



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021**





WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2021 serta prakiraan maju Tahun 2022.
- (3) Program prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 mempedomani RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang telah dipetakan dengan nomenklatur program yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Berita acara hasil pemetaan program RPJMD ke nomenklatur program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021; dan
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 55

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-17
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-47
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-243
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-258
2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019...	II-258
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2019.....	II-288
2.2.3. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019	II-320
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-337
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-337
2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-342
2.3.3. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran dan Program Perangkat Daerah.....	II-361
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi	III-1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	III-5
3.1.3. PDRB per Kapita	III-8
3.1.4. Inflasi	III-9
3.1.5. Ketenagakerjaan	III-12
3.1.6. Kemiskinan	III-14
3.1.7. Ketimpangan Pendapatan.....	III-16
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-17
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-20
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-28
3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-36

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta.....	IV-2
4.2.1. Penyesuaian Target Pertumbuhan Ekonomi	IV-3
4.2.2. Penyesuaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IV-4
4.2.3. Penyesuaian Persentase Penduduk Miskin	IV-4
4.2.4. Prediksi Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021	IV-5
4.3. Tema Pembangunan	IV-6
4.4. Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta.....	IV-7
4.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	IV-8
4.6. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2021	IV-12
4.6.1. Kemiskinan Masyarakat Menurun	IV-12
4.6.2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat.....	IV-13
4.6.3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	IV-14
4.6.4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun.....	IV-15
4.6.5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat.....	IV-16
4.6.6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	IV-17
4.6.7. Kualitas Pendidikan Meningkat.....	IV-18
4.6.8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	IV-19
4.6.9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat	IV-20
4.6.10. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	IV-21
4.6.11. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat.....	IV-22
4.6.12. Infrastruktur Wilayah Meningkat.....	IV-23
4.6.13. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	IV-24
4.7. Sinkronisasi dengan Tematik Pembangunan DIY 2021.....	IV-25
4.7.1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	IV-25
4.7.2. Penurunan Ketimpangan Wilayah	IV-25
4.7.3. Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan.....	IV-26
4.7.4. Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19	IV-26
4.8. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-26
4.9. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.....	IV-28
4.8.1. Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV-28
4.8.2. Rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2021	IV-28
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
 BAB VII PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta.....	II-1
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Air Laut Tahun 2018.....	II-3
Tabel 2.3	Kondisi Klimatologi di Kota Yogyakarta Tahun 2019.....	II-4
Tabel 2.4	Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukan Lahan di Kota Yogyakarta.....	II-5
Tabel 2.5	Jumlah Kejadian Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019.....	II-11
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2015-2019	II-12
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2015-2019	II-13
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-14
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-15
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk yang Mencapai Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-16
Tabel 2.11	Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-17
Tabel 2.12	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-18
Tabel 2.13	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-19
Tabel 2.14	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta (%).....	II-20
Tabel 2.15	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-20
Tabel 2.16	Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2015-2019	II-22
Tabel 2.17	PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-23
Tabel 2.18	PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-26
Tabel 2.19	Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2014-2019.....	II-26
Tabel 2.20	Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-27
Tabel 2.21	Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 ..	II-28
Tabel 2.22	Perbandingan Kondisi IPM Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-28
Tabel 2.23	Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-29
Tabel 2.24	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015	II-30
Tabel 2.25	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 ..	II-32
Tabel 2.26	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-33
Tabel 2.27	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-33
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-34
Tabel 2.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-35

Tabel 2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-35
Tabel 2.31	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-36
Tabel 2.32	Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut BPS di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-37
Tabel 2.33	Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	II-37
Tabel 2.34	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta	II-38
Tabel 2.35	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-38
Tabel 2.36	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-39
Tabel 2.37	Persentase Cadangan Pangan Per 100 Ton Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-41
Tabel 2.38	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-42
Tabel 2.39	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-43
Tabel 2.40	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-43
Tabel 2.41	Produksi Sektor Pertanian Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-44
Tabel 2.42	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-44
Tabel 2.43	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-45
Tabel 2.44	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-45
Tabel 2.45	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-46
Tabel 2.46	Pertumbuhan Industri Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019..	II-47
Tabel 2.47	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-47
Tabel 2.48	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-49
Tabel 2.49	Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-53
Tabel 2.50	Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-54
Tabel 2.51	Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-54
Tabel 2.52	Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-55
Tabel 2.53	Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA dengan Kondisi Baik	II-56
Tabel 2.54	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta.....	II-57
Tabel 2.55	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-57
Tabel 2.56	Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta.....	II-59
Tabel 2.57	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-60
Tabel 2.58	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-60

Tabel 2.59	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta.....	II-61
Tabel 2.60	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-62
Tabel 2.61	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019.....	II-62
Tabel 2.62	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Pendidikan Tahun 2018-2019	II-63
Tabel 2.63	Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-64
Tabel 2.64	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-64
Tabel 2.65	Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-65
Tabel 2.66	Angka Kematian Neonatus di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-66
Tabel 2.67	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-66
Tabel 2.68	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-68
Tabel 2.69	Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-69
Tabel 2.70	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-70
Tabel 2.71	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-70
Tabel 2.72	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-71
Tabel 2.73	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-72
Tabel 2.74	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	II-73
Tabel 2.75	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-73
Tabel 2.76	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-74
Tabel 2.77	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-75
Tabel 2.78	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-75
Tabel 2.79	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-76
Tabel 2.80	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta.....	II-77
Tabel 2.81	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-78
Tabel 2.82	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-78
Tabel 2.83	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS.....	II-79
Tabel 2.84	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS.....	II-80
Tabel 2.85	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta.....	II-81
Tabel 2.86	Penderita Diare yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-81

Tabel 2.87	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-82
Tabel 2.88	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-83
Tabel 2.89	Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-83
Tabel 2.90	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta.....	II-84
Tabel 2.91	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-85
Tabel 2.92	Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-85
Tabel 2.93	Cakupan Pembantu Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-86
Tabel 2.94	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-87
Tabel 2.95	Cakupan Pelayanan Nifas di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-87
Tabel 2.96	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-88
Tabel 2.97	Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-89
Tabel 2.98	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin.....	II-90
Tabel 2.99	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-90
Tabel 2.100	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-91
Tabel 2.101	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS).....	II-92
Tabel 2.102	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam.....	II-92
Tabel 2.103	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2019.....	II-93
Tabel 2.104	<i>Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan</i> Tahun 2018-2019	II-94
Tabel 2.105	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-95
Tabel 2.106	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	II-96
Tabel 2.107	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-97
Tabel 2.108	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-98
Tabel 2.109	Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta.....	II-99
Tabel 2.110	Persentase Tidak Terjadi Genangan (Lebih Dari 30 Cm, Selama 2 Jam) dan Tidak Lebih Dari 2 Kali Setahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-100
Tabel 2.111	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-100
Tabel 2.112	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-101
Tabel 2.113	Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-102

Tabel 2.114	Kapasitas Pemakaman Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2018	II-103
Tabel 2.115	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-103
Tabel 2.116	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-104
Tabel 2.117	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	II-105
Tabel 2.118	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-106
Tabel 2.119	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-107
Tabel 2.120	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-108
Tabel 2.121	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-108
Tabel 2.122	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Tahun 2019.....	II-110
Tabel 2.123	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2018-2019	II-110
Tabel 2.124	Rasio Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-111
Tabel 2.125	Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-111
Tabel 2.126	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-112
Tabel 2.127	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-113
Tabel 2.128	Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-114
Tabel 2.129	Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-115
Tabel 2.130	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta.....	II-116
Tabel 2.131	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun 2019.....	II-117
Tabel 2.132	Cakupan Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-118
Tabel 2.133	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	II-118
Tabel 2.134	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-119
Tabel 2.135	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-120
Tabel 2.136	Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-120
Tabel 2.137	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019.....	II-121
Tabel 2.138	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2019	II-122
Tabel 2.139	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-122

Tabel 2.140	Persentase PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-123
Tabel 2.141	Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-124
Tabel 2.142	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	II-125
Tabel 2.143	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan.....	II-126
Tabel 2.144	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-126
Tabel 2.145	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-127
Tabel 2.146	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-127
Tabel 2.147	Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-128
Tabel 2.148	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun 2019.....	II-129
Tabel 2.149	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Sosial Tahun 2018-2019	II-129
Tabel 2.150	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-130
Tabel 2.151	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-131
Tabel 2.152	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-131
Tabel 2.153	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-132
Tabel 2.154	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2015-2019	II-133
Tabel 2.155	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-133
Tabel 2.156	Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-134
Tabel 2.157	Besaran Pengujian Peralatan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-134
Tabel 2.158	Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-135
Tabel 2.159	Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-135
Tabel 2.160	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2019	II-136
Tabel 2.161	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-136
Tabel 2.162	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-137
Tabel 2.163	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-137
Tabel 2.164	Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-138

Tabel 2.165	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-139
Tabel 2.166	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-140
Tabel 2.167	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-140
Tabel 2.168	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	II-141
Tabel 2.169	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2019	II-141
Tabel 2.170	Ketersediaan Pangan Utama di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-142
Tabel 2.171	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-143
Tabel 2.172	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-143
Tabel 2.173	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta.....	II-144
Tabel 2.174	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-145
Tabel 2.175	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-146
Tabel 2.176	Tersusunnya RPPLH Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-146
Tabel 2.177	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-147
Tabel 2.178	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-147
Tabel 2.179	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-148
Tabel 2.180	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-149
Tabel 2.181	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-151
Tabel 2.182	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-152
Tabel 2.183	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-152
Tabel 2.184	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta.....	II-154
Tabel 2.185	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-154
Tabel 2.186	Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-155
Tabel 2.187	Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).....	II-156

Tabel 2.188	Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-157
Tabel 2.189	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018	II-158
Tabel 2.190	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	II-158
Tabel 2.191	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-160
Tabel 2.192	Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-160
Tabel 2.193	Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-161
Tabel 2.194	Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-162
Tabel 2.195	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-162
Tabel 2.196	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-162
Tabel 2.197	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-163
Tabel 2.198	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-163
Tabel 2.199	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-164
Tabel 2.200	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-165
Tabel 2.201	Persentase LSM Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-166
Tabel 2.202	Jumlah LPMK Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-167
Tabel 2.203	Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-167
Tabel 2.204	Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-168
Tabel 2.205	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-169
Tabel 2.206	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-170
Tabel 2.207	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-171
Tabel 2.208	Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-171
Tabel 2.209	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-172
Tabel 2.210	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-172
Tabel 2.211	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-172
Tabel 2.212	Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-173
Tabel 2.213	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-174
Tabel 2.214	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-175
Tabel 2.215	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-175
Tabel 2.216	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-176

Tabel 2.217	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-177
Tabel 2.218	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-178
Tabel 2.219	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan di Kota Yogyakarta.....	II-179
Tabel 2.220	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	II-179
Tabel 2.221	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Yogyakarta	II-180
Tabel 2.222	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-181
Tabel 2.223	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta	II-182
Tabel 2.224	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-182
Tabel 2.225	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-183
Tabel 2.226	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-184
Tabel 2.227	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-185
Tabel 2.228	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2019.....	II-185
Tabel 2.229	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-186
Tabel 2.230	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-187
Tabel 2.231	Jumlah Terminal Bus, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta.....	II-188
Tabel 2.232	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-188
Tabel 2.233	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-189
Tabel 2.234	Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-190
Tabel 2.235	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-191
Tabel 2.236	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-192
Tabel 2.237	Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Berdasarkan Kelasnya di Kota Yogyakarta	II-193
Tabel 2.238	Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta.....	II-194
Tabel 2.239	Tabel Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2019.....	II-194

Tabel 2.240	Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-195
Tabel 2.241	Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-196
Tabel 2.242	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-197
Tabel 2.243	Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-198
Tabel 2.244	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-199
Tabel 2.245	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019	II-199
Tabel 2.246	Persentase Organisasi Pemuda Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-200
Tabel 2.247	Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-200
Tabel 2.248	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-201
Tabel 2.249	Cakupan Pelatih Bersertifikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-202
Tabel 2.250	Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-202
Tabel 2.251	Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-203
Tabel 2.252	Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-203
Tabel 2.253	Kabupaten Dalam Angka Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-204
Tabel 2.254	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-205
Tabel 2.255	Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-205
Tabel 2.256	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-206
Tabel 2.257	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-207
Tabel 2.258	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-208
Tabel 2.259	Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-209
Tabel 2.260	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Yogyakarta	II-209
Tabel 2.261	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat di Kota Yogyakarta	II-210
Tabel 2.262	Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-211
Tabel 2.263	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-212
Tabel 2.264	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-213
Tabel 2.265	Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta 2015-2019	II-214
Tabel 2.266	PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-214
Tabel 2.267	Indeks Atraksi Pariwisata Tahun 2017	II-215
Tabel 2.268	Indeks Atraksi Pariwisata Tahun 2018-2019	II-216
Tabel 2.269	Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-216
Tabel 2.270	Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-218

Tabel 2.271	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-218
Tabel 2.272	Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-219
Tabel 2.273	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-220
Tabel 2.274	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-220
Tabel 2.275	Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian	II-222
Tabel 2.276	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-222
Tabel 2.277	Persentase Transmigran Swakarsa di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-223
Tabel 2.278	Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-224
Tabel 2.279	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-224
Tabel 2.280	Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-225
Tabel 2.281	Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-226
Tabel 2.282	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA.....	II-227
Tabel 2.283	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.....	II-227
Tabel 2.284	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA.....	II-228
Tabel 2.285	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta.....	II-229
Tabel 2.286	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-230
Tabel 2.287	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-230
Tabel 2.288	Indeks Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2019	II-231
Tabel 2.289	Opini BPK “WTP” di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-231
Tabel 2.290	Persentase SILPA Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-231
Tabel 2.291	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-232
Tabel 2.292	Persentase Belanja Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-233
Tabel 2.293	Persentase Belanja Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-233
Tabel 2.294	Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-234
Tabel 2.295	Penetapan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-234
Tabel 2.296	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Keuangan Tahun 2018-2019	II-234
Tabel 2.297	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Yogyakarta.....	II-235
Tabel 2.298	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kota Yogyakarta.....	II-236
Tabel 2.299	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural.....	II-237
Tabel 2.300	Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-237

Tabel 2.301	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-238
Tabel 2.302	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta	II-238
Tabel 2.303	Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-241
Tabel 2.304	Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-241
Tabel 2.305	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-242
Tabel 2.306	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD	II-242
Tabel 2.307	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-243
Tabel 2.308	Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2019	II-243
Tabel 2.309	Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-244
Tabel 2.310	Persentase Konsumsi Non pangan Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-244
Tabel 2.311	Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-245
Tabel 2.312	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-246
Tabel 2.313	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-247
Tabel 2.314	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta.....	II-247
Tabel 2.315	Jenis Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta	II-248
Tabel 2.316	Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha	II-249
Tabel 2.317	Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan	II-251
Tabel 2.318	Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Skala Usaha.....	II-252
Tabel 2.319	Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan	II-252
Tabel 2.320	Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha	II-253
Tabel 2.321	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-254
Tabel 2.322	Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-254
Tabel 2.323	Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta	II-255
Tabel 2.324	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-256
Tabel 2.325	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-257
Tabel 2.326	Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-258
Tabel 2.327	Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	II-258
Tabel 2.328	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta Tahun 2019	II-264

Tabel 2.329	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019	II-277
Tabel 2.330	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta Tahun 2019	II-278
Tabel 2.331	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Yogyakarta	II-288
Tabel 2.332	Target dan Realisasi Fisik Tahun 2018-2019	II-320
Tabel 2.333	Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2018-2019	II-321
Tabel 2.334	Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta	II-323
Tabel 2.335	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-348
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	III-2
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-19
Tabel 3.3	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019	III-22
Tabel 3.4	Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019	III-24
Tabel 3.5	Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019	III-27
Tabel 3.6	Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019	III-30
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-35
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-37
Tabel 3.9	Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2021	III-38
Tabel 4.1	Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	IV-1
Tabel 4.2	Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta	IV-2
Tabel 4.3	Penyesuaian Sasaran dan Target RKP 2021	IV-3
Tabel 4.4	Asumsi Makro dan Penyesuaian Target RKPD DIY 2020-2021	IV-3
Tabel 4.5	Penyesuaian Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta	IV-6
Tabel 4.6	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2021	IV-12
Tabel 4.7	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat	IV-13
Tabel 4.8	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	IV-13
Tabel 4.9	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	IV-14
Tabel 4.10	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat	IV-15
Tabel 4.11	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	IV-16
Tabel 4.12	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	IV-17
Tabel 4.13	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	IV-18
Tabel 4.14	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat	IV-19

Tabel 4.15	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya.....	IV-20
Tabel 4.16	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	IV-21
Tabel 4.17	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	IV-22
Tabel 4.18	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah.....	IV-23
Tabel 4.19	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-24
Tabel 4.20	Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2021	IV-26
Tabel 5.1	Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021	V-3
Tabel 5.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-10
Tabel 5.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-26
Tabel 5.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-55
Tabel 5.5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-59
Tabel 5.6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-67
Tabel 5.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-75
Tabel 5.8	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-82
Tabel 5.9	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-89
Tabel 5.10	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-95
Tabel 5.11	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-111
Tabel 5.12	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-128
Tabel 5.13	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-138
Tabel 5.14	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-146
Tabel 5.15	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Tegalarjo Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-153
Tabel 5.16	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-177
Tabel 5.17	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-187
Tabel 5.18	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-200
Tabel 5.19	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-217

Tabel 5.20	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-232
Tabel 5.21	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-248
Tabel 5.22	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-262
Tabel 5.23	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-275
Tabel 5.24	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-293
Tabel 5.25	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-308
Tabel 5.26	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-318
Tabel 5.27	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-330
Tabel 5.28	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-347
Tabel 5.29	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-364
Tabel 5.30	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-372
Tabel 5.31	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-381
Tabel 5.32	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-391
Tabel 5.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-398
Tabel 5.34	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-404
Tabel 5.35	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-413
Tabel 5.36	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-426
Tabel 5.37	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-433
Tabel 5.38	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-442
Tabel 5.39	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-452
Tabel 5.40	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-458
Tabel 5.41	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-463
Tabel 5.42	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-469
Tabel 5.43	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-475
Tabel 5.44	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-479

Tabel 5.45	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-484
Tabel 5.46	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-489
Tabel 5.47	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-497
Tabel 5.48	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-506
Tabel 5.49	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021	V-514
Tabel 5.50	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-525
Tabel 5.51	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	V-530
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Target Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja dan Target Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Yogyakarta	I-5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Yogyakarta.....	II-2
Gambar 2.2	Grafik Persentase Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2019	II-5
Gambar 2.3	Grafik Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Per Kecamatan Tahun 2019	II-13
Gambar 2.4	Grafik Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2019.....	II-16
Gambar 2.5	Grafik Distribusi Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2019	II-17
Gambar 2.6	Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018	II-24
Gambar 2.7	Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta	II-25
Gambar 2.8	Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-30
Gambar 2.9	Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-31
Gambar 2.10	Grafik Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	II-40
Gambar 2.11	Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 ..	II-48
Gambar 2.12	Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 ..	II-50
Gambar 2.13	Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-52
Gambar 2.14	Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	II-58
Gambar 2.15	Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha.....	II-250
Gambar 2.16	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Tahun 2018-2019	II-320
Gambar 2.17	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2018-2019	II-321
Gambar 2.18	Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2019	II-322
Gambar 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-2
Gambar 3.2	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021.....	III-4
Gambar 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021.....	III-5
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-6
Gambar 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	III-6
Gambar 3.6	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021	III-8
Gambar 3.7	PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021	III-9
Gambar 3.8	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-10
Gambar 3.9	Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (yoy) Kota Yogyakarta Bulan Januari-Mei Tahun 2019 dan 2020	III-11

Gambar 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-12
Gambar 3.11	Persentase Tenaga Kerja Per Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2019	III-13
Gambar 3.12	Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-14
Gambar 3.13	Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018.....	III-16
Gambar 4.1	Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta.....	IV-11
Gambar 4.2	Kerangka Logis untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat	IV-12
Gambar 4.3	Kerangka Logis untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	IV-13
Gambar 4.4	Kerangka Logis untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	IV-14
Gambar 4.5	Kerangka Logis untuk Penurunan Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk.....	IV-15
Gambar 4.6	Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-16
Gambar 4.7	Kerangka Logis untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	IV-17
Gambar 4.8	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	IV-18
Gambar 4.9	Kerangka Logis untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat	IV-19
Gambar 4.10	Kerangka Logis untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	IV-20
Gambar 4.11	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	IV-21
Gambar 4.12	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup..	IV-22
Gambar 4.13	Kerangka Logis untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah	IV-23
Gambar 4.14	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda tim kerja penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 - a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
 - d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 - e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Sistematika penyajian Rancangan Awal RKPD adalah:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g. Penutup

Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam penyempurnaannya sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD
Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyesuaian tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan DIY maupun Nasional.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Yogyakarta merupakan rangkaian proses yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan

kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota dilaksanakan setelah RKP dan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan pada adanya pandemik Covid-19 yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Sebagai Kota Pariwisata, adanya kebijakan *physical distancing* dan mengurangi aktivitas di luar rumah sangat mempengaruhi kunjungan wisata di Kota Yogyakarta. Penurunan kunjungan wisata ini akan berdampak langsung pada sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata serta sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder pariwisata. Selain kedua sektor tersebut, pandemik Covid-19 juga akan menurunkan sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Jasa Perusahaan. Di sisi lain, peningkatan justru terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 berdasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

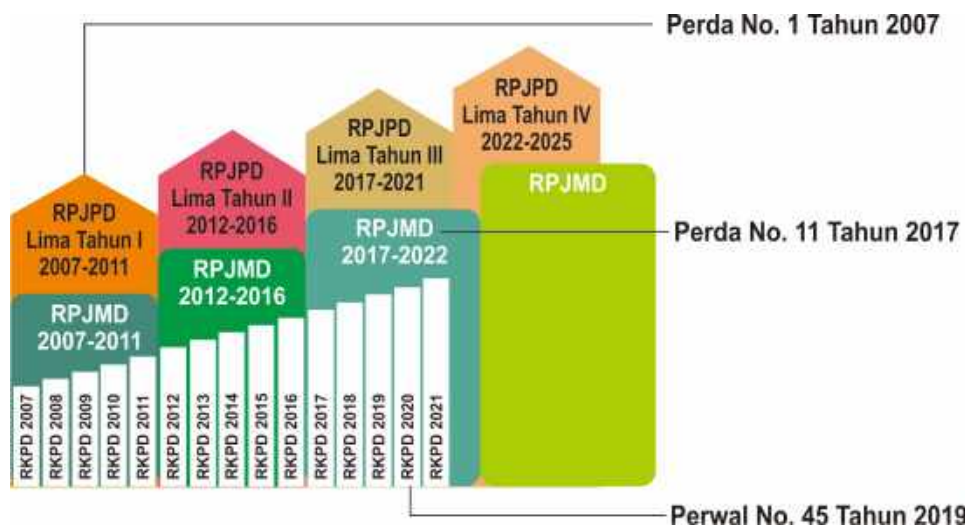
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); dan
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Yogyakarta Tahun 2010-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan RKPD DIY Tahun 2021. Untuk itu perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan pembangunan nasional dan DIY, dalam hal ini mengenai keterkaitan dan keselarasan tema dan prioritas pembangunan, akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV.



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Yogyakarta

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2021 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
3. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
4. Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah kurang lebih 3.250 Ha atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

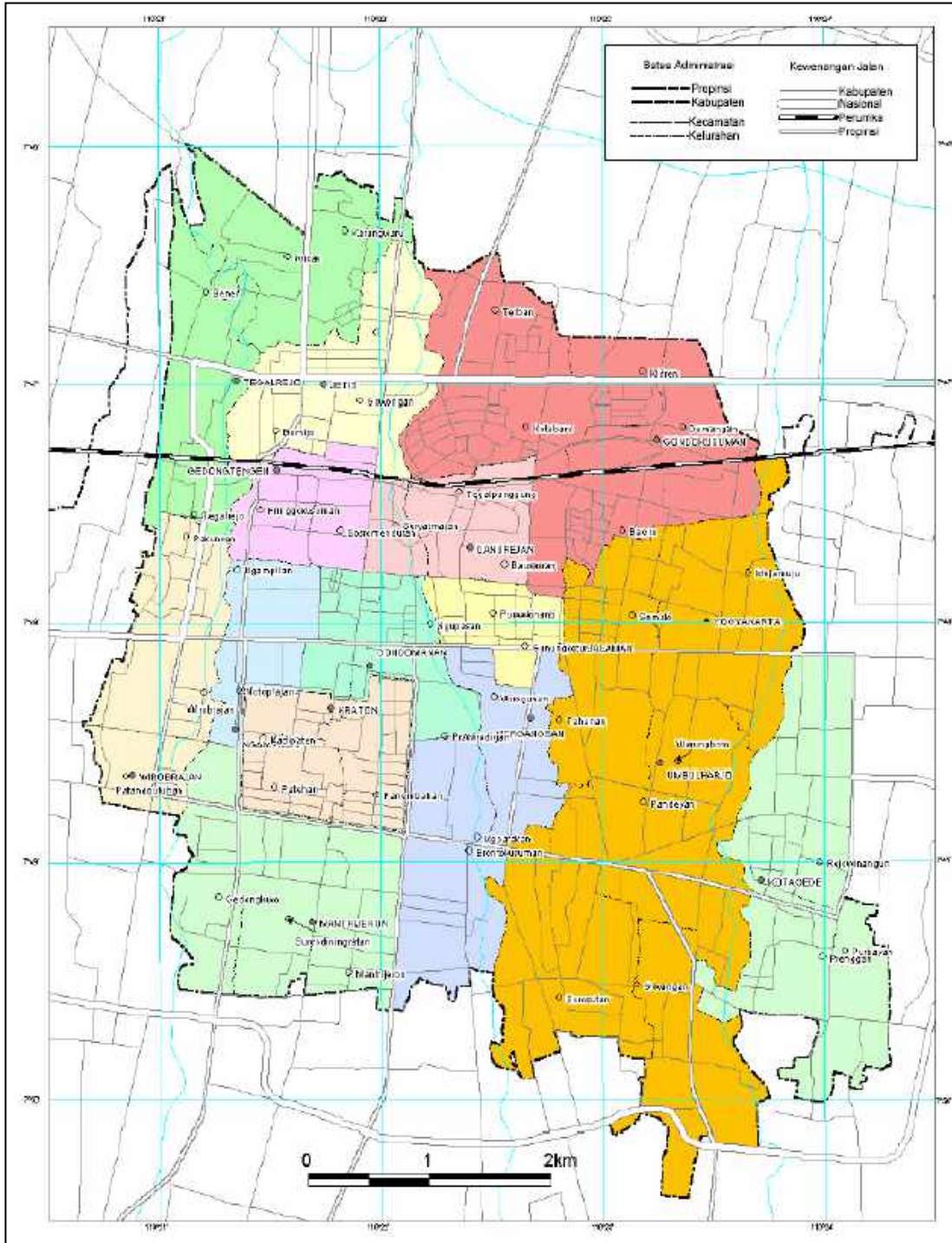
Wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.535 Rukun Tetangga (RT). Jumlah RT ini mengalami perubahan di tahun 2019 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 404 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335 Tahun 2018 tentang Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta Periode 2018-2021. Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah Kelurahan	Presentase Luas (%)
Mantrijeron	261	3	8,03
Kraton	140	3	4,31
Mergangsan	231	3	7,11
Umbulharjo	812	7	24,98
Kotagede	307	3	9,45
Gondokusuman	399	5	12,28
Danurejan	110	3	3,38
Pakualaman	63	2	1,94
Gondomanan	112	2	3,45
Ngampilan	82	2	2,52
Wirobrajan	176	3	5,42
Gedongtengen	96	2	2,95
Jetis	170	3	5,23
Tegalrejo	291	4	8,95
Jumlah	3.250	45	100,00

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2020

Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan luas wilayah sebesar 812 ha atau 24,98% dari luasan Kota Yogyakarta dan memiliki jumlah kelurahan paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak tujuh kelurahan. Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Pakualaman, yakni seluas 63 ha atau sebesar 1,94% dari luasan Kota Yogyakarta.



Sumber: Atlas Triple A Kota Yogyakarta

Gambar 2.1 **Peta Administrasi Kota Yogyakarta**

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"- 07°49'26" Lintang Selatan. Secara geografis Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

3. Topografi

Ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wilayah dengan ketinggian <100 m dan wilayah dengan ketinggian 100-199 m dpl (dari permukaan laut). Diketahui bahwa wilayah Kota Yogyakarta dengan ketinggian 100-199 mdpl cenderung berada di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan wilayah dengan ketinggian <100 mdpl cenderung berada di kecamatan-kecamatan yang berada di bagian selatan Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan topografi Kota Yogyakarta yang semakin rendah dari utara ke selatan.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Air Laut Tahun 2018

No.	Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
		< 100	100 - 199	> 200	
1.	Mantrijeron	261	0	0	261
2.	Kraton	140	0	0	140
3.	Mergangsan	202	29	0	231
4.	Umbulharjo	607	206	0	813
5.	Kotagede	302	5	0	307
6.	Gondokusuman	0	399	0	399
7.	Danurejan	0	110	0	110
8.	Pakualaman	0	63	0	63
9.	Gondomanan	42	70	0	112
10.	Ngampilan	31	51	0	82
11.	Wirobrajan	72	103	0	175
12.	Gedongtengen	0	96	0	96
13.	Jetis	0	170	0	170
14.	Tegalrejo	0	291	0	291
Jumlah (Ha)		1657	1593	0	3.250
Persentase		50,98	49,02	0	100

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2019

4. Geologi

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng Gunung Merapi, sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Tanah regosol merupakan tanah hasil erupsi gunung berapi yang cenderung subur, tekstur tanahnya kasar, berbutir kasar, peka terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya unsur hara, cenderung gembur, dan mudah tererosi. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Kondisi tanah Kota Yogyakarta terbilang cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian.

Formasi geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen *old andesite* (batuan sedimen andesit tua). Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yakni Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota, Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota, dan Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta.

5. Hidrologi

Wilayah Kota Yogyakarta adalah bagian dari dataran kaki fluvio vulkanik Merapi yang mempunyai potensi sumber daya air tanah dan air permukaan yang cukup besar. Besarnya potensi air permukaan disebabkan oleh adanya tiga daerah aliran sungai (DAS) yang membelah Kota Yogyakarta dari utara ke selatan, yaitu DAS Winongo, Code, dan Gajah Wong. Sumber air permukaan juga terdapat di lereng Gunung Merapi, yaitu berupa sumber-sumber mata air yang kini sudah dimanfaatkan untuk pengadaan air bersih bagi Kota Yogyakarta oleh PDAM Tirtamarta, yaitu sumber Mata Air Umbul Wadon dan Kali Kuning.

Tangkapan hujan (*recharge area*) bagi air tanah di Kota Yogyakarta berada di lereng Gunung Merapi dan mengalir lewat akuifer lereng Merapi hingga Graben Bantul. Kedalaman air tanah antara 0,5-20 meter, semakin ke selatan muka air tanah semakin dangkal. Pemanfaatan air tanah oleh penduduk Kota Yogyakarta secara mandiri, sebagian besar berupa sumur dangkal.

6. Klimatologi

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2019 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebanyak 648,4 mm³. Hari hujan terbanyak terjadi juga pada bulan Januari dan Maret, yakni sebanyak 25 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, terendah terjadi pada bulan September sebesar 77 persen. Sedangkan rata-rata tekanan udara pada tahun 2019 sebesar 996,62 mb dan suhu udara rata-rata 27,13°C.

Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi di Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
1	Januari	23,5-31,8	88	995,47	382,00	25
2	Februari	23,6-31,8	87	996,73	237,60	20
3	Maret	23,4-31,1	88	995,81	648,40	25
4	April	23,9-32,4	85	995,08	33,40	4
5	Mei	22,9-32,8	82	996,33	-	-
6	Juni	20,7-30,8	83	997,03	1	1
7	Juli	19,9-30,6	81	997,06	-	-
8	Agustus	20,3-30,6	80	998,23	-	-
9	September	21,1-31,9	77	998,67	-	-
10	Oktober	23,0-32,5	78	996,96	-	-
11	November	24,0-31,3	84	996,51	275,40	17
12	Desember	24,2-33,0	83	995,45	214,60	19

Sumber: BMKG Stasun Geofisika Kelas I Yogyakarta, 2019

7. Penggunaan Lahan

Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pada sektor pertanian (sektor primer), namun dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (sektor tersier). Dari

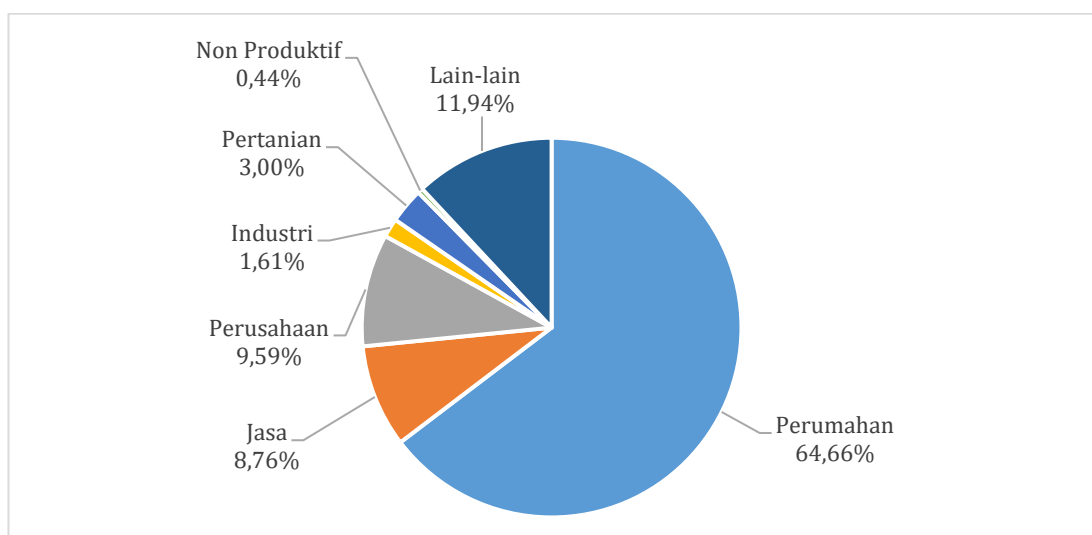
pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh peruntukkan perumahan dengan luasan yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 dengan kecenderungan meningkat. Jenis peruntukkan jasa mengalami peningkatan luasan meskipun peningkatannya tidak signifikan. Berikut merupakan tabel luasan penggunaan lahan berdasarkan status peruntukkan lahan di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.4 Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukkan Lahan di Kota Yogyakarta

Jenis Penggunaan Lahan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perumahan	Ha	2.099,83	2.099,93	2.101,19	2.101,2443	2.101,5661
Jasa	Ha	281,45	281,33	281,59	281,8367	284,5767
Perusahaan	Ha	308,1	307,99	311,06	311,5396	311,6901
Industri	Ha	52,325	52,23	52,23	52,2337	52,2337
Pertanian	Ha	102,7	102,77	101,1	100,4514	97,4808
Non Produktif	Ha	17,55	17,59	14,67	14,5340	14,2923
Lain-lain	Ha	388,05	388,16	388,16	388,1603	388,1603
Jumlah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

Sumber: BPN Kota Yogyakarta 2020

Selanjutnya, karena fungsi yang dimiliki Kota Yogyakarta bukan sebagai sektor primer yang mewadahi sektor produksi seperti pertanian, maka peruntukkan lahan pertanian dan non produktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki luasan yang cenderung menurun, penurunan ini dipengaruhi oleh beralihnya lahan pertanian untuk jasa dan perumahan.



Sumber: BPN Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.2 Grafik Persentase Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2019

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang berlaku untuk tahun 2010-2029 antara lain:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - a. Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi:
 - 1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan; dan
 - 2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.
 - b. Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi:
 - 1) Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan Sistem Transportasi
 - a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 1) Jaringan arteri primer
 - a) Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yang terdiri atas:
 - i. Jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan.
 - 2) Jaringan jalan arteri sekunder
 - a) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas:
 - i. Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo; dan
 - ii. Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.
 - b) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yang terdiri atas:
 - i. Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.
 3. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya
 - a. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta; dan
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

- b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1) Rehabilitasi jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
 - 2) Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
 - 3) Jaringan pelayanan *feeder*, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta; dan
 - 4) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air (SDA), meliputi: Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- c. Jaringan persampahan, meliputi:
 - 1) Penambahan lahan TPA Piyungan, yang berlokasi di Kabupaten Bantul; dan
 - 2) Pengadaan sarana truk sampah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- d. Air limbah, meliputi:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
 - 2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta; dan
 - 3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
- e. Air Minum, melalui:
 - 1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
 - 2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta; dan
 - 3) Pembelian truk tangki air minum.

C. Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari faktor geografis, letak dan kondisi geomorfologis Kota Yogyakarta memberikan berbagai keuntungan, sekaligus juga menimbulkan potensi masalah terkait dengan kerawanan terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi. Ancaman bencana yang mungkin terjadi akibat kondisi geografis Kota Yogyakarta diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kerawanan Bencana Letusan Gunung Merapi

Kedekatan Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi membawa dampak positif pada kesuburan tanah dan penyediaan sumber daya air, baik air permukaan yang

mengalir di tiga aliran sungai yang berhulu di lereng Merapi maupun sebagai area tangkapan bagi air tanah. Namun di sisi lain terdapat juga ancaman bahaya letusan gunung, mengingat Gunung Merapi merupakan gunung api aktif, bahkan dikatakan salah satu yang teraktif di dunia karena periode letusannya relatif pendek, yaitu 3-7 tahun.

Kategori bahaya letusan gunung api terdiri atas bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk saat letusan berlangsung, misalnya awan panas, udara panas (*surger*) sebagai akibat sampingan awan panas, lontaran material berukuran blok (bom) hingga kerikil. Terkait bahaya primer ini, sebagian utara Kota Yogyakarta termasuk Kawasan Rawan Bencana I Merapi juga dapat terkena ancaman perluasan dari awan panas tergantung oleh faktor volume guguran dan arah angin pada saat itu. Sedangkan bahaya sekunder terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada purna letusan, misalnya lahar, kerusakan lahan pertanian/perkebunan atau rumah. Banjir lahar dingin sering menjadi ancaman serius bagi Kota Yogyakarta pasca letusan Merapi. Tumpukan material letusan akan terbawa oleh arus sungai ketika hujan mengguyur lereng Merapi.

Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 terjadi erupsi secara luas pada Gunung Merapi. Kekuatan erupsi Merapi yang terjadi 3 (tiga) kali erupsi yang pernah terjadi sebelumnya. Kota Yogyakarta mempunyai dampak yang terjadi secara langsung dari Gunung Merapi. Dampak tersebut berupa hujan abu dan banjir lahar yang mengalir pada Sungai Code. Selain dampak erupsi Merapi, Kota Yogyakarta juga mengalami dampak erupsi Gunung Kelud. Gunung Kelud terletak di Jawa Timur yang berjarak 235 km dari Kota Yogyakarta. Pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014, Gunung Kelud mengalami letusan dan memberi dampak hujan abu. Ketebalan abu vulkanik sebesar 1-3 cm.

2. Kerawanan Bencana Gempa

Terdapat dua jenis ancaman bencana gempa bumi yang ada di kota Yogyakarta. Ancaman yang pertama adalah gempa vulkanik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh aktifitas vulkanik. Potensi gempa vulkanik ada ketika terjadi letusan Gunung Merapi. Sedangkan yang kedua adalah ancaman gempa tektonik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi. Kota Yogyakarta terletak di daerah rawan gempa tektonik karena letaknya berdekatan dengan pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia di Samudra Hindia. Tumbukan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasi juga menimbulkan sesar aktif yang disebut dengan sesar Opak. Letak sesar Opak yang berada sangat dekat dengan permukiman warga yaitu sebelah selatan dan timur Kota Yogyakarta. Keberadaan sesar ini mengakibatkan potensi kerusakan akibat gempa yang terjadi menjadi lebih besar. Hal ini terlihat ketika

kejadian gempa pada Mei 2006 silam. Kekuatan gempa 5,8-6,2 SR mampu menimbulkan kerusakan yang sedemikian besar terutama di kecamatan-kecamatan bagian selatan Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan sesar Opak tersebut.

3. Kerawanan Bencana Tanah Longsor

Wilayah yang rawan terjadi tanah longsor di Kota Yogyakarta berada di wilayah bantaran tiga sungai besar yang mengalir di Kota Yogyakarta. Beban penggunaan lahan daerah bantaran sungai yang merupakan pemukiman padat dengan kondisi kemiringan tanah yang curam di beberapa lokasi menjadi pemicu kerawanan tersebut. Ancaman menjadi semakin besar ketika terjadi curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu perlu diwaspadai ancaman tanah longsor ini ketika puncak curah hujan bulan November-Maret.

4. Kerawanan Bencana Banjir

Meski potensinya kecil, di Kota Yogyakarta juga berpeluang terjadi banjir. Hal tersebut mengingat Kota Yogyakarta dialiri tiga sungai besar yaitu (1) Sungai Code, (2) Sungai Gajah Wong, dan (3) Sungai Winongo yang mengalir di tengah kota, hal tersebut menjadi kerentanan yang cukup tinggi yang terjadinya genangan air pada puncak curah hujan pada bulan November-Maret. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terdapat 14,42 Ha luasan yang tergenang di Kota Yogyakarta pada tahun 2019.

Bantaran Sungai Code dan Gajah Wong yang merupakan wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede dan sebagian Kecamatan Mergangsan serta Kecamatan Mantrijeron dikategorikan sebagai Zona Rawan Genangan tingkat I (tinggi). Bantaran Sungai Winongo yang mengalir wilayah Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan dan sebagian Kecamatan Wirobrajan dan Mantrijeron, masuk dalam kategori Zona Rawan Genangan tingkat II (sedang). Sedangkan bantaran hulu Sungai Gajah Wong masuk pada Zona Rawan Genangan tingkat III (rendah) pada sebagian wilayah Kecamatan Muja-muju dan Gondokusuman.

Penyebab genangan air juga bisa karena fungsi saluran drainase sebagai pembuangan air hujan yang tidak lancar, juga disebabkan karena sumbatan sampah limbah masyarakat. Kadang fungsi drainase oleh masyarakat dijadikan fungsi ganda sebagai pembuangan air limbah rumah tangga, sehingga daya tampung saluran drainase tersebut tidak mencukupi volume air akibat hujan.

5. Kerawanan Bencana Banjir Lahar Dingin

Banjir lahar dingin merupakan sekumpulan lahar yang dimuntahkan oleh gunung berapi dan sampai ke permukaan yang lebih rendah dengan bantuan atau

dorongan dari air hujan. Lahar biasanya akan berada di sekitar gunung berapi yang tengah mengalami erupsi. Lahar yang berada di sekitar gunung berapi tersebut akan terbawa turun melalui lerang gunung ketika hujan turun dengan derasnya. Lahar yang dibawa turun oleh air hujan ini dapat mempunyai suhu yang dingin ataupun masih panas. Akibatnya, air hujan yang membawa serta material- material vulkanik dari lahar ini akan menerjang lahan yang berada di bawahnya ataupun pemukiman penduduk. Hal ini akan berakibat banyaknya kerusakan ataupun dampak- dampak lain yang akan dihasilkan oleh banjir lahar dingin ini.

Kawasan rawan banjir lahar dingin berada di sekitar Sungai Code, yang meliputi beberapa area berikut, (1) Kecamatan Tegalsrejo, meliputi Kelurahan Karangwaru (Kampung Petinggen); (2) Kecamatan Jetis, meliputi: Kelurahan Cokrodiningratan (Kampung Jetisharjo dan Kampung Cokrokusuman) dan Kelurahan Gowongan (Kampung Jogoyudan); (3) Kecamatan Gondokusuman, meliputi Kelurahan Kotabaru (Kampung Kotabaru) dan Kelurahan Terban (Kampung Terban); (4) Kecamatan Danurejan, meliputi: Kelurahan Suryatmajan (Kampung Ledok Macanan, Kampung Gemblakan Atas, Kampung Gemblakan Bawah dan Kampung Cokrodirjan) dan Kelurahan Tegalpanggung (Kampung Ledok Tukangan, Kampung Tegalpanggung dan Kampung Juminahan); (5) Kecamatan Gondomanan, meliputi: Kelurahan Ngupasan (Kampung Ratmakan) dan Kelurahan Prawirodirjan (Kampung Sayidan dan Kampung Prawirodirjan Ledok); (6) Kecamatan Pakualaman, meliputi Kelurahan Purwokinanti (Kampung Jagalan Ledoksari dan Kampung Jagalan Beji) ; (7) Kecamatan Mergangsan, meliputi: Kelurahan Keparakan (Kampung Keparakan Lor dan Kampung Keparakan Kidul), Kelurahan Wirogunan (Kampung Bintaran, Kampung Surokarsan, Kampung Mergangsan Lor dan Kampung Mergangsan Kidul) dan Kelurahan Brontokusuman (Kampung Karanganyar dan Kampung Lowanu); (8) Kecamatan Umbulharjo, meliputi: Kelurahan Sorosutan (Kampung Sorosutan Mulyorejo).

6. Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Yogyakarta antara lain pohon tumbang, angin kencang dan longsor talud. Pada tahun 2019 terjadi angin kencang dan pohon tumbang sebanyak 71 kejadian, sedangkan longsor talud sebanyak 9 kejadian.

7. Rawan Bencana Kebakaran

Rawan kebakaran merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya api yang tidak diinginkan dan dapat merugikan berupa materi maupun nyawa sekaligus. Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan. Dengan kata lain, beberapa indikator wilayah yang dianggap paling rawan kebakaran adalah kepadatan penduduk, akses jalan yang sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran, hingga wilayah bantaran sungai.

Kawasan rawan kebakaran di Kota Yogyakarta meliputi beberapa area berikut (1) kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi, meliputi Kecamatan Jetis, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondomanan, dan Kecamatan Danurejan; (2) kawasan di sepanjang jalan arteri yang menjadi pusat-pusat perdagangan dan jasa.

Jumlah kejadian bencana di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan 2019 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	Jenis Bencana	2017	2018	2019
1	Letusan Gunung Api	-	-	-
2	Gempa	1	-	-
3	Tanah Longsor	-	-	-
4	Banjir	3	7	1
5	Banjir lahar dingin	-	-	-
6	Cuaca ekstrim	19	58	80
7	Kebakaran	71	63	64

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020; Dinas Kebakaran, 2020

2.1.1.2. Aspek Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

A. Struktur Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai

potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tegalrejo	36.783	36.693	36.982	37.194	37.164
2	Jetis	27.604	27.326	27.316	27.312	27.132
3	Gondokusuman	41.931	42.067	42.287	42.516	42.818
4	Danurejan	21.477	21.226	21.180	21.233	21.335
5	Gedongtengen	20.645	20.522	20.225	20.117	19.891
6	Ngampilan	18.760	18.710	18.617	18.591	18.550
7	Wirobrajan	27.778	27.925	27.916	27.903	27.868
8	Mantrijeron	35.031	35.324	35.343	35.475	35.433
9	Kraton	22.124	21.985	22.048	22.046	21.831
10	Gondomanan	15.148	15.089	15.049	15.074	14.982
11	Pakualaman	10.686	10.738	10.786	10.786	10.810
12	Mergangsan	31.974	31.948	32.102	32.112	32.043
13	Umbulharjo	67.893	68.403	69.139	69.630	69.887
14	Kotagede	33.052	33.326	33.702	33.972	34.311
Jumlah		410.886	411.282	412.692	413.961	414.055

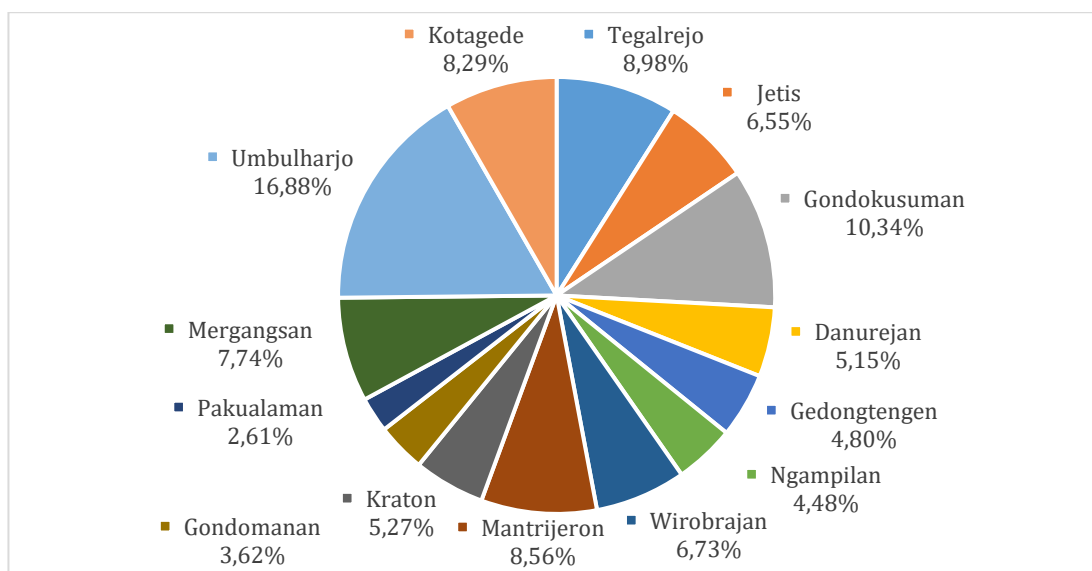
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Analisis mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan dan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting untuk merumuskan rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang mengingat pentingnya faktor penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan. Tanpa analisis mengenai kependudukan, rencana yang dihasilkan akan menjadi rencana yang tidak valid dan akan mengalami kesulitan untuk diimplementasikan serta tidak terarah dengan baik.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, jumlah penduduk Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini dipengaruhi adanya peristiwa kelahiran, kedatangan penduduk, pendataan penduduk rentan (penduduk yang sama sekali tidak mempunyai data administrasi kependudukan).

2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Selain menjadi kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo dari tahun ke tahun juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 69.887 jiwa pada tahun 2019. Berkebalikan dengan Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Pakualaman selain menjadi wilayah paling kecil di Kota Yogyakarta, juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah sebanyak 10.810 jiwa.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020, Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.3 Grafik Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Per Kecamatan Tahun 2019

Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Pada tahun 2019, kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Yogyakarta adalah Kecamatan Ngampilan dengan besaran 22.622 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan penduduk terlentang adalah Kecamatan Umbulharjo dengan angka kepadatan sebesar 8.607 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang terus meningkat, hal ini dikarenakan luas wilayah yang tetap, tapi jumlah penduduk bertambah dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tegalrejo	12.640	12.609	12.709	12.781	12.771
2	Jetis	16.238	16.074	16.068	16.066	15.960
3	Gondokusuman	10.509	10.543	10.598	10.656	10.731
4	Danurejan	19.525	19.296	19.255	19.303	19.395
5	Gedongtengen	21.505	21.377	21.068	20.955	20.720
6	Ngampilan	22.878	22.817	22.704	22.672	22.622
7	Wirobrajan	15.783	15.866	15.861	15.854	15.834
8	Mantrijeron	13.422	13.534	13.541	13.592	13.576
9	Kraton	15.803	15.704	15.749	15.747	15.594

No	Kecamatan	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)				
		2015	2016	2017	2018	2019
10	Gondomanan	13.525	13.472	13.437	13.459	13.377
11	Pakualaman	16.962	17.044	17.121	17.121	17.159
12	Mergangsan	13.842	13.830	13.897	13.901	13.871
13	Umbulharjo	8.361	8.424	8.515	8.575	8.607
14	Kotagede	10.766	10.855	10.978	11.066	11.176
Kota Yogyakarta		12.643	12.655	12.698	12.737	12.740

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta tidak selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut secara langsung berpengaruh pula terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	-0,74	0,10	0,34	0,31	0,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Terdapat penurunan jumlah penduduk pada tahun 2014 ke tahun 2015, yakni 413.936 jiwa di tahun 2014 turun menjadi 410.886 jiwa di tahun 2015, sehingga menjadikan laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta menjadi -0,74%. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan karena adanya kegiatan pemutakhiran dan penonaktifan data penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik ataupun teridentifikasi ganda (memiliki data kependudukan di kabupaten atau kota lain).

Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2018, perkembangan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga laju pertumbuhan penduduk yang ditunjukkan dalam kurun waktu yang sama juga menunjukkan peningkatan. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,02, penurunan berdasarkan laporan/peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, masuk keluarnya penduduk). Besaran laju pertumbuhan penduduk yang berada pada kategori $r > 0$ yang menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun.

4. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan

gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

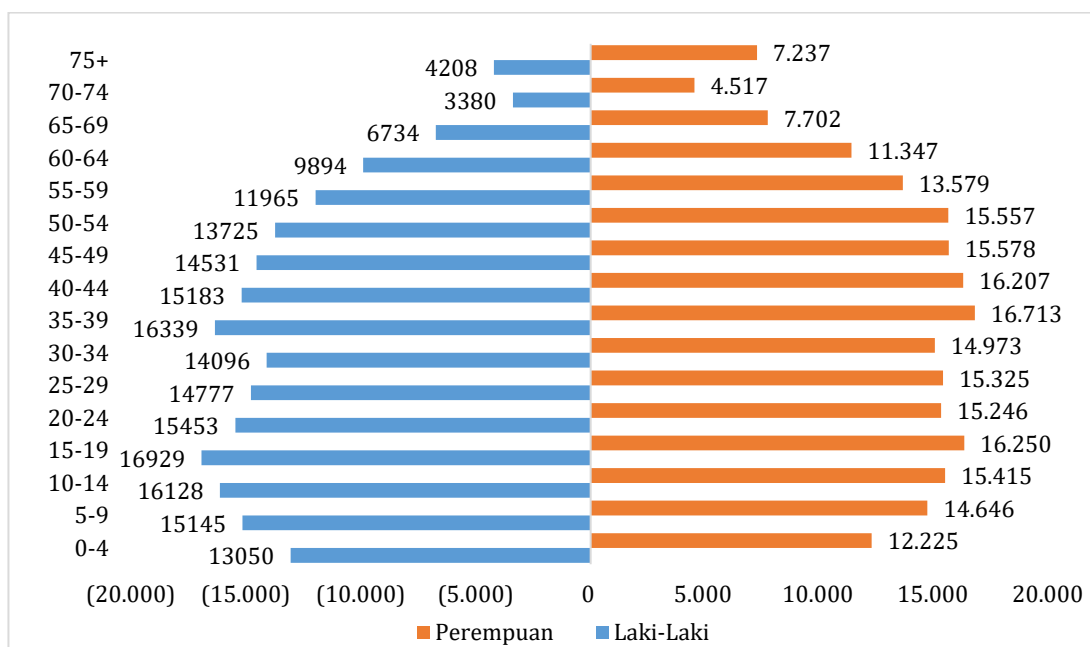
No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2015	200.478	210.408	410.886	95,28
2	2016	200.595	210.687	411.282	95,20
3	2017	201.296	211.396	412.692	95,22
4	2018	201.972	211.989	413.961	95,27
5	2019	201.538	212.517	414.055	94,83

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2018, besaran nilai sex ratio di Kota Yogyakarta cenderung sama, yakni menunjukkan kisaran angka 95, namun pada tahun 2019 menunjukkan kisaran angka 94, yang artinya setiap 100 orang perempuan di Kota Yogyakarta terdapat 94 orang laki-laki. Hal ini dipengaruhi penduduk dengan jenis kelamin perempuan meningkat, sehingga mempengaruhi sex rasionya.

B. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Yogyakarta memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda atau produktif. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 35-39 tahun dengan jumlah total sebesar 33.052 jiwa. Penduduk pada kelompok umur 35-39 tersebut memiliki komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 16.339 jiwa dan perempuan sebanyak 16.713 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 7.897 jiwa.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

Gambar 2.4 Grafik Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2019

C. Struktur Menurut Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut status pendidikan. Data pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut pendidikan di Kota Yogyakarta masih didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SLTA/ sederajat. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk yang Mencapai Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tidak/Blm Sekolah	Jiwa	66.884	51.234	54.330	57.773	59.876
2	Belum Tamat SD/Sederajat	Jiwa	44.523	45.377	45.095	44.102	43.447
3	Tamat SD/Sederajat	Jiwa	40.021	43.998	43.470	42.545	41.033
4	SLTP/Sederajat	Jiwa	53.819	53.028	52.621	52.364	52.218
5	SLTA/Sederajat	Jiwa	119.969	125.481	125.073	124.745	124.678
6	Diploma I/II	Jiwa	2.988	3.402	3.354	3.300	3.188
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	Jiwa	19.467	20.333	20.144	20.044	19.885
8	Diploma IV/Strata I	Jiwa	57.350	61.150	61.203	61.551	62.037
9	Strata-II	Jiwa	5.340	6.493	6.611	6.733	6.887
10	Strata-III	Jiwa	520	785	791	804	806

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

D. Penduduk Menurut Agama

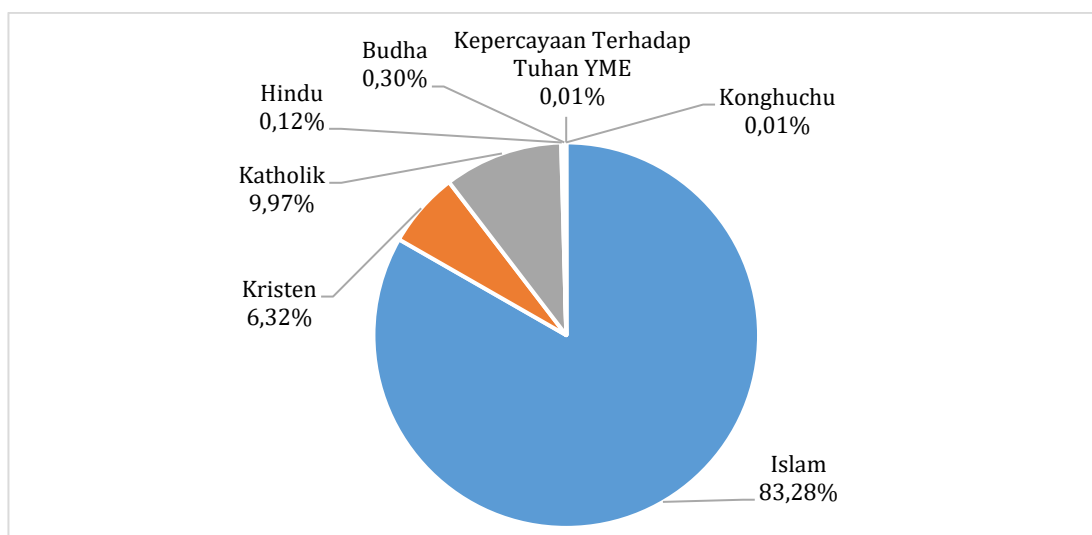
Struktur penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

Tabel 2.11 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Islam	Jiwa	339.694	340.695	342.361	343.824	344.817
2	Kristen	Jiwa	26.572	26.471	26.402	26.399	26.180
3	Katholik	Jiwa	42.737	42.252	42.102	41.929	41.299
4	Hindu	Jiwa	541	520	518	501	478
5	Budha	Jiwa	1.298	1.299	1.257	1.247	1.222
6	Konghuchu	Jiwa	27	30	29	30	26
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Jiwa	17	15	23	31	33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

Mayoritas penduduk di Kota Yogyakarta memeluk agama Islam, yaitu hingga mencapai 83,28%, selanjutnya penduduk beragama Katholik yakni sebesar 9,97%. Selain itu terdapat penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman agama di Kota Yogyakarta ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2019

Gambar 2.5 Grafik Distribusi Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2019

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2019 yaitu sebesar 27.685.125,6 juta rupiah. Nilai

PDRB tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,96% atau meningkat sebesar 1,56 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2015-2019, PDRB Kota Yogyakarta secara konsisten menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,38% dengan persentase pertumbuhan PDRB selama kurun waktu 2015-2019 yang fluktuatif.

Tabel 2.12 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36.052,73	36.377,25	36.766,92	37.296,88	37.844,13
B	Pertambangan dan Penggalian	851,2	856,14	876,75	886,56	895,51
C	Industri Pengolahan	2.996.573,36	3.127.536,80	3.276.812,26	3.394.676,56	3.581.412,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	51.794,65	58.253,30	60.420,27	62.198,73	65.684,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32.797,84	33.527,34	34.601,89	36.204,65	38.718,38
F	Konstruksi	1.722.508,07	1.783.818,87	1.877.754,36	1.981.260,91	2.064.286,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.569.644,79	1.659.173,72	1.754.131,77	1.845.196,02	1.938.551,14
H	Transportasi dan Pergudangan	870.912,18	895.301,92	937.999,98	987.436,19	1.050.362,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.589.749,81	2.739.335,53	2.926.573,70	3.127.938,79	3.394.660,52
J	Informasi dan Komunikasi	3.035.921,59	3.281.050,08	3.474.909,12	3.704.297,56	3.959.894,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.374.111,34	1.443.196,56	1.488.716,71	1.564.443,22	1.683.378,70
L	Real Estate	2.074.601,90	2.167.878,81	2.264.807,44	2.388.465,93	2.512.666,15
M,N	Jasa Perusahaan	278.211,87	285.922,72	304.281,68	320.469,47	338.813,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.021.480,12	2.140.289,80	2.238.654,38	2.328.916,20	2.404.059,60
P	Jasa Pendidikan	2.235.519,73	2.307.655,32	2.424.677,32	2.574.870,81	2.734.512,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	879.118,73	920.126,76	973.057,30	1.035.916,81	1.096.179,57
S,T,U	Jasa Lainnya	623.162,34	655.987,18	693.384,22	738.176,84	783.205,63
PDRB Kota Yogyakarta ADHK		22.393.012,2	23.536.288,1	24.768.426,1	26.128.652,1	27.685.125,6
PDRB Provinsi DIY ADHK (Miliar Rupiah)		83.474,45	87.685,81	92.300,24	98.024,26	104.489,71

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, BPS DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010, sektor sektor informasi dan komunikasi; industri pengolahan; serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan tiga sektor dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Yogyakarta selama tahun 2015-2019. Pada tahun 2019, nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi adalah yang terbesar, yaitu mencapai 3,95 triliun rupiah atau sebesar 14,3% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 12,94% atau 3,58 triliun rupiah di tahun 2019. Selanjutnya, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menghasilkan PDRB sebesar 3,39 triliun rupiah atau 12,26% dari total

PDRB. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) kontribusi Kota Yogyakarta terhadap PDRB ADHK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar pada angka 26%.

Tabel 2.13 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45.154,52	46.844,51	47.858,91	50.620,90	52.990,59
B	Pertambangan dan Penggalian	1.041,04	1.086,96	1.120,56	1.149,45	1.183,64
C	Industri Pengolahan	3.659.952,70	3.961.459,19	4.217.233,84	4.485.033,11	4.823.506,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	48.055,55	57.414,63	70.344,70	75.277,32	81.767,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.035,33	43.862,67	45.993,09	48.378,12	51.777,56
F	Konstruksi	2.133.133,96	2.265.491,88	2.422.777,75	2.683.150,90	2.872.931,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.923.298,65	2.130.571,77	2.345.123,46	2.550.074,63	2.742.495,02
H	Transportasi dan Pergudangan	1.094.829,60	1.152.941,88	1.238.619,79	1.326.611,86	1.491.284,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.540.966,39	3.862.455,83	4.241.593,10	4.578.376,53	5.028.895,24
J	Informasi dan Komunikasi	2.767.355,91	2.999.250,30	3.270.519,55	3.521.878,99	3.754.663,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.790.994,19	1.936.084,28	2.083.550,70	2.269.743,27	2.489.417,45
L	Real Estate	2.496.071,14	2.664.981,32	2.850.160,93	3.072.636,61	3.348.084,36
M,N	Jasa Perusahaan	296.115,28	311.413,03	338.219,79	365.438,27	396.038,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.682.897,32	2.941.107,90	3.261.124,03	3.486.756,30	3.703.368,97
P	Jasa Pendidikan	2.535.454,30	2.660.407,07	2.850.179,35	3.101.517,66	3.376.943,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.016.645,07	1.085.552,83	1.181.954,23	1.283.065,06	1.388.276,40
S,T,U	Jasa Lainnya	717.935,38	774.487,02	842.671,44	919.144,11	995.433,07
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0
PDRB Provinsi DIY ADHB (Miliar Rupiah)		101.440,52	109.962,35	119.128,72	129.874,34	141.400,18

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, BPS DIY 2020, Hasil Olahan 2020
Keterangan : *) sementara **) sangat sementara

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor industri pengolahan; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan empat sektor dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Yogyakarta selama tahun 2015-2019. Pada tahun 2019, nilai PDRB yang terbesar adalah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yakni sebesar 5,02 triliun rupiah atau sebesar 13,74% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 13,18% atau 4,82 triliun rupiah di tahun 2019. Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi menghasilkan PDRB sebesar 3,75 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 10,26% dari total PDRB, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berkontribusi sebesar 10,12% dengan besaran 3,70 triliun rupiah.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) kontribusi Kota Yogyakarta terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar pada angka 25% hingga 27%.

Tabel 2.14 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta (%)

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	13,66	13,71	13,47	13,26	13,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,20	0,22	0,22	0,22
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14
F	Konstruksi	7,96	7,84	7,74	7,93	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,18	7,37	7,49	7,54	7,49
H	Transportasi dan Pergudangan	4,09	3,99	3,96	3,92	4,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,22	13,37	13,55	13,54	13,74
J	Informasi dan Komunikasi	10,33	10,38	10,45	10,41	10,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,68	6,70	6,65	6,71	6,80
L	Real Estate	9,32	9,22	9,10	9,09	9,15
M,N	Jasa Perusahaan	1,11	1,08	1,08	1,08	1,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,01	10,18	10,42	10,31	10,12
P	Jasa Pendidikan	9,46	9,21	9,10	9,17	9,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,79	3,76	3,78	3,79	3,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,68	2,68	2,69	2,72	2,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, BPS DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Keterangan : *) sementara **) sangat sementara

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 didominasi sektor-sektor tersier. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi yang sangat kecil, yaitu sebesar 38,73 miliar atau 0,11% dari total PDRB di tahun 2019. Kontribusi sektor sekunder juga terus menurun dari tahun 2015-2019. Hal ini wajar apabila dikaitkan dengan karakteristik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dan menjadi pusat perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.15 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-rata pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018*	2019**	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,89	0,90	1,07	1,44	1,47	1,15
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,58	2,41	1,12	1,01	1,05
C	Industri Pengolahan	1,79	4,37	4,77	3,60	5,50	4,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16	12,47	3,72	2,94	5,60	5,38
E	Pengadaan Air, Pengelompokan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,61	2,22	3,21	4,63	6,94	3,92
F	Konstruksi	2,89	3,56	5,27	5,51	4,19	4,28

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-rata pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018*	2019**	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	5,70	5,72	5,19	5,06	5,53
H	Transportasi dan Pergudangan	3,92	2,80	4,77	5,27	6,37	4,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,96	5,78	6,84	6,88	8,53	6,80
J	Informasi dan Komunikasi	4,72	8,07	5,91	6,60	6,90	6,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,88	5,03	3,15	5,09	7,60	5,75
L	Real Estate	5,20	4,50	4,47	5,46	5,20	4,97
M,N	Jasa Perusahaan	7,20	2,77	6,42	5,32	5,72	5,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,60	5,88	4,60	4,03	3,23	4,67
P	Jasa Pendidikan	7,03	3,23	5,07	6,19	6,20	5,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,39	4,66	5,75	6,46	5,82	6,02
R,S, T,U	Jasa Lainnya	7,13	5,27	5,70	6,46	6,10	6,13
Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta		5,09	5,11	5,24	5,49	5,96	5,38
Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY		4,95	5,05	5,26	6,20	6,60	5,61

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, BPS DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Pada tahun 2019 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 8,53% sedangkan paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 1,01%. Hal ini sejalan dengan rata-rata pertumbuhan pada rentang waktu 2015-2019, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu sektor penyediaan makan dan minum, yaitu sebesar 6,80%. Sedangkan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terkecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 1,05%.

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan meski tidak signifikan, mengingat luas lahan pertanian di kota Yogyakarta terus mengalami penyusutan, hal ini penting untuk ketahanan pangan penduduk Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 1,47%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 1,50%. Pertumbuhan positif di subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian didukung oleh kelompok tanaman hortikultura tumbuh 3,7%; kelompok komoditi tanaman perkebunan tumbuh 2,3%; peternakan tumbuh 1,4% dan jasa pertanian dan perburuan tumbuh 1,7%.

Pada tahun 2015-2016 pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian pada tahun 2017-2019 pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta lebih

rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertumbuhan Ekonomi menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 94,22% di tahun 2019.

2. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,25% selama lima tahun terakhir. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,2% dan nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,29%.

Tabel 2.16 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2015-2019

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Bahan Makanan	%	4,64	4,77	2,71	3,15	2,77	-9,05
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	5,04	3,84	2,79	2,63	3,76	-3,48
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	4,41	1,64	5,63	2,43	2,08	27,31
4	Sandang	%	5,87	3,04	3,84	3,61	5,51	6,19
5	Kesehatan	%	4,21	4,17	2,76	1,19	5,40	65,53
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	%	1,36	2,40	2,81	3,34	3,92	32,45
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	-2,51	-2,06	6,72	2,46	0,37	-148,12
Inflasi Kota Yogyakarta		%	3,09	2,29	4,2	2,66	2,77	6,25
Inflasi Nasional		%	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	-4,18

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020

Inflasi tahunan Kota Yogyakarta pada tahun 2015, 2016, dan 2018 lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, sedangkan tahun 2017 dan 2019 menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada nasional. Pada tahun 2015, 2018 dan 2019, penyumbang nilai inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran sandang. Kelompok bahan makanan adalah penyumbang terbesar nilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2016. Kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbang nilai inflasi terbesar pada tahun 2017.

Sementara itu, terdapat dua kelompok pengeluaran yang inflasinya mengalami titik terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu kelompok transport,

komunikasi dan jasa keuangan. Nilai inflasinya adalah sebesar -2,51%. Apabila melihat rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa kelompok kesehatan mempunyai kecenderungan meningkat inflasinya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 65,53%. Sedangkan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kecenderungan penurunan terbesar, yaitu -148,12%.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.17 PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Nilai PDRB (Juta Rp)	26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0
Jumlah Penduduk (jiwa)	412.704	417.744	422.732	427.498	431.939
PDRB perkapita (Rupiah/jiwa)	64.918.043,73	69.170.144,99	74.063.579,83	79.108.798,36	84.732.003,82

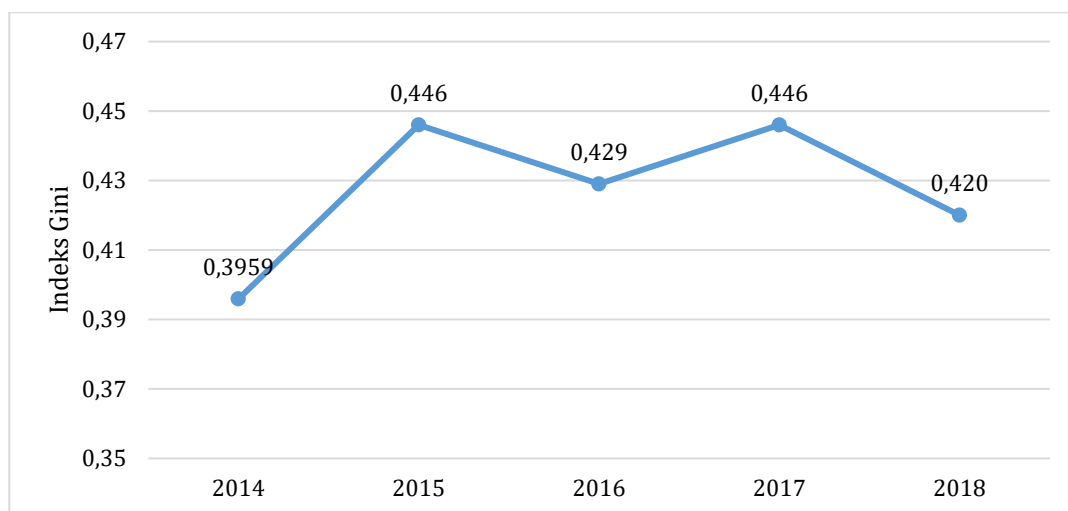
Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Besaran nilai PDRB ADHB Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi per kapita yang positif, hal ini ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata PDRB ADHB per kapita penduduk Kota Yogyakarta sebesar 6,89% per tahun. Pada tahun 2015 PDRB ADHB per kapita penduduk Kota Yogyakarta sebesar 64.918.043,73 rupiah/jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 84.732.003,82 rupiah/jiwa pada tahun 2019. Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta didukung oleh karakteristik wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya jauh lebih beragam dan kompleks. PDRB per kapita menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta, capaian kinerja 120,23% di tahun 2019.

4. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Secara umum, indeks gini Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2014-2018 fluktuatif cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata

sebesar 1,72% per tahun. Meskipun begitu, dari tahun 2015 sampai dengan 2016 indeks gini Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 0,446 menjadi 0,429. Selanjutnya tahun 2017 sampai dengan 2018 indeks gini Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan dari 0,446 menjadi 0,420. Pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik belum melakukan publikasi data Indeks Gini sehingga data tidak dapat ditampilkan. Indeks gini menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 97,06% di tahun 2019.

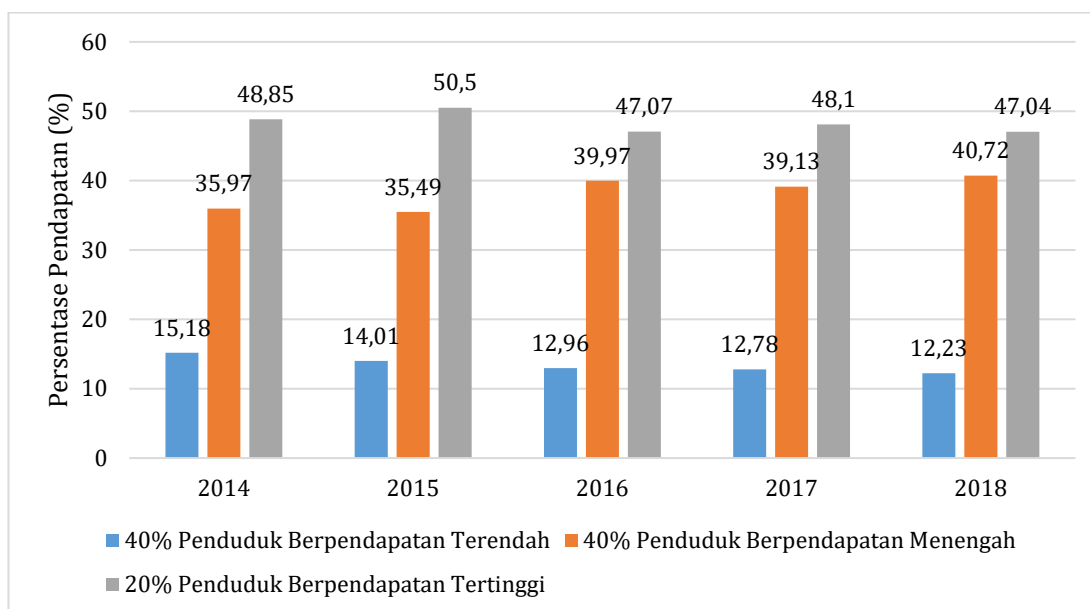


Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018 (BPS Kota Yogyakarta, 2014-2018), Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Indikator lain yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yang fokus menilai ketimpangan berdasarkan kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut, maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.7 Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah memiliki persentase pendapatan yang menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata -5,22% per tahun. Pada tahun 2014, persentase pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan terendah yaitu sebesar 15,18%. Namun sampai dengan tahun 2018 persentase tersebut menurun menjadi 12,23%. Pada saat yang sama pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% tertinggi juga mengalami penurunan, dengan pertumbuhan rata-rata -0,86% per tahun. Sedangkan terjadi peningkatan pendapatan yang cukup besar pada penduduk pendapatan menengah dengan pertumbuhan rata-rata 3,31% per tahun. Penurunan pendapatan 40% penduduk termiskin selama beberapa tahun terakhir mengindikasikan dampak buruk terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan, disamping itu penurunan pendapatan 20% penduduk terkaya memberikan dampak baik untuk menurunnya ketimpangan pendapatan. Pada kondisi ini peningkatan pendapatan tajam yang dialami penduduk menengah mempengaruhi lebih kuat sehingga menghasilkan indeks ketimpangan gini yang menurun. Sementara indikator ketimpangan pendapatan menurut bank dunia ini disandarkan pada besaran pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk termiskin.

6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indikator yang biasa digunakan untuk melihat ketimpangan wilayah adalah Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kota Yogyakarta didasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Berikut ini nilai PDRB per kapita per kecamatan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.18 PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (000 Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mantrijeron	10,24	35.465,6	36.616,4	N/A	N/A
2.	Kraton	10,31	34.889,6	36.637,4	N/A	N/A
3.	Mergangsan	11,36	38.619,3	40.165,0	N/A	N/A
4.	Umbulharjo	18,13	64.128,5	64.306,2	N/A	N/A
5.	Kotagede	8,50	28.313,6	28.235,5	N/A	N/A
6.	Gondokusuman	26,64	85.834,0	89.230,8	N/A	N/A
7.	Danurejan	37,77	115.665,6	120.670,1	N/A	N/A
8.	Pakualaman	9,35	30.630,9	32.229,8	N/A	N/A
9.	Gondomanan	45,91	135.756,3	140.990,1	N/A	N/A
10.	Ngampilan	8,94	30.566,8	31.733,6	N/A	N/A
11.	Wirobrajan	15,71	48.004,3	49.840,1	N/A	N/A
12.	Gedongtengen	16,44	50.581,5	52.413,7	N/A	N/A
13.	Jetis	23,82	73.809,2	77.246,6	N/A	N/A
14.	Tegalrejo	9,94	34.816,6	35.607,4	N/A	N/A
Rata-Rata PDRB per Kapita Kota Yogyakarta		18,08	57.033,9	58.598,7	N/A	N/A

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2016-2018 (BPS Kota Yogyakarta, 2018)

Keterangan : Data tahun 2014-2015 merupakan PDRB tahun dasar 2000

Data tahun 207-2018 merupakan PDRB tahun dasar 2010

Pada tahun 2016, Kecamatan Gondomanan menjadi kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 135.756,3 ribu rupiah, sementara Kecamatan Kotagede berada di posisi terendah dengan PDRB per kapita sebesar 28.313,6 ribu rupiah. Sementara data tahun 2017, Kecamatan Gondomanan menjadi kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 140.990,1 ribu rupiah, sementara Kecamatan Kotagede berada di posisi terendah dengan PDRB per kapita sebesar 28.235,5 ribu rupiah. Pada tahun 2018 dan 2019 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tidak melakukan perhitungan PDRB kecamatan, sehingga Indeks Williamson juga tidak dapat dihitung.

Tabel 2.19 Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2014-2019

No	Indikator	Indeks Williamson (%)						Pertumbuhan rata-rata (% /tahun)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Indeks Williamson	0,517	0,505	0,468	0,471	N/A	N/A	-3,00
2	Kategori Ketimpangan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	N/A	N/A	

Sumber: Hasil olahan, 2019

Ketimpangan di Kota Yogyakarta berdasarkan nilai Indeks Williamson bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson selama 2014-2017 yaitu sebesar -3,00% per tahun. Meski pertumbuhannya fluktuatif, ketimpangan di Kota Yogyakarta selama tahun 2014-2015 tergolong ketimpangan kategori tinggi, sedangkan pada tahun 2016-2017 tergolong ketimpangan kategori sedang. Hal ini dikarenakan selisih nilai PDRB per kapita antara kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi dan kecamatan dengan PDRB per kapita terendah cukup jauh.

7. Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.20 Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Yogyakarta						
Garis Kemiskinan	Rupiah	383.966	401.193	423.815	467.061	495.562
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	36,0	32,06	32,2	29,75	29,45
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	8,75	7,7	7,64	6,98	6,84
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	91,25	92,3	92,36	93,02	93,16
Provinsi DIY						
Garis Kemiskinan	Rupiah	347.721	354.084	374.009	409.744	432.026
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	550,23	494,94	488,53	460,10	448,47
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	14,91	13,34	13,02	12,13	11,70
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	85,09	86,66	86,98	87,87	88,30

Sumber: Statistik Kemiskinan Daerah istimewa Yogyakarta 2019; BPS Kota Yogyakarta 2020

Selama kurun waktu 2015-2019, perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan tren turun. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 36,0 ribu jiwa terus turun sampai pada tahun 2019 menjadi 29,45 ribu jiwa atau setara 6,84% dari total penduduk Kota Yogyakarta.

Dibandingkan dengan Provinsi DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin Provinsi DIY mencapai 14,91% dengan tren menurun sampai pada tahun 2019 adalah sebesar 11,70%. Meski dalam kurun tahun 2015 sampai 2019 persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta memiliki tren turun dan turut berkontribusi dalam menurunkan persentase penduduk miskin di Provinsi DIY, tetapi pada tahun-tahun kedepan Kota Yogyakarta masih harus meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinannya untuk mencapai penurunan target yang lebih baik lagi.

Persentase Penduduk Miskin menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 106,94% di tahun 2019.

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan

manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Berikut adalah tabel Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,25	74,30	74,35	74,45	74,56	0,10
Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,32	16,81	16,82	17,05	17,28	1,44
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,41	11,42	11,43	11,44	11,45	0,09
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp	17.317	17.770	18.005	18.629	19.125	2,52
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		84,56	85,32	85,49	86,11	86,65	0,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2020; Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta Tahun 2020; Hasil Olahan, 2020

Secara umum, nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,61% per tahun. Pada tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta sebesar 84,56, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 86,65 pada tahun 2019.

Tabel 2.22 Perbandingan Kondisi IPM Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator IPM	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Kota Yogyakarta	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65	0,61
Provinsi DIY	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99	0,76
Indonesia	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	0,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2020, Hasil Olahan, 2020

Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, nilai IPM Kota Yogyakarta jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi DIY dan nilai IPM Indonesia. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Yogyakarta ini masuk kategori sangat tinggi (nilai IPM > 80). Apabila dilihat lebih detil pada unsur yang menyusun IPM, setiap indikator juga terus mengalami peningkatan bila dilihat dari tahun 2015-2019. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Menurut hasil kajian Bappeda DIY mengenai IPM per kecamatan tahun 2013-2018 terdapat urutan 10 Kecamatan dengan IPM terbesar di DIY, dalam urutan tersebut terdapat 7 kecamatan dari daerah Kota Yogyakarta, yaitu Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Wirobrajan dan Kecamatan Mantrijeron.

9. Angka Melek Huruf

Merujuk pada pengertian menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Berikut adalah tabel angka melek huruf di Kota Yogyakarta tahun 2015–2019. Pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta belum melakukan publikasi data angka melek huruf, sehingga data tidak dapat ditampilkan.

Tabel 2.23 Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Angka Melek Huruf	Persen	98,50	98,96	98,64	98,75	N/A	0,09

Sumber: BPS DIY,2019; Hasil Olahan, 2020

Secara umum persentase angka melek huruf di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2018 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 0,09% per tahun. Pada tahun 2015 angka melek huruf di Kota Yogyakarta adalah sebesar 98,50%, meningkat pada tahun 2016 yaitu menjadi 98,96%. Pada tahun 2017 angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 98,64%. Selanjutnya pada tahun 2018 Angka melek huruf ini meningkat menjadi sebesar 98,75%, angka ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil penduduk Kota Yogyakarta (1,25%) yang masih belum melek huruf. Tingginya angka melek huruf ini mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik di Kota Yogyakarta semakin meningkat.

10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

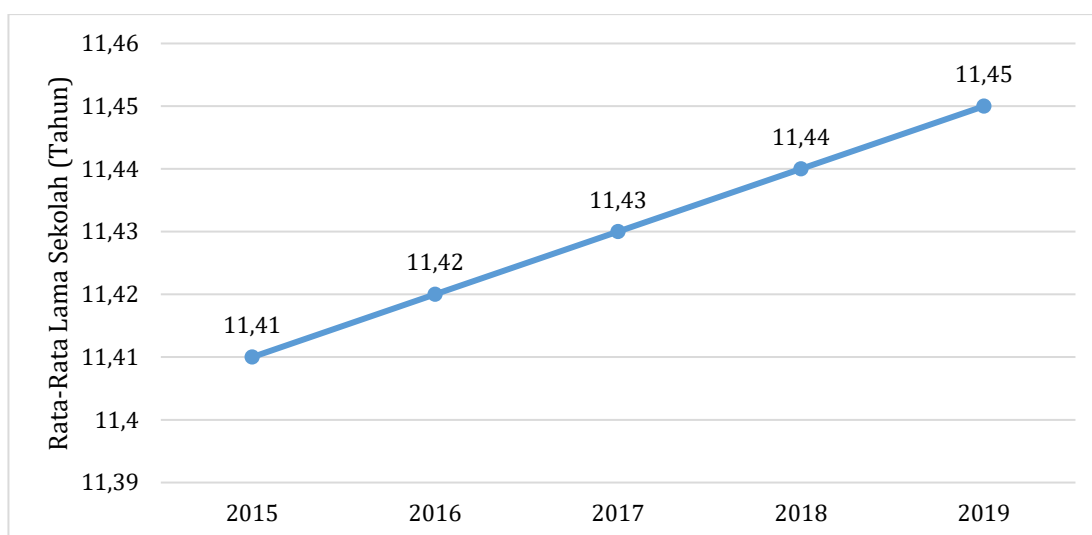
Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut sudah cukup baik. Berikut ini merupakan tabel angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2013-2015.

Tabel 2.24 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015
1.	SD/MI	Tahun	6,15	6,13	6,03
2.	SMP/MTs	Tahun	3,02	3,02	3,00
3.	SMA/MA/SMK	Tahun	3,01	3,02	3,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2017; Hasil Olahan, 2017

Apabila melihat tabel di atas, rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2013-2015 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI angka rata-rata lama sekolah menunjukkan angka 6,03 pada tahun 2015. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sudah menunjukkan angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 3,00. Selanjutnya untuk jenjang SMA/MA/SMK jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan, sedangkan angka rata-rata lama sekolah jenjang SMA/MA/SMK mengalami kenaikan.



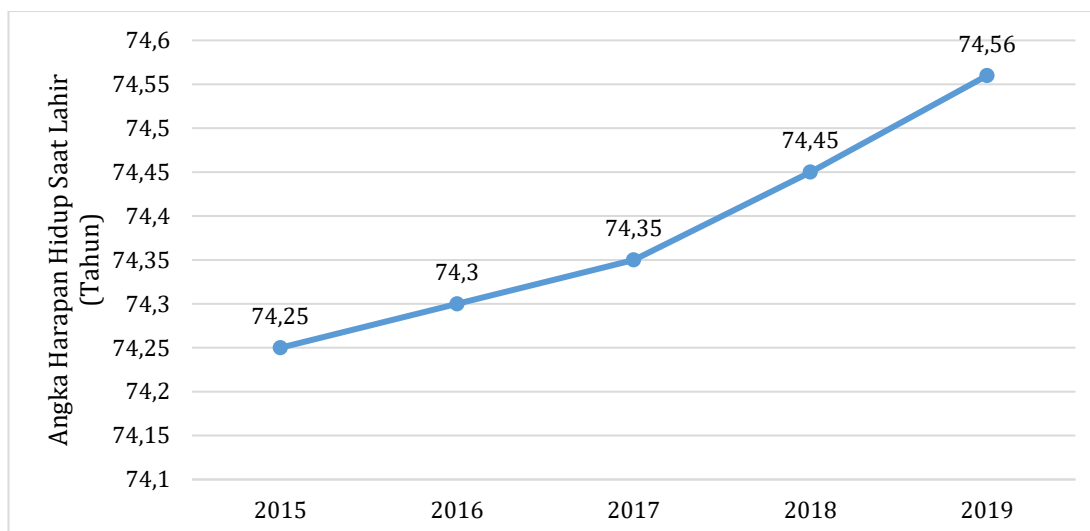
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 2020; Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.8 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Mulai tahun 2015 terdapat perubahan rumus dalam perhitungan indikator IPM, dimana angka rata-rata lama sekolah tidak diidentifikasi berdasarkan jenjang pendidikan. Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2019 mengalami kenaikan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 adalah sebesar 11,45 tahun. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK.

11. Angka Usia Harapan Hidup

Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 2020; Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.9 Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019, angka harapan hidup di Kota Yogyakarta sedikit mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya, yaitu 74,56 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Yogyakarta cenderung semakin meningkat. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jamkesda (jaminan kesehatan khusus pemegang KTP Yogyakarta), jamkesmas (jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dimana keanggotaannya ditentukan melalui TNP2K), dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena fasilitas kesehatan yang selalu ramai dikunjungi masyarakat dan tingkat okupansi ruang inap di berbagai rumah sakit yang meningkat tajam (BPS, 2015).

12. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang. Berikut ini merupakan data persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.25 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Jumlah balita gizi buruk	Anak	77	96	89	80	84	3,07
2.	Jumlah balita	Anak	15.832	15.074	14.954	14.471	13.931	-3,14
3.	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,49	0,64	0,60	0,55	0,60	6,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase balita yang mengalami gizi buruk menunjukkan fluktuasi dengan tren meningkat dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 persentase balita gizi buruk sebesar 0,49%, kemudian pada tahun 2016 meningkat cukup signifikan, yaitu menjadi 0,64%. Selanjutnya angka tersebut terus menurun hingga menjadi 0,55% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,60%. Peningkatan persentase balita gizi buruk disebabkan tingkat mobilisasi yang tinggi memungkinkan pendatang yang datang dengan kondisi balita gizi buruk. Pada penduduk miskin yang memiliki balita dengan kecenderungan gizi buruk, sebelum balita berstatus gizi buruk, balita tersebut sudah dilaporkan oleh kader ke puskesmas. Selanjutnya pihak puskesmas akan melakukan pendataan dan intervensi. Balita akan diberi terapi pengobatan bila sakit dan diberi makanan tambahan berupa biskuit dan bahan makanan lokal yang bersumber dari dana APBD disertai edukasi tentang Pemberian Makan Bayi dan Anak oleh kader PMBA dan petugas puskesmas. Kader akan melakukan pemantauan terhadap balita setiap minggu.

Salah satu upaya untuk menurunkan angka balita gizi buruk yaitu Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) kepada anak Bawah Dua Tahun (Baduta) dari keluarga miskin (gakin). Walaupun pemberian MP-ASI kepada baduta gakin tidak menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Gizi, upaya tersebut dapat membantu mengurangi angka kejadian gizi buruk di Kota Yogyakarta.

13. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi kurang berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi kurang di

Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data prevalensi balita gizi kurang di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.26 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Banyaknya balita gizi kurang	Anak	1.147	1.231	1.136	1.102	1.056	-1,89
2.	Jumlah balita	Anak	15.832	15.074	14.954	14.471	13.931	-3,14
3.	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	7,24	8,17	7,60	7,62	7,58	1,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, prevalensi balita gizi kurang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 prevalensi balita gizi kurang sebesar 7,24%, kemudian angka tersebut meningkat menjadi 8,17% di tahun 2016. Pada tahun 2017 prevalensi balita gizi kurang mengalami penurunan mencapai angka 7,60% dan sedikit meningkat menjadi 7,62% di tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 prevalensi balita gizi kurang menurun kembali menjadi 7,58%.

14. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan Siaga Aktif adalah kelurahan yang penduduknya dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar, dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan survailans berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berikut ini merupakan data cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.27 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelurahan siaga aktif	kelurahan	45	45	45	45	45
2.	Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk	kelurahan	45	45	45	45	45
3.	Cakupan kelurahan siaga aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan 2020, Hasil Olahan 2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk, sama dengan jumlah kelurahan siaga aktif yaitu 45 kelurahan siaga Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar sudah mulai terpenuhi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah dalam pengembangan kelurahan siaga aktif, diantaranya adalah mengenai kelembagaan kelurahan siaga yang belum mantab dan frekuensi pertemuan forum kelurahan siaga belum berjalan secara rutin.

15. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka partisipasi angkatan kerja.

Tabel 2.28 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas (yang bekerja)	Jiwa	177.895	178.200	179.104	180.403	180.717	0,39
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jiwa	347.403	321.652	342.350	341.963	338.187	-0,55
3.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	51,21	55,40	52,32	52,76	53,44	1,19

Sumber: DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2015-2019, angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,19% per tahun. Pada tahun 2015, angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta adalah sebesar 51,21%, sedangkan pada tahun 2016 angka ini meningkat hingga 55,40% sebelum kemudian turun di tahun 2017 menjadi 52,32%. Menurunnya angka partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2018, angka partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 52,76% dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 53,44%, peningkatan angka partisipasi angkatan kerja ini disebabkan oleh penduduk usia kerja yang semuanya dari bukan angkatan kerja baik yang sekolah maupun ibu rumah tangga di tahun 2019 memiliki pekerjaan atau kembali bekerja sehingga masuk menjadi angkatan kerja.

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain angka partisipasi angkatan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) juga dapat dihitung dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan persentase angkatan kerja dari keseluruhan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas. Perhitungan indikator ini terus berganti seiring dengan dinamika penduduk dalam suatu wilayah. Pada rentang tahun 2015-2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 0,09%.

Tabel 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Angkatan Kerja 15 thn ke atas	Jiwa	188.774	184.921	185.272	184.681	183.821	-0,66
2.	Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Jiwa	347.403	321.652	342.350	341.963	338.187	-0,55
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	54,34	57,49	54,12	54,01	54,35	0,09

Sumber: DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

17. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Tabel 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	10.879	6.721	6.168	4.278	3.104	-26,13
2.	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	188.774	184.921	185.272	184.681	183.821	-0,66
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,76	3,63	3,33	2,32	1,69	-25,71

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Selama tahun 2015-2019, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta adalah sebesar -25,71%. Pada tahun 2015, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 5,76% kemudian mengalami penurunan menjadi 1,69% pada tahun 2019. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka ini Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi aktif menyelenggarakan *Jobfair* secara rutin. Oleh karena itu, program ini turut memberikan dampak pada perubahan status penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja dan berubah menjadi pekerja atau memiliki pekerjaan di tahun 2019.

18. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang cukup tinggi, namun masih sama dengan tahun 2018 yaitu 0,98 di tahun 2019.

Tabel 2.31 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Penduduk yang Bekerja	Jiwa	177.895	178.200	179.104	180.403	180.717	0,39
2.	Angkatan Kerja	Jiwa	188.555	184.921	185.272	184.681	183.821	-0,63
3.	Rasio penduduk yang Bekerja		0,94	0,96	0,97	0,98	0,98	1,04

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari tren perkembangannya, diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta cenderung meningkat, meski pertumbuhannya lambat. Pada tahun 2019, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,98 atau sebesar 98% dari total angkatan kerja telah memperoleh kesempatan bekerja, sementara untuk 2% lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur.

19. Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah besar pertumbuhan PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan PDRB per

tenaga kerja menggambarkan semakin efektif tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Yogyakarta selama tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang fluktuatif. Menurut data tenaga kerja dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 PDRB per tenaga kerja di Kota Yogyakarta sebesar 127,55 juta rupiah/jiwa, sedangkan data tahun 2016 tidak tersedia karena pada tahun tersebut penghitungan sampel oleh BPS hanya sampai tingkat provinsi karena adanya pengurangan anggaran. PDRB per tenaga kerja tersebut meningkat menjadi 146,58 juta rupiah/jiwa di tahun 2017, kemudian terus meningkat menjadi 158,05 juta rupiah/jiwa di tahun 2019.

Tabel 2.32 Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut BPS di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	PDRB ADHB	Juta rupiah	26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0	8,11
2.	Jumlah tenaga kerja	Jiwa	210.049	N/A	213.591	224.641	231.570,00	3,31
3.	PDRB per tenaga kerja	Juta rupiah/jiwa	127,55	N/A	146,58	150,55	158,05	7,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan 2020

Menurut data tenaga kerja dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, pada tahun 2015 PDRB per tenaga kerja di Kota Yogyakarta sebesar 505,64 juta rupiah/jiwa, lalu meningkat di tahun 2016 menjadi 521,43 juta rupiah/jiwa. Kemudian menurun menjadi 492,16 juta rupiah/jiwa di tahun 2017 dan kemudian terus meningkat menjadi 538,39 juta rupiah/jiwa di tahun 2019. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33 Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	PDRB ADHB	Juta rupiah	26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0	8,11
2.	Jumlah tenaga kerja	Jiwa	52.986	55.416	63.616	67.979,00	67.979,00	6,56
3.	PDRB per tenaga kerja	Juta rupiah/jiwa	505,64	521,43	492,16	497,49	538,39	1,70

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan 2020

20. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas adalah indikator yang membandingkan jumlah total kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah Kota Yogyakarta. Rasio ini akan menggambarkan besar kesempatan kerja bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada rentang tahun 2015-2019, rasio kesempatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat. Pada tahun 2018 rasio sebesar 0,613% dan di tahun 2019 dengan rasio sebesar 0,536%. Penurunan angka ini disebabkan oleh pembukaan lowongan kerja yang sedikit sehingga terjadi pengurangan kesempatan kerja yang dari 2.145 orang di tahun 2015 dan sempat mengalami kenaikan menjadi 4.081 orang di tahun 2017, namun di tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan hingga jumlah kesempatan kerja mencapai 1.813 orang.

Tabel 2.34 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Kesempatan Kerja	Orang	2.145	2.568	4.081	2.094	1.813	4,13
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Orang	347.403	321.652	342.350	341.350	338.187	-0,55
3.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	0,617	0,798	1,192	0,613	0,536	4,37

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan 2020

21. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tabel 2.35 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	77,3	78,24	79,77	80,21	80,45

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, setiap tahunnya di Kota Yogyakarta telah terdapat survei mengenai IKM. Survei yang dilakukan terdiri dari empat kategori pengelompokan pelayanan publik, yaitu OPD dan unit kerja pemerintahan (bagian dan dinas), unit kecamatan dan kelurahan, UPT puskesmas pada Dinas Kesehatan, dan bidang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK). Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan layanan masyarakat pada lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 telah mencapai nilai indeks tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 80,45.

Peningkatan nilai persepsi responden terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta oleh beberapa hal, antara lain:

1. Kesadaran mengenai standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, sarana dan prasarana, dan inovasi pelayanan publik;
2. Kesadaran dan komitmen institusi pendidikan terhadap peningkatan pelayanan publik sektor pendidikan;
3. Peningkatan kesadaran kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
4. Peningkatan kuantitas pegawai.

Dengan adanya penilaian kinerja pelayanan publik setiap tahunnya, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk dapat melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian yang ada. Dilakukan berbagai pembenahan dengan evaluasi pelayanan yang bertujuan supaya pelayanan publik yang ada dapat terus membaik dan nilai IKM pun dapat terus meningkat.

22. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan besaran pendapatan daerah yang dapat digali dari dalam wilayah sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Tabel 2.36 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Juta Rupiah	510.548,83	540.504,30	657.049,37	667.493,08	689.049,73	8,06
2.	Total Pendapatan Daerah	Juta Rupiah	1.434.009,59	1.577.679,93	1.659.277,14	1.736.920,00	1.765.760,42	5,38

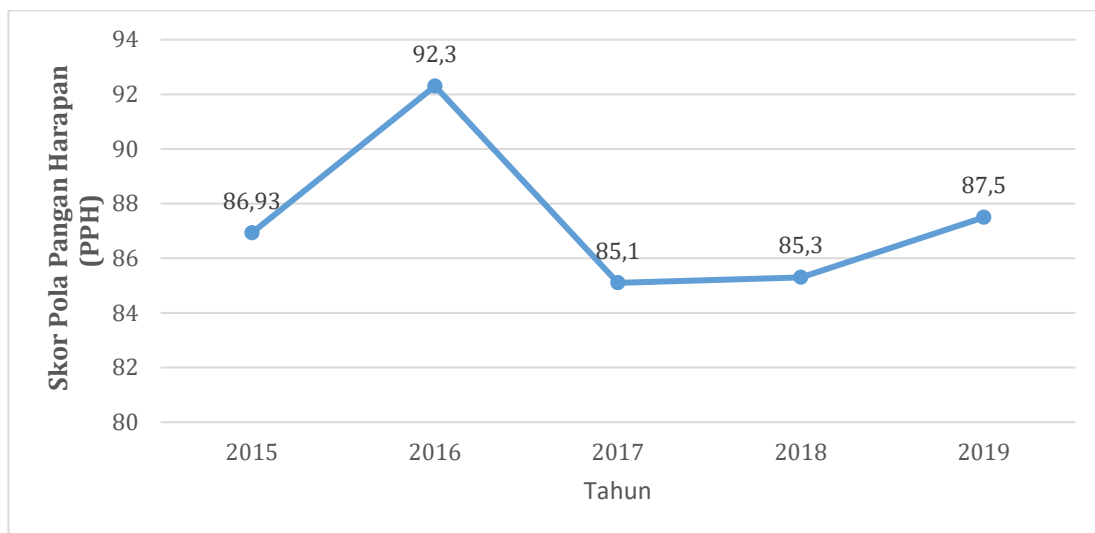
No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
3.	Persentase PAD	%	35,60	34,26	39,60	38,43	39,02	2,60

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2020

Adanya kenaikan sumber PAD yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang terealisasi melebihi target. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta kurun tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 2,60%.

23. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harian (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 2.10 Grafik Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Pada kurun tahun 2015-2019, skor pola pangan harapan Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan angka yang cukup baik. Skor pola pangan harapan pada tahun 2015 sebesar 86,93 kemudian naik menjadi 92,3 di tahun 2016. Selanjutnya angka tersebut menurun menjadi 85,1 pada tahun 2017. Penurunan skor PPH di tahun

2017 ini salah satunya merupakan akibat dari penggunaan rumus perhitungan yang baru. Pada tahun 2018 skor pola pangan harapan naik menjadi 85,3, kenaikan tersebut karena pelaksanaan program ketersediaan pangan dan konsumsi pangan B2SA. Skor PPH kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019, yaitu menjadi 87,5. Peningkatan skor PPH di tahun 2019 dikarenakan terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada pola konsumsi komponen sayur dan buah. Skor PPH juga menjadi indikator SDGs Kota Yogyakarta, capaian kinerja sebesar 102,46% di tahun 2019.

24. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan berfungsi untuk memastikan pada kabupaten/kota tertentu setiap tahunnya agar mempunyai inventarisasi cadangan pangan sebesar 100 ton bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Indikator penguatan cadangan pangan mendorong setiap wilayah untuk dapat mencapai besaran cadangan pangan minimal ini. Jumlah cadangan pangan yang tercantum dalam tabel dibawah ini merupakan data jumlah cadangan beras yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.37 Persentase Cadangan Pangan Per 100 Ton Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah cadangan pangan	Ton	100	100	100	100	112
Persentase cadangan pangan	%	100	100	100	100	112

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020

Pada kurun waktu 2015-2018 jumlah cadangan pangan di Kota Yogyakarta berjumlah sama, yaitu 100 ton. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta belum melakukan pencadangan beras sendiri, sehingga jumlah cadangan beras hanya berasal dari Pemerintah Pusat yaitu sebesar 100 ton. Sedangkan pada tahun 2019 Kota Yogyakarta sudah melakukan pencadangan beras sendiri yaitu sebesar 12 ton, sehingga jumlah cadangan pangan pada tahun 2019 menjadi 112 ton.

25. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. Pendekatan SKPG mencakup tiga indikator yaitu pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi. Indikator pertanian berkaitan dengan ketersediaan pangan daerah, indikator kesehatan terkait dengan preferensi energi, sementara indikator sosial-ekonomi berkaitan dengan kemiskinan keluarga sejahtera dan pra sejahtera. Masing – masing indikator tersebut diskor kemudian digabungkan sebagai penentu tingkat resiko kerawanan pangan daerah.

Tabel 2.38 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan	Daerah	1	0	0	0	0
2	Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku	Daerah	1	0	0	0	0
3	Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku	%	100	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020

Pada kurun waktu 2015-2019, hanya di tahun 2015 saja terdapat daerah rawan pangan di Kota Yogyakarta sedangkan pada tahun setelahnya seluruh wilayah Kota Yogyakarta merupakan daerah aman pangan. Terdapat satu daerah yang termasuk daerah rawan pangan di Kota Yogyakarta dan di tahun yang sama daerah tersebut ditangani sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu Kelurahan Suryatmajan. Kelurahan Suryatmajan pada tahun 2015 dinyatakan sebagai daerah rawan pangan berdasarkan aspek pemanfaatan pangan yang dilihat dari data penimbangan bayi. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian saat itu melaporkan temuan tersebut kepada Walikota dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

26. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB ADHB menggambarkan posisi sektor pertanian dan perkebunan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi sektor pertanian dan perkebunan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -3,72%. Penurunan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan ini sejalan dengan bergesernya fungsi Kota Yogyakarta kepada sektor-sektor tersier.

Tabel 2.39 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor pertanian dan perkebunan	Juta Rupiah	44.299,3	45.944,7	46.915,2	49.628,1	51.973,20	4,08
PDRB Kota Yogyakarta	Juta Rupiah	26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0	8,11
Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan	%	0,165	0,159	0,150	0,147	0,142	-3,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil olahan, 2020

27. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB menggambarkan besaran yang disumbangkan oleh sektor tanaman pangan ke dalam sektor pertanian dan perkebunan secara umum. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi sektor tanaman pangan (palawija) dalam sektor pertanian dan perkebunan Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun, pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -0,85%. Kecilnya pertumbuhan kontribusi sektor pertanian (palawija) ini sejalan dengan bergesernya fungsi Kota Yogyakarta kepada sektor-sektor tersier.

Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor pertanian (palawija)	Juta Rupiah	3.878,8	3.904,7	4.015,4	4.340,3	4.392,8	3,20
PDRB sektor pertanian dan perkebunan	Juta Rupiah	44.299,3	45.944,7	46.915,2	49.628,1	51.973,2	4,08
Kontribusi sektor pertanian (palawija)	%	8,76	8,50	8,54	8,75	8,45	-0,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil olahan, 2020

28. Produksi Sektor Pertanian

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota Yogyakarta sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

Tabel 2.41 Produksi Sektor Pertanian Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Produksi Padi	Ton	764	696	751	764	N/A	0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil olahan, 2020

Pada lima tahun terakhir, produksi tanaman padi di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 0,24%. Pada tahun 2015 produksi padi di Kota Yogyakarta sebesar 764 ton kemudian mengalami penurunan hingga 696 ton di tahun 2016. Pada tahun 2017-2018 kembali mengalami kenaikan sampai angka 764 ton. Penurunan produksi padi di Kota Yogyakarta disebabkan oleh berkurangnya luas tanam padi akibat alih fungsi lahan, sedangkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2017-2018 disebabkan karena meningkatnya luas panen padi. Peningkatan luas panen ini disebabkan adanya sejumlah lahan padi yang dapat melakukan panen lebih dari dua kali dalam setahun, artinya terjadi peningkatan produktifitas lahan padi di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik belum mempublikasi data produksi padi sehingga data tidak dapat ditampilkan.

29. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor pariwisata dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam PDRB, sektor pariwisata diwakili dalam lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi sektor pariwisata dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,98%. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta sebesar 13,22%, lalu meningkat di tahun-tahun setelahnya sehingga mencapai 13,74% di tahun 2019.

Tabel 2.42 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Juta Rupiah	3.540.966,4	3.862.455,8	4.241.593,1	4.578.376,5	5.028.895,24	9,17
PDRB ADHB Kota Yogyakarta	Juta Rupiah	26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,00	8,11
Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	13,22	13,37	13,55	13,54	13,74	0,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil olahan, 2020

30. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perikanan dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam struktur PDRB, sektor perikanan termasuk dalam lapangan usaha A, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 2.43 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor perikanan	Juta Rupiah	855,2	899,8	943,7	992,8	1.017,4	4,44
PDRB ADHB Kota Yogyakarta	Juta Rupiah	26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,00	8,11
Kontribusi sektor perikanan	%	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	-3,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil olahan, 2020

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi sektor perikanan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan negatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -3,39%. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta sebesar 0,0032%, lalu menurun di tahun-tahun setelahnya sehingga mencapai 0,0028% di tahun 2019. Kecilnya kontribusi sektor perikanan di Kota Yogyakarta disebabkan karena sempitnya perairan di wilayah Kota Yogyakarta.

31. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan positif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,09%. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta sebesar 7,18%, lalu meningkat di tahun-tahun setelahnya sehingga mencapai 7,49% di tahun 2019.

Tabel 2.44 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil	Juta rupiah	1.923.298,6	2.130.571,8	2.345.123,5	2.550.074,6	2.742.495,20	9,28

Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
dan Sepeda Motor							
PDRB ADHB Kota Yogyakarta	Juta rupiah	26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,00	8,11
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,18	7,37	7,49	7,54	7,49	1,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil olahan, 2020

32. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan negatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -0,89%. Pada tahun 2015 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta sebesar 13,66%, lalu menurun di tahun-tahun berikutnya sehingga mencapai 13,18% di tahun 2019. Menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan di Kota Yogyakarta disebabkan karena deindustrialisasi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.45 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor industri pengolahan	Juta rupiah	3.659.952,7	3.961.459,2	4.217.233,8	4.485.033,1	4.823.506,33	7,15
PDRB ADHB Kota Yogyakarta	Juta rupiah	26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,00	8,11
Kontribusi sektor industri pengolahan	%	13,66	13,69	13,47	13,26	13,18	-0,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil olahan, 2020

33. Pertumbuhan Industri

Industri yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari industri rumah tangga, kecil, sedang dan besar. Namun mulai tahun 2017 lalu, kewenangan atas industri besar dan menengah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi DIY. Dari tahun 2015-2019, jumlah unit industri kecil di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pertumbuhan rata-ratanya sebesar 8,66% per tahun.

Tabel 2.46 Pertumbuhan Industri Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Unit usaha industri kecil	Unit	6.222	6.222	1.279	1.397	2.862
Pertumbuhan	%	24,89	0,00	-79,44	9,23	104,87

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan 2020

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang menjalani pra pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan data PAUD di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 2.47 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

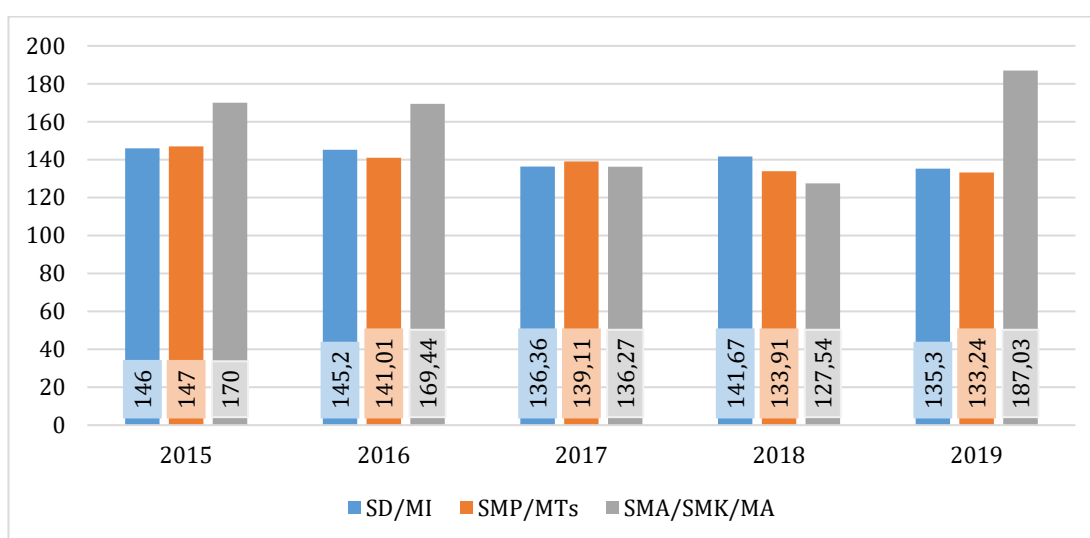
No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak	Jiwa	12.069	12.517	11.295	15.910	18.386	12,59
2.	Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	Jiwa	17.358	16.859	16.876	17.174	17.291	-0,08
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	70	74	67	93	106	12,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

Data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak adalah siswa yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Data tersebut terdiri atas siswa yang berdomisili di Kota Yogyakarta, maupun di luar Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di atas, rasio PAUD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,53%. Pada tahun 2015 rasio PAUD sebesar 70% dan angka tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 74%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan rasio PAUD menjadi 67%, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi peningkatan rasio PAUD yang cukup signifikan menjadi 93%. Peningkatan tersebut karena faktor ibu bekerja semakin tinggi dan kesadaran keluarga agar anak balitanya mendapatkan pendidikan lebih dini. Selanjutnya, pada tahun 2019 rasio PAUD kembali meningkat bahkan nilainya melebihi angka 100%, yaitu sebesar 106%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak melebihi jumlah anak usia 4-6 tahun di Kota Yogyakarta, artinya ada anak dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah TK/RA/penitipan anak di Kota Yogyakarta.

2. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah grafik APK di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 2.11 Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Apabila melihat gambar di atas, nilai persentase APK dari masing-masing jenjang pendidikan memiliki persentase lebih dari 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI dalam kurun waktu 2015-2019 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata APK pada jenjang SD/MI sebesar -1,81% per tahun. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 angka APK pada jenjang SD/MI menunjukkan penurunan, yaitu dari 146% menjadi 136,27%. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD/MI, yaitu menjadi sebesar 141,67%. Peningkatan angka APK SD/MI tahun 2018 karena tingginya daya tampung sekolah di Kota Yogyakarta dan mutu sekolah yang baik di Kota Yogyakarta sehingga menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah. Selanjutnya pada tahun 2019 angka APK pada jenjang SD/MI menurun menjadi 135,3%. Penurunan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan adanya sistem zonasi yang menyebabkan minat

penduduk luar kota bersekolah di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Selain itu, masyarakat cenderung menyekolahkan anaknya di daerah asal untuk menyiapkan anak-anak mereka bersaing di tingkat SMP daerah mereka sendiri.

Pada kurun waktu 2015-2019 angka APK pada jenjang SMP/MTs cenderung menurun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar -2,42% per tahun. Pada akhir periode (tahun 2019) angka APK di tingkat SMP/MTs mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 133,91% menjadi 133,24%. Penurunan tersebut karena penerapan Permendikbud tentang PPDB berdasar sistem zonasi yang menyebabkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Yogyakarta mengalami penurunan.

Angka APK pada jenjang SMA/SMK/MA pada kurun waktu 2015-2018 menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 170% di tahun 2015 menjadi 127% di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka APK pada jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan menjadi 187,03%.

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini merupakan suatu indikator yang menghitung persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga nantinya dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Kota Yogyakarta. Berikut adalah angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.48 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

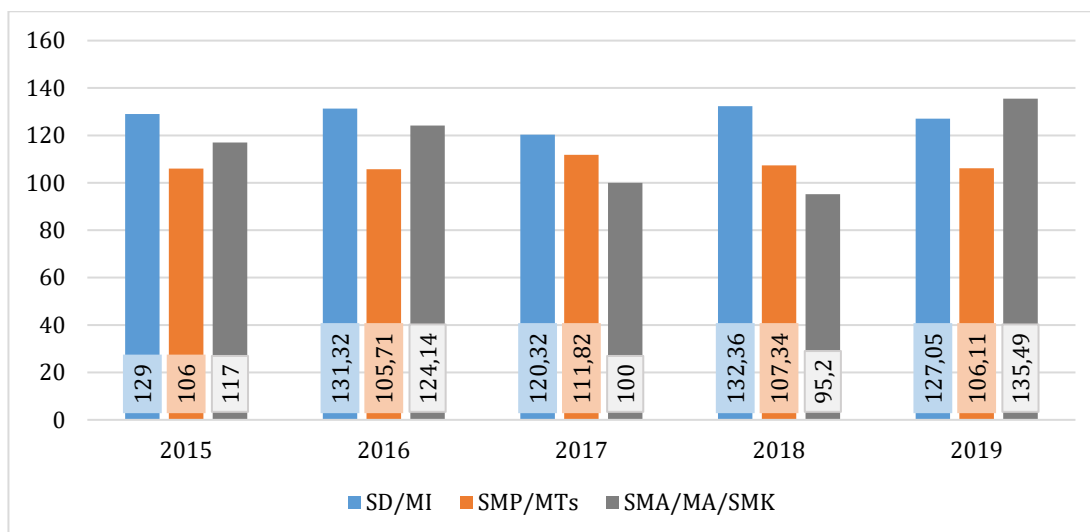
No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Tidak/Belum Sekolah	Persen	12,63	12,46	13,16	13,96	14,46	3,48
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	Persen	11,21	11,03	10,93	10,65	10,49	-1,64
3.	Tamat SD/Sederajat	Persen	10,68	10,70	10,53	10,28	9,91	-1,84
4.	SMP/Sederajat	Persen	12,83	12,89	12,75	12,65	12,61	-0,43
5.	SMA/Sederajat	Persen	30,41	30,51	30,31	30,13	30,11	-0,25
6.	Diploma I/II	Persen	0,84	0,83	0,81	0,80	0,77	-2,15
7.	Diploma III/Akademi/Sarjana Muda	Persen	4,96	4,94	4,88	4,84	4,80	-0,80
8.	Diploma IV/Strata I	Persen	14,76	14,87	14,83	14,87	14,98	0,38
9.	Strata II	Persen	1,50	1,58	1,60	1,63	1,66	2,63
10.	Strata III	Persen	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19	3,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kecenderungan penurunan pada tingkat belum tamat SD/Sederajat, tamat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I/II dan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda. Adapun kecenderungan meningkat terdapat pada kategori tidak/belum sekolah dan jenjang pendidikan tinggi seperti Diploma dan Strata. Meningkatnya persentase pada kategori tersebut menandakan kondisi baik, sebagai wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi.

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 2.12 Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka APM SD/MI dalam kurun waktu 2015-2019 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata APM pada jenjang SD/MI sebesar -1,15% per tahunnya. Pada tahun 2015 APM SD/MI sebesar 129% dan angka tersebut berfluktuasi menjadi 132,36% pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 APM SD/MI menurun menjadi 127,05%. Penurunan

tersebut karena adanya sistem zonasi yang menyebabkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Yogyakarta menurun.

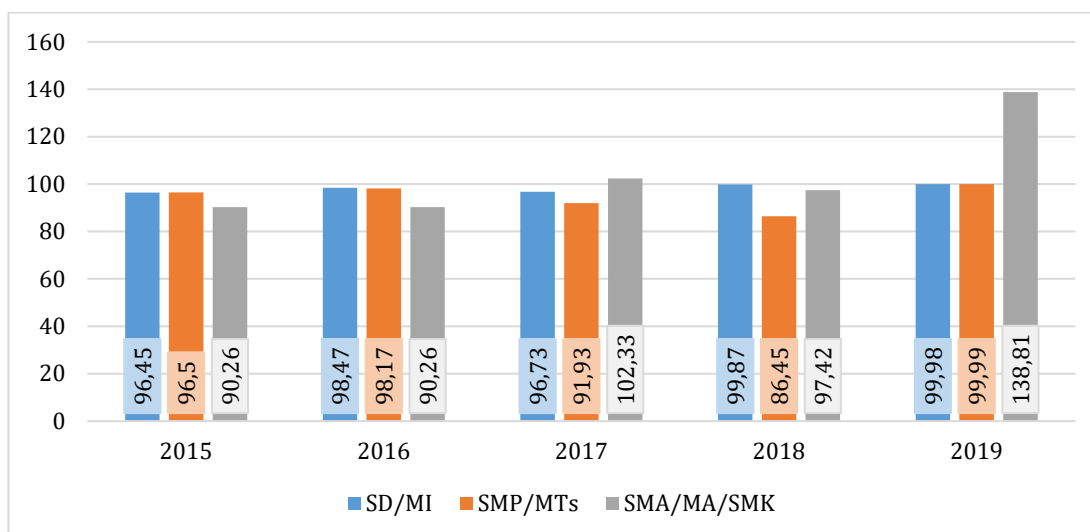
Adapun angka APM pada jenjang SMP/MTs dalam kurun waktu 2015-2019 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat . Pertumbuhan rata-rata APM pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,09% per tahunnya. Pada tahun 2015 APM SMP/MTs sebesar 106% dan angka tersebut menurun di tahun 2016 menjadi sebesar 105,71%. Tahun 2017 terjadi peningkatan APS menjadi 111,82% dan pada tahun 2018 kembali menurun ke angka 107,34%. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali menurun ke angka 106,11%. Penurunan APM sejak tahun 2017 karena Wilayah DIY melaksanakan Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah dengan sistem zonasi di wilayah DIY, sehingga peserta didik dari luar Kota Yogyakarta lebih memilih dan berpeluang diterima bersekolah di daerah tempat tinggalnya.

Pada jenjang SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,04% per tahunnya. Pada tahun 2015 SMA/MA/SMK sebesar 117% dan angka tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 124,14%. Tahun 2017 terjadi penurunan APS menjadi 100% dan pada tahun 2018 kembali menurun ke angka 95,2%. Selanjutnya pada tahun 2019 APS SMA/MA/SMK meningkat ke angka 135,49%.

Nilai-nilai APM pada gambar di atas sebagian besar berada di atas angka 100%. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang lebih baik dan menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/MTs di Kota Yogyakarta yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.

5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 dapat dilihat di bawah ini.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 2.13 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 APS SD/MI sebesar 96,45% dan angka tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 98,47%. Tahun 2017 terjadi penurunan APS menjadi 96,73% dan pada tahun 2018 naik ke angka 99,87%. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka partisipasi sekolah SD/MI kembali meningkat menjadi 99,98%.

Adapun angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2015-2019 juga cenderung fluktuatif dengan rata-rata kenaikan 1,27% per tahunnya. APS jenjang SMP/MTs pada tahun 2019 adalah sebesar 99,99%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,45%. Peningkatan angka partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs tersebut karena daya tampung sekolah di kota Yogyakarta sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, adanya jaminan pendidikan daerah untuk keluarga tidak mampu dan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Adapun data terkait APS pada jenjang SMA/SMK/MA dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 12,77% per tahunnya. Pada tahun 2015 APS SMA/SMK/MA sebesar 90,26% dan angka tersebut tetap di tahun 2016. Tahun 2017 APS meningkat menjadi sebesar 102,33% dan pada tahun 2018 menurun ke angka 97,42%. Angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA meningkat menjadi 138,81% pada tahun 2019.

6. Angka Putus Sekolah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di

suatu jenjang pendidikan. Berikut ini merupakan data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.49 Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen	0,004	0,007	0,01	0	0,01	25,74
2.	SMP/MTs	Persen	0,001	0,013	0	0	0,02	111,47
3.	SMA/MA/SMK	Persen	0,001	0,011	0,006	0,04	0,036	144,95

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan dilihat dari angka rata-rata pertumbuhannya sebesar 25,74%. Pada tahun 2015, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,004% dan angka tersebut meningkat menjadi 0,007% pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 angka putus sekolah SD/MI menurun menjadi 0,01%. Pada tahun 2018 angka putus sekolah pada jenjang SD/MI berhasil diatasi hingga mencapai 0% karena sistem pendidikan yang semakin baik, termasuk program bantuan pembiayaan bagi KMS, penyediaan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang semakin ditingkatkan sehingga mereka dapat bersekolah di sekolah umum. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka putus sekolah pada jenjang SD/MI mengalami peningkatan menjadi 0,01%. Peningkatan tersebut dikarenakan pengaruh pergaulan, faktor keluarga dan ekonomi.

Angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, APS SMP/MTs adalah sebesar 0,001%. Angka tersebut meningkat menjadi 0,013% pada tahun 2016. Selanjutnya angka tersebut menurun pada tahun 2017 dan 2018 berhasil mencapai angka 0%. Itu artinya, tidak ada siswa SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 2019 angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs meningkat menjadi sebesar 0,02%. Peningkatan tersebut dikarenakan pengaruh pergaulan, faktor keluarga dan ekonomi.

Angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, angka putus sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,001% dan angka tersebut meningkat menjadi 0,011% pada tahun 2016. Angka tersebut menurun menjadi 0,006% pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 0,04% pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka putus sekolah menurun menjadi 0,036%.

7. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut.

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 2.50 Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	0
2.	SMP/MTs	Persen	99,83	99,93	100	100	100	0,04
3.	SMA/MA/SMK	Persen	99,88	99,88	100	100	100	0,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan besaran yang tetap yakni 100%. Adapun untuk angka kelulusan jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 dan 2016 mencapai 99,88%, selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sudah mencapai angka 100%. Angka kelulusan jenjang SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 2015-2016 tetap di angka 99,88%. Selanjutnya dalam kurun waktu 2017-2019 angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA sudah mencapai 100%.

Apabila dilihat secara keseluruhan, terdapat pertumbuhan rata-rata per tahun yang positif. Kecenderungan tersebut mengindikasikan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan telah mampu mempertahankan angka kelulusan.

8. Angka Melanjutkan

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 2.51 Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	113,29	105,67	110	104,74	107,93	-1,09
2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Persen	155,56	158,39	156,24	152,94	141,51	-2,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020, Hasil Olahan 2020

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar -1,09% per tahun. Pada tahun 2015, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 113,29% dan terus menurun menjadi 104,74% pada tahun 2018. Penurunan tersebut karena banyak faktor baik ekonomi maupun non ekonomi, seperti pergaulan, kurangnya dukungan keluarga, narkoba, kurang akses/informasi termasuk untuk siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya pada tahun 2019 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs meningkat menjadi 107,93%.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 2015-2019 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK sebesar -2,28% per tahun. Pada tahun 2015, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK sebesar 155,56% dan meningkat menjadi 158,39% pada tahun 2016. Selanjutnya angka tersebut terus menurun menjadi 141,51% pada tahun 2019.

Apabila dicermati, angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang lebih tinggi menunjukkan angka di atas 100%. Hal ini disebabkan banyaknya pelajar dari luar kota yang melanjutkan ke SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta. Fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta masih dianggap lebih baik jika dibandingkan daerah sekitarnya.

9. Fasilitas Pendidikan

Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan, sehingga data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik, yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Indikator terkait sekolah dalam kondisi bangunan baik diganti dengan data ruang kelas dalam kondisi baik. Berikut adalah data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 2.52 Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kelas SD/MI Kondisi Baik	Unit	1.508	1.561	1.733	1.655	1.675
2	Jumlah Seluruh Kelas SD/MI	Unit	1.643	1.685	1.768	1.708	1.729
3	Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	Unit	91,78	92,64	98,02	96,90	96,88

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan ruang kelas pada jenjang pendidikan SD/MI sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baik yang semuanya menunjukkan angka di atas 90%. Pada tahun 2019 persentase ruang kelas kondisi baik sudah mencapai 96,88%. Hasil dari indikator ini menunjukkan kondisi yang baik.

b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Data terkait kondisi bangunan baik pada jenjang SMP/MTs tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan, sehingga diganti dengan data ruang kelas kondisi baik. Berikut merupakan data ruang kelas SMP/MTs dan SMA/MA kondisi baik.

Tabel 2.53 Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA dengan Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Ruang Kelas SMP/MTs							
1	Jumlah Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	Unit	807	706	822	747	835
2	Jumlah Seluruh Kelas SMP/MTs	Unit	845	837	832	756	844
3	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	Persen	95,50	84,35	98,80	98,81	98,83
Ruang Kelas SMA/SMK/MA							
1	Jumlah Kelas SMA/SMK/MA Kondisi Baik	Unit	1.091	1.109	1.287	1.274	1.236
2	Jumlah Seluruh Kelas SMA/SMK/MA	Unit	1.100	1.206	1.232	1.236	1.257
3	Persentase Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi baik	Persen	99,18	91,95	95,73	97,02	98,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase ruang kelas baik pada jenjang SMP/MTs sudah berada kondisi baik. Pada kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan dilihat dari angka rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,64% per tahun. Pada tahun 2019 angka persentase sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 98,83%. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang didapatkan oleh pelajar di Kota Yogyakarta semakin membaik setiap tahunnya.

Persentase ruang kelas pada jenjang SMA/SMK/MA juga sudah berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2015 angka persentase ruang kelas pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 99,18. Selanjutnya angka tersebut terus meningkat sampai dengan tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 98,33%.

10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Penghitungan rasio ini menggunakan perbandingan jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut ini adalah data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 2.54 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	234	233	232	232	234	0,00
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Jiwa	47.838	39.604	48.762	49.280	49.280	1,74
3.	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar		49	59	48	47	47	0,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Dapat dilihat pada tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan 0,24% per tahun. Pada tahun 2015 tersedia 49 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 234 unit. Angka tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi 59 sekolah setiap 10.000 penduduk. Apabila dicermati, rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk dengan usia 7-12 dan 13-15 tahun pada tahun 2017 bertambah sekitar 23% dan jumlah sekolah cenderung tetap. Selanjutnya, pada tahun 2018 tersedia 47 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 232 unit. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar pada tahun 2019 cenderung tetap, yaitu 47 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 234 unit.

11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini perhitungannya melibatkan angka jumlah sekolah SMA/SMK/MA dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.55 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

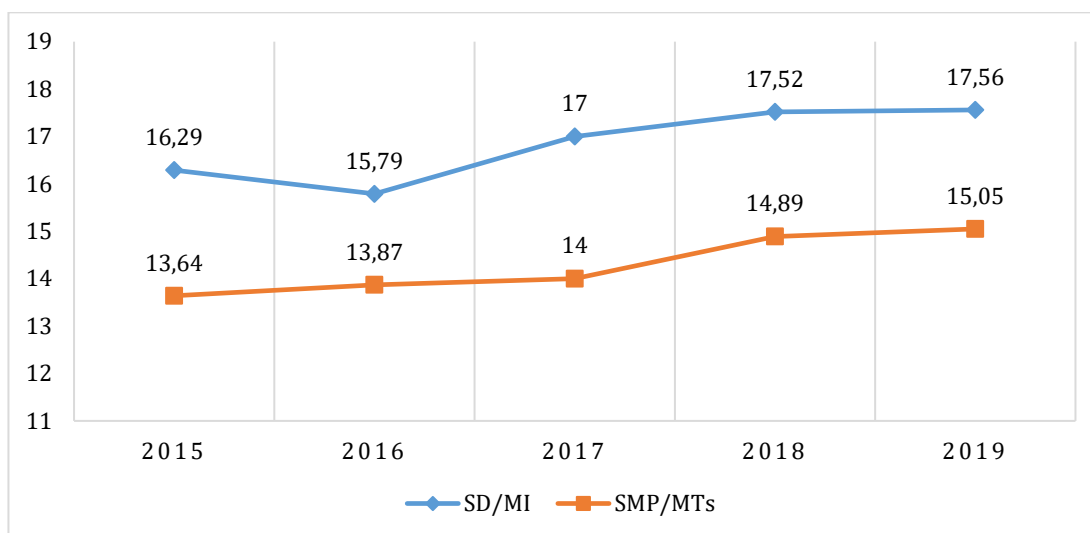
No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SMA/SMK/MA	Unit	85	79	79	76	77	-2,39
2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Jiwa	19.765	21.724	20.612	20.579	19.716	0,11
3.	Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA	Unit/ 10.000 jiwa	43,01	36,37	38,33	36,93	39,05	-1,98

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami kecenderungan cukup fluktuatif. Pada tahun 2015, rasio ketersediaan sekolah adalah 43 sekolah dalam 10.000 penduduk. Selanjutnya, di tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah mengalami penurunan menjadi 36 sekolah dalam 10.000 penduduk. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah penduduk usia 16-18 tahun dan penurunan jumlah sekolah. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah mengalami kenaikan menjadi 38 sekolah dalam 10.000 penduduk, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 36 sekolah dalam 10.000 penduduk. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah sekolah. Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MK meningkat kembali menjadi 39 sekolah dalam 10.000 penduduk di tahun 2019. Hal ini disebabkan bertambahnya sekolah dan berkurangnya jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Pada perhitungan ini, yang dihitung adalah jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SMP/MTs, baik swasta maupun PNS. Formula untuk menghitung rasio ini adalah jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru yang tersedia. Berikut gambar rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 2.14 Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, rasio guru/murid

SD/MI sebesar 16,29 yang berarti bahwa satu orang guru mengajar 16 murid. Angka rasio sempat menurun menjadi 15,79 di tahun 2016. Selanjutnya angka rasio ini terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai 17,56 yang artinya satu orang guru mengajar 17 hingga 18 murid. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah terpenuhinya SPM, mengingat standarnya adalah 32 murid untuk satu guru.

Rasio guru/murid SMP/MTs dalam kurun lima tahun terakhir juga cenderung meningkat. Pada tahun 2015, rasio guru/murid sebesar 13,64 yang berarti bahwa satu orang guru mengajar 13 hingga 14 siswa. Angka rasio ini terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai 15,05 yang artinya satu orang guru mengajar 15 murid.

Guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas. Guru yang mengajar siswa SMP/MTs merupakan guru untuk setiap mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam 1 kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda. Rasio ketersediaan guru/murid sekolah pendidikan dasar di SD dan SMP mengalami kenaikan karena adanya tambahan guru dari penerimaan CPNS, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap Yayasan (GTY).

13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada level SMA/SMK/MA. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah murid yang ideal untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut ini merupakan rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 2.56 Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru SMA/SMK/MA	Orang	3.445	3.322	3.270	3.263	3.277	-1,23
2.	Jumlah murid SMA/SMK/MA	Orang	35.734	36.810	37.209	36.564	36.095	0,27
3.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		9,64	9,02	8,79	8,92	9,08	-1,43

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA sebesar 9,64 yang artinya satu orang guru mengajar 9 sampai 10 siswa. Rasio ini

menurun sehingga menjadi 9,02 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA kembali menurun menjadi 8,79. Rasio guru/murid pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi 8,92, selanjutnya meningkat menjadi 9,08 pada tahun 2019 yang artinya satu orang guru mengajar 9 siswa.

14. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan dasar yang dimaksud adalah SD/MI. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.57 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah guru SD per kelas	Orang	2.923	2.787	2.478	2.405	2.631
2.	Jumlah murid SD	Orang	43.823	43.993	43.061	42.142	42.821
3.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		7	6	6	6	6

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2015, rasio/guru murid SD/MI sebesar tujuh yang berarti satu orang guru per kelas mengajar tujuh murid. Selanjutnya mulai tahun 2016 rasio tersebut turun menjadi enam yang berarti satu guru per kelas mengajar enam murid. Angka ini stabil hingga pada tahun 2019, artinya rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar adalah sebesar enam.

15. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan menengah yang dimaksud adalah SMP/MTs, karena pendidikan jenjang SMA/SMK/MA bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.58 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah guru SMP per kelas	Orang	1.827	1.770	1.678	1.378	1.609
2.	Jumlah murid pendidikan SMP	Orang	25.107	24.535	23.913	20.513	23.492
3.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2015, rasio/guru murid SMP/MTs sebesar tujuh yang berarti satu orang guru per kelas mengajar tujuh murid. Angka ini cenderung stabil hingga pada tahun 2019 rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs adalah sebesar tujuh.

16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Indikator ini adalah perbandingan antara banyaknya lulusan siswa SD dengan banyaknya penduduk yang berusia 12 tahun (usia rata-rata lulus SD). Indikator ini digunakan untuk melihat banyaknya siswa yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar. Berikut merupakan proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar.

Tabel 2.59 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Banyaknya lulusan SD	Orang	7.363	7.163	7.133	7.190	7.351	-0,02
2.	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	Orang	6.507	6.563	6.312	5.095	5.112	-5,48
3.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	%	113	109	113	141	144	6,69

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar memiliki kecenderungan meningkat jika dilihat rata-rata pertumbuhannya yang menunjukkan angka positif. Pada tahun 2015, proporsi murid yang berhasil menamatkan sekolah dasar sebesar 113%. Angka tersebut sempat menurun di tahun 2016 menjadi sebesar 109%. Selanjutnya proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD di Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan menjadi 144% di tahun 2019. Proporsi murid yang menamatkan sekolah dasar menunjukkan angka lebih dari 100%, hal ini dikarenakan banyaknya lulusan SD lebih besar jika dibanding jumlah penduduk yang berusia 12 tahun. Hal ini terjadi karena bisa saja siswa yang lulus pada saat itu tidak berusia 12 tahun, dan bisa juga siswa tersebut bukan penduduk Kota Yogyakarta.

17. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang

materi yang lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.60 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Orang	6.224	7.160	6.861	6.369	7.133	3,92
2.	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Orang	7.578	7.573	7.174	6.604	7.276	-0,78
3.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	82,13	94,55	95,44	96,44	98,03	4,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, persentase guru berijazah S1/D-IV di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, persentase guru berijazah S1/D-IV hanya 82,13%, kemudian terus meningkat hingga mencapai 98,03% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut karena adanya persyaratan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) minimal harus lulus S1 dan persyaratan penerimaan CPNS guru minimal harus lulus S1.

18. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada tahun 2019 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.61 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100,00%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020

Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan baik tingkat SD maupun SMP. Sedangkan pendidikan SMA/K menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

19. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.62 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase SD terakreditasi A	%	82	90,36	108,87	93,25	111,01
2	Persentase SMP terakreditasi A	%	74	77,19	104,31	76,27	102,38
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%	128,98	132,36	102,60	127,05	98,47
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	%	141,11	107,34	76	106,11	75
5	Angka partisipasi kasar SD	%	142,61	141,67	99,32	135,30	94,83
6	Angka partisipasi kasar SMP	%	141,11	133,91	94,86	133,24	94,35
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	11,42	11,43	100,00	11,44	100,09
8	Persentase guru sesuai kualifikasi	%	92,37	94,61	102,31	99,42	107,40

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data capaian SDGs diatas dapat dilihat capaian setiap indikator, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai 100% yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat, Angka partisipasi kasar SD dan Angka partisipasi kasar SMP. Hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor seperti:

- Sarana dan prasarana pada sekolah swasta belum tercukupi;
- Kesadaran akreditasi yang kurang di tingkat Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan kurangnya kualitas pengajar SPS; dan
- Banyak Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja (LKP) yang bersifat bussines oriented. Karena tidak adanya efek positif dari status akreditasi terhadap penambahan jumlah peserta didik, banyak LKP yang tidak berkeinginan untuk mengikuti akreditasi.

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 2.63 Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi	33	30	33	35	24	-6,11
2.	Jumlah kelahiran hidup	bayi	3.972	3.841	3.621	3.620	3.338	-4,21
3.	Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	per 1.000 kelahiran hidup	8,31	7,81	9,11	9,67	7,19	-2,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan dan angka tersebut meningkat pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2019, jumlah kematian bayi mencapai angka 24 kasus dari 3.338 kelahiran hidup. Terjadi penurunan jumlah kematian bayi dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 35 kasus. Penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan oleh kelainan kongenital, dan berat badan lahir rendah/pre term. Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil, yaitu sejak remaja atau calon pengantin. Untuk meningkatkan kesehatan sejak remaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS) membutuhkan dukungan banyak sektor.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut merupakan angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.64 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)		8,31	7,81	9,1	9,7	7,19
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) → (1000-AKB)		991,69	992,19	990,9	990,3	992,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, angka kelangsungan hidup bayi sebesar 991,69 yang berarti setiap 1000 kelahiran bayi terdapat 991 bayi yang dapat hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka tersebut meningkat menjadi 992,19 pada tahun 2016, dan kemudian menurun pada tahun 2017 hingga mencapai angka 990,9. Pada 2018 terjadi penurunan kembali hingga mencapai angka 990,3. Selanjutnya pada tahun 2019, angka kelangsungan hidup bayi meningkat menjadi 992,81, yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 992 bayi yang dapat

hidup sampai dengan usia satu tahun. Peningkatan angka kelangsungan hidup bayi karena angka kematian bayi di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.65 Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita	6	10	4	10	7	31,67
2.	Jumlah kelahiran hidup	balita	3.972	3.841	3.621	3.585	3.338	-4,23
3.	Angka kematian balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)		1,51	2,60	1,10	2,79	2,10	35,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka kematian balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, angka kematian balita sebesar 1,51 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup, lalu meningkat menjadi 2,60 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 angka kematian balita mengalami penurunan menjadi 1,10. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,79 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,1 per 1.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2015 jumlah kematian bayi sebanyak 6 balita dan kemudian meningkat menjadi 10 balita pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 angka tersebut menurun menjadi 4 kasus dan kemudian mengalami kenaikan mencapai 10 kasus pada tahun 2018. Kasus kematian balita disebabkan karena infeksi paru 3 balita, infeksi radang otak 3 balita, serta kelainan kongenital 4 balita. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah kematian balita menurun menjadi 7 balita. Penurunan angka kematian balita dikarenakan akses pelayanan kesehatan balita cukup baik. Namun demikian, penyebab kematian balita dikarenakan penyakit infeksi seperti bronkitis, dehidrasi, dan kelainan kongenital (jantung bawaan, kelainan katup) yang dapat dicegah kematiannya. Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian anak balita di Kota Yogyakarta adalah dengan pemeriksaan ANC terpadu berkualitas, implementasi manajemen terpadu bayi muda (MTBM), implementasi manajemen terpadu balita sakit (MTBS), peningkatan pemanfaatan buku KIA dan peningkatan ASI eksklusif.

4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup. Berikut merupakan angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.66 Angka Kematian Neonatus di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	Bayi	24	18	25	26	13	-8,03
2.	Jumlah kelahiran hidup	Bayi	3.972	3.841	3.621	3.585	3.338	-4,23
3.	Angka kematian neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)		6,04	4,69	6,90	7,25	3,89	-4,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Apabila melihat dari tabel di atas, angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 angka kematian neonatal adalah 3,89 yang berarti bahwa setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 3-4 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,25. Apabila dicermati angka kematian bayi pada tahun 2019 merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses pelayanan kesehatan bayi cukup baik. Namun demikian dari jenis kasus penyebab kematian bayi dikarenakan penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, akut respiratori, encefalitis dan kelainan kongenital (jantung bawaan) serta asfiksia yang semuanya dapat dicegah kematiannya masih perlu diperhatikan.

5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.67 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	orang	5	4	4	4	4	-5,00
2.	Jumlah kelahiran hidup		3.972	3.841	3.621	3.585	3.338	-4,23

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		125,88	104,14	110,47	111,58	119,83	-0,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka kematian ibu cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun dengan angka kematian ibu tertinggi adalah pada tahun 2015 sebesar 125,88 dan tahun dengan angka kematian ibu terendah adalah tahun 2016 sebesar 104,14. Angka kematian ibu cenderung menurun pada tahun 2016 dan kemudian meningkat di tahun 2017-2019. Terdapat perbedaan metode penghitungan, dimana pada tahun 2015, pendataan dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang meninggal di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta tanpa melihat domisili/tempat tinggal ibu tersebut. Akan tetapi mulai tahun 2016, pendataan hanya dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta dan menggunakan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta.

Apabila diamati secara lebih seksama, jumlah ibu hamil yang meninggal tertinggi, yaitu pada tahun 2015 (lima orang). Penyebab kematian ibu pada tahun 2015 diantaranya tiga kasus disebabkan oleh karena penyakit TBC dan HIV pada kehamilan, satu kasus disebabkan oleh karena perdarahan setelah melahirkan, dan satu kasus disebabkan oleh karena infeksi setelah melahirkan.

Kasus kematian ibu dicatat dan dilaporkan berdasarkan identitas KTP, dari lima kasus kematian ibu yang tercatat di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 tersebut di atas empat kasus merupakan penduduk dengan KTP Kota Yogyakarta akan tetapi berdomisili dan mendapatkan pelayanan di luar Kota Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Bantul), sedangkan satu kasus adalah penduduk dengan KTP dan domisili di Kota Yogyakarta yang sudah mendapatkan pendampingan dan pemantauan dari kader, petugas, dan dokter spesialis di RS pada kasus kehamilan dengan komplikasi.

Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil antara lain:

- a. Adanya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga tidak mengakses layanan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilannya;
- b. Ibu hamil mencari dokter di fasyankes tertentu sehingga terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan penanganannya;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengenalan tanda bahaya kehamilan dan persalinan; dan
- d. Pendampingan Ibu Hamil yang belum optimal.

Kesehatan ibu merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, oleh karena itu kesakitan dan kematian ibu, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, mengingat penyebab dan latar belakang sangat dipengaruhi oleh

faktor-faktor yang menjadi tanggung jawab sektor dan pihak lain sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama secara sinergis.

6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi warga kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi empat kategori, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Pada perhitungan indikator ini, posyandu yang dihitung adalah seluruh posyandu tanpa mengkategorikan jenis-jenis posyandu tersebut. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.68 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Posyandu	Unit	625	625	623	621	623	-0,08
2.	Jumlah Balita	Anak	15.832	18.713	16.917	17.653	16.814	2,05
3.	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/ anak	39,48	33,40	36,83	35,18	37,05	-1,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, rasio posyandu per satuan balita sebesar 39,48, artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 39 posyandu. Angka tersebut menurun menjadi 33,40 pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 36,83 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka tersebut kembali menurun menjadi 35,18. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio posyandu per satuan balita menurun menjadi 37,05 yang berarti setiap 1.000 balita dilayani oleh 37 posyandu.

7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Berikut adalah rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.69 Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Puskesmas	Unit	18	18	18	18	18	0,00
	Puskesmas Pembantu	Unit	9	9	9	9	9	0,00
	Klinik	Unit	74	86	88	92	88	4,68
	Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik	Unit	101	113	115	119	115	3,44
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055	0,19
3.	Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk		24,58	27,48	27,87	28,75	27,77	3,24

Sumber: Dinas Kesehatan 2020 Kota Yogyakarta, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, rasio puskesmas/klinik/pustu sebesar 24,58 yang artinya terdapat 24 puskesmas/klinik/pustu yang melayani 100.000 penduduk. Pada tahun 2016, rasio ini meningkat menjadi 27 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk, kemudian tetap 27 puskesmas/klinik/pustu melayani 100.000 penduduk pada tahun 2016. Rasio puskesmas/klinik/pustu kembali meningkat hingga menjadi 28 puskesmas/klinik/pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Meningkatnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2016-2018 disebabkan oleh meningkatnya jumlah klinik, sedangkan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2015-2018. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio puskesmas/klinik/pustu menurun menjadi 27 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Penurunan rasio puskesmas/klinik/pustu ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah klinik, dari 92 unit di tahun 2018 menjadi 88 unit di tahun 2019. Penurunan jumlah klinik ini dikarenakan ada beberapa klinik yang belum memperbaiki ijin dan ada klinik yang tutup.

8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lengkap dan baik. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.70 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Rumah Sakit	unit	17	20	21	21	20	4,47
2.	Jumlah penduduk	jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055	0,19
3.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk		0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	4,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020; Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2019, rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia lima rumah sakit. Angka tersebut sama dengan tahun sebelumnya meskipun jumlah rumah sakit pada tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya satu rumah sakit yang tutup karena sudah tidak bisa membiayai operasional sendiri.

9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.71 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Dokter Umum	Orang	252	252	573	363	416	26,33
2.	Dokter Spesialis	Orang	372	496	662	651	493	10,22
3.	Dokter Gigi	Orang	86	115	243	145	93	17,21
4.	Jumlah Dokter	Orang	710	863	1.478	1.159	1.002	14,42
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055	0,19
6.	Rasio per satuan penduduk		1,73	2,10	3,58	2,80	2,42	14,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020; Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, rasio dokter sebesar 1,73 yang artinya terdapat satu dokter di setiap 1.000 penduduk. Angka ini

meningkat menjadi 2,10 pada tahun 2016, karena jumlah dokter spesialis dan dokter gigi yang membuka praktik mengalami kenaikan. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga mencapai 3,58 pada tahun 2017. Kenaikan terjadi karena pada tahun 2017 jumlah dokter yang ada meningkat dengan signifikan, meskipun jumlah penduduk juga bertambah. Pada tahun 2018 rasio dokter mengalami penurunan mencapai 2,80 yang artinya terdapat dua dokter di setiap 1.000 penduduk. Selanjutnya pada tahun 2019, rasio dokter mengalami penurunan menjadi 2,42 yang artinya terdapat dua dokter di setiap 1.000 penduduk.

10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk.

Tabel 2.72 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah Perawat	Orang	827	2.192	2.434	2.803	2.309	43,41
2	Jumlah Perawat gigi	Orang	99	91	140	89	80	-0,19
3	Jumlah Bidan	Orang	307	298	377	397	311	1,81
4	Jumlah Total	Orang	1.233	2.581	2.951	3.289	2.700	29,30
5	Jumlah Penduduk	Orang	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055	0,19
6	Rasio Perawat	per 1000	2,01	5,33	5,90	6,77	5,58	43,16
7	Rasio Perawat gigi	per 1.000	0,24	0,22	0,34	0,21	0,19	-0,40
8	Rasio Bidan	per 1.000	0,75	0,72	0,91	0,96	0,75	1,59
	Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk	per 1.000	3,00	6,28	7,15	7,95	6,52	29,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020; Hasil Olahan 2020

Tabel di atas menunjukkan rasio perawat di Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 43,41% selama lima tahun terakhir. Demikian pula dengan rasio bidan yang memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,59% per tahun. Sedangkan, rasio perawat gigi memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan -0,40% per tahun. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk secara umum memiliki tren meningkat.

11. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam,

hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda, dan (3) komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (pre-eklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 2.73 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Orang	1.005	942	1.009	1.169	1.067	1,99
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	925	843	846	841	1.067	4,44
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	108,65	111,74	119,27	139,00	100,00	-0,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Yogyakarta mengalami penurunan yaitu dari 108,65% menjadi 100%. Cakupan terendah adalah tahun 2019 dan tertinggi terjadi pada tahun 2018.

Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka besaran cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta sudah melebihi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 80%. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar seluruh komplikasi pada ibu hamil dan melahirkan dapat selalu ditangani dengan baik.

12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019.

Tabel 2.74 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Orang	3.981	3.840	3.617	3.587	3.343
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang	3.982	4.213	4.228	3.587	3.346
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	99,97	91,15	85,55	100,00	99,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dikatakan cukup baik karena masih berada di kisaran 90%-100%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tidak mencapai 100% pada tahun 2014-2016 dan 2019. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan belum mencapai 100% disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan dan pendampingan Ibu hamil yang kurang optimal. Hal ini menandakan perlunya peningkatan indikator ini hingga mencapai 100% setiap tahun, agar seluruh ibu melahirkan mendapatkan pertolongan yang baik dan sesuai standar, hingga nantinya akan memberikan efek positif berupa menurunnya angka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan.

13. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.75 Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kelurahan UCI	Unit	45	45	45	45	45
2.	Jumlah Seluruh Kelurahan	Unit	45	45	45	45	45
3.	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 telah mencapai 100% sesuai dengan target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas maupun rumah sakit.

14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwasiorkor*, dan *marasmus-kwasiorkor*). Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.76 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Anak	109	96	89	80	84
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	109	96	89	80	84
3.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Merujuk pada tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100%). Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sebesar 100%, maka cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta sudah mampu mencapainya.

15. Presentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.77 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	anak	4.036	3.837	3.540	3.389	3.345	-4,56
2.	Jumlah anak usia 1 tahun	anak	4.113	3.955	3.686	3.483	3.429	-4,43
3.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	persen	98,13	97,02	96,04	97,30	97,55	-0,14

Sumber Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 98,13% dan terendah adalah tahun 2017 dengan angka sebesar 96,04%. Pada tahun 2017, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena baik dari jumlah anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak, dan jumlah anak usia satu tahun berkurang. Selanjutnya persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terus mengalami peningkatan hingga mencapai 97,55% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya optimalisasi sweeping bayi yang belum imunisasi sesuai jadwal dan meningkatnya kesadaran masyarakat.

16. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Kasus AFP (*acute flaccid paralysis*) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh rudapaksa/trauma/kecelakaan. AFP dapat terjadi pada beberapa penyakit salah satunya karena virus polio. *AFP non polio* adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus *AFP non polio* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Kepmenkes 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang pelaksanaan surveilans AFP menuju Indonesia bebas Polio, pengukuran indikator *non polio AFP rate* ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

Tabel 2.78 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	orang	1	2	4	2	6
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	orang	89.036	89.522	93.223	88.299	87.880
3.	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk		1,12	2,23	4,29	2,27	6,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus AFP non polio di Kota Yogyakarta secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 ada satu orang penderita, dan pada tahun 2016 naik menjadi dua orang. Kemudian pada tahun 2017 naik kembali menjadi empat orang penderita dan pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus menjadi dua orang. Selanjutnya jumlah tersebut meningkat menjadi 6 orang pada tahun 2019. Sedangkan *rate*-nya berada pada rentang 1,12 – 6,83 per 100.000 penduduk. Angka AFP non Polio tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 6,83 per 100.000 penduduk. Angka AFP non Polio terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 1,12 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non Polio AFP Rate adalah minimal 3. Peningkatan non polio AFP Rate disebabkan adanya sistem kewaspadaan dini dan respon yg baik sehingga ditemukan AFP lebih banyak untuk kewaspadaan polio.

17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Diberikan tatalaksana atau ditangani adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

Tabel 2.79 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Anak	396	760	823	1.178	1.540
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Anak	2.030	1.777	1.783	1.783	1.783
3.	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	Persen	19,51	42,77	46,16	66,07	86,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Tabel di atas menunjukkan cakupan balita pneumonia yang ditangani di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019. Secara umum, pada akhir periode terjadi peningkatan cakupan balita pneumonia ditangani bila dibandingkan dengan awal periode. Tahun 2015 cakupan hanya sebesar 19,51%, kemudian terjadi kenaikan yang signifikan bahkan lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2016, yaitu mencapai 42,77%. Penurunan jumlah perkiraan penderita Pneumonia pada tahun 2016 terjadi karena adanya perubahan estimasi Kementerian Kesehatan dimana sasaran pneumonia adalah sebesar 4,32% dari jumlah balita MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit). Cakupan balita pnemonia yang ditangani terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka sebesar 86,37% pada tahun 2019. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena penemuan penderita yang ditangani rumah sakit naik disebabkan oleh administrasi rumah sakit yang semakin tertib dalam melaporkan data penanganan penderita. Hal

ini justru baik karena semakin banyak yang ditangani dan dilaporkan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit.

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.80 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Orang	355	369	547	564	604
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Orang	265	262	621	710	770
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	133,96	140,84	88,08	79,44	78,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020; Hasil Olahan, 2020

Tabel di atas menunjukkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mulai dari tahun 2015 hingga 2019. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Akan tetapi, pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah perkiraan kasus pada tahun 2017 dinaikkan dari tahun 2016, namun pada realitanya kasus TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati tidak sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga nilai cakupannya turun meskipun jumlah kasus yang ditemukan meningkat dibanding tahun 2016. Pada tahun 2019 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 78,44%, angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BCA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan penanganan penderita penyakit TBC BTA.

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

Tabel 2.81 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang	440	594	551	556	604
2.	Jumlah Penduduk	Orang	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055
3.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	107,09	144,43	133,51	134,31	145,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Jumlah penderita kasus TB (baru dan lama) di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan jumlah kasus terendah sebanyak 440 kasus di tahun 2015 dan kasus tertinggi sebanyak 604 kasus di tahun 2019. Pada tahun 2015 tingkat prevalensi tuberkulosis sebesar 107,09 per 100.000 penduduk, kemudian naik menjadi 144,43 di tahun 2016. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 440 kasus menjadi 594 kasus penderita TBC. Hal ini disebabkan kolaborasi penemuan kasus TB melibatkan beberapa program misalnya KIA (Kesehatan Ibu Anak), HIV dan DM (Diabetes Melitus). Alasan diadakan kolaborasi penemuan kasus TB karena TB sangat rentan sekali menyerang anak-anak, penderita HIV dan DM (Diabetes Melitus) dimana daya tahan tubuh mereka rendah untuk melawan bakteri/kuman penyebab TB. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat prevalensi tuberkulosis menurun menjadi 133,51. Hal tersebut dikarenakan kolaborasi antar program yang terkait TB belum maksimal, sehingga masih sangat diperlukan kerjasama yang maksimal agar kasus TB bisa ditemukan semaksimal mungkin dan dapat segera terobati. Selanjutnya pada tahun 2018 tingkat prevalensi tuberkulosis meningkat menjadi sebesar 134,31 dan angka tersebut kembali meningkat menjadi 145,87 per 100.000 penduduk di tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kegiatan aktif *case funding*.

20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000. Tingkat kematian TB di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Orang	8	12	13	20	56
2.	Jumlah Penduduk	Orang	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055
3.	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	1,95	2,92	3,15	4,83	13,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena tuberkulosis bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tingkat kematian tertinggi karena tuberkulosis terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 13,52 artinya terdapat 13-14 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Sementara itu, tingkat kematian karena tuberkulosis terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,95, artinya terdapat 1-2 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pasien TB yang meninggal dunia yaitu sebanyak 56 orang. Kenaikan jumlah kematian tersebut tidak hanya disebabkan oleh TB itu sendiri, akan tetapi juga disebabkan oleh penyakit-penyakit penyerta seperti HIV dan DM (Diabetes Melitus). Hal tersebut dikarenakan adanya pengembangan kasus TB dimana kasus HIV dan DM ikut dimasukkan. Alasan diadakan pengembangan kasus TB karena TB sangat rentan sekali menyerang anak-anak, penderita HIV dan DM (Diabetes Melitus).

21. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) adalah strategi pengendalian Tuberkulosis (TB) yang dikembangkan oleh WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Berikut merupakan tabel proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.83 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	839	1.001	944	943	1.048
2.	Jumlah pasien baru TB paru BTA	Orang	355	388	386	399	428
3.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	236,34	257,99	244,56	236,34	244,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS bersifat fluktuatif. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 257,99%. Sementara itu, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah terjadi pada tahun 2015 dan 2018, yaitu sebesar 236,34%. Jumlah pasien baru TB paru BTA dari kurun waktu tahun 2015–2019 mengalami fluktuasi dengan jumlah pasien baru TB paru BTA paling sedikit terjadi pada tahun 2015 dan tertinggi terjadi pada tahun 2019.

22. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen. Tabel berikut ini merupakan data proporsi indikator tersebut di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.84 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Orang	326	277	277	277	304
2.	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	Orang	428	359	398	398	411
3.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	76,17	77,16	69,60	69,60	73,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Secara umum, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2019. Pada awalnya terjadi peningkatan, yaitu dari 76,17% di tahun 2015 menjadi sebesar 77,16% di tahun 2016. Pada tahun 2016 dilakukan pengembangan penemuan kasus Tuberkulosis melalui kolaborasi lintas program. Kolaborasi lintas program dilakukan dengan memasukkan kasus KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan HIV dalam perhitungan. Penurunan cakupan terjadi karena kolaborasi lintas program tersebut masih belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi sebesar 69,60% dan stagnan pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, proporsi TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS meningkat menjadi 73,97%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan tatalaksana, pemberian PMT, dan pemberian reward. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa belum semua pasien yang diobati berhasil sembuh.

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah presentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.85 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	945	1.705	414	113	476
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	945	1.705	414	113	476
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Apabila melihat pada tabel di atas, terjadi peningkatan yang signifikan jumlah penderita DBD di tahun 2016. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya siklus 5 tahunan DBD di Kota Yogyakarta. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani.

24. Penderita Diare yang Ditangani

Definisi indikator ini adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

Tabel 2.86 Penderita Diare yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	Jiwa	11.668	10.892	9.081	9.757	9.453
2.	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	Jiwa	8.760	11.105	8.832	11.144	11.143
3.	Penderita diare yang ditangani	Persen	133,20	98,09	102,82	87,55	84,83

Sumber: Dinas Kesehatan 2020, Hasil Olahan 2020

Cakupan penderita diare di tahun 2015 sebesar 133,20% dan di akhir periode menurun menjadi 84,83%. Secara umum cakupan penanganan diare mengalami fluktuasi meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017. Penurunan persentase penderita diare yang ditangani dikarenakan penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dikarenakan peningkatan sarana sanitasi.

25. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jiwa	81	208	159	161	123
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055
3.	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	0,020	0,051	0,039	0,039	0,030

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien HIV AIDS di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV AIDS terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 0,020%. Sementara itu, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai 0,051%. Pada awal periode (tahun 2015) jumlah pasien HIV AIDS 81 orang, di akhir periode (tahun 2019) meningkat menjadi 123 orang. Hal ini menunjukkan bahwa akses ARV (*Anti Retro Viral*) bagi orang dengan HIV/ AIDS lebih baik.

Terjadi kenaikan signifikan pada jumlah pasien penderita HIV dan AIDS di tahun 2016 dimana tahun sebelumnya hanya berjumlah 81 orang menjadi 208 orang. Kenaikan jumlah pasien HIV pada tahun 2016 dikarenakan jumlah layanan HIV di Kota Yogyakarta bertambah. Dengan bertambahnya jumlah layanan HIV, maka jumlah pelacakan/penemuan kasus HIV di Kota Yogyakarta juga semakin meningkat. Terdapat 4 Puskesmas yang bisa melayani ARV (*Anti Retro Viral*) di Kota Yogyakarta, yaitu Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Umbulharjo 1, Puskesmas Mantrijeron, dan Puskesmas Tegalrejo.

26. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS adalah indikator dalam agenda MDGs yang digunakan untuk mencapai tujuan MDGs yaitu mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV AIDS hingga tahun 2015. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektifitas program penyebarluasan informasi, pendidikan, program komunikasi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS, khususnya pada populasi orang muda berusia 15-24 tahun. Indonesia hingga tahun 2015 belum berhasil menuntaskan tujuan dari MDGs tersebut, sehingga program untuk pemberantasan HIV

AIDS masih terus dilanjutkan dalam SDGs, namun indikator ini tidak digunakan lagi dalam SDGs.

Tabel 2.88 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS	Jiwa	498	2.791	3095	3.127	3.930
2.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun	Jiwa	64.066	64.417	64.493	64.413	64.958
3.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	0,78	4,33	4,80	4,85	6,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data di atas, proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS secara umum masih sangat sedikit, yaitu tidak sampai 10%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat sedikit penduduk usia 15-24 tahun di Kota Yogyakarta yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Meskipun begitu, persentase yang ada menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya.

27. Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan, tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

Tabel 2.89 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Jenis Penyakit	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyakit Jantung	97	122	26	30	245
2.	Kanker	316	333	323	401	558
3.	Gangguan Jiwa Berat	836	797	969	939	1.190
4.	Gagal Ginjal	529	641	722	898	981
5.	Anemia	1.393	1.353	1.157	1.373	872
6.	Stroke	1.048	1.220	1.344	1.763	350
7.	Asma	2.939	2.824	2.786	2.659	2.607
8.	Diabetes	9.543	9.517	9.036	9.272	11.046
9.	Hipertensi	20.636	21.508	19.897	21.262	26.400

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah penderita penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif. Hipertensi, diabetes, asma, gangguan

jiwa berat, gagal ginjal dan anemia merupakan enam penyakit tidak menular yang terbanyak di Kota Yogyakarta. Dari keenam penyakit tidak menular tersebut, pertumbuhan tertinggi yaitu pada penyakit gagal ginjal, sebesar 16,86 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah itu pada penyakit anemia, sebesar -8,79 persen. Meskipun begitu, jumlah penderita penyakit asma pada tahun 2019 masih tetap terhitung cukup banyak.

Jumlah penderita penyakit tidak menular yang sangat tinggi yaitu hipertensi. Bahkan rata-rata jumlah penderita penyakit ini selama tahun 2015-2019 mencapai angka 21.941 penderita per tahun.

28. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan rujukan pasien miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata satu pada kurun waktu tertentu (lama dan baru). Jumlah kunjungan tersebut meliputi pasien rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut.

Tabel 2.90 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	jiwa	160.244	165.181	182.704	193.544	N/A	N/A
2.	Jumlah masyarakat miskin	jiwa	105.632	60.230	60.195	60.213	N/A	N/A
3.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	151,70	274,25	303,52	321,43	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2017 menunjukkan kecenderungan meningkat. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin bahkan mencapai lebih dari 100%. Hal ini terjadi karena pasien yang ditangani tidak hanya berasal dari Kota Yogyakarta saja. Angka cakupan yang melebihi 100% menunjukkan bahwa pasien rujukan miskin dapat tertangani dengan baik. Pada tahun 2018-2019 data tidak dapat ditampilkan karena tidak ada data pilah, hanya dibedakan BPJS dan pasien umum. Masyarakat di Kota Yogyakarta mendapatkan fasilitas bebas biaya berobat ke puskesmas di wilayah tempat tinggalnya.

29. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan

sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.91 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3.647	3.526	3.235	3.270	3.342
2.	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	orang	3.972	3.841	3.621	3.585	3.345
3.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	91,82	91,80	89,34	91,21	99,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020; Hasil Olahan 2020

Tabel di atas menggambarkan cakupan kunjungan bayi dalam kurun waktu lima terakhir. Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 cakupan kunjungan bayi adalah sebesar 91,82% dan terus menurun menjadi sebesar 89,34% di tahun 2017, kemudian naik lagi di tahun 2018-2019 menjadi sebesar 99,91%.

Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Standar tersebut merupakan KN Lengkap (Kunjungan Lengkap). Pada saat bayi dilahirkan adalah KN 1 atau kunjungan yang pertama. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si ibu membawa bayi ke fasilitas kesehatan lain seperti Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan di luar Kota Yogyakarta. Alasan lain adalah karena si bayi sama sekali tidak melanjutkan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Sebagai catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Yogyakarta.

30. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah kecamatan. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

Tabel 2.92 Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah puskesmas	Unit	18	18	18	18	18
2.	Jumlah kecamatan	Unit	14	14	14	14	14
3.	Cakupan puskesmas	Persen	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh puskesmas di Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan dari tahun 2015-2019 yaitu 18 unit puskesmas. Jumlah kecamatan yang ada di sana berjumlah 14 unit, sehingga cakupan puskesmas adalah 128,57%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kecamatan minimal sudah memiliki satu unit puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan, sehingga idealnya minimal dalam satu kecamatan terdapat satu puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat setempat.

31. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

Tabel 2.93 Cakupan Pembantu Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pembantu puskesmas	Unit	9	9	9	9	9
2.	Jumlah kelurahan	Unit	45	45	45	45	45
3.	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan angka yang tetap. Pada tahun 2015-2018 tersedia 9 puskesmas pembantu (pustu).

32. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

Tabel 2.94 Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Orang	4.247	3.832	3.809	3.791	3.407
2.	Jumlah sasaran ibu hamil	orang	4.627	4.213	4.228	4.207	3.855
3.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	91,79	90,96	90,09	90,11	88,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 91,79% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 88,38%. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2015-2019 secara umum memiliki trend yang menurun meskipun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2018. Penurunan kunjungan ibu hamil terjadi karena mobilitas ibu hamil yang tinggi, yang memungkinkan melakukan kunjungan ke 2, 3 ataupun ke 4 di fasilitas kesehatan lain (di luar Kota Yogyakarta). Sementara itu, komunikasi pemberi layanan dengan ibu hamil tidak berjalan lancar sehingga pemantauan pelayanan ibu hamil tidak dapat dilaporkan. Dinas Kesehatan hanya melakukan pencatatan terhadap kunjungan ibu hamil di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta.

33. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Masa nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

Tabel 2.95 Cakupan Pelayanan Nifas di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	orang	3.751	3.539	3.342	3.253	3.120
2.	Jumlah seluruh ibu nifas	orang	3.982	3.841	3.617	3.585	3.346
3.	Cakupan pelayanan nifas	Persen	94,20	92,14	92,40	90,74	93,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan nifas tahun 2015-2019 di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan cakupan pada tahun 2015, yaitu dari

94,20% menjadi 93,25%. Hal ini dikarenakan mobilitas ibu nifas yang cukup tinggi sampai masa nifas, sehingga pemantauan pelayanan ibu nifas tidak dapat dilaporkan.

34. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis*, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah <2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.

Tabel 2.96 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Orang	509	522	508	428	472
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Orang	596	576	543	606	472
3.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	85,40	90,63	93,55	70,63	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

Tabel di atas menunjukkan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Yogyakarta tahun 2015 hingga 2019. Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah sebesar 85,40%, kemudian meningkat menjadi 90,63% pada tahun 2016. Angka tersebut terus meningkat menjadi 93,55% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani turun cukup signifikan menjadi 70,63%. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami kenaikan hingga mencapai angka 100%, artinya semua neonatus dengan komplikasi berhasil ditangani. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, maka data di atas menunjukkan tren yang positif.

35. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Sedangkan pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, serta daya lihat.

Tabel 2.97 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Orang	12.339	12.588	11.840	12.253	14.180
2.	Jumlah seluruh anak balita	Orang	18.919	18.713	16.917	17.653	16.814
3.	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	65,22	67,27	69,99	69,41	84,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan anak balita tahun 2015-2019 di Kota Yogyakarta. Secara umum cakupan pelayanan anak balita di akhir periode mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan cakupan di awal periode, yaitu dari 65,22% menjadi 84,33%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

36. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah kabupaten /kota setempat. MP ASI yang diberikan adalah makanan seperti bubur kacang hijau dan makanan lain seperti yang ada di POSYANDU. Anggaran yang digunakan untuk menyediakan MP ASI bergantung pada kemampuan masing-masing PUSKESMAS, sehingga jumlah yang diberikan berbeda setiap tahunnya.

Tabel 2.98 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Anak	804	877	590	1.321	1.567
2.	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Anak	942	1.121	1.295	1.364	1.812
3.	Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	85,35	78,23	45,56	96,8	86,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2018 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin sebesar 85,35%. Angka ini terus menurun hingga menjadi 45,56% pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 96,8, hal ini dikarenakan pemenuhan PMT yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun program nasional. Pada tahun 2019 cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin menurun menjadi 86,48%. Hal ini dikarenakan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin bersifat promotif dan tidak termasuk dalam SPM. Anggaran kesehatan lebih difokuskan pada program/kegiatan yang mendukung pencapaian SPM, antara lain Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan penimbangan minimal 8 kali setahun.

37. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah murid SD yang diperiksa adalah murid SD kelas 1. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan.

Tabel 2.99 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Anak	7.856	6.966	6.880	6.904	55.035
2.	Jumlah murid SD dan setingkat	Anak	8.008	7.148	6.880	6.904	55.035
3.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Persen	98,10	97,45	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat menunjukkan peningkatan, meskipun sempat sedikit menurun di tahun 2016. Pada tahun 2015 cakupannya sebesar 98,10%, kemudian mengalami penurunan menjadi 97,45 pada tahun 2016. Selanjutnya cakupan meningkat menjadi 100% hingga di akhir periode. Pada periode tahun 2017-2019 cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat telah mencapai 100%, artinya semua murid SD dan setingkat telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih. Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dilaksanakan pada kelas 1-9 secara keseluruhan, namun pada tahun 2019 ini belum melibatkan jejaring fasilitas layanan kesehatan di wilayah.

38. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Jumlah kunjungan pasien ini meliputi jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama.

Tabel 2.100 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Jiwa	165.181	182.704	193.544	N/A	N/A
2.	Jumlah seluruh masyarakat miskin	jiwa	60.230	60.195	60.213	N/A	N/A
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	274,25	303,52	321,43	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, indikator cakupan pelayanan dasar pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2018-2019 data tidak tersedia, hal ini disebabkan pasien saat ini dibedakan sebagai pasien BPJS dan pasien umum. Pasien BPJS tidak hanya pasien miskin, tetapi semua penduduk yang membayar iur biaya. Semua masyarakat di Kota Yogyakarta telah tercover layanan BPJS Kesehatan Kelas 3.

39. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Tabel 2.101 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	14	14	15	16	15	14
2.	Jumlah RS	19	19	20	21	20	19
3.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	73,68	73,68	75,00	76,19	75,00	73,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua RS yang ada di Kota Yogyakarta memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Hal ini disebabkan beberapa RS khusus belum memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

40. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

Tabel 2.102 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani >24 jam	kasus	27	34	45	27	16
2.	Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	kasus	27	34	45	27	16
3.	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data dari tabel di atas, selama periode tahun 2015-2019 terdapat sejumlah KLB di Kota Yogyakarta. Tahun 2017 adalah tahun dimana jumlah KLB terbanyak yaitu 45 kejadian, sedangkan tahun 2019 jumlah kejadian KLB paling sedikit yaitu 16 kasus. Dari seluruh KLB yang terjadi kesemuanya sudah mampu ditangani <24 jam. Sehingga cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah 100%. Keberhasilan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

dikarenakan jejaring dan kemitraan yg bagus, adanya petugas surveilans puskesmas dan surveilans kelurahan yang menjalankan tugas dengan baik, serta adanya sistem kewaspadaan dini dan respon yang baik.

41. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2019 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.103 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	98,00%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	99,00%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,00%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,00%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100,00%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100,00%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2019 dari 12 target SPM, 8 target terealisasi 100% dan 4 target tidak terealisasi 100%. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi terkait indikator SPM ke fasilitas kesehatan swasta sehingga dalam pelayanan yang terkait program SPM belum dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal. Selain itu, masih ada pelayanan yang tidak dilaporkan oleh jejaring dan jaringan ke Puskesmas padahal telah dilakukan pelayanan sesuai standar oleh fasilitas kesehatan swasta ataupun fasilitas kesehatan pemerintah diluar kota Yogyakarta. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut

Dinas Kesehatan akan menyusun regulasi terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan dukungan fasilitas kesehatan swasta.

42. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.104 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	%	100	100	100	99,91	99,91
2	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	%	85,2	91,10	106,67	91,33	106,69
3	Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang	%	8,81	8,53	100,93	8,18	102,73
4	Prevalensi stunting	%	13	12,80	100,00	11,30	90
5	Jumlah kematian ibu	Orang	4	4	100	4	100
6	Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup	7,52	9,76	67,93	6,89	105,10
7	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/ransgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	%	100	100	100	100,00	100,00
9	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	100	100	100,00	100,00
10	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100,00	100,00
11	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100,00	100,00
12	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	%	100	100	100	100,00	100,00
13	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	%	80	96,00	117,07	96	117
14	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	%	88	96,00	102,13	96	102,13
15	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	85	95,40	106,00	95,89	106,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2020

Dilihat pada tabel diatas, dari 15 indikator SDGs dari bidang kesehatan tersebut masih terdapat 2 indikator yang belum tercapai 100% yaitu Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar dan Prevalensi stunting. Hal itu dipengaruhi beberapa hal yaitu adanya rasa malu untuk memeriksakan kehamilan

pada trimester pertama untuk kehamilan yang tidak diinginkan, ada obat yang tidak tersedia di e-katalog, ibu tidak merasakan tanda-tanda persalinan sehingga lahir di rumah dan masih ada bayi yang tidak IMD karena BBLR atau SC.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Walikota Nomor 356/KEP/2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Yogyakarta, maka terdapat duplikasi nama ruas jalan dengan nomor ruas jalan yang berbeda, ketidaksesuaian panjang dan lebar ruas jalan serta ketidaksesuaian ujung dan pangkal ruas jalan, sehingga Keputusan Walikota Nomor 356/KEP/2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti perwal nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan ruas-ruas jalan Kota Yogyakarta.

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,69% per tahun. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun ini diduga dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor panjang jalan yang tidak bertambah setiap tahun, bahkan cenderung menurun; dan faktor yang kedua yaitu pertumbuhan jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang secara umum mengalami peningkatan jumlah dengan rata-rata pertumbuhan sebanyak 1,15% per tahun. Hal tersebut mengindikasikan jika semakin banyaknya populasi penduduk yang ada tidak diimbangi dengan pertumbuhan (penambahan baik dalam segi pertambahan panjang maupun pelebaran) jalan. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Yogyakarta yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan.

Tabel 2.105 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah panjang jalan*	Km	248,09	248,09	233,21	233,21	233,21	-1,50
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055	0,19
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/1000	0,0604	0,0603	0,0565	0,0563	0,0563	-1,69

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020, dengan Hasil Olahan, 2020

Keterangan : *) Jumlah Panjang Jalan Bernomor Ruas Jalan

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk memperbaiki aksesibilitas ini yaitu dengan optimalisasi angkutan umum, sehingga diharapkan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi yang menjadi sumber kepadatan arus lalu lintas di Kota Yogyakarta. Selain itu, berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan untuk dilalui roda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

2. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)

Data kondisi jalan mantap (baik dan sedang) digunakan untuk mengganti data kondisi jalan dalam keadaan baik karena dinilai lebih dapat merepresentasikan kondisi jalan aktual di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.106 Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	216,695	234,41	190,254	191,087	200,85	-1,28
2.	Panjang seluruh jalan	Km	248,09	248,09	233,21	233,21	233,21	-1,50
3.	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	87,35	94,49	81,58	81,94	86,12	0,02
4.	SPM (Standar Pelayanan Minimal) Nasional	Persen	60	60	60	60	60	0,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Kondisi jalan mantap di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cukup fluktuatif. Terjadi kenaikan panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2015 ke tahun 2016, tetapi terjadi penurunan sampai dengan tahun 2018. Kemudian meningkat kembali di tahun 2019, hal tersebut membuat pertumbuhan rata-rata tahunannya negatif yaitu -1,28% per tahun. Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi mantap karena adanya penyesuaian dengan Perwal Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kota Yogyakarta. Persentase jalan Kota di Yogyakarta dalam kondisi mantap dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah 0,04 %. Angka persentase jalan dalam kondisi mantap Kota Yogyakarta masih jauh di atas SPM (Standar Pelayanan Minimal) Nasional yaitu 60%. Keadaan ini tentunya selaras dengan kondisi jalan di lapangan yang telah 100% mempunyai perkerasan aspal. Hal tersebut mengindikasikan jika kualitas dan kuantitas jalan yang ada di Kota Yogyakarta sudah baik.

3. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (Minimal 1,5 m)

Permendagri Nomor 86/2017 menyebutkan bahwa perhitungan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dilakukan dengan membagi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m) dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikalikan dengan bilangan 100. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta masih belum dapat menghitung secara detail terkait trotoar dan drainase yang memiliki identifikasi minimal 1,5 meter karena sulit dilakukannya. Sehingga indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dibuat secara umum (trotoar dan drainase semua ukuran).

Tabel 2.107 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	158,979	158,979	158,979	158,979	158,979	0,00
2.	Panjang seluruh jalan kota	Km	248,09	248,09	233,21	233,21	233,21	-1,50
3.	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	%	64,08	64,08	68,17	68,17	68,17	1,60

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak terjadi penambahan maupun pengurangan, atau dapat dikatakan jika kondisinya stagnan. Akan tetapi, pada tahun 2017 terjadi penurunan panjang jalan di Kota Yogyakarta yang menjadikan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan meningkat. Sehingga nilai pertumbuhan rata-ratanya menjadi 1,60% per tahun pada tahun 2019.

Secara umum dapat diasumsikan jika panjang jalan di Kota Yogyakarta yang telah memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air masih cukup rendah. Hal ini dikarenakan dalam satu ruas jalan belum tentu terdapat drainase dan atau trotoar. Sebagian besar jalan yang terdapat di lingkup wilayah Kota Yogyakarta hanya memiliki drainase dan atau trotoar di salah satu sisinya saja (ruas jalan kanan atau kiri saja). Oleh karena itu, nilai persentasenya masih berkisar 64,08% sampai dengan 68,17%.

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi memberikan gambaran kondisi sanitasi pada skala individu (rumah tangga). Keberadaan sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan pokok minimal seperti yang tercantum dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah. Persentase rumah tinggal bersanitasi dapat dihitung dari jumlah rumah berakses sanitasi dibandingkan dengan jumlah rumah tinggal dalam persen.

Tabel 2.108 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah rumah berakses sanitasi	Unit	76.534	79.973	80.074	80.319	140.906	20,15
2.	Jumlah rumah tinggal	Unit	82.713	83.158	83.156	83.156	142.144	17,87
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	92,53	96,17	96,29	96,59	99,13	1,75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020, dengan Hasil Olahan, 2020

Persentase rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,75% per tahun. Selain itu, terlihat pula jika pertumbuhan rata-rata jumlah rumah berakses sanitasi lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata jumlah rumah tinggal. Bertambahnya jumlah rumah berakses sanitasi karena rumah tinggal yang belum bersanitasi sudah tertangani, sedangkan meningkatnya jumlah rumah tinggal karena adanya pendataan rumah tinggal yang dilakukan di tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan jika banyak rumah tinggal (lama) yang dahulu belum berakses sanitasi, lambat laun dapat mengakses sanitasi dengan baik. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat upaya yang cukup baik dari dinas atau OPD terkait dalam memberikan pelayanan kebutuhan pokok minimal di Kota Yogyakarta.

5. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang

drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.109 Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang Drainase Kondisi Baik	Km	287,91	290,08	292,27	296,23	300,77	1,10
2.	Panjang Seluruh Drainase	Km	330,57	332,74	334,93	338,89	343,43	0,96
3.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	87,10	87,18	87,30	87,41	87,58	0,14

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Tren panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, yakni sebesar 287,91 km pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 300,97 km pada tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya adalah 1,10%. Hal tersebut juga selaras dengan peningkatan panjang seluruh drainase yang ada di Kota Yogyakarta dengan pertumbuhan 0,96% pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat menunjukkan grafik yang meningkat. Secara umum, drainase dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi drainase di Kota Yogyakarta sudah berada dalam kondisi yang baik dengan cakupan drainase dalam kondisi baik lebih besar dari 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta terutama dalam perbaikan drainase berhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

6. Persentase Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan Tidak Lebih Dari 2 Kali Setahun

Indikator selanjutnya adalah persentase tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) tidak lebih dari 2 kali setahun. Persentase tersebut didapatkan dari perbandingan antara total luasan daerah yang tergenang dengan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.110 Persentase Tidak Terjadi Genangan (Lebih Dari 30 Cm, Selama 2 Jam) dan Tidak Lebih Dari 2 Kali Setahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Total luasan yang tergenang	Ha	7,76	7,54	5,65	17,11	11,664	35,78
2.	Total luasan daerah rawan genangan	Ha	7,76	7,54	5,65	17,11	11,664	35,78
3.	Persentase Tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	100	100	100	100	100	0,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020

Total luasan daerah yang tergenang dengan total luasan daerah rawan tergenang di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan di tahun 2017, hal ini disebabkan karena adanya pendataan kembali oleh Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan karena luasan yang tergenang sudah tertangani.

7. Rasio Jaringan Irigasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan indikator ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat. Dalam skala provinsi di tahun 2019, ditargetkan 70% jaringan irigasi dapat memenuhi kebutuhan pertanian rakyat. Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan membandingkan ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam dengan kebutuhan irigasi berdasarkan rencana tata tanam.

Namun, data terkait irigasi di Kota Yogyakarta masih sangat minim. Terdapat dua indikator terkait irigasi, yaitu persentase irigasi kota dalam keadaan baik dan rasio jaringan irigasi. Dari kedua indikator tersebut hanya satu indikator yang dapat dianalisis yaitu indikator rasio jaringan irigasi.

Tabel 2.111 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang saluran irigasi		65	60	56	53,28	51,58	-5,60
2.	Luas lahan budidaya pertanian	Ha	62	60	56	57,6	57,6	-1,81
3.	Rasio Jaringan Irigasi		1,05	1,00	0,97	0,93	0,90	-3,86

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahsan, 2020

Berdasarkan data yang ada dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 panjang saluran irigasi dan luas budidaya pertanian menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pertumbuhan rata-rata panjang saluran irigasi sebesar -5,6% per tahun dan pertumbuhan rata-rata luas lahan budidaya pertanian sebesar -1,81% per tahun.

Kedua data tersebut berpengaruh pada rasio jaringan irigasi yang juga menunjukkan penurunan setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,86% per tahun.

Penurunan yang terjadi pada luas lahan budidaya pertanian tentunya akan berpengaruh pada panjang saluran irigasi, karena semakin sempit luas lahan pertanian maka akan semakin pendek pula saluran irigasinya. Berkurangnya luas lahan budidaya pertanian di Kota Yogyakarta diindikasikan karena perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (permukiman). Hal tersebut tidak dapat dihindari mengingat populasi penduduk di Kota Yogyakarta yang semakin bertambah dengan diiringi luas daerah yang stagnan. Selain itu, Kota Yogyakarta juga bukan wilayah yang berbasis pada sektor pertanian, sehingga luas lahan pertanian yang ada sangat sempit (terbatas).

8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan Kota Yogyakarta. Air minum berkualitas (layak) di Kota Yogyakarta bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air terlindungi, PDAM, dan BPPSPAM.

Tabel 2.112 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Penduduk berakses air minum	Jiwa	404.560	405.104	405.104	412.726	416,049	-24,47
2.	Jumlah penduduk	Unit	409.487	411.282	412.695	412.726	416,049	-24,78
3.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	98,80	98,50	98,16	100	100	0,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tahun 2020, Hasil Olahan 2020

Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 memiliki kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-ratanya sebesar 0,31% per tahun. Pada tahun 2018 dan 2019 persentase penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta sudah mencapai 100%. Pencapaian ini didukung adanya pengawasan eksternal, pengambilan sampel air minum, laboratorium kesehatan lingkungan yang memudahkan dalam pemeriksaan air, pembinaan depot air minum, pelatihan rencana pengamanan air minum dan pembinaan asosiasi depot air minum.

9. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Indikator areal kawasan kumuh ini didapatkan dengan perbandingan antara data luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dengan luasan wilayah Kota Yogyakarta keseluruhan. Indikator ini dapat merepresentasikan persentase luasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta secara *time series* yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.113 Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Kawasan Kumuh	Ha	264,89	222,92	191,62	50,39	75,32	-13,53
2.	Luas Wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	0,00
3.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	8,15	6,86	5,89	1,55	2,32	-13,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020, dengan Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan data yang ada, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan data yang cukup fluktuatif. Berdasarkan SK Walikota Nomor 393 Tahun 2014, sebagian besar permukiman tersebut umumnya terdapat di sepanjang bantaran Sungai Winongo, Sungai Code dan Sungai Gajah Wong. Selanjutnya, dikeluarkan SK Walikota Nomor 216 Tahun 2016 yang mengatur tentang permukiman kumuh di Kota Yogyakarta sebagai acuan dalam perhitungan permukiman kumuh yang tersebar di 36 kelurahan yang mencakup 229 RW. Wilayah dengan kawasan permukiman kumuh paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Mantrijeron.

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 50,39 Ha, tetapi pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 75,32 Ha. Pada tahun 2019 dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 yang dilakukan oleh Korkot Kota Yogyakarta, Satker/PPK PIP Kota Yogyakarta, dan Pokja PKP Kota Yogyakarta maka didapatkan hasil pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 257,82 Ha.

Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementerian Perumahan Rakyat, dan salah satu pihak swasta. Kemudian, terdapat program KOTAKU yang juga dapat menjadi sarana pengurangan pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

10. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk umum, yang berada dibawah pengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah. Terdapat empat TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan rician sebagai berikut.

Tabel 2.114 Kapasitas Pemakaman Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2018

No.	Nama TPU	Lokasi		Luas Area (Ha)	Daya Tampung (Unit) *per 2018
		Kelurahan	Kecamatan		
1.	TPU Sasanalaya	Keparakan	Mergangsan	12,65	4.611
2.	TPU Sarilaya	Mantrijeron	Mantrijeron	6,497	1.779
3.	TPU Pracimalaya	Wirobrajan	Wirobrajan	12,213	3.632
4.	TPU Utaralaya	Tegalrejo	Tegalrejo	16,764	3.421

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Melihat daya tampung TPU yang tetap, menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan cara untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman umum di masa mendatang yang semakin meningkat.

Tabel 2.115 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Unit	12.579	12.579	12.579	12.579	12.579	0
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055	0,19
3.	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk		30,61	30,58	30,48	30,39	30,38	-0.19

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikan dengan bilangan 1000. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk relatif tidak meningkat. Hal ini mengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, ditambah dengan luas dan daya tampung tempat pemakaman umum di Kota Yogyakarta yang cenderung stagnan (tidak bertambah).

11. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling

banyak adalah masjid. Keberadaan masjid di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan dan tetap berada pada angka 496 unit, kemudian terus meningkat hingga mencapai 518 unit pada tahun 2019. Mushola di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari 464 unit menjadi 487 unit, pada tahun 2019 jumlahnya tetap 487 unit. Gereja kristen pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjumlah tetap yaitu 41 unit, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 54 unit. Vihara pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlahnya tetap 6 unit, kemudian menurun menjadi 5 unit pada tahun 2018 dan 2019. Gereja katolik, Pura dan Klenteng jumlahnya tetap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.116 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Tempat Ibadah :							
	a. Masjid	Unit	496	496	496	517	518	1,11
	b. Mushola	Unit	464	468	470	487	487	1,23
	c. Gereja Kristen	Unit	41	41	41	41	54	7,93
	d. Gereja Katolik	Unit	7	7	7	7	7	0,00
	e. Pura	Unit	1	1	1	1	1	0,00
	f. Vihara	Unit	6	6	6	5	5	-4,17
	g. Klenteng	Unit	2	2	2	2	2	0,00
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055	0,19
3.	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk							
	a. Masjid	Unit/1000 Jiwa	1,21	1,21	1,20	1,25	1,25	0,91
	b. Mushola	Unit/1000 Jiwa	1,13	1,14	1,14	1,18	1,18	1,03
	c. Gereja Kristen	Unit/1000 Jiwa	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	7,73
	d. Gereja Katolik	Unit/1000 Jiwa	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,19
	e. Pura	Unit/1000 Jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19
	f. Vihara	Unit/1000 Jiwa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-4,35
	g. Klenteng	Unit/1000 Jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2020; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020; Hasil Olahan 2020

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 perkembangan rasio jumlah tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kota Yogyakarta, pada tempat ibadah Masjid, Mushola dan Gereja Kristen mengalami peningkatan, sedangkan pada tempat ibadah Gereja Katolik, Pura, Vihara dan Klenteng rasio tetap.

12. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Indikator dalam Lampiran 1 Permendagri No.86 Tahun 2017 salah satunya adalah indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat data luas wilayah ber-HPL/HGB berdasarkan sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dihitung dengan membandingkan luas RTH publik terhadap luas wilayah ber HPL dan HGB.

Tabel 2.117 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	619,189	619,405	189,628	190,467	190,68	-17,20
2.	Luas wilayah ber HPL	Ha	8,52	8,52	8,52	8,52	7,0343	-4,36
3.	Luas wilayah ber HGB	Ha	130,11	138,26	157,63	183,03	392,9897	37,78
4.	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL		72,67	72,70	22,26	22,36	27,11	-11,91
5.	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB		4,76	4,48	1,20	1,04	0,49	-36,44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2020; Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Pertumbuhan rata-rata rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL adalah -11,91% per tahun sedangkan pertumbuhan rata-rata rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB adalah -36,44%. Penurunan signifikan yang terjadi pada kedua rasio tersebut terjadi dikarenakan penurunan drastis pada luas RTH pada tahun 2017. Penurunan RTH pada tahun 2017 terjadi dikarenakan pembaharuan sumber data yang digunakan, sehingga angkanya yang dihasilkan adalah angka yang lebih valid dan rasional.

13. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Indikator luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan ini didapatkan dari pembagian luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dengan luas wilayah Kota Yogyakarta. Indikator ini dihitung untuk melihat kesesuaian luasan RTH publik di Kota Yogyakarta dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.118 Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha	619,189	619,405	189,628	190,467	190,680	-17,20
2.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan	Ha	650	650	650	650	650	0,00
3.	Luas Wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	0,00
4.	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	19,05	19,06	5,83	5,86	5,87	-17,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, luasan RTH publik yang ada di Kota Yogyakarta cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan yang cukup mencolok terjadi pada tahun 2017 dengan penurunan lebih dari 50% RTH publik dari tahun 2016. Hal tersebut membuat pertumbuhan rata-ratanya menunjukkan angka yang negatif yaitu -17,20% per tahun. Keadaan yang sama terjadi pada persentase luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah Kota Yogyakarta yang juga menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang negatif yaitu -17,20% per tahun.

Penurunan yang mencolok pada luasan RTH publik di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dikarenakan perbedaan metode dalam pengukuran luasan RTH publik tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, metode yang digunakan hanya menambahkan RTH publik yang terbangun setiap tahunnya tanpa melihat pengurangan RTH tersebut dari citra satelit. Selanjutnya pada tahun 2017 pengukuran telah menggunakan citra satelit yang terbaru sehingga, didapat luasan yang merepresentasikan keadaan di lapangan pada tahun 2017.

Kemudian tahun 2017 juga terdapat beberapa perubahan indentifikasi tutupan lahan, yang sebelumnya jalur pengaman jalan dan median jalan secara keseluruhan masuk pada hitungan RTH publik, pada tahun 2017 yang termasuk dalam hitungan luas tutupan lahan tersebut adalah jalur pengaman jalan dan median jalan yang ditanami perindang, yang dapat diinterpretasi secara manual melalui citra tersebut. Oleh karena itu, luas tutupan lahan di Kota Yogyakarta turun dengan drastis.

Selanjutnya, untuk mencapai luasan RTH minimal 30% dari total luasan wilayah, salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dengan membeli tanah yang diperuntukkan sebagai RTH publik. Contohnya pada tahun 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DISPERTARU (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) membeli tanah seluas 1.365 m². Tanah tersebut berada pada daerah Pringgokusuman seluas 172 m², Purwokinanti seluas 276 m², dan di daerah Kricak seluas 917 m². Pada

tahun 2018, luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM meningkat menjadi seluas 190,467 m². Pada tahun 2018 terdapat penambahan RTH publik di Pringgokusuman, Brontokusuman dan Kadipaten. Keadaan yang sama terjadi pada persentase luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah Kota Yogyakarta yang juga menunjukkan peningkatan menjadi 5,86%. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 5 lokasi baru RTH publik di Keparakan, Prenggan, Giwangan, Suryatmajan, dan Gedongkiwo dengan penambahan luas 2.252 m². Persentase luasan RTH publik pada tahun 2019 mencapai 5,87%. Keterbatasan wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km² menyebabkan kesulitan dalam penyediaan penambahan RTHP dengan keluasan yang memadai atau besar. Sampai tahun 2019, sudah ada 47 lokasi RTHP di wilayah Kota Yogyakarta.

14. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.119 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Bangunan ber- IMB	Unit	69.410	70.328	71.189	71.682	72.143	0,97
2.	Jumlah Bangunan	Unit	130.172	131.092	133.686	134.179	134.179	0,85
3.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan		0,533	0,536	0,533	0,534	0,536	0,12

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terus meningkat, yakni sebanyak 69.410 unit pada tahun 2015 hingga menjadi 72.143 unit di tahun 2019, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,97% per tahun. Tren rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, sama halnya dengan jumlah bangunan yang ber-IMB yang cenderung sama dengan tahun sebelumnya. Rasionya menunjukkan kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata dengan angka 0,12% per tahun.

15. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah ruang

publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publik yang tersedia. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak tercatat perubahan apapun pada ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.120 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	m ²	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2020

16. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Indikator rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan diperoleh dengan membagi data luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara dengan luas daratan di Kota Yogyakarta. Indikator ini tidak dapat dianalisis dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 karena keterbatasan data. Hanya data tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saja yang dapat diperoleh, sehingga rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara di Kota Yogyakarta hanya bisa dianalisis pada tahun tersebut.

Tabel 2.121 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	Ha	N/A	N/A	289,08	289,48	290,61
2.	Luas daratan	Ha	N/A	N/A	2.960,92	3.250	3.250
3.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan		N/A	N/A	0,0976	0,0891	0,0894

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Berdasarkan data di atas, rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 menunjukkan angka yang cukup rendah yaitu 0,0976. Hal tersebut dikarenakan Kota Yogyakarta hanya memiliki tutupan vegetasi yang minim. Hal ini juga selaras dengan minimnya RTH publik yang dimiliki Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Data tahun 2017 didapatkan karena adanya pembaharuan citra satelit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk memperbarui data RTH dan data terkait tutupan lahan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2018 rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta menunjukkan

angka 0,0891. Selanjutnya, rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta meningkat menjadi 0,0894 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut karena adanya penambahan perhitungan pada tutupan vegetasi embung langensari seluas 1,4031 Ha.

17. Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator ketaatan terhadap RTRW ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan dengan angka 100. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, indikator tersebut memiliki definisi yang sama dengan indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW. Namun, perhitungan terkait indikator tersebut baru mulai dilaksanakan mulai tahun 2017.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2018 didapatkan angka persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kota Yogyakarta sebesar 77,13%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada sekitar 32,87% bagian wilayah di Kota Yogyakarta yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW yang ada. Sedangkan pada tahun 2019 didapatkan angka persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kota Yogyakarta sebesar 78,45%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada sekitar 21,55% bagian wilayah di Kota Yogyakarta yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW yang ada. Fungsi hunian, perdagangan jasa, perkantoran mengalami perubahan yang cukup dinamis naik turun selama rentang waktu 3 tahun. Fungsi sarana pendidikan, sarana olahraga serta rekreasi dan sarana kesehatan dan keagamaan cenderung mengalami peningkatan luas pemanfaatan dari tahun ke tahun, luas sawah dan tanah produktif non-sawah cenderung mengalami penyusutan dari tahun ke tahun.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam masalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW salah satunya dengan cara melakukan *review* RTRW dan melakukan kebijakan ketentuan dominasi pada suatu cakupan wilayah, sehingga semisal pada peruntukkan perdagangan boleh saja digunakan untuk permukiman asal dominasinya masih pada perdagangan.

18. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum pada tahun 2019 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.122 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100,00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2019 dari 2 target SPM telah tercapai 100%.

19. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pekerjaan umum disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.123 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	%	83,22	84,05	100,06	84,06	100,00
2	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	%	82	84,00	100,00	86,20	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Dilihat pada tabel diatas, 2 indikator SDGs dari bidang pekerjaan umum sudah tercapai 100%. Tercapainya hal tersebut adalah upaya Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan dukungan anggaran baik melalui APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY melalui Dana Keistimewaan, APBN maupun CSR.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Menurut Permendagri Nomor 86/2017, dirumuskan bahwa rasio rumah layak huni sebagai perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Dari tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan meningkat, dari yang semula berjumlah 89.771 unit di tahun 2015 menjadi 121.388 unit di tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,67% per tahun.

Tabel 2.124 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah rumah layak huni	Unit	89.771	89.966	90.193	91.167	121.388	8,67
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055	0,19
3.	Rasio rumah layak huni		0,218	0,219	0,219	0,220	0,293	8,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Rasio rumah layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 memiliki kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-ratanya sebesar 8,48% per tahun. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi sebanyak 121.388. Hal tersebut disebabkan karena data sebelum tahun 2019 memakai data rumah sensus dari BPS, setelah tahun 2019 memakai pendataan rumah dari DPUPKP.

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasio permukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman.

Tabel 2.125 Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Permukiman Layak Huni	Ha	2.723,1	2.765,08	2.796,38	2.937,61	2.912,68	1,72
2.	Luas Wilayah Permukiman	Ha	2.988	2.988	2.988	2.988	2.988	0,00
3.	Rasio permukiman layak huni		0,91	0,93	0,94	0,98	0,97	1,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 dengan Hasil Olahan 2020

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Yogyakarta dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun rasio permukiman layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2018 stagnan dengan kecenderungan meningkat, namun pada tahun 2019 rasio pemukiman layak huni menurun. Namun menurunnya rasio pemukiman layak huni di

tahun 2019 tidak berpengaruh dengan nilai pertumbuhan rata-rata rasio permukiman layak huni di Kota Yogyakarta yang cenderung meningkat yaitu 1,72% per tahun.

Berdasarkan data yang ada, terjadi penurunan luas areal permukiman layak huni dari tahun 2019. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan updating data rumah layak huni (pendataan tahun 2019).

3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan dikalikan dengan 100. Indikator ini hampir sama dengan indikator rasio rumah layak huni, akan tetapi pembagiannya yang berbeda. Indikator ini akan dapat menunjukkan persentase rumah layak huni yang ada di Kota Yogyakarta secara *time series* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.126 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit	89.771	89.966	90.193	91.167	121.388	8,67
2.	Jumlah seluruh rumah	Unit	130.172	131.092	133.686	134.179	124.372	-1,06
3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	68,96	68,63	67,47	67,94	97,60	10,54

Sumber: Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung menurun, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 97,60% dengan pertumbuhan rata-rata 10,54% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya pendataan kembali rumah layak huni pada tahun 2019.

Indikator cakupan rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Yogyakarta. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Persepsi rumah tidak layak huni menurut Profil Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2004 yaitu keluarga yang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis, estetika, dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak huni diantaranya adalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan, bambu yang mudah rusak tertiuip angin; (c) tidak memiliki ventilasi; (d) atap mudah bocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukan ruang; (f) tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, sempit, dan berhimpitan.

Faktor penyebab keluarga tinggal di rumah tidak layak huni adalah (a) miskin secara ekonomi; (b) pengaruh lingkungan rumah tinggal; (c) sekedar untuk tempat berteduh selama tinggal dan bekerja di kota; (d) tidak memiliki pengetahuan tentang rumah sehat; dan (e) penghuninya malas dan masa bodoh. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpai di wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, Manunggal maupun Gajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel kereta api, kolong jembatan, atau terminal.

Selanjutnya, menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni di Kota Yogyakarta, kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di Kota Yogyakarta diantaranya adalah (a) luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m² per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m² per orang (bobot nilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2); (c) bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan *gedheg*, kayu kualitas rendah (bobot nilai 2); serta (d) adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2). Berdasarkan dengan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlah antara 1-4, maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah kurang layak huni, sedangkan jika bobot nilai berjumlah ≥ 5 , maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni.

Tabel 2.127 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah tidak Layak Huni	Unit	3.009	2.784	2.640	1.798	2.984

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020, dengan Hasil Olahan 2020

Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta, tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Selanjutnya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terlihat jika jumlah RTLH di Kota Yogyakarta selalu mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan penanganan terhadap RTLH telah efektif dilaksanakan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu program penanganan RTLH dari dana APBD yang bekerjasama dengan TNI dalam program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa). Selanjutnya, yaitu program penanganan RTLH yang dananya berasal dari pusat melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan yang terakhir yaitu penanganan RTLH melalui DAK (Dana Anggaran Khusus) untuk RTLH. Melihat tren penurunan jumlah RTLH di Kota Yogyakarta ini, maka dapat diartikan jika kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi permukiman kumuh secara umum dan rumah tidak layak huni secara khusus telah dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan adanya pendataan ulang pada perumahan dan RTLH di tahun 2019.

4. Persentase Permukiman yang Tertata

Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014 mendefinisikan permukiman sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Luas permukiman yang tertata dihitung dengan melihat luas area permukiman yang ada dikurangi dengan luas permukiman kumuh/tidak layak huni yang cenderung tidak teratur, dan memiliki kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase luas permukiman yang tertata dihitung dengan membandingkan luas permukiman yang tertata dengan luas area permukiman keseluruhan dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.128 Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas area permukiman yang tertata	Ha	2.723,1	2.765,08	2.796,38	2.937,61	2.912,68	1,72
2.	Luas keseluruhan area permukiman	Ha	2.988	2.988	2.988	2.988	2.988	0,00
3.	Persentase luas permukiman yang tertata	%	91,18	92,54	93,59	98,31	97,48	1,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020, Hasil Olahan 2020

Adapun jumlah luasan permukiman yang tertata di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan kecenderungan meningkat, namun pada tahun 2019 terdapat penurunan. Hal tersebut berpengaruh pula pada nilai pertumbuhan rata-rata persentase luas permukiman yang tertata di Kota Yogyakarta menjadi 1,72% per

tahun. Berdasarkan data yang ada, terjadi penurunan luas areal permukiman yang tertata dari tahun 2018 menuju tahun 2019. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan adanya pendataan kembali luas areal pemukiman yang tertata di tahun 2019.

5. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh ini didapatkan dengan pembagian antara data luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah Kota Yogyakarta, dikalikan dengan 100. Indikator ini sama dengan indikator yang ada pada unsur pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan persentase permukiman kumuh yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.129 Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	264,89	222,92	192,751	50,39	75,32	-13,44
2.	Luas wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	0,00
3.	Lingkungan permukiman kumuh	%	8,15	6,86	5,93	1,55	2,32	-13,44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020, dengan Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan data yang cukup fluktuatif. Hal yang mencolok yaitu penurunan signifikan luasan kawasan kumuh dari tahun 2015 ke tahun 2019 yaitu dari 264,89 Ha menjadi 75,32 Ha. Hal tersebut berdasarkan perhitungan kesepakatan dengan KOTAKU yang dituangkan dalam berita acara Tahun 2019, sebagian besar permukiman tersebut umumnya terdapat di sepanjang bantaran Sungai Winongo, Sungai Code dan Sungai Gajah Wong.

Pada tahun 2016 dikeluarkan SK Walikota Nomor 216 Tahun 2016 yang mengatur tentang permukiman kumuh di Kota Yogyakarta sebagai acuan dalam perhitungan permukiman kumuh. Dalam SK tersebut menyebutkan bahwa terdapat 229 RW yang masuk dalam kategori kampung kumuh. Kampung-kampung kumuh tersebut tersebar hampir di seluruh kelurahan, seperti Kelurahan Gedongkiwo, Sorosutan, Suryatmajan, Prawirodirjan, Pringgokusuman, Kricak, Karangwaru, Ngupasan, dan lainnya. Wilayah dengan kawasan permukiman kumuh paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Mantriweron.

Pada tahun 2018 luasan kawasan kumuh di Pemerintah Kota Yogyakarta menurun cukup signifikan menjadi 50,39 Ha dari 192,751 Ha di tahun 2017. Salah satu program pengurangan kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak

Huni (BSPS RTLH) di beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementerian Perumahan Rakyat, dan salah satu pihak swasta. Kemudian, terdapat program KOTAKU yang juga dapat menjadi sarana pengurangan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

6. Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Indikator luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan ini didapatkan dari pembagian data luasan permukiman kumuh yang tertangani dengan luasan permukiman kumuh kemudian dikalikan dengan 100. Indikator ini dapat menunjukkan persentase luasan permukiman kumuh yang telah tertangani oleh pemerintah Kota Yogyakarta secara *time series*.

Tabel 2.130 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	Ha	43,101	30,169	85,24	57,121	15,16	11,52
2.	Luas permukiman kumuh	Ha	264,89	222,92	192,751	107,511	75,32	-25,89
3.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	16,27	13,53	44,22	53,13	20,13	41,99

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan data yang cukup fluktuatif. Akan tetapi, pada tahun 2019 memiliki kecenderungan turun hal ini dipengaruhi karena adanya pendataan ulang sehingga pertumbuhan rata-rata 11,52% per tahun. Hal tersebut menjadikan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 41,99% per tahun.

Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan luasan permukiman kumuh yang tertangani lebih dari dua kali lipat dari tahun 2016 yaitu 85,24 Ha. Angka tersebut cukup besar mengingat luasan kawasan kumuh keseluruhan pada tahun tersebut juga cukup rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 192,751 Ha. Pada tahun 2018 luasan permukiman kumuh yang tertangani 57,121 Ha. Hal tersebut dikarenakan banyaknya program pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada khususnya yang menyoroti kasus permukiman kumuh berjalan dengan baik. Diantaranya adalah program KOTAKU dan M3K (*Mundur Mungghah Madhep Kali*). Sedangkan pada tahun 2019 luas permukiman kumuh yang tertangani menurun hanya

berkisar 15,16 Ha, hal ini mengingat luas permukiman kumuh pada tahun 2019 juga menurun sehingga persentase luasan permukiman kumuh di daerah perkotaan juga rendah.

7. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat pada tahun 2019 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.131 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	100,00%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2019 hanya 1 target SPM telah tercapai 100%. Belum ada kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta merelokasi rumah terdampak pembangunan daerah, sehingga baik perencanaan maupun realisasi belum ada.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu kelurahan. Dengan beragam dan heterogennya masyarakat yang tinggal di Kota Yogyakarta, kemungkinan terjadinya friksi dan timbulnya permasalahan di tengah lingkungan masyarakat pun semakin besar. Untuk menjaga stabilitas keadaan, maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusakan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.

Perhitungan cakupan petugas linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas linmas yang bertugas di tengah-tengah masyarakat. Berikut adalah perhitungan cakupan petugas linmas di Kota Yogyakarta dengan menggunakan aspek wilayah kerja kota yaitu cakupan per 10.000 penduduk.

Tabel 2.132 Cakupan Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Linmas	Orang	2.869	2.884	2.864	3.575	3.847
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055
3	Jumlah wilayah kerja kota	Jiwa	69,82	70,12	69,40	86,36	92,91
4	Cakupan	%	41,09	41,13	41,27	41,40	41,41

Sumber: Satpo PP, 2020; Jumlah penduduk berdasarkan data Dindukcapil 2020

Dari hasil perhitungan cakupan petugas Linmas berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 cakupan petugas linmas masih berada di bawah 50% dengan kisaran angka 40-41%. Pada tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah linmas menjadi 3.847 orang, hal ini karena ada pemenuhan kebutuhan pemilu dan terdapat pendaftaran anggota linmas secara sukarela.

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di wilayah Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) berkaitan dengan seberapa kondusif situasi dan kondisi di suatu wilayah. Semakin banyak pelanggaran K3 terjadi, maka semakin tidak kondusif situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Namun, semakin tinggi juga tingkat penyelesaiannya maka pelanggaran K3 yang terjadi juga banyak terselesaikan. Berikut adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.133 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	8.568	6.529	4.118	4.391	4.271
2	Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	8.652	6.618	4.300	4.466	4.299
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	99,02	98,66	95,77	98,32	99,35

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2020

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Yogyakarta telah berada di atas angka 95% dan dapat dikatakan mencapai predikat yang sangat baik. Naiknya Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2019 menjadi 99,35% adalah salah satu wujud strategi penegakan yang lebih berprioritas secara pre-emptif dan preventif dengan tidak mengendurkan strategi penegakan secara represif yustisi dan non yustisi. Sebagai upaya pre-emptif Satpol PP Kota Yogyakarta terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam

menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Kampung Panca Tertib yang telah dirintis sejak tahun 2015.

3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Perlu adanya penanggulangan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Tabel 2.134 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km ²	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km ²	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, 2020

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Luas wilayah kota Yogyakarta adalah 32,5 km² dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 luas WMK yaitu sebesar 32,5 km² yang merupakan keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini pun menjadikan cakupan pelayanan kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%.

4. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari adanya penanganan yang cepat dari petugas Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan bencana kebakaran.

Tabel 2.135 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 menit	Kejadian	49	63	71	63	64
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	49	63	71	63	64
3.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	11	11	11	11	11

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2020

Jumlah kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bersifat fluktuatif. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta banyak disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik khususnya rumah tangga masih minim sehingga diperlukan sosialisasi terus menerus terhadap penggunaan listrik dan peralatan pendukungnya.

Apabila dilihat dari tingkat waktu tanggap yang terjadi di daerah layanan WMK di seluruh Kota Yogyakarta sejak tahun 2015 hingga 2019 tingkat dapat terus tertangani 100% di bawah 15 menit. Tingkat waktu tanggap yang terjadi dari tahun ke tahun masih berada dalam waktu 11 menit. Meski begitu masih perlu dilakukan pengembangan kebutuhan pelayanan tanggap bencana kebakaran untuk mengatasi kemungkinan kejadian di masa mendatang, baik dalam hal kuantitas sarana pemadam, petugas, hingga kualitasnya.

5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalam mengatur suatu subyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

Tabel 2.136 Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	960	1.058	789	649	534
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	1.389	1.540	1.110	724	562
3	Penegakan PERDA	Persen	69,11	68,70	71,08	89,64	95,02

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2020

Jumlah penegakan Perda yang dihitung berdasarkan persentase atas jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dengan jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Yogyakarta, sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Dengan jumlah pelanggaran Perda yang terus meningkat sejak tahun 2015 hingga 2016 kemudian terus turun hingga tahun 2019. Persentase penegakan Perda juga sempat turun pada tahun 2016 namun kembali naik hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 lebih berprioritas pada strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif dengan tidak mengendurkan semangat strategi penegakan perda secara represif yustisi dan non yustisi.

6. **Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.137 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	88,59%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2020; Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2020; BPBD Kota Yogyakarta, 2020

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2019 SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 5 indikator SPM terdapat 1 indikator yang belum tercapai yaitu Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala/permasalahan baik jumlah SDM, sarana dan prasarana, kondisi kepadatan lalu lintas maupun pelaporan kejadian. Namun hal tersebut tetap diupayakan sebaik mungkin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

7. **Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.138 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase kampung tangguh bencana	%	40	57,06	129,68	67,65	138,06
2	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	75	83,45	108,38	100,00	126,58
3	Persentase edukasi proteksi kebakaran	%	95	99,53	104	100	104,17
4	Angka kriminalitas	Kejadian	1.660	1.115	131,511	1.037	135,025

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2020; Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2020; BPBD Kota Yogyakarta, 2020

Dilihat dari tabel diatas, indikator SDGs dari bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018-2019 telah mencapai target capaian lebih dari 100%. Salah satu faktor pendorong keberhasilan capaian adalah antusias serta partisipasi warga kampung dalam pembentukan Kampung Tangguh Bencana cukup tinggi.

F. Sosial

1. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.139 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	27.900	37.645	31.473	25.614	30.781	5,02
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	51.900	61.148	33.020	32.709	35.947	-4,81
3.	PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	53,76	61,56	95,31	78,31	85,63	15,21

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 53,76% terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai angka 95,31%, namun mengalami penurunan menjadi 78,31% di tahun 2018 dan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 85,63%. Hal ini dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Sosial. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menggunakan kriteria baru dalam penentuan pemberian bantuan sosial bagi penduduk lanjut usia. Semula, kriteria penerima ASLUT (Asistensi Lanjut Usia Terlantar) adalah lanjut usia terlantar. Tahun 2018, kriteria penerima adalah lanjut usia miskin yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta yang terdata sebagai KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial). Perubahan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan manfaat dari intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Meningkatnya jumlah PMKS pada tahun 2019 dipengaruhi oleh kebijakan baru yang menentukan bahwa seluruh lansia miskin/terlantar yang masuk dalam KSJPS mendapatkan bantuan sosial ASLUM (Asistensi Lanjut Usia Miskin). Kebijakan tersebut memperluas sasaran penerima manfaat.

2. PMKS yang Tertangani

Indikator ini merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif dengan penurunan terjadi pada tahun 2018, dimana sebelumnya persentase PMKS yang tertangani adalah sebesar 75,87% dan menurun menjadi 74,76%. Penurunan jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2018 dikarenakan penurunan penerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penurunan penerima bantuan BPNT dikarenakan mulai tahun 2018, penyalurannya bekerjasama dengan bank milik negara dan e-warong sebagai penyedia barang. Perubahan kebijakan ini membutuhkan waktu penyesuaian yang berakibat tidak semua kartu bantuan terisi saldo. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase PMKS hingga menjadi 81,08%. Meningkatnya PMKS yang tertangani, salah satunya disebabkan perbaikan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sehingga penerima bantuan semakin banyak. Selain itu, meningkatnya dukungan anggaran APBD dalam rangka mencapai target SPM.

Tabel 2.140 Persentase PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	28.350	35.771	41.598	29.182	34.051	7,33

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
2.	Jumlah PMKS yang ada	Orang	45.646	55.020	54.827	39.035	41.999	-0,26
3.	Persentase PMKS yang tertangani	%	62,11	65,01	75,87	74,76	81,08	7,09

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

3. PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (bansos) dalam jangka waktu satu tahun. Berikut merupakan tabel PMKS skala kota yang menerima bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 2.141 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 tahun	Orang	19.337	28.886	31.751	24.452	29.379	14,12
2.	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	22.734	32.337	33.500	31.091	33.957	11,97
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	85,06	89,33	94,78	78,65	86,52	1,03

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

Apabila melihat pada tabel di atas, persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial memiliki kecenderungan meningkat. Pada awal periode persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah sebesar 85,06%, dan terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai 94,78%. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 78,65%. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan baru skema bantuan sosial. Bantuan bagi masyarakat miskin yang sebelumnya diberikan berupa beras (raskin), diganti menjadi non tunai. Mulai tahun 2018, bantuan bagi masyarakat miskin berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyalurannya bekerjasama dengan bank milik negara dan e-warong sebagai penyedia barang. Perubahan kebijakan ini membutuhkan waktu penyesuaian yang berakibat tidak semua kartu bantuan terisi saldo. Dengan demikian, tidak semua calon penerima

bantuan menerima BPNT. Selanjutnya meningkat menjadi 86,52% pada tahun 2019, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan baru yang menentukan bahwa seluruh lansia miskin/terlantar yang masuk dalam KSJPS mendapatkan bantuan sosial ASLUM yang memperluas sasaran penerima manfaat. PMKS yang menerima bantuan sosial untuk kebutuhan dasar diantaranya adalah PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar), ASLUM (Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin) dan ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas).

4. **PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya**

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya. Adapun persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial pada tahun 2015 - 2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama. Jika dilihat dari jumlah PMKS yang menjadi peserta program KUBE tampak ada penurunan tajam. Penurunan ini dikarenakan data yang digunakan adalah data Profil KUBE terkini. Kegiatan ini mendata kelompok KUBE yang benar-benar masih aktif. Kelompok yang mati maupun vakum tidak didata. Namun dilihat dari presentase peserta KUBE yang terdampingi, cakupannya lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Profil KUBE berperan cukup signifikan dalam hal ini. Dengan adanya Profil KUBE, maka terdata dengan jelas PMKS yang perlu mendapatkan intervensi.

Tabel 2.142 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	5.090	5.440	8.125	3.630	3.490
2.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	20.253	20.253	20.253	6.580	6.580
3.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	25,13	26,86	40,12	55,17	53,04

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini merupakan perhitungan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa panti sosial yang ada sudah berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.143 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	unit	16	15	13	13	13
2.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	unit	16	15	13	13	13
3.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini adalah untuk melihat persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Jumlah WKBSM di Kota Yogyakarta meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah WKBSM adalah 13 unit dan pada akhir periode berjumlah 25 unit. Hal tersebut sesuai dengan WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial. Meningkatnya jumlah WKBSM tahun 2019 dipengaruhi oleh kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial di lingkungannya. Secara kultural, mulai muncul gerakan untuk peduli kepada sesama.

Tabel 2.144 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah WKBSM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	13	14	22	22	25	19,62
2.	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	22	22	22	22	25	3,41
3.	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	59	64	100	100	100	16,21

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

7. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial. Dinas Sosial Kota Yogyakarta tidak memiliki data terkait korban bencana pada masa tanggap darurat. Akan tetapi, Dinas Sosial memiliki data yang terkait dengan bencana biasa (tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat) dengan penanganan sesuai dengan peristiwa bencana yang terjadi.

Tabel 2.145 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	82	66	76	105	60
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	82	66	76	105	60
3.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase korban yang menerima bantuan sosial sudah mencapai 100% dan angka tersebut stabil di setiap tahunnya.

8. Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Indikator ini merupakan persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tidak terdapat korban yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat. Hal tersebut dikarenakan tidak terjadi bencana yang ditetapkan sebagai tanggap darurat. Berikut merupakan tabel persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Tabel 2.146 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang	0	41	279	139	86
2.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang	0	41	279	139	86

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%. Pada tahun 2017, jumlah korban bencana alam cuaca ekstrim yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 276 orang mengungsi. Selanjutnya pada tahun 2018, jumlah korban bencana cuaca ekstrim yang dievakuasi sebanyak 1 orang luka-luka dan 138 orang mengungsi. Pada tahun 2019, jumlah korban banjir sebanyak 9 orang mengungsi, jumlah korban cuaca ekstrim sebanyak 8 orang luka-luka dan 66 orang mengungsi, serta korban bencana lainnya sebanyak 3 orang mengungsi.

9. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerima jaminan sosial bagi para penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial. Berdasarkan tabel di bawah, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial masih di atas angka 80%, hal ini didukung karena adanya kebijakan untuk memberikan jaminan sosial bagi lansia miskin/terlantar dan penyandang disabilitas yang masuk data KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial) sehingga manfaat bantuan dapat diterima oleh sasaran yang lebih luas.

Tabel 2.147 Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang	1.113	2.585	1.989	2.207	4.358
2.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang	4.860	3.650	3.713	3.713	4.435
3.	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	22,90	70,82	53,57	59,44	98,26

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

10. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada tahun 2019 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.148 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100,00%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti	100,00%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	99,60%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut gelandangan dan pengemis	100,00%
5	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah Kabupaten/Kota	100,00%

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2019 SPM bidang Sosial dari 5 indikator SPM hampir semua mencapai 100%, terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti dengan target 100% dan tercapai 99,60%.

11. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Sosial

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang sosial disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.149 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Sosial Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Angka kemiskinan	%	7,7	6,98	107,92	6,84	106,94
2	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	80	85,92	107,40	87,97	109,96
3	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	%	70	88,73	126,76	89,58	119,44

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan tabel diatas, 3 indikator SDGs di bidang Sosial telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan baik berupa dukungan anggaran dalam program pengentasan kemiskinan, maupun dukungan korporat di lingkungan Kota Yogyakarta. Selain itu keberhasilan tersebut didukung dengan Penguatan Data dan Informasi serta Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Tabel 2.150 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	36	40	24	14	16	-14,07
2.	Jumlah Perusahaan	Unit	1.405	1.460	1.470	1.689	1.692	4,92
3.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja	%	25,62	27,40	16,23	8,29	9,46	-17,16

Sumber: DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2020

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2015-2019, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun dengan pertumbuhan rata-rata yaitu sebesar -17,16% per tahun. Sementara itu jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta semakin meningkat dengan pertumbuhan 4,92% per tahun. Pada tahun 2015, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja sebesar 36 kasus, sedangkan di tahun 2019 hanya terjadi 16 kasus sengketa saja. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim kerja di Kota Yogyakarta sangat kondusif mengingat tingkat kasus sengketa terus menurun namun jumlah perusahaan terus meningkat. Selain itu, kesadaran pekerja untuk memahami atas hak dan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan semakin tinggi serta penanganan kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dilakukan dengan cara mediasi oleh OPD dan jika tidak menemukan titik temu kasus tersebut akan berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Cara penanganan kasus seperti ini diharapkan akan menemukan titik temu yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

2. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari

keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun n. Persentase kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Yogyakarta tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,84%. Peningkatan ini sejalan dengan turunnya jumlah kasus yang tercatat selama tahun 2015 sampai 2019. Adapun penyelesaian kasus yang terjadi di prioritaskan untuk selesai pada tingkat kota, hal ini akan lebih efisien terutama dari segi waktu dan biaya, namun jika kasus yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui jalur PB maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya yakni melalui pengadilan.

Tabel 2.151 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	21	12	13	14	11	-12,07
2.	Jumlah kasus yang tercatat	Kasus	35	23	13	14	16	-13,95
3.	Tingkat penyelesaian kasus	%	60,00	52,17	100	100	68,75	11,84

Sumber: DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2020

3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dari tahun 2015-2018, jumlah pencari kerja yang ditempatkan cenderung naik, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -9,87% per tahun. Meski persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan di tahun 2015-2016, dan 2018 tetapi sebenarnya jumlah pencari kerja yang mendaftar cenderung fluktuatif yang bersifat menurun. Pada tahun 2015 pencari kerja yang mendaftar sebanyak 1.866 orang, sedangkan tahun 2018 jumlah pencari kerja yang terdaftar hanya sebanyak 1.832 orang, namun di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 2.323 orang, hal ini dikarenakan oleh banyaknya peserta CPNS Kota Yogyakarta tahun 2019 yang mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning, namun belum ada kepastian terkait penempatannya. Hal ini yang memberikan pengaruh terhadap turunnya jumlah pencari kerja yang di tempatkan.

Tabel 2.152 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	2.044	2.151	2.480	2.094	1.163	-9,87
2.	Pencari kerja yang mendaftar	Orang	1.866	1.563	3.816	1.832	2.323	25,68
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	109,54	137,62	64,99	114,3	50,06	-1,87

Sumber: DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2020

4. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja yaitu dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini yaitu agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Perlindungan dan keselamatan kerja tersebut merupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Indikator ini akan menghitung persentase perusahaan yang menerapkan K3 dari keseluruhan jumlah perusahaan yang terdaftar dengan melihat jumlah perusahaan yang memiliki P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagaimana dalam Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987.

Tabel 2.153 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit	43	37	38	40	45	1,63
2.	Jumlah perusahaan	Unit	1.405	1.469	1.584	1.689	1.692	4,80
3.	Keselamatan dan Perlindungan	%	3,06	2,52	2,40	2,37	2,66	-2,86

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017: Dinas Tenaga Kerja DIY, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Selama tahun 2015-2019 persentase perusahaan yang memiliki menerapkan K3 bersifat fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -2,86%. Jumlah perusahaan yang memiliki P2K3 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, sedangkan jumlah perusahaan yang terdaftar terus meningkat setiap tahunnya.

5. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja. Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek terus bertambah setiap tahunnya namun tidak lebih pesat dari peningkatan jumlah tenaga kerja secara umum. Pada tahun 2015, persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek dari keseluruhan tenaga kerja adalah sebesar 99,39%, namun di tahun selanjutnya terus menurun sehingga mencapai 84,79% pada tahun 2019.

Tabel 2.154 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK	Orang	52.205	54.581	57.677	57.649	57.677	2,56
2.	Jumlah seluruh pekerja	Orang	52.525	55.430	63.649	68.021	68.021	6,81
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek	%	99,39	98,47	90,62	84,75	84,79	-3,83

Sumber: DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2020

6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta adalah mengenai upah minimum kota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Secara umum, perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019 menurun dan bahkan penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha sudah mencapai angka 100% sejak tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 2.155 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penyelesaian perselisihan	Kasus	35	23	13	14	16	-13,95
2.	Jumlah kejadian perselisihan	Kasus	35	23	13	14	16	-13,95
3.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	%	100	100	100	100	100	0,00

Sumber: Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020: dengan Hasil Olahan. 2020

7. Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan perusahaan adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah perusahaan yang telah diperiksa baik pemeriksaan pertama, berkala, ulang, maupun khusus dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Besaran pemeriksaan perusahaan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar -1,60%.

Tabel 2.156 Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Unit	301	244	264	307	328	3,10
2.	Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar	Unit	1.405	1.469	1.584	1.689	1692	4,80
3.	Persentase pemeriksaan perusahaan	%	21,42	16,61	16,67	18,18	19,39	-1,60

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017; Dinas Tenaga Kerja DIY, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan perusahaan adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah peralatan perusahaan yang telah diuji dan memiliki surat izin beroperasi dari keseluruhan peralatan perusahaan yang terdaftar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Besaran pengujian peralatan perusahaan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 89,61%. Penurunan jumlah peralatan yang telah diuji pada tahun 2018 dikarenakan masa berlaku alat uji yang berbeda-beda dan sesuai dengan permintaan dari perusahaan.

Tabel 2.157 Besaran Pengujian Peralatan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah peralatan yang telah diuji	Unit	975	1.060	1.119	40	250	110,71
2.	Jumlah seluruh peralatan yang terdaftar	Unit	993	1.066	1.240	1.105	1.228	5,98
3.	Persentase pengujian peralatan	%	98,19	99,44	90,24	3,62	20,36	89,61

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017; Dinas Tenaga Kerja DIY, 2019, dengan Hasil Olahan, 2020

9. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan negatif. Persentase tenaga kerja terbina juga mengalami fluktuasi namun kecenderungannya negatif dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar -0,26%, hal ini dikarenakan oleh faktor jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi yang setiap tahunnya semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Adapun hal ini terjadi karena di tahun 2018 ada 31 jenis pelatihan, sedangkan di tahun 2019 ada 30 jenis pelatihan. Selain itu di tahun 2019 ada inovasi jenis pelatihan baru, yaitu pelatihan *Airport Operation Service*, Setir

Mobil dan SIM B, dan Barista sehingga kemungkinan masyarakat belum berminat mengikuti jenis pelatihan yang baru.

Tabel 2.158 Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	830	486	605	625	598	-4,49
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	1.300	729	1.553	1.566	1.121	10,38
3.	Persentase tenaga kerja terbina kompetensi	%	63,84	66,67	38,96	39,91	53,35	-0,26

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

10. Rasio Jumlah lulusan S1/S2/S3

Rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 menggambarkan besaran penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki latar belakang pendidikan baik sehingga meningkatkan kualitas pencari kerja di Kota Yogyakarta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi yang cenderung positif 2015-2019 namun mengalami penurunan jumlah lulusan di tahun 2018 sehingga pertumbuhan rata-rata lulusan S1/S2/S3 sebesar 2,54%. Sedangkan rasio lulusan S1/S2/S3 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan menjadi 0,168 sehingga pertumbuhan rata-ratanya sebesar 2,34% per tahun.

Tabel 2.159 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	jiwa	67.807	69.513	70.258	69.088	69.730	2,54
2.	Jumlah Seluruh Penduduk	jiwa	412.704	417.744	422.732	413.961	414.055	0,19
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3		0,164	0,166	0,166	0,166	0,168	2,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

11. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Tenaga Kerja

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang tenaga kerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.160 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan upah minimum kota	%	5	8,03	146,00	8,54	142,33
2	Persentase jumlah penganggur	%	5,08	6,22	76,34	4,80	103,61
3	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	%	32,65	35,71	102	35,88	100,34

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 indikator SDGs di bidang tenaga kerja pada tahun 2018 terdapat 1 indikator yang belum mencapai 100%, tetapi pada tahun 2019 semua indikator sudah mencapai 100%.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.161 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	5.813	5.690	5.605	5.524	5.376
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	73.450	73.633	74.103	74.760	76.154
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	7,91	7,73	7,56	7,39	7,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Hasil olahan; 2020

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 7,91%. Pada tahun 2019 menurun sampai menjadi sebesar 7,06%.

2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan yang menduduki kursi DPRD. Jumlah kursi di keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki jumlah tetap, yakni 40 orang, sedangkan jumlah kursi keanggotaan yang diduduki oleh perempuan memiliki jumlah yang cenderung menurun. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 terdapat 10 orang perempuan yang menduduki kursi keanggotaan DPRD, dengan proporsi kursi yang

diduduki perempuan di DPRD sebesar 25%. Pada tahun 2017 hingga 2018 terdapat 9 orang perempuan yang menduduki kursi keanggotaan DPRD, dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 22,5%. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan menurun kembali menjadi 5 orang, dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 12,5%. Sejak tahun 2015 hingga 2019 besaran proporsi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta belum dapat memenuhi kuota yang ditentukan yakni sebesar 30%.

Tabel 2.162 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	10	10	9	9	5
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	40	40	40	40	40
3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	25	25	22,5	22,5	12,5

Sumber: Sekretariat Dewan Kota Yogyakarta, 2020

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.163 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	30.603	31.290	31.806	32.487	33.529
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	73.450	73.633	74.103	74.760	76.154
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	30,60	31,29	31,81	32,49	44,03

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung meningkat. Partisipasi pekerja perempuan di lembaga swasta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga pemerintahan. Partisipasi di lembaga swasta mencapai lebih dari 44,03% total jumlah pekerja perempuan.

4. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.164 Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah KDRT	Orang	626	544	254	193	249	-23,22
2.	Jumlah rumah tangga	Orang	130.172	131.092	133.686	135.602	138.430	1,28
3.	Rasio KDRT	%	0,48	0,41	0,18	0,14	0,18	-24,10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Berdasarkan data di atas rasio KDRT di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2018 berada dalam kondisi cukup baik ditunjukkan dengan rasio KDRT yang menurun di setiap tahunnya, namun jumlah KDRT mengalami peningkatan di tahun 2019. Pada periode tahun 2015, jumlah KDRT adalah sebesar 626 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,48%, dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya hingga di tahun 2018 jumlah kasus KDRT di Kota Yogyakarta mencapai 193 dengan nilai rasio KDRT sebesar 0,14%. Namun di tahun 2019 jumlah KDRT mengalami peningkatan hingga mejadi 249 kasus dengan nilai rasio 0,18%. Kenaikan jumlah kasus KDRT di tahun 2018-2019 dikarenakan jumlah korban yang melapor semakin banyak, hal ini dapat di indikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran tindak KDRT sudah baik. Selain itu, semakin banyak lembaga yang turut membantu dalam penanganan kasus KDRT salah satunya melalui jejaring kerja di Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat Kota dan Kecamatan yang telah didukung oleh status hukum yang kuat.

Penurunan jumlah kasus KDRT di setiap tahunnya tak luput dari upaya preventif yang telah dilakukan seperti sosialisasi, pendampingan sekolah ramah anak, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK dan rintisan usaha serta penanganan secara komprehensif yang melibatkan peran serta masyarakat antara lain FPKK Kecamatan dan *stakeholder* lainnya. Selain itu, adapun strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan yang dilakukan oleh DPMPPA adalah sosialisasi dan pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) kepada aparat kecamatan, polsek dan kader masyarakat, Penyelenggaraan Sosialisasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan sosialisasi tentang UPT P2TP2A serta mekanisme penanganan kekerasan perempuan dan anak kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi selain itu juga dilakukan optimalisasi peran dan fungsi Satuan Tugas Siap Gerak (Satgas Sigrak) dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui

pelatihan peningkatan kapasitas. Satgas Sigrak bertugas melakukan pencegahan dan mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan.

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.165 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	58,55	-	60,05	63,49	64,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pada tahun 2014, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 58,55%. Data tahun 2016 tidak tersedia karena pada tahun tersebut penghitungan sampel oleh BPS hanya sampai tingkat provinsi. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 64,32% pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Yogyakarta ini yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT. Akan tetapi, data yang disajikan bawah merupakan data gabungan, dimana korban kekerasan tidak hanya ditangani oleh UPT saja. Penangan dilakukan oleh lembaga lain seperti Rifka Annisa, Puskesmas, ditangani oleh petugas provinsi, dsb.

Tabel 2.166 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	626	517	254	193	249
2.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	626	517	254	193	249
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020; Hasil Olahan, 2020

Secara umum cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Terjadi penurunan jumlah pengaduan/laporan yang cukup signifikan di tahun 2015-2018, namun terjadi peningkatan jumlah laporan di tahun 2019 sebanyak 249 laporan. Sosialisasi dan pelatihan yang intensif terhadap masyarakat untuk penanganan kasus, serta kesadaran masyarakat meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan penghitungan dimana jumlah pengaduan yang tercatat murni berasal dari Kota Yogyakarta.

7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Indikator ini bertujuan untuk melihat besarnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Yogyakarta. Secara umum cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Namun data yang ada bersifat fluktuatif, misalnya saja di tahun 2015-2017 data mengalami penurunan, namun di tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dan semua kasus tersebut telah mendapatkan penanganan oleh petugas kesehatan yang ada. Seiring pelayanan yang semakin baik maka tingkat penyelesaian kasus yang terlayani pun semakin meningkat, selain itu ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.167 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana	Orang	111	68	35	58	60

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
	KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu						
2.	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang	111	68	33	58	60
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020; Hasil Olahan, 2020

8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum merupakan indikator yang didapatkan dari hasil perbandingan jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum.

Tabel 2.168 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang	88	56	20	52	75
2.	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	88	56	20	52	75
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 2020

Berdasarkan tabel di atas, cakupan pelayanan bantuan hukum kepada korban kekerasan sudah mencapai 100% pada tahun 2015-2019. Hal tersebut menunjukkan pelayanan terhadap korban kekerasan sudah optimal. Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum masih bersifat fluktuatif meskipun pada tahun 2017 terjadi penurunan dan pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan.

9. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.169 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,65	0,11	182,81	0,10	184,13

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
2	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	Persen	74	88,64	116,63	86,76	111,23
3	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,74	0,03	195,89	0,06	191,67

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 2020

Dilihat dari tabel diatas, semua indikator SDGs pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018-2019 telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya pengembangan inovasi SIGRAK (Siap Gerak Atasi Kekerasan).

C. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama selama tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,94%, sedangkan pertumbuhan rata-rata ketersediaan pangan yaitu sebesar -2,23% per tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah yang paling besar pada kurun waktu 2015-2019, yaitu 143,24 kg/jiwa. Sedangkan yang paling kecil pada tahun 2018, yaitu 118,55 kg/jiwa.

Tabel 2.170 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama	Kg	58.656.000	56.029.000	56.487.000	50.116.000	55.726.000	-0,94
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	409.487	412.704	411.700	422.732	431.939	1,35
3	Ketersediaan Pangan Utama	kg/jiwa	143,24	135,76	137,20	118,55	129,01	-2,23

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

Ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta berasal dari daerah lain di sekitar Kota Yogyakarta dan juga hasil produksi di wilayah Kota Yogyakarta. Walaupun menunjukkan pertumbuhan yang menurun, kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasikan melalui indikator ketersediaan

energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal / Kapita / Hari dan protein 57 Gram / Perkapita / Perhari.

Ketersediaan energi dan protein di Kota Yogyakarta pada kurun waktu lima tahun terakhir tergolong baik karena telah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Pada tahun 2019 tersedia energi sebesar 2.507 kkal per kapita per hari dan protein sebanyak 78,88 gram per kapita per hari.

Tabel 2.171 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari							
1	Energi	Kkal	2.475	2.374	2.472	2.480	2.507
2	Protein	Gram	63,11	72,55	75,69	75,43	78,88
Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari							
3	Energi	Kkal	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	Protein	Gram	57	57	57	57	57
Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari							
5	Energi	%	112,5	107,91	112,36	112,73	113,95
6	Protein	%	110,72	127,78	132,79	132,33	138,39

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Teknis termasuk Kementerian Pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis, dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan perlu ada satu institusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Tabel 2.172 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi	Sampel	20	20	2.694	1.476	459
2	Jumlah sampel pangan yang diambil	Sampel	20	20	2.719	1.585	532
3	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	99,08	93,12	86,28

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dilakukan perhitungan rumus pangan aman dengan menghitung persentase jumlah sampel yang

aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku terhadap jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2015-2016 persentase pangan yang aman di Kota Yogyakarta cenderung stabil 100%, kemudian terus mengalami penurunan menjadi 86,28 pada tahun 2019. Penurunan sampel pangan yang aman dikonsumsi pada tahun 2019 disebabkan oleh musim kemarau lebih lama yang mengakibatkan pestisida dalam sayuran dan buah menjadi tinggi dikarenakan tidak terkena hujan.

D. Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sesuai dengan Lampiran Permendagri 86/2017, formula yang digunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan luas wilayah dikalikan dengan bilangan 100. Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah umum, sultan ground dan pakualaman ground. Data secara rinci terkait luas lahan bersertifikat untuk tanah umum, tanah sultan ground dan tanah pakualaman ground, sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional belum bisa menampilkan. Hal ini dikarenakan dalam sistem Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta belum ada fasilitas untuk merekap luas pemilikan subyek tertentu.

Tabel 2.173 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas lahan bersertifikat	Ha	605,30	682,40	789,03	2.646,27	2.665,63	66,12
2.	Luas Wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	0,00
3.	Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah	%	18,62	21,00	24,28	81,41	82,02	66,12

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2020, dengan Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data yang ada, luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pertumbuhan rata-ratanya sebesar 66,12% per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta. Pertumbuhan rata-ratanya adalah 66,12% per tahun. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan luasan wilayah Kota Yogyakarta.

Peningkatan luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta tidak lepas karena adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah dilaksanakan oleh BPN Kota Yogyakarta. Selanjutnya, angka persentase luas lahan

bersertifikat yang ada di Kota Yogyakarta masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan luasan wilayah yang ada. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah masih banyaknya objek bukan persertifikatan tanah yang ada di kota Yogyakarta. Misalnya saja, sungai, parit, jalan, *sultan ground* dan *pakualaman ground*. Luasan objek bukan bersertifikat tersebut diindikasikan cukup besar, sehingga sisa lahan yang dapat disertifikasikan tidak terlalu besar.

2. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Formula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasus tanah negara adalah dengan membandingkan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.174 Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	2	1	3	5	3	44,17
2.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	3	2	5	7	5	32,02
3.	Penyelesaian kasus sengketa tanah	%	66,67	50	60	71,43	60,00	-0,49

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2019, dengan Hasil Olahan 2020

Jumlah kasus sengketa yang dihitung merupakan data dari Badan Pertanahan Nasional yang berupa kasus sengketa tanah dari semua tanah persil milik perorangan. Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh BPN dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan naik, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 44,17% per tahun.

Kemudian persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata -0,49% per tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak seimbangannya jumlah kasus yang tertangani dengan jumlah kasus yang terdaftar. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belum ada kasus sengketa tanah yang dapat tertangani 100%. Oleh karena masih banyaknya kasus yang belum tertangani, maka menyebabkan angka persentasenya rendah. Keadaan ini harusnya menjadi catatan bagi pihak yang terkait untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik meskipun jumlah kasus yang ada setiap tahunnya hanya sedikit.

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.175 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah izin lokasi	Unit	1	-	-	2	20
2.	Permohonan izin lokasi	Unit	1	-	-	2	20
3.	Penyelesaian izin lokasi	%	100	-	-	100	100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2020 dengan Hasil Olahan 2020

Permohonan izin lokasi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017 cenderung stagnan tidak ada data, namun di tahun 2015 terdapat permohonan izin lokasi sebanyak 1 dan mendapatkan izin. Tahun 2015 permohonan izin lokasi dilakukan sebatas untuk mengganti kepemilikan tanah gudang susu milik Perusahaan SGM. Kemudian pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 dan 2017 Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan izin lokasi dan hanya memberikan pertimbangan teknik kepada walikota terkait penerbitan izin lokasi sehingga, tidak terdapat data. Namun di tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah permohonan izin lokasi sebanyak 2 unit yang mendapatkan persetujuan dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 20 unit permohonan izin lokasi yang mendapatkan persetujuan.

E. Lingkungan Hidup

1. Tersusunnya RPPLH Kota

Indikator tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya Dokumen RPPLH di Kota Yogyakarta secara *time series* dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 2.176 Tersusunnya RPPLH Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersusunnya RPPLH Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data yang ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, RPPLH baru ada pada tahun 2017 karena menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pembuatan dokumen tersebut. Sedangkan pada tahun sebelumnya memang belum ada aturan terkait RPPLH. Tahun 2019 dokumen RPPLH yang tersusun di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ada satu dokumen yaitu Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDDT Air). Data perhitungan DDDT di Wilayah Kota Yogyakarta digunakan sebagai referensi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup khususnya komponen air di Kota Yogyakarta. Dokumen ini juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terhadap rencana kegiatan yang memberikan dampak terhadap kualitas dan kuantitas air di Kota Yogyakarta.

2. Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota

Indikator terintegrasinya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam rencana pembangunan kota adalah indikator lanjutan dari indikator sebelumnya yang berisi tentang ada atau tidaknya RPPLH di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.177 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2016 belum ada peraturan terkait untuk penyusunan RPPLH sehingga RPPLH pun belum terintegrasi dalam rencana pembangunan Kota Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2017 terdapat peraturan terkait penyusunan RPPLH, sehingga RPPLH telah terintegrasi dalam rencana pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun tersebut, hal ini pun berlanjut sampai dengan tahun 2019 sehingga terdapat integrasi RPPLH dalam rencana pembangunan di Kota Yogyakarta. Tahun 2021, direncanakan penyusunan Naskah Akademik (NA) untuk RPPLH. Saat ini sudah ada inventarisasi RPPLH yang sudah disusun dalam jangka waktu 4 tahun.

3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota

Indikator terselenggaranya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tingkat daerah kota akan menunjukkan ada atau tidaknya dokumen atau kajian tersebut di suatu kota. Di Kota Yogyakarta dokumen KLHS dibuat pada tahun 2015 dan tahun 2019.

Tabel 2.178 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

KLHS adalah dokumen wajib untuk pengkajian suatu perencanaan yang sudah memasukkan unsur-unsur lingkungan. Jika perencanaan sudah memasukkan unsur-unsur lingkungan dan membuat dokumen KLHS maka perencanaan tersebut sudah termasuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, beberapa dokumen yang wajib harus mempunyai KLHS adalah perencanaan yang berkaitan dengan RPJPD/RPJMD (Kebijakan Perencanaan) dan dokumen RTRW/RDTR (Perencanaan Tata Ruang). KLHS di Kota Yogyakarta dibuat oleh instansi yang sedang membuat dokumen perencanaan dengan melibatkan instansi lingkungan hidup.

Dokumen KLHS belum dimiliki oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2015 dan 2016. Mulai tahun 2017, dokumen KLHS dibuat seiring dengan dibuatnya Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Yogyakarta. Tahun 2017 dibuat oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta karena BAPPEDA adalah instansi yang membuat RDTR dan RPJMD tersebut. Selanjutnya, mulai tahun 2018 pembuatan dokumen KLHS dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai pembuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Yogyakarta. Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai ketua kelompok kerja.

4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas air ini menurut Lampiran Permendagri 86/2017 didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus indeks pencemaran. Hal tersebut sama dengan data yang ada di Kota Yogyakarta, tetapi data indeks kualitas air pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah diolah dan menggunakan formula dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sesuai dengan indikator indeks kualitas air pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Oleh karena itu, satuan pada indikator ini disesuaikan dengan data yang ada.

Tabel 2.179 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	IKA	50,60	50,00	50,00	49,26	41,98	-4,36

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, secara umum nilai indeks kualitas air di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami perubahan, namun di tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai indeks kualitas air sebesar 49,26. Selanjutnya, indeks kualitas air kembali menurun menjadi 41,98 pada tahun 2019. Penurunan indeks kualitas air pada tahun 2019 dikarenakan adanya parameter yang masih dominan melebihi baku mutu yaitu parameter Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Coliform yang diakibatkan oleh cuaca musim panas yang terlalu panjang sehingga pada beberapa titik pantau sungai memiliki debit kecil.

Pengujian kualitas air yang ada di Kota Yogyakarta selama ini sudah merepresentasikan musim dan kondisi sungai yang ada. Hal ini dikarenakan pengujian dilakukan pada bulan-bulan tertentu yang masing-masing merepresentasikan musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian, pengujian kualitas air sungai telah dilakukan pada lima titik (hulu, tengah dan hilir) pada setiap sungai. Sungai yang diuji

kualitas airnya yaitu Sungai Manunggal, Gajah Wong, Code dan Winongo. Selain itu, parameter yang diujikan juga sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yaitu parameter TSS, DO, BOD, COD, *Total Phospat*, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*.

Selanjutnya, menurut pedoman IKLH tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, nilai indeks kualitas air ± 50 IKA tersebut masuk ke dalam kategori cemar sedang dengan nilai $IP\ 5,0 < PI_j \leq 10,0$. Keadaan ini dipengaruhi dari beberapa faktor pencemar yang ada di sekitar sungai maupun jauh dari sungai. Diantaranya adalah masih banyaknya masyarakat bantaran sungai yang membuang limbah atau sampah rumah tangga mereka ke sungai langsung tanpa ada penanganan terlebih dahulu.

Selanjutnya, cemarnya kualitas air sungai di Kota Yogyakarta juga tidak dapat dihindari, karena sungai yang ada di Kota Yogyakarta adalah sungai bagian tengah dari seluruh badan sungai di Provinsi DIY, sehingga sungai yang ada di Kota Yogyakarta akan terpengaruh dengan kualitas hilir sungai dari kabupaten di atasnya yaitu Kabupaten Sleman. Jika kualitas air masukan dari Kabupaten Sleman buruk, maka sungai-sungai di Kota Yogyakarta tentunya akan memiliki kualitas air yang hampir sama pula. Oleh karena itu, penanganan kualitas air ini cukup sulit karena menyangkut seluruh kota/kabupaten di wilayah Provinsi DIY. Tindakan atau penanganan yang telah dilakukan oleh DLH dalam upaya menjaga kualitas air sungai di Kota Yogyakarta diantaranya adalah pembinaan terhadap perusahaan yang rawan membuang limbah ke sungai, pembinaan kepada masyarakat di pinggir sungai, pembentukan satgas kebersihan sungai sebanyak 40 orang, kerja bakti rutin di bantaran sungai pada 140 RW, dan membangun IPAL komunal untuk usaha kecil yang rawan membuang limbahnya ke sungai.

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas udara ini didapatkan melalui sebuah formula sesuai dengan Lampiran Permendagri 86/2017 yaitu $IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$. Perhitungan tersebut sama dengan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.180 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	IKU	29,29	66,65	89,27	84,24	84,00	38,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, hasil pengukuran indeks kualitas udara Kota Yogyakarta tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-ratanya menunjukkan peningkatan dengan angka 38,89% per tahun.

Pengukuran IKU di Kota Yogyakarta telah menyesuaikan dengan parameter yang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili sumber pencemar bergerak dan SO₂ mewakili sumber pencemar tidak bergerak. Pengukuran kualitas udara pada tahun 2016 di Kota Yogyakarta dilakukan pada 10 titik yang tersebar mewakili wilayah Kota Yogyakarta, diantaranya adalah di Perempatan Galleria Mall, Jl. Laksda Adi Sucipto, Perempatan Jl. Kusumanegara, Pertigaan Kotagede, Terminal Giwangan, Perempatan Wirobrajan, Jl. Magelang (Perempatan Pingit), Jl. Malioboro, Perempatan Kantor Pos Pusat.

Tahun 2015 nilai indeks kualitas udara yang mana angka tersebut adalah angka terendah selama lima tahun pengukuran. Perbedaan angka tersebut dikarenakan perbedaan metode dalam pengukuran indeks kualitas udara antara Kota Yogyakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Pusat). Sebelum tahun 2017, pengukuran indeks kualitas udara dilaksanakan oleh DLH Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode manual aktif, sedangkan pada tahun 2017 dan seterusnya pengukuran indeks kualitas udara langsung dilakukan oleh pusat dengan menggunakan metode pasif. Pada tahun 2019 terjadi penurunan indeks kualitas udara dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 84,24 menjadi 84,00. Penurunan indeks kualitas udara pada tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat di Kota Yogyakarta dan adanya penambahan aktivitas setiap akhir minggu dan libur serta kurangnya lahan penghijauan di Kota Yogyakarta.

Secara umum, kualitas udara di Kota Yogyakarta dalam kondisi yang baik. Karena semakin besar nilai IKU maka akan semakin baik pula kualitas udaranya. Selanjutnya, walaupun Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi daerah yang padat dilalui kendaraan, kualitas udaranya cenderung masih baik. Hal tersebut dikarenakan adanya pergerakan angin yang cukup besar di Kota Yogyakarta, sehingga polusi akibat kendaraan bermotor tidak singgah dalam waktu yang lama di Kota Yogyakarta.

6. Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan yang dimaksud pada Permendagri 86/2017 ini adalah hasil dari pengukuran dengan formula tertentu yang tertuang dalam Lampiran Permendagri 86/2017. Formula tersebut sama dengan formula yang digunakan untuk menentukan

IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) pada dokumen IKLH, sehingga data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaras dengan data yang dibutuhkan.

Tabel 2.181 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	ITV	56,82	38,78	39,67	39,68	39,69	-7,35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020

Berdasarkan data indeks kualitas tutupan lahan yang ada di Kota Yogyakarta menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-ratanya adalah -7,35% per tahun. Pada tahun 2015, indeks kualitas tutupan lahan sebesar 56,82 dan angka tersebut menurun signifikan menjadi 38,78 pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan perhitungan yang digunakan pada tahun tersebut telah menggunakan perhitungan yang terbaru dari kementerian pusat sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Selain itu, pada tahun tersebut telah dilakukan pembaruan citra satelit, sehingga hasil yang didapatkan lebih merepresentasikan keadaan nyata. Pada tahun 2017 indeks kualitas tutupan lahan meningkat menjadi 39,67, selanjutnya terus meningkat menjadi 39,69 di tahun 2019. Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan dikarenakan adanya penambahan dan penanaman pohon perindang pada Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan permukiman.

Nilai ITV di Kota Yogyakarta cenderung rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak banyak mempunyai tutupan vegetasi. Tutupan vegetasi yang cukup besar hanya berada di hutan Kebun Binatang Gembira Loka.

7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota

Indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota ini didapatkan dengan membagi data jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota yang ditangani dengan data total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota kemudian dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.182 Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani	Laporan	61	73	93	103	32	-2,78
2.	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Pemantauan Perusahaan	70	85	76	120	48	2,18
3.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	87,14	85,88	122,37	85,83	66,67	-2,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data yang ada, persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-ratanya adalah -2,79% per tahun. Penurunan tersebut dikarenakan mulai tahun 2019 pengajuan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dilakukan melalui sistem, dimana tahun sebelumnya dilakukan secara manual. Adanya perubahan tersebut dimungkinkan ada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang belum mengajukan izin.

8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Indikator terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ini adalah indikator terkait pemberian penghargaan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat atas jasanya melestarikan lingkungan khususnya di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.183 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020

Pemberian penghargaan lingkungan hidup telah menjadi agenda rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut terlihat dari data yang ada jika telah terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup di lingkup Kota Yogyakarta secara berkelanjutan. Penghargaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta antara lain:

- a. Lomba bank sampah;
- b. Lomba adipura kecamatan;
- c. Lomba adiwiyata sekolah;
- d. Lomba saka kalpataru;
- e. Olimpiade lingkungan hidup;
- f. Lomba hari peringatan lingkungan hidup;
- g. Seleksi kalpataru dan kehati;
- h. Kampung hijau proklamasi tingkat kota; dan
- i. Lomba profil dan inovasi sekolah peduli lingkungan.

9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta

Indikator ini didapatkan dari pembagian jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase berapa persen pengaduan masalah yang dapat ditangani oleh dinas terkait.

Berdasarkan data yang ada, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik secara 100%. Akan tetapi, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-ratanya adalah 95,11% per tahun. Peningkatan pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dikarenakan bertambahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan. Pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta cukup beragam, sebagai contoh pengaduan terkait limbah keluaran pabrik ataupun penyusutan tinggi muka air tanah pada sumur masyarakat karena indikasi aktivitas perhotelan.

Tabel 2.184 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	pengaduan	4	11	5	5	18	95,11
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	pengaduan	4	11	5	5	18	95,11
3.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Kota Yogyakarta	%	100	100	100	100	100	0,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2020

10. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang menuju sistem *zero waste*. Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah kota dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.185 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/ tahun)
1.	Jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	Ton/hr	52,17	45,28	92,65	55,56	100,35	33,00
2.	Total timbulan sampah	Ton/hr	236,3	226,2	365	359,07	361,96	14,07
3.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	22,08	20,02	25,38	15,47	27,72	14,40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2020

Sampah yang dikelola di Kota Yogyakarta adalah sampah yang dikelola secara 3R meliputi jumlah sampah yang dikelola oleh bank sampah, dimanfaatkan kembali oleh pihak pemulung dan sampah yang diolah pada TPST 3R di Nitikan. Jumlah sampah yang dikelola kembali di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 14,40%. Secara umum dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah sampah yang dikelola.

Pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait pengelolaan sampah dan total timbulan sampah. Pengelolaan sampah 3R naik dari 45,28 Ton/hr menjadi 92,65 Ton/hr sedangkan untuk timbulan sampah naik dari 226,2 Ton/hr menjadi 365 Ton/hr. Kenaikan pengelolaan sampah 3R pada tahun tersebut dikarenakan pada tahun 2017 mulai dioperasikannya TPST 3R yang berada di Nitikan sehingga membuat pengolahan sampah 3R meningkat drastis. Hal tersebut menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan rata-rata jumlah sampah yang dikelola di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 33,00% per tahun. Selanjutnya, untuk kenaikan timbulan sampah pada tahun 2017 terjadi karena perbedaan perhitungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, koefisien sampah yang digunakan adalah 0,65 kg/orang/hari. Akan tetapi, pada tahun 2017 koefisien yang digunakan adalah 0,87 kg/orang/hari. Oleh karena itu, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada kedua tahun tersebut. Pada tahun 2018 jumlah timbulan mengalami penurunan, namun di tahun ini pula jumlah pengelolaan sampah juga mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 55,56 ton/hr sampah yang dapat dikelola dari total timbulan 359,07 ton/hr, sehingga persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R mencapai 15,47% saja sampah yang dapat dikelola di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah timbulan mengalami peningkatan, demikian pula dengan jumlah pengelolaan sampah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 100,35 ton/hr sampah yang dapat dikelola dari total timbulan 361,96 ton/hr, sehingga persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R mencapai 27,72%. Peningkatan persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dikarenakan adanya penambahan fasilitas dan kapasitas rumah kompos dari 72 ton menjadi 144 ton dan memasukkan aktivitas pemulung dan pelapak sebagai pelaku pengurangan sampah serta penambahan jumlah komunitas pengelola sampah berupa bank sampah.

Tabel 2.186 Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah kelompok bank sampah	Kelompok	405	405	433	475	481	4,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020, dengan Hasil Olahan 2020

Masyarakat dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Di Kota Yogyakarta terdapat kelompok bank sampah yang dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yakni sebesar 4,47% pertahun.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, terdapat 405 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 antusiasme penduduk semakin meningkat, yang diidentifikasi dari peningkatan kelompok bank sampah yang sangat tinggi hingga pada tahun 2019 terdapat 481 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Kenaikan jumlah kelompok bank sampah dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah dan melalui kelompok-kelompok masyarakat sadar lingkungan antara lain penambahan bank sampah di wilayah Karangwaru, Pakuncen, Suryodiningratan, dan Klitren. Pengelolaan sampah secara kelompok melalui bank sampah juga mulai dikembangkan sebagai usaha kreatif yang bernilai ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan bank sampah dan masyarakat di wilayah itu sendiri. Adanya peningkatan jumlah bank sampah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan angka pengelolaan sampah secara 3R.

11. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Indikator timbulan sampah yang ditangani dan indikator persentase jumlah sampah yang tertangani didapat dari perbandingan volume sampah yang ditangani dengan jumlah timbulan sampah dikalikan 100. Yang dimaksud volume sampah yang ditangani adalah volume sampah yang dibuang ke TPA.

Tabel 2.187 Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)	ton/hari	179,4	176,4	261,28	236,05	252,95	10,99
2.	Perkiraan timbulan sampah	ton/hari	236,3	226,2	365	359,07	361,96	14,07
3.	Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA	%	75,92	77,98	71,58	65,74	69,88	-1,84

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan volume sampah yang dibuang ke TPA cukup fluktuatif dengan kecenderungan naik serta pertumbuhan rata-ratanya sebesar 10,99% per tahun. Hal tersebut selaras dengan naiknya pula jumlah perkiraan timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata 14,07% per tahun.

Keadaan tersebut tidak lepas dari tingginya kenaikan volume timbulan sampah dari tahun 2016-2018. Hal ini disebabkan karena peningkatan kinerja DLH Kota Yogyakarta yang melakukan pendataan secara menyeluruh timbulan sampah di Kota

Yogyakarta. Pendataan timbulan sampah pada tahun 2018 meliputi sampah yang terdapat di TPS dan sampah dari pihak swasta (seperti hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, dll). Sedangkan, pada tahun 2016 pendataan timbulan sampah yang dilakukan hanya meliputi sampah yang terdapat di TPS, karena sampah dari pihak swasta langsung dibuang ke TPA tanpa melakukan pelaporan ke DLH Kota Yogyakarta.

Banyaknya jumlah timbulan sampah yang ada di TPS mengindikasikan jika masyarakat belum menerapkan kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) secara baik. Masyarakat masih membuang sampah langsung tanpa dilakukannya pengelolaan terlebih dahulu, sehingga sampah menumpuk di TPS. Kemudian, jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada waktu siang hari di Kota Yogyakarta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah penduduk pada waktu malam hari. Selain itu, sebagai kota pariwisata, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta juga memiliki pengaruh terhadap jumlah timbulan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya pendekatan kepada masyarakat terkait penanganan sampah di perkotaan. DLH telah melakukan pelatihan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang, sehingga diharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang.

12. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Indikator persentase cakupan area pelayanan ini didapatkan dari pembagian data luas area pelayanan pengelolaan sampah dengan luas area kota dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan melihat seberapa besar cakupan area pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta secara *time series*.

Tabel 2.188 Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km ² /ha	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2.	Luas area Kota	km ² /ha	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
3.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat jika dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta sudah mencapai 100% atau dengan kata lain semua wilayah sudah terlayani dengan baik tanpa terkecuali. Hal tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampahnya.

13. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Yogyakarta

Indikator operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kota ini adalah indikator yang bertujuan untuk menunjukkan nilai TPA dari program adipura di suatu wilayah. Di Kota Yogyakarta data terkait nilai adipura ini dapat ditunjukkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Nilai TPA (program adipura) agar bisa mendapatkan adipura harus lebih besar atau sama dengan 71.

Tabel 2.189 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai TPA (Program Adipura)		71,16	71,60	67,76	63,17	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat jika nilai program adipura di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cukup fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa Kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 selalu mendapatkan adipura. Akan tetapi, tahun setelahnya yaitu tahun 2013 sampai tahun 2016 Kota Yogyakarta tidak mendapatkan adipura. Lalu setelahnya, tahun 2017 Kota Yogyakarta baru mendapatkan adipura lagi. Namun untuk tahun 2018 Kota Yogyakarta kembali tidak mendapatkan penghargaan adipura. Pada tahun 2019 nilai TPA tidak dapat ditampilkan dikarenakan belum ada data penilaian adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup.

14. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Lingkungan Hidup

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.190 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Udara		66,85	84,24	125,64	84,00	124,91
2	Indeks Kualitas Air		50,2	49,26	97,74	41,98	82,96
3	Persentase pengangkutan sampah	%	91,26	92,71	100,59	102,76	109,33
4	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	%	29,19	29,30	99,29	29,34	98,85
5	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	5,65	7,98	100,00	9,99	99,11
6	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	12	15	115	27,72	198

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
7	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.	%	23,62	31,46	114,07	42,34	135,01
8	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	41,58	41,5	99,00	41,57	98,39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas, dari 8 indikator SDGs bidang lingkungan hidup terdapat 4 indikator yang belum mencapai 100%. Belum tercapainya indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta;
- b. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan;
- c. Pengetahuan masyarakat mengenai Dokumen Lingkungan belum maksimal;
- d. Pengetahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah belum maksimal; dan
- e. Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan, ada yang belum mencantumkan dampak dari limbah B3 yang dihasilkan sehingga tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan pemenuhan izin PPLH.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesai (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia diatas 17 tahun. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, rasio penduduk ber-KTP adalah sebesar 0,93. Perhitungan penduduk yang memiliki KTP setelah tahun 2015 adalah penduduk yang sudah melakukan rekam e-KTP, karena pada tahun 2014 KTP biasa sudah dianggap tidak berlaku. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan rasio penduduk ber-KTP, dan angka tersebut terus naik hingga tahun 2019 menjadi 0,99.

Tabel 2.191 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber-KTP	Orang	284.687	297.800	302.408	306.600	311.302	2,27
2.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	307.033	306.950	309.788	313.317	314.241	0,58
3.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk		0,93	0,97	0,98	0,98	0,99	1,68

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020; Hasil Olahan, 2020

2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan. Dengan kata lain, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

Tabel 2.192 Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah bayi berakta kelahiran	Orang	4.089	4.139	4.202	3.794	3.894	-1,08
2.	Jumlah bayi	Orang	4.516	4.493	4.293	3.795	3.894	-3,49
3.	Rasio Bayi Berakta Kelahiran		0,91	0,92	0,98	1,00	1,00	2,54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020; Hasil Olahan 2020

Apabila melihat tabel di atas, rasio bayi berakta kelahiran mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada awal periode yaitu tahun 2015 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 0,91. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 1,00 bayi yang memiliki akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin meningkat. Pencapaian ini didukung dengan adanya program 3 in 1 di Dinas, Kecamatan dan Rumah Sakit. Program 3 in 1 adalah salah satu program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pengurusan dan penerimaan akte kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak dirumah sakit tempat dilahirkan. Selain itu mulai tahun 2013, pembuatan akta kelahiran ditentukan dengan asas peristiwa, dimana akta dibuat berdasarkan tempat kelahiran bayi. Namun di tahun 2014, penerbitan akta kelahiran ditentukan berdasarkan domisili orang tua.

3. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diketahui bahwa seluruh pasangan nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakta nikah. Berikut adalah data rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.

Tabel 2.193 Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Orang	88.644	93.368	97.646	105.965	131.692
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Orang	189.726	189.805	190.487	191.839	193.805
3.	Rasio pasangan berakte nikah		0,42	0,44	0,47	0,49	0,51

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio pasangan berakta nikah belum mencapai kondisi yang optimal.

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota

Basis data atau *database* merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan *database* akan memudahkan *stakeholder* untuk mengambil, mencari, atau menganalisis data kependudukan. Tabel berikut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil telah menerapkan *database* kependudukan skala kota dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019.

Tabel 2.194 Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Aturan pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Tabel berikut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019.

Tabel 2.195 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

6. Cakupan Penerbitan KTP

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah KTP yang diterbitkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya sudah memiliki KTP.

Tabel 2.196 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Kartu	284.687	297.800	302.408	306.600	311.302
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	Orang	307.033	306.950	309.788	313.317	314.241
3.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	92,72	97,02	97,62	97,86	99,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan penerbitan KTP di Kota Yogyakarta cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan hal yang baik, terutama jika dilihat angka cakupan pada tahun 2019 sudah mencapai 99,06%.

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Indikator cakupan penerbitan akta kelahiran merupakan hasil perbandingan antara jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dengan jumlah kelahiran di tahun bersangkutan.

Tabel 2.197 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Orang	4.089	4.139	4.202	3.779	3.894
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Kelahiran	4.516	4.493	4.293	3.795	3.894
3.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	90,54	92,12	97,88	99,58	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan cakupan penerbitan akta kelahiran. Pada tahun 2015 cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 90,54% dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga mencapai angka 100%. Kenaikan angka cakupan penerbitan akta kelahiran menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran. Pencapaian ini didukung dengan adanya program 3 in 1 di Dinas, Kecamatan dan Rumah Sakit. Program 3 in 1 adalah salah satu program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pengurusan dan penerimaan akte kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak di rumah sakit tempat dilahirkan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Perkantoran pemerintahan kelurahan merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan. Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di Kota Yogyakarta. Kualitas perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.198 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat Baik	Kantor	12	14	10	20	21
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik	Kantor	15	9	19	13	15
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang Baik	Kantor	18	22	16	12	9
Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan	Kantor	45	45	45	45	45

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik	Persen	60,00	51,11	64,44	73,33	80,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2015 cakupan sebesar 60%, kemudian menurun menjadi 51,11% pada tahun 2016. Selanjutnya cakupan terus meningkat hingga mencapai 80% pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat perubahan kondisi kantor kelurahan dari kurang baik menjadi sangat baik karena pembangunan gedung baru, yaitu Kelurahan Demangan, Ngupasan dan Brontokusuman. Sementara itu, terdapat perubahan kondisi kantor kelurahan dari sangat baik menjadi baik karena kerusakan bangunan seperti atap bocor, eternit berlubang dan kerusakan papan nama, yaitu kelurahan Rejowinangun, dan Prawirodirjan.

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Indikator jumlah kelompok binaan LPM tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. LPM pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan.

Tabel 2.199 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	kelompok	616	616	616	616	616
2.	Jumlah LPM	kelompok	45	45	45	45	45
3.	Rata-rata binaan LPM		13,69	13,69	13,69	13,69	13,69

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah kelompok binaan LPM jumlahnya cenderung stagnan. Di tahun 2015-2019 jumlahnya 616 kelompok dengan total jumlah LPM dari tahun 2015-2019 sebanyak 45 kelompok. Hal ini pun berdampak pada persentase rata-rata binaan LPM yang mencapai 13,69%.

3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah wadah kegiatan bagi kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan dari PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Tabel 2.200 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma)	Kelompok	5.146	5.173	4.854	3.916	4.565
2.	Jumlah PKK	Kelompok	3.204	3.208	3.240	3.210	3.203
3.	Rata-rata binaan PKK		1,61	1,61	1,50	1,22	1,43

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya kecenderungan penurunan jumlah rata-rata binaan PKK di tahun 2017-2018, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2019. Sementara itu kelompok dasawisma yang ada di Kota Yogyakarta kebanyakan mulai kurang aktif atau bahkan sudah tidak aktif lagi dari tahun ke tahun. Selain itu penyebab dari penurunan kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma) disebabkan oleh penggabungan RT di wilayah dan dikuatkan dengan perwal kampung No.72 tahun 2018, dengan adanya penggabungan RT sehingga memberikan pengaruh pada jumlah dasawisma.

4. Persentase LSM Aktif

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM berfungsi untuk melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.

Bila melihat dari bentuknya, LSM adalah inisiatif dan merupakan bentukan dari masyarakat. Oleh karena itu LSM bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan

sosial budaya maupun kegotongroyongan. LSM juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam mendorong pembangunan segala bidang. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah LSM dengan jumlah LSM yang aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.201 Persentase LSM Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah LSM yang Aktif	unit	17	18	28	37	38
2.	Jumlah seluruh LSM	Unit	N/A	40	48	49	50
3.	Persentase LSM aktif	%	N/A	45,00	58,33	75,51	76,00

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2020

Dikarenakan keterbatasan dan perbedaan sumber data, jumlah keseluruhan LSM yang diketahui mulai pada tahun 2016. Sementara itu jumlah LSM yang aktif dapat diketahui berdasarkan masa berlaku yang ada pada surat keterangan terdaftar (SKT) dari masing-masing LSM yang melapor kepada Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogyakarta. Dari data yang ada, dapat terlihat bahwa jumlah LSM yang aktif meningkat jumlahnya hingga tahun 2019. Jumlah persentase yang ada menunjukkan bahwa jumlah LSM yang aktif pada tahun 2016 sampai dengan 2019 meningkat namun dengan angka yang masih di bawah 100%. Pada tahun 2019 ada penambahan 1 Ormas/LSM yang terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa.

5. Persentase LPM Berprestasi

Ajang kompetisi dan mengoptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan di tengah kelembagaan sosial masyarakat. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberi rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kota Yogyakarta untuk mendapatkan LPMK berprestasi. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk meningkatkan gerak keaktifan lembaga-lembaga tersebut. LPMK berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (saat ini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Yogyakarta untuk LPMK yang memiliki prestasi baik. Terdapat sepuluh kriteria dalam menentukan LPMK berprestasi, diantaranya:

- a. Ketaatan antara realisasi dengan proposal kegiatan;
- b. Ketaatan volume pekerjaan dengan proposal;
- c. Besarnya swadaya masyarakat;
- d. Perencanaan sesuai Musrenbang;
- e. Ketepatan waktu realisasi pelaksanaan;
- f. Fokus pelaksanaan;

- g. Realisasi pelaksanaan;
- h. Ketertiban administrasi;
- i. Persentase pemegang KMS; dan
- j. Persentase ketaatan membayar pajak PBB.

Tabel 2.202 Jumlah LPMK Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah LPMK Berprestasi	Kelompok	6	6	7	N/A	N/A
2.	Jumlah LPMK	Kelompok	45	45	45	45	45
3.	Persentase LPM Berprestasi	%	13,33	13,33	15,56	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat adanya stagnansi jumlah LPMK berprestasi sejak tahun 2015 hingga 2016 yaitu dengan enam LPMK dari jumlah keseluruhan 45 LPMK yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian di tahun 2017 terdapat peningkatan menjadi 7 LPMK berprestasi dengan persentase 15,56%. Pemberian apresiasi LPMK berprestasi ini diharapkan dapat memacu semangat dan motivasi seluruh LPMK di Kota Yogyakarta untuk semakin unggul dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Namun, untuk saat ini sudah tidak ada penilaian terkait LPMK berprestasi sehingga terdapat kekosongan data di tahun 2018-2019.

6. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skop paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Yogyakarta muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2.203 Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta	kelompok	1	1	1	1	1
2.	Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta	kelompok	14	14	14	14	14

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta	kelompok	45	45	45	45	45
4.	Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta	kelompok	615	616	616	616	616
5.	Jumlah kel. PKK RT	kelompok	2.529	2.532	2.578	2.535	2.527
6.	Jumlah kel. Dasawisma	kelompok	5.146	5.173	4.854	3.916	4.565

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat jumlah kelompok PKK di tingkat RT jumlahnya semakin meningkat sejak tahun 2015 hingga ke tahun 2017, namun di tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Sementara itu di tingkat dasawisma jumlahnya menurun cukup besar dari tahun 2017-2018. Hal ini dikarenakan oleh penggabungan RT di wilayah dan dikuatkan dengan perwal kampung No.72 tahun 2018, dengan adanya penggabungan RT sehingga memberikan pengaruh pada jumlah dasawisma. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus mengingat keaktifan kelompok PKK bertujuan untuk memantau usaha-usaha aktif di tingkat paling bawah dalam merealisasikan program-program pembangunan. Tanpa adanya kegiatan PKK yang aktif, maka akan lebih sulit dalam kegiatan realisasi program pembangunan pada tingkatan bawah.

7. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, posyandu juga menjadi tempat pelayanan keluarga berencana. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada. Berikut ini merupakan data posyandu aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.204 Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah posyandu aktif	Unit	625	625	623	623	618
2.	Jumlah seluruh posyandu	Unit	625	625	623	623	618
3.	Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020; Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase posyandu aktif dari tahun 2015-2019 sudah mencapai 100%. Namun pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan jumlah posyandu aktif yang sebelumnya berjumlah 625 pada tahun 2015-2016 menjadi 618 di tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh adanya penggabungan posyandu-posyandu menjadi satu namun dengan fungsi yang tetap sama dan jangkauan pelayanan yang tetap.

8. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat, menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, makin kecilnya jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 2.205 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rupiah	1.207.896.050	1.308.416.080	1.618.887.325	1.423.299.240	1.939.122.500
2.	Total Program	Rupiah	3.835.000.000	4.218.500.000	4.640.350.000	4.640.350.000	5.540.350.000
3.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program	Persen	31,49	31,50	34,89	30,67	35,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Dapat dilihat pada tabel bahwa dari tahun ke tahun persentase jumlah swadaya masyarakat di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2018 sempat mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar semakin membaik data ini dapat dilihat berdasarkan nilai persentase di tahun 2019 kembali meningkat bahkan lebih tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

9. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat. Setelah program pemberdayaan dihentikan oleh pemerintah, maka diharapkan program-program yang sudah ada dapat dipelihara dan diteruskan oleh masyarakat agar dapat terus bermanfaat meskipun pemerintah sudah tidak menjalankan program tersebut.

Tabel 2.206 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat	Buah	2	2	2	2	2
2.	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Buah	2	2	2	2	2
3.	Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 bahwa jumlah program pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat jumlahnya tetap yakni sebanyak dua program. Sementara itu persentase pemeliharaan pasca program yang ada juga telah mencapai angka 100% dan bertahan hingga tahun 2019.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Pada tahun 2017 Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang berperan aktif di Kampung KB diantaranya Dinas Pertanian dan Pangan, DLH, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Kecamatan/Kelurahan, Koramil, Polsek, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPMPPA, Dinas Pendidikan, Kemenag/KUA, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, BPBD, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappeda, PKK Kota Yogyakarta, BNN, BKKBBN, Koperasi AKU dan Perguruan Tinggi (UNY, UAD, UGM, UMY, Amikom).

2. Jumlah Perangkat Daerah yang Menyetujui dan Memanfaatkan Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kerjasama dengan 50 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam hal ini kelurahan dihitung sebagai PD tersendiri di luar kecamatan.

3. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Indikator rata-rata anak per keluarga menggambarkan keberhasilan keluarga berencana. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan rasio keluarga. Rasio anak adalah rasio seluruh penduduk usia 0-18 tahun. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang fluktuatif setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 rata-rata jumlah anak per keluarga mencapai nilai 1,25 namun di

tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,22 anak per keluarga. Pemerintah secara nasional menyarankan agar jumlah anak adalah 2 anak per keluarga. Bila mengacu pada saran pemerintah tersebut, kondisi di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan anjuran.

Tabel 2.207 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak	Orang	110.296	110.296	167.319	167.757	168.876
2.	Jumlah keluarga	keluarga	129.092	131.092	133.686	135.602	137.933
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	1,17	1,19	1,25	1,24	1,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020; Hasil Olahan, 2020

4. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208 Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	34.818	32.704	29.579	27.453	27.237
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	46.213	44.454	42.147	40.258	38.951
3.	Rasio akseptor KB	%	75,34	73,57	70,18	68,19	69,93

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Catatan : pengertian akseptor KB sama dengan peserta KB aktif

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2018 rasio akseptor KB terus menurun, yaitu dari 75,34% menjadi 68,19%. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio akseptor KB sedikit meningkat menjadi 69,93%. Apabila dilihat dari jumlah akseptor KB pada tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang semakin menurun, yaitu dari 34.818 menjadi 27.237. Penurunan jumlah akseptor KB disebabkan adanya pasangan usia subur yang hamil atau drop out karena memasuki usia menopause.

5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga termasuk di dalamnya peserta KB baru pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat,

obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

Tabel 2.209 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan	34.818	32.704	29.579	27.453	27.237
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	46.213	44.454	42.147	40.258	38.951
3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	%	75,34	73,57	70,18	68,19	69,93

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Tabel di atas menampilkan data angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun atau yang sering disebut dengan indikator cakupan peserta KB aktif dalam rentang lima tahun. Cakupan KB aktif di Kota Yogyakarta pada 2015 yaitu 75,34% kemudian terus turun hingga tahun 2018 menjadi 68,19%. Pada tahun 2019 angka tersebut meningkat menjadi 69,93%. Dalam target RPJMN pada tahun 2019 untuk angka pemakaian kontrasepsi sebesar 66%. Mengacu pada target tersebut, Kota Yogyakarta sudah mampu mencapai target sejak tahun 2015.

Tabel 2.210 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan	34.818	32.704	29.579	27.453	27.237
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	46.213	44.454	42.147	40.258	38.951
3	Cakupan peserta KB aktif	%	75,34	73,57	70,18	68,19	69,93

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020; Hasil Olahan, 2020

6. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun

ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.

Tabel 2.211 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun	Kelahiran	161	55	68	62	29
2	Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	Orang	16.892	16.695	16.606	16.375	16.651
3	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	Per 1.000 wanita	9,53	3,29	4,09	3,79	1,74

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020; Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun sebesar 9,53, kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,29 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 angka tersebut meningkat menjadi 4,09. Selanjutnya terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 1,74, yang artinya setiap 1.000 perempuan usia 15-19 tahun terdapat 1 orang yang telah melahirkan. Penurunan tersebut dikarenakan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang didalamnya memberikan pembekalan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan juga mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program tersebut menyarankan usia kawin pertama bagi wanita adalah 21 tahun dan bagi pria 25 tahun.

7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni di bawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun, dan usia di atas 35 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari program Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama. Tabel berikut menunjukkan cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya berusia <20 tahun di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.212 Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th	Pasangan	118	122	N/A	N/A	105
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	46.213	32.704	42.147	40.258	38.951
3.	Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	0,26	0,37	N/A	N/A	0,27

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Apabila melihat tabel di atas, cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun pada tahun 2015, yaitu sebesar 0,26%, kemudian meningkat menjadi 0,37% pada tahun 2016. Pada tahun 2017-2018 tidak dilakukan pendataan, sehingga data tidak dapat ditampilkan. Hal ini dikarenakan terdapat *miss communication* dengan BKKBN yang mengakibatkan pendataan tidak dianggarkan. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun menurun menjadi

0,27%, dibandingkan tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya program pendewasaan usia perkawinan, adanya program PIK-R, dan gerakan orang tua sahabat remaja.

8. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet need adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB. Sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

Tabel 2.213 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi + Jumlah PUS yang ingin anak tunda	Pasangan	4.802	5.067	5.790	6.095	3.654
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	46.213	32.704	42.147	40.258	38.951
3.	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	10,39	15,49	13,74	15,14	9,38

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Tabel di atas menunjukkan nilai *unmet need* KB selama lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 *unmet need* KB sebesar 10,39%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 15,49% pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 angka tersebut menurun menjadi 13,74%, dan setelah itu terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2018 menjadi 15,14%. Pada akhir periode *unmet need* KB menurun menjadi 9,38%. Penurunan nilai *unmet need* disebabkan oleh jumlah pasangan yang tidak ingin anak lagi dan jumlah pasangan usia subur yang ingin anak tunda mengalami penurunan, hal ini dikarenakan mengikuti metode modern kontrasepsi atau tradisional kontrasepsi.

Dalam RPJMN, pemerintah berusaha menurunkan angka ini menjadi 9,91% di tahun 2019, sedangkan dalam target BKKBN, targetnya lebih tinggi lagi yaitu diturunkan hingga 5%. Mengacu pada kedua target tersebut, Kota Yogyakarta masih belum mampu menurunkan angka *unmet need* selama periode tersebut. Penurunan *unmet need* KB disebabkan oleh jumlah pasangan yang tidak ingin anak lagi dan jumlah PUS yang ingin anak tunda mengalami penurunan karena mengikuti metode modern kontrasepsi atau tradisional kontrasepsi.

9. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan

dalam jangka panjang. Selain itu, menurut BKKBN, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jenis MKJP adalah IUD, Implan atau susuk, tubektomi, atau vasektomi.

Tabel 2.214 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MJKP	Pasangan	14.188	13.682	12.674	11.965	11.796
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	34.818	44.454	29.579	27.453	27.237
3.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40,75	30,78	42,85	43,58	43,31

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Catatan: MKJP terdiri atas IUD, MOP, MOW, Implan/Susuk

Tabel di atas menunjukkan kondisi lima tahun terakhir persentase penggunaan MKJP di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2015 persentase MKJP sebesar 40,75%, kemudian menurun menjadi 30,78% pada tahun 2016. Selanjutnya persentase MKJP terus meningkat hingga mencapai 43,58% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase MKJP mengalami penurunan menjadi 43,31%. Penurunan MKJP disebabkan oleh akseptor KB yang ingin segera memiliki anak, hamil atau sudah memasuki usia menopause. Dalam RPJMN 2014-2019, pemerintah menargetkan peningkatan persentase MKJP di Indonesia dari 18,3% (2012) menjadi 23,5% di tahun 2019. Mengacu pada target tersebut, Kota Yogyakarta sudah mencapai target tersebut.

10. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi (*contraceptive discontinuation rate*) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (*exposure*) karena berbagai alasan, seperti kegagalan atau mengalami efek samping. Angka ini juga bisa disebut dengan kejadian *drop out* KB.

Tabel 2.215 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan	5.098	5.982	6.804	6.710	3.654
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	34.818	32.704	29.579	27.453	27.237
3.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	14,64	18,29	23,00	24,44	13,42

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-rata persentase tingkat keberlangsungan pemakaian

kontrasepsi sebesar 45,66% per tahun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi. Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi atau biasa disebut *drop out* (DO) dalam data di atas dapat dikarenakan menopause, sedang hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda, tidak ingin lagi memiliki anak ataupun alasan-alasan lainnya. Rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah *drop out* (DO) dalam data di atas adalah : { (Jumlah Peserta KB Aktif Tahun Lalu + Jumlah Peserta KB Baru Tahun Ini) - Jumlah Peserta KB Aktif Bulan ini } Untuk mengetahui alasan masing-masing PUS tidak lagi menggunakan kontrasepsi dibutuhkan data *by name by address* yang tercatat dalam laporan kader tingkat RT dan RW.

11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

Tabel 2.216 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Orang	5.112	5.036	5.036	4.619	4.470
2.	Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS	Orang	5.931	5.759	5.961	5.530	5.438
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	86,19	87,45	84,48	83,53	82,20

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan tabel di atas, cakupan anggota bina BKB yang ber KB di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu dari 86,19% menjadi 87,45%. Selanjutnya terus mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2019, yaitu dari 84,48% menjadi 82,20%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta di-*update* satu tahun sekali. Sedangkan statistik rutin

merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKL yang bersatus PUS. Selain itu penyebab lainnya adalah anggota BKB adalah keluarga yang masih memiliki balita atau rata-rata keluarga anggota BKB adalah PUS Mupar (pasangan usia subur yang berumur kurang dari 35 tahun atau lebih muda). PUS MUPAR tidak menggunakan metode kontrasepsi modern bisa disebabkan karena sedang hamil atau ingin anak segera.

12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Cakupan anggota BKR ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKR yang merupakan PUS dan berKB dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota BKR. Kondisi cakupan anggota BKR ber-KB di Kota Yogyakarta dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.217 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Orang	1.546	1.719	1.479	1.368	1.339
2.	Jumlah anggota kelompok BKR yang berstatus PUS	Orang	1.873	1.935	1.822	1.834	1.733
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	82,54	88,84	81,17	74,59	77,26

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Secara umum, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB sebesar 82,54 dan kemudian meningkat menjadi 88,84% pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2019 angka tersebut terus menurun hingga mencapai 77,26%. Penurunan jumlah ini terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta di-*update* satu tahun sekali. Sedangkan statistik rutin merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKL yang bersatus PUS. Selain itu, anggota BKR dan BKL yang masih PUS cenderung merupakan PUS yang mendekati menopause dan tidak ingin punya anak lagi berpendapat bahwa mereka tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi modern.

13. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Cakupan anggota BKL ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKL yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah kelompok BKL seluruhnya. Di Kota Yogyakarta cakupan anggota BKL ber-KB mengalami fluktuasi, di tahun 2015 memiliki persentase sebesar 81,34% lalu mengalami peningkatan menjadi 87,65% pada tahun 2016, selanjutnya tahun 2017-2019 terus menurun hingga mencapai 68,93% yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.218 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Orang	1.722	1.888	1.624	1.529	1.329
2.	Jumlah anggota kelompok BKL yang berstatus PUS	Orang	2.117	2.154	1.891	1.937	1.928
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	81,34	87,65	85,88	78,94	68,93

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Penurunan pada tahun 2017-2019 terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta di-*update* satu tahun sekali. Sedangkan statistik rutin merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKL yang bersatus PUS. Selain itu faktor pendorong lainnya adalah anggota BKR dan BKL yang masih PUS cenderung merupakan PUS yang mendekati menopause dan tidak ingin punya anak lagi berpendapat bahwa mereka tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi modern.

14. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga. PPKS berada di lingkup kecamatan seperti halnya puskesmas. Persentase PPKS dapat digunakan untuk melihat cakupan PPKS di suatu wilayah. Adapun data terkait jumlah unit Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2.219 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PPKS	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Kecamatan	Wilayah	14	14	14	14	14
3.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah PPKS di Kota Yogyakarta hanya terdapat satu unit, yaitu Kecamatan Mergangsan. Hal ini menyebabkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta cukup rendah, yaitu sebesar 7,14%.

15. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (generasi berencana), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Tabel di bawah ini menunjukkan cakupan remaja PIK RM per kecamatan/distrik selama kurun waktu lima tahun di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.220 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PIK R/M	Kelompok	42	42	51	51	55
2.	Jumlah kecamatan	Wilayah	14	14	14	14	14
3.	Cakupan Remaja Dalam PIK Remaja/Mahasiswa	%	300,00	300,00	364,29	364,29	392,86

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Tabel di atas menunjukkan cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019. Secara umum, cakupan remaja dalam PIK Remaja/Mahasiswa mengalami peningkatan. Seperti yang terlihat pada tahun 2015-2016 memiliki nilai yang sama sebesar 300%, kemudian meningkat menjadi 364,29% pada tahun 2017-2018. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan remaja dalam PIK Remaja/Mahasiswa meningkat menjadi 392,86%. Peningkatan jumlah PIK R disebabkan oleh beberapa wilayah yang membentuk forum PIK R setelah merasakan manfaat adanya kegiatan PIK R.

16. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan KB) pada awalnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kabupaten/kota, namun terjadi pengalihan status menjadi ASN pemerintah pusat. Pengalihan status PKB/PLKB ini merupakan konsekuensi pelaksanaan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski telah beralih kelola ke pemerintah pusat, PKB/PLKB akan tetap bertugas di daerah, karena fungsi pendayagunaan PKB/PLKB tetap ada pada pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.221 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	Orang	23	21	20	18	18
2.	Jumlah PKB/PLKB	Orang	23	21	20	18	18
3.	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Tabel di atas menunjukkan cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk tahun 2015-2019 di Kota Yogyakarta. Secara umum, dapat dilihat bahwa cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah telah mencapai 100% dari tahun 2015-2019. Namun apabila dilihat dari jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan, selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan sebanyak 23 orang, namun di tahun 2016 mulai mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 hanya ada 18 orang PKB dan PLKB di Kota Yogyakarta. Penurunan jumlah PKB dan PLKB pada tahun 2019 disebabkan adanya PKB dan PLKB yang telah memasuki masa pensiun.

17. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB. Dalam menjaga kelangsungan kepesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB. Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB

dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta.

Tabel 2.222 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	Orang	2.359	2.327	1.890	1.706	1.613
2.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS	Orang	2.914	2.690	2.165	1.919	1.919
3.	Cakupan PUS Peserta KB UPPKS	%	80,95	86,51	87,30	88,90	84,05

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Tabel di atas menunjukkan cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019. Cakupan PUS peserta KB OPPKS mengalami fluktuasi berada pada rentang 80-89%. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 88,90%, sedangkan cakupan terendah terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 80,95%. Dapat dilihat berdasarkan data yang ada di dalam tabel, jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB dan jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS dalam rentang tahun 2015-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mengalami penurunan dikarenakan adanya anggota kelompok yang sedang hamil atau yang ingin segera memiliki anak. Hal tersebut sama dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS juga mengalami penurunan karena alasan tersebut.

18. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan:

- a. Aspek demografis (jumlah kepala keluarga);
- b. Aspek wilayah teritorial (jumlah kampung/kelurahan); dan
- c. Aspek geografis (luas wilayah dan daerah kepulauan).

Tabel 2.223 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa	Orang	45	45	45	45	45
2.	Jumlah kelurahan	Wilayah	45	45	45	45	45
3.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Tabel di atas menunjukkan rasio PPKBD setiap kelurahan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun dari 2015 hingga 2019. Jumlah petugas pembantu pembina KB desa ada sejumlah 45 orang sejak tahun 2015 dan tidak berubah hingga tahun 2019. Rasio PPKBD di Kota Yogyakarta adalah 100%, artinya setiap kelurahan di Kota Yogyakarta sudah memiliki satu orang PPKBD.

19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Dalam rangka mendukung kesuksesan program Keluarga Berencana (KB) di daerah, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah dengan adanya jaminan ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi hak-hak reproduksi pasangan usia subur. Melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi, diharapkan dapat menekan angka kelahiran di daerah tersebut.

Alat kontrasepsi merupakan pasokan dari pusat yang didistribusikan ke Kabupaten/Kota. Sedangkan perkiraan permintaan masyarakat merupakan target yang harus dicapai oleh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peserta KB. Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi tidak selalu dapat dipenuhi karena alat kontrasepsi beserta pelayanan KB gratis lebih ditujukan untuk keluarga Pra KS dan KS 1. Harapannya keluarga sejahtera menjadi peserta KB mandiri. Peningkatan pasokan pusat untuk IUD sebagai upaya untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.

Tabel 2.224 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota	IUD	3.055	1.900	1.608	2.236	2.681
		Kondom	219	143	58	251	205
		Pil KB	7.400	4.998	3.798	1.567	3.800
		Suntikan	3.399	2.224	7.000	1.733	3.725
		Susuk KB/Implan	596	422	480	392	367
		Total	14.669	9.687	12.944	6.179	10.778
2.	Perkiraan permintaan masyarakat	IUD	22.883	10.221	13.775	1.728	7.063
		Kondom	2.126	7.040	2.704	149	13.561
		Pil KB	6.079	4.658	3.192	2.315	2.309
		Suntikan	8.740	10.532	39.464	9.426	5.429
		Susuk KB/Implan	856	1.140	2.072	361	824
		Total	40.684	33.591	61.207	13.979	29.186

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	36,06	28,84	21,15	44,20	36,93

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2020

20. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Perpres no.19 tahun 2016 bahwa peserta BPJS saat ini dapat menggunakan layanan KB secara gratis, yang sebelumnya layanan ini belum ditanggung BPJS. Beberapa pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS adalah Vasektomi & Tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Layanan ini merupakan kerjasama BPJS dengan faskes dan jejaringnya untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

Tabel 2.225 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	Unit	7	43	43	42	43
2.	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	55	57	57	51	49
3.	Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama Dengan BPJS	%	12,73	75,44	75,44	82,35	87,76

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase faskes yang bekerjasama dengan BPJS dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 hingga mencapai 75,44%, angka tersebut bernilai tetap pada tahun 2017, selanjutnya terus meningkat sampai dengan tahun 2019 mencapai 87,76%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS.

21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan dan pembangunan keluarga dilakukan melalui penguatan Delapan Fungsi Keluarga. Delapan Fungsi Keluarga yang dimaksud antara lain Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Lingkungan.

Tabel 2.226 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	700	703	714	690	688
2.	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	700	703	714	690	688
3.	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi 688 kelompok kegiatan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kelompok kegiatan baru dan kelompok kegiatan yang sudah tidak aktif dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelompok BKS yang terdiri dari Kelompok BKB terdapat 6 kelompok kegiatan yang sudah tidak aktif, Kelompok BKR terdapat 2 kelompok kegiatan yang sudah tidak aktif dan Kelompok BKL bertambah 2 kelompok kegiatan baru;
- b. Kelompok UPPKS berjumlah tetap; dan
- c. Kelompok PIK R bertambah 4 kelompok kegiatan baru.

Sedangkan apabila dilihat dari cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui Delapan Fungsi Keluarga sudah mencapai 100%. Untuk mendukung pelaksanaan Delapan Fungsi Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan pembinaan melalui kelompok kegiatan BKS (Bina Keluarga Sejahtera), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dan PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dengan sasaran yang berbeda untuk masing-masing kelompok kegiatan. Penjabaran terkait masing-masing kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok BKS terdiri dari (a) Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang beranggotakan keluarga yang mempunyai anak balita sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lain terkait dengan tumbuh kembang anak; (b) Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai remaja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sikap perilaku orangtua dan anggota keluarga lain sehingga terjalin hubungan yang harmonis; (c) Kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia);
- b. Kelompok UPPKS merupakan wadah pembelajaran bagi keluarga di bidang usaha yang menjadi wahana terjadinya perubahan perilaku keluarga untuk mengenal usaha ekonomi skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan keluarga anggota kelompok UPPKS dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB; dan

- c. Kelompok PIK R suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

22. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase pembiayaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui APBD di Kota Yogyakarta. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase pembiayaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 persentase pembiayaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 0,25%, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 0,44% pada tahun 2019.

Tabel 2.227 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	Rp.	3.823.436.043	4.478.407.193	4.174.435.294	5.655.372.450	7.564.239.660
2.	Jumlah APBD	Rp.	1.539.699.344.285,44	1.665.420.970.708,79	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34
3.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD	%	0,25	0,27	0,28	0,34	0,44

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2020

23. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.228 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	CPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>)	%	73,66	68,19	92,50	77,91	105,61
2	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)		1,92	1,24	135,08	1,22	135,79

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
3	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	%	11,4	15,13	66,58	9,38	116,40

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data di atas, 3 indikator SDGs di bidang Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2019 sudah mencapai 100%.

I. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, data penumpang angkutan umum yang digunakan di Kota Yogyakarta adalah data penumpang bis yang masuk Terminal Giwangan.

Tabel 2.229 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal)	Jiwa	2.121.076	1.970.096	3.713.458	3.054.948	4.181.863	25,13

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2020, dengan Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas jumlah penumpang bis yang ada di Terminal Giwangan Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata yaitu 25,13% per tahun. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, jumlah penumpang angkutan umum dihitung dari jumlah pembelian tiket masuk peron ke Terminal Giwangan. Namun, mulai bulan Januari 2017, jumlah penumpang angkutan umum dihitung dari jumlah penumpang *rill* yang ada di dalam bus, bukan lagi dari penumpang yang masuk dan membayar retribusi peron. Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2017 tersebut dianggap lebih relevan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Penurunan jumlah penumpang bis pada tahun 2018 karena banyaknya alat transportasi yang harganya bersaing dengan harga tiket bis dan juga semakin banyak kendaraan pribadi sebagai alternatifnya. Kecenderungan meningkatnya jumlah penumpang pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa moda transportasi bus AKDP, AKAP maupun Perkotaan masih menjadi kebutuhan masyarakat disamping moda transportasi lain seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya.

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.230 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	2.196	2.328	1.938	1.756	1.591	-7,38

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cukup fluktuatif dengan kecenderungan turun yaitu sebanyak 2.196 unit pada tahun 2015 menjadi 1.591 unit pada tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata -7,38% per tahun.

Penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di tahun 2019 dapat terjadi karena akumulasi dari berbagai faktor seperti mutasi kendaraan, perubahan angkutan umum menjadi angkutan pribadi, berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Yogyakarta maupun berkurangnya kesadaran untuk melakukan uji KIR.

3. Jumlah Terminal Bus

Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bus di Kota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di Kecamatan Umbulharjo.

Tabel 2.231 Jumlah Terminal Bus, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Terminal Bus	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Halte Permanen Transjogja	Unit	34	34	34	50	69
3.	Jumlah Halte <i>Portable</i> Bus Transjogja	Unit	30	40	40	40	77
4.	Jumlah Stasiun Kereta Api	Unit	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2020

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Di samping itu, juga terdapat jumlah halte untuk armada atau bus Transjogja. Bus Transjogja menggunakan dua jenis halte, yakni halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dipinjampakaikan ke provinsi, sehingga semua halte sekarang dioperasikan oleh provinsi. Selain halte permanen, mulai tahun 2013 terdapat pembangunan halte *portable* untuk bus Transjogja, di tahun 2015 jumlah halte *portable* untuk Transjogja sejumlah 30 unit dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 jumlah halte *portable* sejumlah 77 unit. Selain halte *portable* jumlah halte permanen untuk Bus Transjogja, di tahun 2015-2017 jumlahnya tetap, yaitu sebanyak 34 unit pada tahun 2018 jumlah halte bertambah 16 unit dengan total jumlah halte permanen saat ini mencapai 50 unit dan tahun 2019 halte bertambah 19 unit dengan total jumlah halte permanen saat ini mencapai 69 unit.

4. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator persentase layanan angkutan darat ini didapatkan dari pembagian jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat lalu dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

Tabel 2.232 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah angkutan darat	Unit	12.803	12.106	12.349	11.609	11.230	-3,17
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	Jiwa	2.121.076	1.970.096	3.713.458	3.054.948	4.181.863	22,62
3.	Persentase layanan angkutan darat	%	0,60	0,61	0,33	0,38	0,27	-15,19

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, persentase layanan angkutan darat di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun dari 0,60% pada tahun 2015 menjadi 0,27% di tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -15,19% per tahun. Hal tersebut dipengaruhi karena meningkatnya jumlah penumpang angkutan darat yang tidak diimbangi dengan jumlah unit angkutan darat.

5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dua (karena setiap tahun satu angkutan umum uji KIR dua kali). Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belum tentu berdomilisi di Kota Yogyakarta, dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang lewat wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.233 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	Unit	7.676	7.849	7.289	6.530	6.103	-5,46
2.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	12.803	12.106	12.349	11.609	12.062	-1,38
3.	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	59,95	64,83	59,03	56,25	50,60	-3,89

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2020

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi kendaraan yang memenuhi kelayakan, akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi tanda uji.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar -3,89% per tahun. Hal tersebut dikarenakan tidak selarasnya pertumbuhan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dengan pertumbuhan angkutan umum. Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -5,46% per tahun. Sedangkan peningkatan jumlah angkutan umum pada tahun 2019 terjadi karena adanya update data jumlah angkutan KTB di Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata pertumbuhan -1,38% per tahun.

6. Pemasangan Rambu-Rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikator pemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan nilai yang terus mengalami peningkatan, yakni sebesar 86,40% pada tahun 2015 meningkat menjadi 91,29% pada tahun 2019, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,40% per tahun.

Tabel 2.234 Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Rambu-rambu Terpasang	Unit	6.071	6.095	6.103	6.210	6.415	1,40
2.	Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Tersedia	Unit	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027	0,00
3.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	86,40	86,73	86,85	88,37	91,29	1,40

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2020

Pemasangan Rambu di Tahun 2019 menambah jumlah rambu dengan rincian 100 Rambu Larangan/Perintah, 50 Rambu Penunjuk dan 40 Rambu RPPJ. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan jumlah rambu-rambu yang ada di berbagai sudut kota.

7. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.235 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang Jalan	Km	248,09	248,09	233,21	233,21	233,21	-1,50
2.	Jumlah Kendaraan	Unit	276.651	277.088	279.562	289.480	305.565	2,11
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan	km/unit	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	-3,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020; Kantor Samsat Kota Yogyakarta, Tahun 2020

Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,11% per tahun, yakni 276.651 unit kendaraan pada tahun 2015 meningkat menjadi 305.565 unit kendaraan pada tahun 2019. Panjang jalan yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah panjang jalan bernomor ruas jalan yang dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2016 memiliki panjang yang sama, yakni sepanjang 248,09 km. Akan tetapi, tahun 2017 panjang jalan berubah menjadi 233,21 karena ada perbaikan data oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menurun dengan angka pertumbuhan rata-rata -3,53% per tahun.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan dengan tidak diiringi dengan penambahan luas atau lebar jalan tentunya akan semakin membuat kemacetan semakin marak. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

8. Jumlah Orang dan Barang Melalui Terminal dan Stasiun per Tahun

Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki terminal dengan tipe terminal barang (*cargo*).

Tabel 2.236 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal)	Jiwa	2.121.076	1.970.096	3.713.458	3.054.948	4.181.863	25,13

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2020, dengan Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas jumlah penumpang bis yang ada di Terminal Giwangan Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata yaitu 25,13% per tahun. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penumpang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah penumpang. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, jumlah penumpang angkutan umum dihitung dari jumlah pembelian tiket masuk peron ke Terminal Giwangan. Namun, mulai bulan Januari 2017, jumlah penumpang angkutan umum dihitung dari jumlah penumpang *rill* yang ada di dalam bus, bukan lagi dari penumpang yang masuk dan membayar retribusi peron. Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2017 tersebut dianggap lebih relevan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Penurunan jumlah penumpang bis pada tahun 2018 karena banyaknya alat transportasi yang harganya bersaing dengan harga tiket bis dan juga semakin banyak kendaraan pribadi sebagai alternatifnya. Sedangkan pada tahun 2019 cenderung meningkat hal ini dapat dilihat bahwa moda transportasi angkutan umum masih menjadi kebutuhan masyarakat disamping angkutan pribadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya.

Selain itu, terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan yang berada di bawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) VI. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Gedongtengen. Stasiun ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Sementara itu, Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta apinya yang membujur dari barat ke timur, berada di wilayah Kecamatan Danurejan. Stasiun Lempuyangan ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas ekonomi.

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut, diduga saat ini bus bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan dugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang

dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta, didukung dengan tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbang masuk/keluar Kota Yogyakarta yang selalu habis (*sold out*) di akhir pekan atau pada saat hari-hari libur nasional.

Tabel 2.237 Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Berdasarkan Kelasnya di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penumpang kelas eksekutif	Orang	980.982	1.080.374	1.341.506	1.528.101	1.369.642	9,46
2.	Jumlah penumpang kelas bisnis	Orang	654.134	662.662	692.223	583.273	230.557	-17,61
3.	Jumlah penumpang kelas ekonomi	Orang	1.908.023	2.330.002	6.551.363	3.439.294	4.060.647	43,46
4.	Total penumpang melalui stasiun	Orang	3.543.139	4.073.038	8.585.092	5.550.668	5.660.846	23,09

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia, 2020

Jumlah penumpang Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 cenderung meningkat, yakni 3.543.139 penumpang pada tahun 2015 meningkat menjadi 8.585.092 penumpang pada tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5.550.668 penumpang kemudian naik kembali pada tahun 2019 menjadi 5.660.846 penumpang. Dibandingkan data tahun 2018, jumlah penumpang kelas eksekutif dan kelas bisnis pada tahun 2019 menurun sedangkan jumlah penumpang kelas ekonomi meningkat, hal ini dimungkinkan terjadi karena penumpang beralih atau lebih memilih kelas ekonomi dari pada kelas eksekutif dan/atau kelas bisnis, sehingga dari total penumpang yang melalui stasiun memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 23,09% per tahun.

Selain penumpang, kedua stasiun di wilayah Kota Yogyakarta juga mengangkut bahan bakar minyak dan barang hantaran potongan. Jumlah bahan bakar minyak yang melalui stasiun di Kota Yogyakarta memiliki nilai fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2015 hingga tahun 2018, yakni sebanyak 190.640 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 300.911 ton pada tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 256.188 ton. Sementara itu, jumlah barang hantaran potongan yang melalui stasiun, yakni sebanyak 8.910 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 15.254 ton pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 3.826 ton dengan pertumbuhan rata-rata total angkutan barang melalui terminal sebesar -19,45% per tahun.

Volume angkutan barang bahan bakar minyak melalui stasiun di Kota Yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2019 keluar dari tren meningkat selama tahun 2015-2018, namun demikian volume tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pasokan BBM di wilayah tujuan. Penurunan yang drastis pada volume bahan hantaran potongan diduga karena maraknya pengiriman barang dengan moda angkutan lain.

Tabel 2.238 Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Bahan bakar minyak	Ton	190.640	212.559	275.882	300.911	256.188	-19,00
2.	Barang hantaran potongan	Ton	8.910	8.705	12.174	15.254	3.826	-27,44
3.	Total angkutan barang melalui terminal	Ton	199.550	221.264	288.056	316.165	260.014	-19,45

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia, 2020

J. Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator cakupan layanan telekomunikasi ini didapatkan dari pembagian luas wilayah yang *tercoverage* dengan luas wilayah keseluruhan. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa luas cakupan yang telah ada di Kota Yogyakarta terkait layanan telekomunikasi. Data terkait layanan telekomunikasi didapatkan dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Yogyakarta, tetapi data yang ada hanya dari tahun 2017. Hal ini dikarenakan tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pendataan terkait data tersebut.

Tabel 2.239 Tabel Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2019

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019
1.	Luas Wilayah Yang <i>tercoverage</i>	Km	37,51	35,75	35,75
2.	Luas Wilayah Keseluruhan	Km	32,50	32,5	32,5
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi		1,15	1,10	1,10

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data pada tahun 2019 angka cakupan layanan telekomunikasi di Kota Yogyakarta adalah 1,10. Hal tersebut mengindikasikan jika secara umum Kota Yogyakarta telah lebih dari 100% *tercoverage* dengan layanan telekomunikasi. Hal tersebut terlihat dari lebih luasnya cakupan yang *tercoverage* dibandingkan luasan wilayah Kota Yogyakarta itu sendiri. Dalam hal ini, luas wilayah yang *tercoverage*

adalah data luas wilayah yang telah tercoverage dengan layanan *provider* telekomunikasi, bukan data telekomunikasi dengan layanan fiber optik.

Pada tahun 2017-2022 Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian merencanakan pemasangan free wifi pada Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di 158 lokasi. Pada tahun 2017 telah dilakukan pemasangan free wifi di 40 lokasi RTHP, kemudian meningkat menjadi 73 lokasi pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 98 lokasi. Sedangkan free cctv dipasang di kantor kelurahan, kecamatan, kawasan malioboro, alun-alun dan simpang traffic light. Pada tahun 2017-2022 pemasangan free cctv direncanakan di 172 lokasi. Pada tahun 2017 telah dilakukan pemasangan free cctv di 25 lokasi, kemudian meningkat menjadi 32 lokasi pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 42 lokasi.

2. Indeks Layanan Informasi Publik

Indeks Layanan Informasi Publik menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian sebesar 100,31% pada tahun 2018 dan sebesar 99,07% di tahun 2019.

K. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 2.240 Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah Koperasi Aktif	unit	462	462	454	364	364	-5,28
2	Jumlah Seluruh Koperasi	unit	556	556	557	364	364	-8,62
3	Persentase Koperasi Aktif	%	83,08	83,09	81,50	100,00	100,00	5,19

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Jumlah koperasi yang aktif di Kota Yogyakarta selama tahun 2015-2019 menunjukkan nilai yang fluktuatif dan cenderung menurun. Dari 462 unit koperasi

aktif di tahun 2015, turun menjadi 364 unit koperasi aktif pada tahun 2019. Hal ini pun mempengaruhi nilai pertumbuhan persentase koperasi aktif yang mencapai angka 5,19%. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan oleh penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2. Persentase BPR/LKM Aktif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di Kota Yogyakarta, meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dari perkembangannya, jumlah LKM di Kota Yogyakarta secara umum mengalami penurunan selama tahun 2015-2019. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya.

Tabel 2.241 Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam	Unit	20	20	15	10	10	-14,58
2.	Badan Usaha Kredit Pedesaan	Unit	14	14	14	14	14	0,00
3.	Koperasi Simpan Pinjam	Unit	46	47	47	38	33	-7,53
	Jumlah	Unit	80	81	76	62	57	-7,85

Sumber: Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan jumlah LKM mengalami penurunan dari tahun 2015-2019. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah LKM adalah karena jumlah anggota mengalami pengurangan sehingga menghambat operasional dari LKM tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri atau berhenti beroperasi.

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah

satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.242 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
Jumlah usaha mikro dan kecil	unit	22.418	22.707	23.175	23.586	25.385	3,19
Jumlah seluruh UKM	unit	23.341	23.468	23.987	24.398	26.196	2,96
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96,05	96,76	96,61	96,67	96,90	0,22

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan, dari 22.418 unit pada tahun 2015 menjadi 25.385 unit di tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,19%. Hal ini dipengaruhi oleh pengurusan IUM/OSS, satu orang pelaku usaha dapat memperoleh IUM lebih dari satu. Pelaku yang memperoleh IUM melalui OSS tidak hanya pelaku usaha mikro saja tapi juga pelaku usaha kecil. Dalam OSS spesifikasi usaha (meliputi perdagangan, perindustrian, perhubungan, transportasi) tidak seperti spesifikasi usaha yang menjadi kewenangan daerah (fashion, kuliner, kerajinan/craft, dan jasa). Selain peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil, jumlah seluruh UKM juga mengalami peningkatan sehingga persentase usaha mikro dan kecil juga mengalami peningkatan menjadi 96,90%.

4. Nilai Omset UKM yang Dibina

Nilai Omset UKM yang dibina menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan nilai sebesar Rp. 6.698.880.000,00 dan capaian 104,49 % di tahun 2018 dan nilai sebesar Rp. 7.368.768.000,00 dan capaian 109,47 % di tahun 2019.

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Yogyakarta banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi DIY dengan morfologi perkotaan.

Tabel 2.243 Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Investor PMA	Unit	33	63	72	20	12	-1,76
2	Investor PMDN	Unit	41	91	132	640	1.702	179,45
	Total	Unit	74	154	204	660	1.714	130,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data jumlah Investor PMDN dan Investor PMA di Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 dimana investor PMA mengalami fluktuasi, pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan hingga di tahun 2017 sejumlah 72 unit, namun di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya 12 unit saja. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah Investor PMDN yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, di tahun 2015 jumlah PMDN sebanyak 41 unit dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 berjumlah 1.702 unit. Namun jika dilihat dari total investor di tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalnya saja di tahun 2018 total jumlah investor sebanyak 660 unit dan mengalami lonjakan investor di tahun 2019 hingga mencapai 1.714 unit, dengan total pertumbuhan rata-rata mencapai 130,95%. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan perizinan berusaha melalui elektronik yaitu melalui online single submission (OSS) sehingga proses pengurusan izin dipermudah.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dilihat dari kontribusinya, investasi PMA memberikan kontribusi lebih besar seiring dengan lebih banyaknya unit investor PMA atas PMDN. Sepanjang kurun tahun 2015 sampai dengan 2019, nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 350,62%. Pada tahun 2015, investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta sebesar 1.709.612,1 juta rupiah dengan rincian 599.374,2 juta rupiah PMA dan 1.110.237,9 juta rupiah PMDN. Kemudian terus meningkat setiap tahunnya sehingga mencapai 2.034.257,53 juta rupiah pada tahun 2017 dengan rincian 768.305,8 juta rupiah PMA dan 1.265.951,73 juta rupiah PMDN. Sedang di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.453.822,51 juta rupiah dengan rincian 355.902,1 juta rupiah PMA dan 1.097.920,41 juta rupiah PMDN. Penurunan tersebut karena perubahan sistem perizinan berusaha dari semula SPIPISE menjadi OSS di bulan juli 2018 menyebabkan belum semua pelaku usaha mendaftarkan usahanya (mengajukan izin usaha) melalui OSS. Kemudian dengan adanya kebijakan OSS tersebut pada tahun 2019 nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 21.993.757,29 juta rupiah dengan rincian 957.680,24 PMA dan 21.036.077,05 juta rupiah PMDN hal ini didukung oleh proses pengurusan izin yang dipermudah.

Tabel 2.244 Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	PMA	Juta Rp	599.374,20	707.522,6	768.305,8	355.902,1	957.680,24	35,51
2	PMDN	Juta Rp	1.110.237,90	1.130.987,55	1.265.951,73	1.097.920,41	21.036.077,05	454,13
	Total	Juta Rp	1.709.612,10	1.838.510,15	2.034.257,53	1.453.822,51	21.993.757,29	350,62

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Persentase peningkatan nilai investasi menjadi salah satu indikator SDGs dengan capaian 348% di tahun 2019.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel 2.245 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019
Penanam Modal Asing (PMA)					
1	Tenaga Kerja	Jiwa	223	1.225	764
2	Perusahaan	Unit	7	20	12
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		31,86	61,25	63,67
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)					
1	Tenaga Kerja	Jiwa	651	5.745	23.546
2	Perusahaan	Unit	17	282	1.702
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		38,29	20,37	13,83
Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja			70,15	81,62	77,50

Sumber: DPMP Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Pada tahun 2018, terdapat 20 unit PMA yang datang ke Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.225 orang, sedangkan PMDN yang berjumlah 282 unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.745 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018. Di tahun 2019 terdapat 12 unit PMA di Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 764 orang dan 1.702 unit PMDN dengan daya serap sebesar 23.546 tenaga kerja di Yogyakarta, dengan rasio daya serap tenaga kerja tahun 2019 mencapai 77,50 jiwa/unit.

Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa PMDN mampu menyerap tenaga kerja dengan rasio 13,83 tenaga kerja/unit dan PMA mampu menyerap tenaga kerja dengan rasio 63,67 tenaga kerja/unit di tahun 2019.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik

Tabel 2.246 Persentase Organisasi Pemuda Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah organisasi pemuda aktif	organisasi	20	24	26	28	30	10,79
2.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	organisasi	60	37	30	30	30	-14,31
3.	Persentase organisasi pemuda aktif	%	33,33	64,86	86,67	93,33	100,00	35,76

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2015 sebesar 33,33%. Angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2019. Peningkatan jumlah organisasi pemuda disebabkan oleh bertambahnya minat pemuda untuk berorganisasi. Organisasi pemuda yang dimaksud dalam data di atas adalah organisasi pemuda yang bermitra langsung dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Organisasi tersebut diantaranya adalah organisasi berbasis agama, karang taruna tingkat Kota Yogyakarta, dsb.

2. Wirausaha Muda

Wirausaha adalah salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu kota. Wirausaha selain dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain. Berikut adalah data terkait jumlah wirausaha muda di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.247 Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah wirausaha muda	Jiwa	-	-	129	129	150
2	Jumlah seluruh wirausaha	jiwa	-	-	2.080	2.080	2.080
3	Persentase wirausaha muda	%	-	-	6,20	6,20	7,21

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah wirausaha muda pada tahun 2017 adalah 129 orang dengan total seluruh wirausaha adalah 2.080 orang dan di tahun 2018 dengan jumlah sama. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah wirausaha muda meningkat menjadi 150 orang dengan total seluruh wirausaha adalah 2.080 orang. Peningkatan keberadaan wirausahawan muda ini diiringi dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses teknologi dan trend belanja online, seperti halnya dalam melakukan pemasaran sangat terbantu dengan adanya media sosial tanpa harus memiliki toko secara fisik, sehingga dalam proses pemasaran dan pelayanan konsumen dapat lebih efisien. Selain itu, juga banyak diselenggarakan pelatihan wirausaha bagi wirausaha muda. Wirausaha muda yang dimaksud di sini adalah wirausahawan yang berumur 16–30 tahun dan memiliki kemitraan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Yogyakarta.

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Indikator ini menggambarkan cabang olahraga yang dibina. Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kota Yogyakarta merupakan dinas yang baru dibentuk, sehingga keberadaan database masih belum terorganisir. Data yang didapatkan hanya berasal dari tahun 2016-2019.

Tabel 2.248 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Unit	-	34	34	36	41
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Unit	-	34	34	36	41
3	Persentase cakupan pembinaan olahraga	%	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data tersebut, jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dari tahun 2016-2019 terjadi peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 34 dan angka ini tetap pada tahun 2017. Selanjutnya angka tersebut pada tahun 2018 meningkat menjadi 36 dan meningkat kembali menjadi 41 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat penambahan lima cabang olahraga yang dibina, yaitu berkuda, softball, baseball, rugby dan soft tenis. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Yogyakarta sudah mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang terdaftar sudah terbina dengan baik.

4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A,B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

Tabel 2.249 Cakupan Pelatih Bersertifikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pelatih bersertifikasi	Jiwa	-	-	56	56	154
2	Jumlah seluruh pelatih	jiwa	-	-	144	144	218
3	Persentase cakupan pelatih bersertifikasi	%	-	-	38,89	38,89	70,64

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data yang ada, persentase cakupan pelatih yang memiliki sertifikat tahun 2017-2018, yaitu hanya sebesar 38,89%. Rendahnya nilai cakupan disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan kesempatan bagi tiap daerah, tiap cabang olahraga untuk mengurus sertifikat tersebut. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase cakupan pelatih bersertifikat meningkat menjadi 70,64%. Peningkatan tersebut disebabkan para pelatih mengikuti pelatihan/sertifikasi secara mandiri.

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Indikator ini bertujuan untuk melihat persentase atlet pelajar yang dibina jika dibandingkan dengan seluruh atlet pelajar. Kota Yogyakarta pada tahun 2017 memiliki atlet pelajar sebanyak 230 orang, dan 180 diantaranya adalah atlet yang dibina. Data tersebut meningkat di tahun 2018 yaitu dengan jumlah atlet pelajar 250 orang dan yang masuk atlet dibina sebanyak 191 orang. Selanjutnya angka tersebut meningkat kembali di tahun 2019, yaitu dengan jumlah atlet pelajar 349 orang dan yang masuk atlet dibina sebanyak 240 orang. Apabila dilihat dari persentase cakupan pembinaan atlet muda dalam kurun waktu tahun 2017-2019 menunjukkan penurunan, yaitu dari 78,26 di tahun 2017 menjadi 68,77 di tahun 2019. Penurunan persentase cakupan pembinaan atlet muda disebabkan oleh tidak seimbang nya peningkatan jumlah atlet pelajar yang dibina dengan jumlah seluruh atlet pelajar.

Tabel 2.250 Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Jiwa	-	-	180	191	240
2	Jumlah seluruh atlet pelajar	jiwa	-	-	230	250	349
3	Persentase cakupan pembinaan atlet muda	%	-	-	78,26	76,40	68,77

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2020

Pemerintah sangat memperhatikan potensi-potensi atlet muda untuk dibina melalui sentra-sentra pembinaan seperti kelas khusus olahraga, pemusatan pelatihan

atlet kota yogyakarta serta pusat pembuatan minatbakat istimewa khusus anak-anak SD.

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu tahun tertentu. Pada tahun 2016 sebanyak 35 atlet berhasil meraih prestasi saat PON (Pekan Olahraga Nasional) berlangsung. Pada tahun 2017, sebanyak 29 atlet berhasil menorehkan prestasi. Sebanyak 23 atlet memperoleh prestasi saat POPNAS dan 6 atlet berprestasi saat jang SEA Games dan ASEAN Para Games. Di tahun 2018 yang masuk catatan atlet berprestasi sebanyak 33 orang, penambahan data ini merupakan akumulasi dari tahun 2017 dengan penambahan 4 orang atlet berprestasi pada kejuaraan Asian Para Games yang berasal dari cabang olahraga catur, voli pasir, dan panjat dinding. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun mencapai 36 orang. Pada tahun 2019 atlet-atlet di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan prestasi baik di ajang Kejurnas Cabor, POPNAS, POMNAS, OOSN Nasional maupun even-even internasional yang diikuti. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.251 Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jiwa	-	35	29	33	36

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2020

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah kejuaraan atau prestasi yang diperoleh dari cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun. Pada tahun 2016 terdapat 12 kejuaraan bidang olahraga yang dimenangkan oleh atlet yang berasal dari Kota Yogyakarta, dan pada tahun 2017 terdapat 15 cabang olahraga yang memperoleh kejuaraan. Pada tahun 2017 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan di tingkat nasional adalah 11 cabang olahraga dan tingkat internasional sebanyak 4 cabang olahraga. Pada tahun 2018 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan ada 16 kejuaraan. Selanjutnya jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun menurun menjadi 9 kejuaraan. Hal ini disebabkan tingkat persaingan di semua cabang olahraga semakin kompetitif dan semakin ketat.

Tabel 2.252 Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	Kejuaraan	-	12	15	16	9

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2020

N. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi data semestinya disajikan secara progresif hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun, sebaliknya yang terjadi, seringkali buku statistik terbit harus lengkap, sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang *update*.

Untuk mengolah data statistik, diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2015 hingga 2019 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi.

Tabel 2.253 Kabupaten Dalam Angka Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Buku Kota dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2019

Tabel di atas hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kota Yogyakarta telah tersedia, tetapi belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu, tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan, yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas. Semestinya penyebutan jumlah eksemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas. Salah satu Indikator SDGs adalah persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2019.

O. Persandian

1. Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Di zaman serba teknologi yang terus berkembang saat ini, keamanan dalam lingkup pemerintahan kota sangat diperlukan. Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Tabel 2.254 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	48	51	51	51	51
2.	Jumlah total perangkat daerah	OPD	48	51	51	51	51
3.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta, 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah sudah 100%. Jumlah total perangkat Daerah pada tahun 2015 ada 48 Perangkat Daerah, kemudian pada tahun 2016 ada perubahan kelembagaan sehingga jumlah Perangkat Daerah menjadi 51.

Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian kinerja 100% di tahun 2019.

P. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukkan kesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Bahkan hampir setiap bulan ada pertunjukkan kesenian dan budaya, baik yang diselenggarakan secara gratis maupun berbayar. Berikut ini merupakan data penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.255 Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	Hari	311	251	54	54	111

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2015-2018 jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang signifikan dimana penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya hanya mencapai sebanyak 54 hari di tahun 2017-2018, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 111 hari pertunjukkan seni dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya kegiatan seni dan budaya yang mendapat dana yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Adapun kegiatan tersebut yaitu : Aktualisasi

Pelestarian Macapat, Lomba/Festival Geguritan, Lomba Penulisan Cerkak Bahasa Jawa, Lomba Macapat, Lomba Pranata Adicara, Lomba Alih Aksara Jawa, Lomba Baca Cerkak, Lomba Sesorah, Pagelaran Macapat Massal, Gelar Seni Budaya, Festival Ketoprak Tk.Kota, Festival Teater Tk.Kota, Festival Langen Carita Tk.Kota, Festival Karawitan Ibu-ibu Tk.Kota, Pengiriman Festival Tk.DIY, *Jogja Cross Culture*, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Upacara Adat Tradisi, Pagelaran Wayang, Pagelaran Dalang Anak dan Remaja, Pentas Event Seni, dan Festival Godong Opo-opo.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa. Berdasarkan data di bawah ini, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 terdapat 225 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, 181 diantaranya adalah BCB dan 44 merupakan BWB.

Tabel 2.256 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	567	586	225	157	157
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	Unit	648	648	181	157	157
3.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	87,5	90,43	82,22	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2020

Berdasarkan data di atas, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan (rentang tahun 2015-2016). Akan tetapi pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perbedaan landasan hukum dalam menentukan benda, situs dan kawasan cagar budaya. Landasan hukum yang digunakan sebelum tahun 2017 adalah SK Walikota Yogyakarta Tahun 2009 Tentang Warisan Budaya. Pendataan di tahun-tahun tersebut hanya bersifat menginventarisasi saja sehingga semua bangunan lama dimasukkan, padahal banyak dari bangunan tersebut yang identitas kepemilikannya tidak jelas dan tidak disertai dengan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, semenjak tahun 2017 dilakukan verifikasi melalui kajian dengan landasan hukum yaitu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pada tahun 2017 terdapat 225 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, 181 diantaranya adalah BCB (Benda Cagar

Budaya) dan 44 merupakan BWB (Benda Warisan Budaya). Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan pendataan kembali sehingga jumlah yang dilestarikan sejumlah 157 buah, adapun rinciannya adalah Bangunan sebanyak 141 buah, Kawasan sebanyak 5 buah dan Situs sebanyak 11 buah.

3. Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif

Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan realisasi sebesar 55,50% dan capaian 111% di tahun 2018 dan nilai sebesar 60% dan capaian 107,14 % di tahun 2019.

Q. Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahunnya.

Tabel 2.257 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Kunjungan	163.111	222.588	238.283	312.394	506.763
2	Jumlah pengunjung	Jiwa	163.111	222.588	238.283	312.394	506.763
3	Jumlah populasi yang harus dilayani	Jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055
4	Rasio (1/3)		0,40	0,54	0,58	0,75	1,22

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, pada tahun 2016, lonjakan jumlah pengunjung dapat dikatakan signifikan, yang kemudian diikuti pula dengan kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2017 sampai 2019. Kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar dan juga adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat mencakup masyarakat yang lebih luas. Inovasi program yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah meliputi:

- a. Layanan MONIKA (Mobil Internet Kewilayahan);

- b. Layanan PUSPITA (Perpustakaan Satelit wilayah Yogyakarta);
- c. Layanan mobil keliling;
- d. Layanan motor keliling;
- e. Layanan LESTARI (Lesehan Literasi Jogja Istimewa);
- f. Layanan PEVITA (Perpustakaan Alternatif Kota Yogyakarta);
- g. Layanan PENTA DA SILVA (Pendampingan Pustakawan kepada Instansi untuk Menjadikan Literasi sebagai salah satu Fasilitasnya);
- h. Layanan SAPARATU (Sarana Peminjaman dan Pengembalian Buku Pustaka langsung tanpa turun dari Kendaraan);
- i. Layanan STELLA (Story Telling);
- j. Layanan ELSITA (Literasi dengan Sungguh-sungguh Sehari-hari Tiada Akhir);
- k. Layanan POJOK BACA;
- l. Layanan TALITA (Wisata Pengenalan Literasi di Perpustakaan Kota Yogyakarta);
- m. Layanan AMANDA (Ambil Barang Anda);
- n. Layanan SILVIA (Sinema Literasi Audio Visual untuk Pemustaka);
- o. Layanan BIANCA (BI Corner untuk Anda); dan
- p. Layanan KEISHA (Kemas Informasi di Perpustakaan Kota Yogyakarta).

2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Berikut ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 2.258 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	18.388	20.362	21.024	22.541	36.910
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	32.808	36.177	34.710	42.002	52.425
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		0,56	0,56	0,61	0,54	0,70

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Kenaikan jumlah buku maupun judul buku dikarenakan adanya

penambahan yang berasal dari pengadaan yang dilakukan pihak perpustakaan daerah maupun dari hibah yang didapat dari pusat maupun sumber lainnya. Peningkatan jumlah koleksi judul berangsur meningkat dari waktu ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan, sedangkan penambahan koleksi buku (jumlah eksemplar) merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

3. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.259 Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perpustakaan	unit	307	335	477	358	346
2	Jumlah Penduduk	jiwa	410.886	411.282	412.692	413.961	414.055
3	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk		7,47	8,15	11,56	8,65	8,36

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Yogyakarta 2020

Dari data yang ada dalam tabel, dapat terlihat bahwa jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015-2018, rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan, yaitu dari 7,47 menjadi 11,56. Selanjutnya angka tersebut terus menurun hingga mencapai angka 8,36 pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sekolah yang mengalami regrouping.

4. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir. Jumlah rata-rata pengunjung dalam lima tahun terakhir yaitu sejak 2015 hingga tahun 2019 yaitu sebesar 288.628 jiwa pengunjung.

Tabel 2.260 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah pengunjung	Jiwa	163.111	222.588	238.283	312.394	506.763	
2	Rata-rata jumlah pengunjung	Jiwa					288.628	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020, Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan ini dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta.

5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat.

Tabel 2.261 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pustakawan bersertifikat	Orang	8	8	6	6	15
	Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat*	Orang	18	19	26	45	18
	Total	Orang	26	27	32	51	33
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai	Orang	28	35	41	51	33
3	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat	%	92,86	77,14	78,05	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

Keterangan : *) jumlah tenaga teknis dan penilai yang merupakan lulusan S1 Perpustakaan

Data terkait keseluruhan tenaga teknis dan penilai dalam hal ini dikategorikan bersertifikat diambil dari jumlah tenaga teknis dan penilai yang memiliki latar belakang pendidikan yaitu merupakan lulusan S1 Perpustakaan. Pada tahun 2015 persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat sebesar 92,86% dan menurun menjadi 77,14% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan tenaga teknis yang tidak mengharuskan memiliki latar belakang ilmu perpustakaan seperti kebutuhan tenaga untuk armada perpustakaan keliling yang jumlahnya meningkat di tahun 2016. Hal ini juga terjadi di tahun 2017, namun di tahun 2018 adanya penambahan tenaga teknis terkait dengan penambahan layanan perpustakaan keliling dan Pevita. Perpustakaan keliling menambah 7 orang dan Pevita menambah 12 orang sehingga persentase pustakawan sudah mencapai 100% yang artinya seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai sudah bersertifikasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah pustakawan bersertifikat bertambah menjadi 9 orang karena adanya 1 orang pustakawan cpns rekrutmen baru di tahun 2019. Sedangkan jumlah tenaga teknis berkurang karena penataan sdm di dinas perpustakaan. Apabila dilihat secara keseluruhan persentase pustakawan sudah mencapai 100% yang artinya seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai sudah bersertifikasi.

R. Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Secara umum tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

Tabel 2.262 Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah OPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	Unit	156	154	152	159	159
2.	Jumlah OPD	Unit	156	154	152	159	159
3.	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Jumlah OPD yang dimaksud pada tabel adalah jumlah seluruh OPD Kota Yogyakarta ditambah dengan unit kerja dan juga BUMD. Pada tahun 2018 jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 159 unit, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 152 unit. Hal ini disebabkan terdapat penambahan jumlah OPD yang menerapkan arsip secara baku, yaitu 3 BUMD dan 4 UPT baru. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. OPD yang telah menerapkan arsip secara baku tahun 2019 berjumlah 159 terdiri dari Sekretariat Daerah 8 unit, Dinas Daerah 20 unit, Lembaga Teknis Daerah 5 unit, UPTD 26 unit, Kelurahan 45 unit, Kecamatan 14 unit, Puskesmas 18 unit, SMPN16 unit, BUMD 3 unit. Tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Yogyakarta telah mencapai angka sempurna yakni 100%. Hal tersebut merupakan pencapaian yang baik dan perlu dipertahankan hingga tahun-tahun selanjutnya.

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pengelola kearsipan dilakukan oleh arsiparis. Arsiparis merupakan SDM kearsipan yang memang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis maupun dinamis dan melakukan pembinaan. Arsiparis dituntut untuk selalu profesional sehingga kemampuan dan kualitas senantiasa selalu ditingkatkan melalui kegiatan sertifikasi. Berikut adalah kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.263 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	kali	6	6	11	11	11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2015-2016 terlihat bahwa kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan di Kota Yogyakarta cenderung stagnan. Namun kemudian di tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kegiatan tersebut, namun tidak mengalami peningkatan jumlah kegiatan sampai dengan tahun 2019. Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2019 berjumlah sebelas kegiatan terdiri dari:

- a. SAGITA (Satuan Tugas Arsip Kota Yogyakarta);
- b. FKK (Forum Komunikasi Kearsipan/Pengelola Arsip Non LKD);
- c. Bimbingan Teknis Arsiparis;
- d. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip OPD;
- e. Forum Komunikasi Arsiparis (FKA);
- f. Pengawasan Kearsipan;
- g. Penyuluhan Pengelola Arsip Ormassospol;
- h. ANGGITA (Arsipe dipenggalih lan ditata/Penyuluhan Kearsipan bagi Pengurus Kampung dna LPMK);
- i. KARTINI (Keluarga Tertib Arsip Masa Kini/penyuluhan kearsipan bagi keluarga di tingkat RT);
- j. Supervisi dan Monitoring Kearsipan;
- k. AMARTA (Arsip Tertata Milik Keluarga Kita/sosialisasi penyelamatan arsip vital keluarga di tingkat RW terutama wilayah yang rawan bencana).

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kota Yogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Dilihat dari perkembangan

realisasi kunjungan wisata, selama tahun 2015-2019, kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta berhasil melampaui target kunjungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan pertumbuhan rata-rata kunjungan sebesar 7,95% per tahun. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan mencapai 3.250.681 kunjungan dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.378.609 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara terus meningkat, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan positif.

Tabel 2.264 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Kunjungan Wisman	Kunjungan	393.082	208.023	435.655	496.293	498.866	19,20
2	Kunjungan Wisnu	Kunjungan	2.857.599	3.053.725	3.459.116	3.606.947	3.879.743	7,99
	Jumlah	Kunjungan	3.250.681	3.261.748	3.894.771	4.103.240	4.378.609	7,95

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2020 :dengan Hasil Olahan, 2020

Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta dipengaruhi adanya upaya pemerintah dalam hal pengembangan dan peningkatan fasilitas daya tarik wisata utama di Kota Yogyakarta, khususnya di Kawasan Malioboro. Selain itu di tahun 2019 masyarakat sekarang cenderung memiliki *Trend* (gaya hidup) milenial yang menempatkan *leisure* dan *travelling* sebagai kebutuhan yang penting dalam hidup mereka. Dalam hal lain adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY) dan stakeholder pariwisata lainnya, dalam mempromosikan dan memasarkan daya tarik pariwisata Kota Yogyakarta melalui kegiatan promosi yang inovatif, yaitu *direct promotion* (*table top, famtrip, travelmart, dll*) yang dipadu dengan melibatkan sektor swasta pariwisata dengan skema B2B (*business to business*). Kunjungan wisata menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 120,23% di tahun 2019.

2. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata juga sangat mempengaruhi keberhasilan sektor pariwisata. Lama kunjungan wisata akan menentukan produktifitas sektor usaha, salah satunya jasa penginapan. Dilihat dari perkembangan realisasi lama kunjungan wisata, selama tahun 2015-2019, kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata kunjungan negatif sebesar -2,11% per tahun. Pada tahun 2018, lama kunjungan wisatawan mencapai 2,01 hari dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,08 hari kunjungan.

Tabel 2.265 Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Lama Kunjungan Wisata	hari	2,35	2,75	2,29	2,01	2,08	-2,11

Sumber: Dinas Pariwisata 2020; Hasil Olahan, 2020

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya lama kunjungan wisata pada tahun 2019 dibanding dengan tahun sebelumnya adalah semakin banyaknya event atraksi pariwisata berbasis budaya yang beragam, baik yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta maupun instansi pemerintah dan komunitas masyarakat lainnya (kampung wisata, seniman, dsb), banyaknya pilihan akomodasi yang tersedia seperti *homestay*, *guesthouse*, atau penginapan sejenis yang banyak diminati oleh wisatawan domestik/nusantara serta adanya *direct promotion* berupa *Fam trip* dan *Travel Mart* cukup efektif dalam mempertahankan serta meningkatkan lama tinggal wisatawan.

3. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada obyek pariwisata di wilayah Kota Yogyakarta. PAD sektor pariwisata pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan positif, di tahun 2019 persentase PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 37%. Namun besaran yang dikontribusikan ke PAD Kota Yogyakarta menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu menurun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah PAD yang lebih besar dari sektor lain selain sektor pariwisata.

Tabel 2.266 PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Pajak Hotel	93.196.594.318	114.305.035.112	129.058.539.653	149.075.654.791	161.297.192.790	14,82
2.	Pajak Restoran	28.734.423.175	36.645.164.077	42.635.643.730	48.312.177.110	63.237.228.654	22,02
3.	Pajak Hiburan	7.402.074.094	11.440.566.732	13.662.360.780	12.594.868.046	12.702.230.080	16,75
4.	BLUD Taman Pintar	12.796.033.917	14.226.650.100	14.479.991.482	15.829.150.378	14.784.210.000	3,92
5.	Total Sektor Pariwisata	142.129.125.504	176.617.416.020	199.836.535.645	225.811.850.325	252.020.861.524	15,50
6.	Total PAD	510.548.822.810	540.504.305.182	657.049.376.703	667.492.075.470	689.049.725.509	8,06
7.	Persentase (%)	28	33	30	34	37	7,45

Sumber: BPKAD, 2020 dengan hasil olahan 2020

Tercapainya realisasi pajak hotel antara lain karena adanya peningkatan *room rate hotel*, kenaikan tingkat hunian pada jumlah kamar hotel dan juga adanya kenaikan

Average Room Rate di tahun 2019. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara rutin dan penagihan secara insentif terhadap obyek pajak, adanya pemasangan alat pantau transaksi dan adanya peningkatan kunjungan wisata di bulan November karena liburan juga mengakibatkan adanya peningkatan kunjungan hotel. Meningkatnya realisasi pajak restoran antara lain disebabkan karena bertambahnya jumlah obyek pajak gerai restoran di mall atau pusat perbelanjaan di tahun 2019, selain itu jumlah WP untuk Catering juga bertambah sebanyak 2 WP. Tercapainya realisasi pajak hiburan antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah penonton di bioskop karena tayangan film Box Office dan naiknya harga tiket pada saat hari libur, adanya penambahan jadwal pertunjukan bioskop dan event-event kesenian insidental di Kota Yogyakarta antara lain musik show di Stadion Kridosono dan Lapangan Parkir Mandala Krida serta maraknya event pertandingan olahraga.

4. Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata

Pada tahun 2017 indeks kualitas atraksi pariwisata dihitung berdasarkan dua indeks yaitu keindahan dan keunikan, dengan hasil indeks atraksi kualitas pariwisata sebesar 80,06. Sedangkan pada tahun 2018 indeks kualitas atraksi pariwisata dihitung berdasarkan sembilan indeks, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan petugas, respon/kecepatan pelayanan, keunikan, dan tarif. Indeks kualitas pariwisata tahun 2018 sebesar 78,47, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun dengan adanya penambahan kategori indeks penilaian di tahun 2018 menunjukkan lebih detailnya sistem penilaian terkait atraksi pariwisata sehingga data yang didapat lebih mencerminkan kondisi real yang ada mengingat semakin banyaknya aspek yang menjadi acuan penilaian. Kemudian di tahun 2019 indeks kualitas atraksi pariwisata sebesar 85,5, peningkatan ini didukung beberapa hal, antara lain : daya tarik wisata populer di Kota Yogyakarta telah dikelola dengan baik dan profesional oleh pengelola masing-masing, penyelenggaraan atraksi wisata oleh Dinas Pariwisata, sekaligus memberikan *feedback* kepada seniman/keompok seni untuk perbaikan pelaksanaan acara atraksi wisata kedepan serta Kota Yogyakarta memiliki branding yang kuat sebagai kota wisata dan masuk dalam lima kawasan destinasi super prioritas. Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 97,21% di tahun 2019.

Tabel 2.267 Indeks Atraksi Pariwisata Tahun 2017

No.	Daya Tarik Wisata	Nilai Indeks Tahun 2017	
		Keindahan	Keunikan
1	Kraton	82,75	84,5
2	Taman Pintar	76,25	77,5
3	Gembira Loka	76	74,5
4	Taman Sari	82,25	83,75
5	Benteng Vredeburg	83,5	75,75
6	XT Square	81,5	82,5

No.	Daya Tarik Wisata	Nilai Indeks Tahun 2017	
		Keindahan	Keunikan
7	Indeks Atraksi Kualitas DTW	80,06	

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2019

Tabel 2.268 Indeks Atraksi Pariwisata Tahun 2018-2019

Nilai Indeks Tahun 2018									
Daya Tarik Wisata	Kemanan	Ketertiban	Kebersihan	Kesejukan	Keindahan	Keramahan Perugas	Respon/Kecepatan pelayanan	Keunikan	Tarif
Kraton	80	79	77	79	83	82	80	85	80
Taman Pintar	77	76	71	72	78	77	75	80	75
Gembira Loka	78	77	76	78	80	75	76	80	73
Taman Sari	78	78	76	75	84	78	77	84	80
Kawasan Malioboro	79	79	77	78	83,5	82	80	87	81
XT Square	77	75	76	77	81,5	80	77	82	75
Indeks Atraksi Kualitas DTW									78,47
Nilai Indeks Tahun 2019									
Daya Tarik Wisata	Kemanan	Ketertiban	Kebersihan	Kesejukan	Keindahan	Keramahan Perugas	Respon/Kecepatan pelayanan	Keunikan	Tarif
Kraton	82	85	94	84	81	82	83	85	87
Taman Pintar	84	84	85	86	85	87	89	87	89
Gembira Loka	85	88	82	97	80	81	82	85	84
Taman Sari	87	94	81	79	90	82	86	84	87
Kawasan Malioboro	87	88	86	85	83	82	80	87	86
XT Square	90	87	83	87	87	80	85	91	85
Indeks Atraksi Kualitas DTW									85,5

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2020

B. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota Yogyakarta sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

Tabel 2.269 Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Produksi Padi	Ton	764	696	751	764	N/A	0,24
2.	Luas Panen Padi	Ha	130	108	117	117	N/A	-2,86
3.	Produktivitas Lahan	Ton/Ha	5,88	6,44	6,42	6,53	N/A	3,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Hasil olahan, 2020

Pada tahun 2015 dan 2018 produksi padi di Kota Yogyakarta sebesar 764 ton dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 0,24%. Naik turunnya produksi

padi ini secara umum disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kota Yogyakarta. Meskipun begitu, pada tahun 2018 produksi padi sebesar 764 ton, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi tersebut mengalami peningkatan sekitar 1,73 persen. Peningkatan produksi padi ini bukan disebabkan bertambahnya luas tanam padi, namun meningkatnya produktifitas lahan. Untuk data 2019 belum dapat disajikan, karena BPS belum melakukan publikasi.

2. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Yogyakarta. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahannya dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) jumlah kelompok petani di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan rata-rata -3,32% per tahun. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah anggota kelompok aktif yang kurang dari 10 orang, sehingga kelompok tersebut tidak memenuhi syarat sebagai kelompok petani. Anggota kelompok yang sudah tidak aktif dikarenakan anggota kelompok memasuki usia lansia, meninggal atau perpindahan domilisi.

Jumlah kelompok petani di Kota Yogyakarta yang mendapatkan bantuan pemda menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai -5,74% per tahun pada rentang waktu 2015-2019. Jumlah kelompok petani yang mendapat bantuan pemda pada tahun 2015 sebanyak 19 kelompok dan di tahun 2016 terdapat 24 kelompok yang mendapat bantuan tersebut. Pada tahun 2017 tidak ada kelompok petani yang mendapat bantuan dari pemda dikarenakan Dinas Pertanian dan Pangan merupakan OPD baru sehingga tidak menganggarkan bantuan kelompok petani. Selanjutnya di tahun 2018 sebanyak 3 kelompok petani mendapat bantuan dari pemda. Pada tahun 2019 kelompok petani mendapat bantuan dari pemda meningkat menjadi 15 kelompok. Peningkatan kelompok petani yang mendapat bantuan pemda dikarenakan adanya pengembangan sasaran/cakupan kelompok tani untuk dijadikan Demonstrasi Plot (Demplot) pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga/masyarakat.

Tabel 2.270 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Kelompok petani yang mendapat bantuan pemda	Kelompok	19	24	0	3	15	-5,74
2	Total kelompok petani/ cakupan bina kelompok tani	Kelompok	206	210	179	179	180	-3,32
3	Cakupan bina kelompok petani	Persen	9,22	11,43	0	1,68	8,33	-2,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Mekanisme penerimaan bantuan yaitu kelompok petani mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian dan Pangan, kemudian disurvei oleh dinas, selanjutnya menerima bantuan. Kriteria kelompok penerima bantuan antara lain memiliki anggota sebanyak 15 sampai dengan 20 orang, sudah disahkan oleh kelurahan dan mempunyai kegiatan pertanian yang berjalan aktif.

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Yogyakarta. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik sering disebut juga dengan Rasio Elektrifikasi.

Tabel 2.271 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	96.655	98.688	101.880	105.351	109.192	3,10
2.	Jumlah rumah tangga	RT	130.172	131.092	133.686	134.179	142.534	2,32
3.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	74,25	75,28	76,21	78,52	76,61	0,81

Sumber: Perusahaan Listrik Negara Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 selalu menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan data di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,81% per tahun, yakni 74,25% di tahun 2015 meningkat menjadi 76,61% di tahun 2019.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini mencapai 80,54% dan ditargetkan pemerintah akan mencapai 100% pada tahun

2020. Hingga tahun 2019, rasio elektrifikasi di Kota Yogyakarta mencapai angka 76,61% yang berarti bahwa masih perlu dilakukan peningkatan elektrifikasi atau perluasan jaringan listrik.

2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Daya listrik terpasang dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki daya yang semakin meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,83% per tahun. Peningkatan pada tahun 2019 disebabkan adanya penambahan satu trafo GI sebesar 30MVA. Daya terkontrak Provinsi DIY lebih naik seiring dengan penambahan pelanggan dan penambahan daya listrik. Pada tahun 2019 persentase ketersediaan daya listrik menurun dikarenakan pertumbuhan daya terkontrak Provinsi DIY lebih tinggi dibandingkan penambahan daya listrik terpasang.

Tabel 2.272 Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Daya listrik terpasang	MVA	750	840	930	1.020	1.050	8,83
2.	Daya terkontrak Provinsi DIY	MVA	1.448	1.577	1.698	1.822	1.952	7,74
3.	Persentase ketersediaan daya listrik	%	51,76	53,25	54,77	55,98	53,79	1,01

Sumber: Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah kota berkewajiban untuk mengaliri listrik hingga dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil.

D. Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2015-2019, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2015 sampai dengan tahun

2018 menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor. Selanjutnya, pada tahun 2019 nilai ekspor bersih perdagangan menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 23.543.469 US\$.

Tabel 2.273 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai Ekspor	US \$	15.549.667,59	16.939.955	18.137.289,40	19.907.956,73	36.427.067,00	27,19
2	Nilai Impor	US \$	19.195.988,00	20.766.558	22.664.452,51	24.890.146,80	12.883.598,28	-5,27
	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	-3.646.320,84	-3.826.603	-4.527.163,11	-4.982.190,07	23.543.469	-134,81

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Peningkatan nilai ekspor didukung oleh semakin tingginya permintaan ekspor produk kerajinan yang menjadi unggulan Kota Yogyakarta, diantaranya berupa kerajinan kulit, logam (perak, aluminium, kuningan), kayu, dan sebagainya. Sedangkan impor menurun karena pabrik susu yang mengimpor bahan baku utama produk susu berpindah ke luar Kota Yogyakarta.

2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, *gap* yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian.

Kelompok pedagang/usaha informal merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan perdagangan di Kota Yogyakarta, sektor informal berperan sangat besar bagi perekonomian kota ini. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor ini.

Tabel 2.274 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Unit	80	80	80	86	180
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Unit	N/A	N/A	15.450	13.933	13.832
3	Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal	%	N/A	N/A	0,52	0,62	1,30

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2020

Jumlah kelompok pedagang dan pengusaha informal yang sudah terbentuk di Kota Yogyakarta menunjukkan jumlah yang relatif besar. Pada tahun 2019 Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 86 unit menjadi 180 unit. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran pada tahun 2019. Namun, apabila dilihat dari segi kelompok pedagang yang mendapat bantuan dari pemda, cakupannya masih relatif kecil, yaitu hanya 0,52% di tahun 2017. Angka tersebut terus meningkat menjadi 1,30 pada tahun 2019.

Bantuan binaan untuk kelompok pedagang informal yang diberikan oleh pemda berupa kemitraan antara pedagang kelontong dengan distributor. Pada tahun 2019 kemitraan diikuti oleh 180 pedagang kelontong, dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan masing-masing peserta 30 pedagang disetiap pertemuan. Pedagang kelontong yang mengikuti kemitraan terdiri dari pedagang di pasar Demangan, Lempuyangan, Kranggan, Sentul, Serangan dan Beringharjo. Pedagang kelontong yang mengikuti kemitraan dipilih oleh lurah pasar berkoordinasi dengan ketua paguyuban pedagang.

3. Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian

Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian dihitung dari gabungan kinerja revitalisasi pasar, kinerja pembinaan UKM, kinerja penertiban PKL, dan kinerja pembinaan IKM. Kinerja revitalisasi pasar dihitung dari persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat, kinerja pembinaan UKM dihitung dari persentase peningkatan Omset UKM yang dibina, kinerja penertiban PKL dihitung dari persentase titik lokasi PKL yang tertata, dan kinerja pembinaan IKM dihitung dari persentase peningkatan omset IKM yang dibina.

Kinerja revitalisasi pasar melalui indikator pasar yang memenuhi standar pasar sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 519 Tahun 2008. Standar pasar sehat ini meliputi aspek lokasi, bangunan, sanitasi, keamanan, fasilitas dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Dari aspek lokasi, lokasi harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang, lokasi pasar bukan lokasi rawan bencana alam dan kecelakaan serta bukan bekas tempat pembuangan akhir sampah maupun pertambangan. Dari aspek bangunan, bangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembagian area sesuai komoditi dan ada pembagian zoning dengan identitas yang jelas, mempunyai ukuran los dengan lebar lorong minimal 1,5 meter, pencahayaan yang cukup, kantor pengelola dan jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar utama minimal 10 meter. Dari aspek sanitasi, harus tersedia air bersih, tandon air dan kran dalam kondisi baik. Dari aspek keamanan, harus tersedia peralatan pemadam kebakaran yang memadai dengan lokasi yang mudah dijangkau dan petunjuk prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran. Dari aspek fasilitas, tersedia sarana tempat ibadah yang memadai, ventilasi dan pencahayaan, akses keluar masuk kendaraan pengangkut unggas tersendiri, fasilitas pemotongan unggas umum yang memenuhi persyaratan,

sarana cuci dan pembuangan limbah cair khusus, tempat penampungan sampah yang terpisah dari sampah pasar dan pos pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang memadai.

Tabel 2.275 Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian

No.	Indikator	2017	2018	2019
1	Kinerja revitalisasi pasar	10,00	13,3	16,7
2	Kinerja pembinaan UKM	3,20	4,01	6,83
3	Kinerja penertiban PKL	4,03	15,64	-
4	Kinerja publikasi harga bahan pokok	-	-	100
5	Kinerja pembinaan IKM	5,07	43,80	9,71

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2020

Kinerja revitalisasi pasar pada tahun 2019 dapat tercapai melalui kegiatan lima pasar sehat, yaitu pasar Ngasem, pasar Gedongkuning, pasar Lempuyangan, pasar Karangwaru dan pasar Pingit. Terkait Kinerja pembinaan UKM dihitung dari peningkatan Omset UKM yang dibina melalui pameran yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2019 kinerja penertiban PKL diganti dengan publikasi harga bahan pokok, dimana target publikasi sebanyak 24 kali dalam setahun dapat tercapai. Sedangkan salah satu kegiatan pembinaan IKM yang dilakukan adalah pemantauan pra dan pasca intervensi kepada IKM baik melalui pelatihan maupun fasilitasi pameran.

E. Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.276 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	kelompok	40	42	42	42	42
2	Total Kelompok Pengrajin	kelompok	40	50	50	50	50
3	Persentase bina kelompok pengrajin	%	100	84	84	84	84

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2020

Pada tahun 2015 terdapat 40 kelompok pengrajin lalu meningkat menjadi 50 pada tahun 2016 dan angka tersebut tetap sampai dengan tahun 2019. Persentase bina kelompok pengrajin pada tahun 2015 mencapai 100%, namun angka tersebut

menurun pada tahun 2016 menjadi 84% dan angka tersebut tetap sampai dengan tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan dan pembinaan sehingga kelompok pengrajin akan kembali bertambah dan meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.

Pada tahun 2019, bantuan binaan untuk kelompok pengrajin yang diberikan oleh pemda berupa sarana promosi di pameran Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS). Kelompok pengrajin yang memperoleh bantuan terdiri dari kelompok pengrajin di 14 kecamatan, masing-masing kecamatan mengirimkan 3 kelompok. Kelompok pengrajin yang memperoleh bantuan dipilih oleh forkom kecamatan.

F. Transmigrasi

1. Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri dengan mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2015-2019, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dari Kota Yogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasi swakarsa berbantu maupun swakarsa mandiri.

Tabel 2.277 Persentase Transmigran Swakarsa di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah transmigran swakarsa	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah seluruh transmigran	Orang	39	48	22	33	30
3.	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020

Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunya akibat kekhawatiran masyarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa. Sementara itu, jumlah KK dan individu yang mengikuti transmigrasi umum pada tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 terdapat 12 KK dan 39 anggota keluarga yang mengikuti transmigrasi. Namun, pada tahun 2017, jumlah KK dan anggota keluarga yang ikut transmigrasi turun, dan naik kembali jumlah KK dan anggota keluarga yang mengikuti transmigrasi di tahun 2018-2019 sebanyak 10 KK dengan 33 orang anggota keluarga tahun 2018 dan 30 anggota keluarga di tahun 2019. Berdasarkan jumlah individu yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuota peserta (KK) transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan

untuk jumlah anggota keluarga merupakan seluruh anggota dari KK yang terpilih untuk mengikuti program transmigrasi.

Tabel 2.278 Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Transmigrasi Swakarsa						
	Kepala Keluarga	KK	0	0	0	0	0
	Individu	Jiwa	0	0	0	0	0
2	Transmigrasi Umum						
	Kepala Keluarga	KK	12	13	7	10	10
	Individu	Jiwa	39	48	22	33	30
3	Jumlah Total Transmigrasi						
	Kepala Keluarga	KK	12	13	7	10	10
	Individu	Jiwa	39	48	22	33	30

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020

G. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Darat

Berdasarkan kondisi geografis Kota Yogyakarta, jenis kegiatan perikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yang dibudidayakan dalam keramba. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam antara lain nila, lele, dan bawal.

Tabel 2.279 Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Produksi Ikan	Kg	46.183	36.132	40.941	42.310	40.690	-2,23
2	Target Daerah	Kg	65.000	65.000	60.000	40.300	40.600	-9,95
	Tingkat Realisasi	%	71,05	55,59	68,24	104,99	100,22	12,58

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Apabila dilihat dari perkembangannya selama tahun 2015-2019, diketahui bahwa tingkat realisasi produksi yang ada menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-rata per tahun tingkat realisasi produksi mencapai 12,58%. Pada tahun 2015, tingkat realisasi sebesar 71,05% kemudian menurun menjadi 55,59% di tahun 2016. Pada tahun selanjutnya tingkat realisasi terus meningkat hingga mencapai 104,99% pada tahun 2018. Namun tingkat realisasi pada tahun 2019 menurun menjadi 100,22%.

Jika dilihat berdasarkan jumlah produksi ikan dan target daerah pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Secara umum, produksi ikan tertinggi masih ada di tahun 2015, yaitu sebesar 46.183 kg, namun angka tersebut belum bisa mencapai target daerah yang sebesar 65.000 kg. Sedangkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2017-2018 disebabkan oleh adanya bantuan bibit oleh Pemerintah. Target daerah pada tahun 2018 diturunkan menjadi 40.300 kg dikarenakan adanya alih fungsi lahan dan tidak ada lagi bantuan dari kementerian untuk budi daya lele. Produksi ikan pada tahun

2019 sebesar 40.690 kg telah mencapai target daerah yaitu sebesar 40.600 kg. Penurunan produksi ikan pada tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan suhu dan cuaca yang tidak tentu sehingga menyebabkan gagal panen.

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah perairan laut sehingga ikan yang ada di Kota Yogyakarta merupakan hasil budidaya penduduk kota dan juga hasil nelayan dari daerah lain.

Tabel 2.280 Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Ton	32,15	32,13	32,13	31,57	N/A	-15,40
2	Target Daerah	Ton	31,50	31,50	31,50	31,5	31,5	-14,17
Tingkat Realisasi		%	102,06	102,00	102,00	100,22	N/A	-1,66

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Tingkat realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019 cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,66% per tahun. Realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2017 telah melebihi target yang ditetapkan. Namun, realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan. Jumlah konsumsi ikan dan target daerah di tahun 2018 mengami penurunan yang sangat signifikan dengan angka jumlah konsumsi ikan mencapai 12,36 ton dan angka target daerah sebesar 12,97 ton. Pada tahun 2019 jumlah konsumsi ikan di Kota Yogyakarta tidak dapat ditampilkan karena data belum dirilis oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.

3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Namun, karena di Kota Yogyakarta tidak ada nelayan, maka indikator tersebut disesuaikan menjadi bina kelompok pengusaha perikanan budidaya. Pembinaan terhadap kelompok budidaya perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya perikanan sampai pemasaran.

Tabel 2.281 Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelompok Pengusaha Budidaya Ikan yang mendapat bantuan pemda	Kelompok	1	0	0	0	11
2	Total kelompok pengusaha budidaya perikanan	Kelompok	58	41	76	45	40
3	Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan	%	1,72	0	0	0	27,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Pada rentang tahun 2015-2019, jumlah kelompok budidaya perikanan menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2015 terdapat 58 kelompok pengusaha budidaya perikanan, dan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 41 kelompok. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 76 kelompok, lalu terus menurun menjadi 40 kelompok pada tahun 2019. Penurunan kelompok pengusaha budidaya perikanan dikarenakan beberapa kelompok sudah tidak aktif. Sementara itu, dilihat dari jumlah kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda, pada tahun 2015 terdapat 1 kelompok. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 tidak ada kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda. Pada tahun 2019 kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda meningkat menjadi 11 kelompok. Bantuan yang diberikan oleh Pemda ke kelompok pengusaha budidaya ikan berupa paket bantuan budidaya ikan lele meliputi kolam bulat terpal bioflok, bibit lele, dan pakan; paket bantuan ikan hias; serta paket bantuan kolam Grc dan blower. Mekanisme pemberian bantuan yaitu (1) pembentukan kelompok dengan anggota minimal 10 orang yang berasal dari kelurahan yang sama; (2) pengukuhan kelompok oleh penyuluh pertanian; (3) mendaftarkan kelompok ke Dinas Pertanian dan Pangan; (4) mendaftarkan kelas kelompok di kelurahan; (4) mempunyai lahan/tempat pengolahan; (5) pengajuan proposal; (6) survey; (7) bimbingan teknis; (8) penerimaan bantuan. Kriteria kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda yaitu (1) proposal diketahui oleh ppl kelurahan dan kecamatan untuk kelompok pemula, sedangkan untuk kelompok madya proposal diketahui oleh pemerintah kota; (2) kelompok tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut; (3) kelompok harus memiliki pengurus dan anggota; (4) kelompok memiliki lahan; dan (5) memiliki ketersediaan air serta pembuangan limbah.

2.1.3.4. Aspek Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20

tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Tabel 2.282 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2020

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kota Yogyakarta telah ada berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta tahun 2005-2025. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

Tabel 2.283 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2020

Seperti halnya RPJPD, perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD juga telah tersedia di tataran pemerintahan Kota Yogyakarta. RPJMD yang ada dalam lima tahun terakhir telah melewati dua periode ketetapan RPJMD. Untuk tahun 2014 hingga 2016, RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016. Kemudian untuk tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPД yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPД disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPД Kota Yogyakarta tahun 2015 hingga 2020 telah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang RKPД Kota Yogyakarta Tahun 2015;
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 Tentang RKPД Kota Yogyakarta Tahun 2016;
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang RKPД Kota Yogyakarta Tahun 2017;
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 Tentang RKPД Kota Yogyakarta Tahun 2018;
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 Tentang RKPД Kota Yogyakarta Tahun 2019; dan
- f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 Tentang RKPД Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Tabel 2.284 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPД yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPД yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2020

Ketersediaan RKPД memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap OPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan koordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPД memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas, pemenuhan dasar hukum berupa perwal yang selalu mengiringi RKPД

memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian *outcome* yang diharapkan.

4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

Tabel 2.285 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2020

Dokumen RTRW yang masih berlaku saat ini dan untuk lima tahun terakhir merupakan dokumen RTRW yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029. Adanya ketersediaan RTRW ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka namun juga diimplementasikan dan menjadi dasar pengawasan dalam pembangunan sehingga pembangunan daerah yang terjadi dapat sesuai dan terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan.

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu, keberadaan RKPD adalah bentuk pembaruan sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100, sehingga akan didapatkan penjabaran data seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.286 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah program RKPd Tahun berkenaan	Program	109	109	120	120	120
2.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	109	109	120	120	120
3.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Program	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd yaitu pada tahun 2015 hingga 2019 telah mencapai 100%. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPd. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPd lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan *sequence* antar RKPd. Oleh karena itu, dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKPd dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung tetap dari tahun ke tahun, mengingat program di RPJMD merupakan prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, diharapkan untuk periode RPJMD selanjutnya program RKPd lebih eksplisit dengan didukung oleh data yang nyata.

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD Selanjutnya

Selain penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd, diperlukan juga pendetailan program mengenai aspek keuangan di dalamnya. Penjabaran tersebut dituangkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Data terkait penjabaran program RKPd ke dalam APBD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program APBD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RKPd yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100, sehingga akan didapatkan penjabaran data seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.287 Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program	109	109	120	120	120
2.	Jumlah program RKPd yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	109	109	120	120	120
3.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Program	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan penjabaran konsistensi program RKPd ke dalam APBD yaitu pada tahun 2015 sejumlah 100%. Angka ini kemudian berhasil dipertahankan sempurna hingga tahun 2019.

7. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks perencanaan pembangunan merupakan salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian sebesar 108,14 di tahun 2019.

Tabel 2.288 Indeks Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Tahun Dasar	2018		2019	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks perencanaan pembangunan	91	97,58	107,00	98,84	108,14

B. Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah kemudian dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam rentang Tahun 2015-2019, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan opini BPK sangat baik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 100% di tahun 2019.

Tabel 2.289 Opini BPK “WTP” di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Opini BPK “WTP”	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2020

2. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. SILPA sebaiknya bernilai “0” (nol) karena kebiasaan menyalakan anggaran berarti perencanaan dan realisasi anggaran daerah belum berjalan secara efektif. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase SILPA Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan besaran SILPA terbesar terjadi pada tahun 2017 dan SILPA terkecil di tahun 2016.

Tabel 2.290 Persentase SILPA Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Total SILPA	Rp	205.342.170.311,46	117.651.486.141,87	254.103.922.554,36	226.442.324.759,52	220.338.750.390,45
2.	Total APBD	Rp	1.539.699.344.285,44	1.665.420.970.708,79	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34
3.	Persentase SILPA	%	13,34	7,06	17,11	13,70	12,70

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2020

Penurunan persentase SILPA terhadap total APBD dikarenakan adanya peningkatan realisasi Total Belanja Daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan realisasi Total Pendapatan Daerah pada tahun 2019. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.765.760.418.492,27 naik 1,66% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.736.919.997.852,52. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.734.593.335.861,45 naik 4,95% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.652.727.843.523,91.

3. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Dalam analisis aspek ekonomi dalam urusan penunjang, program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD sebaiknya dilaksanakan secara keseluruhan, ketika ada satu atau beberapa jumlah program atau kegiatan dalam rencana yang tidak terlaksana tentu akan mengurangi hasil yang akan didapatkan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak ada satupun program atau kegiatan yang tidak terlaksana dari rencana yang telah ditetapkan dalam APBD. Sedangkan jumlah program atau kegiatan yang direncanakan kian bertambah. Pada tahun 2015 terdapat 109 program yang direncanakan dalam APBD, kemudian bertambah menjadi 120 program di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.291 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana	Program	0	0	0	0	0
2.	Jumlah program dalam APBD	Program	109	109	120	120	120
3.	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber: BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2020

4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase belanja urusan pendidikan terhadap total APBD menunjukkan penurunan namun tetap memenuhi syarat minimal 20%. Belanja pendidikan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 581 Milyar Rupiah atau senilai 34,94% dari total APBD Kota Yogyakarta.

Tabel 2.292 Persentase Belanja Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah belanja urusan pendidikan	Rupiah	557.294.194.931,50	581.878.080.949,31	451.057.057.376,91	381.032.183.162,54	375.686.835.468,11
2.	Total APBD	Rupiah	1.539.699.344.285,44	1.665.420.970.708,79	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34
3.	Persentase	%	36,20	34,94	30,38	23,05	21,66

Sumber: BPKAD KotaYogyakarta, 2020

Penurunan persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD dikarenakan adanya penurunan realisasi Belanja Pendidikan dari anggaran yang ditargetkan. Pada tahun 2018 Belanja Pendidikan terealisasi sebesar 93,76% dari anggaran, sedangkan pada tahun 2019 Belanja Pendidikan terealisasi sebesar 90,59% dari anggaran.

5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase Belanja Kesehatan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja kesehatan daerah sebanyak 10% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase belanja urusan kesehatan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 10%. Belanja kesehatan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 323 Milyar Rupiah atau senilai 18,65% dari total APBD Kota Yogyakarta.

Tabel 2.293 Persentase Belanja Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah belanja urusan kesehatan	Rupiah	229.854.313.900,00	271.941.515.704,64	293.957.094.614,42	310.949.518.124,38	323.577.594.454,29
2.	Total APBD	Rupiah	1.539.699.344.285,44	1.665.420.970.708,79	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34
3.	Persentase	%	14,93	16,33	19,80	18,81	18,65

Sumber: BPKAD KotaYogyakarta, 2020

Penurunan persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD dikarenakan adanya penurunan realisasi Belanja Kesehatan dari anggaran yang ditargetkan. Pada tahun 2018 Belanja Kesehatan terealisasi sebesar 96,59% dari anggaran, sedangkan pada tahun 2019 Belanja Kesehatan terealisasi sebesar 88,77% dari anggaran.

6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Yogyakarta, khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum pada rentang tahun 2015-2019, proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Proporsi seperti ini baik karena asumsinya akan lebih banyak anggaran yang digunakan untuk belanja barang atau jasa yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti pelayanan publik atau pembangunan

daerah. Proporsi belanja langsung dan tidak langsung di Kota Yogyakarta ini bersifat fluktuatif dengan belanja langsung terbesar dikeluarkan pada tahun 2019 dan belanja tidak langsung terbesar dikeluarkan pada tahun 2016.

Tabel 2.294 Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah belanja langsung	Rupiah	955.497.973.186	980.972.937.704	989.747.488.381	953.552.120.802,91	1.017.623.678.662
2.	Total APBD	Rupiah	1.774.573.915.911	1.800.707.338.425	1.666.195.785.675	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861
	Persentase	%	53,8	54,5	59,4	57,70	58,67
1.	Jumlah belanja tidak langsung	Rupiah	819.075.942.725	819.734.400.721	676.448.297.294	699.175.722.721,00	716.969.657.199
2.	Total APBD	Rupiah	1.774.573.915.911	1.800.707.338.425	1.666.195.785.675	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861
	Persentase	%	46,2	45,5	40,6	42,30	41,33

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2020

Kenaikan Proporsi Belanja Langsung terhadap Total APBD dikarenakan adanya peningkatan yang cukup besar pada target Belanja Langsung secara keseluruhan. Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2018 sebesar Rp1.048.587.110.262,00 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.167.976.204.978,00 atau meningkat sebesar 11,39%.

7. Penetapan APBD

Ketepatan waktu dalam menetapkan APBD juga menjadi indikator dalam analisis urusan penunjang. Keterlambatan waktu dalam menetapkan APBD dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam kurun lima tahun terakhir Pemerintah Kota Yogyakarta selalu tepat waktu dalam menetapkan APBD.

Tabel 2.295 Penetapan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2020

8. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang keuangan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.296 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	89,37	96,15	106,31	95,34	104,15
2	Pendapatan Asli Daerah	%	546.000.000.000	642.229.922.879	117,62	689.049.725.509,27	105,52

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
3	Nilai Pajak Daerah	%	346.906.500.000	407.576.588.698	114,23	451.265.948.031	124,18

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas, 3 indikator SDGs pada bidang keuangan pada tahun 2019 sudah mencapai 100%. Hal ini adalah wujud komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah dengan menetapkan keputusan walikota Nomor 399/2017 tentang Penilaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peninjauan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Faktor lain dalam keberhasilan mencapai sesuai dengan target antara lain dengan terimplementasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dukungan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan asset daerah 44 Perangkat Daerah dan 1 SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyediakan data laporan daerah serta adanya kebijakan pengelolaan keuangan yang mensyaratkan pengajuan Ganti Uang melampirkan bukti rekonsiliasi asset turut mempercepat proses rekonsiliasi aset.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai bidang dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Berikut ini merupakan tabel dengan data rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Yogyakarta setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dengan satuan jam pelajaran (jpl).

Tabel 2.297 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jpl	36	26	30	50	80

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2020

Dapat dilihat bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Terjadinya fluktuasi data dikarenakan setiap tahunnya jumlah pendidikan dan pelatihan yang diadakan belum tentu sama, tergantung dengan prioritas hasil Analisis Kebutuhan Diklat. Pada tahun 2015, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebesar 36 jpl, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 26 jpl.

Selanjutnya angka tersebut terus meningkat sampai dengan tahun 2019 hingga mencapai 80 jpl. Peningkatan tersebut dikarenakan banyaknya pegawai yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, yaitu sebanyak 67 orang dengan jumlah jpl di atas 850, serta terdapat pegawai CPNS sebanyak 341 orang yang mengikuti pelatihan dasar dengan jumlah jpl 1.441. Selain itu, terdapat pengiriman diklat dengan jumlah jpl di atas 30 sebanyak 100 orang, ditambah lagi pelaksanaan diklat bagi 1.331 orang ASN dengan jpl masing-masing minimal 10 jpl per hari.

2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dari pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh para pegawai atau aparatur sipil negara (ASN), terdapat kategori pendidikan dan pelatihan pendidikan formal. Data didapatkan dengan membandingkan antara jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan jumlah total ASN.

Tabel 2.298 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	1.305	1.278	1.271	1.247	1.839
2	Jumlah total ASN	Orang	7.623	5.905	5.564	5.226	5.223
3	Persentase	%	17,12	21,64	22,84	23,86	35,21

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2015 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 17,12%. Persentase tersebut terus meningkat menjadi 35,21% di tahun 2019. Peningkatan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal disebabkan oleh pengajuan diklat dari OPD meningkat, dan kebutuhan organisasi atas diklat juga meningkat, sehingga pelaksanaan diklat baik melalui swakelola maupun pengiriman diklat meningkat.

3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Selain pendidikan dan pelatihan formal yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat ASN. Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total ASN.

Tabel 2.299 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	537	600	641	638	623
2	Jumlah total ASN	Orang	7.623	5.905	5.564	5.226	5.223
3	Persentase	%	7,04	10,16	11,52	12,21	11,93

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural jumlahnya terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Persentase tersebut menurun pada tahun 2019, nilai persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menjadi 11,93%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya ASN struktural yang pensiun di tahun 2019.

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.

Tabel 2.300 Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	25	23	22	19	26

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat fluktuasi jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta. Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi yang terdapat di jajaran instansi pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 25 orang pada tahun 2015. Mulai pada tahun 2016 jumlah pemangku jabatan yang diduduki mulai berkurang menjadi 23 orang dan terus menurun hingga pada tahun 2018 menjadi 19 orang. Selanjutnya terdapat peningkatan jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta menjadi 26 orang pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2019 terdapat pengisian kekosongan jabatan di instansi pemerintahan. Pengisian kekosongan jabatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama, yang kemudian dilakukan lelang/seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada tahun 2019.

5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir per tahunnya.

Tabel 2.301 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	3.292	2.851	2.914	2.450	2.351

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hingga 2019 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di instansi pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 3.292 orang. Jumlah tersebut menurun menjadi 2.851 orang pada tahun 2016, hal ini disebabkan adanya perpindahan jabatan serta pengangkatan jabatan ke jabatan fungsional. Selanjutnya, jumlah jabatan administrasi pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.914 orang. Jumlah jabatan administrasi pada tahun 2018 menurun menjadi 2.450 orang, hal ini terjadi dikarenakan adanya pengangkatan jabatan administrasi ke jabatan struktural, adanya mutasi dan sejumlah pegawai memasuki masa purna tugas / pensiun. Pada tahun 2019 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di instansi pemerintah Kota Yogyakarta menurun menjadi 2.351, hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang pensiun pada jabatan administrasi.

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ASN terdiri dari dua macam jabatan yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Tabel 2.302 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	4.306	3.031	2.628	2.757	2.873

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2020

Pada tabel di atas terlihat data mengenai jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebanyak 4.306 orang, kemudian menurun pada tahun 2016 yaitu menjadi 3.031 orang. Penurunan disebabkan oleh adanya mutasi pemegang kewenangan jabatan guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke pemerintah daerah provinsi selain itu adanya inpassing Jabatan Fungsional Umum (JFU) ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 angka tersebut menurun kembali yaitu menjadi 2.628 orang dan meningkat menjadi 2.757 pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu meningkat menjadi sebesar 2.873, hal ini disebabkan adanya tambahan CPNS rekrutmen tahun 2018 sebanyak 322 CPNS jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis fungsional lainnya.

D. Penelitian dan Pengembangan

Pada tahun anggaran 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.860.428.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan rupiah). Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.709.035.281,87 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen) atau 95,01%. Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan program Penelitian dan Pengembangan dengan tiga kegiatan utama yaitu Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah, Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis, dan Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah.

Hasil pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan dapat terlihat pada capaian indikator kinerja utama yaitu indeks kemanfaatan penelitian dan pengembangan untuk Tahun 2019 dapat tercapai sebesar 84 persen. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2018 yang sebesar 82 persen. Kendala utama dari pelaksanaan program penelitian dan pengembangan adalah belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan (*evidence base policy*). Selain itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi daerah. Akan tetapi belum sepenuhnya pengawasan inovasi ini dapat berjalan dengan optimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tercapainya sasaran program penelitian dan pengembangan adalah:

1. Optimalisasi penyebarluasan informasi hasil penelitian melalui jurnal jaringan penelitian yang disusun setiap tahun dan penyusunan jurnal hasil penelitian secara elektronik dalam bentuk e jurnal jarlit;
2. Optimalisasi hasil penelitian yang didukung oleh kegiatan perancangan inovasi penyusunan Sistem Aplikasi *Decision Support System* (DSS), yaitu dengan mengoptimalkan eksekutif summary hasil kajian yang dapat diupload pada aplikasi dimaksud untuk memudahkan layanan data dan informasi terkait hasil penelitian dan rekomendasi hasil penelitian serta informasi lainnya kepada mitra kerja Litbang;;
3. Optimalisasi peran Jaringan Penelitian (Jarlit) dalam mengawal proses penelitian tematis di Kota Yogyakarta;
4. Optimalisasi peran Forum LPPM dalam meningkatkan peran serta aktif Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta dalam membantu pembangunan di Kota Yogyakarta melalui Tri Dharma Perguruan tinggi;
5. Mendorong, mengawal, dan mengevaluasi Inovasi dan penelitian di kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat dan OPD, melalui kegiatan Anugerah Inovasi dan Penelitian Tahun 2019 dengan ending pelaksanaan pada acara Festival Inovasi Jogja yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2019 di Lower Ground, Galeria Mall, Kota Yogyakarta; dan
6. Optimalisasi peran Forum Inovasi Daerah dan Tim Perancangan Inovasi dalam mengawal, mendorong, dan mendampingi penumbuhan serta pengawalan pelaksanaan inovasi di Kota Yogyakarta.

Salah satu bentuk keberhasilan pengawalan inovasi adalah inovasi e SPTPD masuk dalam Top 99 Inovasi di tingkat nasional serta Inovasi e retribusi menjadi juara I pada Anugerah Inovasi dan Penelitian Kota Yogyakarta Tahun 2019.

E. Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Dalam proses kinerja pemerintah kota, diperlukan adanya sistem pengawasan yang dapat menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut. Berikut merupakan tabel mengenai persentase tindak lanjut temuan dari perbandingan dengan jumlah total temuan yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2019.

Tabel 2.303 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	45	15	28	102	64
2	Jumlah total temuan	Rekomendasi	64	57	63	116	71
3	Persentase	Persen	70,31	26,31	44,44	87,93	90,14

Sumber: Inspektorat Kota Yogyakarta, 2020

Jumlah total rekomendasi temuan pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, namun jumlah penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pada tahun 2019 mengalami perlambatan yakni dari total 71 rekomendasi terdapat 64 rekomendasi yang ditindaklanjuti, sedangkan 7 rekomendasi belum terselesaikan hal ini dipengaruhi oleh Laporan Hasil Audit yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019 baru dapat ditindaklanjuti pada Tahun 2020.

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Dengan adanya fungsi pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) maka diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran dan pelanggaran serta pemberian sanksi tindak lanjut dalam kinerja pemerintah kota. Berikut ini merupakan tabel persentase pelanggaran pegawai atau ASN di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 2.304 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	28	17	7	8	11
2	Jumlah total ASN	Orang	7.623	5.905	5.564	5.225	5.223
3	Persentase	Persen	0,37	0,29	0,13	0,15	2,11

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Yogyakarta, 2020

Pada tahun 2015 persentase pelanggaran pegawai di Kota Yogyakarta sebesar 0,37%, angka tersebut terus menurun menjadi 0,13% di tahun 2017. Pada tahun 2018 angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 0,15%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase pelanggaran pegawai di Kota Yogyakarta meningkat kembali menjadi sebesar 2,11%. Peningkatan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena adanya penegakan kepatuhan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dimulai dengan kepatuhan presensi sesuai jam kerja, dimana penerapan presensi elektronik berpengaruh terhadap penyediaan data setiap PNS.

F. Sekretariat Dewan

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota

Dalam melaksanakan kinerjanya selama lima tahun, DPRD Kota Yogyakarta membutuhkan panduan kerja untuk dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang sesuai. Untuk itu diperlukan adanya rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja dalam mencapai tujuan.

Tabel 2.305 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat DPRD diketahui bahwa telah ada rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya.

2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPRD perlu menyusun dan mengintegrasikan program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada setiap tahunnya, DPRD akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam melakukan penyusunan dan pengintegrasian program-program tersebut dalam melaksanakan aspek fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi anggaran. Kemudian pada DPRD Kota Yogyakarta sendiri telah ada pengintegrasian program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD pada setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.306 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020

3. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap Anggaran Pembangunan

Selain penyusunan dan pengintegrasian program kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD, diperlukan pula pengintegrasian terhadap anggaran pembangunan yang dimiliki kota. Pengintegrasian ini juga dilakukan bersama dengan BAPPEDA dalam rangka penyesuaian serta melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat dewan DPRD. Kemudian pada setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir telah dilakukan pengintegrasian tersebut, seperti yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.307 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020

G. Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan indeks pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta. Hasil capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.308 Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2019

No.	Indikator RAD	Tahun Dasar	2018		2019	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	WTP	WTP	100	WTP	100
2	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100	A	100
3	Indeks pelayanan publik	69,85	70,63	100,50	73,32	103,69
4	Indeks pelaksanaan pembangunan	79,75	80,21	100,26	80,45	100,25

Sumber: Sekretariat Daerah, 2020

Berdasarkan data diatas, indikator SDGs dari Sekretariat Daerah pada tahun 2019 sudah mencapai 100%.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya

adalah konsumsi pangan dan non pangan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Tabel 2.309 Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018*	2019**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pengeluaran pangan	Juta Rupiah	5.350.520	5.862.334	6.339.053	6.731.363	7.180.703	7,64
Pengeluaran non pangan	Juta Rupiah	10.535.494	11.370.154	12.503.211	13.357.778	14.160.752	10,51
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah	15.886.014	17.232.488	18.842.264	20.089.141	21.341.455	10,49
Jumlah Penduduk	Jiwa	412.704	417.744	422.732	427.498	431.939	1,53
Pengeluaran per kapita per tahun	Juta Rupiah	38,49	41,25	44,57	46,99	49,41	8,79
Pengeluaran per kapita per bulan	Juta Rupiah	3,21	3,44	3,71	3,92	4,12	8,79

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2020; dengan Hasil Olahan, 2020
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

Selama rentang waktu tahun 2015-2019, kelompok pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta yang mendominasi kelompok pengeluaran non pangan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,51% per tahun. Sedangkan pengeluaran untuk pangan juga mengalami peningkatan tetapi dengan besar pertumbuhan rata-rata yang lebih kecil yaitu 7,64%. Nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok pangan tidak lebih besar dari kelompok non pangan karena kelompok non pangan ini mencakup pengeluaran banyak hal, seperti pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; hotel dan restoran; dan lainnya.

2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

Tabel 2.310 Persentase Konsumsi Non pangan Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018*	2019**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pengeluaran non pangan	Juta Rupiah	10.535.494	11.370.154	12.503.211	13.357.778	14.160.752	7,68
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah	15.886.014	17.232.488	18.842.264	20.089.141	21.341.455	10,49

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018*	2019**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Persentase Pengeluaran Non Pangan	%	66,32	65,98	66,36	66,49	66,35	0,02

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2020; dengan Hasil Olahan, 2020
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

Selama rentang tahun 2015-2019, diketahui bahwa pola konsumsi rumah tangga per kapita untuk non pangan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pangan. Lebih tingginya konsumsi non pangan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh tipologi masyarakat yang merupakan penduduk perkotaan dimana kebutuhan penduduk relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Ditinjau dari pertumbuhannya, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,02% per tahun. Pada tahun 2015, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga perkapita Kota Yogyakarta sebesar 66,32% kemudian menurun menjadi 65,98% di tahun 2016. Selanjutnya angka tersebut meningkat hingga mencapai 66,49 pada tahun 2018. Pada akhir periode (tahun 2019) angka tersebut menurun menjadi 66,35%.

3. Produktivitas Total Daerah

Penghitungan produktivitas total daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam tiga sektor besar yaitu *agriculture*, *manufacture*, dan *services*. Sektor *agriculture* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor *manufacture* terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor *service* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.311 Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Satuan	2015	2016	2017	2018*	2019**
Nilai PDRB ADHK						
<i>Agriculture</i>	juta rupiah	36.052,73	36.377,25	36.766,92	37.296,88	37.844,13
<i>Manufacture</i>	juta rupiah	4.804.525,12	5.003.992,45	5.250.465,62	5.475.227,41	5.750.996,89
<i>Service</i>	juta rupiah	17.552.434,40	18.495.918,40	19.481.193,62	20.616.127,84	21.896.284,53
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja						
<i>Agriculture</i>	Jiwa	3.200	6.400	399	371	764

Lapangan Usaha	Satuan	2015	2016	2017	2018*	2019**
Manufacture	Jiwa	32.805	55.674	35.516	40.298	43.339
Service	Jiwa	174.044	19.102	177.676	183.972	187.773
Total Produktivitas						
Agriculture	juta rupiah/ jiwa	11,27	5,68	92,15	100,53	49,53
Manufacture	juta rupiah/ jiwa	146,46	89,88	147,83	135,87	132,70
Service	juta rupiah/ jiwa	100,85	968,27	109,64	112,06	116,61

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2020; dengan Hasil Olahan, 2020
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta adalah *manufacture*, meskipun jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di sektor *services*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor *services* merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor *manufacture*.

4. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB adalah perbandingan jumlah ekspor dan impor terhadap jumlah PDRB. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa kegiatan ekspor dan impor sudah berperan besar terhadap perekonomian suatu wilayah.

Tabel 2.312 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa	Juta rupiah	209.921	228.689	244.853	268.757	665.694	119,52
2.	Jumlah PDRB	Juta rupiah	26.791.936,1	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0	8,21
3.	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB		0,008	0,008	0,008	0,008	0,018	107,94

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2020 dengan hasil olahan, 2020

Rasio ekspor dan impor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2018 memiliki nilai yang cenderung tetap, yaitu sebesar 0,008. Selanjutnya, pada tahun 2019 rasio ekspor dan impor barang dan jasa terhadap PDRB meningkat menjadi 0,018.

5. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat. Berikut ini jumlah bank yang beroperasi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.313 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Jenis Bank	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	KC Bank Umum	unit	45	44	46	47	44	-0,47
2	KCP Bank Umum	unit	87	92	94	95	95	2,25
3	KK Bank Umum	unit	83	83	80	76	77	-1,82
4	KP BPR	unit	10	11	11	11	11	2,50
5	KC BPR	unit	7	7	8	8	9	6,70
6	KK BPR	unit	12	17	17	17	18	11,89
	Jumlah	unit	244	254	256	254	254	1,03

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020.

Perkembangan jumlah bank di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki kecenderungan meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,03% per tahun. Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut, karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha.

6. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum maupun BPR adalah perbandingan jumlah pinjaman terhadap simpanan nasabah di bank. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum dan BPR di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2015 rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum dan BPR sebesar 0,47 kemudian meningkat sehingga mencapai 0,64 pada tahun 2019.

Tabel 2.314 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah pinjaman di bank umum dan BPR	Juta rupiah	11.539.280,64	13.362.692,73	13.823.255,36	17.683.923	20.604.176	15,92
2	Dana pihak ketiga di bank umum dan BPR	Juta rupiah	24.483.925,84	26.632.034,45	29.363.486,37	30.452.477	32.253.519	7,16
3	Rasio Pinjaman Terhadap		0,47	0,50	0,47	0,58	0,64	8,41

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
	Simpanan di Bank Umum dan BPR							

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Keterangan : (*) Data sampai dengan bulan November 2019

7. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR

Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing (BPR saat ini tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam Valuta Asing) yang berbentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka.

Meningkatnya total simpanan masyarakat dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyimpan uang, baik di Bank Umum maupun di BPR. Peningkatan jumlah simpanan masyarakat di bank tersebut bisa juga disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang sudah mulai berubah (adanya kecenderungan masyarakat mulai berpikir dan mengatur strategi pengeluaran untuk menghadapi kebutuhan hidup di masa yang akan datang).

Tabel 2.315 Jenis Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta

No	Jenis Simpanan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*
1.	Giro	Juta Rp.	3.286.784	3.530.055	4.079.852	4.169.322	4.481.340
		rekening	18.682	19.536	20.162	20.933	18.044
		%	13,42	13,25	13,77	13,69	13,89
2.	Simpanan Berjangka	Juta Rp.	9.332.171	9.524.730	10.750.630	10.570.283	11.458.026
		rekening	47.375	49.273	50.935	52.010	54.502
		%	38,12	35,76	36,27	34,71	35,52
3.	Tabungan	Juta Rp.	11.864.971	13.577.249	14.806.004	15.712.873	16.314.153
		bilyet	1.351.935	1.628.368	1.899.130	2.096.619	2.188.062
		%	48,46	50,98	49,96	51,60	50,58
4	Total Simpanan	Juta Rp.	24.483.926	26.632.034	29.636.486	30.452.478	32.253.519

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah DIY, 2020; Bank Indonesia, 2020

Keterangan : (*) Data sampai dengan bulan November 2019

8. Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha

Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian pinjaman ini adalah pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pinjaman kepada

bukan penduduk, pinjaman kelolaan, pinjaman dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia, nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

Tabel 2.316 Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Sektor Ekonomi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha							
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Juta Rp.	26.164	40.364	60.551	46.075	95.074
		%	0,23	0,33	0,44	0,26	0,46
2	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	1.413	1.566	5.717	28.307	33.446
		%	0,01	0,01	0,04	0,16	0,16
3	Industri Pengolahan	Juta Rp.	773.174	763.589	889.003	996.779	999.791
		%	6,70	6,18	6,43	5,64	4,85
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp.	12.102	16.741	7.839	8.679	15.281
		%	0,10	0,14	0,06	0,05	0,07
5	Konstruksi	Juta Rp.	850.464	1.317	1.205	2.464	2.200
		%	7,37	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp.	4.495.772	943.278	1.258.566	1.320.278	1.023.496
		%	38,96	7,63	9,10	7,47	4,97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp.	160.618	2.964.791	3.328.568	3.735.124	3.616.998
		%	1,39	23,98	24,08	21,12	17,55
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Juta Rp.	706.742	119.035	104.443	96.083	103.951
		%	6,12	0,96	0,76	0,54	0,50
9	Jasa-jasa	Juta Rp.	674.252	1.655.508	1.716.301	1.855.420	1.835.542
		%	5,84	13,39	12,42	10,49	8,91
10	Informasi Dan Komunikasi	Rp Juta		67.034	140.359	120.317	90.133
		%	0,00	0,54	1,02	0,68	0,44
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	Rp Juta		90.627	66.583	208.960	46.276
		%	0,00	0,73	0,48	1,18	0,22
12	Real Estate	Rp Juta		434.558	414.909	340.261	358.876
		%	0,00	3,52	3,00	1,92	1,74
13	Jasa Perusahaan	Rp Juta		148.096	155.058	189.522	154.155
		%	0,00	1,20	1,12	1,07	0,75
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Rp Juta		1.435	1.505	2.801	9.512
		%	0,00	0,01	0,01	0,02	0,05
15	Jasa Pendidikan	Rp Juta		77.503	118.119	501.452	535.047
		%	0,00	0,63	0,85	2,84	2,60
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Rp Juta		188.030	277.904	388.972	447.339
		%	0,00	1,52	2,01	2,20	2,17
17	Jasa Lainnya	Rp Juta		602.949	625.486	775.213	822.046
		%	0,00	4,88	4,52	4,38	3,99
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha							
18	Rumah Tinggal	Juta Rp.	965.770	977.047	1.075.503	1.254.662	1.274.786
		%	8,37	7,90	7,78	7,09	6,19
19	Flat dan Apartemen	Juta Rp.	36.782	33.019	32.792	31.963	40.042
		%	0,32	0,27	0,24	0,18	0,19
20	Ruko dan Rukan	Juta Rp.	80.016	100.258	117.777	103.897	82.794
		%	0,69	0,81	0,85	0,59	0,40
21	Kendaraan Bermotor	Juta Rp.	496.466	503.209	548.882	592.490	574.616
		%	4,30	4,07	3,97	3,35	2,79
22	Lainnya	Juta Rp.	2.259.546	2.632.740	2.876.186	5.084.203	8.442.775
		%	19,58	21,30	20,81	28,75	40,98
Total Pinjaman		Juta Rp	11.539.281	12.362.694	13.823.256	17.683.922	20.604.176

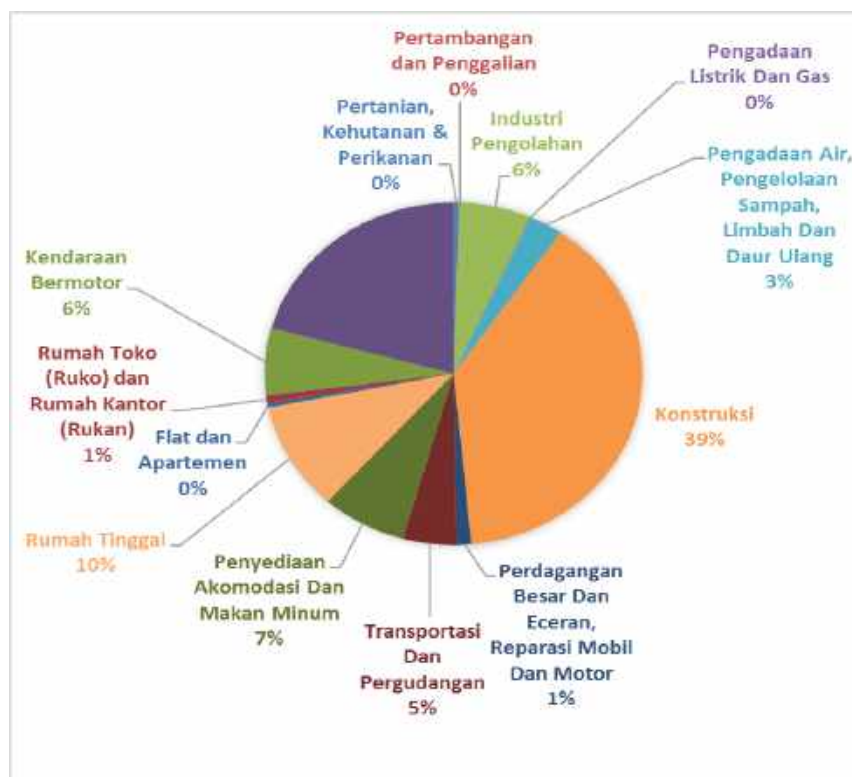
Sumber: Bank Indonesia, 2020

Keterangan : (*) Data sampai dengan bulan November 2019

Pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR berdasarkan lapangan usaha, terdiri dari dua sektor, yakni pinjaman berdasarkan lapangan usaha dan pinjaman

kepada bukan lapangan usaha. Pinjaman berdasarkan lapangan usaha meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate, dan jasa perusahaan; jasa-jasa; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan lainnya; serta jasa lainnya. Sedangkan pinjaman kepada bukan lapangan usaha meliputi rumah tinggal; flat dan apartemen; ruko dan rukan; kendaraan bermotor; serta lainnya.

Total pinjaman yang diberikan baik di Bank Umum maupun di BPR menurut lapangan usaha dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak usaha di wilayah Kota Yogyakarta dinilai layak untuk dapat mengajukan kredit kepada bank. Pada tahun 2019 sektor ekonomi berdasar lapangan usaha yang mengajukan pinjaman terbesar kepada bank adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan jasa-jasa. Sedangkan pinjaman kepada bukan lapangan usaha yang terbesar adalah untuk lainnya dan rumah tinggal.



Sumber: Bank Indonesia, 2020; Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.15 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha

9. Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan

Sama dengan posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut lapangan usaha, pengertian posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut jenis penggunaan merupakan pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian pinjaman ini adalah pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pinjaman kepada bukan penduduk, pinjaman kelolaan, pinjaman dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia, nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

Tabel 2.317 Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan

No	Jenis Penggunaan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*
1.	Modal Kerja	Juta Rp.	4.087.354	3.987.777	4.777.557	5.561.252	5.333.938
		%	0,017	0,016	0,015	0,011	0,010
2.	Investasi	Juta Rp.	3.613.347	4.128.643	4.394.559	5.055.456	4.855.225
		%	31,313	33,396	31,791	28,588	23,564
3.	Konsumsi	Juta Rp.	3.838.580	4.246.273	4.651.140	7.067.215	10.415.014
		%	33,265	34,347	33,647	39,964	50,548
	Total Pinjaman	Juta Rp.	11.539.281	12.362.693	13.823.256	17.683.923	20.604.177

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Keterangan : (*) Data sampai dengan bulan November 2019

Pinjaman yang diberikan di bank umum dan BPR berdasarkan jenis penggunaannya dibedakan menjadi tiga, yakni modal kerja, investasi, dan konsumsi. Pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, jenis penggunaan pinjaman untuk modal kerja memiliki kecenderungan menurun, sedangkan pinjaman untuk keperluan investasi maupun konsumsi dalam kurun waktu yang sama menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pinjaman investasi di tahun 2019 sebesar 4.855.225 juta rupiah menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan pinjaman investasi tahun 2018. Persentase pinjaman konsumsi di tahun 2019 sebesar 50,548% menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan persentase pinjaman konsumsi di tahun 2018 yang sebesar 39,964%.

10. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Tabel 2.318 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Skala Usaha

No	Skala Usaha	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*
1.	Mikro	Juta Rp.	521.045	563.549	603.510	768.897	832.634
		%	15,014	14,625	14,256	17,131	18,505
2.	Kecil	Juta Rp.	1.057.491	1.163.212	1.327.797	1.559.183	1.540.452
		%	30,472	30,187	31,364	34,738	34,237
3.	Menengah	Juta Rp.	1.891.832	2.126.579	2.302.204	2.160.330	2.126.345
		%	54,514	55,188	54,380	48,131	47,258
Total Kredit		Juta Rp.	3.470.368	3.853.340	4.233.511	4.488.410	4.499.431

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Keterangan : (*) Data sampai dengan bulan November 2019

Kredit UMKM yang diberikan di bank umum dan BPR berdasarkan skala usaha terbagi menjadi tiga, yakni untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, total kredit baik untuk skala usaha mikro dan kecil di wilayah Kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan, sedangkan untuk usaha menengah cenderung fluktuatif. Proporsi setiap tahunnya pada skala usaha mikro sebesar $\pm 14-19\%$, skala usaha kecil $\pm 30-35\%$, serta pada skala usaha menengah sebesar $\pm 47-56\%$.

Tabel 2.319 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan

No	Jenis Penggunaan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*
1.	Modal Kerja	Juta Rp.	2.056.491	2.285.970	2.540.921	3.024.182	2.701.764
		%	59,259	59,324	60,019	67,378	60,047
2.	Investasi	Juta Rp.	1.413.877	1.567.370	1.692.591	1.464.227	1.797.667
		%	40,741	40,676	39,981	32,622	39,953
Total Kredit		Juta Rp.	3.470.368	3.853.340	4.233.512	4.488.409	4.499.431

Sumber: Sumber: Bank Indonesia, 2020

Keterangan : (*) Data sampai dengan bulan November 2019

Selanjutnya, kredit UMKM yang diberikan baik di bank umum maupun BPR berdasarkan penggunaannya terdiri atas jenis penggunaan untuk modal kerja dan

investasi. Secara total, kredit UMKM yang diberikan di bank umum maupun di BPR dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu meningkat, yakni 3,47 triliun rupiah di tahun 2015 meningkat menjadi 4,49 triliun rupiah di tahun 2019, dengan proporsi penggunaan untuk modal kerja yang lebih besar dibandingkan dengan investasi.

Tabel 2.320 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha

No	Sektor Ekonomi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Juta Rp.	15.746	20.827	30.091	29.043	36.136
		%	0,454	0,540	0,711	0,647	0,803
2.	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	1.020	539	3.565	7.430	6.816
		%	0,029	0,014	0,084	0,166	0,151
3.	Industri Pengolahan	Juta Rp.	222.888	246.434	297.188	370.374	387.345
		%	6,423	6,395	7,020	8,252	8,609
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp.	6.688	6.484	6.788	8.538	14.791
		%	0,193	0,168	0,160	0,190	0,329
5.	Konstruksi	Juta Rp.	162.394	1.317	1.203	2.414	1.998
		%	4,679	0,034	0,028	0,054	0,044
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp.	2.396.503	195.473	352.781	248.499	317.886
		%	69,056	5,073	8,333	5,536	7,065
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp.	116.402	2.012.796	2.150.018	2.306.615	2.184.255
		%	3,354	52,235	50,786	51,391	48,545
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Juta Rp.	210.523	95.038	77.097	72.324	65.757
		%	6,066	2,466	1,821	1,611	1,461
9.	Jasa-jasa	Juta Rp.	338.205	603.085	657.598	554.697	669.105
		%	9,746	15,651	15,533	12,358	14,871
10	Informasi Dan Komunikasi	Juta Rp.	-	59.916	75.145	66.142	64.720
		%	0,000	1,555	1,775	1,474	1,438
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	Juta Rp.	-	87.285	42.082	161.665	19.592
		%	0,000	2,265	0,994	3,602	0,435
12	Real Estate	Juta Rp.	-	58.634	68.980	62.311	168.232
		%	0,000	1,522	1,629	1,388	3,739
13	Jasa Perusahaan	Juta Rp.	-	130.780	131.828	175.220	131.133
		%	0,000	3,394	3,114	3,904	2,914
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rp.	-	-	-	18	-
		%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Jasa Pendidikan	Juta Rp.	-	64.915	45.351	55.612	66.396
		%	0,000	1,685	1,071	1,239	1,476
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Juta Rp.	-	34.047	33.228	69.454	52.160
		%	0,000	0,884	0,785	1,547	1,159
17	Jasa Lainnya	Juta Rp.	-	235.767	260.569	298.051	313.109
		%	0,000	6,119	6,155	6,640	6,959
Total Kredit		Juta Rp.	3.470.369	3.853.337	4.233.512	4.488.407	4.499.431

Sumber: Sumber: Bank Indonesia, 2020

Keterangan : (*) Data sampai dengan bulan November 2019

Selain dibagi menjadi berdasarkan skala usaha dan penggunaannya, kredit UMKM yang diberikan di bank umum dan BPR terdapat pula pembagian berdasarkan lapangan usahanya, yang meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate, dan jasa perusahaan; jasa-jasa; informasi dan komunikasi; jasa

keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan lainnya; dan jasa lainnya. Pada tahun 2019, jumlah kredit UMKM yang diberikan bank umum dan BPR menurut lapangan usaha, proporsi terbesar pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 48,545%.

11. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Yogyakarta. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan sosial di masyarakat. Berikut ini merupakan tabel mengenai angka kriminalitas yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 hingga 2019. Kasus kriminalitas yang terjadi dibagi menjadi kasus kriminalitas narkoba dan kasus kriminalitas lainnya.

Tabel 2.321 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas	Kasus	868	798	615	575	547
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas	Kasus	2.002	1.592	1.174	958	739
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	43,36	50,12	52,39	60,02	74,02

Sumber: *Bagian Reskrim Polresta Kota Yogyakarta 2020*

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 43,36%, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 74,02% pada tahun 2019. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka kriminalitas antara lain peningkatan volume patroli, penempatan personil di daerah rawan kejahatan, dibentuknya satgas saber pungli dan satgas anti klitih, adanya perda tentang pemasangan CCTV, dan operasi kepolisian yang dilaksanakan secara terus menerus.

Tabel 2.322 Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Narkoba	Kasus	45	82	80	123	112
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Narkoba	Kasus	53	83	78	124	118
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	84,91	98,79	102,56	99,19	94,92

Sumber: *Bagian Narkoba Polresta Kota Yogyakarta 2020*

Pada angka kriminalitas narkoba, sejak tahun 2015 hingga 2018 jumlah laporan tindak kriminalitas narkoba dan jumlah penyelesaian tindak kriminalitas narkoba menunjukkan angka yang semakin meningkat. Sedangkan, pada tahun 2019 kedua angka tersebut menurun. Penurunan tersebut dikarenakan peningkatan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya pencegahan yang semakin dimaksimalkan, peningkatan kegiatan ungkap kasus narkoba, kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba telah meningkat, dan adanya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan oleh pemerintah. Apabila dilihat dari persentase penanganan kriminalitas narkoba, menunjukkan angka yang cenderung fluktuatif.

Tabel 2.323 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	913	880	695	698	547
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	409.487	411.282	412.692	413.961	414.055
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk	Kasus	22,30	21,40	16,84	16,86	13,12

Sumber: Polresta Yogyakarta 2019, Hasil Olahan 2020

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta jumlahnya semakin berkurang apabila dihitung dengan perbandingan setiap 10.000 penduduk. Sejak tahun 2015 dengan jumlah kasus tindak kriminalitas sebanyak 22,30 kasus tertangani di setiap 10.000 penduduk, jumlahnya terus berkurang hingga tahun 2017 dengan angka kasus tertangani yaitu 16,84 kasus per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi 16,86, setelahnya menurun menjadi 13,12 di tahun 2019.

12. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sementara itu, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Tabel 2.324 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Jenis Pendapatan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Pajak	Jenis	10	10	10	10	10	0,00
2	Retribusi	Jenis	16	14	15	13	14	-2,75
	Jumlah	Jenis	26	24	25	23	24	-1,79

Sumber: Bagian P3ADK, 2020: dengan Hasil Olahan, 2020

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2015-2019 konstan dengan 10 jenis pajak. Selanjutnya, jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 berjumlah 16 jenis, dan menurun menjadi 14 jenis di tahun 2016. Pada tahun 2017 angka tersebut naik menjadi 15 jenis, kemudian turun menjadi 13 jenis pada tahun 2018. Angka tersebut naik menjadi 14 jenis pada tahun 2019.

Pajak yang berlaku di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing/IMPTA.

13. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu goodwill dan political will pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah Perda di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Jumlah perda terkait perijinan pada tahun 2015 berjumlah 28 buah, dan terus meningkat menjadi 51 di

2019. Jumlah perda terkait lalu lintas barang dan jasa pada tahun 2015 berjumlah 28 buah, dan terus meningkat menjadi 49 di tahun 2019. Selanjutnya, jumlah perda terkait ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 berjumlah 28 buah, dan meningkat menjadi 41 buah di tahun 2019.

Tabel 2.325 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah Perda terkait perijinan	Buah	28	30	35	48	51	16,80
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	Buah	28	30	35	46	49	15,44
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	Buah	28	30	35	37	41	10,08

Sumber: Bagian Hukum Kota Yogyakarta, 2020

Terdapat tiga buah Perda baru terkait perijinan di tahun 2019, ketiga Perda tersebut adalah:

- a. Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran; dan
- c. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja.

Terdapat tiga buah Perda baru terkait lalu lintas barang dan jasa di tahun 2019, ketiga Perda tersebut adalah:

- a. Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran; dan
- c. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja.

Terdapat empat buah Perda baru terkait ketenagakerjaan di tahun 2019, keempat Perda tersebut adalah:

- a. Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran;
- c. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan , dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja.

14. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Yogyakarta pada tahun 2019 adalah 40,99%.

Tabel 2.326 Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Penduduk usia <15th + usia >64th	Jiwa	119.505	118.959	119.607	119.812	120.387	0,18
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	291.381	292.323	293.085	294.147	293.668	0,20
3	Rasio ketergantungan	%	41,01	40,69	40,81	40,73	40,99	-0,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2020

Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Yogyakarta memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2015 hingga 2018, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 40,99 dengan penurunan rata-rata -0,01% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Yogyakarta semakin berkurang setiap tahunnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2019 mendasarkan pada RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.327 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Angka Kemiskinan	6,24	6,84	90,38%
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan	Indeks Keberdayaan Masyarakat	56,53	63,86	112,97%
3	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatkan	Pola Pangan Harapan	85,4	87,5	102,46%
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,40	0,42	95,00%
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,19%	5,49%	105,78%
6	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Angka Kriminalitas	1.596	1.037	135,03%
		Jumlah Pelanggaran Perda	5.600	4.299	123,23%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	11,43 tahun	11,44 tahun	100,09%
		Angka harapan lama sekolah	17,01 tahun	17,05 tahun	100,24%
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,34 tahun	74,45 tahun	100,15%
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	56%	60%	107,14%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	73,40%	78,45%	106,88%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,04	53,67	105,15%
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur Wilayah	41,29	42,88	103,85%
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB	BB	100%
		Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%

Sumber: LKIP Kota Yogyakarta Tahun 2019

1. Sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun

Penghitungan pencapaian sasaran pertama berdasarkan pada angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Target angka kemiskinan pada tahun 2019 adalah sebesar 6,24, adapun realisasi tahun 2019 adalah 6,84 sehingga tingkat capaiannya 90,38 persen. Sasaran pertama didukung oleh Dinas Sosial; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas PUPKP; dan Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas Sosial; Bappeda; Dinas Kominfosan; dan 14 Kecamatan yang berperan dalam proses pendukung.

Faktor pendorong dalam mencapai sasaran ini antara lain:

a. Komitmen Kepala Daerah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta telah meningkatkan eksistensi program Gandeng Gendong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta dan membantu pengentasan kemiskinan. Program ini mensinergikan lima unsur, yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, Kampus, Komunitas, Kampung, dan Korporat (Konsep 5K) dalam rangka sinergitas pembangunan. Sebagai langkah konkrit, Pemerintah Kota Yogyakarta membuat kebijakan penggunaan batik Segoro Amarto, Lurik, Jumputan, Sibori serta Ecoprint sebagai pakaian dinas aparatur sipil negara. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM khususnya warga miskin di Kota Yogyakarta. Selain itu, dikembangkan pula SIM Nglarisi yang merupakan aplikasi pemesanan jamuan rapat Pemerintah Kota Yogyakarta. Penyedia yang tergabung ke dalam aplikasi tersebut dipersyaratkan mengikutsertakan warga miskin sebagai anggota kelompoknya, sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat miskin secara khusus.

b. Dukungan Anggaran Dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Berkaitan dengan warga yang sudah tidak bisa diberdayakan secara ekonomi, Dinas Sosial memberikan perlindungan sosial. Adapun jenis perlindungan dan jaminan sosial yang disalurkan, antara lain Asistensi Lanjut Usia Miskin (ASLUM), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, diberikan pula Jaminan Kesehatan melalui anggaran Dinas Kesehatan. Kota Yogyakarta berkomitmen mendorong tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) yang dituangkan dalam bentuk MoU antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BPJS, sehingga apabila masyarakat Kota Yogyakarta mau diberikan fasilitas BPJS Kelas III, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menanggung iuran BPJS-nya. Dari sisi pendidikan, Dinas Pendidikan memberikan Jaminan Pendidikan kepada siswa miskin. Hal ini diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi yang membutuhkan bantuan biaya.

Infrastruktur sarana dan prasarana permukiman bagi warga miskin juga terus dilakukan perbaikan, baik melalui anggaran APBD, APBN, Pemda DIY, maupun dana CSR. Total perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan sepanjang tahun 2019 sebanyak 561 rumah. Meskipun tidak semuanya diperuntukkan bagi warga miskin, namun secara umum orang yang mempunyai permasalahan rumah tidak layak huni biasanya adalah orang yang kurang mampu sehingga dalam pelaksanaan pemberian bantuan RTLH pun warga kurang mampu/miskin tetap menjadi prioritas dalam penanganan RTLH yang ada di Kota Yogyakarta.

Dari segi ekonomi, Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya meningkatkan pendapatan melalui pemberian pelatihan, pembentukan kelompok usaha serta pemberian modal usaha dengan pembinaan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

c. Dukungan Korporat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Dukungan korporat terus menerus didorong, baik melalui keterlibatannya dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kota maupun melalui Forum Tanggungjawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TLSP) Kota Yogyakarta. Untuk tahun 2019, alokasi dana CSR yang diperoleh berasal dari: (1) BPD DIY sebesar Rp 553.256.000,- untuk bantuan kelompok dan rintisan usaha, pembinaan sekolah ramah anak, kampung ramah anak, dan puskesmas ramah anak, serta penanganan RTLH; (2) Bank Jogja sebesar Rp 200.000.000,- untuk pengadaan sarpras pendidikan, pelatihan kuliner, kampung ramah anak, dan penanganan RTLH; dan (3) PT.

Sarana Multigriya Finansial (SMF) memberikan bantuan penanganan RTLH sebanyak 14 unit.

d. Penguatan Data dan Informasi

Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mewadahi pengolahan data kemiskinan beserta intervensi yang sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. SIM tersebut dinamakan SIM Pemberdayaan. Dengan adanya SIM Pemberdayaan, diharapkan intervensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah mendasarkan data penduduk miskin yang dikeluarkan Kementerian Sosial, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sudah diiriskan dengan data kemiskinan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, yakni Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (DKSJPS). Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan pula tidak ada duplikasi intervensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dikarenakan basis data sudah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

e. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Koordinasi antara TKPK Kota dengan TKPK Kelurahan terus diintensifkan dengan tujuan terjalin sinergi antara kebijakan yang sifatnya *top down* maupun kebutuhan masyarakat yang sifatnya *bottom up*. Melalui mekanisme rapat keluarga masyarakat didorong untuk melakukan *self assessment* apakah dirinya masih layak disebut masyarakat miskin atau tidak, dengan mengisi parameter dan indikator yang tersedia.

Terdapat penghambat yang masih ditemui dalam mencapai sasaran ini, yaitu:

- a. Belum optimalnya penggunaan olahan data dalam SIM Pemberdayaan untuk menjamin ketepatan sasaran. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pola koordinasi yang lebih efektif serta mewajibkan setiap Perangkat Daerah dalam penggunaan data SIM Pemberdayaan pada setiap intervensinya;
- b. Berdasarkan data irisan DTKS Januari 2019 dan KSJPS 2018, penduduk tidak bekerja di usia 18-59 tahun masih mendominasi permasalahan. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan keterlibatan lebih banyak sasaran dalam setiap program dan kegiatan yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans terutama dalam kegiatan yang berpeluang dalam penciptaan lapangan usaha. Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui rintisan usaha dengan jejaring kemitraan; dan
- c. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin terkendala status kepemilikan lahan. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu

dengan menempatkan warga miskin yang tidak memiliki rumah ke rumah susun milik pemerintah.

2. Sasaran Keberdayaan Masyarakat Meningkat

Indikator sasaran ini adalah Indeks Keberdayaan Masyarakat. Indikator Keberdayaan Masyarakat didapat dari komposit indeks pemberdayaan kampung serta persentase perempuan dan anak yang tidak mengalami kekerasan. Pemberdayaan kampung dilihat dari kampung yang sudah diberdayakan melalui deklarasi kampung yakni Kampung Ramah Anak, Kampung Panca Tertib, Kampung Tangguh Bencana/ KTB, Kampung Gerbang Mas/JBM, Kampung Wisata, Kampung Budaya, Kampung Bebas Asap Rokok, Kampung Anti Vandalisme, Kampung Pintar, Kawasan Tanpa Rokok, PHBS, STBM, Kampung Bebas Narkoba, Kampung Hijau, Kampung Siaga Bencana, Kampung Bebas Jentik Nyamuk/*Community Deal* PSN-DBD, Kampung Dongeng, Kampung KB, Kampung Literasi, Kampung Jogowargo, Kampung Sadar Gender, Kampung Kesehatan Reproduksi Remaja, Kampung Sayur, Kampung *Cyber*, Kelurahan Budaya, Kampung Sains dan Literasi, Kampung Cakruk Multi Fungsi, dan Kampung Bebas Pekat.

Nilai indeks pemberdayaan kampung diperoleh dari hasil skoring 170 kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk tahun 2019, realisasi indeks pemberdayaan kampung sebesar 39,82. Untuk data perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 219 orang dari 212.819 orang jumlah penduduk perempuan, sehingga persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan adalah 99,89 persen. Sedangkan untuk data anak yang mengalami kekerasan pada tahun 2019 sebanyak 67 orang dari 114.667 orang jumlah penduduk anak, sehingga persentase anak yang tidak mengalami kekerasan adalah 99,94 persen. Dengan demikian, realisasi indeks keberdayaan masyarakat tahun 2019 mencapai 63,86. Adapun tingkat capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 (56,53) adalah 112,97 persen.

Sasaran ini didukung oleh DPMPPA; 14 Kecamatan; Dinas Dalduk KB; Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Sosial; Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan; BPBD; Satpol PP; dan Dinas PUPKP yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas Pemuda dan Olahraga; DPMPPA; Bagian Tapem; dan Dinas Sosial yang berperan dalam proses pendukung. Adapun faktor pendorong yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Tingginya Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Upaya Pemberdayaan Kampung melalui Program Dodolan Kampung
Program Dodolan Kampung merupakan penerjemahan Program Gandeng Gendong yang berfokus pada pemberdayaan berbasis kampung. Dodolan Kampung memiliki tiga arti, yaitu: (1) *Do dolan kampung*/Bermain ke

kampung, merupakan sebuah ajakan menghidupkan kampung sebagai sarana sosial dan ajang silaturahmi; (2) *Dodolan ing kampung*/Penguatan ekonomi kampung, merupakan media penumbuhan, pengembangan, dan penguatan ekonomi lokal; dan (3) *ngeDol kampung*/Menjual potensi kampung atau *Branding Kampung*, merupakan upaya menjual potensi sekaligus menjaring aspirasi sebagai *stakeholder* dalam keberlanjutan pembangunan kampung. Dengan adanya program Dodolan Kampung, diharapkan wilayah dapat mengetahui potensi yang dimiliki sehingga program dan kegiatan yang akan direncanakan dapat mengangkat potensi wilayah tersebut.

- b. Tingginya Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Berbasis Kampung Masyarakat Kota Yogyakarta cukup aktif dalam partisipasi pembangunan, dimulai dari proses perencanaan program dan kegiatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang bersumber dari anggaran kewilayahan serta memantau kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam mendukung pembangunan berbasis kampung, masyarakat juga ikut memberikan swadaya, baik berupa tenaga, jamuan, maupun materiil. Di samping itu, hal yang terpenting adalah menjaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah agar tidak terkotori oleh upaya vandalisme oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Pengembangan Inovasi SIGRAK (Siap Gerak Atasi Kekerasan)
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPMPPA mengembangkan SIGRAK sebagai upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui inovasi ini, diharapkan masyarakat yang menjadi korban kekerasan berani untuk melaporkan kekerasan yang didampingi fasilitator. Selain hal tersebut, terdapat pula *Mobile Gender Corner* sebagai media dan program untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta.

Terdapat beberapa permasalahan yang masih muncul dalam pencapaian sasaran ini, yaitu:

- a. Pemberdayaan berbasis kampung masih bersifat parsial, belum ada sinkronisasi antar Perangkat Daerah maupun stakeholder. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pembuatan *roadmap* pemberdayaan kampung yang mensinergikan antar pemangku kepentingan berdasarkan 5K;
- b. Usulan program dan kegiatan pada Musrenbang Kelurahan belum berfokus pada pengembangan kampung berdasarkan potensi yang ada. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan perubahan mekanisme

Musrenbang Kelurahan dimana harus ada validasi dari Bappeda sebelum dilaksanakan Musrenbang Kelurahan; dan

- c. Pemahaman dan kepedulian terhadap permasalahan sosial terutama terhadap kekerasan anak dan perempuan belum menjadi kebutuhan bersama. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan optimalisasi penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui penguatan ketahanan keluarga.

3. Sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Ketahanan pangan masyarakat meningkat dilihat dari indikator Pola Pangan Harapan. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan indikator dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan indikator dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH merupakan indikator sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Tabel 2.328 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi Aktual	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	803,5	46,2	40,2	0,5	23,1	20,1	25,0	20,1
2.	Umbi-umbian	67,2	3,9	3,4	0,5	2,0	1,7	2,5	1,7
3.	Pangan Hewani	399	23,0	20,0	2,0	46,0	40,0	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	28,8	1,7	1,4	0,5	0,9	0,7	5,0	0,7
5.	Buah/biji berminyak	13,3	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
6.	Kacang-kacangan	228,6	13,1	11,4	2,0	26,2	22,8	10,0	10,0
7.	Gula	27,7	1,6	1,4	0,5	0,8	0,7	2,5	0,7
8.	Sayuran dan buah	163,9	9,4	8,2	5,0	47,0	41,0	30,0	30,0
9.	Lain-lain	5,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	1.737,7	100,0	87,0		146,3	127,4	100,0	87,5

Sumber: Survei Pola Pangan Harapan Tahun 2019, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Skor Pola Pangan Harapan Kota Yogyakarta Tahun 2019 diukur dengan cara survei sampel rumah tangga di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta. Target pola pangan harapan pada tahun 2019 adalah sebesar 85,4, adapun realisasi tahun 2019 adalah 87,5 sehingga tingkat capaiannya 102,46 persen.

Sasaran ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Sosial; Dinas PUPKP; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan Dinas Kesehatan yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans; DPMPPA; dan 14 Kecamatan yang berperan dalam proses pendukung. Adapun faktor pendorong untuk mendukung sasaran ini adalah:

a. Adanya Upaya Peningkatan Ketersediaan Pangan

Salah satu upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan adalah melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan berupa Kampung Sayur, Lorong Sayur, dan pemanfaatan pekarangan. Selain itu, program Lele Cendol yang dilaksanakan di wilayah juga turut memperkuat ketahanan pangan dari sektor perikanan. Dari sisi pertanian, karena terbatasnya lahan di Kota Yogyakarta maka kemampuan dan kemandirian kelompok tani dalam mengakses dan menerapkan teknologi pertanian menjadi fokus utama dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok tani. Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di atas, diharapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat diberdayakan secara mandiri.

b. Adanya Upaya Penyehatan Pola Konsumsi Pangan

Sebagai upaya agar masyarakat memahami konsumsi pangan yang sehat, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi pangan sehat, di antaranya melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Makan Buah dan Sayur (Gebyur). Selain itu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dihalakkan oleh Dinas Kesehatan diharapkan mampu mendukung peningkatan pola konsumsi pangan sehat yang ada di masyarakat.

c. Adanya Upaya Penguatan Distribusi Pangan

Upaya untuk menguatkan distribusi pangan adalah melalui kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau stok dan harga barang yang ada di masyarakat. Dengan adanya pemantauan ini diharapkan bahan pangan yang ada di Kota Yogyakarta dapat terdistribusi secara merata. Selain melalui operasi pasar, dukungan infrastruktur jalan juga tidak kalah penting. Jalan protokol maupun jalan kampung senantiasa ditingkatkan kualitasnya agar tidak mengganggu distribusi pangan oleh para distributor.

d. Adanya Upaya Peningkatan Keamanan Pangan

Unit Respon Cepat (URC) adalah tim yang dibentuk untuk menangani kasus zoonosa dalam waktu maksimal 24 jam sebagai upaya meningkatkan keamanan pangan. Selain itu, dilaksanakan pula pemeriksaan keamanan pangan yang ada di pasar, apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Dinas Pertanian dan Pangan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta BPOM dalam melakukan pengujian bahan berbahaya terhadap sampel yang ditemukan pada bahan pangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang masih muncul dalam pencapaian sasaran ini, yaitu:

- a. Budaya konsumsi pangan masyarakat yang menempatkan padi/nasi sebagai satu-satunya sumber pangan utama. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan promosi dan informasi makanan alternatif pengganti nasi; dan
- b. Kegemaran masyarakat mengkonsumsi makanan cepat saji dan tidak beragam dari segi jenis dan jumlahnya. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan sosialisasi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

4. Sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) yang merupakan angka dari BPS. Target Indeks Gini Tahun 2019 adalah 0,40, sedangkan realisasinya 0,42 sehingga tingkat capaiannya sebesar 95,00 persen. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Indeks Gini Kota Yogyakarta 0,42 masuk dalam kategori moderat yang berarti masih terdapat ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan rendah dengan pendapatan tinggi. Semakin mendekati angka 1, menunjukkan ketimpangan yang semakin besar.

Sasaran keempat didukung oleh Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan Dinas Kesehatan yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans; Dinas Sosial; DPMPPA; Dinas Dalduk KB; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian dan Pangan; 14 Kecamatan; dan Dinas PUPKP yang berperan dalam proses pendukung. Adapun faktor pendorong dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Sebagai upaya penyiapan tenaga yang siap kerja, Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans telah memberikan pelatihan yang berbasis keterampilan seperti pelatihan mengemudi, satpam, serta perhotelan. Dari pelatihan tersebut selanjutnya disalurkan kepada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Di samping itu, berkaitan dengan keamanan kerja, dijalin pula kerjasama hubungan industrial dengan perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

- b. Peningkatan Kesejahteraan Koperasi
Pembinaan kelembagaan koperasi dilakukan, baik terhadap koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif dengan meningkatkan kualitas sumber daya pengurus dan pengawas koperasi. Dengan adanya pembinaan tersebut, diharapkan omset dan asset koperasi dapat meningkat sehingga semakin banyak warga yang mau ikut bergabung menjadi anggota koperasi.
- c. Peningkatan Kesejahteraan UMKM
Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans menyediakan fasilitas pengembangan konsultasi bisnis dan manajemen sebagai upaya untuk mendampingi rintisan usaha agar semakin berkembang, terutama dalam hal pemasaran produk. Selain itu, juga dilaksanakan fasilitasi kemitraan dan pembiayaan bagi pelaku UMK sehingga usaha yang dimiliki dapat berkembang.

Beberapa penghambat yang dijumpai dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi UMKM. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu: (1) gelar potensi UMKM serta kemitraan dengan perusahaan dalam menyalurkan hasil produksi UMKM, dan (2) optimalisasi teknologi informasi melalui SIM Nglarisi untuk memasarkan produk olahan makanan dan aplikasi Dodolan untuk mengiklankan hasil produk UMKM;
- b. Semakin menurunnya minat masyarakat untuk membentuk koperasi, serta sulitnya mengaktifkan kembali koperasi pasif, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya dukungan dari pengurus atau anggota koperasi untuk membenahi organisasinya. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu: (1) bimtek bagi anggota koperasi di kelurahan untuk memberi motivasi teknis pengelolaan koperasi, dan (2) monitoring dan evaluasi kelembagaan di koperasi; dan
- c. Masih rendahnya pemahaman akan hak dan kewajiban bagi pekerja dan perusahaan. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu: (1) pembinaan dan monitoring kepesertaan jaminan sosial, (2) sosialisasi penetapan UMK tahun 2020 (3) pembinaan syarat kerja di perusahaan, dan (4) penyelesaian kasus perselisihan hubungan industri.

5. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Sasaran kelima memiliki indikator Angka Pertumbuhan Ekonomi. Angka Pertumbuhan Ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 yang diterbitkan BPS. Adapun target tahun 2019 adalah 5,19 persen sedangkan realisasinya 5,49 persen sehingga tingkat capaiannya menjadi 105,78 persen.

Sasaran ini didukung oleh Dinas Pariwisata; 14 Kecamatan; Dinas Kebudayaan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan; Dinas PMP; Dinas Pertaru; Kantor Kesbang; dan Satpol PP yang berperan dalam proses pendukung. Beberapa upaya yang sudah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Sektor Perdagangan

- 1) Pemeliharaan sarana prasarana pasar yang berkelanjutan, penyediaan gasilintas tempat sampah, serta kebijakan pembatasan pembuangan sampah warga di TPS pasar memudahkan pembersihan dan pengelolaan sampah pasar, sehingga standar pasar sehat dapat terpenuhi.
- 2) Optimalisasi kegiatan penertiban administrasi pedagang dan efisiensi pelaksanaan e-retribusi, serta perubahan komponen dari los ke kios, sehingga berpotensi dalam peningkatan pendapatan.
- 3) Pengelolaan pasar dengan PPK BLUD mendorong *effort* kinerja pengelola menjadi lebih baik, responsif, visioner, inovatif, dan selalu mengutamakan pelayanan sehingga menarik dan mendongkrak kepercayaan publik khususnya pelaku usaha dan pengunjung pasar.

b. Sektor Perindustrian

- 1) Peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk UKM, serta pelaksanaan promosi produk UKM melalui media sosial sehingga penyebarluasan informasi produk lebih luas dan cepat.
- 2) Dilaksanakannya program bagi pelaku IKM yang usahanya sudah berjalan lebih dari satu tahun, serta dilakukan pendampingan pasca pelatihan yang dilakukan oleh fasilitator pendamping IKM sekaligus memastikan peserta pelatihan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengaplikasikan hasil pelatihan dalam usaha industri masing-masing.
- 3) Peningkatan jumlah produksi dan pemasaran hasil industri logam secara optimal ke industri maupun IKM.

c. Sektor Pariwisata

- 1) Pameran pariwisata dan Atraksi Pariwisata di Kawasan Titik Strategis di Kota Yogyakarta.
- 2) *Famtrip* dan Wayang Jogja *Night Carnival* 2019 dilaksanakan sebanyak satu kali kegiatanyang rutin digelar pada bulan Oktober, untuk menghidupkan daya tarik wisata/atraksi di waktu malam juga sebagai *event* seni budaya sarana promosi pariwisata berbasis budaya di Kota

Yogyakarta, Gelar Potensi Kampung Wisata dan Jelajah Kampung Wisata.

- 3) Pengembangan Taman Pintar tidak hanya sebagai wisata kunjungan tetapi sebagai wisata pendidikan melalui berbagai program dan *event* yang dilakukan.

Adapun beberapa kendala yang masih dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan sampah (daur ulang), dan terbatasnya fasilitas standarisasi pasar sehat. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah serta menumbuhkan kesadaran pedagang pentingnya menjaga kebersihan, pemilahan sampah, serta Gerakan 3R;
- b. Masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi tepat waktu. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pengembangan e-retribusi sebagai wadah pembayaran retribusi secara online; dan
- c. Kondisi ekonomi global pada tahun 2019 yang lesu, menyebabkan *event* promosi untuk produk ekspor berkurang dibandingkan tahun 2018. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pengembangan promosi produk ekspor berbasis *e-commerce*.

6. Sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun

Sasaran ini memiliki dua indikator, yaitu Angka Kriminalitas dan Jumlah Pelanggaran Perda.

Kriminalitas termasuk faktor yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Kriminalitas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat menjadi indikator tidak sejahteranya masyarakat. Jadi terdapat hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara faktor kesejahteraan dengan faktor kriminalitas. Angka kriminalitas yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan, sehingga angka kriminalitas harus ditekan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Angka kriminalitas yang dimaksud meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Angka kriminalitas ini perlu ditekan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Target angka kriminalitas tahun 2019 adalah sebesar 1.596, realisasi pada tahun 2019 sebesar 1.037 sehingga tingkat capaian 135,03 persen. Angka kriminalitas ini menurun sebesar 78 jika dibandingkan tahun 2018 (1.115) dan sudah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2022 (1.500). Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tindakan kriminal di Kota Yogyakarta sudah semakin terkendali.

Untuk jumlah pelanggaran perda, target tahun 2019 sebesar 5.600. Adapun realisasinya adalah 4.299, sehingga tingkat capaiannya 123,23 persen. Jumlah pelanggaran perda ini menurun sebesar 167 jika dibandingkan dengan tahun 2018 (4.466) dan secara capaian realisasi telah melampaui target pada tahun bersangkutan. Meskipun menunjukkan capaian yang positif, target capaian untuk indikator kinerja jumlah pelanggaran perda perlu dilakukan revaluasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Jumlah realisasi 4.299 pelanggaran didapat dari penegakan perda secara non yustisi sebesar 3.737 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 562 pelanggaran, baik yang didapat dari laporan masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda dan dari hasil operasi petugas di lapangan. Laporan masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda di wilayah dilaporkan kepada petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) yang ditempatkan di tiap kecamatan sebagai petugas terdepan dalam penanganan masalah pelanggaran perda dan seoptimal mungkin untuk dapat terselesaikan di tingkat wilayah. Kegiatan patroli yang secara rutin dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam rangka monitoring dan operasi penegakan perda dilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli di lapangan dua kali patroli dalam sehari.

Sasaran ini didukung oleh Satpol PP; Kantor Kesbang; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Dalduk dan KB; Bagian Tapem dan Kesra; dan 14 Kecamatan yang berperan dalam proses utama, serta oleh Kantor Kesbang dan 14 Kecamatan yang berperan dalam proses pendukung. Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk pemuda sebagai sarana aktualisasi diri;
- b. Optimalisasi strategi penegakan perda melalui upaya preventif di samping tetap didukung pelaksanaan strategi penegakan perda secara represif yustisi dan non yustisi;
- c. Kegiatan patroli yang secara rutin dilakukan oleh petugas Pol PP dalam rangka monitoring dan operasi penegakan perda dilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli di wilayah Kota Yogyakarta dengan pola 3 shift selama 24 jam dalam sehari;
- d. Telah ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi modal dasar dan landasan pendukung terwujudnya optimalisasi penegakan peraturan daerah;
- e. Intensifikasi koordinasi baik di internal Pemkot Yogyakarta maupun dengan institusi penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, TNI, dan

sebagainya) serta kerjasama kemitraan dalam rangka pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kota Yogyakarta; dan

- f. Laporan masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda di wilayah, dilaporkan kepada petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) yang ditempatkan di tiap kecamatan sebagai petugas terdepan dalam penanganan masalah pelanggaran perda dan seoptimal mungkin untuk dapat terselesaikan di tingkat wilayah.

Beberapa penghambat yang masih ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan optimalisasi strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif dengan tetap berkomitmen melakukan penguatan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) dan sosialisasi gerakan panca tertib berbasis sekolah (*Pantib for school*) serta melalui kegiatan Gerakan Panca Tertib berbasis komunitas (*Pantib for community*) diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda secara signifikan; dan
- b. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota Yogyakarta yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Yogyakarta menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda, diantaranya pembuatan *website* Satpol PP yang terintegrasi dan menjadi sub domain *website* Pemerintah Kota Yogyakarta, Jogja *Smart Service* (JSS), Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP, SIMGAKDA (SIM Penegakan Perda), dan SMS *Gateway* yang telah direncanakan dan menjadi pendukung *roadmap smart city* Kota Yogyakarta.

7. Sasaran Kualitas Pendidikan Meningkat

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Kegunaan indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Interpretasi dari tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Target angka RLS pada tahun 2019 adalah 11,43 tahun, sedangkan realisasinya 11,44 tahun sehingga tingkat capaiannya 100,09 persen. Angka RLS ini lebih tinggi dibandingkan angka RLS DIY (9,32 tahun) dan angka RLS nasional (8,17 tahun). Namun demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk mencapai target pada RPJMD masih perlu ditingkatkan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Adapun target untuk angka HLS pada tahun 2019 adalah 17,01 tahun, sedangkan realisasinya 17,05 tahun sehingga tingkat capaiannya 100,24 persen. Angka HLS ini lebih tinggi dibandingkan angka HLS DIY (15,56 tahun) dan angka HLS nasional (12,91 tahun). Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2022, realisasi 2019 masih belum melampaui target. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus berupaya dalam peningkatan kualitas pendidikan khususnya berkaitan dengan HLS.

Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan; Dinas Pemuda dan Olahraga; 14 Kecamatan; dan DPMPPA yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas Pendidikan; Dinas PUPKP; Dinas Sosial; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; dan 14 Kecamatan yang berperan dalam proses pendukung. Adapun faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Dilaksanakannya kegiatan penambahan materi pelajaran untuk setiap sekolah, pelaksanaan *try out* persiapan UASDA/UN, pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi guru sehingga memberikan dampak pada kenaikan rata-rata UASDA/UN;
- b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Yogyakarta mengalami peningkatan, dikarenakan oleh peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan, adanya bantuan JPD untuk membiayai pendidikan bagi siswa

- kurang mampu, serta sinergitas pemerintah dan perangkat kelurahan (RT/RW) dalam memberikan sosialisasi program-program pendidikan;
- c. Adanya kerjasama yang baik antara sekolah dengan pengawas pembina, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan cukup dengan adanya anggaran di Dinas Pendidikan maupun BOSDA sehingga berdampak pada kenaikan dari indikator program akreditasi;
 - d. Adanya kegiatan PPMBI Olahraga, PPMBI Seni, dan Klinik Sains untuk membina siswa dalam persiapan O2SN;
 - e. Kualitas PKBM dan penyelenggara pendidikan non formal yang semakin meningkat;
 - f. Adanya peraturan yang mengharuskan guru berijazah S1 untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), adanya bantuan bagi guru PNS dalam mengikuti PPG; dan
 - g. Sistem PPDB zonasi yang membatasi siswa inklusi hanya 2% dari jumlah siswa baru, meningkatnya frekuensi workshop SPPI untuk PAUD-TK, dan meningkatnya peran ULD dalam memberikan layanan pendukung pada SPPI.

Beberapa penghambat yang masih ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pada sekolah swasta belum tercukupi. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah swasta dengan menggunakan dana APBD maupun CSR;
- b. Kesadaran akreditasi yang kurang di tingkat SPS dan kurangnya kualitas pengajar SPS. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan peningkatan kualitas pengajar SPS serta pemberian intensif yang sesuai; dan
- c. Banyak LKP yang bersifat *business oriented*. Karena tidak adanya efek positif dari status akreditasi terhadap penambahan jumlah peserta didik, banyak LKP yang tidak berkeinginan untuk mengikuti akreditasi. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya status akreditasi serta merumuskan kebijakan yang memberikan efek positif terhadap LKP yang sudah terakreditasi.

8. Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran ini memiliki indikator Angka Harapan Hidup. Target Angka Harapan Hidup pada tahun 2019 adalah 74,34 tahun, sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar 74,45 tahun sehingga tingkat capaiannya 100,15 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2018 (74,35 tahun), tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup DIY (74,82 tahun). Angka harapan hidup merupakan lama

hidup manusia di dunia. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta dikarenakan membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Beberapa hal yang berpengaruh penting pada peningkatan angka harapan hidup adalah pola makan, penyakit menular, penyakit bawaan lahir, lingkungan tempat tinggal, stres atau tekanan.

Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan; Dinas Dalduk dan KB; DPMPPA; 14 Kecamatan; dan RS Jogja yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Dalduk dan KB; Dinas PUPKP; dan 14 Kecamatan yang berperan dalam proses pendukung. Faktor pendorong tercapainya sasaran ini adalah:

- a. Adanya akreditasi puskesmas dan rumah sakit mendorong peningkatan layanan dan prasarana;
- b. Dukungan anggaran baik APBN, APBD DIY, APBD Kota Yogyakarta maupun pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- c. Adanya kebijakan Kementerian Kesehatan dalam menggunakan dana BOK untuk menambah jumlah SDM (Promkes, Gizi, Akuntansi, PL) untuk mendukung Program 8.000 HPK;
- d. Sistem komunikasi dan koordinasi yang baik dengan jejaring dan mitra surveilens sesuai Perwal Nomor 100/2016 tentang Sistem Surveilens Berbasis Masyarakat; dan
- e. Adanya mitra kerjasama yang mendukung kegiatan (HI, BNNK, Program Peduli Yakkum, Pelatihan-pelatihan untuk petugas (IVA dan kriyoterapi, Posbindu PTM, Pandu PTM, dan lain-lain), Workshop PTM dan Keswa).

Adapun penghambat yang muncul dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan sosialisasi pentingnya PHBS kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Waktu dan tempat pelayanan masih kurang optimal dikarenakan lokasi puskesmas yang sempit dan pasien yang banyak. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan perbaikan tempat pelayanan serta pengkajian penambahan jumlah Puskesmas Buka 24 jam;
- c. Masyarakat kurang peduli dalam memahami aturan dan prosedur pelayanan JKN. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan sosialisasi massif aturan dan prosedur pelayanan JKN;
- d. Ketersediaan rawat inap intensif di RS belum memadai. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan penguatan kerjasama dan peningkatan komitmen dari RS jejaring;
- e. Data kependudukan tidak valid sehingga menyulitkan proses integrasi Jamkesda. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan *updating* data kependudukan berdasarkan SIAK serta melakukan validasi penduduk;

- f. Adanya rasa malu untuk memeriksakan kehamilan pada trimester pertama untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pendampingan sejak remaja perihal pernikahan dini, serta pendampingan personal terhadap perempuan yang hamil di luar nikah;
- g. Ada obat yang tidak tersedia di e-katalog. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan berkomunikasi dengan LKPP berkaitan dengan obat yang tidak ada di e-katalog;
- h. Ibu tidak merasakan tanda-tanda persalinan sehingga lahir di rumah. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan sosialisasi kepada ibu hamil berkaitan gejala persalinan;
- i. Masih ada bayi yang tidak IMD karena BBLR atau SC. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan sosialisasi pentingnya ASI bagi bayi; dan
- j. Jumlah lansia di Kota Yogyakarta yang cukup banyak memerlukan lebih banyak tenaga dan anggaran dalam pemeriksaan kesehatan lansia. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pemberdayaan kader Kelurahan Siaga untuk memantau kesehatan lansia melalui Posyandu Lansia.

9. Sasaran Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan

Indikator sasaran ini adalah Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif. Adapun target pada tahun 2019 sebesar 56 persen, sedangkan realisasinya 60 persen sehingga tingkat capaiannya 107,14 persen. Dari penilaian yang dilakukan terhadap keaktifan Rintisan Kelurahan Budaya terdapat sebanyak 12 Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif dari sejumlah 20 Rintisan Kelurahan Budaya. Sesuai dengan formula indikator sasaran, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif}}{\text{Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya}} \times 100\% = \frac{12}{20} \times 100\% = 60\%$$

Penilaian aktifitas Rintisan Kelurahan Budaya pada tahun 2019 mencakup aktivitas masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan seni budaya dengan interval penilaian keaktifan rintisan kelurahan budaya dari angka 1 – 35. Nilai kriteria rintisan kelurahan disebut aktif apabila memiliki skor 29 – 35, kriteria cukup aktif dengan skor 22 – 28, dan kurang aktif dengan skor ≤ 21 .

Aktivitas Rintisan Kelurahan Budaya yang menjadi indikator keaktifan pada tahun 2019 meliputi dialog budaya (seminar/*workshop* budaya), keaktifan dalam forum, Aktualisasi Seni Budaya, Gelar Potensi Seni Budaya, Pentas Seni, keikutsertaan

dalam pameran yang menampilkan kekayaan kuliner dan produk-produk UMKM dari setiap Rintisan Kelurahan Budaya, Pawai, dan Penyelenggaraan Upacara Adat. Dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, berikut rintisan kelurahan budaya yang aktif pada tahun 2019:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. Gedongkiwo; | g. Semaki; |
| b. Keparakan; | h. Wirobrajan; |
| c. Purbayan; | i. Pringgokusuman; |
| d. Pandeyan; | j. Warungboto; |
| e. Cokrodiningratan; | k. Tegalpanggung; dan |
| f. Prenggan; | l. Gunungketur. |

Sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans; Dinas PUPKP; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan; dan 14 Kecamatan yang berperan dalam proses utama. Faktor pendorong pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta yang tinggi dalam menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya;
- b. Dukungan anggaran kegiatan melalui Dana Keistimewaan;
- c. Antusiasme masyarakat dalam mendukung Program Rintisan Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta; dan
- d. Adanya regulasi kawasan konservasi budaya dengan peraturan RTRW dan RTBL (RTBL Kawasan Kraton (2012), RTBL Kawasan Kotagede (2010), RTBL Kawasan Pakualaman (2014), RTBL Kawasan Kotabaru (2014, 2017), RTBL Plengkung Gading-Panggung Krapyak (2016), RTBL Kawasan Mangkubumi (2018)).

Sedangkan kendala yang masih ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah dinamika kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta berubah seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan internalisasi berbagai nilai luhur yang terkait dengan kesejarahan dan bahasa, melalui Kajian Filosofi Batik Yogyakarta, Kajian Perkembangan Teknologi arsitektur bangunan tradisional, Kampanye Sadar Budaya di Media TV, dan Inventarisasi Data Kesejahteraan.

10. Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat

Indikator sasaran ini adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat. Target untuk tahun 2019 adalah 73,40 persen, adapun realisasinya sebesar 78,45 persen sehingga tingkat capaian menjadi 106,88 persen. Perhitungan kesesuaian

berdasarkan rincian hasil kajian kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.329 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019

No.	Fungsi	Rencana (Ha)	Eksisting (Ha)	Selisih (Ha)
1.	Hunian	1.837,76	1.615,50	222,26
2.	Perdagangan dan Jasa	688,31	641,71	46,60
3.	Perkantoran	73,22	92,99	19,76
4.	Industri	0,51	9,35	8,84
5.	Sarana Pendidikan	89,02	183,76	94,73
6.	Sarana Kesehatan dan Keagamaan	18,57	59,47	40,90
7.	Sarana OR dan Rekreasi	10,28	13,90	3,63
8.	Sarana Transportasi	42,47	39,30	3,17
9.	Cagar Budaya	59,78	25,56	34,22
10.	Pariwisata	87,08	39,54	47,54
11.	RTH	38,85	47,64	8,79
12.	RTH Khusus	22,82	24,05	1,23
13.	Sempadan Sungai	23,42	33,65	10,23
14.	Sungai	25,74	38,39	12,65
15.	Jalan	259,17	247,20	11,97
16.	Lahan Kosong		75,24	75,24
17.	Sawah		43,71	43,71
18.	Tanah Produktif		46,05	46,05
	Total	3.277,01	3.277,01	706,20
	Ketidaksesuaian			21,55
	Kesesuaian			78,45

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2019

Sasaran ini didukung oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Penanaman Modal dan Perizinan; Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan Hidup; dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang berperan dalam proses pendukung. Faktor pendorong tercapainya sasaran ini adalah adanya berbagai upaya, yaitu:

- a. Tersedianya aturan secara cukup lengkap, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- b. Data-data pemanfaatan ruang tersedia dengan cukup baik; dan
- c. Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi prasyarat pendirian sebuah bangunan.

Sedangkan kendala yang masih ditemui adalah:

- a. Masih minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
- b. Dalam hal terjadi kekosongan pengaturan, belum ada ketentuan yang mengatur tentang diskresi. Selain itu, masih belum tersedia mekanisme insentif dan disinsentif. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pembuatan regulasi penunjang seperti Peraturan Walikota tentang insentif dan disinsentif, Petunjuk Teknis RDTR, Direksi, dan sebagainya.

11. Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Indikator sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target untuk tahun 2019 sebesar 51,04, sedangkan realisasinya 53,67 sehingga tingkat capaiannya 105,15 persen. Ruang lingkup IKLH meliputi analisis indeks kualitas air, kualitas udara, dan indeks tutupan vegetasi.

Tabel 2.330 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Indikator	Parameter	Bobot	Realisasi	Perhitungan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, Total Coliform	30%	41,98	12,59
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	SO ₂ , NO ₂	30%	84	25,2
3	Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)	Luas Tutupan Lahan dan Dinamikasi Vegetasi	40%	39,69	15,88
IKLH : (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x ITV)					53,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2019

Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan; Dinas Kesehatan; Satpol PP; dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang berperan dalam proses utama, serta oleh Dinas Kesehatan dan 14 Kecamatan yang berperan dalam proses pendukung. Beberapa faktor pendorong pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Adanya pemantauan Evaluasi Kinerja Udara Perkotaan (EKUP) yang memantau emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan emisi udara tidak bergerak di beberapa ruas jalan Kota Yogyakarta setiap tahun;
- b. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh ulu-ulu sungai dan pemberian izin secara ketat bagi usaha yang membuang limbah ke sungai mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai;
- c. Adanya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 yang diadakan rutin setiap tahun dengan adanya bimbingan teknis dan visitasi ke lokasi;
- d. Terbangunnya 5 RTHP pada tahun 2019, yaitu RTHP Purwokinanti (276 m²), RTHP Brontokusuman III (600 m²), RTHP Wirogunan (209 m²), RTHP Pandeyan I (250 m²), dan RTHP Kricak II (917 m²) dengan total luasan sebesar 2.252 m²;
- e. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah sudah mulai meningkat, animo masyarakat untuk aktif di bank sampah juga meningkat dilihat dari jumlah nasabah bank sampah yang terus meningkat; dan
- f. Terdapat fasilitas pendaurulangan di Kota Yogyakarta, yaitu TPST 3R Nitikan dan Karangmiri. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan Rumah Kompos di TPST 3R Nitikan dengan tujuan sampah dapat dipilah dari

rumah tangga, mana yang masih bisa dimanfaatkan dan mana yang benar-benar tidak bisa diolah kemudian dibuang ke TPA Piyungan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih muncul adalah:

- a. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, terutama jam-jam masyarakat beraktivitas serta setiap akhir minggu dan libur, dimana kendaraan dari luar kota memadati Kota Yogyakarta. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan melakukan publikasi secara intensif kepada masyarakat tentang kondisi udara di Kota Yogyakarta,, sehingga meningkatkan kepedulian dan informasi lingkungan kepada masyarakat;
- b. Sebagian besar warga yang berada di pinggir sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai melalui kerja bakti rutin Gerakan Kebersihan Sungai pada 140 RW yang secara rutin telah dilaksanakan setiap tahun;
- c. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan menambah luasan ruang terbuka hijau dengan penekanan pada penambahan pohon perindang jalur hijau untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan. Secara sinergi dengan Program Pengelolaan RTH Publik, upaya ini terus ditingkatkan setiap tahun dengan menganggarkan penanaman pohon sebanyak 500 pohon;
- d. Pengetahuan masyarakat mengenai Dokumen Lingkungan belum maksimal. Permasalahan tersebut diatasi dengan: (1) sosialisasi dengan mencetak *booklet* penyusunan Dokumen Lingkungan agar masyarakat mengetahui jenis usaha yang wajib mempunyai dokumen lingkungan, dan memahami cara penyusunan dokumen lingkungan yang baik dan benar; dan (2) melakukan pembinaan tentang penyusunan Dokumen Lingkungan setiap tahun dengan harapan dapat mengetahui dan memahami informasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pengetahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah belum maksimal. Selain itu, pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan, ada yang belum

mencantumkan dampak dari limbah B3 yang dihasilkan sehingga tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan pemenuhan izin PPLH. Permasalahan tersebut diatasi dengan: (1) menelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 secara rutin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan; (2) melakukan visitasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan limbah B3; dan (3) mencetak *booklet* pengurusan izin PPLH dan mencetak buku perundangan yang dibagikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan;

- f. Upaya peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH. Sampai akhir tahun 2019, persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta baru tercapai sebesar 18,80% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik Pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang berada di wilayah permukiman. Bekerjasama dengan OPD terkait dan wilayah untuk mencegah alih fungsi RTHP;
- g. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat. Upaya ini telah dilaksanakan dan dianggarkan secara rutin pada 45 kelurahan; dan
- h. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih. Permasalahan tersebut diatasi dengan: (1) mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih; dan (2) pengembangan rumah kompos di TPST 3R di Nitikan, sehingga sesuai pengembangannya nanti, kapasitasnya akan bertambah dua kali lipatnya yakni 20 ton per bulan dari sebelumnya 10 ton per bulan.

12. Sasaran Infrastruktur Wilayah Meningkatkan

Sasaran ini memiliki indikator Indeks Infrastruktur Wilayah yang dihitung melalui komposit Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Permukiman (Dinas PUPKP), Indeks Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup), Tingkat Pelayanan Jalan (*Level Of Service*) (Dinas Perhubungan), Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana (BPBD) serta Indeks Ketahanan dan

Keselamatan Kebakaran (Dinas Kebakaran); yang dihitung dari $[40\% \times [70\% \{ \text{Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} \} + \{30\% \text{ Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman} \}] + [20\% \{50\% \text{ pengurangan sampah} + 50\% \text{ pengangkutan sampah} \}] + 30\% \text{ Level of Service} + [10\% \{ \text{Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana} + \text{Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran} \} / 2]$. Target tahun 2019 sebesar 41,29, adapun realisasinya 42,88 sehingga tingkat capaiannya 103,85%.

Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum terdiri dari Indeks Infrastruktur Bina Marga (kualitas sarpras jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan serta PJU lingkungan), Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (saluran pengairan dan drainase), dan Indeks Infrastruktur Cipta Karya (bangunan sesuai standar kebutuhan). Panjang jalan kondisi mantap di Kota Yogyakarta sebesar 200,85 km dari 233 km sehingga realisasi tahun 2019 sebesar 86,20 persen. Untuk kualitas PJU lingkungan, PJU ramah lingkungan atau yang menggunakan LED di Kota Yogyakarta sebanyak 11.943 titik dari 26.926 titik sehingga realisasi tahun 2019 sebesar 44,35 persen. Untuk kualitas saluran pengairan, panjang talud dan saluran kondisi baik di Kota Yogyakarta sepanjang 614.445,83 meter dari 72.684,50 meter sehingga realisasi tahun 2019 sebesar 84,53 persen. Untuk drainase, saluran drainase yang terbangun di Kota Yogyakarta sepanjang 300.770,27 meter, jika dibandingkan dengan panjang saluran drainase yang seharusnya terbangun (343.431,27 meter) maka realisasi tahun 2019 sebesar 87,57 persen. Sedangkan untuk pemenuhan bangunan sesuai standar kebutuhan, jumlah bangunan gedung Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dibangun sebanyak 1.430 unit, jika dibandingkan dengan jumlah gedung yang dimiliki pemerintah (1.628 unit), maka realisasi tahun 2019 sebesar 87,83 persen. Indeks Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman terdiri dari kualitas sarpras dasar permukiman dan persentase cakupan air limbah yang memadai. Untuk kualitas sarpras dasar permukiman, kawasan dengan sarpras baik seluas 3.061,5 hektar, jika dibandingkan total kawasan (3.250 hektar) maka realisasi tahun 2019 sebesar 94,2 persen. Sedangkan untuk persentase air limbah yang memadai, jumlah tangki septik yang baik sebanyak 72.224 unit dari 85.919 unit tangki septik yang dimiliki masyarakat, sehingga realisasi tahun 2019 sebesar 84,06 persen.

Indeks Pengelolaan Sampah terdiri dari pengurangan sampah dan pengangkutan sampah. Untuk pengurangan sampah, target tahun 2019 yang ditentukan DLH sebesar 18,18 persen dan dapat terealisasi sebesar 25,64 persen (106.690 jiwa dari 416.049 jiwa) atau tercapai 141,03 persen. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah bank sampah mandiri dan bank sampah yang ada di masyarakat mengalami peningkatan menjadi 481 bank sampah. Dari 481 unit, sebanyak 461 bank sampah dikategorikan sebagai bank sampah yang aktif sehingga tingkat pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat sebesar 95,84 persen dibandingkan dengan total jumlah bank sampah

yang ada. Untuk pengangkutan sampah, target tahun 2019 yang ditentukan DLH sebesar 93,99 persen dan dapat terealisasi sebesar 102,76 persen (427.547 jiwa dari 416.049 jiwa) atau tercapai 109,33 persen. Hal ini dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berteknologi modern dan rehabilitasi TPS.

Tingkat pelayanan jalan (*level of service/LoS*) merupakan ukuran kinerja ruas jalan atau simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan, kepadatan, dan hambatan yang terjadi. Angka 0,8 merupakan angka maksimal untuk ukuran kinerja jalan kategori lancar, apabila angka di atas 0,8 maka masuk kategori tidak lancar. Angka LoS berbanding terbalik, artinya semakin besar nilai LoS maka kinerja jalan semakin menurun. Dari target tahun 2019 LoS yang ditentukan Dinas Perhubungan sebesar 0,799 dapat terealisasi sebesar 0,719 atau tercapai 111 persen, artinya masuk klasifikasi LoS C di ambang batas yang tinggi mendekati klasifikasi D dengan karakteristik arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi, kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat, dan pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah jalur, atau mendahului.

Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana terdiri dari Kampung Tangguh Bencana (KTB), evakuasi korban bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk Kampung Tangguh Bencana (KTB), jumlah Kampung Tangguh Bencana di Kota Yogyakarta yang dibentuk sebanyak 115 kampung, jika dibandingkan dengan jumlah kampung di seluruh Kota Yogyakarta (170 kampung) maka realisasi tahun 2019 sebesar 67,65 persen. Untuk evakuasi korban bencana, jumlah korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap sebanyak 86 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah korban bencana alam (86 jiwa) maka realisasi tahun 2019 sebesar 100 persen. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebanyak 2 unit, jika dibandingkan dengan jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam (2 unit) maka realisasi tahun 2019 sebesar 100 persen.

Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran terdiri dari ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, dan *response time*. Untuk ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu sebanyak 415 rekomendasi, jika dibandingkan dengan jumlah rekomendasi proteksi kebakaran (415 rekomendasi) maka realisasi tahun 2019 sebesar 100 persen. Untuk edukasi proteksi kebakaran, indikator yang digunakan adalah jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dan jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani, dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100 persen (55 penyuluhan proteksi

kebakaran di wilayah terselenggara 100 persen, dan 82 permohonan edukasi proteksi kebakaran yang diajukan oleh sekolah tercapai 100 persen). Sedangkan untuk *response time*, indikator yang digunakan adalah waktu untuk merespon kebakaran maksimal 11 menit. Pada tahun 2019, jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap sebanyak 325 kejadian, jika dibandingkan dengan jumlah kejadian keseluruhan (325 kejadian) maka realisasi tahun 2019 sebesar 100 persen.

Sasaran ini didukung oleh Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; BPBD; dan Dinas Kebakaran yang berperan dalam proses utama, serta oleh 14 Kecamatan yang berperan dalam proses pendukung. Beberapa faktor pendorong pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Dukungan anggaran baik melalui APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY melalui Dana Keistimewaan, APBN maupun CSR dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
- b. Kerjasama lintas sektor dalam mengatasi kemacetan di Kota Yogyakarta;
- c. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah sudah mulai meningkat, animo masyarakat untuk aktif di bank sampah juga meningkat dilihat dari jumlah nasabah bank sampah yang terus meningkat;
- d. Terdapat fasilitas pendaurulangan di Kota Yogyakarta, yaitu TPST 3R Nitikan dan Karangmiri. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan Rumah Kompos di TPST 3R Nitikan dengan tujuan sampah dapat dipilah dari rumah tangga, mana yang masih bisa dimanfaatkan dan mana yang benar-benar tidak bisa diolah kemudian dibuang ke TPA Piyungan; dan
- e. Partisipasi warga kampung dalam pembentukan Kampung Tangguh Bencana cukup tinggi.

Adapun faktor penghambat yang masih ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Kekurangan personil dalam pelaksanaan penegakan Perda dan pengendalian operasional serta operasional penyelenggaraan perparkiran. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan memaksimalkan personil yang ada dengan dibantu dari personil bidang lain;
- b. Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan menyurati wajib uji untuk melakukan uji berkala;
- c. Lambatnya pertumbuhan jalan di kota. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan adanya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas sebagai salah satu upaya Dinas Perhubungan dalam mengatasi dampak terhadap penurunan kelancaran lalu lintas;

- d. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Perda untuk mengutamakan angkutan umum;
- e. Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan dinas terkait dan pengemudi becak motor mengenai keselamatan berlalu lintas;
- f. Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan adanya dukungan instansi terkait dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang perhubungan;
- g. Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menambah armada angkutan umum;
- h. Kurangnya ketersediaan tempat khusus parkir. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan adanya potensi tempat khusus parkir pada lahan/persil milik warga dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir *on street*;
- i. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat. Upaya ini telah dilaksanakan dan dianggarkan secara rutin pada 45 kelurahan;
- j. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih; dan
- k. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengangkutan sampah dengan

menggunakan alat-alat yang berteknologi modern. Upaya ini dilakukan dengan setiap tahun mengalokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang modern.

13. Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kemen PAN/RB Tahun 2019 nomor B/712/AA.05/2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2019 memperoleh predikat A dengan nilai 80,03. Realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD yakni BB. Dalam usaha pencapaian indikator sasaran ini, beberapa faktor pendorong yang ada yaitu:

- a. Dokumentasi komitmen Kepala Daerah dalam implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta tercermin dengan adanya ekspose Kepala Perangkat Daerah di hadapan Kepala Daerah sebelum penyusunan perjanjian kinerja;
- b. Telah disusunnya proses bisnis sebagai bahan penyempurnaan indikator dan target kinerja RPJMD yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan;
- c. Telah dilaksanakan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, baik Eselon II, III, maupun IV, pengukuran serta pelaporan kinerja untuk seluruh Perangkat Daerah dengan melibatkan Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, serta Bagian Layanan Pengadaan;
- d. Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam hal penyusunan dokumen laporan kinerja daerah yakni Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Adanya pemanfaatan sistem aplikasi manajemen kinerja serta menggunakannya untuk membangun dan menetapkan sistem *reward* dan *punishment* dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberian TPP Berbasis Kinerja; dan
- f. Adanya sistem e-Sakip yang terintegrasi di dalam aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) memudahkan perangkat daerah dalam penyusunan pengukuran dan pelaporan kinerja.

Sedangkan untuk opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berdasarkan surat dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DIY Nomor 13A/LHP/XVIII.YOG/03/2020 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019, maka hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini merupakan kesebelas kalinya Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan yang disusun.

Sasaran ini didukung oleh Bappeda; Dinas Kominfo; Bagian Tapem dan Kesra; BPKAD; Dinas Pertaru; Dinas PUPKP; BKPP; Bagian Organisasi; Inspektorat; Bagian Hukum; Sekretariat DPRD; dan Dinas Dukcapil yang berperan dalam proses utama, serta oleh Bappeda; Dinas Kominfo; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berperan dalam proses pendukung. Adapun faktor pendorong pencapaian indikator sasaran ini adalah:

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah dengan menetapkan Keputusan Walikota Nomor 399/2017 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peninjauan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. Dukungan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah 44 Perangkat Daerah dan 1 SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyediakan data pelaporan daerah; dan
- d. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan yang mensyaratkan pengajuan Ganti Uang melampirkan bukti rekonsiliasi aset turut mempercepat proses rekonsiliasi aset.

Sedangkan faktor penghambat yang muncul terkait indikator Opini BPK atas LKPD adalah:

- a. Belum adanya koordinasi yang optimal pihak-pihak yang terkait (terutama Bendahara, Pengurus Barang Pengguna, Pelaksana Akuntansi, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) dalam proses pencatatan transaksi maupun peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkup SKPD. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan semua Perangkat Daerah wajib menyusun SOP tentang penyusunan Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah untuk menjamin adanya sinergitas dan koordinasi yang optimal *stakeholder* internal Perangkat Daerah sesuai amanat Keputusan

Walikota Yogyakarta Nomor 400 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP Laporan Keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

- b. Terjadinya mutasi dan pergantian personil mengakibatkan kualitas SDM yang menangani penatausahaan dan pelaporan barang maupun keuangan masih belum memadai. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas SDM personil yang terlibat secara aktif langsung dalam proses penatausahaan maupun pelaporan barang dan keuangan dengan narasumber dari instansi maupun akademisi yang kompeten; dan
- c. Belum adanya status kejelasan asset terhadap pekerjaan yang didanai dari anggaran Pemda DIY maupun pusat. Strategi penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan melaksanakan koordinasi dengan Pemda DIY maupun instansi pusat berkaitan dengan kejelasan asset, apakah akan dipinjampakaikan atau dihibahkan.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2019

Tabel 2.331 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Yogyakarta

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
		Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN WAJIB																
Pendidikan																
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A	91,46%	171.599.837.544,10	90,36%	22.127.816.100,55	89,76%	26.488.911.288,00	93,25%	25.580.874.339,00	103,89%	96,57%	93,25%	70.066.738.666,33	101,96%	40,83%	Dinas Pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional	8 medali		12 medali		7 medali		8 medali		114,29%		8 medali		100,00%		
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP akreditasi A	75,00%	146.731.162.461,76	77,19%	20.479.893.086,01	74,50%	23.359.364.077,50	76,27%	15.846.298.447,91	102,38%	67,84%	76,27%	56.135.051.864,77	101,69%	38,26%	Dinas Pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional	6 medali		9 medali		4 medali		11 medali		275,00%		11 medali		183,33%		
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	91,90%	36.426.621.273,78	98,51%	4.410.969.570,00	90,20%	5.561.830.398,18	100,00%	7.396.883.973,00	110,86%	132,99%	100,00%	15.922.698.565,92	108,81%	43,71%	Dinas Pendidikan
	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	90,80%		95,11%		90,30%		97,30%		107,75%		97,30%		107,16%		
	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	90,30%		99,42%		90,00%		97,44%		108,27%		97,44%		107,91%		
	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	45 lbg		66 lbg		30 lbg		80 lbg		266,67%		80 lbg		177,78%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah LKP terakreditasi	14 lbg		14 lbg		11 lbg		29 lbg		263,64%		29 lbg		207,14%		
Program Pengembangan Pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	94,04%	620.335.386.411,93	94,61%	83.738.191.794,00	93,97%	95.969.892.329,98	93,21%	75.906.682.155,00	99,19%	79,09%	93,21%	244.779.358.629,00	99,12%	39,46%	Dinas Pendidikan
	Jumlah sekolah inklusi	84 Sekolah		65 Sekolah		69 Sekolah		70 sekolah		101,45%		70 sekolah		83,33%		
Kesehatan																
Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	81,00	298.442.939.413,91	79,10	40.759.931.388,94	79,00	43.711.039.890,18	80,25	46.015.473.436,46	101,58%	105,27%	80,25	125.160.568.572,40	99,07%	41,94%	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	77,00	177.127.804.161,17	75,92	20.854.492.951,15	71,00	29.585.106.398,10	76,27	31.887.556.506,05	107,42%	107,78%	76,27	72.650.038.365,20	99,05%	41,02%	Dinas Kesehatan
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100,00%	212.791.496.841,66	100,00%	28.243.207.353,00	100,00%	36.737.165.788,53	100,00%	39.330.923.558,00	100,00%	107,06%	100,00%	86.502.134.127,00	100,00%	40,65%	Dinas Kesehatan
	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100,00%		96,00%		100,00%		100,56%		100,56%		100,56%				
	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi	-		95,00%		-		-		-		-				
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	-		100,00%		-		-		-		-				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan	-		100,00%		-		-		-		-		-		
	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	87,18%		-		79,49%		84,21%		105,94%		84,21%		96,59%		
	Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji	100,00%		109,00%		100,00%		186,31%		186,31%		186,31%		186,31%		
Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	90,00%	73.878.459.712,18	96,00%	10.582.076.613,69	84,00%	12.166.156.018,80	98,23%	8.857.785.155,52	116,94%	72,81%	98,23%	28.267.441.389,70	109,14%	38,26%	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	90,00%		95,00%		80,00%		99,89%		124,86%		99,89%		110,99%		
	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	96,00%		65,00%		75,00%		76,27%		101,69%		76,27%		79,45%		
	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi	96,00%		91,00%		90,00%		93,81%		104,24%		93,81%		97,72%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase tenaga penyehat tradisional yang terdaftar	80,00%		70,30%		70,00%		84,62%		120,88%		84,62%		105,77%		
	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98,00%		96,20%		97,00%		96,55%		99,54%		96,55%		98,52%		
	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	95,00%		95,40%		95,00%		95,89%		100,94%		95,89%		100,94%		
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100,00%	31.609.173.715,33	97,02%	4.033.110.328,00	100,00%	4.258.655.865,35	97,76%	4.812.621.748,00	97,76%	113,01%	97,76%	13.625.119.604,00	97,76%	43,10%	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100,00%		100,00%		100,00%		99,91%		99,91%		99,91%		99,91%		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100,00%		100,00%		100,00%		98,74%		98,74%		98,74%		98,74%		
	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%		82,42%		100,00%		84,33%		84,33%		84,33%		84,33%		
	Persentase anak pada usia	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar															
	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100,00%		89,99%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Jumlah wilayah yang melaksanakan KTR	464		410		404		466		115,35%		466		100,43%		
	Cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)	77,80%		48,89%		57,80%		57,78%		99,96%		57,78%		74,26%		
	Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96,50%		91,50%		96,00%		96,12%		100,13%		96,12%		99,61%		
	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	90,00%		91,10%		89,50%		91,33%		102,05%		91,33%		101,48%		
	Presentase institusi yang melaksanakan UKK	100,00%		100%		100,00%		100%		100,00%		100%		100,00%		
Program Pencegahan dan	Persentase penderita TB mendapatkan	100,00%	16.509.005.067,18	100,00%	2.041.950.438,00	100,00%	3.522.011.736,10	100,00%	1.872.690.600,00	100,00%	53,17%	100,00%	5.398.298.049,00	100,00%	32,70%	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengendalian Penyakit	pelayanan TB sesuai standar															
	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;	60,00%	945.475.605.158,29	17,41%	139.249.440.786,60	40,00%	133.264.490.000,00	24,96%	118.984.797.945,26	62,41%	89,28%	24,96%	388.729.199.649,16	41,61%	41,11%	Rumah Sakit Jogja
	Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	82,00%		81,25%		79,00%		82,23%		104,09%		82,23%		100,28%		
	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit	26		18		20		22		110,00%		22		84,62%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terintegrasi (Integrated Health System)															
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	92,00%	421.094.857.248,10	84,00%	59.083.856.576,64	86,00%	45.404.120.805,55	86,20%	75.645.228.887,35	100,23%	166,60%	86,20%	199.478.272.828,68	93,70%	47,37%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	70,00%		33,63%		40,00%		44,35%		110,89%		44,35%		63,36%		
Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	84,80%	266.469.833.405,47	73,50%	37.217.940.335,18	84,57%	37.972.252.301,10	84,54%	37.586.877.114,15	99,96%	98,99%	84,54%	111.139.321.356,58	99,69%	41,71%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	87,97%		87,63%		87,55%		87,58%		100,03%		87,58%		99,55%		
Program pembangunan gedung pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	91,00%	207.994.952.372,75	87,00%	21.956.140.507,26	88,00%	23.345.542.250,00	87,84%	42.516.891.940,31	99,82%	182,12%	87,84%	100.117.127.096,91	96,53%	48,13%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	17,00%	126.196.634.458,70	15,47%	17.397.343.235,21	14,00%	17.343.011.929,80	27,72%	18.589.673.808,52	198,00%	107,19%	27,72%	53.717.964.756,94	163,06%	42,57%	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	76,11		64,58		71,61		72,26		100,91%		72,26		94,94%		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	43,22%	55.721.673.622,30	41,50%	7.170.733.369,76	42,25%	7.543.564.007,53	41,57%	11.233.232.153,48	98,39%	148,91%	41,57%	25.354.441.326,47	96,18%	45,50%	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	73,81		67,19		69,31		69,70		100,56%		69,70		94,43%		
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	88,48%	11.165.790.386,71	61,40%	1.832.575.425,00	72,00%	1.753.654.130,78	72,00%	1.840.347.264,00	100,00%	104,94%	72,00%	4.614.710.383,00	81,37%	41,33%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Pengendalian tata ruang	Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	75,45%	6.416.724.807,89	50,25%	991.602.400,00	56,50%	1.031.062.764,30	56,50%	1.068.023.150,00	100,00%	103,58%	56,50%	2.632.111.675,00	74,88%	41,02%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Ketahanan Pangan																
Program pembinaan ketahanan pangan	Kelurahan dengan kerawanan pangan	0	6.099.087.269,36	-	791.055.367,04	0	682.468.647,60	0	1.324.456.499,16	100,00%	194,07%	0	2.976.880.431,20	100,00%	48,81%	Dinas Pertanian dan Pangan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	98,00%	121.306.869.274,83	93,00%	17.200.102.347,72	94,20%	14.238.891.132,44	94,20%	31.892.614.181,59	100,00%	223,98%	94,20%	61.267.111.531,77	96,12%	50,51%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	87,62%		84,05%		84,06%		84,06%		100,00%		84,06%		95,94%		
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	96,00%	26.851.245.542,91	98,32%	3.813.408.902,64	95,00%	4.150.190.528,79	99,35%	5.396.407.153,00	104,58%	130,03%	99,35%	11.654.845.158,98	103,49%	43,41%	Satpol PP
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	93,00%	25.262.497.478,01	80,25%	2.835.782.933,00	85,00%	2.699.435.330,00	86,90%	3.425.682.520,57	102,24%	126,90%	86,90%	11.437.301.593,57	93,45%	45,27%	Satpol PP
Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	100,00%	3.170.553.631,51	73,09%	417.242.337,02	77,50%	490.259.643,08	81,03%	447.066.148,00	104,55%	91,19%	81,03%	1.280.891.687,58	81,03%	40,40%	Satpol PP
Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	88,24%	22.034.628.946,27	59,56%	3.124.945.204,53	70,59%	3.243.562.364,22	73,82%	3.680.526.627,00	104,58%	113,47%	73,82%	9.364.866.044,75	83,66%	42,50%	Satpol PP
	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran	100,00%	10.673.938.042,00	100,00%	1.212.990.000,00	97,00%	894.215.822,03	100,00%	2.795.094.703,85	103,09%	312,57%	100,00%	5.771.612.703,85	100,00%	54,07%	Dinas Kebakaran

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pencegahan Kebakaran	yang diproses tepat waktu															
	Persentase edukasi proteksi kebakaran	98,00%		99,53%		96,00%		100,00%		104,17%		100,00%		102,04%		
Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100,00%	10.160.881.960,87	100,00%	816.215.498,40	100,00%	880.060.840,00	100,00%	3.843.881.177,40	100,00%	436,77%	100,00%	6.054.720.175,80	100,00%	59,59%	Dinas Kebakaran
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kampung tangguh bencana	85,29%	26.295.136.742,62	57,06%	3.766.167.013,17	67,65%	2.508.295.706,50	67,65%	8.442.151.071,42	100,00%	336,57%	67,65%	14.667.677.228,27	79,31%	55,78%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	90,00%		83,45%		84,00%		100,00%		119,05%		100,00%		111,11%		
	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	90,00%		100,00%		84,00%		100,00%		119,05%		100,00%		111,11%		
Sosial																
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	85,00%	26.972.019.305,40	85,92%	3.611.569.783,48	82,00%	3.830.452.831,32	87,97%	4.671.430.784,68	107,28%	121,96%	87,97%	11.697.041.725,16	103,49%	43,37%	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	87,00%	10.772.709.416,07	88,73%	1.516.411.269,54	77,00%	1.580.519.550,00	89,58%	1.722.002.938,64	116,34%	108,95%	89,58%	4.545.431.388,90	102,97%	42,19%	Dinas Sosial
Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	90,00%	14.941.861.598,38	86,34%	2.320.467.728,47	88,00%	1.987.743.064,05	88,61%	2.307.100.905,12	100,69%	116,07%	88,61%	6.484.052.685,85	98,46%	43,40%	Dinas Sosial
Tenaga Kerja																
Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	70,00%	26.948.695.302,29	62,51%	3.919.793.109,00	64,15%	3.735.926.029,50	64,15%	4.141.296.089,00	100,00%	110,85%	64,15%	11.522.100.112,08	91,64%	42,76%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Prosentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37,97%	5.527.204.790,11	35,17%	624.152.675,00	35,76%	744.142.374,75	35,88%	979.146.160,00	100,33%	131,58%	35,88%	2.451.872.920,00	94,49%	44,36%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	1,00%	8.532.889.140,77	1,04%	1.496.942.358,20	1,00%	840.738.519,70	3,25%	1.056.425.420,00	325,03%	125,65%	3,25%	3.889.338.692,40	325,03%	45,58%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	85,00%		-		82,00%		83,48%		101,81%		83,48%		98,21%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	78,13%	9.843.055.830,21	57,45%	1.546.488.978,88	59,38%	1.293.420.161,90	100,00%	1.620.108.215,76	168,42%	125,26%	100,00%	4.338.809.731,48	128,00%	44,08%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	80,00%		45,10%		46,67%		80,39%		172,27%		80,39%		100,49%		
	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	84,00%		88,64%		78,00%		86,76%		111,23%		86,76%		103,28%		
Program Perlindungan Anak	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	100,00%	11.852.704.960,80	53,33%	1.734.805.208,60	66,00%	1.760.976.626,35	80,00%	1.991.937.290,56	121,21%	113,12%	80,00%	5.026.077.721,24	80,00%	42,40%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
	Persentase Puskesmas Ramah Anak	100,00%		72,22%		80,00%		100,00%		125,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	100,00%		35,14%		52,00%		61,26%		117,81%		61,26%		61,26%		
Pertanahan																
Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.	100,00%	263.370.042.367,58	91,80%	75.392.779.165,00	94,82%	17.524.585.845,45	96,11%	25.668.025.817,00	101,36%	146,47%	96,11%	125.648.323.472,00	96,11%	47,71%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persentase tertib administrasi pemenuhan	100,00%		93,60%		95,34%		95,53%		100,20%		95,53%		95,53%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kebutuhan pertanahan.															
Lingkungan Hidup																
Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	80,61%	11.768.105.695,68	58,42%	1.681.579.926,00	60,63%	1.655.495.722,00	67,63%	1.644.620.230,00	111,55%	99,34%	67,63%	4.923.702.820,20	83,90%	41,84%	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	15,28%		8,04%		10,08%		9,99%		99,11%		9,99%		65,38%		
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	100,00%	15.000.931.544,49	88,29%	1.861.287.603,62	88,20%	1.835.129.061,00	90,73%	2.578.997.299,00	102,87%	140,53%	90,73%	6.813.872.674,62	90,73%	45,42%	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase perusahaan yang telah mentaati dokumen lingkungan	41,77%		31,46%		31,36%		42,34%		135,01%		42,34%		101,37%		
	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang telah terakreditasi	33,33%		11,11%		20,00%		31,11%		155,55%		31,11%		93,33%		
	Persentase Kampung berwawasan lingkungan	100,00%		-		52,94%		52,94%		100,00%		52,94%		52,94%		
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	99,75%	6.948.982.870,23	99,24%	675.684.622,00	99,75%	424.272.079,20	99,54%	1.960.932.550,00	99,78%	462,19%	99,54%	3.998.095.807,56	99,78%	57,53%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	98,75%	4.057.862.614,30	85,16%	472.247.254,00	95,00%	431.492.307,10	86,04%	440.197.658,00	90,57%	102,02%	86,04%	1.784.393.394,72	87,13%	43,97%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100,00%	8.963.635.802,47	52,63%	1.730.249.614,00	70,00%	908.015.354,15	86,32%	1.079.354.096,00	123,31%	118,87%	86,32%	4.043.731.757,68	86,32%	45,11%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Danurejan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,00	14.675.798.331,69	81,75	1.770.093.216,04	79,00	2.145.926.901,28	81,78	2.661.622.514,91	103,52%	124,03%	81,78	6.357.947.365,99	99,73%	43,32%	Kecamatan Danurejan
	Tingkat swadaya masyarakat	20,00%		29,42%		17,00%		27,61%		162,44%				27,61%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,00	10.059.282.902,06	82,10	1.298.212.684,00	82,50	1.324.277.344,80	82,54	1.901.091.359,37	100,05%	143,56%	82,54	4.554.187.408,09	98,26%	45,27%	Kecamatan Gedongtengen
	Tingkat swadaya masyarakat	28,00%		24,00%		25,00%		25,00%		100,00%				25,00%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(Kecamatan Gedongtengen)																
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan (Kecamatan Gondokusuman)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,00	24.590.747.307,96	80,65	3.315.805.925,66	80,50	3.540.061.915,48	81,03	4.459.551.963,63	100,66%	125,97%	81,03	10.713.163.174,37	98,82%	43,57%	Kecamatan Gondokusuman
	Tingkat swadaya masyarakat	15,00%		11,00%		12,00%		20,42%		170,17%		20,42%		136,13%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan (Kecamatan Gondomanan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,00	10.352.180.629,87	87,51	1.337.322.955,00	87,40	1.384.022.317,64	88,18	1.920.540.552,00	100,89%	138,77%	88,18	4.646.026.675,00	100,20%	44,88%	Kecamatan Gondomanan
	Tingkat swadaya masyarakat	15,00%		30,25%		12,00%		25,02%		208,51%		25,02%		166,81%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jetis)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	87,50	15.928.289.617,43	86,01	1.935.981.077,00	86,00	2.260.270.058,50	86,25	3.062.267.378,15	100,29%	135,48%	86,25	7.061.389.185,15	98,57%	44,33%	Kecamatan Jetis
	Tingkat swadaya masyarakat	28,00%		25,17%		25,00%		30,00%		120,00%		30,00%		107,14%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90,50	17.665.245.055,50	87,12	2.313.471.033,27	89,00	2.508.998.343,66	90,07	3.266.003.745,36	101,20%	130,17%	90,07	7.763.901.112,50	99,52%	43,95%	Kecamatan Kotagede

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Kotagede)	Tingkat swadaya masyarakat	30,00%		30,39%		30,00%		31,25%		104,17%		31,25%		104,17%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Kraton)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	77,69	14.659.083.504,77	80,01	1.874.745.017,34	76,19	2.249.774.722,61	80,37	2.718.271.073,59	105,49%	120,82%	80,37	6.244.591.519,90	103,45%	42,60%	Kecamatan Kraton
	Tingkat swadaya masyarakat	15,00%		25,00%		12,00%		26,77%		223,10%		26,77%		178,48%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Mantrijeron)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,87	17.923.830.552,19	83,50	2.391.895.232,22	83,97	2.622.452.640,75	83,70	3.071.711.946,41	99,68%	117,13%	83,70	7.673.878.842,63	98,62%	42,81%	Kecamatan Mantrijeron
	Tingkat swadaya masyarakat	43,57%		26,60%		42,07%		26,90%		63,94%		26,90%		61,74%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Mergangsan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85,00	16.058.132.130,07	81,10	2.080.802.194,00	82,00	2.447.011.786,28	82,59	2.969.516.675,30	100,72%	121,35%	82,59	6.878.849.076,56	97,16%	42,84%	Kecamatan Mergangsan
	Tingkat swadaya masyarakat	47,00%		43,50%		44,00%		32,23%		73,25%		32,23%		68,57%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Ngampilan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85,00	10.246.158.404,13	81,25	1.248.592.159,00	83,20	1.374.455.554,04	82,34	2.051.026.036,55	98,97%	149,22%	82,34	4.668.559.924,60	96,87%	45,56%	Kecamatan Ngampilan
	Tingkat swadaya masyarakat	28,65%		24,31%		28,63%		20,08%		70,14%		20,08%		70,09%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Pakualaman)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	81,69	8.639.895.639,16	81,33	1.120.176.704,00	81,39	1.205.757.423,25	81,43	1.704.735.559,00	100,05%	141,38%	81,43	3.873.939.728,00	99,68%	44,84%	Kecamatan Pakualaman
	Tingkat swadaya masyarakat	15,00%		11,00%		12,00%		12,46%		103,83%		12,46%		83,07%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Tegalrejo)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	81,50	22.593.088.342,42	80,30	2.971.048.317,17	80,30	3.188.106.871,70	80,30	4.175.320.906,52	100,00%	130,97%	80,30	9.951.208.105,58	98,53%	44,05%	Kecamatan Tegalrejo
	Tingkat swadaya masyarakat	31,87%		22,37%		31,78%		26,52%		83,45%		26,52%		83,21%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,00	26.301.093.276,80	80,27	4.251.417.076,67	80,50	1.666.287.469,75	81,59	6.389.565.294,84	101,35%	383,46%	81,59	14.551.048.443,51	99,50%	55,32%	Kecamatan Umbulharjo

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Umbulharjo)	Tingkat swadaya masyarakat	25,00%		25,00%		25,00%		17,21%		68,84%		17,21%		68,84%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Wirobrajan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,07	18.333.213.324,33	82,82	2.436.492.854,00	82,83	2.591.470.340,66	82,84	3.202.546.685,31	100,01%	123,58%	82,84	7.977.349.757,15	99,72%	43,51%	Kecamatan Wirobrajan
	Tingkat swadaya masyarakat	25,00%		29,93%		25,00%		24,27%		97,08%		24,27%		97,08%		
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Program Pengendalian Penduduk	Crude Birth Ratio	11-10 CBR	12.307.300.517,54	8,64 CBR	1.809.678.750,00	11-10 CBR	1.590.697.804,00	8,12	2.298.634.078,00	118,83%	144,50%	8,12	5.590.082.428,00	118,83%	45,42%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,00%	20.645.446.270,20	68,19%	3.652.054.065,00	73,77%	2.220.781.094,50	77,91%	3.653.255.588,00	105,61%	164,50%	77,91%	9.757.983.866,00	105,28%	47,26%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,10%		15,13%		11,28%		9,38%		116,83%		9,38%		84,51%		
	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	33,96%		25,93%		29,70%		27,27%		91,83%		27,27%		80,32%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perhubungan																
Program Pengelolaan Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	25 km/jam	29.310.825.594,80	25,37 km/jam	3.664.181.792,36	22 km/jam	4.509.417.753,16	26,83 km/jam	3.691.058.462,61	121,95%	81,85%	26,83 km/jam	11.645.140.114,97	107,32%	39,73%	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Perparkiran	Persentase juru parkir yang tertib	97,00%	48.696.000.223,06	-	5.989.533.749,00	97,00%	7.570.567.980,00	97,07%	6.515.111.892,00	100,07%	86,06%	97,07%	19.453.466.254,00	100,07%	39,95%	Dinas Perhubungan
	Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	94,00%		-		80,00%		100,00%		125,00%		100,00%		106,38%		
Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah pelanggaran	470	14.065.678.386,83	-	1.797.200.282,80	500	2.158.572.100,86	402	2.258.163.714,96	119,60%	104,61%	402	5.837.541.471,96	85,53%	41,50%	Dinas Perhubungan
	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan	91,50%		-		90,00%		90,69%		100,77%		90,69%		99,11%		
Komunikasi dan Informatika																
Program Peningkatan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	97,00%	9.520.322.352,65	93,76%	1.450.495.930,00	95,50%	1.203.394.345,75	95,49%	1.501.649.938,00	99,99%	124,78%	95,49%	4.215.154.868,00	98,44%	44,28%	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	71,80%	96.319.109.535,60	32,00%	14.834.792.311,00	40,93%	12.903.232.890,19	43,22%	13.814.368.142,00	105,60%	107,06%	43,22%	41.172.363.469,00	60,20%	42,75%	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	86,62%		63,69%		69,43%		77,07%		111,00%		77,07%		88,97%		
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100,00%	11.671.441.171,37	100%	1.704.588.925,00	100,00%	1.387.823.241,15	100,00%	2.343.143.178,00	100,00%	168,84%	100,00%	5.512.865.373,00	100,00%	47,23%	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Nilai Aset Koperasi	627.620.532,157	6.222.008.726,30	-	783.077.015,00	554.492.544,013	775.512.132,00	556.857,323,144	1.134.249.700,00	100,43%	146,26%	556.857,323,144	2.843.047.280,00	88,73%	45,69%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	Nilai Omset Koperasi	405.042,817,597		-		394.985,048,481		424.856,579,781		107,56%		424.856,579,781		104,89%		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Mikro	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)	7.792.464,708	18.830.482.381,88	-	2.373.210.440,00	6.731.424,000	2.349.432.060,000	7.368.768,000	4.418.319.303,000	109,47%	188,06%	7.368.768,000	9.094.500.682,90	94,56%	48,30%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Penanaman Modal																
Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	55,00%	6.605.968.233,25	34,17%	331.714.752,08	40,00%	347.699.432,95	66,00%	216.827.334,40	165,00%	62,36%	66,00%	3.036.990.340,48	120,00%	45,97%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan	100,00%	1.282.184.095,33	-	73.614.038,10	98,00%	58.168.220,00	79,00%	30.664.200,00	80,61%	52,72%	79,00%	593.787.823,10	79,00%	46,31%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase regulasi pelayanan perizinan	100,00%	2.621.402.138,99	100%	316.079.264,30	100,00%	288.441.200,00	100,00%	164.328.736,16	100,00%	56,97%	100,00%	1.082.268.059,46	100,00%	41,29%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Program Pengembangan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	90,00%	4.959.528.462,58	82,81%	607.857.352,40	82,50%	579.174.150,00	87,10%	764.804.870,64	105,58%	132,05%	87,10%	2.238.504.123,04	96,78%	45,14%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kepemudaan dan Olahraga																
Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	100,00%	12.552.596.312,30	69,00%	1.458.412.260,00	76,92%	1.980.529.661,96	76,92%	2.325.074.502,00	100,00%	117,40%	76,92%	5.306.174.330,00	76,92%	42,27%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Olahraga	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	98,00%	23.617.164.689,71	88,00%	3.326.377.762,00	89,83%	3.929.746.128,61	89,83%	3.602.429.944,00	100,00%	91,67%	89,83%	9.378.193.634,00	91,66%	39,71%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Statistik																
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100,00%	1.340.289.157,91	100,00%	14040300000,00%	100,00%	19513483900,00%	100,00%	24594320000,00%	100,00%	126,04%	100,00%	582.992.350,00	100,00%	43,50%	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Persandian																
Program Peningkatan	Persentase pengamanaan informasi	100,00%	7.904.032.268,47	101,70%	1.233.486.243,00	100,00%	1.037.873.938,00	100,00%	1.595.224.975,00	100,00%	153,70%	100,00%	3.632.031.954,00	100,00%	45,95%	Dinas Komunikasi,

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelayanan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	76,00%		26,90%		38,00%		38,46%		101,21%		38,46%		50,61%		Informasi dan Persandian
Kebudayaan																
Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	42,80%	7.523.066.154,31	-	1.379.362.950,64	21,40%	778.146.542,40	21,43%	1.265.403.720,00	100,13%	162,62%	21,43%	3.556.316.235,32	50,07%	47,27%	Dinas Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasikan	18 dokumen	3.240.067.129,75	6 dokumen	343.757.220,00	9 dokumen	430.347.348,80	9 dokumen	1.018.578.620,00	100,00%	236,69%	9 dokumen	1.665.919.040,00	50,00%	51,42%	Dinas Kebudayaan
	Persentase pelestarian bahasa dan sastra	30,00%		-		24,00%		27,20%		113,33%		27,20%		90,67%		
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	Persentase pelestarian seni tradisi berbasis kelurahan	62,00%	6.362.397.196,20	-	924.032.668,20	55,50%	1.087.140.280,00	55,56%	952.432.400,00	100,10%	87,61%	55,56%	2.486.767.468,20	89,61%	39,09%	Dinas Kebudayaan
Perpustakaan																
Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	1.050	10.308.242.324,92	100	1.297.330.619,06	150	1.321.038.580,87	150	2.411.905.207,08	100,00%	182,58%	150	4.937.561.588,10	14,29%	47,90%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	77,50		76,86		76,00		77,16		101,53%		77,16		99,56%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	6.600	2.970.418.712,19	2.323	348.571.149,00	1.000	254.655.140,00	1.736	1.535.119.229,00	173,60%	602,82%	1.736	1.978.552.878,00	26,30%	66,61%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan																
Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	152 perangkat daerah /unit kerja	2.429.046.512,06	60 perangkat daerah /unit kerja	287.257.601,61	78 perangkat daerah /unit kerja	302.013.393,61	78 perangkat daerah /unit kerja	324.368.300,00	100,00%	107,40%	78 perangkat daerah /unit kerja	1.051.495.306,61	51,32%	43,29%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3.600	2.866.777.627,89	364	376.795.301,02	520	371.400.167,61	521	501.468.877,00	100,19%	135,02%	521	1.284.194.538,06	14,47%	44,80%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN																
Pariwisata																
Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	56,25%	62.922.151.441,45	-	8.076.424.851,06	46,87%	8.576.934.390,20	46,88%	10.742.930.647,38	100,01%	125,25%	46,88%	27.596.782.304,44	83,33%	43,86%	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Taman Pintar	Jumah Pengunjung Taman Pintar	900.000	107.034.258.283,00	997.904	16.808.308.761,00	840.000	14.935.000.000,00	922.575	15.634.162.114,00	109,83%	104,68%	922.575	45.252.000.576,00	102,51%	42,28%	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Kualitas Atraksi	Indeks kualitas atraksi pariwisata	87,95	18.061.107.908,32	78,47	2.312.363.475,00	83,18	2.254.143.711,20	85,51	2.604.736.200,00	102,80%	115,55%	85,51	7.905.629.675,00	97,22%	43,77%	Dinas Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	39,71%		-		32,54%		34,69%		106,60%		34,69%		87,36%		
Pertanian																
Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Persentase penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	100,00%	13.071.655.958,43	100,00%	1.639.767.421,39	100,00%	1.392.220.666,50	100,00%	2.726.669.054,72	100,00%	195,85%	100,00%	6.400.000.497,91	100,00%	48,96%	Dinas Pertanian dan Pangan
	Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya	99,00%		-		96,00%		95,74%		99,73%		95,74%		96,71%		
Program Pembinaan Pertanian	Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya	92,00%	9.676.166.975,10	-	1.612.486.026,97	89,00%	1.394.486.594,40	86,28%	2.154.194.322,72	96,94%	154,48%	86,28%	4.413.578.658,49	93,78%	45,61%	Dinas Pertanian dan Pangan
	Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama	9 kelompok		-		6 kelompok		6 Kelompok		100,00%		6 Kelompok		66,67%		
Perdagangan																
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar	26,70%	66.806.226.839,55	13,30%	9.479.626.935,20	16,67%	10.055.912.710,47	16,70%	9.390.033.894,00	100,20%	93,38%	16,70%	27.269.787.805,32	62,55%	40,82%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Pendapatan retribusi pasar	14.257.615.859	44.955.158.760,73	14.096.442.567	5.836.002.383,00	14.089.577.359	6.247.858.370,39	14.788.015.434	6.145.749.115,00	104,96%	98,37%	14.788.015.434	18.822.675.698,54	103,72%	41,87%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Pusat Bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.302.261.160	45.301.382.891,09	5.406.580.780	6.513.588.941,00	5.251.179.950	6.020.446.306,03	5.666.389.889	5.548.829.910,95	107,91%	92,17%	5.666.389.889	18.942.208.542,66	106,87%	41,81%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Persentase peningkatan omset UKM yang dibina	9,00%	24.380.684.768,61	4,10%	3.712.826.518,00	6,00%	3.209.571.165,30	6,83%	3.376.140.603,00	113,83%	105,19%	6,83%	10.422.303.125,80	75,89%	42,75%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam sebulan	100,00%		-		100,00%		100,00%		100,00%						
Perindustrian																
Program Pembinaan Perindustrian	Prosentase peningkatan omset IKM yang dibina	9,00%	25.848.886.042,62	43,80%	3.471.091.800,00	8,00%	3.809.364.308,50	9,71%	2.843.997.503,00	121,38%	74,66%	9,71%	10.244.466.859,00	107,89%	39,63%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Logam	Pendapatan UPT Logam	956.100.200	29.360.449.828,44	360.451.566	2.587.203.570,70	493.422.500	3.150.254.794,00	502.276.911	2.251.755.258,40	101,79%	71,48%	502.276.911	12.413.865.652,80	52,53%	42,28%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi																
Program Pengembangan dan Penempatan	Persentase penempatan transmigran	100,00%	2.509.398.536,36	100,00%	218.306.278,00	100,00%	505.911.280,00	100,00%	212.926.781,00	100,00%	42,09%	100,00%	816.390.562,68	100,00%	32,53%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tenaga Kerja dan Transmigrasi																Menengah dan Tenaga Kerja
URUSAN PENUNJANG																
Perencanaan																
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	92,00%	3.781.991.351,13	94,25%	542.508.410,45	91,40%	535.182.541,00	98,71%	753.730.960,00	108,00%	140,84%	98,71%	1.691.569.370,45	107,29%	44,73%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	92,00%	8.007.538.140,95	99,77%	799.434.990,00	91,40%	930.540.419,00	99,49%	608.234.160,00	108,85%	65,36%	99,49%	3.305.867.665,00	108,14%	41,28%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	92,00%	6.579.885.421,32	99,36%	627.342.850,00	91,40%	761.445.731,00	98,81%	490.036.366,00	108,11%	64,36%	98,81%	2.715.025.851,00	107,40%	41,26%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	92,00%	15.541.560.479,72	99,07%	1.617.655.665,91	91,40%	2.310.891.314,00	98,46%	707.543.820,00	107,72%	30,62%	98,46%	5.636.153.185,91	107,02%	36,27%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan																
Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Prosentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100,00%	1.536.283.339,71	100,00%	156.909.424,51	100,00%	186.490.976,00	100,00%	133.848.192,16	100,00%	71,77%	100,00%	634.249.765,35	100,00%	41,28%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengendalian Belanja Daerah dan	Prosentase penyerapan belanja daerah	92,90%	1.587.213.053,82	89,16%	74.834.912,38	92,60%	111.156.999,51	89,79%	53.757.400,00	96,97%	48,36%	89,79%	700.789.869,22	96,66%	44,15%	Badan Pengelola

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengelolaan Dana Transfer																Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	86,35%	5.632.034.870,13	95,45%	642.883.658,00	79,54%	567.324.841,51	93,18%	778.581.516,00	117,15%	137,24%	93,18%	2.594.405.144,84	107,91%	46,07%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Prosentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	100,00%	83.833.130.428,11	100,00%	13.412.402.224,66	94,00%	5.110.152.903,97	96,95%	12.725.536.759,87	103,14%	249,02%	96,95%	42.776.651.959,93	96,95%	51,03%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase Ketercapaian Target Pajak Daerah	100,00%	7.763.183.635,39	-	701.290.641,69	100,00%	844.104.178,60	102,70%	705.567.918,16	102,70%	83,59%	102,70%	3.325.433.001,85	102,70%	42,84%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	Prosentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	16,00%	18.878.013.738,66	18,92%	2.221.931.155,00	14,50%	2.383.700.113,65	23,71%	2.137.641.000,00	163,48%	89,68%	23,71%	7.941.026.907,00	148,16%	42,06%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																
Program Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	71,00%	5.536.911.134,08	52,05%	399.170.750,00	55,00%	1.386.836.084,00	41,45%	835.233.099,00	75,36%	60,23%	41,45%	1.692.708.299,00	58,38%	30,57%	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	95,00%	4.614.858.092,58	99,31%	386.399.800,00	93,00%	489.182.663,75	99,77%	606.619.300,00	107,28%	124,01%	99,77%	2.083.980.200,00	105,02%	45,16%	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
Program Peningkatan	Persentase Kelulusan ASN yang	80,00%	28.184.744.463,04	92,58%	2.903.946.628,00	77,00%	3.882.541.070,50	99,34%	6.724.091.317,00	129,01%	173,19%	99,34%	13.273.645.251,00	124,17%	47,10%	Badan Kepegawaian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kompetensi Aparatur Sipil Negara	mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															dan Pendidikan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan																
Program Penelitian dan Pengembangan	Indeks Kemanafaatan Penelitian dan Pengembangan	90	11.059.735.691,53	82	1.709.035.281,87	84	1.844.778.410,00	84	1.773.226.475,00	100,00%	96,12%	84	4.429.998.786,87	93,33%	40,06%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																
Program Pengembangan Kawasan kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	85,00%	7.993.535.570,03	79,40%	1.259.798.492,00	80,00%	1.344.325.385,31	80,15%	1.259.798.492,00	100,19%	93,71%	80,15%	3.179.079.307,72	94,30%	39,77%	Kantor Kesbang
Inspektorat																
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91,00%	2.936.470.421,53	100,00%	218.459.350,00	91,00%	255.268.556,50	100,00%	383.251.066,00	109,89%	150,14%	100,00%	1.384.984.116,00	109,89%	47,16%	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91,00%	1.358.528.992,26	97,00%	47.784.790,00	91,00%	64.873.520,00	90,00%	49.955.648,00	98,90%	77,00%	90,00%	634.385.638,00	98,90%	46,70%	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik	91,00%	787.773.357,18	100,00%	38.779.550,00	91,00%	53.682.570,00	100,00%	38.862.225,00	109,89%	72,39%	100,00%	355.511.675,00	109,89%	45,13%	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	91,00%	1.140.512.754,64	100,00%	36.438.610,00	91,00%	66.580.436,00	80,00%	42.564.100,00	87,91%	63,93%	80,00%	519.843.715,00	87,91%	45,58%	Inspektorat
Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91,00%	476.105.714,50	88,00%	91.354.554,74	85,00%	95.593.437,89	91,90%	87.523.996,16	108,12%	91,56%	91,90%	178.878.550,90	100,99%	37,57%	Inspektorat
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)		Level 3 (dengan catatan)		level 3 (untuk 3 elemen penilaian)		Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)		100,00%				Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)		
Sekretariat Daerah																
Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85,00%	18.560.816.280,70	73,34%	2.884.780.067,60	79,00%	3.455.776.526,23	90,00%	1.529.716.732,16	113,92%	44,27%	90,00%	6.324.039.690,00	105,88%	34,07%	Bagian Tata Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Berkembang (Nilai 201-350)		Cepat Berkembang (Nilai 372)		106,29%		Cepat Berkembang (Nilai 372)		100,00%		
Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target PAD	100,00%	5.871.597.787,61	-	568.441.764,23	100,00%	702.095.166,80	105,46%	768.566.400,00	105,46%	109,47%	105,46%	2.564.056.539,91	105,46%	43,67%	Bagian Perekonomian
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	95,50%	4.133.451.288,30	98,42%	441.171.047,83	94,00%	655.231.879,68	98,77%	510.280.905,16	105,07%	77,88%	98,77%	1.616.303.563,06	103,42%	39,10%	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	82,50%	6.202.290.784,17	84,57%	623.474.566,81	75,00%	75462454055,00%	83,52%	656.288.156,52	111,36%	86,97%	83,52%	2.616.699.577,65	101,24%	42,19%	Bagian Layanan Pengadaan
	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	82,50%		87,92%		75,00%		88,75%		118,33%		88,75%		107,58%		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100,00%	14.758.774.743,27	139,21%	102504912096,00%	80,00%	190290768776,00%	80,39%	135229509600,00%	100,49%	71,06%	80,39%	6.006.458.232,20	80,39%	40,70%	Bagian Organisasi
Program Penataan Peraturan	Persentase harmonisasi	100,00%	13.866.070.132,93	100,00%	200639686351,00%	100,00%	151567796361,53%	128,63%	163830188016,00%	128,63%	108,09%	128,63%	6.120.083.513,67	128,63%	44,14%	Bagian Hukum

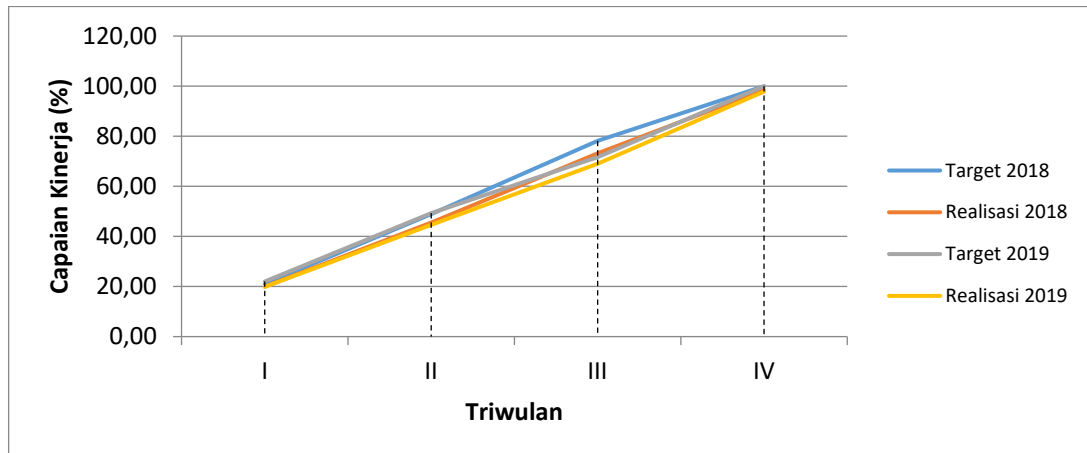
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Rp)	2018		2019						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
				Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	produk hukum daerah															
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	80,50	22.790.318.804,83	81,16	3317953774,73	79,00	2753615912,21	81,24	5.037.595.090,36	102,84%	182,94%	81,24	10.948.826.159,51	100,92%	48,04%	Bagian Umum
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	81,00	12.084.057.891,81	80,71	1590935941,84	80,45	1780286874,77	80,59	1.890.040.072,08	100,17%	106,16%	80,59	5.070.012.041,32	99,49%	41,96%	Bagian Protokol
Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100,00%	75.627.558.274,73	100,00%	6.548.638.045,00	100,00%	25.138.150.130,00	100,00%	8.392.083.334,71	100,00%	33,38%	100,00%	14.940.721.379,71	100,00%	19,76%	DPRD
Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100,00%	73.994.809.542,33	100,00%	10.930.670.735,98	100,00%	19.903.689.100,00	100,00%	9.268.345.825,00	100,00%	46,57%	100,00%	20.199.016.560,98	100,00%	27,30%	DPRD

Sumber: Evaluasi Hasil RPJMD, 2020

2.2.3. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019

- **Kinerja Fisik**

Pencapaian kinerja fisik kegiatan diperoleh melalui pelaporan masing-masing perangkat daerah dalam SIM Pelaporan Dalbang (www.simpelaporan.jogjakota.go.id). Berikut ini disajikan grafik realisasi fisik tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.16 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Tahun 2018-2019

Tabel 2.332 Target dan Realisasi Fisik Tahun 2018-2019

		TW I	TW II	TW III	TW IV
2018	Target	20,99	48,88	78,16	100,00
	Realisasi	19,97	45,49	73,18	98,42
2019	Target	22,00	49,26	71,67	100,00
	Realisasi	19,85	44,61	69,01	97,83

Sumber: Hasil Olahan, 2020

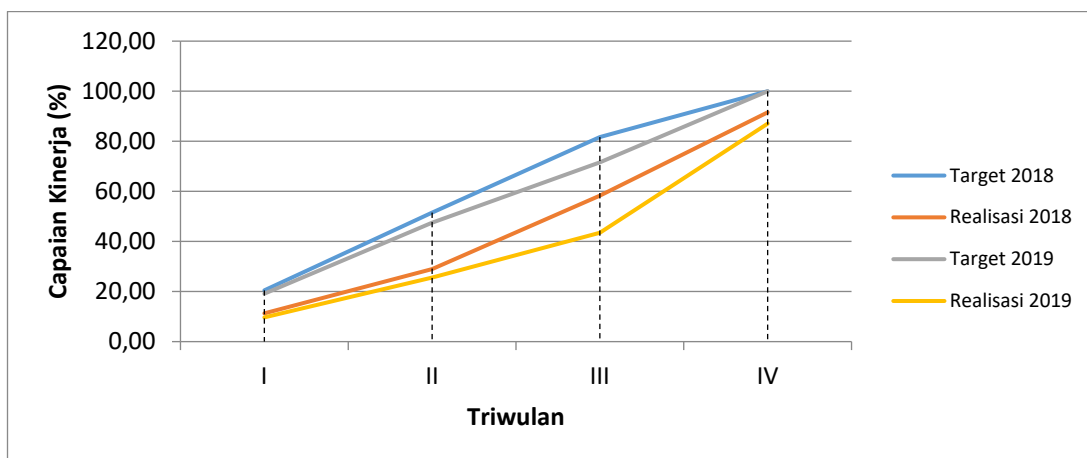
Dari gambar dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi fisik pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,59%. Sedangkan apabila dilihat dari pencapaian target 2019, maka diperoleh nilai deviasi sebesar 2,17%. Adapun penyebab terjadinya deviasi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pekerjaan yang putus kontrak (Pembangunan SAH Jl. Soepomo);
2. Terdapat pekerjaan yang gagal lelang yakni Pengembangan Aquarium Taman Pintar; Pembangunan Pagar Embung Giwangan; Pembangunan SR dan Saluran Pembawa Kelurahan Klitren serta Pengadaan dan Pemasangan ATCS;
3. Pengadaan tanah Kantor Kel. Gunungketur tidak mencapai kesepakatan; dan
4. Pembahasan raperda tidak memenuhi target dikarenakan mundurnya penetapan alat kelengkapan DPRD.

Untuk capaian fisik 51 OPD/Unit kerja yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, seluruh OPD/Unit kerja (100%) yang memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi.

- **Kinerja Keuangan**

Pencapaian kinerja keuangan kegiatan diperoleh melalui pelaporan masing-masing perangkat daerah dalam SIM Pelaporan Dalbang (www.simpelaporan.jogjakota.go.id) yang sudah terintegrasi dengan SIPKD. Berikut ini disajikan grafik realisasi keuangan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.17 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2018-2019

Tabel 2.333 Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2018-2019

		TW I	TW II	TW III	TW IV
2018	Target	20,48	51,51	81,71	100,00
	Realisasi	11,29	28,94	58,33	91,56
2019	Target	19,15	47,49	71,59	100,00
	Realisasi	9,68	25,57	43,45	87,05

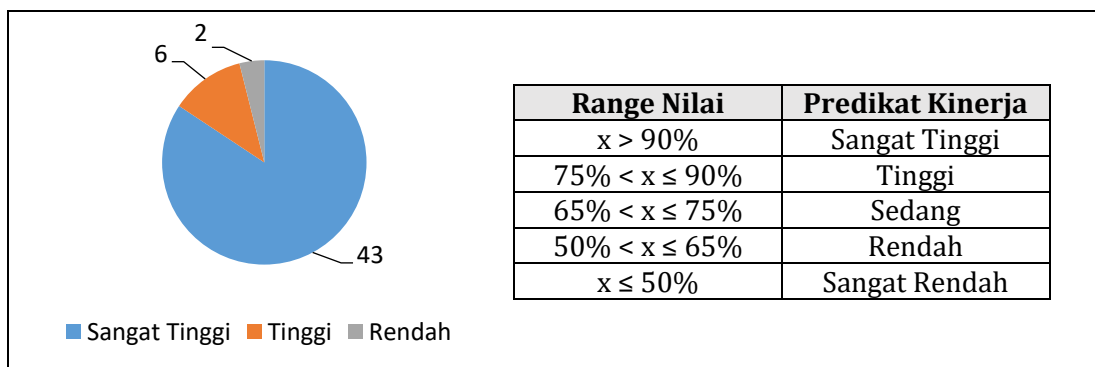
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Dari gambar dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi keuangan pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,51%. Sedangkan apabila dilihat dari pencapaian target 2019, maka diperoleh nilai deviasi sebesar 12,95%. Adapun penyebab terjadinya deviasi adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan honor menyesuaikan penerima honor (misal karena penerima cuti haji, diklat, dan lain-lain sehingga tidak memperoleh hak untuk menerima honor);
2. Target pendapatan RSUD tidak tercapai sehingga berimbas pada realisasi jasa pelayanan;
3. Realisasi keuangan kegiatan bersifat rutin dan antisipasi menyesuaikan kebutuhan;
4. Belanja narasumber menyesuaikan kehadiran;
5. Pembahasan Raperda tidak memenuhi target;
6. Pembayaran premi kesehatan bergantung klaim BPJS;
7. Perubahan regulasi terkait mekanisme pencairan JPD;

8. Pengadaan PPPK untuk tahun 2019 tidak terlaksana serta siklus rekrutmen lompat tahun anggaran;
9. Penataan ASN tidak terlaksana disebabkan adanya SE Mendagri terkait penyederhanaan birokrasi;
10. Efisiensi lelang pengadaan barang/jasa dan pengadaan tanah;
11. Terdapat pekerjaan putus kontrak dan yang mengalami gagal lelang;
12. Terdapat pengadaan tanah yang tidak mencapai kesepakatan; dan
13. Keterlambatan pencairan Dana BOS Kinerja dari Pemerintah Pusat sehingga tidak dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi.

Untuk capaian keuangan 51 OPD/Unit kerja yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat 43 OPD/Unit kerja (84,31%) yang memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi, 6 OPD/Unit kerja (11,76%) yang memiliki predikat kinerja Tinggi, dan 2 OPD/Unit kerja (3,92%) yang memiliki predikat kinerja Rendah. Capaian tersebut disajikan dalam diagram berikut.



Sumber: SIM Pelaporan Kota Yogyakarta, 2020

Gambar 2.18 Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2019

Tabel 2.334 Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KECAMATAN UMBULHARJO	100,00%	92,92%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<p>1. Penambahan kegiatan yang dilimpahkan dari OPD lain, pada anggaran perubahan tidak dikawal oleh OPD dimaksud.</p> <p>2. Masih sedikit kurang cermat dalam penghitungan prognosis, yang berpengaruh pada anggaran perubahan</p> <p>3. Sisa pagu yang tidak bisa dipakai dalam kegiatan pemeliharaan fisik lingkungan karena keterbatasan waktu.</p>	<p>1. Target Capaian Kinerja Tahun 2019</p> <p>2. Hasil evaluasi kegiatan triwulan III</p> <p>3. Percepatan pelaporan kinerja keuangan tahun 2019</p>
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	96,45%	91,97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	pelaksanaan kegiatan ada yang tidak sesuai dengan plotting dan tatakala	semua PPKom, PPTK sudah melaksanakan tugas semaksimal mungkin, untuk menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan target yang ditentukan
3	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	99,94%	94,90%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	: Adanya laporan yang sudah ditindaklanjuti namun tidak dilaporkan secara sistem aplikasi, kemampuan operator lapangan yang perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk lebih banyak mengunduh aplikasi JSS belum tinggi. Masalah migrasi dan integrasi sistem	Programmer yang bisa diandalkan untuk membuat aplikasi Jogja Smart Service dan penyediaan infrastruktur yang memadai yang bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, saran keluhan ke Pemkot. Kesadaran OPD dalam menanggapi laporan masyarakat melalui UPIK dan JSS, kerjasama yang baik

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						dari UPIK ke JSS yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan	dengan pihak ke tiga sehingga pengadaan berjalan dengan baik
4	KECAMATAN JETIS	99,66%	95,01%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1.Kegiatan PTSL Seksi trantib tidak terserap maksimal 2. Hasil penawaran lelang kegiatan pemeliharaan jalan Seksi Ekonomi Pembangunan terlalu rendah	- dilakukan koordinasi rutin setiap seminggu sekali (setiap senin) -evaluasi dilakukan melalui jalur formal dan informal
5	KECAMATAN WIROBRAJAN	100,00%	95,47%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kemampuan personil dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan	1. adanya pendekatan infromal kepada masy 2. Adanya monev berkala setiap seminggu sekali
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100,00%	94,54%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Kurangnya pelatihan untuk pelayanan prima bagi KIE medis dan petugas KB di wilayah 2. Kurang optimalnya peran kader di tingkat RT dan RW.	Tingkat pendidikan PUS sudah tinggi, akses informasi dan pelayanan KB mudah dan terjangkau.
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,00%	94,18%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kurangnya kesadaran OPD di lingkungan Pemkot dalam komitmennya menyusun dan mengumpulkan GAB GBS dalam mewujudkan PPRG	Adanya sinergitas, anggaran, dan komitmen pimpinan dalam mencapai target.
8	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	97,54%	84,88%	Sangat Tinggi	Tinggi	Beberapa kegiatan di BKPP dengan anggaran yang besar bergantung pada kebijakan pusat (rekrutmen CPNS)	Proses pelayanan administrasi yang semula bergantung pada berkas, menjadi lebih cepat dengan adanya layanan aplikasi (sim LHKPN, sim PKP, Sim SLKS satyalancana, dsb)

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	BAGIAN HUKUM	100,00%	93,63%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kinerja Bagian Hukum masih perlu dilakukan sinkronisasi dengan instansi vertikal dan mitra kerja terkait.	SDM dan adanya koordinasi internal Bagian Hukum dan dengan instansi/pihak terkait.
10	KECAMATAN MANTRIJERON	100,00%	96,36%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. pada pelaksanaan PTSL dikarenakan kurangnya koordinasi dari pusat Kegiatan sudah terlaksana, namun rencana dan realisasi anggaran masih ada perbedaan	1. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan kampung 2. koordinasi rutin di kecamatan rakortas setiap senin 3. evaluasi dilakukan secara formal maupun informal 4. Semua pejabat ikut mendukung pelaksanaan dan kegiatan
11	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100,00%	90,25%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Beberapa pekerjaan pelaksanaannya dijadikan satu sehingga serapan keuangan tidak maksimal	Koordinasi yang intensif dan pemantauan pelaksanaan kegiatan
12	KECAMATAN GEDONGTENGEN	100,00%	97,31%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	- Pelimpahan Kewenangan, harus dengan petunjuk teknis yang lebih jelas - SPJ yang berkaitan dengan masyarakat, harus dengan ekstra dalam penagihan spj (dioyak-oyak)	Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan
13	KECAMATAN GANDOMANAN	100,00%	97,44%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	tidak ada	1. melakukan koordinasi secara intensif terkait PTSL 2. Adanya perencanaan dan kerjasama tim yang baik. 3. Adanya evaluasi dan instruksi yang

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
							bersifat teknis pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan (camat). 4. Proaktif dari kelurahan dan Kecamatan
14	BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	97,22%	97,27%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya beberapa sub kegiatan yang sifatnya insidental dan dipengaruhi oleh kinerja OPD terkait	Semangat kerja para personil dan komitmen yang kuat dari Kepala SKPD sehingga melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi pencapaian target PAD sesuai APBD secara terukur dan konsisten
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	99,89%	91,55%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Fasilitas layanan online yang disediakan Dukcapil dan JSS belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat.	Adanya regulasi baru di bidang kependudukan yang menyederhanakan persyaratan dan prosedur pelayanan dengan bentuk percepatan paket layanan dan tandatangan elektronik.
16	BAGIAN PROTOKOL	98,88%	92,99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Menyesuaikan dengan agenda kegiatan dan jumlah tamu Sekda, asisten dan staf ahli yang datang.	Komitmen yang tinggi dalam pencapaian tujuan organisasi.
17	BAGIAN UMUM	99,99%	91,54%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Adanya pengunduran jadwal kegiatan eksplorasi hubungan bilateral ke luar negeri 2. Sisa hasil lelang dan pengadaan langsung untuk kegiatan fisik yang sifatnya cadangan atau jaga-jaga	Dukungan dari semua pihak untuk memberikan pelayanan yang baik dan percepatan pelaksanaan belanja sesuai dengan tatakala perbulan.
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	98,15%	93,62%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Ketergantungan kinerja oleh kinerja OPD lain	Program dilaksanakan sesuai tatakala

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	BAGIAN ORGANISASI	100,00%	95,39%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Frekuensi pemakaian kendaraan dinas operasional untuk kegiatan diluar kantor kurang optimal.	Pola koordinasi yang intensif dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala yang ada , sarana dan prasarana yang memadai.
20	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	97,83%	52,48%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	- Masyarakat cenderung tidak sabar dalam mengikuti proses administrasi pertanahan. - Fluktuasi harga tanah di pasaran yang berubah sangat cepat.	Semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.
21	INSPEKTORAT	100,00%	92,72%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
22	SEKRETARIAT DPRD	93,99%	57,17%	Sangat Tinggi	Rendah	1. Dinamika pembahasan di DPRD yang sangat tinggi 2. Transisi Periodisasi Dewan Tahun 2019-2024 3. Penyebab rendahnya serapan anggaran dikarenakan mundurnya penetapan alat kelengkapan DPRD yang berdampak pada mundurnya jadwal pembahasan raperda dan agenda kegiatan DPRD	1. Koordinasi Internal Sekretariat DPRD. 2. Komunikasi Intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD.
23	KECAMATAN DANUREJAN	99,94%	93,21%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	perencanaan keuangan kurang detail sehingga terjadi kesalahan dalam penyesuaian harga	Koordinasi rutin setiap senin dan dipimpin langsung oleh camat
24	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	98,94%	95,03%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	(1) BBM kendaraan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena adanya kenaikan harga pertamax	(1) Komitmen dari PPTK untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target, (2) koordinasi yang baik

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						sehingga pembelian BBM beralih ke pertalite, (2) Beberapa kendaraan tidak dioperasikan sehingga anggaran suku cadang tidak terealisasi	
25	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	100,00%	93,74%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	adanya perubahan tatakala pelaksanaan kegiatan	tersedia sarana dan prasarana yang memadai
26	DINAS PENDIDIKAN	99,16%	90,99%	Sangat Tinggi	Tinggi	Adanya Perubahan regulasi dari Pusat	Perencanaan yang dilaksanakan sesuai tatakala dan SDM yang memadai
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	99,26%	88,26%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Pengelolaan keuangan masih belum optimal sehingga ada beberapa kegiatan mundur dari tatakala dan tidak terlaksana	1. Perencanaan yang baik (tata kala kegiatan dan target)
28	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100,00%	95,45%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	adanya regulasi yang mengatur bahwa dinkop hanya sebagai pembina sedangkan pengawas dari provinsi sehingga untuk menindaklanjuti membutuhkan rekomendasi dari pengawas provinsi	1. inovasi IPK Online 2. sistem pendaftaran pelatihan melalui JSS 3. adanya evaluasi yang dilakukan setiap tahun 4. Koordinasi antar stakeholder (APINDO, Serikat Pekerja, Disnaker Kota dan Provinsi) berjalan dengan baik 5. pengelolaan koperasi mulai profesional (karyawan yang berkompeten)
29	KECAMATAN TEGALREJO	99,29%	94,87%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya perubahan /pergeseran kegiatan dana kelurahan	Ketepatan pelaksana kegiatan sesuai Tatakala

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
30	KANTOR KESATUAN BANGSA	100,00%	94,19%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. belum efektifnya jaringan dengan kelompok masyarakat yang memiliki potensi pengendalian konflik. 2. Kewenangan pengurusan pengeluaran SKT di tingkat pusat.	ketersediaan dana dan jaringan dukungan mitra kantor kesbang
31	KECAMATAN KRATON	99,90%	92,38%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Keterbatasan SDM sehingga terjadi penumpukan beban kerja dan berakibat kurang maksimalnya target yang tercapai	danya peran aktif dari lembaga masyarakat dan pendekatan kepada masyarakat, adanya monev berkala 3x dalam seminggu
32	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	97,92%	92,02%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Keterbatasan SDM, adanya kendala dalam pengumpulan rekening Pokmas PTSL	Pelaksanaan sesuai tatakala. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	97,64%	96,60%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan faktor eksternal (administrasi, kegiatan insidental, dinamisasi keadaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan)	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran dua kali setiap bulan sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi. - Intensifikasi koordinasi baik di internal Pemkot Yogyakarta maupun dengan institusi penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, TNI, dsb) serta kerjasama dengan kemitraan

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
34	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	99,78%	84,98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<p>1. Adanya ketidakpastian pembayaran klaim pasien BPJS yang berdampak pada ketidakstabilan cash flow rumah sakit serta tidak tercapainya target pendapatan rumah sakit, sehingga berpengaruh terhadap capaian belanja yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD.</p> <p>2. Pembayaran dari BPJS untuk klaim bulan September 2019 baru diterima oleh RSUD pada minggu ke-4 bulan Desember tahun 2019 sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi Silpa BLUD tahun 2019. Sedangkan klaim bulan Oktober dan November 2019 masih dalam proses pengajuan, sehingga menjadi piutang yang baru akan dibayarkan pada tahun berikutnya.</p>	<p>1. Kebutuhan obat-obatan dan BHP medis yang sifatnya rutin dan harus selalu tersedia terutama untuk pemenuhan stok obat dan BHP medis pada awal tahun untuk menunjang pelayanan</p> <p>2. Adanya kebutuhan pemeliharaan alat-alat medis yang harus segera dilakukan agar dapat dioperasikan secara optimal demi kelancaran pelayanan rumah sakit</p> <p>3. Pengadaan sarana, prasarana dan alat-alat kesehatan yang bersumber dari DAK tahun 2019 yang pembayarannya masih ditalangi oleh APBD baru akan ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke rekening kas daerah apabila seluruh pekerjaan yang ada dalam kontrak telah selesai dilaksanakan, karena pembayaran menggunakan mekanisme sekaligus bukan bertahap</p>
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	99,67%	95,11%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<p>1. Waktu proses untuk pengadaan/lelang bertambah lama sehingga berpengaruh pada tatakala</p> <p>2. Proses dalam mendapatkan NPWP Kota mudah, namun terkendala pada</p>	<p>1. Adanya tatakala sebagai acuan kegiatan</p> <p>2. Adanya monev secara rutin baik internal maupun eksternal dari opd terkait</p>

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						aktifasi faktur, sehingga proses pencairan menjadi mundur.	
36	KECAMATAN MERGANGSAN	100,00%	93,88%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kurang cermat dalam perencanaan	SDM yang berkualitas dan Sarpras yang lengkap
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00%	95,67%	Sangat Tinggi	Tinggi	Realisasi keuangan tidak bisa dimaksimalkan karena sudah terlanjur di TU kan	Adanya monitoring dan evaluasi bulanan terkait pencapaian target fisik dan keuangan bulanan kegiatan
38	DINAS KEBAKARAN	96,53%	91,59%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	kelengkapan dokumen pengadaan sebagai syarat pencairan dana	koordinasi internal secara intensif dan arahan kebijakan dari kepala dinas dalam rangka percepatan realisasi anggaran
39	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	98,17%	88,77%	Sangat Tinggi	Tinggi	Penyedia jasa lambat dalam penyelesaian administrasi	Perencanaan teknis tepat sasaran sehingga pakerjaan konstruksi selesai tepat pada waktunya
40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	99,67%	92,38%	Sangat Tinggi	Tinggi	1. Kepatuhan pedagang dalam ketepatan waktu membayar retribusi 2. aperaturan daerah yang membatasi UPT Logam untuk penjualan produk secara langsung ke pasar. 3. pemanfaatan aplikasi JSS untuk informasi harga sembako belum optimal	1.. Pemanfaatan e-retribusi untuk optimalisasi pendapatan 2. Pelaksanaan program pelatihan yang sudah sesuai kebutuhan dan berjenjang 3. Pendataan IKM yang update 4. pemanfaatan pemasaran online oleh IKM meningkat
41	KECAMATAN PAKUALAMAN	100,00%	97,76%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	- Kurangnya kepastian dalam kebijakan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga membuat beberapa kegiatan ditunda	- Ketersediaan Pagu anggaran yang memenuhi usulan warga dan kebutuhan dari kegiatan OPD - Ketersediaan sarana dan fasilitas dalam

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>atau dibatalkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Dana yang cukup besar belum ditambahi dengan Penambahan SDM, semisal untuk Dana Kelurahan harus ada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan pejabat struktural, tetapi SDM ASN yang ada di Kecamatan dan Kelurahan minim. - Kebijakan Rekon Persediaan dan Asset di pertengahan Tahun membuat arus kas di Bendahara sempat terhenti yang berimbas Pelaksanaan Kegiatan di PPTK juga terhenti. 	<p>bekerja, dengan disetujuinya pembaharuan perangkat komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semangat dari ASN dan Non ASN dalam memenuhi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan.
42	DINAS PERHUBUNGAN	99,38%	90,90%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Beberapa kegiatan yang gagal lelang 2. ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tatakala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Rekonsiliasi Keuangan Setiap Bulan 2. Evaluasi Kegiatan Setiap Bulan
43	DINAS KEBUDAYAAN	99,52%	93,74%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<p>(i) Pemahaman pengurus RKB belum secara utuh memahami berkaitan dengan 5 (lima) aspek Kelurahan Budaya (Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014); (ii) Kurang adanya keterkaitan dari pengurus RKB untuk menjadi Kelurahan Budaya; (iii) Masih kurang kuatnya eksistensi Rintisan Kelurahan Budaya sehingga</p>	<p>(i) Sinergi yang baik dengan lembaga terkait seperti instansi vertikal Kebudayaan, LSM dan Komunitas; (ii) Adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat termasuk swasta; (iii) kooperatifnya pihak ketiga.</p>

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						akses terhadap anggaran pembangunan kewilayahan menjadi terbatas;(iv) Belum adanya database yang baik dan lengkap; (v) Rendahnya penggunaan Bahasa, Sastra, dan Tembang Daerah (misal : macapat, geguritan, sanepa, paribahasan, dll) dalam kehidupan sehari - hari oleh masyarakat; (vi) Pemahaman masyarakat berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya yang perlu ditingkatkan.	
44	DINAS KESEHATAN	99,48%	88,10%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Belum adanya regulasi untuk fasilitasi kesehatan swasta dalam mendukung pencapaian indikator bidang kesehatan khususnya SPM.	Program 8000 HPK, Adanya kebijakan kemenkes dalam menggunakan dana BOK untuk menambah jumlah SDM (Promkes, Gizi, Akuntansi,PL)
45	DINAS SOSIAL	99,99%	93,37%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Perubahan regulasi yang mendadak di tengah tahun anggaran berjalan	Jejaring kerja yang kooperatif
46	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,00%	98,28%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Keluasan area layanan adalah hambatan utama dalam pengembangan layanan dan pelaksanaan tugas rutin 2. Keterbatasan anggaran, karena rasionalisasi dan skala prioritas pelaksanaan program pemerintah	1. Adanya fasilitas gedung, ruangan beserta berbagai sarana pendukung bagi pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. 2. Kebijakan Pimpinan yang progresif dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>3. Jumlah SDM yang belum memenuhi analisa beban kerja dan analisa jabatan</p> <p>4. Banyaknya ragam tema buku yang terbit tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.</p> <p>5. Sistem otomasi perpustakaan yang masih terus dikembangkan</p> <p>6. Arsip yang terolah masih kurang lengkap</p> <p>7. Terjadi kebakaran pada 17 Desember 2018 di Komplek Gedung instalasi kearsipan di Ngampilan.</p>	<p>3. Inovasi layanan yang selalu dikembangkan</p> <p>4. Sumber Daya Manusia dengan ilmu yang sesuai di bidangnya.</p>
47	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	100,00%	95,74%	Sangat Tinggi	Tinggi		tingkat partisipasi masyarakat & kerjasama dgn wilayah terjalin dgn baik, OKP bertambah aktif dlm kegiatan serta lebih byk variasi bidang yg ditekuni
48	KECAMATAN KOTAGEDE	100,00%	98,41%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	keterbatasan kemampuan beberapa stakeholder masyarakat dalam Teknologi informasi namun dapat di komunikasikan.	<p>1. adanya evaluasi berkala</p> <p>2. pengurus barang memfasilitasi untuk servis dan pajak kendaraan bermotor</p> <p>3. adanya evaluasi dan instruksi yang bersifat teknis pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan (camat).</p>

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
49	KECAMATAN NGAMPILAN	98,63%	94,79%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	kurang cermatnya perencanaan pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan (capaian keuangan rendah disebabkan karena makan minum untuk pembinaan kampung, penggandaan monografi, pelatihan linmas dari target 4 kali terealisasi 3 kali, honor PTSL yang tidak terserap)	Adanya evaluasi kegiatan setiap seminggu 1x setiap Rabu pagi dan pembahasan khusus mengenai capaian fisik dan keuangan tiap bulan
50	DINAS PARIWISATA	99,80%	86,97%	Sangat Tinggi	Tinggi	1. struktur organisasi yang tidak sesuai dengan Dinas Pariwisata DIY dan Kementerian Pariwisata sehingga mengalami kesulitan dalam hal koordinasi dan tindak lanjut teknis.2. Pemahaman masyarakat atas posisi sebagai Kota Wisata dan nilai-nilai sapta pesona belum optimal. 3. Manajemen rekayasa lalu lintas yang kurang suportif terhadap kepentingan pariwisata Kota Yogyakarta. 4. Perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas saat peak season seharusnya sudah dibuat lebih awal dan dipedomani oleh semua stakeholder.5. Adanya tahun politik di Indonesia dan	1. Pengembangan dan peningkatan fasilitas daya tarik wisata utama di Kota Yogyakarta, khususnya di Kawasan Malioboro.2. Trend (gaya hidup) milenial yang menempatkan leisure dan travelling sebagai kebutuhan yang penting dalam hidup mereka.3. Kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan BP2KY dan stakeholder pariwisata lainnya, dalam mempromosikan dan memasarkan daya tarik pariwisata Kota Yogyakarta melalui kegiatan promosi yang inovatif, yaitu direct promotion (table top, famtrip, travelmart,dll) yang dipadu dengan melibatkan sektor swasta pariwisata dengan skema B2B (Business to

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						terjadinya beberapa bencana alam pada tahun 2019.6. Harga tiket transportasi (penerbangan) yang mahal selama tahun 2019. 7. Sentimen Indeks kemahalan pariwisata ke Yogyakarta yang ditengarai disebabkan oleh harga tiket masuk ke daya tarik wisata Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang tinggi.	business).4. Semakin banyaknya event atraksi pariwisata berbasis budaya yang beragam, baik yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta maupun instansi pemerintah dan komunitas masyarakat lainnya (kampung wisata, seniman, dsb).5. Banyaknya pilihan akomodasi yang tersedia seperti homestay, guesthouse, atau penginapan sejenis yang banyak diminati oleh wisatawan domestik/nusantara.6. Direct promotion berupa Fam trip dan Travel Mart cukup efektif dalam mempertahankan serta meningkatkan lama tinggal.
51	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	99,97%	92,95%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Data RUP yang selalu berubah sehingga target dan realisasi pelaksanaan tender juga berubah, Adanya perubahan metode pengadaan pada beberapa OPD, misalnya dari tender menjadi pengadaan langsung atau menjadi e-purchasing.	Melakukan pendampingan SiRUP terhadap OPD agar memudahkan dalam melakukan entri data RUP pada SiRUP.
	Rata-Rata	99,26%	91,84%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Sumber: SIM Pelaporan Kota Yogyakarta, 2020

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi.

Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan** dengan sasaran daerah pertama Kemiskinan Masyarakat Menurun memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penggunaan olahan data dalam SIM Pemberdayaan untuk menjamin ketepatan sasaran;
- b. Banyaknya penduduk tidak bekerja di usia produktif yakni 18-59 tahun; dan
- c. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi warga miskin terkendala status kepemilikan lahan.

Selain permasalahan yang telah disebutkan di atas, adanya pandemik Covid-19 yang mulai tersebar di Kota Yogyakarta pada akhir Triwulan I tahun 2020 menimbulkan permasalahan baru yang berkenaan dengan sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun. *Slowing-down* aktivitas ekonomi menyebabkan semakin susah orang keluar dari kemiskinan, bahkan munculnya orang miskin baru karena terdampak.

Sasaran kedua, Keberdayaan Masyarakat Meningkat, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan berbasis kampung masih bersifat parsial, belum ada sinkronisasi antar Perangkat Daerah maupun *stakeholder*;
- b. Usulan program dan kegiatan pada Musrenbang Kelurahan belum berfokus pada pengembangan kampung berdasarkan potensi yang ada; dan
- c. Pemahaman dan kepedulian terhadap permasalahan sosial terutama terhadap kekerasan anak dan perempuan belum menjadi kebutuhan bersama.

Sasaran ketiga, Kualitas Pendidikan Meningkat, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pada sekolah swasta belum tercukupi;

- b. Kesadaran akreditasi yang kurang di tingkat SPS dan kurangnya kualitas pengajar SPS; dan
- c. Banyak LKP yang bersifat *business oriented* karena tidak adanya efek positif dari status akreditasi terhadap penambahan jumlah peserta didik, banyak LKP yang tidak berkeinginan untuk mengikuti akreditasi.

Sasaran keempat, Harapan Hidup Masyarakat Meningkat, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Waktu dan tempat pelayanan masih kurang optimal dikarenakan lokasi puskesmas yang sempit dan pasien yang banyak;
- c. Masyarakat kurang peduli dalam memahami aturan dan prosedur pelayanan JKN;
- d. Ketersediaan rawat inap intensif di RS belum memadai;
- e. Data kependudukan tidak valid sehingga menyulitkan proses integrasi Jamkesda;
- f. Adanya rasa malu untuk memeriksakan kehamilan pada trimester pertama untuk kehamilan yang tidak diinginkan;
- g. Ada obat yang tidak tersedia di e-katalog;
- h. Ibu tidak merasakan tanda-tanda persalinan sehingga lahir di rumah;
- i. Masih ada bayi yang tidak IMD karena BBLR atau SC; dan
- j. Jumlah lansia di Kota Yogyakarta yang cukup banyak memerlukan lebih banyak tenaga dan anggaran dalam pemeriksaan kesehatan lansia.

Adapun sasaran kelima, Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Dinamika kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta berubah seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya.
2. Prioritas **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi** dengan sasaran daerah pertama Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat memiliki permasalahan sebagai berikut:
- a. Budaya konsumsi pangan masyarakat yang menempatkan padi/nasi sebagai satu-satunya sumber pangan utama; dan
 - b. Kegemaran masyarakat mengkonsumsi makanan cepat saji dan tidak beragam dari segi jenis dan jumlahnya.

Sasaran kedua, Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi UMKM;
- b. Semakin menurunnya minat masyarakat untuk membentuk koperasi, serta sulitnya mengaktifkan kembali koperasi pasif, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya dukungan dari pengurus atau anggota koperasi untuk membenahi organisasinya; dan
- c. Masih rendahnya pemahaman akan hak dan kewajiban bagi pekerja dan perusahaan.

Sasaran ketiga, Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan sampah (daur ulang), dan terbatasnya fasilitas standarisasi pasar sehat;
- b. Masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi tepat waktu; dan
- c. Kondisi ekonomi global pada tahun 2019 yang lesu, menyebabkan *event* promosi untuk produk ekspor berkurang dibandingkan tahun 2018.

Selain permasalahan per sasaran yang telah disebutkan di atas, adanya pandemik Covid-19 yang mulai tersebar di Kota Yogyakarta pada akhir Triwulan I tahun 2020 menimbulkan permasalahan baru yang berkenaan dengan sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkat. *Physical distancing* sebagai upaya untuk penanggulangan Covid-19 memaksa masyarakat untuk mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas di luar rumah termasuk kunjungan wisata. Penurunan kunjungan wisata ini secara langsung berpengaruh terhadap sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata, serta sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder pariwisata. Penurunan juga terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Jasa Perusahaan. Meskipun demikian, pandemik ini justru menyebabkan sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat.

Adapun sasaran keempat, Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda; dan
- b. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi

para pelaku usaha atau masyarakat Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota Yogyakarta yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Yogyakarta menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

3. Prioritas **Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota, dan Lingkungan Hidup** dengan sasaran daerah pertama Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat memiliki permasalahan sebagai berikut:
 - a. Masih minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Dalam hal terjadi kekosongan pengaturan, belum ada ketentuan yang mengatur tentang diskresi; dan
 - c. Masih belum tersedia mekanisme insentif dan disinsentif.

Sasaran kedua, Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, terutama jam-jam masyarakat beraktivitas serta setiap akhir minggu dan libur, dimana kendaraan dari luar kota memadati Kota Yogyakarta;
- b. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta;
- c. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan;
- d. Pengetahuan masyarakat mengenai Dokumen Lingkungan belum maksimal;
- e. Pengetahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah belum maksimal;
- f. Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan, ada yang belum mencantumkan dampak dari limbah B3 yang dihasilkan sehingga tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan pemenuhan izin PPLH;
- g. Upaya peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH. Sampai akhir tahun 2019, persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta baru tercapai sebesar 18,80% dari luas wilayah Kota Yogyakarta;

- h. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal; dan
- i. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih.

Adapun sasaran ketiga, Infrastruktur Wilayah Meningkatkan, permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Kekurangan personil dalam pelaksanaan penegakan Perda dan pengendalian operasional serta operasional penyelenggaraan perparkiran;
 - b. Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor;
 - c. Lambatnya pertumbuhan jalan di kota;
 - d. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan;
 - e. Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum;
 - f. Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan;
 - g. Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal;
 - h. Kurangnya ketersediaan tempat khusus parkir;
 - i. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal;
 - j. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih; dan
 - k. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai.
4. Prioritas **Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi** didukung oleh sasaran daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan memiliki permasalahan sebagai berikut:
- a. Belum adanya koordinasi yang optimal pihak-pihak yang terkait (terutama Bendahara, Pengurus Barang Pengguna, Pelaksana Akuntansi,

- dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) dalam proses pencatatan transaksi maupun peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkup SKPD;
- b. Terjadinya mutasi dan pergantian personil mengakibatkan kualitas SDM yang menangani penatausahaan dan pelaporan barang maupun keuangan masih belum memadai; dan
 - c. Belum adanya status kejelasan asset terhadap pekerjaan yang didanai dari anggaran Pemda DIY maupun pusat.

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berikut ini disajikan permasalahan Kota Yogyakarta mendasarkan urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah.

1. Pendidikan

1. Masih adanya Angka Putus Sekolah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah

Angka Putus Sekolah menunjukkan banyaknya siswa yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2019, Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI mencapai 0,01 persen, jenjang SMP/MTs mencapai 0,02 persen, sedangkan jenjang SMA/MA/SMK mencapai 0,036 persen. Adanya Angka Putus Sekolah ini dapat dipengaruhi adanya faktor pergaulan, keluarga, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat mengurangi Angka Putus Sekolah, guna mendukung program pemerintah Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Belum semua ruang kelas sekolah dasar maupun menengah dalam kondisi baik

Pada tahun 2019, terdapat 1.675 kelas dalam kondisi baik dari 1.729 jumlah keseluruhan ruang kelas untuk jenjang SD/MI, sehingga masih terdapat 54 kelas untuk jenjang SD/MI dalam kondisi tidak baik. Untuk jenjang SMP/MTs, dari 844 jumlah kelas keseluruhan, terdapat 835 dalam kondisi baik sehingga kondisi kelas yang tidak baik berjumlah 9 kelas. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK, dari 1.257 jumlah kelas keseluruhan, terdapat 1.236 kelas dalam kondisi baik sehingga kondisi kelas yang tidak baik berjumlah 21 kelas. Hal ini tentu menjadi perhatian Dinas Pendidikan untuk merencanakan penganggaran guna memenuhi kebutuhan rehab kelas agar dapat memenuhi kondisi yang baik untuk pembelajaran.

3. Belum semua guru sekolah dasar dan menengah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, pada tahun 2019 terdapat 7.133 guru yang sudah memiliki ijazah S1/D-IV dari total 7.276 guru, sehingga terdapat 143 guru yang belum memiliki ijazah S1/D-IV. Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kependidikan.

2. Kesehatan

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2015-2019 di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata -2,21 per 1.000 kelahiran hidup per tahun. Jumlah kematian bayi tahun 2019 mencapai 24 kasus dari 3.338 kelahiran hidup, sehingga AKB mencapai 7,19 per 1.000 kelahiran hidup. Melihat capaian target tersebut mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi. Penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan oleh kelainan kongenital dan berat badan lahir rendah/pre term yang sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil, yaitu sejak remaja atau calon pengantin. Untuk meningkatkan kesehatan sejak remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) membutuhkan dukungan banyak sektor.

2. Tingginya Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2015-2019 di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 35,62 per 1.000 kelahiran hidup per tahun. Jumlah kematian balita tahun 2019 mencapai 7 kasus dari 3.338 kelahiran hidup, sehingga AKABA mencapai 2,20 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini tentu perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama Dinas Kesehatan untuk mengupayakan program dan kegiatan guna mengatasi hal tersebut.

3. Masih tingginya Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal tahun 2015-2019 di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata -4,09 per 1.000 kelahiran hidup per tahun. Jumlah kematian neonatal tahun 2019 mencapai 13 kasus dari 3.338 kelahiran hidup, sehingga Angka Kematian Neonatal

mencapai 3,89 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun angka ini merupakan angka terendah selama tahun 2015-2019, dari jenis kasus penyebab kematian bayi dikarenakan penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, akut respiratori, ensefalitis dan kelainan kongenital (jantung bawaan) serta asfiksia yang semuanya dapat dicegah kematiannya masih perlu diperhatikan.

4. Masih tingginya Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015-2019 di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata -0,70 per 100.000 kelahiran hidup per tahun. Jumlah kematian ibu hamil tahun 2019 mencapai 4 kasus dari 3.338 kelahiran hidup, sehingga AKI mencapai 111,83 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI menunjukkan perlunya perhatian khusus terkait pencegahan penyebab kematian ibu hamil, seperti: (a) kehamilan yang tidak diinginkan sehingga tidak mengakses layanan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan; (b) ibu hamil mencari dokter di fasyankes tertentu sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan; (c) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tanda bahaya kehamilan dan persalinan; dan (d) pendampingan ibu hamil belum optimal. Pencegahan kematian ibu hamil diperlukan kerjasama yang sinergis dari berbagai sektor mengingat banyaknya penyebab kematian ibu hamil.

5. Tingginya tingkat kematian karena tuberkulosis

Dalam rentang waktu 2015-2019, kasus kematian karena tuberkulosis cenderung meningkat. Pada tahun 2015, jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 8 orang dari 410.886 orang jumlah penduduk, sehingga tingkat kematian mencapai 1,95 per 100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pasien TB yang meninggal meningkat drastis menjadi 56 orang dari 414.055 orang jumlah penduduk, sehingga tingkat kematian mencapai 13,52 per 100.000 penduduk. Penyebab kematian TB yang tinggi pada tahun 2019 dikarenakan penyakit penyerta (HIV dan diabetes melitus) ikut dimasukkan. Alasan pengembangan kasus ini karena TB sangat rentan menyerang anak-anak, penderita HIV, dan diabetes melitus. Angka kematian yang cukup tinggi ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota untuk mengatasi hal tersebut.

6. Tingginya penderita Penyakit Tidak Menular

Dalam rentang waktu 2015-2019, jumlah penderita Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi, terutama penyakit jantung dengan pertumbuhan rata-rata 169,78 persen per tahun, gagal ginjal dengan pertumbuhan rata-rata 16,86 persen per tahun, kanker dengan pertumbuhan rata-rata 16,42 persen per tahun, dan gangguan jiwa berat

dengan pertumbuhan rata-rata 10,14 persen per tahun. Untuk tahun 2019, jumlah penderita PTM di Kota Yogyakarta untuk hipertensi sebanyak 26.400 orang, diabetes sebanyak 11.046 orang, asma sebanyak 2.607 orang, gangguan jiwa berat sebanyak 1.190 orang, gagal ginjal sebanyak 981 orang, anemia sebanyak 872 orang, kanker sebanyak 558 orang, stroke sebanyak 350 orang, dan penyakit jantung sebanyak 245 orang. Jumlah PTM yang cukup tinggi tersebut menunjukkan perlunya pencegahan penambahan penderita PTM dari berbagai sektor terkait.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum semua jalan berkondisi mantap

Data jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2015 sepanjang 216,695 km atau sebesar 87,35 persen dari total panjang jalan 248,09 km. Namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 234,41 km atau sebesar 94,49 persen dari total keseluruhan. Untuk tahun 2017, panjang jalan keseluruhan dihitung ulang menjadi 233,21 km dan jalan yang dalam kondisi mantap sepanjang 190,254 km atau 81,58 persen. Tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi mantap mengalami peningkatan mejadi 191,087 km dari 233,21 km atau 81,94 persen. Tahun 2019 meningkat menjadi 200,85 km dari 233,21 km atau 86,12 persen sehingga masih terdapat 13,88 persen jalan yang belum dalam kondisi mantap dan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah.

2. Belum semua jalan memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 meter)

Tahun 2015, jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 meter) sepanjang 158,979 km dari 248,09 km atau 64,08 persen. Tahun 2016 masih bertahan di angka tersebut. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat penghitungan ulang panjang seluruh jalan kota yaitu sepanjang 233,21 km, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 meter) sepanjang 158,979 km atau 68,17 persen. Angka ini masih bertahan di tahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan trotoar dan drainase di Kota Yogyakarta hampir semuanya hanya ada di salah satu sisi jalan saja.

3. Penyediaan air minum masih belum optimal

Indikator persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Yogyakarta didapatkan dari persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk terlayani di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki kecenderungan yang menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -5,67 persen per tahun. Pada tahun 2015, cakupan pelayanan air minum sebesar 44,48 persen. Namun pada tahun 2019 angka tersebut menurun menjadi 34,52

persen atau sebanyak 142.938 orang dari jumlah penduduk 414.055 orang. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan pengembangan pelayanan air minum.

4. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota Yogyakarta, keberadaan RTH dapat memperbaiki iklim mikro kota dan estetika kota. Indikator luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan ini didapatkan dari pembagian luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dengan luas wilayah Kota Yogyakarta. Dari tahun 2015-2019, luasan RTH publik yang ada di Kota Yogyakarta cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tahun 2019 luasan RTH publik mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar 190,467 Ha (tahun 2018) meningkat menjadi 190,680 Ha (tahun 2019). Penurunan yang cukup mencolok terjadi pada tahun 2017 dengan penurunan lebih dari 50% RTH publik dari tahun 2016. Hal tersebut membuat pertumbuhan rata-ratanya menunjukkan angka yang negatif yaitu -17,20% per tahun. Penurunan yang mencolok pada luasan RTH publik di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dikarenakan perbedaan metode dalam pengukuran luasan RTH publik tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dapat mendekati kepada target luasan RTH sesuai standar.

5. Banyaknya pembangunan menggunakan lahan pertanian dibandingkan lahan non produktif

Pada tahun 2019, lahan pertanian di Kota Yogyakarta seluas 97,48 Hektar yang berarti mengalami penurunan sebanyak 2,97 Hektar jika dibandingkan dengan tahun 2018 (100,45 Hektar). Penurunan juga terjadi pada lahan non produktif, yaitu seluas 14,29 Hektar di tahun 2019 yang berarti turun sebanyak 0,24 Hektar jika dibandingkan dengan tahun 2018 (14,53 Hektar). Hal ini berarti bahwa banyaknya pembangunan yang menggunakan lahan pertanian dibandingkan lahan yang sudah non produktif.

4. Ketahanan Pangan

1. Masih terdapat komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang mengandung bahan berbahaya

Berdasarkan data capaian kinerja program tahun 2019 pada Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan, dari 1.000 total sampel pangan asal perikanan, terdapat 916 sampel pangan asal perikanan yang bebas bahan

berbahaya, dengan kata lain masih terdapat 84 sampel pangan asal perikanan yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu, dari 836 total sampel pangan asal hewan, terdapat 835 sampel pangan asal hewan yang bebas bahan berbahaya, dengan kata lain terdapat 1 sampel pangan asal hewan yang mengandung bahan berbahaya.

2. Masih terdapat komoditas pangan asal tumbuhan yang mengandung bahan berbahaya

Berdasarkan data capaian kinerja program tahun 2019 pada Program Pembinaan Pertanian, dari 532 total sampel komoditas pangan asal tumbuhan, terdapat 459 sampel komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya, dengan kata lain masih terdapat 73 sampel komoditas pangan asal tumbuhan yang mengandung bahan berbahaya.

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih terdapat Rumah dalam kondisi Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, yakni 89.771 unit pada tahun 2015 meningkat menjadi 121.388 unit pada tahun 2019.

Indikator persentase rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Yogyakarta. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Selanjutnya, menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni di Kota Yogyakarta. Kriteria yang dimaksudkan mengenai kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di Kota Yogyakarta, diantaranya adalah: (a) luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m² per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m² per orang (bobot nilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2); (c) bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan gedheg, kayu kualitas rendah (bobot nilai 2); serta (d) adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2). Berdasarkan dengan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlah antara 1-4 maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah kurang layak huni, sedangkan apabila bobot nilai berjumlah sama dengan atau lebih dari lima maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.335 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	3.009	2.784	2.640	1.798	2.984

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2020, dengan Hasil Olahan 2020

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun mengalami penurunan jumlah RTLH tahun 2015-2019, masih banyak rumah tidak layak huni yang ada di Kota Yogyakarta yang harus segera diintervensi oleh Pemerintah Kota.

6. Sosial

1. Belum semua PMKS memperoleh Bantuan Sosial

Perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi. Persentase terendah PMKS yang memperoleh bantuan sosial terjadi pada tahun 2015 sebesar 53,76 persen, sedangkan persentase tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebanyak 95,31 persen. Pada tahun 2019, PMKS penerima bantuan berubah menjadi 85,63 persen. Bentuk bantuan sosial yang paling besar diberikan antara lain BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

2. Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum tertangani

Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Jumlah PMKS di Kota Yogyakarta masih tergolong cukup banyak. Pada tahun 2019, jumlah PMKS yang tertangani 34.051 orang, sedangkan jumlah PMKS yang ada sebanyak 41.999 orang sehingga PMKS yang dapat tertangani sebesar 81,08 persen. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

3. Masih banyak penduduk miskin di Kota Yogyakarta

Kemiskinan perkotaan masih menjadi isu yang dihadapi oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta. Walaupun secara kuantitas jumlah

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun, namun masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh di Kota Yogyakarta. Isu kemiskinan di DIY juga menjadi perhatian dalam Pembangunan DIY 5 tahun mendatang (2017-2022) karena jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 sekitar 11,70 persen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,22 persen (September 2019). Dengan kata lain, Kota Yogyakarta menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan di DIY yang besar dibandingkan Kabupaten lain. Perhatian juga perlu diberikan terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi.

7. Tenaga Kerja

1. Belum semua perusahaan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawannya

Selama tahun 2015-2017, persentase keselamatan dan perlindungan yang diterapkan oleh perusahaan mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -2,86 persen per tahun. Penurunan tersebut terjadi seiring bertambahnya jumlah perusahaan dan jumlah perusahaan yang menerapkan K3. Pada tahun 2015, tercatat ada 43 unit perusahaan yang menerapkan K3 atau sekitar 3,06 persen dari total perusahaan sebanyak 1.405 unit. Sedangkan pada tahun 2019, dari total perusahaan sebanyak 1.692 unit, sebanyak 45 unit perusahaan sudah menerapkan K3 atau setara dengan 2,66 persen dari total perusahaan.

2. Jumlah pengangguran terbuka masih cukup tinggi

Selama tahun 2015-2019, TPT di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta adalah sebesar -25,71 persen per tahun. Pada tahun 2015, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 5,76 persen atau sejumlah 10.879 jiwa dan turun menjadi 1,69 persen atau sejumlah 3.104 jiwa pada tahun 2019. Apabila dilihat dari jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerja yang ada pada tahun 2019, besaran yang dimiliki memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Meskipun demikian, jika dilihat dari angka nominalnya, jumlah pengangguran masih tergolong tinggi (3.104 jiwa).

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih terdapat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Pada tahun 2019, kasus kekerasan perempuan mencapai 219 kasus.. Hal ini tentu menjadi catatan penting dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
2. Belum semua kelurahan berpredikat layak anak
Jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta ada 45 kelurahan. Dari jumlah tersebut baru sekitar 30 kelurahan yang memenuhi kategori kelurahan layak anak pada tahun 2019. Masih ada 15 kelurahan yang belum optimal dalam pemenuhan hak-hak anak di wilayahnya.

9. Pertanahan

1. Masih terdapat lahan yang belum memiliki sertifikat tanah
Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Tercatat seluas 605,30 hektar lahan bersertifikat di tahun 2015 kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 2.665,63 hektar lahan bersertifikat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 66,12 persen per tahun. Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah juga mengalami peningkatan yakni 18,62 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 82,02 persen pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat 17,98 persen lahan di Kota Yogyakarta yang belum memiliki sertifikat.
2. Masih terdapat kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan
Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan turun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 44,17 persen per tahun. Hal tersebut selaras dengan naiknya pertumbuhan rata-rata jumlah kasus yang terdaftar di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 32,02 persen per tahun. Akan tetapi, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata -0,49 persen per tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak seimbang pertambahan jumlah kasus yang tertangani dengan jumlah kasus yang terdaftar. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belum ada kasus sengketa tanah yang dapat tertangani 100%. Oleh karena masih banyaknya kasus yang belum tertangani, maka menyebabkan angka persentasenya rendah. Keadaan ini harusnya menjadi catatan bagi pihak yang terkait untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik meskipun jumlah kasus yang ada setiap tahunnya hanya sedikit.

10. Lingkungan Hidup

1. Pencemaran air sungai masih terjadi

Tiga sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta, yakni Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong masih belum dapat memenuhi syarat sebagai sumber air baku. Berdasarkan hasil pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing sungai, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami perubahan, tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai IKA sebesar 49,26 dan kembali menurun di tahun 2019 dengan nilai IKA sebesar 41,98; dan nilai pertumbuhan rata-rata dari tahun 2015-2019 sebesar -4,36 persen per tahun. Menurut pedoman IKLH tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKA ± 50 tersebut masuk ke dalam kategori cemar sedang dengan nilai $IP 5,0 < PIJ \leq 10,0$. Keadaan ini dipengaruhi dari beberapa faktor pencemar yang ada di sekitar sungai maupun jauh dari sungai. Diantaranya adalah masih banyaknya masyarakat bantaran sungai yang membuang limbah atau sampah rumah tangga mereka ke sungai langsung tanpa ada penanganan terlebih dahulu.

2. Semakin tercemarnya udara

Penghitungan IKU menggunakan parameter NO₂ mewakili sumber pencemar bergerak dan SO₂ mewakili sumber pencemar tidak bergerak. Terdapat perbedaan metode penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebelum tahun 2017 dengan setelah tahun 2017. Sebelum tahun 2017, penghitungan IKU dilakukan dengan manual aktif, sedangkan setelah tahun 2017 digunakan metode pasif. Nilai IKU tahun 2017 sebesar 89,27 dan menurun menjadi 84,24 di tahun 2018. Nilai ini kembali menurun menjadi 84,00 di tahun 2019, yang berarti semakin rendahnya kualitas udara di Kota Yogyakarta. Penurunan kualitas udara ini dipengaruhi semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor, adanya penambahan aktivitas setiap akhir pekan, dan kurangnya penghijauan di Kota Yogyakarta.

3. Belum semua sampah terangkut ke TPA

Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kota Yogyakarta. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di atas 200 ton/hari. Angka timbulan sampah di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 236,3 ton/hari (pada tahun 2015) menjadi 361,96 ton/hari (pada tahun 2019). Keterbatasan fasilitas dan proses pengangkutan sampah mengakibatkan belum seluruh sampah terangkut ke TPA, hanya 69,88 persen volume sampah yang terangkut ke TPA (data tahun 2018). Sampah yang tidak

ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit.

11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Masih adanya penduduk yang tidak ber-KTP

Rasio penduduk Kota Yogyakarta yang ber-KTP selama tahun 2015-2019 cenderung tinggi dengan angka lebih dari 90 persen. Pada tahun 2015, dari 307.033 penduduk usia >17 tahun atau telah menikah, terdapat 92,72 persen yang memiliki KTP. Angka ini terus meningkat menjadi 99,06 persen penduduk ber-KTP dari total 314.241 penduduk usia >17 tahun atau telah menikah. Meskipun rasio tersebut cukup tinggi, namun jika dilihat dari angka nominalnya, masih terdapat 2.939 penduduk usia >17 tahun atau telah menikah yang belum memiliki KTP. Hal ini perlu mendapat perhatian dari dinas terkait guna mencapai tertib administrasi kependudukan.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih terdapat LSM yang tidak aktif

LSM merupakan inisiatif bentukan masyarakat sehingga mengikat secara sosial budaya maupun kegotongroyongan. Pada tahun 2019, dari 50 unit LSM di Kota Yogyakarta, 76 persen atau 38 unit di antaranya merupakan LSM yang aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan masih terdapat 12 unit LSM yang tidak aktif. Setiap masyarakat yang memiliki LSM aktif akan memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam mendorong pembangunan segala bidang. Perlu upaya dari dinas terkait untuk mengkoordinasikan LSM yang sudah ada untuk dapat aktif kembali agar pembangunan berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik.

2. Belum semua kampung melaksanakan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat kampung dapat dilihat dari besaran indeks pemberdayaan kampung. Berdasarkan data capaian kinerja sasaran tahun 2019 pada sasaran Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan, indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung di Kota Yogyakarta sebesar 39,82. Nilai indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung merupakan perbandingan skor kampung se-Kota Yogyakarta dengan jumlah kampung se-Kota Yogyakarta. Skor kampung se-Kota Yogyakarta pada tahun 2019 diketahui sebesar 67,70. Sedangkan jumlah kampung se-Kota Yogyakarta pada tahun 2019 diketahui sebanyak 170 kampung (berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 404 Tahun 2019

tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335 Tahun 2018 tentang Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta Periode 2018-2021).

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih minimnya kepesertaan KB Aktif

Besaran cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung menunjukkan penurunan. Pada tahun 2015, cakupan peserta KB aktif mencapai 75,34 persen, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 68,19 persen, meskipun sedikit meningkat pada tahun 2019 menjadi 69,93 persen. Di masa yang akan datang diharapkan jumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlah penduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Belum adanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan

Berdasarkan data tahun 2015-2019, jumlah PPKS di Kota Yogyakarta hanya ada 1 unit, yaitu di Kecamatan Mergangsan, atau hanya sebesar 7,14 persen. PPKS memberikan layanan data/informasi mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), konsultasi, konseling, bimbingan, maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Sehingga, PPKS seharusnya ada di setiap kecamatan layaknya puskesmas. Masih kurangnya jumlah PPKS di Kota Yogyakarta perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah terutama dinas terkait agar dapat ketahanan dan kesejahteraan keluarga semakin meningkat.

3. Belum semua faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS

Pada tahun 2017, terdapat 7 unit faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS atau sebesar 12,73 persen dari total 55 unit faskes dan jejaring. Jumlah ini meningkat drastis menjadi 43 unit faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS atau sebesar 75,44 persen dari total 57 faskes dan jejaring. Persentase ini terus meningkat menjadi 87,76 persen di tahun 2019, atau sebesar 43 unit faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dari total 49 unit faskes dan jejaring. Meskipun memiliki kecenderungan yang meningkat, dari angka tersebut diketahui masih ada 6 unit faskes dan jejaring yang tidak bekerjasama dengan BPJS.

14. Perhubungan

1. Masih minimnya penggunaan angkutan umum sebagai moda transportasi

Penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat karena berbagai alasan. Keterbatasan layanan angkutan umum menjadi alasan utama. Belum terjangkaunya halte dari tempat tinggal merupakan salah satu penyebab tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Di samping itu ketepatan waktu layanan juga menjadi faktor penyebab hal tersebut. Aspek layanan transportasi di Kota Yogyakarta juga belum menunjukkan kinerja yang bagus, khususnya untuk layanan transportasi perkotaan (angkutan umum darat). Ketersediaan (*supply*) layanan transportasi yang ada di Kota Yogyakarta masih belum menarik minat masyarakat. Permasalahan transportasi bisa dianalogikan sebagai sebuah siklus yang saling mempengaruhi. Kurangnya pelayanan transportasi umum perkotaan memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Trans Jogja yang menjadi moda transportasi angkutan darat utama di Kota Yogyakarta masih belum bisa menjadi solusi bagi angkutan umum darat. Masih belum optimal layanan ini berkaitan dengan ketersediaan moda, jalur trayek, dan juga ruang jalan.

Berdasarkan data tahun 2015-2019, jumlah angkutan darat di Kota Yogyakarta memiliki tren menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,17 persen per tahun. Hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan rata-rata jumlah penumpang angkutan darat yang memiliki tren meningkat sebesar 22,62 persen per tahun. Selama rentang tahun tersebut, persentase layanan angkutan darat tergolong masih sangat rendah, yaitu di bawah 1 persen, atau sebesar 0,60 persen di tahun 2015, 0,61 persen di tahun 2016, bahkan menurun semakin menurun menjadi 0,33 persen di tahun 2017, 0,38 persen di tahun 2018, dan 0,27 persen di tahun 2019. Penurunan drastis ditunjukkan pada tahun 2017, hal ini berkaitan dengan mulai hilangnya bus dalam kota (Damri, Aspada, Puskopkar, Kopata) di tahun tersebut.

2. Masih rendahnya kepemilikan KIR untuk angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang melintas di Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,89 persen per tahun. Hal tersebut dikarenakan tidak selarasnya pertumbuhan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR yang memiliki pertumbuhan rata-rata -5,46 persen per tahun, dengan jumlah angkutan umum pada tahun tersebut yang memiliki pertumbuhan rata-rata -1,38 persen per tahun. Uji KIR diperlukan untuk menguji apakah angkutan umum tersebut memiliki kelayakan untuk beroperasi.

3. Masih terbatasnya prasarana transportasi

Selain moda transportasi, masalah transportasi di Kota Yogyakarta juga terletak pada keterbatasan prasarana transportasi seperti ketersediaan jalan dan rambu lalu lintas. Panjang jaringan jalan yang ada di Kota Yogyakarta relatif tidak bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun dikarenakan keterbatasan ruang untuk pembangunan. Hal ini berbanding terbalik dengan penambahan jumlah kendaraan pribadi mengakibatkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun dari 0,0009 pada tahun 2015 menjadi 0,0008 pada tahun 2019.

15. Komunikasi dan Informatika

1. Masih terdapat aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melebihi tempo maksimal 2x24 jam

Berdasarkan data capaian kinerja program tahun 2019 pada Program Peningkatan Komunikasi Publik, dari 2.082 total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi), terdapat 1.988 tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2x24 jam. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 94 aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melebihi tempo maksimal 2 x 24 jam.

2. Belum semua ruang publik terpasang *free wifi* dan CCTV

Berdasarkan data capaian kinerja program tahun 2019 pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika, terdapat 98 ruang publik yang terpasang *free wifi* atau sebesar 62,03 persen dari 158 ruang publik yang seharusnya ada *free wifi*. Adanya *free wifi* di ruang publik merupakan salah satu faktor daya tarik sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengunjung di ruang publik tersebut. Di sisi lain, hanya terdapat 42 ruang publik yang terpasang CCTV atau sebesar 24,42 persen dari 172 ruang publik yang seharusnya ada CCTV. Adanya CCTV menjamin keamanan pengunjung ruang publik.

16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) masih relatif tinggi

Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2015-2019 cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,89 persen per tahun. Indeks Gini pada tahun 2015 sebesar 0,446, namun menurun menjadi 0,429 pada tahun 2016, kembali meningkat menjadi 0,446 pada tahun 2017, dan kembali menurun menjadi 0,420 pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019, BPS belum melakukan publikasi mengenai data Indeks Gini. Tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota

Yogyakarta di atas 0,4 yang artinya bahwa Kota Yogyakarta termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria moderat. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk.

17. Penanaman Modal

1. Belum maksimalnya rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan jumlah dan nilai investasi perusahaan berskala nasional baik Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) diharapkan dapat memberikan yang positif terhadap perekonomian penduduk, dimana salah satu indikatornya adalah rasio daya serap tenaga kerja. Data mengenai rasio daya serap tenaga kerja terhadap perusahaan di Kota Yogyakarta mulai tersedia tahun 2017. Pada tahun 2017, terdapat 7 unit PMA yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 233 orang (rasio daya serap 31,86); dan pada tahun 2019 dengan jumlah 12 unit PMA mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 764 orang (rasio daya serap 63,67. Sedangkan untuk PMDN, pada tahun 2017 terdapat 17 unit PMDN yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 651 orang (rasio daya serap 38,29); dan pada tahun 2019 dengan jumlah 1.702 unit PMDN mampu menyerap 23.546 orang (rasio daya serap 13,83).

18. Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya wirausaha muda

Data mengenai wirausaha muda di Kota Yogyakarta mulai tersedia tahun 2017. Berdasarkan data 2017-2019, jumlah wirausaha muda cenderung meningkat. Pada tahun 2017, jumlah wirausaha muda sebanyak 129 jiwa atau sebesar 6,20 persen dibandingkan jumlah seluruh wirausaha. Jumlah ini meningkat di tahun 2019 menjadi 150 jiwa atau sebesar 7,21 persen dibandingkan jumlah seluruh wirausaha. Wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

2. Belum semua pelatih memiliki sertifikasi

Data mengenai pelatih bersertifikasi di Kota Yogyakarta mulai tersedia tahun 2017. Jumlah pelatih bersertifikasi pada tahun 2017 sebanyak 56 jiwa atau sebesar 38,89 persen dibandingkan seluruh pelatih. Pelatih bersertifikat meningkat menjadi 154 jiwa atau sebesar 70,64 persen dibandingkan seluruh pelatih di tahun 2019, yang berarti masih terdapat 29,36 persen pelatih yang belum bersertifikasi. Peningkatan ini dikarenakan para pelatih mengikuti pelatihan/sertifikasi secara mandiri.

3. Kurangnya pembinaan atlet muda

Data mengenai pembinaan atlet muda di Kota Yogyakarta mulai tersedia tahun 2017. Jumlah atlet pelajar yang dibina pada tahun 2017 sebanyak 180 jiwa atau sebesar 78,26 persen dibandingkan seluruh atlet pelajar. Atlet pelajar yang dibina meningkat menjadi 240 jiwa atau sebesar 68,77 persen dibandingkan seluruh atlet pelajar. Turunnya cakupan pembinaan atlet muda ini dikarenakan laju pertumbuhan rata-rata atlet pelajar yang dibina (15,88 persen per tahun) lebih rendah dari laju pertumbuhan rata-rata seluruh atlet pelajar (24,15 persen per tahun).

19. Kebudayaan

1. Belum semua benda, situs, dan kawasan cagar budaya dilestarikan

Pada tahun 2015, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 87,5 persen atau 567 unit dari total 648 unit. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang sangat signifikan yaitu sebesar 181 unit dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 sebesar 157 unit, dan tidak ada peningkatan maupun penurunan di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh pendataan benda cagar budaya berdasarkan kepemilikan masih belum tertata dengan dengan baik. Masih diperlukan tinjauan di lapangan terkait status kepemilikan cagar budaya serta pendataan yang lebih mendalam terkait cagar budaya yang masih belum jelas status kepemilikannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan benda, situs, dan Kawasan cagar budaya yang dimiliki.

20. Perpustakaan

1. Rasio perpustakaan per satuan penduduk yang terus menurun

Rasio perpustakaan per 10.000 penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami dinamika peningkatan maupun penurunan. Puncak rasio tertinggi berada di tahun 2017 dengan 11,56 yaitu 477 perpustakaan berbanding dengan 412.692 jumlah penduduk. Namun pada tahun 2018 dan 2019 rasio tersebut menurun dari 8,65 hingga 8,36. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 2.000 penduduk pada tahun 2019 dibanding tahun 2017, tetapi justru terdapat penurunan jumlah perpustakaan menjadi 346 perpustakaan. Perlunya perhatian lebih terhadap rasio perpustakaan karena berhubungan erat dengan budaya literasi yang ada di masyarakat agar semakin meningkat.

21. Kearsipan

1. Kualitas SDM Pengelola Kearsipan masih belum merata

Pada tahun 2015-2016 kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan di Kota Yogyakarta cenderung stagnan di angka 6 kali. Sedangkan pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan dari tahun 2016 yaitu 11 kali, namun tidak mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2019. Peningkatan kegiatan pengelola kearsipan perlu ditingkatkan serta tetap memperhatikan bagi kegiatan yang efektif dan benar-benar optimal dalam meningkatkan SDM pengelolaan arsip. Selain itu, pembaharuan kegiatan yang relevan dengan kondisi terkini dapat menjadi tolok ukur dalam penentuan kegiatan agar lebih tepat dengan perkembangan zaman.

22. Pariwisata

1. Belum meratanya pementasan atraksi wisata di titik-titik strategis pariwisata Kota Yogyakarta; dan
2. Masih minimnya atraksi pariwisata yang diselenggarakan di malam hari, sebagai daya tarik pariwisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.

23. Pertanian

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun dari tahun ke tahun

Sektor pertanian merupakan sektor minoritas dan perkembangannya kalah cepat dengan sektor-sektor basis di daerah perkotaan. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan PDRB sektor pertanian bernilai positif yaitu sebesar 2,35% per tahun. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta semakin menurun. Pada tahun 2015, sektor pertanian menyumbang sebesar 0,165% dari total seluruh PDRB. Persentase tersebut terus menurun hingga tersisa sebesar 0,147% di tahun 2018.

2. Semakin menurunnya pembinaan kelompok tani

Cakupan bina kelompok tani dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan secara keseluruhan yang awalnya pada tahun 2015 dan 2016 kelompok yang mendapat bantuan yaitu 19 dan 24, menjadi 0 pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 yaitu dengan 3 kelompok tani yang menerima bantuan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 15 kelompok tani dan itupun masih dibawah tahun 2015. Jika ditinjau memang terjadi penurunan total kelompok tani yang pada tahun 2015 sebesar 206 kelompok menjadi 180 kelompok di tahun 2019. Hal ini dapat dianalisis jika minat dapat sektor pertanian oleh masyarakat mengalami penurunan

sehingga mengurangi kriteria kelompok yang seharusnya mendapat bantuan di sektor pertanian untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian kelompok tani tersebut.

24. Perdagangan

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami stagnasi

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan positif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,09%. Pertumbuhan rata-rata pertahun tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor utama bagi Kota Yogyakarta. Stagnasi ini terjadi mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 pada kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB yaitu sebesar 7,49. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 7,54 namun terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 7,49.

25. Perindustrian

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami kecenderungan pertumbuhan rata-rata per tahun negatif

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan negatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -0,89%. Terjadinya penurunan kontribusi sektor industri pengolahan ini terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 13,69 dan terus menurun hingga 13,18 pada tahun 2019. Perlunya perhatian lebih pada sektor tersebut untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang bersentuhan langsung dengan industri ini.

26. Transmigrasi

1. Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi

Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Pada tahun 2012-2019, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dari Kota Yogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasi swakarsa berbantu maupun swakarsa mandiri. Rendahnya minat

masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunya akibat kekhawatiran masyarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa. Sementara itu, jumlah KK dan individu yang mengikuti transmigrasi umum pada tahun 2015-2019 cenderung turun naik. Pada tahun 2015, jumlah KK yang mengikuti transmigrasi umum yaitu sebesar 39 individu dan pada tahun 2019, jumlah 30 individu.

27. Fungsi Penunjang

1. Belum efektif dan efisiennya penyusunan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran
2. Belum seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti
Pada tahun 2015 rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 70,31% lalu mengalami penurunan drastis di tahun 2016 sebesar 26,31 persen dan 44,44% pada tahun 2017. Jumlah total rekomendasi temuan pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, namun jumlah penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pada tahun 2019 mengalami perlambatan yakni dari total 71 rekomendasi terdapat 64 rekomendasi yang ditindaklanjuti.
3. Jumlah pelanggaran pegawai semakin meningkat
Pada tahun 2015 persentase pelanggaran pegawai di Kota Yogyakarta sebesar 0,37%, angka tersebut terus menurun menjadi 0,13% di tahun 2017. Pada tahun 2018 angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 0,15%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase pelanggaran pegawai di Kota Yogyakarta meningkat kembali menjadi sebesar 2,11%. Peningkatan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena adanya penegakan kepatuhan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dimulai dengan kepatuhan presensi sesuai jam kerja, dimana penerapan presensi elektronik berpengaruh terhadap penyediaan data setiap PNS.
4. Belum terpenuhinya penataan kebutuhan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Masih terdapat ASN yang tidak lulus dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
6. Realisasi pelaksanaan kegiatan belum tepat sesuai target 100%
7. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah memiliki tepat struktur tepat fungsi

2.3.3. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Berikut ini disajikan permasalahan Kota Yogyakarta berdasarkan sasaran dan program yang diampu oleh perangkat daerah.

1. Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

Dari 19 sasaran OPD yang ada di Misi 1, seluruh sasaran OPD (100%) dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 45 program OPD, terdapat 35 program OPD (77,78%) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan program OPD yang tidak tercapai:

- a. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron, dengan indikator program pertama Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, alasan tidak tercapai karena adanya keterlambatan cetak KTP dikarenakan kepingan yang masih menunggu dari pusat sehingga ada masyarakat yang kecewa.

Sedangkan untuk indikator program kedua, Tingkat Swadaya Masyarakat, alasan tidak tercapai karena: (1) swadaya di Kelurahan Gondokusuman menurun karena jumputan menurun; dan (2) pos ronda banyak yang tidak aktif.

- b. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan, dengan indikator program Tingkat Swadaya Masyarakat, alasan tidak tercapai karena dana swadaya bergantung pada kebutuhan pembangunan masyarakat.

- c. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan, dengan indikator program pertama Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, alasan tidak tercapai karena adanya aturan baru terkait perijinan (IUM, IMB, OSS) sehingga masyarakat kecewa tidak mendapatkan pelayanan masyarakat

Sedangkan untuk indikator program kedua, Tingkat Swadaya Masyarakat, alasan tidak tercapai karena dana swadaya bergantung pada kebutuhan pembangunan masyarakat.

- d. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo, dengan indikator program Tingkat Swadaya Masyarakat, alasan tidak tercapai karena menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

- e. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo, dengan indikator

- program Tingkat Swadaya Masyarakat, alasan tidak tercapai karena: (1) swadaya masyarakat pada dana PMK Kelurahan Giwangan turun karena banyak kegiatan dari luar yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN yang menyasar Kelurahan Giwangan; dan (2) dana swadaya masyarakat pada dana PMK Kelurahan Pandeyan, Warungboto, Muja-muju dan Semaki turun karena kegiatan sudah dicukupkan oleh APBD.
- f. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan, dengan indikator program Tingkat Swadaya Masyarakat, alasan tidak tercapai karena besarnya swadaya bergantung pada masyarakat.
 - g. Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan, dengan indikator program Persentase Komoditas Pangan Asal Hewan dan Perikanan Bebas dari Bahan Berbahaya, alasan tidak tercapai karena masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pangan asal perikanan untuk mematuhi mutu pangan asal perikanan yang aman untuk dikonsumsi.
 - h. Program Pembinaan Pertanian, dengan indikator program Persentase Komoditas Pangan Asal Tumbuhan yang Bebas Penggunaan Bahan Berbahaya, alasan tidak tercapai karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pedagang pasar/ pelaku pasar tentang bahan berbahaya bagi komoditas pangan asal tumbuhan.

2. Misi 2: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta

Dari 7 sasaran OPD yang ada di Misi 2, seluruh sasaran OPD (100%) dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 21 program OPD, terdapat 19 program OPD (90,48%) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan program OPD yang tidak tercapai:

- a. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan indikator program Persentase Penempatan Pekerja, alasan tidak tercapai karena belum optimalnya jumlah pekerja yang ditempatkan.
- b. Program Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, dengan indikator program Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, alasan tidak tercapai karena kecenderungan pengaduan turun karena sistem perijinan berusaha baru dengan sistem aplikasi.

3. Misi 3: Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta

Dari 3 sasaran OPD yang ada di Misi 3, seluruh sasaran OPD (100%) dapat mencapai target. Begitu juga untuk program OPD, dari 7 program OPD, seluruh program OPD (100%) dapat mencapai target.

4. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya

Dari 16 sasaran OPD yang ada di Misi 4, terdapat 11 sasaran OPD (68,75%) yang telah mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 59 program OPD, terdapat 50 program OPD (84,75%) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Aksesibilitas Pendidikan Meningkat, dengan indikator sasaran pertama Angka Partisipasi Kasar SD, kedua Angka Partisipasi Kasar SMP, ketiga Angka Partisipasi Murni SD, dan keempat Angka Partisipasi Murni SMP, alasan keempat indikator sasaran OPD ini tidak tercapai karena: (1) PPDB zonasi yang menyebabkan jumlah anak luar kota yang bersekolah di Yogya mengalami penurunan; dan (2) kualitas pendidikan di Kabupaten/kota lain semakin merata dan meningkat sehingga minat warga luar kota bersekolah di Yogyakarta semakin turun.
- b. Derajat Kesehatan Meningkat, dengan indikator sasaran Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat, alasan tidak tercapai karena penetapan target yang terlalu tinggi karena pada saat penetapan target PIS PK belum mulai dilaksanakan (pada saat itu memakai acuan pendataan PHBS). Indeks IKS didapatkan dari aplikasi Keluarga Sehat (tidak real time) sehingga terjadi gap antara hasil real Puskesmas dengan hasil dari aplikasi KS.

Sedangkan penjelasan program OPD yang tidak tercapai:

- a. Program Pengembangan Pendidikan, dengan indikator program Persentase Guru Sesuai Kualifikasi, alasan tidak tercapai karena: (1) kurangnya kesadaran diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi; dan (2) biaya untuk melanjutkan PPG cukup besar.
- b. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator program pertama Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar, alasan tidak tercapai karena adanya rasa malu untuk memeriksakan kehamilan pada trimester pertama untuk kehamilan yang tidak diinginkan.

Untuk indikator program kedua, Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar, dan ketiga Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar,

alasan kedua indikator program OPD ini tidak tercapai karena: (1) ibu tidak merasakan tanda-tanda persalinan sehingga lahir di rumah; dan (2) ingin ditolong suaminya.

Untuk indikator program keempat, Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, alasan tidak tercapai karena masih ada bayi yang tidak IMD karena BBLR atau SC.

Untuk indikator program kelima, Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri), alasan tidak tercapai karena kerjasama lintas sektor belum optimal.

Sedangkan untuk indikator program keenam, Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes, alasan tidak tercapai karena persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes.

- c. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, dengan indikator program Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam Per Tahun, alasan tidak tercapai karena ketersediaan anggaran terkait dengan biaya pengembangan SDM (pelatihan) bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD, dimana dengan kondisi ketidakstabilan pembayaran klaim pasien BPJS maka belanja yang bersumber dari BLUD lebih diprioritaskan untuk operasional pelayanan langsung terhadap pasien (obat-obatan, BHP medis, dan kegiatan operasional rutin lain-lain).
- d. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dengan indikator program Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga, alasan tidak tercapai karena: (1) metode pertemuan sulit untuk dilakukan karena kesibukan dari orang tua; dan (2) manfaat dari BKB, BKR, dan BKL tidak langsung terlihat, baru dapat terlihat beberapa tahun berikutnya.

5. Misi 5: Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan

Dari 4 sasaran OPD yang ada di Misi 5, terdapat 1 sasaran OPD (25,00%) yang telah mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 10 program OPD, terdapat 8 program OPD (80,00%) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali, dengan indikator sasaran pertama Indeks Kualitas Air, alasan tidak tercapai karena sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai. Hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta.

Sedangkan untuk indikator sasaran kedua Indeks Kualitas Udara, alasan tidak tercapai karena adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, terutama jam-jam masyarakat beraktivitas serta setiap akhir minggu dan libur, dimana kendaraan dari luar kota memadati Kota Yogyakarta.

- b. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Meningkat, dengan indikator sasaran Persentase Luasan RTH Publik dari Minimal RTH Publik 20% Luas Kota Yogyakarta, alasan tidak tercapai karena upaya peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH. Sampai akhir tahun 2019 prosentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta baru tercapai sebesar 18,80 % dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

Sedangkan penjelasan program OPD yang tidak tercapai:

- a. Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, dengan indikator program Persentase Usaha yang Telah Memiliki Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), alasan tidak tercapai karena masyarakat masih salah persepsi mengenai Dokumen Lingkungan.
- b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, dengan indikator program Persentase RTH Publik yang Dikelola terhadap Luas RTH Publik, dengan alasan tidak tercapai terkendala pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH.

6. Misi 6: Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman

Dari 7 sasaran OPD yang ada di Misi 6, seluruh sasaran OPD (100%) dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 20 program OPD, terdapat 18 program OPD (90,00%) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan program OPD yang tidak tercapai:

- a. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase, dengan indikator program Persentase Kualitas Saluran Pengairan/Penyediaan Bangunan Talud.
- b. Program Pembangunan Gedung Pemerintah, dengan indikator program Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Sesuai Standar Kebutuhan.

Alasan kedua indikator program tersebut tidak tercapai karena: (1) kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak

berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan; dan (2) kondisi di lapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana.

7. Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Dari 15 sasaran OPD yang ada di Misi 7, terdapat 14 sasaran OPD (93,33%) yang telah mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 45 program OPD, terdapat 38 program OPD (84,44%) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Meningkat, dengan indikator sasaran Indeks Tertib Administrasi Kependudukan, alasan tidak tercapai karena masyarakat masih enggan/kurang optimal dalam memanfaatkan layanan online yang disediakan oleh Dindikcapil.

Sedangkan penjelasan program OPD yang tidak tercapai:

- a. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer, dengan indikator program Persentase Penyerapan Belanja Daerah, alasan tidak tercapai karena: (1) regulasi terkait mekanisme pencairan JPD dan SE Mendagri terkait penyederhaan birokrasi; (2) efisiensi lelang pengadaan barang/jasa dan pengadaan tanah; dan (3) terdapat pekerjaan yang tidak selesai sesuai target yaitu putus kontrak, pengadaan tanah yang tidak mencapai kesepakatan dan gagal lelang.
- b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan indikator program Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset, alasan tidak tercapai karena hasil pemeriksaan di akhir tahun sehingga tindak lanjut rekomendasi dilaksanakan melampaui tahun anggaran 2019.
- c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya, dengan indikator program Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya, alasan tidak tercapai karena hasil pemeriksaan di akhir tahun sehingga tindak lanjut rekomendasi dilaksanakan melampaui tahun anggaran 2019.
- d. Program Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara, dengan indikator program Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta, alasan tidak tercapai karena adanya SE Mendagri

terkait penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada penataan khususnya pengisian jabatan struktural yang masih lowong dan belum dapat terisi/dilakukan penataan, menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

- e. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan indikator program Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan, alasan tidak tercapai karena fasilitas layanan online yang disediakan Dukcapil dan JSS belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat.
- f. Program Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan indikator program Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, alasan tidak tercapai karena dari target 15 RS, ada 2 RS yang belum bekerjasama dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran karena masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana yang ada di RS untuk melaksanakan layanan online 3 in 1.
- g. Program Peningkatan Komunikasi Publik, dengan indikator program Persentase Tindak Lanjut Aduan, Pertanyaan, Usul Saran dan Informasi Masyarakat dalam Tempo Maksimal 2x24 Jam, alasan tidak tercapai karena belum semua pesan yang masuk melalui UPIK maupun JSS dapat tertangani.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

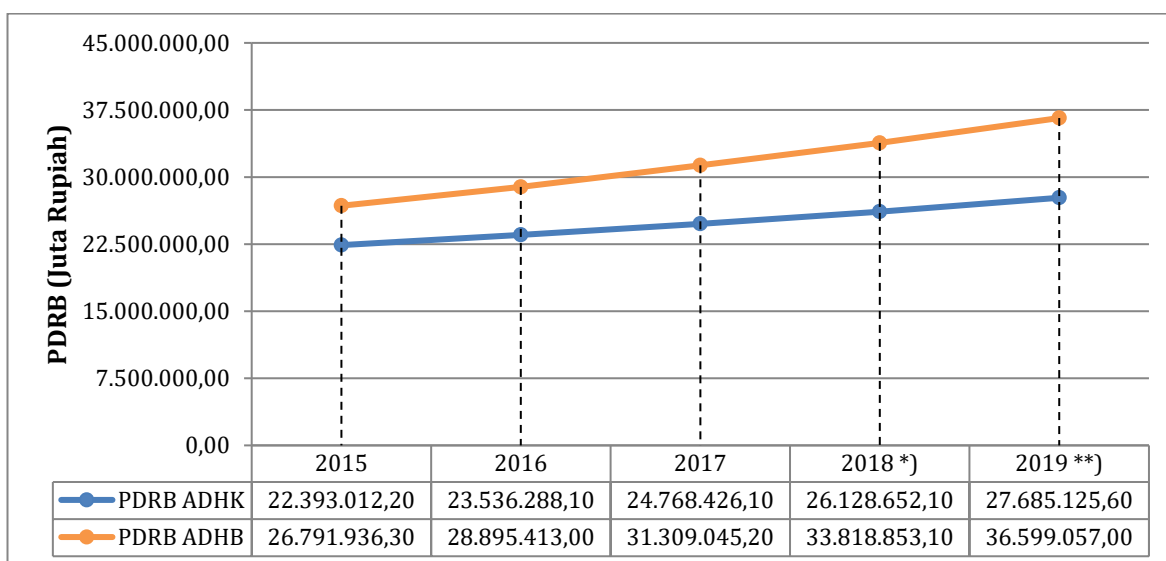
Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2021 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2021 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 22,39 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,11 persen menjadi 23,53 triliun rupiah pada tahun 2016, meningkat sebesar 5,24 persen menjadi sebesar 24,76 triliun rupiah pada tahun 2017, meningkat sebesar 5,49 persen

menjadi 26,12 triliun rupiah pada tahun 2018, dan meningkat sebesar 5,96 persen menjadi 27,68 triliun rupiah pada tahun 2019.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020

Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

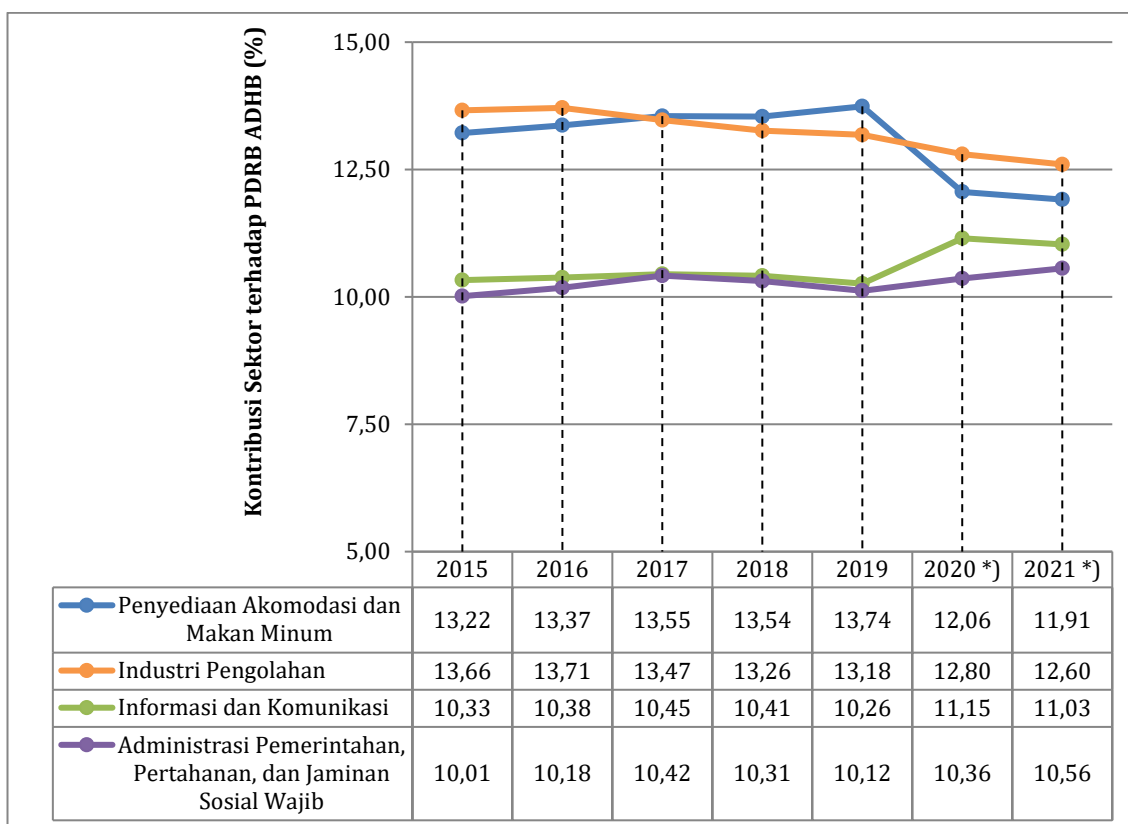
No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45.154,52	46.844,51	47.858,91	50.620,90	52.990,59
B	Pertambangan dan Penggalian	1.041,04	1.086,96	1.120,56	1.149,45	1.183,64
C	Industri Pengolahan	3.659.952,70	3.961.459,19	4.217.233,84	4.485.033,11	4.823.506,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	48.055,55	57.414,63	70.344,70	75.277,32	81.767,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.035,33	43.862,67	45.993,09	48.378,12	51.777,56
F	Konstruksi	2.133.133,96	2.265.491,88	2.422.777,75	2.683.150,90	2.872.931,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.923.298,65	2.130.571,77	2.345.123,46	2.550.074,63	2.742.495,02
H	Transportasi dan Pergudangan	1.094.829,60	1.152.941,88	1.238.619,79	1.326.611,86	1.491.284,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.540.966,39	3.862.455,83	4.241.593,10	4.578.376,53	5.028.895,24
J	Informasi dan Komunikasi	2.767.355,91	2.999.250,30	3.270.519,55	3.521.878,99	3.754.663,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.790.994,19	1.936.084,28	2.083.550,70	2.269.743,27	2.489.417,45
L	Real Estate	2.496.071,14	2.664.981,32	2.850.160,93	3.072.636,61	3.348.084,36
M,N	Jasa Perusahaan	296.115,28	311.413,03	338.219,79	365.438,27	396.038,77

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.682.897,32	2.941.107,90	3.261.124,03	3.486.756,30	3.703.368,97
P	Jasa Pendiidkan	2.535.454,30	2.660.407,07	2.850.179,35	3.101.517,66	3.376.943,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.016.645,07	1.085.552,83	1.181.954,23	1.283.065,06	1.388.276,40
S,T,U	Jasa Lainnya	717.935,38	774.487,02	842.671,44	919.144,11	995.433,07
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0
PDRB Provinsi DIY ADHB (Miliar Rupiah)		101.440,52	109.962,35	119.128,72	129.874,34	141.400,18

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, BPS DIY 2020

Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Industri Pengolahan; (c) Informasi dan Komunikasi; dan (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 10 persen. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota. Pada tahun 2019, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 5,02 triliun rupiah atau sebesar 13,74 persen, dan menduduki peringkat pertama. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,42 triliun rupiah atau sebesar 12,06 persen di tahun 2020 dan 4,65 triliun rupiah atau sebesar 11,91 persen di tahun 2021. Di posisi ke dua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 4,82 triliun rupiah atau sebesar 13,18 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,69 triliun rupiah atau sebesar 12,80 persen di tahun 2020 dan 4,92 triliun rupiah atau sebesar 12,60 persen di tahun 2021. Di posisi ke tiga, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 3,75 triliun rupiah atau sebesar 10,26 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,08 triliun rupiah atau sebesar 11,15 persen di tahun 2020 dan 4,31 triliun rupiah atau sebesar 11,03 persen di tahun 2021. Sedangkan posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 3,70 triliun rupiah atau sebesar 10,12 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 3,79 triliun rupiah atau sebesar 10,36 persen di tahun 2020 dan 4,12 triliun rupiah atau sebesar 10,56 persen di tahun 2021.

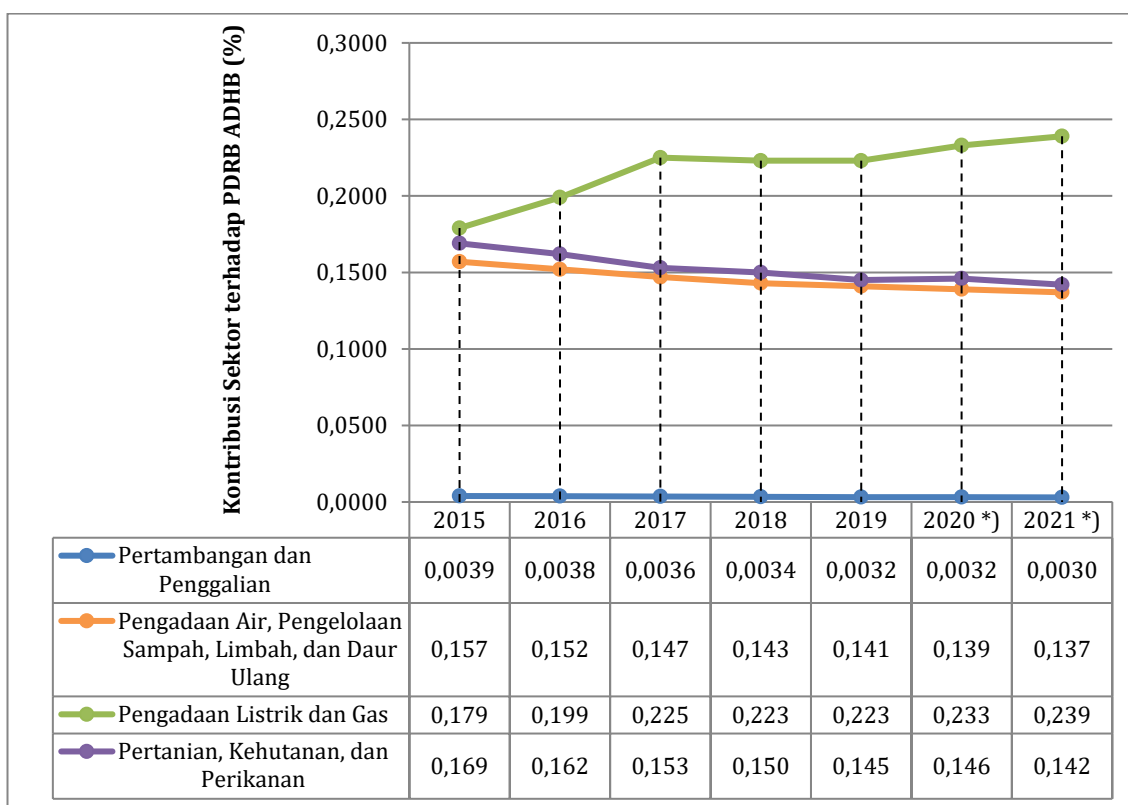


Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen. Pada tahun 2019, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 1,18 milyar rupiah atau sebesar 0,0032 persen, dan merupakan kontribusi paling rendah. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 1,15 milyar rupiah atau sebesar 0,0032 persen di tahun 2020 dan 1,16 milyar rupiah atau sebesar 0,0030 persen di tahun 2021. Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 51,77 milyar rupiah atau sebesar 0,141 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 50,81 milyar rupiah atau sebesar 0,139 persen di tahun 2020 dan 53,60 milyar rupiah atau sebesar 0,137 persen di tahun 2021. Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 52,99 milyar rupiah atau sebesar 0,145 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 53,48 milyar rupiah atau sebesar 0,146 persen di tahun 2020 dan 55,61 milyar rupiah atau sebesar 0,142 persen di tahun 2021. Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 81,76 milyar rupiah atau sebesar 0,223 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor

ini diproyeksikan mencapai 85,57 milyar rupiah atau sebesar 0,223 persen di tahun 2020 dan 93,33 milyar rupiah atau sebesar 0,239 persen di tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

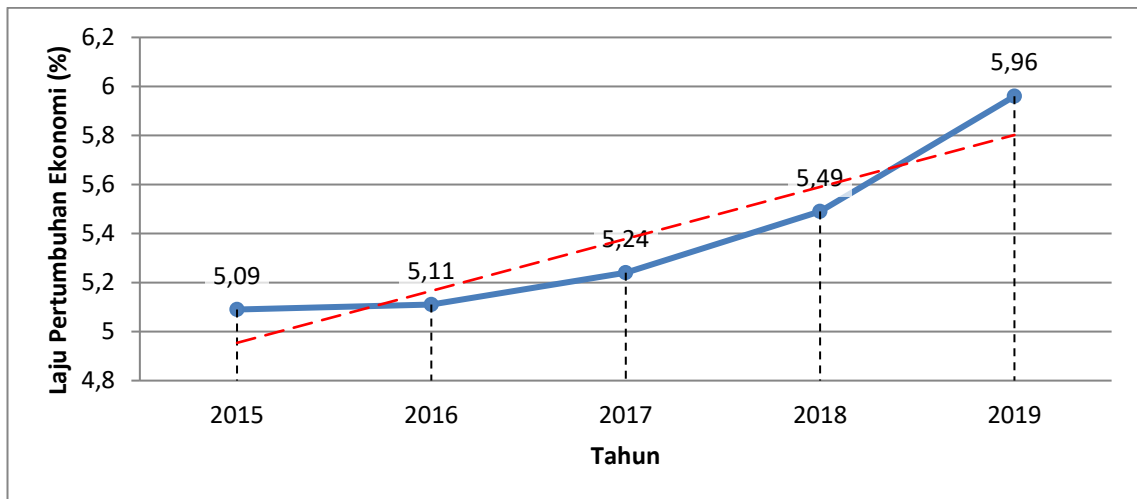
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

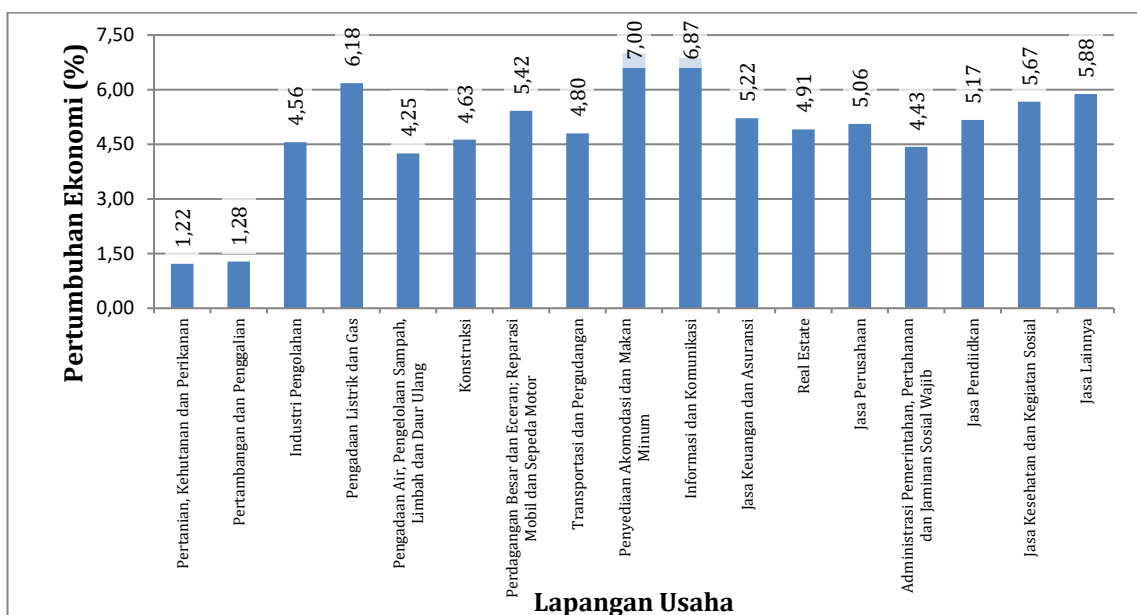
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, LPE Kota Yogyakarta mencapai 5,09 persen dan terus meningkat sampai dengan 5,96 persen pada tahun 2019.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Selama tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sembilan sektor mengalami pertumbuhan dengan angka di atas 5 persen, yaitu pada sektor: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,00 persen; (b) Informasi dan Komunikasi sebesar 6,87 persen; (c) Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,18 persen; (d) Jasa Lainnya sebesar 5,88 persen; (e) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,67 persen; (f) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 5,42 persen; (g) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,22 persen; (h) Jasa Pendidikan sebesar 5,17 persen; dan (i) Jasa Perusahaan sebesar 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

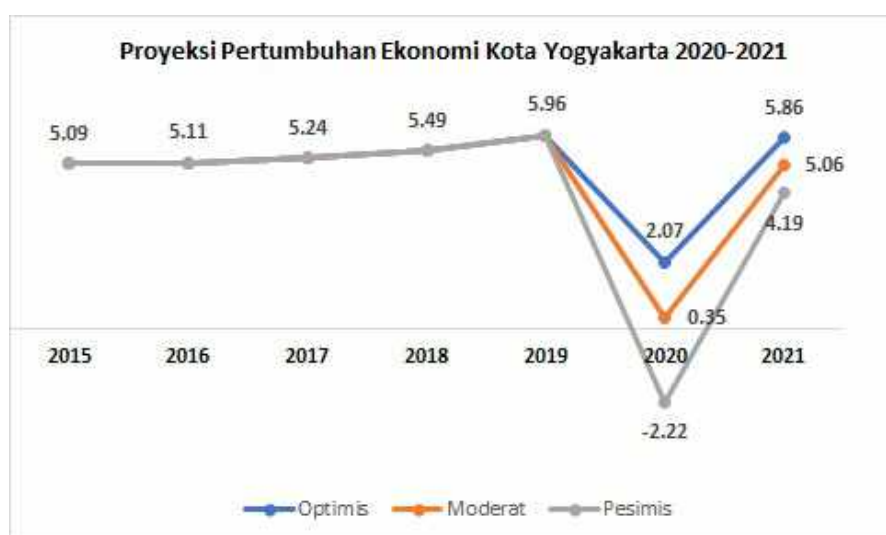
Sebagai Kota Pariwisata dimana ekonomi berjalan seiring pertambahan jumlah kunjungan wisata, Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemik Covid-19. *Physical distancing* sebagai upaya untuk penanggulangan Covid-19 memaksa masyarakat untuk mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas di luar rumah termasuk kunjungan wisata. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta terutama pada Industri Hotel Restoran. Penurunan sektor ini mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja. Selain itu, masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga akan mengalami penurunan pendapatan, misalnya Usaha Kecil Mikro (UKM) yang memproduksi dan/atau menjual souvenir dan oleh-oleh, penjaja makanan, tukang becak, andong, dan pekerja sektor informal pariwisata lainnya. Proyeksi dilakukan dengan menggunakan tiga skenario, yaitu: (1) skenario optimis, mengasumsikan pandemik akan berakhir pada awal sampai dengan pertengahan TW IV tahun 2020; (2) skenario moderat mengasumsikan pandemik akan berakhir pada pertengahan sampai dengan akhir TW I tahun 2021; dan (3) skenario pesimis mengasumsikan pandemik akan berakhir pada TW II tahun 2021.

Dengan pengaturan (*adjustment*) pada skenario kunjungan wisata, maka akan diketahui nilai sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata, serta sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder pariwisata. Penurunan ekonomi juga dipengaruhi turunnya sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Jasa Perusahaan. Namun, adanya pandemik Covid-19 ini justru diprediksikan dapat meningkatkan sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Untuk sektor-sektor lain pembentuk PDRB, diasumsikan dengan variasi yang berbeda untuk setiap skenario.

Untuk asumsi setiap skenario pada tahun 2021 mendasari pada asumsi pada skenario yang sama pada tahun 2020. Untuk skenario optimis pada tahun 2021, diasumsikan pandemik sudah berakhir sehingga pada TW I 2021 diasumsikan sudah ada pergerakan kunjungan wisata. Pada TW II 2021, diperkirakan kunjungan akan mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya musim libur sekolah dan libur lebaran sehingga diasumsikan terjadi peningkatan dan pada TW III 2021, asumsi peningkatan ini juga didukung adanya pelarangan mudik untuk tahun 2020 sehingga diproyeksi pada tahun 2021 masyarakat akan melakukan *Revenge Mudik*. Untuk TW IV 2021 diasumsikan adanya peningkatan dari kunjungan wisatawan TW yang sama tahun 2019. Asumsi ini didasarkan pada adanya proyeksi peningkatan liburan akhir tahun yang tertunda pada tahun 2020. Untuk skenario moderat, dimana pandemik diasumsikan akan berakhir pada awal sampai dengan pertengahan tahun 2021, maka untuk TW I 2021 diasumsikan kunjungan baru akan mencapai peningkatan pada TW II 2021. Pada TW III dan TW IV 2021 peningkatan pergerakan

masyarakat terus terjadi. Untuk skenario pesimis, proyeksi pergerakan masyarakat baru akan mengalami peningkatan yang optimal pada akhir TW III 2021 sejalan dengan asumsi berakhirnya pandemik pada pertengahan sampai dengan akhir TW II 2021.

Dengan asumsi pertumbuhan per sektor, maka di dapatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:



Sumber: Analisis, 2020

Gambar 3.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

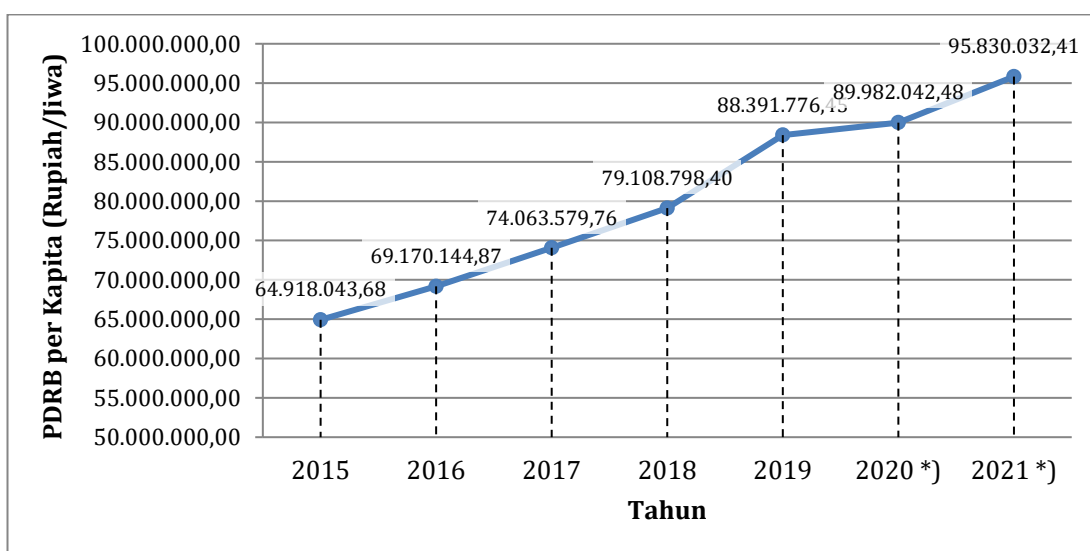
Meskipun penghitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan 3 asumsi, yang selanjutnya digunakan adalah proyeksi dengan asumsi pesimis. Dengan asumsi pesimis, maka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar -2,22 persen dan pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4,19 sebesar. Proyeksi ini dapat diraih dengan tidak hanya mengandalkan kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) namun juga harus mengoptimalkan kunjungan wisatawan dari dalam DIY atau bahkan wisatawan lokal Kota Yogyakarta. Penciptaan *demand* atau pasar bagi setiap sektor khususnya sektor pariwisata yang mampu menjadi pemantik sektor-sektor lain menjadi strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

3.1.3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya

alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, nilai PDRB ADHB sebesar 26,79 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 412.704 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 64.918.043,68 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 69.170.144,87 rupiah/jiwa pada tahun 2016, dan terus meningkat hingga sebesar 88.391.776,45 rupiah/jiwa pada tahun 2019. Dengan asumsi pesimis berkaitan adanya pandemik Covid-19, nilai PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta diproyeksikan meningkat menjadi 89.982.042,48 rupiah/jiwa pada tahun 2020 dan 95.830.032,41 rupiah/jiwa pada tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

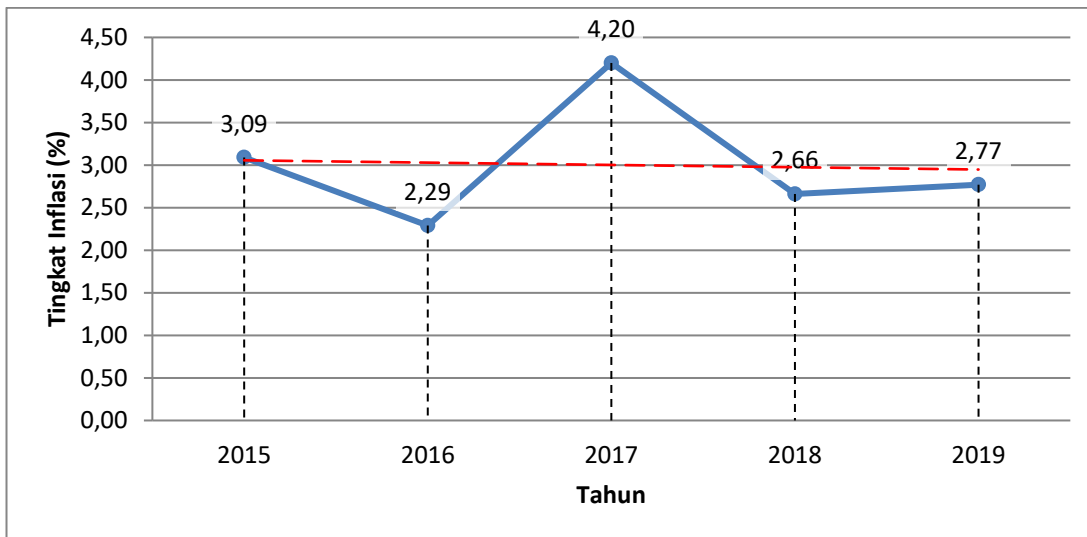
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3.7 PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021

3.1.4. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian dengan pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2015-2017 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, tingkat inflasi Kota Yogyakarta mencapai 2,29%. Angka ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar.

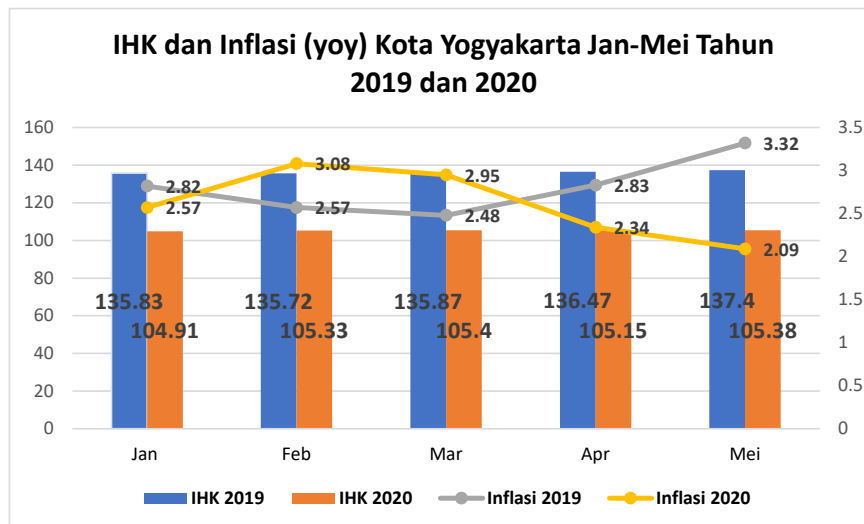


Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020

Gambar 3.8 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulan Mei 2020 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta menyebutkan inflasi DIY pada triwulan II 2020 secara tahunan diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibanding realisasi inflasi triwulan I 2020. Berdasarkan *tracking*, pada bulan April DIY mengalami deflasi 0,24% (mtm) dan pada bulan Mei 2020 DIY mengalami inflasi 0,22% (mtm). Angka ini tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang dimulai dengan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat mengenai adanya kasus pertama di Bulan Maret.

Anjuran Pemerintah untuk *stay at home* mulai gencar dikampanyekan berdampak pada penurunan pergerakan dan aktifitas masyarakat. Upaya pemerintah melarang mudik dan pembatasan aktivitas menyebabkan permintaan angkutan udara di DIY terus menurun, sehingga potensi dampak inflasi seasonal akibat lebaran menjadi minimal. Pada momen Ramadhan dan Lebaran di Bulan April-Mei umumnya terjadi lonjakan permintaan terhadap komoditas transportasi, namun pada tahun 2020 terjadi anomali. Penurunan tarif tiket pada April dan Mei 2020 telah turun mendekati batas bawah. Pasca dibukanya kembali penerbangan untuk keperluan khusus pada Mei 2020, belum ada perubahan tarif angkutan udara.



Sumber: Laporan Perekonomian DIY, 2020; Hasil Olahan, 2020

Gambar 3.9 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (yoy) Kota Yogyakarta Bulan Januari-Mei Tahun 2019 dan 2020

Pelarangan aktivitas mudik dan penurunan kunjungan pariwisata secara signifikan menyebabkan tingkat konsumsi pangan di DIY pada umumnya dan Kota Yogyakarta sebagai pusat sektor akomodasi dan makan minum di DIY pada khususnya cenderung menurun. Di sisi lain pada momen tersebut diiringi dengan masa panen beberapa komoditas pangan utama, sehingga kondisi stok pangan cenderung melimpah. Hal ini menyebabkan potensi *oversupply* pada beberapa komoditas seperti aneka cabai, daging ayam ras, hingga telur ayam ras. Dari sisi pendorong inflasi, pasca panen raya padi di awal triwulan II, harga beras masih mengalami peningkatan seiring dengan tingginya permintaan untuk kebutuhan Bansos. Secara stok, komoditas beras di DIY maupun nasional mengalami surplus. Diperkirakan harga beras akan mulai turun di akhir triwulan II 2020.

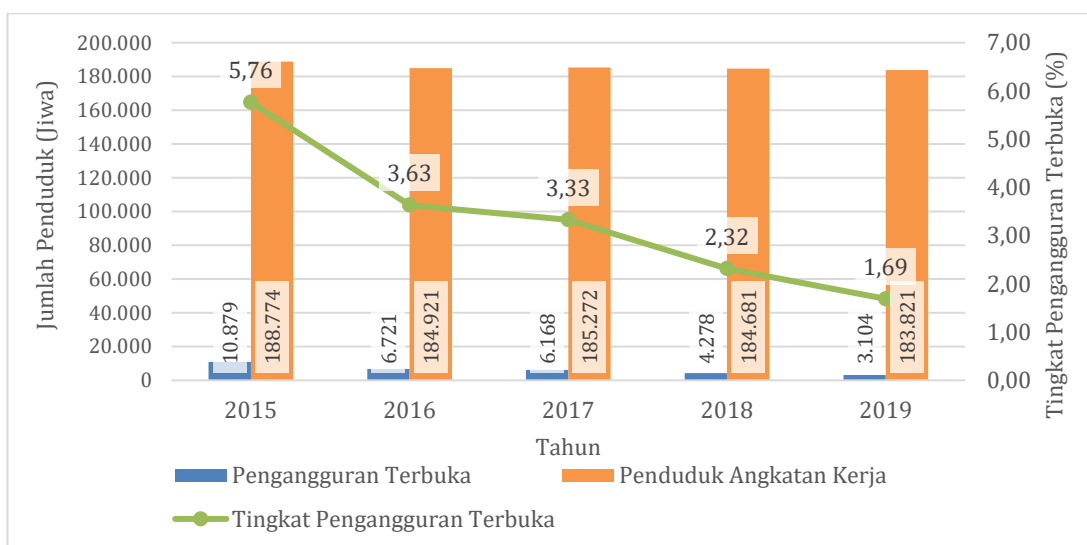
Gambaran inflasi di Kota Yogyakarta sampai dengan Bulan Mei 2020 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu dan kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta dan kelompok transportasi menjadi penanda bahwa inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 akan berada di bawah inflasi Kota Yogyakarta 2019. Penurunan konsumsi dan permintaan terhadap jasa transportasi sebagai dampak perlambatan kinerja pariwisata disertai dengan adanya kepastian *stock* pangan secara nasional menjadi dasar proyeksi inflasi Kota Yogyakarta ada pada rentang 2,4% -2,8% di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, seiring dengan proyeksi membaiknya seiring dengan membaiknya perekonomian global, menurunnya ketidakpastian pasar keuangan dunia, tetap tingginya confidence investor terhadap prospek ekonomi Indonesia pada 2021 yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor akomodasi dan makan minum di Kota Yogyakarta maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi sedikit lebih

tinggi dibandingkan dengan inflasi 2020 yaitu pada rentang 2,4%-3,4%. Proyeksi kenaikan inflasi tersebut yang diiringi dengan proyeksi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4.19%-5,86% menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kinerja perekonomian di Kota Yogyakarta menunjukkan arah yang positif. Proyeksi inflasi pada tahun 2021 juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017 yang menetapkan nilai Inflasi Nasional maupun Daerah ada pada rentang $3\% \pm 1$.

3.1.5. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, TPT Kota Yogyakarta sebesar 5,76 persen. TPT menurun menjadi 3,63 persen di tahun 2016 dan terus menurun hingga menjadi 1,69 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut.

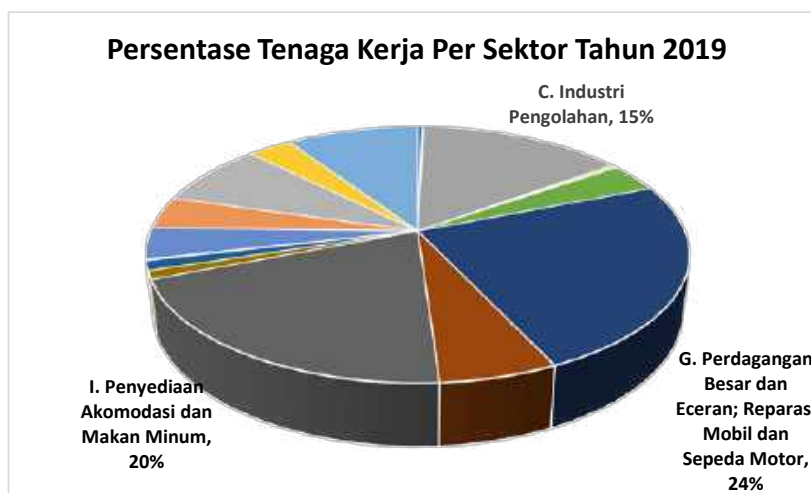


Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemik Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT di Kota Yogyakarta. Sektor yang paling terdampak ekonomi di Kota Yogyakarta adalah sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata dan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor ikutan dari pariwisata. Data tenaga kerja per sektor PDRB tahun 2019 menunjukkan jumlah tenaga kerja dari sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 46.611 pekerja atau 20 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja, sedangkan pada

sektor Industri Pengolahan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 33.672 pekerja atau sebesar 15 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja. Dengan melihat persentase yang cukup besar pada kedua sektor tersebut, maka penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak signifikan pada penambahan TPT di Kota Yogyakarta pada tahun 2020.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2020 (BPS, 2020)

Gambar 3.11 Persentase Tenaga Kerja Per Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2019

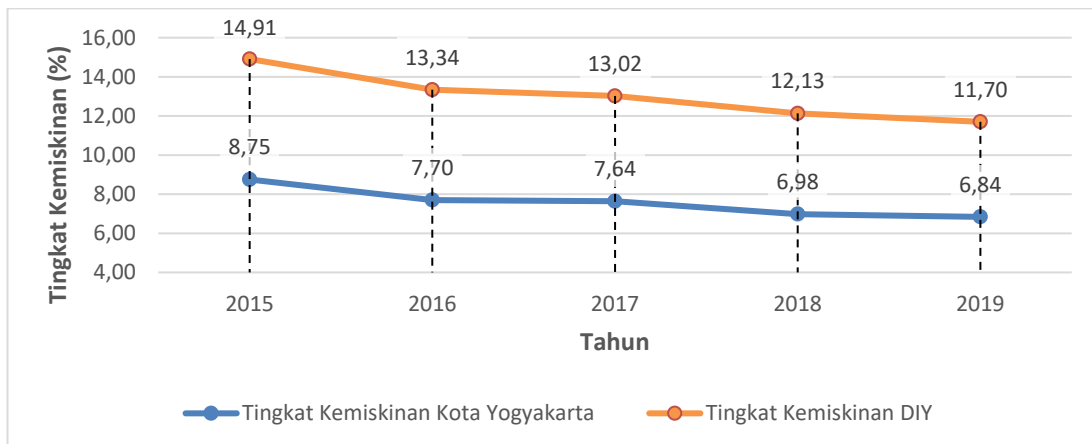
Proyeksi TPT Kota Yogyakarta dilakukan dengan melakukan *forecast linier* sederhana antara pertumbuhan ekonomi dan TPT. Pada tahun 2020, seiring dengan menurunnya angka proyeksi pada pertumbuhan ekonomi sebesar -2,22 persen pada skenario pesimis, maka proyeksi TPT juga mengalami peningkatan yaitu pada angka 10,46 persen. Perubahan ini seiring dengan proyeksi pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Industri Pengolahan dimana kedua sektor tersebut mampu menyerap 35 persen dari jumlah tenaga kerja di semua sektor.

Pada tahun 2021, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik dari tahun 2020 seiring dengan meningkatnya proyeksi jumlah kunjungan wisata, maka angka pengangguran akan mengalami penurunan. Pada skenario pesimis pariwisata diprediksi mulai bangkit pada pertengahan TW II dan III tahun 2021, sehingga pariwisata diprediksi akan mulai berjalan normal pada TW III dan TW IV. Dari *timeline* pariwisata tersebut maka pertumbuhan ekonomi diprediksi semakin meningkat, sedangkan angka pengangguran diprediksi semakin menurun dibandingkan tahun 2020. Pada skenario pesimis prediksi TPT tahun 2021 ada pada angka 6,13 persen. Prediksi TPT ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT tahun 2019 sebesar 4,8 persen. Peningkatan TPT tersebut dikarenakan untuk sektor Akomodasi dan Makan Minum dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 20 persen diprediksi belum akan menggeliat seperti tahun 2019. Prediksi ini didasarkan pada belum pulihnya daya beli masyarakat, sehingga masyarakat akan tetap melakukan

perjalanan wisata dengan mengurangi lama tinggal dan pola konsumsi makan dan minum selama berwisata dibandingkan dengan lama tinggal dan pola konsumsi makan minum pada perjalanan wisata tahun 2019.

3.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2015-2019. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 8,75 persen dan menurun menjadi 6,84 persen pada tahun 2019. Kondisi ini berkesesuaian dengan indikator-indikator makro lainnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah pengangguran. Grafik di bawah ini menyajikan Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 3.12 Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Penurunan ekonomi sebagai akibat dari pandemik Covid-19 dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Dari sisi pendapatan, sektor Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Industri Pengolahan akan mengalami dampak terbesar di Kota Yogyakarta yang akan berdampak pada tenaga kerja pada kedua sektor tersebut yang mencapai 35 persen dari total tenaga kerja di semua sektor. Belum lagi jika melihat penutupan beberapa universitas dan sekolah di tahun 2020, maka tenaga kerja ikutan dari sektor Jasa Pendidikan tersebut juga akan mengalami penurunan secara pendapatan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, sehingga dari sisi pengeluaran akan terjadi

penurunan ekonomi terutama dari sektor pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*).

Slowing-down aktivitas ekonomi menyebabkan semakin susahnya orang keluar dari kemiskinan. Bahkan lebih buruk lagi, munculnya orang miskin baru karena terdampak. Pada tahun 2019, kondisi belum pandemik, sekitar 6,84 persen atau 29.450 jiwa penduduk kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 93,16% penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian diantaranya hidup dengan penghasilan sedikit diatas garis kemiskinan, atau rentan miskin. Pada masa pandemik ini, kelompok tersebut yang sangat rentan terdampak, sehingga jatuh miskin. Akibatnya, tingkat kemiskinan yang secara konstan mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya, akan mengalami tren kebalikan di tahun 2020 dengan masuknya orang miskin baru.

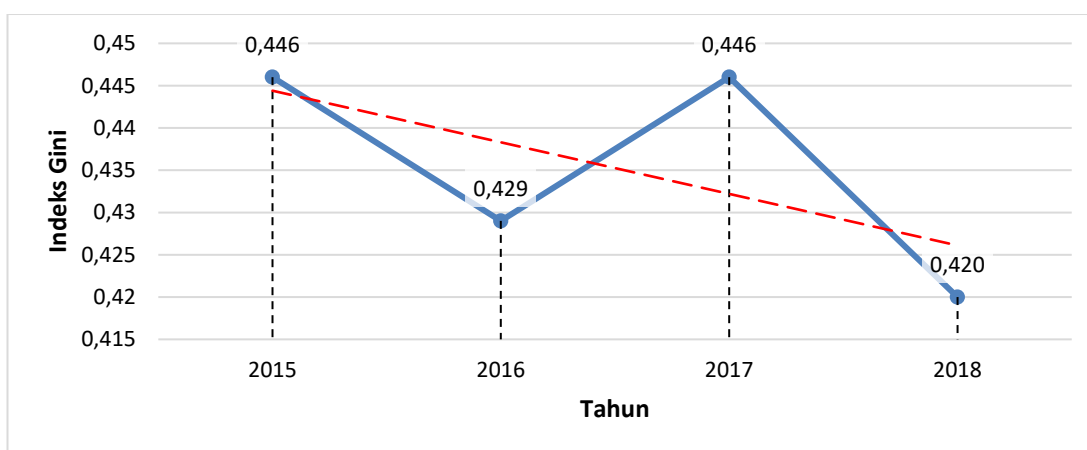
Dengan melakukan *forecast linier* sederhana terhadap data pertumbuhan ekonomi dan prediksi pertumbuhan ekonomi, maka didapatkan prediksi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2020 dengan skenario pesimis dimana pertumbuhan ekonomi diprediksi ada pada angka -2,22 persen, maka persentase penduduk miskin diprediksi mencapai 13,97 persen. Sedangkan pada tahun 2021, seiring dengan membaiknya prediksi pertumbuhan ekonomi, maka prediksi persentase penduduk miskin juga akan mengalami penurunan. Pada skenario pesimis dimana pertumbuhan ekonomi diprediksi ada pada angka 4,19 persen maka persentase penduduk miskin diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu pada angka 10,17 persen.

Dari data prediksi penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2020 ke tahun 2021, didapatkan laju penurunan yang cukup signifikan dibandingkan penurunan pada periode 2015-2019. Prediksi ini didasarkan pada asumsi sektor-sektor terdampak besar pada tahun 2020 adalah sektor dengan jumlah tenaga kerja mencapai 35 persen dari seluruh tenaga kerja pada semua sektor. Sektor tersebut adalah sektor Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Industri Pengolahan, dimana sektor ini sebagian besar menempati 40% Penduduk Berpendapatan Terendah yang merupakan kelompok rawan miskin. Dengan kata lain, pada tahun 2020 ketika lahan penghasilan mereka mengalami penurunan, maka ada penduduk pada kelompok tersebut yang menjadi penganggur sehingga penduduk miskin meningkat. Pada tahun 2021 seiring membaiknya kedua sektor tersebut, penduduk yang memang sudah mempunyai lahan penghasilan dan ketrampilan di dunia tersebut cukup cepat dalam melakukan *recovery* sehingga angka kemiskinan dan pengangguran turun signifikan pada tahun 2021. Penduduk tersebut diasumsikan sebagai tipe penduduk miskin yang berbeda dengan orang miskin yang selama ini memang dibawah garis kemiskinan dimana walaupun sudah diintervensi dalam

berbagai program namun belum dapat keluar dari garis kemiskinan dikarenakan dari berbagai aspek terkait pendidikan, kultur, dan ketrampilan.

3.1.7. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini. Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2015-2018 cenderung menurun. Penurunan Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin kecil. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018.



Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018 (BPS Kota Yogyakarta, 2014-2018); Hasil Olahan, 2019

Gambar 3.13 Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018

Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS, sehingga belum dapat ditampilkan. Namun, berdasarkan hasil *forecast*, Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2019 yaitu sebesar 0,418.

Pandemik Covid-19 diprediksi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Kemiskinan berhubungan erat dengan kemampuan individu atau masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, diprediksi jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah akan mengalami pengurangan atau bahkan penghilangan pendapatan yang kemudian akan

berdampak pada penurunan pengeluaran secara signifikan. Di sisi lain, 40% Penduduk Berpendapatan Menengah dan 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi diasumsikan juga akan mengalami penurunan pendapatan, namun dari sisi pengeluaran dimungkinkan perubahan komposisi pengeluaran yang digunakan sebagai petunjuk terjadinya perubahan tingkat kesejahteraan pada kelompok ini akan mengalami penurunan yang lebih lambat dibandingkan pada kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Terendah.

Dari asumsi di atas, maka Indeks Gini tahun 2020 diprediksi akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut selaras dengan prediksi pertumbuhan ekonomi. Pada skenario pesimis dimana pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar -2,22 persen, maka ketimpangan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta diprediksi akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2019 (0,418), yaitu sebesar 0.592.

Sedangkan pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, maka perubahan komposisi pengeluaran berupa peningkatan pengeluaran pada kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Terendah diasumsikan akan lebih cepat dibandingkan dengan penduduk pada 40% Penduduk Berpendapatan Menengah dan 20% Penduduk Berpendapatan Teratas. Dari asumsi di atas, maka angka Indeks Gini diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada skenario pesimis dimana pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 4,19 persen, maka ketimpangan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada angka 0,457.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya

mampu menyumbangkan sebesar 39,02 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 49,57 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11,41 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.655.151.581.738,- (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 552.134.779.000,- |
| b. Pendapatan Transfer | Rp 1.073.683.902.738,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 29.332.900.000,- |

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2021.

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	REALISASI			APBD Tahun Berjalan	NO.	URAIAN	Proyeksi/Target Tahun Rencana
		2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020			2021
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.659.277.141.816,66	1.736.919.997.852,52	1.765.760.418.492,27	1.885.417.118.316,00	1.	PENDAPATAN DAERAH	1.655.151.581.738,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	657.049.376.703,22	667.493.075.470,14	689.049.725.509,27	671.770.478.946,00	1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	552.134.779.000,00
1.1.1.	Pajak Daerah	426.039.934.525,00	407.573.263.422,00	451.265.948.031,00	451.106.500.000,00	1.1.1.	Pajak Daerah	369.499.600.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	38.680.069.506,00	33.984.531.787,00	32.428.343.731,00	33.813.710.477,00	1.1.2.	Retribusi Daerah	26.938.586.207,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.109.251.809,31	28.032.365.012,83	28.975.003.950,01	35.001.411.395,00	1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.846.635.879,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163.220.120.862,91	197.902.915.248,31	176.380.429.797,26	151.848.857.074,00	1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.849.956.914,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	871.360.226.464,00	867.706.455.745,00	875.308.177.702,00	908.779.706.475,00	1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.073.683.902.738,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.293.359.328,00	46.678.379.697,00	28.975.322.400,00	41.712.972.475,00	1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	887.225.475.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	700.372.564.000,00	701.377.143.000,00	1.2.2.	Transfer Antar Daerah	186.458.427.738,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	170.562.681.136,00	162.523.890.048,00	145.960.291.302,00	165.689.591.000,00			
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.867.538.649,44	201.720.466.637,38	201.402.515.281,00	304.866.932.895,00	1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.332.900.000,00
1.3.1.	Hibah	3.189.000.000,00	32.251.792.000,00	31.011.780.000,00	27.057.600.000,00	1.3.1.	Hibah	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	1.3.2.	Dana Darurat	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	118.950.538.649,44	126.437.432.637,38	133.393.876.281,00	117.026.683.895,00	1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	29.332.900.000,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	42.500.000.000,00	35.760.859.000,00	92.136.508.000,00			
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.228.000.000,00	531.242.000,00	1.236.000.000,00	68.646.141.000,00			

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020; Dengan Olahan, 2020

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang, Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2019 masih pada kisaran 49,57 persen dan PAD menyumbang sebesar 39,02 persen). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan;

7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2019, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 689,049 miliar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 105,52 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Hasil Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Tabel 3.3 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	URAIAN	2017 (Audited)			2018 (Audited)			2019 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.1.	Pajak Daerah	346.906.500.000	426.039.934.525,00	122,81	398.156.500.000	407.573.263.422,00	102,37	425.381.500.000	451.265.948.031,00	106,08
1.1.2.	Retribusi Daerah	37.522.457.605	38.680.069.506,00	103,09	33.387.993.296	33.984.531.787,00	101,79	33.451.735.712	32.428.343.731,00	96,94
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.109.251.810	29.109.251.809,31	100,00	28.013.979.674	28.032.365.012,83	100,07	28.935.929.644	28.975.003.950,01	100,14
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.170.859.251	163.220.120.862,91	113,21	154.332.031.467	197.902.915.248,31	128,23	165.242.774.274	176380429797,26	106,74
Pendapatan Asli Daerah		557.709.068.666	657.049.376.703,22	117,81	613.890.504.437	667.493.075.470,14	108,73	653.011.939.630	689.049.725.509,27	105,52

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; Dengan Olahan, 2020

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2021, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

3.2.1.2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, definisi dari Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi Dana Perimbangan pada APBD tahun 2019 relatif besar mencapai 49,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Capaian realisasi untuk DAU sebesar 100,17 persen sedangkan DAK sebesar 85,32 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	URAIAN	2017 (Audited)			2018 (Audited)			2019 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.428.848.000	42.293.359.328,00	67,75	66.079.502.000	46.678.379.697,00	70,64	46.213.757.482	28.975.322.400,00	62,70
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	658.504.186.000	658.504.186.000,00	100,00	658.504.186.000	658.504.186.000,00	100,00	699.176.894.000	700.372.564.000,00	100,17
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	183.731.513.867	170.562.681.136,00	92,83	171.973.412.993	162.523.890.048,00	94,51	171.069.860.000	145.960.291.302,00	85,32
Dana Perimbangan		904.664.547.867	871.360.226.464,00	96,32	896.557.100.993	867.706.455.745,00	96,78	916.460.511.482	875.308.177.702,00	95,51

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; Dengan Olahan, 2020

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun 2021 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2021 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu TA 2020, TA 2019 dan TA 2018; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2021;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHTTA 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2021 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu TA 2020, TA 2019 dan TA 2018; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2021;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2021 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2020;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2021. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, nilai pendapatan ini mencapai 201,402 miliar rupiah dengan capaian target sebesar 108,69 persen.

Tabel 3.5 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	URAIAN	2017 (Audited)			2018 (Audited)			2019 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3.1.	Hibah	1.815.000.000	3.189.000.000,00	175,70	28.299.400.000	32.251.792.000,00	113,97	30.078.600.000	31.011.780.000,00	103,10
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	113.534.689.278	118.950.538.649,44	104,77	117.026.683.895	126.437.432.637,38	108,04	118.220.579.275	133.393.876.281,00	112,83
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000	7.500.000.000,00	100,00	42.500.000.000	42.500.000.000,00	100,00	35.760.859.000	35.760.859.000,00	100,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.228.000.000	1.228.000.000,00	100,00	531.242.000	531.242.000,00	100,00	1.236.000.000	1.236.000.000,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		124.077.689.278	130.867.538.649,44	105,47	188.357.325.895	201.720.466.637,38	107,09	185.296.038.275	201.402.515.281,00	108,69

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; Dengan Olahan, 2020

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2021;
2. Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2021;
3. Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2021. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2021 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2021, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2019;
4. Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis

belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung tahun 2019 masih pada kisaran 41,33 persen, sedangkan proporsi Belanja Langsung mencapai 58,67 persen. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 35,96 persen terhadap total Belanja Daerah dan 87,00 persen terhadap Belanja Tidak Langsung. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Tabel 3.6 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	URAIAN	2017 (Audited)			2018 (Audited)			2019 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.1.	Belanja Tidak Langsung	676.448.297.294	595.046.560.332,00	87,97	747.082.418.932	699.175.722.721,00	93,59	775.963.952.168,52	716.969.657.199,00	92,40
2.1.1.	Belanja Pegawai	605.384.395.410	534.485.736.910,00	88,29	660.805.889.712	635.124.320.919,00	96,11	667.465.772.253,00	623.730.246.194,00	93,45
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	63.603.861.400	57.686.171.498,00	90,70	69.020.358.500	53.665.425.050,00	77,75	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.890.400.000	1.384.850.000,00	73,26	8.801.300.000	7.764.735.000,00	88,22	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kepada Partai Politik	1.244.662.418	1.241.353.418,00	99,73	2.328.000.498	2.328.000.498,00	100,00	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	98,92
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.324.978.066	248.448.506,00	5,74	6.126.870.222	293.241.254,00	4,79	8.227.812.190,52	317.693.064,00	3,86
2.2.	Belanja Langsung	989.747.488.381	889.874.138.794,17	89,91	1.048.587.110.262	953.552.120.802,91	90,94	1.167.976.204.978,00	1.017.623.678.662,34	87,13
2.2.1.	Belanja Pegawai	174.032.215.976	167.895.327.433,88	96,47	133.713.028.722	132.107.387.708,85	98,80	163.392.184.600,00	136.801.816.234,28	83,73
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.374.265.916	427.664.724.387,69	85,98	541.440.849.688	496.351.994.037,57	91,67	617.496.329.981,00	553.387.490.228,89	89,62
2.2.3.	Belanja Modal	318.341.006.489	294.314.086.972,60	92,45	373.433.231.852	325.092.739.056,49	87,06	387.087.690.397,00	327.434.372.199,17	84,59
	Belanja Daerah	1.666.195.785.675	1.484.920.699.126,17	89,12	1.795.669.529.194	1.652.727.843.523,91	92,04	1.943.940.157.146,52	1.734.593.335.861,34	89,23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; Dengan Olahan, 2020

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

3.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2018;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

2. Belanja Bunga

Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

3. Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

4. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

5. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

6. Belanja Bagi Hasil

Untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2020 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.

8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Belanja Langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender;
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis; dan
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	REALISASI			APBD Tahun Berjalan	NO.	URAIAN	Proyeksi/Target Tahun Rencana
		2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020			2021
2.	BELANJA DAERAH	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	1.998.768.133.912	2.	BELANJA DAERAH	1.689.344.342.984,20
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	595.046.560.332,00	699.175.722.721,00	716.969.657.199,00	796.666.565.084	2.1.	BELANJA OPERASI	1.522.744.916.250,20
2.1.1.	Belanja Pegawai	534.485.736.910,00	635.124.320.919,00	623.730.246.194,00	681.991.005.406	2.1.1.	Belanja Pegawai	679.604.851.844,20
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	685.131.781.788,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	2.1.3.	Belanja Bunga	-
2.1.4.	Belanja Hibah	57.686.171.498,00	53.665.425.050,00	79.389.047.945,00	62.515.172.200	2.1.4.	Belanja Subsidi	-
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.384.850.000,00	7.764.735.000,00	11.551.423.000,00	47.341.295.000	2.1.5.	Belanja Hibah	110.019.897.618,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	47.988.385.000,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1.241.353.418,00	2.328.000.498,00	1.981.246.996,00	1.319.092.478			
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	248.448.506,00	293.241.254,00	317.693.064,00	3.500.000.000	2.2.	BELANJA MODAL	162.506.655.454,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	889.874.138.794,17	953.552.120.802,91	1.017.623.678.662,34	1.202.101.568.828	2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
2.2.1.	Belanja Pegawai	167.895.327.433,88	132.107.387.708,85	136.801.816.234,28	138.163.800.611			
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	427.664.724.387,69	496.351.994.037,57	553.387.490.228,89	723.991.264.203	2.4.	BELANJA TRANSFER	592.771.280,00
2.2.3.	Belanja Modal	294.314.086.972,60	325.092.739.056,49	327.434.372.199,17	339.946.504.014	2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-
						2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	592.771.280,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020; Dengan Olahan, 2020

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	REALISASI			APBD Tahun Berjalan	NO.	URAIAN	Proyeksi/Target Tahun Rencana
		2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020			2021
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.654.486.141,87	262.150.761.112,36	226.448.050.491,52	153.831.015.596,00	3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.672.761.246,20
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117.651.486.141,87	254.103.922.554,36	226.442.324.759,52	153.831.015.596,00	3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	74.672.761.246,20
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	8.044.288.558,00	-	-	3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000,00	2.550.000,00	5.725.732,00	-	3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.907.006.278,00	119.900.590.681,45	37.275.000.000,00	40.480.000.000,00	3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.480.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	37.907.006.278,00	63.861.759.721,45	37.275.000.000,00	40.480.000.000,00	3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	40.480.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	56.038.830.960,00	-	-	3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Dan Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-	3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
						3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-
	Pembiayaan Netto	79.747.479.863,87	142.250.170.430,91	189.173.050.491,52	113.351.015.596,00		Pembiayaan Netto	34.192.761.246,20
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	254.103.922.554,36	226.442.324.759,52	220.340.133.122,45	-		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020; Dengan Olahan, 2020

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.655.151.581.738,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	552.134.779.000,00
1.1.1.	Pajak Daerah	369.499.600.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	26.938.586.207,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.846.635.879,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.849.956.914,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.073.683.902.738,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	887.225.475.000,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	186.458.427.738,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.332.900.000,00
1.3.1.	Hibah	-
1.3.2.	Dana Darurat	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	29.332.900.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.655.151.581.738,00
2.	BELANJA DAERAH	1.689.344.342.984,20
2.1.	BELANJA OPERASI	1.522.744.916.250,20
2.1.1.	Belanja Pegawai	679.604.851.844,20
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	685.131.781.788,00
2.1.3.	Belanja Bunga	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-
2.1.5.	Belanja Hibah	110.019.897.618,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	47.988.385.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	162.506.655.454,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
2.4.	BELANJA TRANSFER	592.771.280,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	592.771.280,00
	Jumlah Belanja	1.689.344.342.984,20
	Surplus/(Defisit)	(34.192.761.246,20)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.672.761.246,20
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	74.672.761.246,20
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	74.672.761.246,20
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.480.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	40.480.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.480.000.000,00
	Pembiayaan Netto	34.192.761.246,20
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Sumber: Hasil Olahan, 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan DIY untuk menjamin sinergisitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

Rencana kerja ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. RKPD merupakan dokumen secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD;
2. RKPD merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program APBD; dan
3. RKPD berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 diturunkan dari visi dan misi. Visi Kota Yogyakarta untuk perencanaan jangka menengah tahun 2017-2022 adalah: **Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan.** Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta dan hubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	1. Kemiskinan masyarakat menurun
		2. Keberdayaan masyarakat meningkat
		3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta	2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta	4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
		5. Pertumbuhan ekonomi meningkat
3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	3. Meningkatkan moral, etika dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun

Misi	Tujuan	Sasaran
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya	4. Meningkatkan Kualitas pendidikan dan kesehatan	7. Kualitas pendidikan meningkat
		8. Harapan hidup masyarakat meningkat
5. Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan	5. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	6. Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan	10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
6. Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman	7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	11. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	8. Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	12. Infrastruktur wilayah meningkat
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	9. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

4.2. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

No	Indikator	Target 2021		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,7	5,31	5,21
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,1	2,24	4,90
3.	Indeks Gini	0,372-0,375	0,3705	0,395
4.	IPM (%)	73,3	81,40	85
5.	Angka Kemiskinan (%)	8,0-8,5	8,07	6,00

Sumber : RPJMN 2020-2024, RPJMD DIY 2017-2022 dan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Target yang tertera dalam tabel di atas tercantum dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD DIY 2017-2022 dan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022. Namun dengan ditetapkannya *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) sebagai pandemi global semenjak tanggal 11 Maret 2020, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sampai saat ini cukup terdampak, maka perlu adanya penyesuaian dalam penentuan target pembangunan.

Penyesuaian sasaran dan target pembangunan nasional Tahun 2021 sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Penyesuaian Sasaran dan Target RKP 2021

No.	Indikator	Proyeksi Tahun 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5 – 8,2
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7
4.	Rasio Gini	0,377-0,379
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 – 72,90

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020

Penyesuaian target pembangunan DIY disusun berdasarkan 3 skenario, yaitu skenario pesimis, moderat, dan optimis.

Tabel 4.4 Asumsi Makro dan Penyesuaian Target RKPD DIY 2020-2021

No.	Indikator	2020			2021			2022		
		Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,5	2,3	3,1	4,2	5,2	6,0	n/a	5.34	n/a
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	13,37	12,71	12,42	11,6	11,5	11,47	11,40	11,25	11,05
3.	Rasio Gini	0,516	0,494	0,487	0,454	0,445	0,438	0,400	0,390	0,375
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79.79	80,19	80,63	80,42	80,83	81,26	81,06	81,46	81,90

Sumber: DIY, 2020

Penyesuaian target dalam RKP maupun RKPD DIY menjadi dasar bagi Kota Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian target pada sasaran makro.

4.2.1. Penyesuaian Target Pertumbuhan Ekonomi

Kota Yogyakarta memiliki PDRB yang didominasi oleh sektor informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan dan juga penyedia akomodasi dan makan minum. Dua sektor terakhir, yang besarnya melebihi 30%, merupakan sektor utama pariwisata. Oleh karena itu, jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh terhadap nilai sektor tersebut. Ekonomi di Kota Yogyakarta berjalan seiring pergerakan jumlah kunjungan wisata.

Pandemik Covid-19 di tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan bagi Kota Yogyakarta. *Social Distancing* yang menjadi upaya dalam penanggulangan Covid-19 berdampak besar pada pengurangan aktivitas luar rumah termasuk kunjungan wisata. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta menyebabkan penurunan sektor riil, berakibat langsung pada keuangan daerah Kota Yogyakarta terutama pada Industri Hotel Restoran. Hal yang menyebabkan penurunan pendapatan pada Industri tersebut, mengakibatkan pula penurunan pendapatan bagi pekerja dan masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata serta pekerja sektor informal pariwisata lainnya. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 yang diproyeksikan hingga -2,22 persen mendapatkan pengaruh besar dari

penurunan di sektor akomodasi dan makan minum serta industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa perusahaan. Sektor yang diproyeksikan tumbuh positif adalah sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Sedangkan pada tahun 2021, semua sektor diprediksi tumbuh positif. Selain sektor Akomodasi dan Makan Minum, sektor lain yang akan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan. Dengan asumsi sesuai analisa di bab III, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 Kota Yogyakarta diproyeksikan pada angka 4.19%.

4.2.2. Penyesuaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT di Kota Yogyakarta. Prosentase jumlah tenaga kerja tahun 2019 dari sektor akomodasi dan makan minum adalah 20% dan sektor industri pengolahan sebesar 15%. Dengan melihat persentase yang cukup besar pada kedua sektor tersebut maka, penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak signifikan pada penambahan TPT di Kota Yogyakarta pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik dari tahun 2020 seiring dengan meningkatnya proyeksi jumlah kunjungan wisata, maka angka pengangguran akan mengalami penurunan. Angka pengangguran diprediksi semakin menurun dibandingkan tahun 2020 dengan target TPT adalah 6,13% pada tahun 2021.

4.2.3. Penyesuaian Persentase Penduduk Miskin

BPS dalam perhitungan kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan konsep tersebut, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Penurunan pendapatan akibat dari pandemik Covid-19 memberikan dampak pada daya beli masyarakat, yaitu terjadinya penurunan ekonomi terutama dari sektor pengeluaran rumah tangga (household expenditure). Penduduk miskin baru di tahun 2020 didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah yang masuk dalam sektor-sektor

terdampak besar pada tahun tersebut. Sektor tersebut adalah sektor akomodasi dan makan minum serta sektor industri pengolahan, yang sebagian besar merupakan 40% penduduk dengan pendapatan terendah, di mana merupakan kelompok rawan miskin. Pada tahun 2021, seiring dengan membaiknya prediksi pertumbuhan ekonomi maka prediksi persentase penduduk miskin juga akan mengalami penurunan. Seiring membaiknya kedua sektor tersebut, penduduk miskin baru ini pulalah yang akan melakukan recovery dengan lebih cepat daripada penduduk miskin yang sebelumnya memang tidak memiliki lahan pekerjaan, sehingga angka kemiskinan turun signifikan walaupun belum bisa kembali di angka tahun 2019 yaitu di angka 10,17% di tahun 2021.

4.2.4. Prediksi Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

Gini Ratio menjadi alat ukur pemerataan distribusi pendapatan perkapita. Nilainya di kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir semakin turun, yang berarti tingkat ketimpangan penduduk semakin kecil. Nilai ini dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antarkelompok penduduk, apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan mengecil.

Pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, diprediksi jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan meningkat, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Dampak pengurangan atau hilangnya pendapatan pada 40% penduduk dengan pendapatan terendah akan berdampak pada penurunan pengeluaran secara signifikan. Sedangkan penduduk pada 40% pendapatan menengah dan 20% pendapatan atas diasumsikan juga akan mengalami penurunan pendapatan, namun lebih lambat dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah.

Dari asumsi di atas, maka diprediksi pada tahun 2020 angka gini ratio akan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan maka perubahan komposisi pengeluaran berupa peningkatan pengeluaran pada kelompok 40% pendapatan terendah diasumsikan akan lebih cepat dibandingkan dengan penduduk pada 40% pendapatan menengah dan 20% pendapatan atas. Maka angka gini ratio diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, dengan angka pertumbuhan ekonomi pada angka 4,19%, ketimpangan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta diprediksi akan mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu pada angka 0,457.

Tabel 4.5 Penyesuaian Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Penyesuaian Target 2021		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	4,2-6,0	4,19
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5-8,2	3,69-4,80	6,13
3.	Indeks Gini	0,377-0,379	0,454-0,439	0,457
4.	IPM	72,78-72,90	80,42-81,26	85
5.	Angka Kemiskinan (%)	9,2-9,7	11,47-11,60	10,17

Sumber : Rancangan RKP 2020, DIY 2020, dan Analisis Bappeda, 2020

4.3. Tema Pembangunan

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2021. Tema RKP untuk tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dengan Fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2021, yaitu **“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”**. Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi: Pariwisata, Tenaga kerja, Investasi, Industri, Sosial dan Kesehatan.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah: **“Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Percepatan pemulihan:** dimaknai sebagai segala upaya dan hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi yang ada, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan yang terjadi dan kembali kepada target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kota;
2. **Sosial Ekonomi:** Dimaknai bahwa Bidang Sosial Ekonomi yang mengalami penurunan di tahun 2020 harus dipulihkan. Dua bidang ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kestabilan pertumbuhan ekonomi kota perlu dijaga melalui pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Kondisi Sosial Ekonomi menjadi penentu terbentuknya kondisi kota secara keseluruhan, didukung dengan infrastruktur dan bidang lainnya; dan
3. **Kesejahteraan masyarakat:** Dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat kota, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial

ekonominya. Tujuan utama dari usaha percepatan pemulihan sosial ekonomi adalah Kesejahteraan Masyarakat. Semua kelompok masyarakat, membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya.

4.4. Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta

Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2021 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta. Percepatan pemulihan sosial ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni. Dengan mempertahankan standart pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih mengkondisikan masyarakat untuk tetap menjaga kualitas sumber daya manusia.

Etos kerja berkemajuan yang cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi tetap terjaga dan meningkat, menciptakan rasa aman dan mencerahkan. Demikian pula berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menjadi modal sosial masyarakat dalam menghadapi kondisi yang terjadi akibat pandemi di tahun 2020.

Gerakan gendeng gendong, sinergi dan penumbuhan partisipasi dari segenap 5 komponen (Kota, Kampung, Kampus, Korporasi serta Komunitas) serta kerja sama antar kabupaten dan kota lain dibutuhkan untuk pemulihan sosial serta ekonomi.

Kota Yogyakarta berkembang sebagai pusat pelayanan jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi, komunikasi serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang unggul secara komparatif dan kompetitif. Sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utama, gerbang utama pertumbuhan ekonomi kota yang mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.

Pemulihan pekonomian akan menggerakkan pembangunan, memberikan manfaat bukan hanya bagi penduduk kota juga bagi pendatang, yang juga merupakan para pelaku mayoritas di sektor pendidikan, pariwisata, dan perdagangan.

Selain itu, dibangun sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi terbangun untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan sarana prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai untuk aktifitas warga memberikan ruang yang kondusif untuk nilai dan aktifitas sosial budaya.

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, menjunjung nilai keistimewaan, menguatkan identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan. Dan menguatkan identitas

kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam Kerja sama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

4.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2021 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan di bawah ini. PN dalam RKP 2021 penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas pembangunan DIY adalah:

1. Pembangunan Manusia Unggul;
2. Aktivitas Perekonomian Berkelanjutan;
3. Penguatan infrastruktur strategis; dan
4. Pendukung prioritas pembangunan.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota, dan Lingkungan; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan

Kebijakan ini ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tata Kota didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

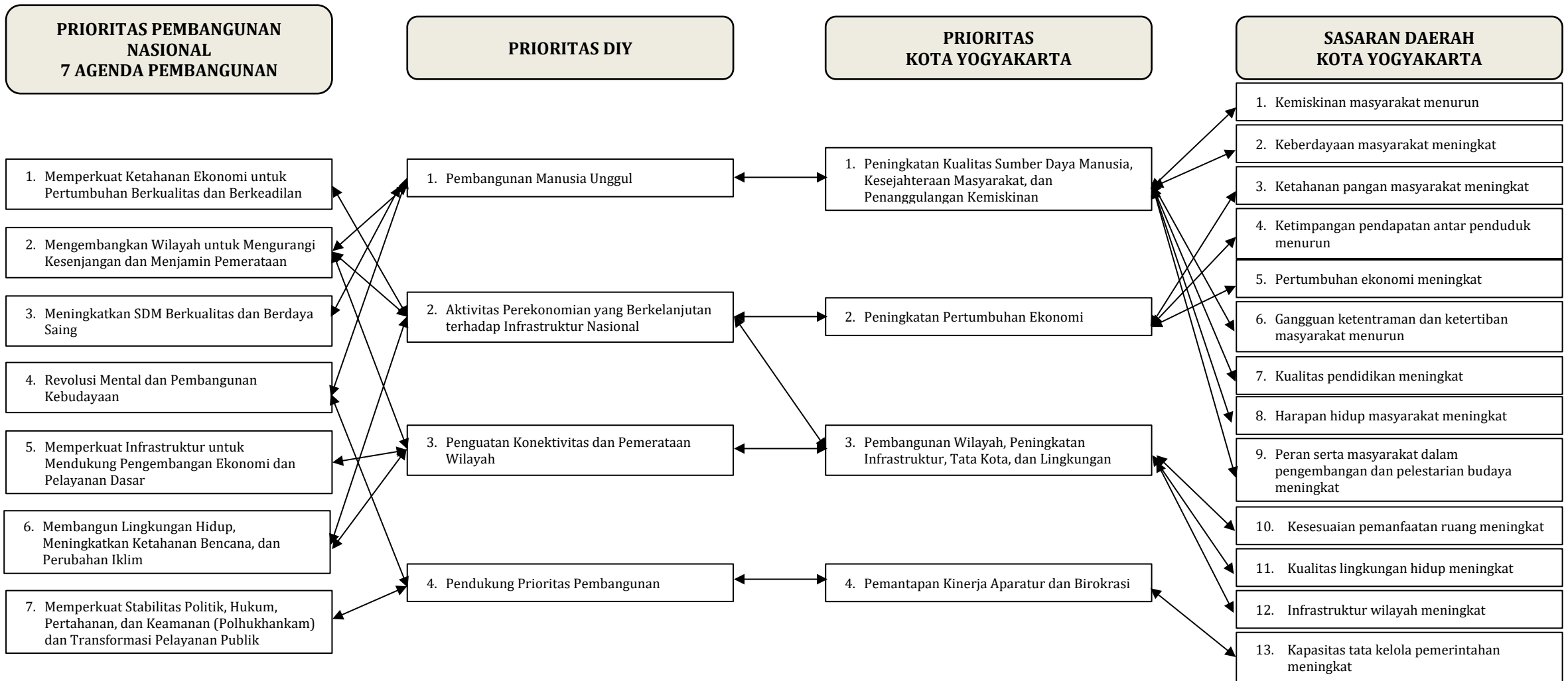
4. Pemanjapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparaturn dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparaturn dalam mendukung pembangunan.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Keberdayaan masyarakat meningkat;
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
7. Kualitas pendidikan meningkat;
8. Harapan hidup masyarakat meningkat;
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;
11. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
12. Infrastruktur wilayah meningkat; dan
13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta

4.6. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2021

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	10,17
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	63,87
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	87,6
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,457
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	4,19%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	975
		Jumlah pelanggaran Perda	4.250
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,45 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,30 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,58 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	67%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,6%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,44
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	43,36
13	Kapabilitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022; Hasil Analisis, 2020

4.6.1. Kemiskinan Masyarakat Menurun

Sasaran daerah Kemiskinan Masyarakat Menurun dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.2 Kerangka Logis untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kemiskinan Masyarakat Menurun diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
1.	Kemiskinan masyarakat menurun	Perlindungan Sosial	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jaminan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPKP; Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pendapatan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penguatan Data dan Informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian; Bappeda; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penguatan TKPK	Bappeda; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat

Sasaran daerah Keberdayaan Masyarakat Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.3 Kerangka Logis untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Keberdayaan Masyarakat Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
2.	Keberdayaan masyarakat meningkat	Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kampung	DP3AP2KB; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; BPBD; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas PUPKP; 14 Kemantren

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
		Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB
		Perlindungan Anak	DP3AP2KB; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	DP3AP2KB; Bagian Tata Pemerintahan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Sasaran daerah Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.4 Kerangka Logis untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
3.	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas PUPKP
		Pembinaan Pola Konsumsi Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penguatan Distribusi Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perdagangan; Dinas PUPKP
		Pembinaan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; DP3AP2KB; Bagian Kesra; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Sasaran daerah Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.5 Kerangka Logis untuk Penurunan Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
4.	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Peningkatan Kesejahteraan anggota Koperasi dan pelaku UKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Kesehatan
		Penempatan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian dan Pangan; 14 Kemantren; Dinas PUPKP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Sasaran daerah Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.6 Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Pertumbuhan Ekonomi Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
5.	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Peningkatan Ekonomi Sektor Jasa Pariwisata	Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); 14 Kemantren
		Peningkatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perdagangan
		Peningkatan Ekonomi Sektor Industri	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
		Peningkatan Infrastruktur	Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan
		Perizinan dan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas PUPKP
		Stabilitas Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun

Sasaran daerah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.7 Kerangka Logis untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
6.	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Upaya Pencegahan (Preventif)	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB; Bagian Kesejahteraan Rakyat; 14 Kemantren
		Upaya Penindakan (Represif)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.7. Kualitas Pendidikan Meningkat

Sasaran daerah Kualitas Pendidikan Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.8 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kualitas Pendidikan Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
7.	Kualitas pendidikan meningkat	Pendidikan SD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
		Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; 14 Kemantren
		Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; DP3AP2KB
		Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Pemenuhan Standar dan Sarpras Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas PUPKP
		Penguatan Data dan Informasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengembangan Budaya Literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Pariwisata; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran daerah Harapan Hidup Masyarakat Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.9 Kerangka Logis untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Harapan Hidup Masyarakat Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
8.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; DP3AP2KB; 14 Kemantren
		Peningkatan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
		Pencegahan dan Pengendalian penyakit	Dinas Kesehatan
		Regulasi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Data dan Sistem Informasi	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB
		Pengembangan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan; DPUPKP; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan

Sasaran daerah Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.10 Kerangka Logis untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.15 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
9.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Pelestarian Budaya Benda (<i>Tangible</i>)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas PUPKP; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pelestarian Budaya Tak Benda (<i>Intangible</i>)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Pariwisata; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.10. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat

Sasaran daerah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.11 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
10.	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pelaksanaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas PUPKP
		Penguatan Sistem Informasi Geospasial	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.11. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran daerah Kualitas Lingkungan Hidup memiliki Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung dengan formula:

$$\text{IKLH} = 30\% \text{ Indeks Kualitas Udara (IKU)} + 30\% \text{ Indeks Kualitas Air (IKA)} + 40\% \text{ Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)}.$$

Gambar berikut memperlihatkan kerangka logis untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.12 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.17 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
11.	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja;
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan; 14 Kemantren; Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.12. Infrastruktur Wilayah Meningkat

Sasaran daerah Infrastruktur Wilayah Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.13 Kerangka Logis untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Infrastruktur Wilayah Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.18 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
12.	Infrastruktur wilayah meningkat	Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPKP
		Peningkatan Infrastruktur Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan	BPBD; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Partisipasi Masyarakat	14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.6.13. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sasaran daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.14 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.19 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
13.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Bagian Tapem; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Administrasi dan Keuangan; Sekretariat Semua OPD
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BPKAD; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandjkoala Sarta Tata Sasana); Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah; Dinas PUPKP
		Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Organisasi
		Penguatan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Penataan Peraturan Perundangan	Bagian Hukum; Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Dinas Dukcapil; Dinas Kominfo dan Persandian; Bagian Organisasi; Bagian Umum dan Protokol; 14 Kemantren
		Penguatan Inovasi	Bappeda
		Pengembangan E-Gov	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4.7. Sinkronisasi dengan Tematik Pembangunan DIY 2021

4.7.1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan

Dukungan Kota Yogyakarta terhadap Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok yang menjadi wadah kegiatan pembangunan yang menyoar penurunan kemiskinan dilakukan dengan berbagai program yang langsung menyoar pada kemiskinan serta pelayanan akan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu: perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan khusus anak, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera untuk berbagai Kelompok Bina Sejahtera, serta peningkatan kawasan permukiman kumuh. Selain itu juga menjamin ketersediaan serta pengendalian harga bahan pokok, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, pendidikan, pendaftaran penduduk, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dukungan tersebut dilakukan di Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dindikcapil, serta 14 Kecamatan.

Tematik pembangunan DIY ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan.

4.7.2. Penurunan Ketimpangan Wilayah

Penurunan Ketimpangan Wilayah yang mewadahi kegiatan pembangunan yang menyoar penurunan ketimpangan (pemerataan, peningkatan infrastruktur) di DIY, didukung oleh program kegiatan yang direncanakan Kota Yogyakarta di tahun 2021, yaitu: penempatan transmigrasi, penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, pengembangan UMKM, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM. Selain itu juga program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Penyelenggaraan jalan serta pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dukungan ini dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Tematik pembangunan DIY ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota, dan Lingkungan.

4.7.3. Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan

Tematik pembangunan DIY ini didukung oleh Kota Yogyakarta yaitu dengan program penyelenggaraan penataan ruang, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta pengembangan UMKM, dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan serta Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tematik pembangunan DIY ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota, dan Lingkungan.

4.7.4. Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 yang menjadi tematik pembangunan DIY yang keempat ini, yang mewadahi kegiatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada sektor Kesehatan, pariwisata, industri dan investasi sebagai sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19.

Dukungan tematik pembangunan ini menitikberatkan pada pasca pandemi Covid-19, dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat di 14 kecamatan, 45 kelurahan

Tematik ini sejalan dengan tema pembangunan kota Yogyakarta dan didukung oleh prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan.

4.8. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2021, Kota Yogyakarta melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2021

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		2. Pendidikan Dasar		
		3. Pendidikan Kesetaraan		

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
2	Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Kesehatan
		2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin		
		3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
		4. Pelayanan kesehatan balita		
		5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
		6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
		7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		
		8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
		9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		
		10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
		11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)		
		yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif		
3	Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Satpol PP
		2. Pelayanan informasi rawan bencana		BPBD
		3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana		
		5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		
		3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti		
		4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
		5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		

Sumber: Analisis, 2020

4.9. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2021 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

4.8.1. Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta 2021;
2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kota Yogyakarta; dan
4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta yang lebih baik.

4.8.2. Rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2021

Rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan
 - a. Peningkatan Pendidikan Masyarakat
 - 1) Pengalokasian anggaran untuk fasilitas pendukung PAUD di wilayah Kota Yogyakarta;
 - 2) Dukungan bagi warga yang tidak mampu dalam mengambil IJAZAH dikarenakan tidak mampu membayar SPP;
 - 3) Pendampingan untuk perpustakaan kampung;
 - 4) Optimalisasi dan sosialisasi yang tepat untuk dana Jaminan Pendidikan Daerah (JPD);
 - 5) Bantuan Pendidikan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar dalam KMS; dan

- 6) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) DIKLAT Pengelolaan Administrasi Lembaga.
- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - 1) Program Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di tingkat masyarakat;
 - 2) Pembinaan Kader POSYANDU serta pemberian makanan tambahan POSYANDU yang memperhatikan standar gizi bagi balita dan lansia;
 - 3) Pembekalan bagi kader RW Siaga maupun Posbindu serta pelatihan yang terkait dengan deteksi dini penyakit maupun tumbuh kembang anak bagi masyarakat;
 - 4) Penanganan untuk segera menindak apotek-apotek ilegal agar segera ditutup karena cukup meresahkan masyarakat;
 - 5) Penyediaan obat dan SDM dokter untuk pemeriksaan rutin POSYANDU Lansia; dan
 - 6) Sosialisasi terkait Jaminan Kesehatan di wilayah.
 - c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Pelatihan dan pembinaan keterampilan maupun pembudidayaan yang dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan perokomian masyarakat;
 - 2) Pelatihan marketing online untuk memasarkan produk masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat;
 - 3) Penggalan potensi kampung dan pemberian stimulan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Pendampingan bagi kampung yang belum memiliki branding kampung;
 - 5) Pelatihan pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah limbah serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian masyarakat.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja
 - 1) Pemberian bibit tanaman, sayur, maupun ikan konsumsi dalam mendukung budidaya masyarakat sebagai bentuk peningkatan perekonomian masyarakat;
 - 2) Pendampingan serta pengembangan kampung wisata yang ada di lingkungan Kota Yogyakarta agar lebih terkonsep dengan baik;

- 3) Intergrasi antar kampung untuk memperkuat branding kampung dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;
 - 4) Mempermudah syarat pendaftaran program Gandeng-Gendong oleh masyarakat, serta dukungan berupa pendampingan maupun pelatihan bagi masyarakat; dan
 - 5) Pendampingan berupa bantuan modal usaha bagi masyarakat yang disinergikan dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota, dan Lingkungan
- a. Pengembangan potensi ekonomi kewilayahan
 - 1) Pengembangan Ekowisata di beberapa titik lokasi bantaran sungai dengan upayanya dalam meningkatkan Kawasan kuliner maupun kerajinan serta peningkatan daya tarik wisata di Kota Yogyakarta.
 - b. Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah
 - 1) Pengerasan jalan untuk wilayah yang membutuhkan supaya memperlancar akses distribusi serta sebagai pengembangan pusat-pusat perekonomian di wilayah;
 - 2) Peningkatan serta perbaikan saluran pembuangan air limbah (SPAL) maupun saluran pembuangan air hujan (SPAH);
 - 3) Peningkatan dan perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung;
 - 4) Pendampingan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - 5) Pemasangan hidran kebakaran air di permukiman padat penduduk sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat; dan
 - 6) Pengadaan pagar pengaman tebing di lokasi yang membahayakan bagi masyarakat.
 - c. Pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta
 - 1) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang sudah ada untuk dapat dioptimalkan agar bermanfaat bagi masyarakat.
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat
 - 1) Optimalisasi pengelolaan persampahan di lingkungan Kota Yogyakarta; dan
 - 2) Pengelolaan air hujan yang tepat guna di setiap wilayah agar bermanfaat bagi masyarakat.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
 - a. Peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan
 - 1) Pengelolaan pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang mencakup beberapa instansi untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak meninggalkan indikator dan target yang tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program, kegiatan, sub kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2021. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Selain SPM, *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang sudah menjadi komitmen bersama dengan DIY, konsep *money follow program* yang merupakan pendekatan untuk penganggaran yang berdasar pada prioritas program, serta konsep kota Yogyakarta sebagai *smart city* juga disinkronisasikan dalam proses perencanaan.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 baik indikator sasaran maupun program, yang sinkron dengan rencana Perjanjian Kinerja tahun 2021. Pengampu sub kegiatan dan program bersifat dinamis dan dapat berubah menyesuaikan dengan peraturan walikota mengenai SOTK yang akan ditetapkan lebih lanjut. Usulan juga memperhatikan hal-hal strategis sesuai dengan ketugasan OPD masing-masing. Sedangkan usulan pada sub kegiatan dan output

sesuai urutan prioritas, yang nantinya juga bisa menjadi dasar pemilihan saat terjadi efisiensi pada output maupun target, ketika ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2021. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2021 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Di sisi lain, dalam RKPD juga memuat mengenai program dan kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Dalam hal ini, nomenklatur program Dana Keistimewaan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan yang kemudian disesuaikan dengan nomenklatur program Pemerintah Kota Yogyakarta. Berikut rekapitulasi perbandingan nomenklatur program berdasarkan Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan dan nomenklatur program Kota Yogyakarta.

Tabel 5.1 Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

No.	OPD	NAMA PROGRAM (RPJMD DIY)	NAMA PROGRAM (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	Kegiatan	KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	SUB KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	KELUARAN		USULAN ANGGARAN	KETERANGAN
							TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN TATA RUANG										
1	DPUPKP Kota Yogyakarta	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pedestrian Jalan Senopati	2400 m2	16.231.000.000	16.231.000.000 (Pedestrian Jl. Senopati)
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru						
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Gamedia-Bethesda)	5500 m2	20.374.743.000	
2	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (UPT Malioboro)	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara fisik selama 12 bulan:	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km	7.297.685.000	Pengolahan sampah oleh pihak ke 3
							a. Street furniture			
							b. Vegetasi			
							c. Limbah			
							d. Kelistrikan			
							e. Air			
							f. Peralatan pendukung tenaga pemeliharaan			
							g. Prasarana pendukung kawasan			
							h. penjagaan kawasan malioboro			
							i. Pemeliharaan Kebersihan			
							j. Pemeliharaan jalan/pemolesan teraso			

No.	OPD	NAMA PROGRAM (RPJMD DIY)	NAMA PROGRAM (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	Kegiatan	KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	SUB KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	KELUARAN		USULAN ANGGARAN	KETERANGAN
							TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2. Komunikasi antara Pemkot Yogyakarta dengan komunitas kawasan Malioboro	Terfasilitasinya komunikasi antara pemerintah kota Yogyakarta dengan komunitas di kawasan Malioboro		
3	DLH Kota Yogyakarta	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Mangkubumi-Pangurakan:	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Mangkubumi-Pangurakan	810.073.000	Usulan baru menindaklanjuti hasil BPK 1075681494,40
							a. Street furniture			
							b. Vegetasi			
							c. Air			
							d. Peralatan pendukung tenaga pemeliharaan			
e. Prasarana pendukung kawasan										
			Program Pengelolaan Persampahan	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Pengelolaan sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2. Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Kawasan Tugu Golong Gilig, Jl. Mangkubumi dan Jl. Pangurakan dan Alun-alun Utara secara fisik selama 12 bulan:	Sarana dan prasarana kawasan	1.075.682.000	
							a. Peralatan pendukung tenaga pemeliharaan			
							b. Prasarana pendukung kawasan			
JUMLAH									45.789.183.000	

No.	OPD	NAMA PROGRAM (RPJMD DIY)	NAMA PROGRAM (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	Kegiatan	KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	SUB KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	KELUARAN		USULAN ANGGARAN	KETERANGAN
							TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN PERTANAHAN										
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Pertanahan	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional 2. Identifikasi 75 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di kota yogyakarta	1. 100 Bidang 2. 1 dokumen	456.340.000	- Pengurangan Target Papan Nama dan penambahan jumlah identifikasi Tanah Kasultanan/Kadipaten
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Program Penatagunaan Tanah	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta	100%	244.000.000	200 rekom
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Penanganan Sengketa Pertanahan untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyelesaian Masalah/Sengketa Tanah	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Fasilitasi rekomendasi penanganan permasalahan tanah Kasultanan dan Kadipaten	100%	125.000.000	50 Rekom
JUMLAH									825.340.000	
URUSAN KEBUDAYAAN										
1	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kajian Sejarah	3 Kajian	956.300.000	
							Lawatan Sejarah	1 event		
							Lomba Cerdas Cermat Sejarah	1 event		
							Peringatan Hari-hari Sejarah	3 event		
						Penyediaan Sarana dan Prasarana	1. Kompetisi Bahasa dan sastra	8 Jenis lomba	836.444.900	
	2. Pagelaran Karya Bahasa dan Sastra	15 kali								

No.	OPD	NAMA PROGRAM (RPJMD DIY)	NAMA PROGRAM (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	Kegiatan	KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	SUB KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	KELUARAN		USULAN ANGGARAN	KETERANGAN
							TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Pembinaan Sejarah	3. Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa 4. Festival Sastra Yogyakarta	8 Kali 1 event		
			Program Pengelolaan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Fasilitasi Komunitas Museum Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Sarasehan Permuseuman Jumpa Sahabat Museum Jogja Museum Expo	1 Event 1 Komunitas 1 Kali 4 event 1 Event	892.262.580	
2	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	Program Pelestraian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Penetapan WBCB (TACB Kota Yogyakarta) Rekomendasi Pelestarian WBCB (TP2WB Kota Yogyakarta) Travel Heritage Rehab BCB dan BWB Publikasi Pusat Informasi Kalang Kajian Warisan Budaya	20 Naskah 120 Rekomendasi 1 Kali 2 bangunan 1 paket 2 Dokumen	3.222.832.480	
3	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (RKB)	Peningkatan SDM Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) Digitalisasi Profil Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	3 kali 1 kali 1 dokumen	364.686.380	
				Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (DIY-Kyoto)	Lomba Lukis DIY-Kyoto	20 karya terseleksi	100.000.000	

No.	OPD	NAMA PROGRAM (RPJMD DIY)	NAMA PROGRAM (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	Kegiatan	KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	SUB KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	KELUARAN		USULAN ANGGARAN	KETERANGAN	
							TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Misi)	Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) (Jawa)	1 kali	1.267.169.540		
		Jogja Mandiri Expo (Kalimantan dan Sumatera)					2 kali				
		Gelar Seni Budaya Yogyakarta (TMII)					1 kali				
		Festival Sriwijaya (Palembang)					1 kali				
		Parade Musik Daerah					1 kali				
			PENGHARGAAN SENIMAN DAN BUDAYAWAN	PENGHARGAAN Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan (Penghargaan)	PENGHARGAAN Seniman, Budayawan, Pelestari Warisan Budaya dan Bangunan Cagar Budaya	6 Orang untuk semua kategori	250.000.000			
		Festival Kebudayaan Yogyakarta								1.000.000.000	
		Pentas Seni FKY Tingkat Kota									5 hari
		Dukungan untuk FKY Tingkat DIY: Pawai Pasar Seni Pentas Seni									- 1 hari 18 hari 2 kali
			Gelar Budaya Jogja	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai	Sekar Rinonce	1 event	6.387.965.120			
		Festival Kethoprak Tingkat Kota					1 event				
		Festival Karawitan Tingkat Kota					1 event				

No.	OPD	NAMA PROGRAM (RPJMD DIY)	NAMA PROGRAM (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	Kegiatan	KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	SUB KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	KELUARAN		USULAN ANGGARAN	KETERANGAN
							TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Daerah Kabupaten/Kota	dengan Kebutuhan dan Tuntutan (GBJ)	Festival Langen Carita Tingkat Kota	1 event		
							Festival Teater Tingkat Kota	1 event		
							Pengiriman Festival Tingkat DIY (Sendratari, Teater, Langencarita, Kethoprak, Karawitan)	5 jenis		
				Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat (Penghayat)	Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tingkat DIY	1 kali	290.365.000	
						Jamasan Pusaka	1 kali			
						Sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)	1 kali			
						Gelar Upacara Adat	10 kali			
				Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional (Implementasi)	Pagelaran Wayang	3 event	1.500.000.000	
						Fes. Dalang Anak Tk.Kota	1 event			
						Fes. Dalang Remaja Tk. Kota	1 event			
						Rumaket (Ruang Masyarakat untuk Ketemu)	1 kali			
						Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2 dokumen			
						Diseminasi Nilai Budaya	2 kali			
						Pembuatan Film Animasi nilai budaya	1 film			
				Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Even Penggiat Seni)	Pentas Godhong Apa-apa	6 kali	400.000.000	
						Jemparingan	1 kali			
JUMLAH									17.468.026.000	

No.	OPD	NAMA PROGRAM (RPJMD DIY)	NAMA PROGRAM (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	Kegiatan	KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	SUB KEGIATAN (RKPD KOTA YOGYAKARTA 2021)	KELUARAN		USULAN ANGGARAN	KETERANGAN
							TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN KELEMBAGAAN										
1	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program Administrasi Umum	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen	200.000.000	
							Dokumen Monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen		
2	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	Program Administrasi Umum	Implementasi Budaya Pemerintahan	Penataan Organisasi	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000	
							Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen		
							Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	95 ASN		
JUMLAH								300.000.000		

Sumber: Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						236,526,128,918	263,565,290,183	Sekretariat	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										120,101,000	152,477,820	Lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	10,820,000	18,000,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	68,750,000	70,125,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
						Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	1 dokumen									
						Pengelolaan Website OPD	12 bulan									
						Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku									
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	14,660,000	17,768,400		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	22,450,000	43,095,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	3,421,000	3,489,420		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	232,165,063,644	258,965,180,353	Lanjutan		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	gaji dan Tunjangan ASN	2250 orang					232,031,324,508	258,820,930,353		Sub Bagian Keuangan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,240,000	3,500,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	125,999,136	135,000,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	1,500,000	2,000,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	3,000,000	3,750,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										4,240,964,274	4,447,632,010	baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Benda POS yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	16,225,000	16,549,500		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Jasa Pengiriman/paket	10 kali							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	18,600,000	18,972,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	82 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	32,300,000	40,000,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit							
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	11 unit							
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 6	1 unit							
								Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	2 kali							
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	498,980,000	508,959,600		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	98,186,400	100,150,128		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	79,182,600	80,766,252		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	150000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	26,999,000	27,538,980		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Almari arsip	17 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	635,566,250	755,109,050		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Filling Cabinet	5 buah							
								TV	5 unit							
								Komputer	6 unit							
								Laptop	2 unit							
								Printer	20 unit							
								Monitor	3 unit							
								Meja Kerja	30 buah							
								Meja Rapat	10 buah							
								Kursi kerja	9 buah							
								Kursi rapat	35 buah							
								Sofa	3 buah							
								Dispenser	10 buah							
								LCD	4 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan rumah tangga yang tersedia	50 jenis			84,629,240	92,000,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	18,260,000	20,910,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Bahan Perpustakaan	5 jenis							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	1050 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	331,760,000	338,395,200		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Makan Minum Harian yang tersedia untuk Pegawai	210 orang							
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	8 kali 2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	866,000,000	883,320,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	25 kali 60 orang							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	6 kali 15 orang							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab gedung / bangunan kantor dan gudang	6 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,116,250,000	1,138,575,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								jasa Pemeliharaan taman	12 bulan							
								jasa Keamanan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	239,049,784	243,830,780		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4	11 unit							
								Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 3	1 unit							
								Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2	82 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan AC	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	178,976,000	182,555,520		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan komputer	12 bulan							
								Pemeliharaan printer	12 bulan							
								Pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan							
								pemeliharaan Genset	2 kali							
								Pemeliharaan Hydrant	2 kali							
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				persentase SD terakreditasi A	90,91%					172,994,038,479	181,511,737,166		Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang PNF & PAUD	
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama						jumlah siswa SD berprestasi tingkat nasional	8 medali									
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal dan informal						persentase SMP terakreditasi A	75%									
Program pengembangan pendidikan						jumlah siswa SMP berprestasi tingkat nasional	5 medali									
						persentase kelulusan Paket A	91,50%									
						persentase kelulusan Paket B	90,50%									

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						persentase kelulusan Paket C	90,20%									
						jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga									
						jumlah LKP terakreditasi	13 lembaga									
						Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah									
						Persentase Kelulusan warga belajar	90.50%									
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										70,345,473,676	76,668,868,770	baru		
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat	Kualitas pendidikan meningkat	yogyakarta			Rehab sekolah	8 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	2,014,263,000	2,011,063,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat	Kualitas pendidikan meningkat	yogyakarta			Pengadaan meja kursi siswa	1000 set	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	1,535,000,000	1,545,000,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan JPD	2 kali	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95,15%	1,310,439,568	1,330,000,000		Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah	APBD
								Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa Prestasi	270 siswa							
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Pengadaan alat kesenian Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPi) untuk 10 sekolah	10 set	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	192,700,000	193,000,000		Kepala UPT Unit Layanan Disabilitas	APBD
								Pengadaan alat Tes Psikologi	2 set							
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah	167 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	992,245,400	1,050,000,000		Seksi Kurikulum Penilaian dan Kesiswaan SD	APBD
								Test Pendalaman Materi Ujian Sekolah/ Madrasah	7345 siswa							
								Assesment Kompetensi Minimum	167 sekolah							
								Bimtek Penyusunan Soal ujian sekolah	40 guru							
								pengembangan media atau alat peraga pembelajaran (video 3 mata pelajaran)	3 video							
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Penyusunan Kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	1 dokumen	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	304,766,000	345,000,000		Kepala UPT Unit Layanan Disabilitas	APBD
								Siswa yang melaksanakan Assesmen	650 siswa							
								Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPi)	75 sekolah							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan KBS Online	192 kali	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	422,044,080	430,000,000		Seksi Kurikulum Penilaian dan Kesiswaan SD	APBD
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota Yogyakarta			Evaluasi dan Laporan keterlaksanaan kurikulum	1 laporan	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	43,433,000	51,500,000		Seksi Kurikulum Penilaian dan Kesiswaan SD	APBD
								Evaluasi dan Laporan hasil ujian sekolah daerah	1 laporan							
								Evaluasi dan Laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	1 laporan							
								Evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan karakter	1 laporan							
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Evaluasi dan Kajian Kebijakan Pendidikan oleh Dewan Pendidikan	1 laporan	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	160,000,000	175,000,000		Dewan Pendidikan	APBD
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota Yogyakarta			Kejuaraan dalam Kompetisi Sains Nasional (KSN)	2 kejuaraan	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	8 medali	1,047,352,500	1,150,000,000		Seksi Kurikulum Penilaian dan Kesiswaan SD	APBD
								Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD	6 kejuaraan							
								Kejuaraan dalam MTQ SD	15 kejuaraan							
								Pembinaan Klinik Sains	60 siswa							
								Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Jawa Pelajar	5 kejuaraan							
								Program Pengembangan Minat Bakat istimewa (PPMBI) SENI	30 orang							
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Peserta Pengembangan Kompetensi melalui Kelompok Kerja guru (KKG)	800 orang	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	236,570,800	246,235,800		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	APBD
								Peserta mengusulkan angka kredit	115 orang							
								Penilaian kinerja kepala sekolah	30 orang							
								Jumlah Peserta induksi Guru	40 orang							
								Peserta Pembinaan Pegawai/guru	100 orang							
								Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	80 orang							
								Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	50 orang							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Peserta Kegiatan Lesson Study	80 orang							
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat	697 orang	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	7,997,834,784	8,158,103,990		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	APBD
								Penerima Insentif GTT/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD Kota yang dikelola	1399 orang							
								Pengelolaan tambahan Penghasilan Pegawai	1027 orang							
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Yogyakarta			Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	113 orang	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	2,690,870,504	2,750,700,000		UPT Unit Layanan Disabilitas	APBD
								Pengembangan Kompetensi Guru Pendamping Khusus (GPK)	50 orang							
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Pengelolaan BOS SD	164 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	17,257,433,488	21,108,265,980		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
								Peserta workshop manajemen SD	164 sekolah							
								Pendampingan akreditasi SD	25 sekolah							
								Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah							
								Peserta Lomba Gugus Depan Unggul	10 sekolah							
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA	89 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	33,777,656,552	35,750,000,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
								Jumlah siswa Yang mendapatkan dana BOSDA Swasta	11263 siswa							
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi yang dikelola	10 Aplikasi	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	362,864,000	375,000,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
								Publikasi data pendidikan (buku informasi, leaflet, kalender pendidikan, Rangkuman data Pendidikan)	4 kegiatan							
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										75,733,619,235	82,884,989,452	baru		

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebelur Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Meja Kursi Siswa	340 set	persentase SMP terakreditasi A	75%	593,300,000	605,166,000		Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Smp	APBD
	1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			pengadaan Mesin Riso	9 sekolah	persentase SMP terakreditasi A	75%	1,042,900,000	1,063,758,000		Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Smp	APBD
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Beasiswa prestasi dan PIP	18000 siswa	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95.15%	31,167,083,000	33,275,000,000		Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah	APBD
								Pengelolaan Dana Bansos JPD	14100 siswa							
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah Madrasah	65 sekolah	persentase SMP terakreditasi A	75%	497,225,000	507,169,500		Seksi Kurikulum Penilaian Dan Kesiswaan Smp	APBD
								Tes Pendalaman Materi Ujian Sekolah Madrasah (4 mapel : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA)	8000 siswa							
								Penilaian Akhir Semester / Penilaian Akhir Tahun	16 sekolah							
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Evaluasi dan Laporan keterlaksanaan kurikulum	1 laporan	persentase SMP terakreditasi A	75.00%	226,189,000	230,712,780		Seksi Kurikulum Penilaian Dan Kesiswaan Smp	APBD
								Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	1 laporan							
								Evaluasi dan Laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	1 laporan							
								Evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan karakter	1 laporan							
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Kejuaraan dalam Kompetisi Sains nasional (KSN)	3 kejuaraan	jumlah siswa SMP berprestasi tingkat nasional	5 medali	1,926,942,800	1,971,000,000		Seksi Kurikulum Penilaian Dan Kesiswaan Smp	APBD
								Kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah Remaja (KIR)	5 kejuaraan							
								Kejuaraan MTQ SMP	4 kejuaraan							
								Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP	5 kejuaraan							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP	4 kejuaraan							
								Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Pelajar International Sains and Invention Fair	14 kejuaraan 500 tim							
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Sekolah yang mengikuti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online	57 sekolah	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	5 medali	480,510,000	490,120,200		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	APBD
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Peserta Pengembangan Kompetensi Guru melalui MGMP	40 orang	persentase SMP terakreditasi A	75%	317,662,600	350,000,000		Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Smp	APBD
								Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi	2 kejuaraan							
								Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	30 orang							
								Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	30 orang							
								Penilaian kinerja kepala sekolah	5 orang							
								Jumlah Peserta induksi Guru	30 orang							
								Peserta Pembinaan Pegawai/guru	100 orang							
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat	697 orang	persentase SMP terakreditasi A	75%	4,857,092,051	4,954,233,892		Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP	APBD
								Penerima Insentif GTT/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD Kota yang dikelola	810 orang							
								Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai	300 orang							
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan dan Pengembangan manajemen Sekolah	58 sekolah	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	240,714,784	245,529,080		Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana SMP	APBD
								Jumlah Kejuaraan Lomba Sekolah Sehat	3 kejuaraan							
								Pengelolaan Dana BOS SMP	58 sekolah							
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 1	788 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,991,000,000	2,300,000,000		Kepala Sekolah SMPN 1	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 2	711 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,779,500,000	2,050,000,000		Kepala Sekolah SMPN 2	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 3	602 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,499,500,000	1,745,700,000		Kepala Sekolah SMPN 3	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 4	501 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,257,500,000	1,450,000,000		Kepala Sekolah SMPN 4	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 5	922 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,387,500,000	2,660,000,000		Kepala Sekolah SMPN 5	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 6	709 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,760,500,000	2,050,000,000		Kepala Sekolah SMPN 6	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 7	606 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,517,000,000	1,750,200,000		Kepala Sekolah SMPN 7	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 8	923 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,345,000,000	2,660,500,000		Kepala Sekolah SMPN 8	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 9	606 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,520,000,000	1,750,200,000		Kepala Sekolah SMPN 9	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 10	508 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,273,000,000	1,490,000,000		Kepala Sekolah SMPN 10	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 11	390 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	992,500,000	1,150,000,000		Kepala Sekolah SMPN 11	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 12	500 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,244,000,000	1,460,000,000		Kepala Sekolah SMPN 12	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 13	394 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	979,500,000	1,155,000,000		Kepala Sekolah SMPN 13	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 14	388 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,005,500,000	1,135,000,000		Kepala Sekolah SMPN 14	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 15	989 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,481,500,000	2,860,700,000		Kepala Sekolah SMPN 15	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 16	701 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,761,500,000	2,025,000,000		Kepala Sekolah SMPN 16	APBD
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa Yang mendapatkan Dana BOSDA Swasta	5726 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	8,589,000,000	9,500,000,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	APBD
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										22,085,891,568	19,187,678,944	baru		
	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota Yogyakarta			Jumlah Paket Rehab Sekolah	1 sekolah	jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	211,800,000	250,000,000		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	APBD
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	kota Yogyakarta			Jelajah Museum	2 kali	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	27,608,000	28,160,160		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	APBD
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Pendidik PAUD	1388 orang	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	3,716,239,000	3,790,563,780		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
								Jumlah peserta Pelatihan Pembelajaran Media PAUD	50 orang							
								Jumlah peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD	50 orang							
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Peserta Pengembangan Kompetensi Guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus PAUD	50 orang	jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	104,200,000	106,284,000		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
								Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	50 guru							
								Penilaian kinerja kepala sekolah	11 orang							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Peserta Pembinaan Pegawai/guru	200 orang							
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat	370 orang	jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	4.200,885.000	4.285,358,245		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
								Penerima Insentif GTT/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD Kota yang dikelola	704 orang							
								Pengelolaan tambahan Penghasilan Pegawai	367 orang							
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Layanan PAUD (KB = 105, TPA = 66, TK= 220, SPS PAUD = 578)	4 layanan	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	9,732,659,568	9,927,312,759		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	APBD
								Laporan Hasil Pendataan PAUD	1 dokumen							
								Pengelolaan dana BOP PAUD	450 lembaga							
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Sekolah yang mendapatkan Dana BOSDA Negeri	217 sekolah	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	4,092,500.000	800,000,000		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	APBD
								Sekolah yang mendapatkan Dana BOSDA Swasta	224 sekolah							
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										4,829,054,000	2,770,200,000	baru		
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A, B, dan C	3 kali	Persentase Kelulusan Paket A Persentase Kelulusan Paket B Persentase Kelulusan Paket C	91.50% 90.50% 90.20%	723,366.000	745,000,000		Seksi Pendidikan Masyarakat Kesetaraan dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	APBD
								Bimtek Pengelola PKBM	30 orang							
								Lomba Peserta Didik Paket A, B, C	3 kejuaraan							
								Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	20 lembaga							
								Pengelolaan Kampung Baca	27 kampung							
								Pendampingan Jam Belajar Masyarakat (JBM)	616 RW							
	1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan tutor kesetaraan	100 orang	Persentase Kelulusan Paket A Persentase Kelulusan Paket B Persentase Kelulusan Paket C	91.50% 90.50% 90.20%	300,000.000	306,000,000		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	40 orang	Jumlah LKP terakreditasi	13 lembaga	240,605,000	265,300,000		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
								Kejuaraan dalam Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	5 kejuaraan							
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Bimbingan akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga	Persentase Kelulusan Paket A Persentase Kelulusan Paket B Persentase Kelulusan Paket C	91.50% 90.50% 90.20%	3,455,670,000	1,342,900,000		Seksi Pendidikan Masyarakat Kesetaraan dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	APBD
								Pengelolaan BOP Kesetaraan	19 lembaga							
								Pengelolaan Dana BOSDA SKB	1 lembaga							
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Akreditasi Lembaga Kursus	8 lembaga	Jumlah LKP terakreditasi	13 lembaga	109,413,000	111,000,000		Seksi Pendidikan Masyarakat Kesetaraan dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	APBD
								Kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	1 kejuaraan							
								Peningkatan kompetensi LKP	20 lembaga							
Program pengembangan pe	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Persentase guru sesuai kualifikasi	99.70%			Persentase guru sesuai kualifikasi	99.70%	29,955,609,340	30,572,121,527		Sekretaris	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										29,955,609,340	30,572,121,527	Baru		
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan GTT (Guru Tidak Tetap)	464 orang			29,825,609,340	30,422,121,527		Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pengelolaan PTT (Pegawai Tidak Tetap)	289 orang							
								Pengelolaan Tenaga Bantuan (Naban)	305 orang							
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui PGRI	3999 orang	Persentase guru sesuai kualifikasi	99.7%	130,000,000	150,000,000		Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
Program pengembangan ke	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				persentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%					2,351,937,662	2,413,000,000		Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota										2,305,514,000	2,366,000,000	lanjutan		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Seleksi Pemuda Pelopor 1 kali	5 orang	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	105,800,000	110,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemuda	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Ekspo Karya Pemuda	1 kali	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	274,300,000	277,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
								Jambore Pemuda Derah	1 kali							
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Seleksi Pembinaan dan Pelatihan PASKIBRAKA	46 org	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	1,668,714,000	1,702,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
								Pembinaan Kepemudaan	5 kali							
								lomba baris berbaris	1 kali							
	2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Gelar Pelajar	4 kali	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	170,700,000	190,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
								Pengendalian Kenakalan Remaja	6 kali							
	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Pemberian Penghargaan kepada Pemuda/OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) yang berprestasi	43 orang	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	86,000,000	87,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										46,423,662	47,000,000	Lanjutan		
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Dokumen data potensi organisasi kepemudaan	3 jenis	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	46,423,662	47,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
								Pelatihan Manageman bagi Pengurus OKP	33 OKP							
								Pembinaan Kelembagaan antar OKP	33 OKP							
								Musrenbang Pemuda Kota Yogyakarta	1 kali							
Program pengembangan ol	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif	97%					8,688,634,700	9,282,156,000		Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kab/kota										1,385,972,500	1,450,000,000	lanjutan		
	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD	11 kejuaraan	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	976,752,500	1,000,000,000		Seksi Olahraga Prestasi	APBD
								Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP	5 kejuaraan							
								Kejuaraan dalam Gala Siswa	1 kejuaraan							
	2.19.03.2.02.03	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Disdikpora			penyelenggaraan Piala Dunia U20	1 kali	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	409,220,000	450,000,000		Seksi Olahraga Prestasi	APBD
	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO)	102 Siswa	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	760,196,200	900,000,000		Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	APBD
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										5,665,256,000	6,042,156,000	Lanjutan		
	2.19.03.2.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Pelatihan Pelaku Olahraga (Pelatih)	30 orang	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	15,256,000	24,156,000		Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	APBD
								Pendataan kelompok organisasi keolahraagaan	2 jenis dokumen							
	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota Yogyakarta	41 Pengkot	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	5,650,000,000	6,018,000,000		Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	APBD
								Pembinaan Olahraga Rekreasi melalui FORMI (Federasi Olahraga masyarakat Indonesia)	422732 orang							
								Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas oleh NPC (National Paralympic Commite)	65 orang							
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										877,210,000	890,000,000	Lanjutan		
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, pengembangan dan Pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Kelompok senam yang terbina	14 kelompok	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	877,210,000	890,000,000		Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM BARU	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66,30%					340,863,600	355,725,000		Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										340,863,600	355,725,000	baru		
	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Pembinaan Pramuka oleh Kwartir Cabang kota Yogyakarta	485 Gudep dan Saka	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66,30%	340,863,600	355,725,000		Seksi Kepemudaan	APBD
Total												450,857,212,699	487,700,029,876			

Tabel 5.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					51,163,461,000	52,698,364,830		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										52,880,000	54,466,400	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	5,470,000	5,634,100		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Dokumen DHA	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	9,060,000	9,331,800		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD
								Penyusunan RKA dan DPA	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
								Penyusunan RKPA dan DPPA	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi renja, statis dinamis, SPM dan DAK Dinas Kesehatan	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	33,840,000	34,855,200		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,610,000	2,688,300		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,900,000	1,957,000		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										48,602,579,000	50,060,656,370	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	743 Asn	Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	743 Asn	48,453,533,000	49,907,138,990		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kapasitas verifikasi keuangan	18 puskesmas, 1 rs dan dinas	Peningkatan kapasitas verifikasi keuangan	18 puskesmas, 1 rs dan dinas	118,346,000	121,896,380		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11 dokumen	Tersediaanya dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11 bulan	1,320,000	1,359,600		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Tersedianya dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	1,840,000	1,895,200		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Penatausahaan Bulanan	11 dokumen	Tersedianya Laporan Penatausahaan Bulanan	11 dokumen	21,200,000	21,836,000		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersedianya dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,020,000	3,110,600		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	3,320,000	3,419,600		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,508,002,000	2,583,242,060	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Dokumen	20 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1,575,000	1,622,250		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Materai	127 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	18,600,000	19,158,000		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	39,930,000	41,127,900		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	27 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
								Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	879,631,808	906,020,762		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa Keamanan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	200,760,000	206,782,800		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas, dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	100 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	56,766,448	58,469,441		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	190,627,250	196,346,068		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	656.034 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	12,042,100	12,403,363		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer/Laptop	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	170,660,000	175,779,800		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								LCD	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
								Printer	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
								UPS	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
								Mic Wireless / Mic	3 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
								Kursi Rapat	30 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
								Belanja Bahan Komputer/Printer	10 jenis							

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	36,165,394	37,250,356		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,540,000	3,646,200		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Buku Bacaan Perpustakaan	15 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makanan dan minuman	97 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	76,830,000	79,134,900		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	16 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	165,300,000	170,259,000		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	102,000,000	105,060,000		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	426,374,000	439,165,220		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	27 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	127,200,000	131,016,000		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
Program pelayanan kesehatan dasar	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	80.50					151,409,004,351	155,951,274,484		Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan, Ka. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data Informasi Kesehatan, Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat, Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
Program pelayanan kesehatan rujukan						Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	75									
						Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	84.62%									
						Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	100%									

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program upaya pelayanan kesehatan						Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%									
						Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%									
						Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100%									
Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan						Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	88%									
Program peningkatan kesehatan masyarakat						Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%									
						Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%									
						Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%									
						Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%									
						Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%									
						Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%									
						Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%									
					Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%										
						Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%									

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program pencegahan dan pengendalian penyakit						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV Aids (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV Aids	100%									
						Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%									
						Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%									
						Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%									
						Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%									
						Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%									
Program peningkatan kesehatan masyarakat						Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	89.90%									
						Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96.30%									
						Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	100%									
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota										7,434,736,000	7,657,778,080	Baru		
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Alat kesehatan/ alat penunjang medik di puskesmas	1 paket	Terpenuhinya alat kesehatan/ alat penunjang medik untuk pelayanan kesehatan di puskesmas	1 paket	1,000,000,000	1,030,000,000		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Ketersediaan Obat , Vaksin	12 bulan	Terpenuhinya obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	12 bulan	3,709,136,000	3,820,410,080		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Ketersediaan Bahan Habis Pakai	12 bulan	Terpenuhinya bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan	12 bulan	2,675,000,000	2,755,250,000		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik di Puskesmas	18 Puskesmas	Terpeliharanya alat kesehatan/ alat penunjang medik di Puskesmas	18 Puskesmas	50,600,000	52,118,000		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										143,657,977,369	147,967,716,693	Baru		
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3631 orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	121,560,000	125,206,800		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3053 orang	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	19,950,000	20,548,500		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3087 orang	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	213,475,000	219,879,250		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16929 orang	Persentase balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	63,590,000	65,497,700		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Usia Pendidikan Dasar	65521 orang	Persentase Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	131,100,000	135,033,000		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	273.343 Orang	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	527,180,000	542,995,400		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular	APBD
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54224 orang	Persentase Usia Lanjut mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80,780,000	83,203,400		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32.620 Orang	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	7,200,000	7,416,000		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular	APBD
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.719 Orang	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	600,000	618,000		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular	APBD
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	1.190 Orang	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	7,800,000	8,034,000		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular	APBD
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12.000 orang	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	1,066,470,000	1,098,464,100		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	APBD
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah orang dengan resiko orang terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.184 orang	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS (Ibu hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria transgender, pengguna NAPZA dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV/AIDS	100%	491,473,317	506,217,517		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	APBD
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Petugas mengikuti peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan gizi masyarakat	275 orang	Persentase pelayanan kesehatan gizi	100%	46,300,000	47,689,000		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
								Jumlah Petugas mengikuti Penguatan Surveilans Gizi	450 orang							
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penguatan penerapan prinsip kesehatan kerja	6 keg	Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk pekerja di tempat kerja	90 orang	14,550,000	14,986,500		Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	APBD
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan eksternal kualitas air di Kota Yogyakarta	700 sampel	Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di penyelenggara air minum	85.80%	629,825,800	648,720,574		Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	APBD
								Jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	100 sekolah	Persentase sekolah yang memenuhi syarat kesehatan	86,00%					
								Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	2 dokumen DPLH	Permasalahan kesehatan lingkungan sudah mempunyai rancangan payung hukum	2 dokumen DPLH					

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	2 kali	PIRT pangan, jasaboga & rumah makan memenuhi syarat	25 orang					
								Pengelolaan Limbah Medis	18 Puskesmas	Terkelolanya limbah medis di UPT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	18 Puskesmas					
								Pemantauan kesehatan lingkungan UPT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	20 UPT	UPT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terpantau kesehatan lingkungannya	20 UPT					
								Pembinaan Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja terhadap Rumah Sakit	20 RS	Terbinanya rumah sakit pada penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja	20 RS					
								Pelaksanaan STBM di Kelurahan	45 kelurahan	Terlaksananya STBM di Kelurahan terpilih	45 kelurahan					
								Pembangunan jamban sehat	20 lokasi	Terbangunnya jamban sehat	20 lokasi					
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Promosi Kesehatan di Layanan Kesehatan	21 lokasi	Jumlah Layanan Kesehatan yang melakukan promosi kesehatan	21 lokasi	500,746,218	515,768,605		Ka. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	APBD
								Promosi Kesehatan di Sekolah	529 sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan media promosi kesehatan	529 sekolah					
								Promosi Kesehatan di Tempat Ibadah (Masjid/Mushala)	200 masjid/mushala	Jumlah Tempat Ibadah (Masjid/Mushala) yang mendapatkan media promosi kesehatan	200 masjid/mushala					
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen Surveilans Epid	Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen Surveilans Epid	76,268,800	78,556,864		Ka. Seksi Surveilans Data dan Informasi Kesehatan	APBD
								Dokumen Penyelidikan Epidemiologi	12 Bulan	Dokumen Penyelidikan Epidemiologi	12 Bulan					
								Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	12 Bulan	Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	12 Bulan					
								Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	52 Edisi	Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	52 Edisi					
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Evaluasi Pelayanan Kesehatan Khusus	25 kali	Tersedianya hasil koordinasi dan evaluasi pelayanan program Yankesmas	25 kali	339,433,160	349,616,154		Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Jaminan Kesehatan	APBD
								Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas	Semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas					
								Pelayanan P3K dan Bencana Kesehatan	422 kali	Terlaksananya Pelayanan P3K dan Bencana Kesehatan	422 kali					

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)	359 kegiatan	Cakupan penyakit DBD tertangani	100%	610,696,500	629,017,395		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	APBD
								Audit kasus penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	1 kasus	Tersedianya informasi untuk langkah tindak lanjut pencegahan kematian akibat penyakit menular	1 data					
								Sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	50 orang	Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder dll dalam upaya pengendalian penyakit menular	50 orang					
								Penguatan layanan imunisasi pada praktisi swasta	2 data	Tersedianya Data Imunisasi bayi, Balita dan anak sekolah	2 data					
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan Jaminan Kesehatan	114,098 Jiwa	Persentase masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan	100%	65,123,651,995	67,077,361,555		Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Jaminan Kesehatan	APBD
								Jasa Perawatan Jaminan Kesehatan Daerah	12 bulan	Persentase Masyarakat mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah	100%					
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Yogyakarta	7 tatanan	Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan Kota Sehat	7 tatanan	123,570,000	127,277,100		Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	APBD
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	1 dokumen	17,915,732,532	18,453,204,508		Ka. UPT RS. Pratama	BLU
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Operasional Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Pratama	12 bulan	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	71%	6,034,050,689	6,215,072,210		Ka. UPT RS. Pratama	APBD
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan I	12 Bulan	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Danurejan 1	28,000 org	886,500,000	913,095,000		Ka. Puskesmas Danurejan I	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan II	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan di Puskesmas Danurejan II	25.931 kunjungan pasien	627,955,292	646,793,951		Kepala Puskesmas Danurejan II	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondomanan	12 bln	Tersedianya Layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Gondomanan	27.338 Kunjungan Pasien	996,850,000	1,026,755,500		Kepala Puskesmas Gondomanan	BLU

RPJMD 2017-2022		Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gedongtengen	12 bln	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen sesuai ketentuan	35.680 kunjungan pasien	1,418,570,000	1,461,127,100		Ka. Pusk. Gedongtengen	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman I	12 bln	Layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman 1	35.940 kunjungan pasien	1,358,700,000	1,399,461,000		Ka. Pusk. Gondokusuman I	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas	12 bulan	755,927,706	778,605,537		Ka. Pusk. Gondokusuman II	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Jetis	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Jetis	58,000 kunjungan pasien	2,566,859,000	2,643,864,770		Ka. Pusk. Jetis	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede I	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede1	34.000 kunjungan pasien	1,563,352,530	1,610,253,106		Ka. Pusk. Kotagede I	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Kotagede 2	25,587 kunjungan pasien	802,487,000	826,561,610		Kepala Puskesmas Kotagede II	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kraton	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Kraton	29,849 kunjungan	1,078,032,728	1,110,373,710		Kepala Puskesmas Kraton	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Mergangsan	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Mergangsan	55.760 kunjungan pasien (perkiraan jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas dalam satu tahun)	2,518,783,000	2,594,346,490		Kepala Puskesmas Mergangsan	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Ngampilan	12 bln	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	12 bulan	797,698,400	821,629,352		Kepala Puskesmas Ngampilan	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Pakualaman	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan di Puskesmas Pakualaman	22,100 kunjungan pasien	876,435,000	902,728,050		Kepala Puskesmas Pakualaman	BLU

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Tegalrejo	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas	12 bulan	2,858,269,000	2,944,017,070		Kepala Puskesmas Tegalrejo	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo I	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Umbulharjo 1	60,500 kunjungan pasien	2,482,531,908	2,557,007,865		Kepala Puskesmas Umbulharjo I	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Umbulharjo 2	34,000 kunjungan pasien	1,088,625,000	1,121,283,750		Kepala Puskesmas Umbulharjo II	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Wirobrajan	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Wirobrajan	60.546 kunjungan pasien	1,559,820,000	1,606,614,600		Ka. Pusk. Wirobrajan	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1	12 bln	penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1 sesuai Ketentuan	1 dok	892,220,092	918,986,695		Ka. Pusk. Danurejan I	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	79 ibu hamil, 69 ibu bersalin, 72 bayi, 366 balita, 1.345 anak sekolah	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Danurejan 1	944 PUS					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	9,206 org							
								Layanan Promosi Kesehatan	9,206 org							
								layanan Kesehatan Lingkungan	9,206 org							
								layanan Gizi	20 org							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	9,206 org							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 2	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,109,897,700	1,143,194,631		Ka. Pusk. Danurejan II	APBD

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	75 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 71 bayi, 289 balita, 1858 anak sekolah pendidikan dasar, 932 WUS.	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Danurejan II	8.980 orang					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	8.980 orang							
								Layanan Promosi Kesehatan	8.980 orang							
								Layanan Kesehatan Lingkungan	8.980 orang							
								Layanan Gizi	15 balita gizi buruk dan kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	8.980 orang							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,370,368,572	1,411,479,629	Ka. Pusk. Gedongtengen	APBD	
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	120 ibu hamil, 115 ibu bersalin, 109 bayi, 653 balita, 693 anak sekolah pendidikan dasar, 3445 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Gedongtengen	12 bulan					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	19.870 orang							
								Layanan Promosi Kesehatan	19.870 orang							
								Layanan Kesehatan Lingkungan	19.870 orang							
								Layanan Gizi	48 Balita gizi buruk dan kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	19.870 orang							

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana	
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,286,983,036	1,325,592,527		Ka. Pusk. Gondokusuman I	APBD	
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	256 ibu hamil, 256 ibu bersalin, 232 bayi, 1.027 balita, 3.811 anak sekolah pendidikan dasar, 6.275 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Wilayah Puskesmas Gondokusuman 1	30.576 orang						
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	30.576 orang								
								layanan Gizi	15 Balita gizi buruk dan 48 kurang								
								layanan Kesehatan Lingkungan	30.576 orang								
								Layanan Promosi Kesehatan	30.576 orang								
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	30.576 orang								
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman II	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Gondokusuman 2 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,190,218,678	1,225,925,239		Ka. Pusk. Gondokusuman II	APBD	
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	74 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 67 bayi, 366 balita, 4463 anak sekolah pendidikan dasar, 795 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Wilayah Puskesmas Gondokusuman 2	6876 orang						
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	6876 orang								
								Layanan Promosi Kesehatan	6876 orang								
								layanan Kesehatan Lingkungan	6876 orang								

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								layanan Gizi	40 Balita gizi buruk dan kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	6876 orang							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas JETIS Sesuai Ketentuan	1 dokumen	862,358,000	888,228,740		Ka. Pusk. Jetis	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	hamil, 297 ibu bersalin, 283 bayi, 1.117 balita, 5.450 anak sekolah pendidikan dasar (3.483 siswa SD, 1.967 siswa SMP), 2.149WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas JETIS	12 bulan					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	27,072							
								Layanan Promosi Kesehatan	12 Balita gizi buruk, 10 balita gizi kurang							
								layanan Kesehatan Lingkungan	27,072							
								layanan Gizi	12 Balita gizi buruk, 10 balita gizi kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	27,072							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede 1 Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	978,963,572	1,008,332,479		Ka. Pusk. Kotagede I	APBD

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	228 ibu hamil, 217 ibu bersalin, 207 bayi, 1.239 balita, 489 anak sekolah pendidikan dasar, 3.745 WUS, 82 balita gizi buruk dan kurang	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kotagede 1	21.352 orang					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	21.352 orang							
								Layanan Promosi Kesehatan	21.352 orang							
								layanan Kesehatan Lingkungan	21.352 orang							
								layanan Gizi	21.352 orang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	21.352 orang							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede 2	12 bulan	Manajemen Puskesmas Kotagede 2	1 dokumen	822,170,000	846,835,100		Ka. Pusk. Kotagede II	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	186 ibu hamil, 177 ibu bersalin, 173 Bayi, 733 Balita, 1424 anak sekolah pendidikan dasar, 639 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kotagede 2	12,496					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	12,496							
								Layanan Promosi Kesehatan	12,496							
								layanan Kesehatan Lingkungan	12,496							
								layanan Gizi	25 Balita gizi buruk dan kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	12,496							

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana	
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kraton	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kraton Sesuai Ketentuan	12 dokumen	1,253,881,876	1,291,498,333		Ka. Pusk Kraton	APBD	
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	181 ibu hamil, 174 ibu bersalin, 165 bayi, 783 balita, 2405 anak sekolah pendidikan dasar, 536 wus, < 8 % balita gizi buruk dan kurung	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kraton	29,849 kunjungan						
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	13,317 orang								
								Layanan Promosi Kesehatan	13,317 orang								
								layanan Kesehatan Lingkungan	13,317 orang								
								layanan Gizi	13,317 orang								
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	13,317 orang								
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketentuan	1 dokumen	1,698,882,800	1,749,849,284		Ka. Pusk Mantrijeron	APBD	
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	327 ibu hamil, 312 ibu bersalin, 297 bayi, 1.246 balita, 2.848 anak sekolah pendidikan dasar, 9.348 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Mantrijeron	35.422 orang						
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	35.422 orang								
								Layanan Promosi Kesehatan	35.422 orang								
								layanan Kesehatan Lingkungan	35.422 orang								
								Layanan Gizi	70 Balita Gizi Buruk dan Kurang								

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	35.422 orang							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	12 bulan	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan sesuai ketentuan	1 dokumen	917,151,924	944,666,482		Ka. Pusk Mergangsan	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	276 ibu hamil, 264 ibu bersalin, 251 bayi, 1.408 balita, 3.826 anak sekolah pendidikan dasar, 8.527 WUS	2. Tersedianya Layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah Puskesmas Mergangsan	12 bulan					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	22.062 orang							
								Layanan Promosi Kesehatan	22.062 orang							
								layanan Kesehatan Lingkungan	22.062 orang							
								layanan Gizi	112 Balita gizi buruk dan kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	22.062 orang							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	1 dokumen	1,051,257,615	1,082,795,343		Ka. Pusk. Ngampilan	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	150 ibu hamil, 136 ibu bersalin, 136 bayi, 782 balita, 3.089 anak sekolah pendidikan dasar, 1.285 WUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas	18,565 orang					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	18,565 orang							
								Layanan Promosi Kesehatan	18,565 orang							
								layanan Kesehatan Lingkungan	18,565 orang							

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								layanan Gizi	0 balita gizi buruk, 3 balita gizi kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	18,565 orang							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman Sesuai Ketentuan	1 dokumen	853,585,000	879,192,550		Ka. Pusk. Pakualaman	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	114 ibu hamil, 108 ibu bersalin, 108 bayi, 456 balita, 2.045 anak sekolah pendidikan dasar, 2.853 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Pakualaman	10,792 orang					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	10,792 orang							
								Layanan Promosi Kesehatan	10,792 orang							
								Layanan Kesehatan Lingkungan	10,792 orang							
								Layanan Gizi	1 balita gizi buruk dan kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya								
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo	12 Bulan	Tersedianya Layanan kesehatan di Puskesmas	12 bulan	1,376,037,654	1,417,318,784		KA. Pusk. Tegalrejo	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	375 ibu hamil, 358 ibu bersalin, 341 bayi, 1621 balita, 564 anak sekolah pendidikan dasar, 2.853 WUS, 3879 PUS							

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana	
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	37.073 orang (jumlah penduduk riil wilayah kerja Pusk)							
								Layanan Promosi Kesehatan	20 Balita gizi buruk dan kurang							
								layanan Kesehatan Lingkungan	37.073 orang (jumlah penduduk riil wilayah kerja Pusk)							
								layanan Gizi	37.073 orang (jumlah penduduk riil wilayah kerja Pusk)							
								Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	37.073 orang (jumlah penduduk riil wilayah kerja Pusk)							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Umbulharjo 1 Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,194,575,800	1,230,413,074		Ka. Pusk Umbulharjo I	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	543 ibu hamil, 519 ibu bersalin, 494 bayi, 1.748 balita, 6.963 anak sekolah pendidikan dasar, 5.073 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Umbulharjo 1	35,100 org					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	35,100 org							
								Layanan Promosi Kesehatan	35,1							
								layanan Kesehatan Lingkungan	35,1							

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								layanan Gizi	69 balita gizi buruk dan kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	35,100 org							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,160,356,714	1,195,167,416		Ka. Pusk Umbulharjo II	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	199 ibu hamil, 189 ibu bersalin, 180 bayi, 1092 balita, 4845 anak sekolah pendidikan dasar, 987 WUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah Puskesmas Umbulharjo 2	24,332 orang					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	24,332 orang							
								Layanan Promosi Kesehatan	24,332							
								layanan Kesehatan Lingkungan	24,332							
								layanan Gizi	6 gizi buruk dan 73 gizi kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	24.332 orang							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan Sesuai Ketentuan	1 dokumen	979,547,500	1,008,933,925		Ka. Pusk. Wirobrajan	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	316 ibu hamil, 301 ibu bersalin, 287 bayi, 1.407 balita, 4.585 anak sekolah pendidikan dasar, 5.638 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Wirobrajan	28,011 orang					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	28,011 orang							

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Layanan Promosi Kesehatan	28,011 orang							
								layanan Kesehatan Lingkungan	28,011 orang							
								layanan Gizi	60 Balita gizi buruk dan kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	28,011 orang							
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Mantrijeron	12 bulan	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan di Puskesmas Mantrijeron	56,000 kunjungan pasien	2,229,059,600	2,295,931,388		Kepala Puskesmas Mantrijeron	BLU
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1,187,186,504	1,222,802,099		Kepala Puskesmas Gondomanan	APBD
								Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	152 ibu hamil, 145 ibu bersalin, 138 bayi, 582 balita, 263 anak sekolah pendidikan dasar, 1376 PUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Gondomanan	15.327 orang					
								Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	15.327 orang							
								Layanan Promosi Kesehatan	15.327 orang							
								layanan Kesehatan Lingkungan	15.327 orang							
								layanan Gizi	67 Balita Gizi Buruk dan Kurang							
								Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	15.327 orang							
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan kegawatdaruratan PSC 119	12 bulan	PSC 119 YES dapat beroperasi dalam melayani masyarakat	12 bulan	1,263,404,738	1,301,306,880		Ka. UPT PSC 119 YES	APBD
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Rumah Sehat Lansia	12 bulan	Tersedianya layanan di Rumah Sehat Lansia	12 bulan	254,282,419	261,910,892		Ka. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	APBD

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	2300 sampel	Data hasil pemeriksaan kualitas air	2300 sampel	404,287,000	416,415,610		Ka. UPT Lab. KesLing	APBD
								Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta	100 sampel	Data hasil pemeriksaan kualitas pangan	100 sampel					
								Pengelolaan limbah medis cair dan padat	12 bulan	Data pengelolaan limbah medis cair dan padat	12 bulan					
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Akreditasi Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	18 Puskesmas dan 15 Rumah Sakit	Cakupan FKTP dan rumah sakit difasilitasi akreditasi	18 Puskesmas dan 15 Rumah sakit	937,900,000	966,037,000		Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Jaminan Kesehatan	APBD
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										25,139,780	25,893,973	Baru		
	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Data Profil Kesehatan	1 Dokumen Profil	Data Profil Kesehatan	1 Dokumen Profil	25,139,780	25,893,973		Ka. Seksi Surveilans Data dan Informasi Kesehatan	APBD
								Dokumen Penyebab Kematian (Cause of Death)	12 Bulan	Dokumen Penyebab Kematian (Cause of Death)	12 Bulan					
								Data Prioritas (KOMDAT)	12 Bulan	Data Prioritas (KOMDAT)	12 Bulan					
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										291,151,202	299,885,738	Baru		
	1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	70 sarana	Fasilitas pelayanan kesehatan mendapat pemenuhan komitmen izin operasional	70 sarana	95,600,000	98,468,000		Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	APBD
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer	20 keg	Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	20 keg	195,551,202	201,417,738		Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	APBD
								Data hasil Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	1 keg	Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	1 keg					
								Revisi buku panduan pengobatan puskesmas	1 keg	Tersusunnya dokumen hasil revisi panduan pengobatan Puskesmas	1 keg					
Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	90%				600 orang	477,292,000	491,610,760		Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
						Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	80%									
						Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%									

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota										138,193,520	142,339,326	Baru		
	1.02.03.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Pelayanan kesehatan dan penyehat tradisional mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1000 orang	Tenaga pelayanan kesehatan dan penyehat tradisional mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1000 orang	138,193,520	142,339,326		Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	APBD
	1.02.03.2.02.02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	16 orang	Pejabat Fungsional sesuai kompetensi yang ditetapkan	16 orang	7,050,000	7,261,500		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
	1.02.03.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelatihan SDMk	45 orang	Penambahan SDMk dengan kemampuan teknis tertentu	45 orang	270,000,000	278,100,000		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
	1.02.03.2.03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota										3,920,000	4,037,600	Baru		
	1.02.03.2.03.01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan SDMk	1 dokumen perencanaan	Tersedianya Perencanaan SDMk Dinas kesehatan	1 dokumen perencanaan	3,920,000	4,037,600		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
	1.02.03.2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										15,220,000	15,676,600	Baru		
	1.02.03.2.04.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Peserta Seminar /kursus/ workshop	20 orang	SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi	20 orang	15,220,000	15,676,600		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
								Desinfo Pejabat Fungsional Kesehatan	129 orang	Pejabat Fungsional Kesehatan mendapatkan pemahaman mengenai Aturan Jabatan Fungsional	129 orang					
	1.02.03.2.05	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										42,908,480	44,195,734	Baru		
	1.02.03.2.05.01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Tenaga kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi	Kesiapan dalam mengikuti rangkaian penilaian nakes teladan di Puskesmas tingkat DIY	5 profesi	39,108,480	40,281,734		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
								Pengelolaan SDMk	600 orang	Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan	600 orang					

RPJMD 2017-2022						Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	19 PT	Kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	19 PT					
	1.02.03.2.05.02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembaruan Data SISDMK tingkat Kota Yogyakarta	1 data	Data SISDMK terbaru tingkat kota Yogyakarta	1 data SISDMK	3,800,000	3,914,000		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	96%					300,060,000	309,061,800		Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
						Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98%									
						Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95.00%									
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										161,500,000	166,345,000	Baru		
	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta	500 orang	Masyarakat mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	500 orang	161,500,000	166,345,000		Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	APBD
								Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	200 nomor PIRT	Produsen industri rumah tangga mendapat Nomor SPP-IRT	200 nomor PIRT					
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										104,280,000	107,408,400	Baru		
	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyuluhan Hygiene Sanitasi	300 orang	Masyarakat mendapatkan sertifikat Penyuluhan Hygiene Sanitasi	300 orang	104,280,000	107,408,400		Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	APBD
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										13,280,000	13,678,400	Baru		

RPJMD 2017-2022		Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana						
Program	0						1	2	3	4	5						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan	
																	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian dan pengawasan pada sentra makanan jajanan	30 sarana	Terlaksananya pengawasan sentra makanan jajanan	30 sarana	13,280,000	13,678,400		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD					
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										21,000,000	21,630,000	Baru							
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeriksaan sampel makanan minuman	200 sampel	terlaksananya pemeriksaan sampel makanan minuman	200 sampel	21,000,000	21,630,000		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD					
Program peningkatan kesehatan masyarakat		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	66.70%					131,115,000	135,048,450		Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat						
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	466					58,030,000	59,770,900	Baru							
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelurahan Siaga (KESI)	45 kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kelurahan siaga	45 Kelurahan	58,030,000	59,770,900		Ka. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	APBD					
		1.02.05.2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										73,085,000	75,277,550	Baru							
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kawasan sasaran kebijakan KTR	18 puskesmas	Jumlah kawasan yang menjadi sasaran kebijakan KTR	18 Puskesmas	73,085,000	75,277,550		Ka. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	APBD					
									Publikasi promosi kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan	Tersampainya informasi promosi kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan										
Total													203,480,932,351	209,585,360,324								

Tabel 5.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					52,549,334,780	52,549,334,780		Ka Bagian Keuangan dan ADP	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										36,202,864,500	36,202,864,500	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Gaji dan Tunjangan ASN	507 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	36,202,864,500	36,202,864,500		Ka Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										16,346,470,280	16,346,470,280	Baru		
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,382,600,000	2,382,600,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD
								Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan							
								Pembayaran Rekening Air	12 bulan							
								Pembayaran Rekening Internet	12 bulan							
								Pembayaran Rekening TV Kabel	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Pembayaran Gaji pegawai BLUD, Naban dan Tenaga Teknis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,077,315,280	9,077,315,280		Ka Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,178,000,000	2,178,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Alat Tulis Kantor	60 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	264,000,000	264,000,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	48 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	198,000,000	198,000,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Renovasi dan pengecatan gedung perkantoran	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,652,000,000	1,652,000,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD
								Jasa Keamanan (Satpam) Rumah Sakit	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Bahan Bakar Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	66,555,000	66,555,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD
								Bahan Bakar Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 2	10 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan Taman Rumah Sakit	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	528,000,000	528,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD
Program pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Jogja	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	81%					109,453,762,000	109,453,762,000		Ka Bidang Penunjang Pelayanan	
						Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	24									
						Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun	12%									
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota										29,723,162,000	29,723,162,000	Baru		
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			Renovasi/rehab gedung pelayanan RS	1 unit	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	1,000,000,000	1,000,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			Pengadaan Ruang PONEK IGD dan Ruang Isolasi	1 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	1,500,000,000	1,500,000,000		Ka Seksi Rawat Jalan	APBD
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Umbulharjo			Pengadaan Prasarana Listrik (UPS dan ETS)	2 unit	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	200,000,000	200,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			Alat Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap, Penunjang	1 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	14,373,162,000	14,373,162,000		Ka Seksi Rawat Jalan	APBD
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			Obat-obatan, Vaksin	12 bulan	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	6,000,000,000	6,000,000,000		Ka Seksi Penunjang Medis	APBD
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			BHP Medis, AMHP Medis, Darah kantong	12 bulan	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	3,600,000,000	3,600,000,000		Ka Seksi Penunjang Medis	APBD
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	5 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	3,050,000,000	3,050,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										79,370,600,000	79,370,600,000	Baru		
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			Operasional Pelayanan Kesehatan	12 bulan	Operasional pelayanan kesehatan rujukan	100%	79,370,600,000	79,370,600,000		Ka Seksi Rawat Inap	BLU
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										360,000,000	360,000,000	Baru		
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			Pengelolaan Database SIM RS	1 dokumen data	Dukungan terhadap kelancaran pengembangan SIM RS	100%	108,000,000	108,000,000		Ka Seksi Rawat Inap	APBD

Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Umbulharjo			Pengelola Aplikasi SIM RS (Analisis Sistem dan Programmer)	1 aplikasi	Dukungan terhadap kelancaran pengembangan SIM RS	100%	252,000,000	252,000,000	Ka Sub Bagian Kepegawaian	APBD	
Total												162,003,096,780	162,003,096,780			

Tabel 5.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						15,759,331,343	16,445,000,000		SEKRETARIS	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										115,000,000	146,000,000	Reguler			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	5,000,000	6,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Program dan Kegiatan	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	15,000,000	20,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	95,000,000	120,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										12,816,496,988	13,017,000,000	Reguler			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	114 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	12,801,496,988	13,000,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	15,000,000	17,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Laporan Proknoisis	2 Dokumen								
								Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen								
								Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen								
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,827,834,355	3,282,000,000	Reguler			
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Surat Dinas yang dikelola	4200	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	22,920,000	24,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	54,000,000	60,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan								
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa STNK	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	69,300,000	75,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Jasa KIR	31 unit								
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	905,961,240	950,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	150,000,000	170,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	17,600,000	20,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Alat Tulis Kantor	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	60,666,295	80,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Barang Cetak	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	96,531,000	100,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Jasa Penggandaan	283,000 lembar								

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	7,400,000	10,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	92,367,500	100,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	35,048,760	40,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Bahan Bacaan/surat kabar	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	2,400,000	3,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi	125 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	44,170,000	50,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Laporan Perjalanan Dinas	18 Laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	174,900,000	300,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	50,000,000	70,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Kendaraan Operasional	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	1,017,569,560	1,200,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Perengkapan Bangunan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	27,000,000	30,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengaliran dan Drainase	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Persentase kualitas saluran pengaliran /penyediaan bangunan talud	91.57%					6,281,896,837	10,000,000,000		KA. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	
	1.03.02.2.01											3,936,889,600	6,500,000,000	Reguler		
	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Sungai	100 m	Terbangunnya Bangunan Talud Sungai		1,527,156,500	2,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Tanggul Sungai	51 m	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	1,146,207,515	3,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
								Penyusunan DED Rehabilitasi Tanggul Sungai	1 Dokumen							
	1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Tanggul dan Tebing sungai	600 m	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	1,263,525,585	1,500,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										2,345,007,237	3,500,000,000	Reguler		
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Jaringan Irigasi	144 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	Kota Yogyakarta	886,460,600	1,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
								Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2022	1 Dokumen							
	1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Bendung Irigasi Muja-muju	22,22 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	100%	1,000,000,000	2,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Jaringan Irigasi	800 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	100%	458,546,637	500,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Target	Target	Target	Target	Target	Target					
						Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	86.21%					9,310,180,360	11,000,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	30%									
						Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15.10%									
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										9,310,180,360	11,000,000,000	Reguler		
	1.03.05.2.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	233 SR	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai		2,851,059,080	3,500,000,000		KA. SEKSI PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	APBD
								Penyusunan DED Perencanaan SR	2 dokumen							
	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa	230 SR	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai	Kota Yogyakarta	1,611,350,000	2,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	APBD
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Air Limbah	1.149 m	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai	Kota Yogyakarta	4,847,771,280	5,500,000,000		KA. UPT PAL	APBD
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	87.58%					2,477,600,000	3,100,000,000		KA. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										2,477,600,000	3,100,000,000	Reguler		
	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Sistem Drainase	125 m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	641,000,000	1,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Saluran Drainase	45 m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	226,600,000	300,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Sistem Drainase	10.000m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	1,610,000,000	1,800,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	96.71%					10,504,736,980	15,500,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota										10,504,736,980	15,500,000,000	Reguler		
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Permukiman	513 m3	Terbangun dan terpeliharanya Talud Permukiman	Kota Yogyakarta	8,083,248,160	13,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penataan Kawasan Permukiman	5 kawasan							
	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Talud Permukiman	406 m3	Terbangun dan terpeliharanya Talud Permukiman	Kota Yogyakarta	2,421,488,820	2,500,000,000		KA. SEKSI PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	APBD
								Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	10 pekerjaan							
								Land Clearing Kawasan Prioritas	5000 m2							
								Penyusunan DED	1 dokumen							
Program Pembangunan Gedung Pemerintah	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai dengan standar kebutuhan	90%					33,806,003,648	36,970,000,000		KA. BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										33,806,003,648	36,970,000,000	Reguler		
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Rekomendasi IMB	800 Rekomendasi IMB	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	389,905,000	470,000,000		KA. SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN	APBD
								Pengawasan Pelaksanaan IMB	12 bulan							
								Rekomendasi SLF	100 Rekomendasi SLF							
								Rekomendasi SKB	100 Rekomendasi SKB							
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuaui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan DED	8 dokumen	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	855,039,784	1,500,000,000		KA. SEKSI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG	APBD
								Kajian Lingkungan	1 Dokumen							
								Rekomendasi Keandalan Bangunan	1 dokumen							
								Updating Data Ledger	1 dokumen							
	1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan dan Renovasi Gedung	14 Lokasi			32,561,058,864	35,000,000,000		KA. SEKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG	APBD
								Pemeliharaan Jaringan Listrik / Tambah daya	1 pekerjaan							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Prosentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik	89%					80,438,633,000	101,700,000,000		KA. BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	
						Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	51.04%									
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										80,438,633,000	101,700,000,000	Reguler		
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan PJU Jalan Protokol	200 titik	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	Kota Yogyakarta	24,113,890,000	35,000,000,000		KA. UPT PJU	APBD
								Peningkatan PJU Kampung	235 titik							
								Peningkatan PJU Lingkungan	300 titik							
								Penyusunan DED Peningkatan PJU dan DED Pemeliharaan PJU TH. 2022	4 dokumen							
								Pendataan PJU Tahap IV	1 Dokumen							
	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Berkala Jalan	30.000 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	11,616,740,000	20,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	APBD
	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pedestrian Jl. Senopati	2400 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	16,231,000,000	17,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	DAIS
	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Gramedia - Bethesda)	4400 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	20,374,743,000	21,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	DAIS
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin Jalan	10.083 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	7,423,480,000	8,000,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	APBD
								Data Kondisi Jalan	2 Dokumen							
	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin Jembatan	239,39 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	678,780,000	700,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	APBD
								Data Kondisi Jembatan	1 dokumen							
PROGRAM BARU	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Prosentase tenaga kerja trampil	67.47%					344,265,000	369,016,250		KA. BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	
						Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	12%									
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										228,690,000	245,000,000	Reguler		
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga trampil konstruksi	210 orang			83,140,000	85,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga trampil konstruksi tersertifikasi	210 orang			73,500,000	80,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD
	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi	4 kali			72,050,000	80,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										115,575,000	124,016,250	Reguler		
	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan SIPJAKI	12 bulan	Terselenggaranya layanan SIPJAKI	Kota Yogyakarta	3,825,000	4,016,250		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD
	1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	1 Dokumen			111,750,000	120,000,000		KA. SEKSI PENDATAAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI	APBD
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	90%					1,110,000,000	1,300,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										1,110,000,000	1,300,000,000	Reguler		
	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	Terwujudnya Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	1,110,000,000	1,300,000,000		KA. UPT RUSUNAWA	APBD
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	71.57%					3,099,900,000	3,250,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										3,099,900,000	3,250,000,000	Reguler		
	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	2 dokumen	tersusunnya DED penataan dan pencegahan permukiman kumuh	Kota Yogyakarta	205,400,000	250,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD
								Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman	1 dokumen							
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	152 unit	meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni, menjadi layak huni	Kota Yogyakarta	2,894,500,000	3,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD
					Total							163,132,547,168	199,634,016,250			

Tabel 5.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Prosentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran.	100%						5,108,891,736	5,619,780,909	Sekretaris Dinas	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai.	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										19,750,000	21,725,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021.	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	3,075,000	3,382,500	Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	9,475,000	10,422,500	Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Buku Profil OPD	1 Buku							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD.	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	1,750,000	1,925,000	Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renja OPD.	1 Dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah.	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	2,250,000	2,475,000	Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	3,200,000	3,520,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,266,325,844	4,692,958,428	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	38 ASN	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	4,239,850,844	4,663,835,928		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,450,000	1,595,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,450,000	1,595,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	5,800,000	6,380,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,850,000	2,035,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	3,200,000	3,520,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	9,100,000	10,010,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,450,000	1,595,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	2,175,000	2,392,500		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										822,815,892	905,097,481	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	13.000 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,200,000	3,520,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	10.000 Surat							
								Meterai	550 Lembar							
								Administrasi Bank	2 Buku							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Rekening Telephone	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,200,000	4,620,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,825,000	8,607,500		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 Unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	97,071,672	106,778,839		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat				Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	84,000,000	92,400,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	37,723,820	41,496,202		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetak	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	48,150,000	52,965,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Penggandaan	60.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,495,000	13,744,500		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Meja Biro	1 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	30,800,000	33,880,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Komputer PC	1 Unit							
								Printer	2 buah							
								Eksternal Harddisk	3 buah							
								Mike Wirelles	5 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jam Dinding	14 Buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,720,400	13,992,440		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,700,000	4,070,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	2.750 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,500,000	42,350,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	10 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	130,900,000	143,990,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	4 kali							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Dispartu	1 Lokasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	124,300,000	136,730,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 2	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	143,560,000	157,916,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Roda 4	5 Unit							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,100,000	5,610,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			AC Split Printer Kamera Pompa Air Sepeda	12 Unit 8 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,570,000	42,427,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	78.64%					2,284,771,800	2,513,248,980		Ka. Bidang Tata Ruang	
Program Pengendalian Tata Ruang						Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	62.25%									
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota										449,100,180	494,010,198	Baru		
	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Penetapan Raperda RTRW	1 Dokumen Raperda RTRW	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	249,903,040	274,893,344		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang	APBD
	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Penetapan Raperwal RTBL Kawasan Jetis	1 Dokumen Perwal RTBL	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	71,573,040	78,730,344		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang	APBD
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota.	750 Dokumen Telaah Teknis KRK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	127,624,100	140,386,510		Ka Seksi Pembinaan Tata Ruang	APBD
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota										922,400,000	1,014,640,000	Baru		
	1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Raperwal Penerapan Insentif, Disinsentif dan Teknik Pengaturan Zonasi	1 Dokumen Raperwal	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	412,200,000	453,420,000		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang	APBD
								Raperwal Petunjuk Pelaksanaan Perda RTRW	1 Dokumen Raperwal							
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kraton	1 Dokumen RTBL	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	277,980,000	305,778,000		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang	APBD
	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Kajian Rencana Pengembangan Jalan dan Arahan GSB di Kota Yogyakarta	1 Dokumen Kajian	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	232,220,000	255,442,000		Ka Seksi Pembinaan Tata Ruang	APBD
								Kajian Pengaturan Ruang Bawah Bumi di Kota Yogyakarta	1 Dokumen Kajian							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota										675,671,620	743,238,782	Baru		
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Kajian evaluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	1 Dokumen Kajian	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemnfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang	100%	344,348,000	378,782,800		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	APBD
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Rencana Induk Penyelenggaraan informasi geospasial	1 Dokumen	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemnfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang	100%	331,323,620	364,455,982		Ka Seksi Pembinaan Tata Ruang	APBD
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota										237,600,000	261,360,000	Baru		
	1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberian Insentif Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	41,579,780	45,737,758		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	APBD
								Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen Laporan							
								Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penataan Ruang	1 Dokumen Laporan							
	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Audit Tata Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	141,479,780	155,627,758		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	APBD
								Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen							
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	54,540,440	59,994,484		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	APBD
Pertanahan	2.10.02	LOKASI				Persentase penerbitan Izin Lokasi	100%					10,785,000	11,863,500			
	2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										10,785,000	11,863,500	Baru		
	2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	5 Dokumen Perizinan	Terwujudnya tertib administrasi pengendalian pertanahan.	100%	10,785,000	11,863,500		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengelolaan Pertanahan	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta.	100%					273,535,000	300,888,500		Ka. Bidang Pengendalian dan Pengawasan	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.										273,535,000	300,888,500	Baru		
	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penanganan Permasalahan Pertanahan.	4 Dokumen Permasal ahan Pertanah an	Kejelasan status hukum pertanahan.	100%	148,535,000	163,388,500		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	APBD
	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Rekomendasi Penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	25 Rekomen dasi			125,000,000	137,500,000		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	DAIS
Program Pengelolaan Pertanahan	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan Tanah.	96.70%					6,113,897,040	6,725,286,744		Ka. Bidang Pertanahan	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										6,113,897,040	6,725,286,744	Baru		
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Tanah untuk RTHP Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Sorosutan dan Kelurahan Ngampilan	3 lokasi	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%	6,113,897,040	6,725,286,744		Ka Seksi Pemanfaatan Pertanahan	APBD
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	3 Dokumen							
Program Pengelolaan Pertanahan	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	98.26%					378,964,820	416,861,302		Ka. Bidang Pertanahan	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				Rekomendasi Pemanfaatan tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten	100%					378,964,820	416,861,302	Baru		
	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendaftaran Pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta (Wilayah Kecamatan Danurejan, Mantrijeron, Jetis, Mergangsan, Wirobrajan, Kotagede, Tegalrejo, Umbulharjo)	10 Bidang	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	134,964,820	148,461,302		Ka Seksi Penatausahaan Pertanahan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pembuatan/perubahan peta bidang Persil untuk Fasilitas Umum (fasum) di Wilayah Kota Yogyakarta.	5 Bidang							
								Pengurusan Permohonan baru/perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwon Kraton Ngayogyakarta Hadingrat di Wilayah Kecamatan Danurejan, Paku Alaman, Mantrijeron, Jetis, Mergangsan, Wirobrajan, Kotagede, Gondokusuman dan Umbulharjo)	25 Bidang							
								Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta	1 Dokumen							
	2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta	200 Rekomendasi			244,000,000	268,400,000		Ka Seksi Pemanfaatan Pertanahan	DAIS
Program Pengelolaan Pertanahan	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				Presentase Kejelasan batas wilayah antar kabupaten dan kota, antar kecamatan dan antar kelurahan.	93.33%					744,942,584	819,436,843		Ka. Bidang Pertanahan	
						Presentase Kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara.	75%									
						Terdaftar nya 100 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta ke BPN Kota Yogyakarta	100%									
						Data Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan 75 bidang potensi tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta	100%									
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										744,942,584	819,436,843	Baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	50 buah	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	288,602,584	317,462,843		Ka Seksi Pemanfaatan Pertanahan	APBD	
								Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan pertanahan	10 lokasi								
								Penyelesaian rekomendasi pemanfaatan tanah negara	15 rekomend asi								
								Papan batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	20 buah								
	2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Badan Pertanahan Nasional	100 Bidang Tanah			456,340,000	501,974,000		Ka Seksi Penatausahaan Pertanahan	DAIS	
								Identifikasi 75 bidang Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	1 Dokumen								
Total												14,915,787,980	16,407,366,778				

Tabel 5.7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%					15,244,284,147	16,778,450,728		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,054,000	10,969,000	Lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Reviu Renstra OPD			3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,210,000	1,331,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja			6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,754,000	1,930,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,160,000	1,918,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD			6 dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,610,000	2,895,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,320,000	2,895,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										13,915,280,892	15,306,811,000	baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Gaji dan Tunjangan ASN			135 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,910,490,892	15,301,540,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	135 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban)	3 jenis dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan)	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	794,000	874,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Bulanan), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Pengukuran Kinerja, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	6 jenis dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,502,000	2,753,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	26 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	794,000	874,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	80,000	88,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	80,000	88,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,319,949,255	1,460,670,728	Lanjutan			

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Keluar	50 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	5,150,000	5,665,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Materai Pengganti beaya materai pada cek	800 lembar 10 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	5,400,000	5,400,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 (44 unit), roda 4 (32 unit), roda 6 (2 unit)	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	48,230,000	53,000,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa KIR	32 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	191,171,280	210,288,408		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	198,968,000	199,000,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	66 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	31,234,625	63,552,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	56,755,000	62,430,500		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	150.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	8,453,700	9,290,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen komputer/printer	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	33,995,000	37,394,005		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	20,475,000	22,522,500		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,400,000	2,640,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	1440 OS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	21,760,000	23,936,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (5 orang), Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Jawa 5 orang), Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (3 orang)	17 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	89,400,000	98,340,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan gedung kantor Satpol PP	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	20,000,000	22,000,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (44 unit), Roda 4 (32 unit), Roda 6 (2 unit), Sepeda (7 unit)	85 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	567,841,650	624,625,815		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer/laptop (20 unit), AC Split (15 unit), printer (10 unit), HT (48 unit), Mesin Ketik (13 buah), Barang elektronik (5 unit), Kamera (8 buah), pompa air (1 unit), Genset listrik (1 unit), Jasa cuci gorlyn, vitrage, taplak (4 kali)	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	18,715,000	20,586,500		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										15,175,712,600	16,693,285,382		Kabid Penegakan Peraturan Perundangan, Kabid Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat, Kabid Pengembangan Kapasitas, Kabid Perlindungan Masyarakat	
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat																
Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan																

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Perlindungan Masyarakat						Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	75%									
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										7,325,489,744	8,058,040,240	Lanjutan		
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan	120 pengamanan	Kondisi yang aman bagi masyarakat, kegiatan pemkot, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	4,244,632,280	4,669,095,508		Ka. Seksi Pengamanan	APBD
								Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balaikota dan Rumah Dinas)	2 objek							
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Monitoring dan penyelidikan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	48 laporan operasi	Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	167,078,460	183,786,306		Ka. Seksi Kewaspadaan Dini	APBD
								Monitoring Bina Pelajar	14 kecamatan							
	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Hasil naskah kerjasama yang tersusun	4 naskah kerjasama			75,092,820	82,602,102		Ka. Seksi Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	APBD
								Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar	3 kali							
								Permasalahan Penegakan produk hukum yang dikaji (Perda Tibum, Perda Parkir, Perda Pondokan, Perda KTR, Perda Miras, dan peraturan perundang-undangan lainnya)	10 perda							
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Piket Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta (20 orang per shift, 3 shift per hari)	365 hari	Meningkatnya kapasitas kinerja dan keterampilan petugas linmas dalam penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas Kota Yogyakarta serta mendukung pengendalian gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	1,318,169,352	1,449,987,000		Ka. Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas	300 buah								
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Kesamaptaan bagi Pol PP dan linmas (60 orang pol pp dan 50 orang linmas)	11 kali	Meningkatnya kesiapsiagaan, kecepatan dan ketepatan PPNS dan Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda	100%	181,311,992	199,444,000		Ka. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM	APBD	
								Tes kesamaptaan (60 orang)	2 kali								
								Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan (Peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perparkiran, pondokan, reklame, bangunan gedung, penyelenggaraan LLAJ, dan Peraturan Perundang-Undang yang lain)	8 peraturan perundang-undangan								
								Pembekalan Sat Linmas (50 orang)	3 kali								
	1.05.02.2.01.06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Satpol PP			Workshop Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (100 orang)	2 kali	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pejabat fungsional Pol PP	100%	17,500,000	19,250,000		Ka. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM	APBD	
	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Gerakan Kampung Panca Tertib	80 kampung	Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta	170 kampung	1,321,704,840	1,453,875,324		Ka. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	APBD	
								Gerakan Pantib for School	6 sekolah								
								Evaluasi Implementasi Gerakan Panca Tertib	12 laporan								
	1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota										7,844,642,856	8,629,107,142	Lanjutan			
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda	12 laporan	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi	100%	7,666,878,008	8,433,565,809		Ka. Seksi Pengendalian Operasional	APBD	
								Penanganan pelanggaran perda dan perkara	12 laporan								
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi	12 laporan	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi	100%	177,764,848	195,541,333		Ka. Seksi Penyidikan	APBD	
								Penegakan hukum terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	12 pelanggaran								
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota										5,580,000	6,138,000	baru			

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Coaching clinic PPNS (20 orang)	1 kali	Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme PPNS	100%	5,580,000	6,138,000		Ka. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM	APBD
Total												30,419,996,747	33,471,736,110			

Tabel 5.8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%				7,139,207,571	7,480,055,000			Sekretaris Dinas Kebakaran	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										19,210,000	20,900,000	lanjutan			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta		Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen		Tersusunnya Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	4,800,000	5,200,000		Ka Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta		DPA dan DPPA 2021	2 dokumen		Dokumen DPA dan DPPA 2021	2 dokumen	9,570,000	10,500,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta		Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4,840,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										6,086,507,312	6,231,200,000	Lanjutan			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	53 ASN		Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	53 ASN	6,057,735,312	6,200,000,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KotaYogya karta		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1000 dokumen		Tersedianya bahan Pelaksanaan Verifikasi	1000 dokumen	4,840,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14 Dokumen		Tersusunnya dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14 Dokumen	4,620,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan bulanan)	12 dokumen		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan bulanan)	12 Dokumen	4,800,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
							Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 dokumen		Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 Dokumen						

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen						
								Laporan Pengukuran Kinerja	4 Dokumen	Tersusunnya Laporan Pengukuran Kinerja	4 Dokumen						
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	18 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	18 Dokumen	4,840,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4,800,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	4,872,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,033,490,259	1,227,955,000	lanjutan			
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Meterai	340 lembar	Tersedianya Meterai	340 lembar	2,100,000	2,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan RPU	1 tahun	RPU terpelihara	1 tahun	98,302,000	99,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
								Pengadaan pulsa telepon Kepala Dinas	12 bulan	Tersedianya pulsa telepon Kepala Dinas	12 bulan						
								belanja rekening telepon	12 bulan	Tersedianya telepon kantor	12 bulan						
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengujian KIR Kendaraan Operasioal	28 kali	Kendaraan Operasional Lulus Uji KIR	28 kali	71,050,000	78,155,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
								Perpanjangan STNK	40 unit	STNK Kendaraan terbayar pajaknya	40 unit						
								Perpanjangan SIM pengemudi kendaraan PK	2 kali	SIM pengemudi kendaraan PK diperpanjang berlakunya	2 kali						
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Biaya Transfer/Administrasi Bank	120 kali	Biaya Transfer/Administrasi Bank terbayar	120 kali	19,600,000	20,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
								Biaya Sewa Tempat/Lokasi RPU	2 lokasi	Sewa Tempat/Lokasi RPU terbayar	2 lokasi						
								Biaya Perijinan RPU	1 tahun	Perijinan RPU terbayar	1 tahun						
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Jasa Kebersihan	12 bulan	Tersedianya jasa kebersihan	12 bulan	144,000,000	158,400,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
								Pengadaan Higienis System	12 bulan	Tersedianya jasa higienis system	12 bulan						
	X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan komputer, Printer, Laptop, kamera, dan alat elektronik lainnya	56 kali	Tersedianya Jasa pemeliharaan komputer, Printer, Laptop, kamera, dan alat elektronik lainnya	56 kali	19,850,000	20,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Alat Tulis Kantor	65 Jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	65 jenis	21,591,573	22,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja barang cetak	91.000 lembar	tersedianya barang cetakan	91.000 lembar	18,800,000	22,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	

RPJMD 2017-2022	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Belanja penggandaan	50 buah	tersedianya penggandaan	50 buah					
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	8,802,500	8,800,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	53,533,146	89,100,000			APBD
								Pengadaan bahan dan alat Kebersihan	8 jenis	Tersedianya bahan dan alat Kebersihan	8 jenis					
								Pengadaan Bahan Komputer/Printer	8 jenis	Tersedianya Bahan Komputer/Printer	8 jenis					
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	113,666,040	115,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD
								Pengadaan Pakaian Olahraga	2 jenis	Tersedianya Pakaian Olahraga	2 jenis					
								Pengadaan pakaian dinas	2 jenis	Tersedianya pakaian dinas	2 jenis					
								Penyediaan jamuan rapat	350 os	Tersedianya jamuan rapat	350 os					
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan makan minum rapat	99 kali	Tersedianya makan minum rapat	99 kali	17,730,000	22,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	12 kali	Tersedianya biaya perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 kali	224,900,000	250,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung kantor	1 lokasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung kantor	1 lokasi	100,000,000	200,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan	5 unit	Tersedianya jasa pemeliharaan mobil jabatan	5 unit	72,850,000	73,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan penggantian suku cadang kend roda 4	5 unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas jabatan	5 unit	40,665,000	42,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD
								Penyediaan bahan bakar minyak/gas kend roda 4	5 unit	Tersedianya bahan bakar minyak/gas kend 4	5 unit					
								Penyediaan Pelumas roda 4	5 unit	Tersedianya Pelumas roda 4	5 unit					
								Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasioal kend roda 2	16 unit	Trsedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasioal kend roda 2	16 unit					
								Penyediaan penggantian suku cadang kend roda 2	16 unit	Tersedianya penggantian suku cadang kend roda 2	16 unit					
								Penyediaan bahan bakar minyak/gas kend roda 2	16 unit	Tersedianya bahan bakar minyak/gas kend roda 2	16 unit					
								Penyediaan Pelumas roda 2	16 unit	Tersedianya Pelumas roda 2	16 unit					
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Genzet, AC, Mebeleir, dan perlengkapan kantor lainnya	4 jenis	Terlaksananya pemeliharaan Genzet, AC, Mebeleir, dan perlengkapan kantor lainnya	4 jenis	6,050,000	6,500,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program pencegahan kebakaran	1.05.04	PROGRAM KEBAKARAN					Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	99%					5,154,372,500	6,378,000,000		Ka Bidang Pencegahan	
Program penanggulangan kebakaran							Persentase edukasi proteksi kebakaran	97%									
							Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%									
							Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100%									
							Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100%									
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										4,284,065,000	5,410,000,000	lanjutan			
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup		Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Konstruksi Hidran Kampung	1 lokasi	Bangunan Hidran Kampung	1 lokasi	1,580,002,000	2,000,000,000		Ka Seksi Pencegahan dan Inspeksi	APBD
									Pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran	20 pemeriksaan	Terlaksananya pemeriksaan peralatan protksi kebakaran	20 pemeriksaa n					
									Pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran	20 pemeriksaan	Terlaksananya pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran	20 pemeriksaa n					
									Pemeriksaan usaha dibidang proteksi kebakaran	5 pemeriksaan	Terlaksananya pemeriksaan usaha di bidang proteksi kebakaran	5 pemeriksaa n					
									Pemeliharaan hidran kampung	10 hidran	Terlaksananya pemeliharaan hidran kampung	10 hidran					
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup		Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian operasional pemadaman : apel kesiapsiagaan, rapat skill competition Emergency Response Team (ERT), rapat koordinas	180 org x 1354 kali	Terkendalinya operasional pemadaman : apel kesiapsiagaan, rapat skill competition Emergency Response Team (ERT), rapat koordinas	180 org x 1354 kali	2,427,181,000	3,000,000,000		Ka Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan Rutin Bagi Petugas Pemadam Kebakaran	80 org x 6 kali	Terlaksananya Pelatihan Rutin Bagi Petugas Pemadam Kebakaran	80 org x 6 kali					
								Pelatihan Skill Competetion	30 org x 15 kali	Terlaksananya Pelatihan Skill Competetion	30 org x 15 kali					
								Pengadaan APD Petugas Pemadam Kebakaran	45 unit	Tersedianya APD Petugas Pemadam Kebakaran	45 unit					
								Pengadaan seragam petugas teknik	10 bh	Tersedianya seragam petugas teknik	10 bh					
								Pengadaan seragam petugas piket	12 bh	Tersedianya seragam petugas piket	12 bh					
								Pengadaan seragam petugas TT	24 bh	Tersedianya seragam petugas TT	24 bh					
								Pengadaan sarana radio komunikasi	23 unit	Tersedianya sarana radio komunikasi	23 unit					
								Perawatan mobil pemadam kebakaran	10 unit	Terlaksananya perawatan mobil pemadam kebakaran	10 unit					
								Perawatan pompa air	2 unit	Terlaksananya perawatan pompa air	2 unit					
								Perawatan peralatan pemadam kebakaran	68 unit	Terlaksananya perawatan peralatan pemadam kebakaran	68 unit					
								Perawatan mesin Pemadam kebakaran	15 unit	Terlaksananya perawatan mesin Pemadam kebakaran	15 unit					
								Perawatan APD petugas pemadam kbakaran	50 kali	Terlaksananya perawatan APD petugas pemadam kbakaran	50 kali					
								Operasional BBM dan pelumas mobil pemadam kebakaran	10 unit	Tersedianya Operasional BBM dan pelumas mobil pemadam kebakaran	10 unit					
								Operasional BBM dan pelumas mesin pompa dan peralata PK	11 unit	Tersedianya Operasional BBM dan pelumas mesin pompa dan peralata PK	11 unit					
	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian operasioanl penyelamatan	26 org x 22 kali	Terkendalinya operasioanl penyelamatan	26 org x 22 kali	219,382,000	300,000,000		Kepala Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan	APBD
								Pengadaan APD petugas penyelamat	18 unit	Tersedianya APD petugas penyelamat	18 unit					
								Pengadaan seragam petugas penyelamatan	15 set	tersedianya seragam petugas penyelamatan	15 set					
								Pengadaan peralatan pendukung dan mesin penyelamatan	25 unit	Tersedianya peralatan pendukung dan mesin penyelamatan	25 unit					
								Perawatan mobil Penyelamatan	1 unit	Terlaksananya Perawatan mobil Penyelamatan	1 unit					
								Perawatan mesin Penyelamatan	7 unit	Terlaksananya Perawatan mesin Penyelamatan	7 unit					

RPJMD 2017-2022	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Operasional BBM dan pelumas mobil Penyelamatan	1 unit	Tersedianya Operasional BBM dan pelumas mobil Penyelamatan	1 unit					
								Operasional BBM dan pelumas peralatan dan mesin penyelamat	17 unit	Tersedianya Operasional BBM dan pelumas peralatan dan mesin penyelamat	17 unit					
	1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			pengadaan alat pelindung diri (APD) petugas penanganan bahan berbahaya dan beracun	20 unit	Tersedianya alat pelindung diri (APD) petugas penanganan bahan berbahaya dan beracun	20 unit	57,500,000	110,000,000		Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan	APBD
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										117,610,000	168,000,000	Baru		
	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	Data sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	50,000,000	100,000,000		Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	APBD
	1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan standar sarana prasarana PK dan Penyelamatan	1 dokumen	Standar sarana prasarana PK dan Penyelamatan	1 dokumen	67,610,000	68,000,000		Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana	APBD
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran										379,450,000	400,000,000	baru		
	1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			investigasi, inventarisasi dan taksasi kerugian kebakaran di Kota Yogyakarta	50 kejadian	Terlaksananya investigasi, inventarisasi dan taksasi kerugian kebakaran di Kota Yogyakarta	50 kejadian	379,450,000	400,000,000		Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan	APBD
								Pengadaan Peralatan kerja investigasi	8 jenis	Tersedianya Peralatan kerja investigasi	8 jenis					
								Pengadaan pakaian kerja lapangan	30 unit	Tersedianya pakaian kerja lapangan	30 unit					
								Bantuan Sosial musibah kebakaran	4 kejadian x 12 bulan	Tersalurkannya bantuan sosial musibah kebakaran	4 kejadian x 12 bulan					
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										373,247,500	400,000,000	lanjutan		
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	45 kegiatan	Terlaksananya penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kelurahan	45 kegiatan	373,247,500	400,000,000		Kepala Seksi Penyuluhan dan Edukasi	APBD
								edukasi proteksi kebakaran bagi siswa KB/PAUD/TK/SD	60 kali	Terlaksananya edukasi proteksi kebakaran bagi siswa KB/PAUD/TK/SD	60 kali					
								Simulasi Kebakaran	1 kali	Terlaksananya simulasi kebakaran	4 kali					

Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemberdayaan Satlakar	2 hari	Terlaksananya pelatihan bagi satlakar	2 hari					
								Kelembagaan Satlakar	45 Kelurahan	Terbentuknya kelembagaan sat;akar	45 kelurahan					
Total												12,293,580,071	13,858,055,000			

Tabel 5.9 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,667,454,208	2,667,454,208		Kepala Sekretariat	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										17,219,000	17,219,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,910,000	2,910,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Website OPD yang dikelola secara rutin		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,954,000	5,954,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		7 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,265,000	2,265,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,450,000	3,450,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV		6 dokumen								
						Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran		24 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,450,000	3,450,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
						Dokumen RKA dan RKPA yang disusun		2 dokumen								

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Dokumen DPA dan DPPA yang disusun	2 dokumen							
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,640,000	2,640,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan	12 dokumen							
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1,785,502,508	1,785,502,508	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	18 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,779,732,508	1,779,732,508		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,200,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,200,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,200,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	500,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,670,000	1,670,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										847,632,700	847,632,700	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Surat Masuk	2000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,800,000	1,800,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jumlah Surat Keluar	1500 surat							
								Materai 6000 yang tersedia	200 buah							
								Materai 3000 yang tersedia	200 buah							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,600,000	12,600,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
								Pembayaran rekening air	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		33,000,000	33,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	116 unit							
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	13 unit							
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 6	1 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		50,780,000	50,780,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	70,000,000	70,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,727,500	13,727,500		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetak yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28,800,000	28,800,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat-surat/Dokumen yang digandakan	100.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,200,000	2,200,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer notebook yang dibeli	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,850,000	26,850,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Printer yang dibeli	2 unit							
								Bahan-bahan komputer/printer yang dibeli	10 jenis							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Langganan Surat kabar lokal sebanyak 1 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,900,000	1,900,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Buku tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis							
								Buku tentang kebencanaan yang tersedia	7 jenis							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan minum rapat yang tersedia	1745 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	31,270,000	31,270,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5 orang 5 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	84,450,000	84,450,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	2 orang 2 kali							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 orang 1 kali							
								Perjalanan Dinas Diklat	2 orang 3 kali							
	X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Kursi Kerja	19 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,905,200	19,905,200		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pengadaan sofa tamu	1 set							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100,000,000	100,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan kendaraan roda 2 yang terlaksana	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	363,350,000	363,350,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan kendaraan roda 3 yang terlaksana	116 unit							
								Pemeliharaan kendaraan roda 4 yang terlaksana	13 unit							
								Pemeliharaan kendaraan roda 6 yang terlaksana	1 unit							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Komputer	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,000,000	7,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan Printer	8 unit							
								Pemeliharaan AC	4 unit							

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									17,100,000	17,100,000	Baru			
		X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pakaian dinas dan perlengkapannya	18 stel	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,100,000	17,100,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													Kepala Bidang Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										2,778,676,500	2,778,676,500	Lanjutan		
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pelatihan Komunikasi; Pelatihan PPGD; Pelatihan Vertical Rescue; Pelatihan Tenda; Pelatihan Chainsaw)	22 kali	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	756,408,000	756,408,000	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	APBD	
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pusat Data dan Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana yang terselenggara	12 bulan	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	237,520,000	237,520,000	Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Kedaruratan	APBD	
									Perawatan Peralatan Tanggap Darurat	39 unit							
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembantuan Kampung Tangguh Bencana	15 KTB	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1,316,746,000	1,316,746,000	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	APBD	
									Petunjuk arah jalur evakuasi dan titik kumpul (10 KTB dan 5 OPD)	60 buah							
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Pendataan Kerusakan Pasca Kejadian Bencana	50 kejadian	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	445,220,000	445,220,000	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	APBD	
									Rehabilitasi Infrastruktur/Rumah Rusak akibat Kejadian Bencana	12 lokasi							
									Penanganan Rekonstruksi pasca kejadian bencana	2 lokasi							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	BPBD			Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Rutin Tanggap Darurat	4 kali	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	22,782,500	22,782,500		Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Kedaruratan	APBD
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										1,191,721,800	1,191,721,800	Baru		
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kejadian	Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1,098,716,800	1,098,716,800		Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Kedaruratan	APBD
								Operasional Pusdalops PB Admin	5 org							
								Operasional Pusdalops PB TRC	26 org							
								Operasional Mobil Jenazah	6 unit							
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Jamuan Makan Minum Kedaruratan	2000 oh	Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	93,005,000	93,005,000		Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	APBD
								Logistik Non Makanan (karung, terpal, pacul, sekop, linggis, parang bambu, godam)	7 jenis							
Total												6,637,852,508	6,637,852,508			

Tabel 5.10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					13,454,967,074	13,454,967,074			Sekretaris
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										32,351,000	32,351,000	Sedang berjalan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD			3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,916,000	8,916,000		Kepala Subbag PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD			12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	16,825,000	16,825,000		Kepala Subbag PEP	APBD
						Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja			7 dokumen		100%					
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,610,000	6,610,000		Kepala Subbag PEP	APBD
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV			6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										10,097,010,328	10,097,010,328	Sedang berjalan		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Gaji dan Tunjangan ASN			73 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	10,093,510,328	10,093,510,328		Kepala Subbag Keuangan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,500,000	3,500,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
								Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen							
								Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen							
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										3,325,605,746	3,325,605,746	Sedang berjalan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat masuk	4800 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	11,925,000	11,925,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat keluar	3200 surat							
								Materai	2500 lembar							
								Buku cheque	2 buku							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,060,000	12,060,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	60 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,434,000	19,434,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pendukung administrasi perkantoran/keuangan	14 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	599,124,600	599,124,600		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	715,938,246	715,938,246		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor yang tersedia	15 Kegiatan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	89,472,500	89,472,500		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	2 Jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan kelancaran operasional perkantoran	100%	46,782,000	46,782,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,991,500	7,991,500		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Kegiatan/ Seksi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	243,188,900	243,188,900		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,716,000	26,716,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,840,000	6,840,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan makan dan minum rapat	84 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	83,905,000	83,905,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi/konsultasi	13 Kegiatan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	488,700,000	488,700,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	463,668,800	463,668,800		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor dan jasa keamanan kantor	12 bulan			467,149,200	467,149,200		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	42,710,000	42,710,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
						6	7	8	9	10	11					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program data, informasi dan pemberdayaan sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	88%					743,776,500	743,776,500		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										743,776,500	743,776,500	sedang berjalan		
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			pelatihan BSD dan BSL	1 kali	Dukungan peningkatan kapasitas PSKS	100%	234,909,000	234,909,000		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	APBD
								PSM yang mendapat penyuluhan	1 kali							
								Pemberdayaan TKSK	14 orang							
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Seleksi PSKS (PSM, TKSK, Karang Taruna, LKS, WKSMBM) berprestasi	5 kejuaraan	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas PSKS	100%	456,007,500	456,007,500		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	APBD
								PSKS (Karang Taruna, LKS, WKSMBM) yang mendapat penyuluhan di 14 kecamatan	945 orang							
								Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	1 kali							
								Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota dan 3 puskesmas	4 lokasi							
								Bantuan operasional PSKS kepada K3S (Koordinasi Kesejahteraan Sosial), Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI dan Polisi (PEPABRI), Karang Taruna, PWRI, IPSM, Yayasan Anak Mandiri	6 lembaga							
	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	600 orang	Dukungan peningkatan kapasitas PSKS	100%	52,860,000	52,860,000		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
						6	7	8	9	10	11						
0	1	2	3	4	5							12	13	14	15	16	
Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	84%					8,389,729,620	8,389,729,620			Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%										
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										4,953,313,120	4,953,313,120	Sedang Berjalan			
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Penyediaan permakanan Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo	40 orang	Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar PPKS	100%	445,801,000	445,801,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD	
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Yogyakarta			Penyediaan Permakanan Anak Jalanan	20 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	180,000,000	180,000,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Umbulharjo			Penyediaan permakanan bagi lansia terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	70 lansia	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	852,191,000	852,191,000		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD	
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Penyediaan sandang Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA)	40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	78,408,000	78,408,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penganggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Yogyakarta			Penyediaan sandang bagi Anak Terlantar/Anak Jalanan	20 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	10,000,000	10,000,000		Kejala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penganggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Umbulharjo			Penyediaan sandang bagi lansia terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	70 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	164,505,000	164,505,000		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penganggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	13 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	55,000,000	55,000,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penganggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Umbulharjo			Reunifikasi keluarga untuk lansia terlantar di UPT RPSLU Budhi Dharma	36 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	16,752,000	16,752,000		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penganggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)	40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	75,200,000	75,200,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penganggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Yogyakarta			Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi penyandang disabilitas mampu latih	20 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	1,431,645,000	1,431,645,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
								Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi warga rentan hidup di Jalan Rentan Gelandangan Pengemis (Gepeng)	20 orang							
								Pemberian bantuan sosial modal usaha kelayan Yayasan Anak Mandiri	20 orang							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemberian bantuan sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas	300 orang							
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Umbulharjo			Pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia di UPT Budhi Dharma	70 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	478,811,120	478,811,120		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)	40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	181,344,000	181,344,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Yogyakarta			Pemberian motivasi, pelatihan singkat dan pemberian modal usaha bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	231,502,000	231,502,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
								Pemberian motivasi, pelatihan singkat dan pemberian modal usaha bagi Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	20 orang							
								Temu Penguatan Kapasitas Anak Terlantar dan Keluarga sebanyak 150 orang	150 orang							
	1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pemberian akses Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar dan anak jalanan.	5 anak	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	12,650,000	12,650,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pemberian biaya pendidikan dan persediaan obat-obatan bagi anak terlantar di UPT RPA Wiloso Projo	40 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	198,723,000	198,723,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui workshop (untuk 75 peserta), Penumbuhan Kecamatan Inklusi di kecamatan Mergangsan dan Pakualaman, Bimtek Forum Kecamatan Inklusi (FKI) di 12 kecamatan (untuk 360 orang)	12 bulan	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	408,351,000	408,351,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
								Akses Pelayanan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas	300 orang							
								Peringatan Hari Disabilitas Internasional	500 orang							
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Yogyakarta			Operasional pelayanan Kedaruratan sosial	20 kali	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	80,200,000	80,200,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
								Pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan PMKS dalam rangka reaksi cepat	1 tahun	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani						
								Pemberian bantuan sosial penduduk terlanjar	8 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani						

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemberian bantuan sosial ODHA tidak potensial	10 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani						
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pemberian layanan kedaruratan lansia di UPT RPSLU berupa shelter dan Day Care bagi lansia	7 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani		38,000,000	38,000,000		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharna	APBD
	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Penelusuran keluarga untuk anak terlantar	5 anak	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	9,970,000	9,970,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
	1.06.04.2.01.13	Pemberian Layanan Rujukan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			layanan rujukan untuk anak terlantar ke lembaga sosial	2 anak	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	4,260,000	4,260,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial										3,436,416,500	3,436,416,500	Sedang berjalan		
	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Penanganan Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	140 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	100%	1,984,304,500	1,984,304,500		Kepala Seksi perlindungan sosial	APBD
								Pelayanan santunan kematian	600 orang							
								Pelayanan pemakaman jenazah terlantar	30 orang							
								Layanan TRC PMKS	12 bulan							
								Bantuan Sosial Santunan Kematian sebesar @ Rp 3.000.000,-	600 orang							
								Bantuan Sosial Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	140 orang							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Yogyakarta			Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi Klien Pemasarakatan	25 orang	Dukungan penanganan PMKS lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	100%	593,955,000	593,955,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
								Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi Korban Tindak Kekerasan	40 orang							
								Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	20 orang							
								Pemberian motivasi mental, spiritual, dan sosial bagi ABH	24 orang							
	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Umbulharjo			Pengawasan dan Pemantauan kesejahteraan lansia melalui Komisi Daerah lanjut usia	1 rekomendasi pemenuhan kesejahteraan lansia	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	100%	64,360,000	64,360,000		Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial	APBD
								Musrenbang Tematik lansia	1 kali							
								Kunjungan relawan kepada lansia melalui Jogja Sapa Lasia	50 lansia							
	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE (404 KUBE) dan USEP (54 USEP) di 45 kelurahan	458 kelompok	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	100%	733,120,000	733,120,000		Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial	APBD
								Bimtek Pengembangan KUBE	20 kelompok							
								Bimtek Penumbuhan KUBE	20 orang							
								Bimtek Manajemen Usaha E warong KUBE jasa	25 kelompok							
	1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Rekomendasi keringanan biaya pendidikan (100 orang) dan penjaminan kesehatan (50 orang) bagi warga miskin	150 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	100%	60,677,000	60,677,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	85%					17,005,367,840	17,005,367,840		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100%									
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar										12,450,000	12,450,000	sedang berjalan		
	1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Pendampingan dan Monev penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA.	16 LKSA	Dukungan terhadap pemeliharaan anak - anak terlantar	100%	12,450,000	12,450,000		Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										16,992,917,840	16,992,917,840	Sedang berjalan		
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Verifikasi, validasi dan analisa data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS)	1 dokumen	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1,838,653,840	1,838,653,840		Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial	APBD
								Verifikasi, validasi dan analisa data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2 dokumen							
								Verifikasi dan Validasi data Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)	1 dokumen							
								Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1 dokumen							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Penyaluran Program sembako	13.133 KPM	Dukungan terhadap Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	100%	15,154,264,000	15,154,264,000		Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial	APBD
								Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan	11.068 KPM							
								Assesment calon penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PKH Graduasi	50 KPM							
								Penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar	6.672 Orang							
								Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar selama 12 bulan sebesar @ Rp 180.000,-	6.672 Orang							
Indikator Baru yang dimunculkan tahun 2021, dulunya masuk dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										287,230,000	287,230,000		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					Persentase korban bencana yang tertangani		100%			98,660,000	98,660,000	sedang berjalan		
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	kota yogyakarta			Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock logistik bencana target	5 jenis	Dukungan terhadap perlindungan korban bencana	100%	85,140,000	85,140,000		Kepala Seksi perlindungan sosial	APBD
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	kota yogyakarta			Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock sandang bagi korban bencana	184 paket	Dukungan terhadap perlindungan korban bencana	100%	9,200,000	9,200,000		Seksi perlindungan sosial	APBD
	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	kota yogyakarta			Pendampingan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan	14 kecamatan	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100%	2,160,000	2,160,000		Seksi perlindungan sosial	APBD
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	kota yogyakarta			Pendampingan Dukungan Psikososial	14 kecamatan	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100%	2,160,000	2,160,000		Kepala Seksi Perlindungan Sosial	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										188,570,000	188,570,000	sedang berjalan		
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Pengunggulan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	kota yogyakarta			Operasional Kampung Siaga Bencana	3 KSB	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100%	14,100,000	14,100,000		Kepala Seksi Perlindungan Sosial	APBD
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Pengunggulan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	kota yogyakarta			Operasional TAGANA	57 Tagana	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100%	174,470,000	174,470,000		Kepala Seksi perlindungan sosial	APBD
								Operasional Tenaga Pelopor Perdamaian	35 orang							
								Penguatan Kapasitas personil Taruna Siaga Bencana	57 Tagana							
								Penyebarluasan media informasi kebencanaan	14 Kecamatan							
Indikator Baru yang dimunculkan tahun 2021, dulunya masuk dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										32,805,000	32,805,000		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										32,805,000	32,805,000	sedang berjalan		
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Pengunggulan Kemiskinan	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Perawatan makam pahlawan selama 12 bulan	9 makam	Makam pahlawan terawat	100%	32,805,000	32,805,000		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	APBD
Indikator Baru yang dimunculkan tahun 2021, dulunya masuk dalam Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										160,938,400	160,938,400		Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										160,938,400	160,938,400	sedang berjalan		
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	kota yogyakarta			Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun	1 Dokumen	Dukungan terhadap perencanaan tenaga kerja daerah	100%	160,938,400	160,938,400		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Data Penganggur Kota Yogyakarta	1 Dokumen							
Indikator Baru yang dimunculkan tahun 2021, dulunya masuk dalam Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91%			-		1,828,046,900	1,828,046,900		Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										1,703,650,000	1,703,650,000	Sedang Berjalan		
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Keterampilan	500 orang	Dukungan terhadap peningkatan keterampilan pencari kerja	100%	1,703,650,000	1,703,650,000	Sedang Berjalan	Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										120,046,900	120,046,900	Sedang Berjalan		
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina	20 LPK	Dukungan terhadap penguatan kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja	100%	120,046,900	120,046,900	Sedang Berjalan	Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil										4,350,000	4,350,000	Sedang Berjalan		
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Kota Yogyakarta			Perusahaan dan UKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya	50 UKM/Perusahaan	Dukungan terhadap peningkatan produktivitas perusahaan dan UKM	100%	4,350,000	4,350,000	Sedang Berjalan	Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD
Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Persentase penempatan tenaga kerja	68%					913,576,000	913,576,000		Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota										578,938,000	578,938,000	sedang berjalan		
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	kota yogyakarta			Tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya	248 orang	Dukungan terhadap pelayanan antarkerja di daerah	100%	532,788,000	532,788,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK	700 orang	Dukungan terhadap pelayanan antarkerja di daerah	100%	46,150,000	46,150,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										307,968,000	307,968,000	sedang berjalan		
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi Pasar Kerja	1150 orang	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	100%	145,018,000	145,018,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Diseminasi dan sinkronisasi data Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	25 BKK	Dukungan terhadap informasi pasar kerja yang akuntabel	100%	45,000,000	45,000,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Laporan penempatan tenaga kerja peserta Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	40 laporan perusahaan	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	100%	117,950,000	117,950,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
	2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										26,670,000	26,670,000	sedang berjalan		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Sinkronisasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di Kota Yogyakarta	50 Perusahaan	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	100%	26,670,000	26,670,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37.06%					795,450,000	795,450,000		Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										404,444,000	404,444,000	Sedang berjalan		
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas.	75 SK Pengesahan	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100%	41,300,000	41,300,000		Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan	APBD
								Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	400 PKWT							
								Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan	20 bukti pendaftaran							
								Pendaftaran alur proses pelaksanaan pekerjaan	30 perusahaan							
								Pendaftaran penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan penyedia jasa	35 perusahaan							
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Perjanjian Kerja Bersama	10 perusahaan	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100%	11,100,000	11,100,000		Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan	APBD
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Pengusulan Upah Minimum Kota	1 Draft usulan upah minimum kota	Dukungan terhadap kesejahteraan pekerja	100%	352,044,000	352,044,000		Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan	APBD
								Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial	300 Perusahaan							
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										391,006,000	391,006,000	Sedang Berjalan		
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Tersedianya rekomendasi atas permasalahan ketenagakerjaan se-DIY	1 laporan	Dukungan terhadap perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100%	358,477,000	358,477,000		Kepala Seksi Hubungan Industrial	APBD
								Konsultasi Ketenagakerjaan	40 kali							
								Peringatan Hari Buruh	1500 orang							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Deteksi Dini Ketenagakerjaan	100 perusahaan							
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Pencatatan Lembaga Kerjasama Sama Bipartit	20 LKS	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100%	10,263,000	10,263,000		Seksi Hubungan Industrial	APBD
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	kota yogyakarta			Penanganan kasus hubungan Industrial	50 kasus	Dukungan terhadap perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100%	22,266,000	22,266,000		Kepala Seksi Hubungan Industrial	APBD
								Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	1 dokumen							
Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Persentase penempatan transmigran	100%					259,789,500	259,789,500		Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										259,789,500	259,789,500	Sedang berjalan		
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Kerjasama dengan daerah tujuan	2 daerah	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	100%	52,990,000	52,990,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
	3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Penempatan calon transmigran	10 orang	Calon transmigran yang ditempatkan	10 orang	43,995,000	43,995,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
	3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi lokal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Calon transmigran yang mengikuti Pelatihan Pra Penempatan meliputi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan	10 orang	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	100%	48,804,500	48,804,500		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
	3.32.03.2.01.07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Kota Yogyakarta			Pemberian perbekalan kepada calon transmigrasi	10 KK	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	100%	114,000,000	114,000,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
					Total							43,871,676,834	43,871,676,834			

Tabel 5.11 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Adminitrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,669,514,705	8,379,457,812		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasaranan aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase peningkatan laporan capaian kinerja	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										151,164,824	130,021,106	baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	39,590,000	11,539,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	69,072,824	75,980,106		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Pengelolaan website OPD	12 bulan							
								Penyusunan RKA dan DPA tahun 2022, RKPA dan DPPA tahun 2021	4 dokumen							
								Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen							
								Tenaga Teknis	2 orang							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen evaluasi pelaksanaan, hasil renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	18,440,000	18,440,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil renja OPD	6 dokumen							
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	24,062,000	24,062,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,108,506,274	5,619,356,901	lanjutan		

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40 ASN			5,108,506,274	5,619,356,901		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Akuntansi dan pelaporan keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			bahan tanggapan pemeriksaan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			laporan keuangan bulanan/semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen			0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,409,843,607	2,630,079,805	baru			
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			materai 6000 materai 3000	600 lembar lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	6,300,000	6,930,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			pembayaran rekening listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	18,600,000	23,100,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran rekening telepon	12 bulan								

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			pembayaran pajak kendaraan roda 2	52 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	25,950,000	30,387,500		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Tenaga teknis perorangan/tenaga bantuan	14 orang	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	478,776,648	536,030,180		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			jasa kebersihan kantor, UPT, PKK dan gedung balai penyuluhan KB	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	274,560,810	305,292,471		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Alat tulis kantor	74 jenis	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	58,630,221	54,754,426		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Penggandaan surat-surat/dokumen	378.551 lembar	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	86,776,200	100,000,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa lampu, saklar, stop kontak dan kabel	8 jenis			6,263,000	7,000,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Genset mupen	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	58,500,000	83,600,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
								LCD Mupen dan Balai Penyuluhan KB	2 unit								
								CCTV	1 paket								
								Vertical blind	35 meter								
								Sand tray therapy	1 paket								
								Scanner	1 unit								
								Printer	2 unit								
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Perlengkapan kebersihan mobil kepala	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	11,845,000	13,029,500		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD	
								Freezer laktasi	1 unit								
								Kursi laktasi	1 unit								
								Perlengkapan kebersihan balai penyuluhan KB	1 jenis								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Buku Perpustakaan	50 buku	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	4,840,000	5,324,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								surat kabar selama 12 bulan	1 jenis							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Makanan dan minum rapat	1.944 OH; 1.746 OS	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	54,594,000	55,554,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	19 kali 2 orang 2 hari	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	454,400,000	468,800,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	orang 3 hari							
								Konsultasi DAK	hari 1 kali							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	10 kali 2 orang 1 hari							
								Harganas	hari 1 kali							
								Konsultasi lainnya	hari 3 kali							
								Temu kerja regional BKKBN	2 orang 2 hari 3 kali							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Gedung Balai Penyuluh KB	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	419,194,928	445,194,928		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								Sewa lahan parkir Gedung kantor	1 unit 8 unit							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			roda 4	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	385,062,800	429,532,800		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
								roda 2	52 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Pemeliharaan taman	2 taman	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	5,400,000	5,400,000		Kepla Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak			Pemeliharaan komputer	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	60,150,000	60,150,000		Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan printer	43 unit							
								Pemeliharaan AC	20 unit							
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	80.39%					788,305,932	867,136,524		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan						Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yang aktif	72%										
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										212,284,784	233,513,262	sedang berjalan			
	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah OPD yang melaksanakan ARG	2 dokumen	Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	2 dokumen	110,910,000	122,001,000		Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	APBD	
								Penyusunan kebijakan PUG	2 dokumen								
	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan			Pemilihan Gender Champion	4 pemenang	terlaksananya Gender Champion	1 kali	101,374,784	111,512,262		Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	APBD	
								Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh kelembagaan PUG	1 dokumen pendukung APE	terlaksananya Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 dokumen						
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										277,303,040	305,033,344	sedang berjalan			
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pendidikan politik perempuan	60 orang	Tercapainya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100%	19,840,000	21,824,000		Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	APBD	
								Musrenbang Perempuan Kongres Perempuan	60 orang								
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Satgas Gerakan Sayang Ibu yang didampingi	14 satgas	tercapainya advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	100%	257,463,040	283,209,344		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD	
								Pendampingan kelompok prima amarta (rintisan usaha, desa prima, rintisan usaha inklusi)	55 kelompok								
								Kelurahan Lokasi P2WKSS yang didampingi	11 kelompok								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pendampingan kegiatan organisasi perempuan	35 organisasi							
								Peringatan hari besar perempuan dan hari anti kekerasan	3 kali							
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										298,718,108	328,589,918	sedang berjalan		
	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan kegiatan PUSPA	30 orang	terlaksananya Pendampingan kegiatan PUSPA	100%	10,075,000	11,082,500		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan kapasitas organisasi perempuan	3 lembaga	tercapainya peningkatan kapasitas organisasi perempuan	100%	266,408,108	293,048,918		Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	APBD
	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gender Corner Sosialisasi KIE Pemberdayaan Perempuan	540 orang	tersedianya KIE pemberdayaan perempuan	100%	22,235,000	24,458,500		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
									90 orang							
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Persentase Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani	83%					721,726,040	793,898,644		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										7,675,000	8,442,500	sedang berjalan		
	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang yang didampingi	30 lembaga	tercapainya pendampingan pelayanan perlindungan perempuan	100%	7,675,000	8,442,500		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										617,453,000	679,198,300	sedang berjalan		

RPJMD 2017-2022		Indikator Kinerja										Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan			Peningkatan kualitas pelayanan berbasis ISO	1 dokumen	fasilitasi pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender	50 kasus	458,734,000	504,607,400		Kepala UPT P2TP2A	APBD
								Pendampingan rehabilitasi korban kekerasan	1 kasus							
								Penyusunan SOP/SPP dan SKM	2 dokumen							
								peningkatan kapasitas pengurangan resiko pada lokus	4 kecamatan							
								Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender	50 kasus							
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			koordinasi forum satgas sigrak	115 orang	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender	115 orang	158,719,000	174,590,900		Kepala UPT P2TP2A	APBD
								pelatihan penjangkauan korban kekerasan dan identifikasi awal kronologi kasus	115 orang							
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										96,598,040	106,257,844	sedang berjalan		
	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota			Pelatihan penanganan korban kekerasan bagi masyarakat	3 kecamatan	tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya lembaga layanan	3 kecamatan	20,785,000	22,863,500		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
	2.08.03.2.03.04	Peningkatan jejaring antara Lembaga Penyedia Layanan	Sumber Daya Manusia,	masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			koordinasi dengan jejaring antara lembaga	6 kali	terlaksananya koordinasi dengan jejaring antara	100%	75,813,040	83,394,344		Kepala Seksi Perlindungan dan	APBD
Indikator Baru yang dimunculkan tahun 2021, dulunya masuk dalam Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif	67.47%			67,830,000	74,613,000		Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
								Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	4%							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota										44,150,000	48,565,000	sedang berjalan		
	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			advokasi kebijakan 5 pilar/dimensi ketahanan keluarga	2 dokumen	tersedianya advokasi kebijakan kualitas keluarga	100%	20,470,000	22,517,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan lembaga layanan keluarga di tingkat kota	26 lembaga	tercapainya peningkatan lembaga layanan keluarga	100%	23,680,000	26,048,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										23,680,000	26,048,000	sedang berjalan		
	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			pendampingan pokjanal posyandu	618 posyandu	terdampingnya pokjanal posyandu	100%	23,680,000	26,048,000		Kepala Seksi pembinaan dan Pembangunan keluarga	APBD
PROGRAM BARU	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah	49%					50,050,000	53,858,000		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota										50,050,000	53,858,000	sedang berjalan		
	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan data gender dan anak	1 dokumen	tersedianya data gender dan anak	1 dokumen	13,050,000	13,158,000		Kepala Seksi Data Dan Informasi Gender Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	APBD
	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak	1 kegiatan	Termanfaatkannya data Gender dan anak	75 institusi	37,000,000	40,700,000		Kepala Seksi Data Dan Informasi Gender Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Perlindungan Anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	95%					1,560,799,476	1,716,879,423		Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
Program Perlindungan Anak						Persentase Puskesmas Ramah Anak	100%									
						Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah negeri TK s/d SMP)	90%									
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										1,400,014,476	1,540,015,923	sedang berjalan		
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kongres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	meningkatnya SDM, kapasitas lembaga pemenuhan hak anak, partisipasi anak, peran media masa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	100%	1,281,139,476	1,409,253,423		Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak	APBD
								Pembentukan dan pendampingan dikelana Kelana (Kecamatan Layak Anak) yang didampingi	19 kelurahan kecamatan layak anak							
								Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota	60 orang							
								Penguatan Forum Anak Kelurahan	14 forum anak							
								Musrenbang anak tingkat Kota YK	125 orang							
								Penguatan peran media Masa dan Dunia Usaha dalam pengembangan KLA	2 lembaga							
								Youth Supercamp dan Jembatan Persahabatan	240 orang							
								Pengenalan KHA (Konvensi Hak Anak) bagi pegawai pelayanan di Pusat Kreatifitas Anak, PISA (pusat informasi sahabat anak), TES (rumah sakit ramah anak, dan masjid ramah anak)	35 orang							
								penguatan dan pengembangan kra	198 KRA							
								Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) bagi pendidik dan tenaga pendidikan	50 sekolah							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	12 bulan							
								Kelas Parenting Puspaga	6 kali							
								Pendampingan TPA Beringharjo, Prabadarma dan KB Kirana	3 lembaga							
								Inisiasi Rumah Sakit Ramah Anak	1 rumah sakit							
								inisiasi masjid ramah anak	1 masjid							
	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan profil anak	1 dokumen	terkumpulnya data capaian indikator KLA dan profil anak	2 dokumen	118,875,000	130,762,500		Kepala seksi pemenuhan hak anak	APBD
								Pengumpulan data indikator KLA (Kota Layak Anak) yang valid dan update	1 dokumen							
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										160,785,000	176,863,500	sedang berjalan		
	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Peringatan hari Anak nasional	1 kali	terlaksananya Peringatan hari Anak nasional	1 kali	144,705,000	159,175,500		Kepala seksi pemenuhan hak anak	APBD
	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penguatan Gugus Tugas KLA	110 orang	Gugus Tugas KLA yang dikuatkan	110 orang	16,080,000	17,688,000		Kepala seksi pemenuhan hak anak	APBD
Program Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%			883,989,000	972,387,900		Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										580,684,000	638,752,400	sedang berjalan		

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	9 PATBM	meningkatkan kapasitas relawan PATBM dan tersusunnya buku pedoman PATBM	100%	162.663,000	178,929,300		Kepala Seksi Perlindungan Anak	APBD	
								Pendampingan PATBM	10 PATBM								
								Pembentukan kelembagaan Sekolah Ramah Anak	25 sekolah								
								Pelatihan Penyusunan CPP	14 sekolah								
								Monev SRA dan Pusra	38 lokasi								
								Penyusunan Pengembangan Petunjuk Teknis Sekolah Ramah Anak (SRA)	1 dokumen								
	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Perlindungan khusus korban kekerasan dan eksploitasi, pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH dan stigma.	1 laporan	terlaksananya Perlindungan khusus korban kekerasan dan eksploitasi, pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH dan stigma.	1 laporan	418,021,000	459,823,100		Kepala Seksi Perlindungan Anak	APBD	
								Fasilitasi KPAI Kota Yogyakarta	1 lembaga	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan KPAI	1 lembaga						
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										303,305,000	333,635,500	sedang berjalan			
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan perlindungan khusus anak	10 kasus	terlaksanananya penanganan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	30 kasus	158,140,000	173,954,000		Kepala UPT P2TP2A	APBD	
								Penyusunan pedoman pelayanan terhadap anak	125 buku								
								Pendampingan Rehabilitasi korban anak	1 dokumen								
								Penanganan korban kekerasan terhadap anak	20 kasus								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			peningkatan kapasitas layanan terkait perlindungan khusus anak	1 kali	terlaksananya peningkatan kapasitas layanan terkait perlindungan khusus anak	1 kali	43,060,000	47,366,000		Kepala UPT P2TP2A	APBD
	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan sistem pendataan dan pelaporan anak dalam perlindungan khusus	12 dokumen	terlaksananya sistem komunikasi informasi dan edukasi untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus	13 dokumen	47,560,000	52,316,000		Kepala UPT P2TP2A	APBD
								Diseminasi informasi tentang perlindungan khusus anak di lokus	200 orang							
	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Forum koordinasi lintas sektor	1 dokumen	terlaksananya penguatan jejaring lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 dokumen	54,545,000	59,999,500		Kepala UPT P2TP2A	APBD
Program pengendalian penduduk	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR					1,064,671,160	1,881,194,460		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Data	
						Cakupan ketersediaan data bangsa kencana	100%									
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										72,715,000	122,106,140	Lanjutan		
	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang Sd/Mi dan Sstp/Mts, Jalur Non Formal dan Informal	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan	65 orang	Tersampainya pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada 14 SMP di Kota Yogyakarta	14 SMP	12,175,000	55,512,140		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	APBD
								Advokasi Pendidikan Kependudukan bagi Kampung KB	50 orang	Tersampainya pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada 14 SMP di Kota Yogyakarta	38 kampung KB					

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Fapsedu tentang kajian dampak kependudukan bagi Komunitas keagamaan dan remaja lintas agama	14 Kecamatan	Komunitas keagamaan dan remaja lintas agama memiliki peningkatan pemahaman kajian dampak kependudukan	630 orang	60,540,000	66,594,000		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	APBD
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota									991,956,160	1,759,088,320	Baru			
		2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan dan Pengolahan Data Program Bangsa Kencana	1 dokumen	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan program Bangsa Kencana	3 program	273,780,000	701,019,880		Kepala Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Gender dan Anak	APBD
		2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Tersedianya media branding dan publikasi program Bangsa Kencana	1 media	84,706,080	93,122,040		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	APBD
		2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Untuk Memperkuat Integrasi Program Kkbpk Di Sektor Lain	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Data kependudukan dapat tersaji di Rumah Data	38 Rumah Data	38 Rumah Data yang dibina dan dikelola	100%	437,624,000	481,386,400		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	APBD
		2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan pengumpulan dan pengolahan data berbasis perkembangan informasi teknologi oleh IMP (Instansi Masyarakat Perkotaan)	2 jenis	Penigkatan kemampuan IMP dalam penggunaan informasi teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data	420 orang IMP	34,100,000	87,560,000		Kepala Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Gender dan Anak	APBD
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	Tersusunnya dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	161,746,080	396,000,000		Kepala Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Gender dan Anak	APBD
Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.94%				1,020,979,080	1,197,179,488		Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
								Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11.16%								

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal									297,819,080	320,000,988	Baru			
	2.14.03.2.01.04		Promosi dan Kie Program Kkbpk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Promosi program Bangsa Kencana melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang lainnya	3 jenis	Peningkatan cakupan masyarakat yang teredukasi program Bangsa Kencana	100%	87,000,000	87,000,000	Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD	
	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal									297,819,080	320,000,988	Lanjutan			
	2.14.03.2.01.07		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Analis Keluarga Berencana	1 orang	Pemenuhan anjab tenaga analis KB	100%	210,819,080	233,000,988	Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD	
									Pembinaan kepesertaan KB melalui IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan)	3215 org IMP	Konsistensi dan peningkatan kinerja program pembinaan Keluarga Berencana melalui IMP	100%					
	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota									228,160,000	332,678,500	Lanjutan			
	2.14.03.2.03.11		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bakti sosial pelayanan KB gratis, Papsmear, IVA	850 PUS	Peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang terlayani KB	850 PUS	188,270,000	265,677,500	Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD	
	2.14.03.2.03.12		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Komunikasi Informasi Edukasi medis Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	56 faskes	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan KB	56 nakes KB	10,730,000	14,883,000	Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Reward KB Vasektomi	20 orang	Peningkatan kesertaan KB vasektomi	20 peserta KB vasektomi	29.160,000	52.118,000		Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD
								Pertemuan Pembinaan KB Pria	50 orang	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman program Bangga Kencana anggota kelompok KB Pria	100%					
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										495,000,000	544,500,000	Lanjutan		
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kampung KB yang dibina	45 kampung	Peningkatan keberhasilan program Bangga Kencana di kampung KB	100%	495,000,000	544,500,000		Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD
Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	32,54%					781,456,080	832,534,188		Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										748,331,080	796,096,688	Lanjutan		
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Inisiasi Pembentukan Kelompok Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) 7 kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) 7 kelompok, Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) 7 kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) 7 kelompok, Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 7 kelompok	BKB 7 klp, BKR 7 Klp, BKL 7 Klp, PIK-R 7 Klp, UPPKS 7 Klp	Terbentuknya kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	14,10%	228,750,000	251,625,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
								Stratifikasi kelompok BKS	1 dokumen	Tersusunnya klasifikasi kelompok BKS sebagai dasar pengembangan kelompok BKS	3 klasifikasi					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Stratifikasi kelompok UPPKS	1 dokumen	Tersusunnya klasifikasi kelompok BKS sebagai dasar pengembangan kelompok BKS	1 klasifikasi					
	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bimbingan dan pendampingan kelompok BKS dan PIK R	3 jenis	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok BKS dan PIK R	120 org	110,320,000	121,352,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
								Pelatihan PSKS Pendidik Sebaya Konselor Sebaya (PSKS)	80 orang	Regenerasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	80 orang					
								Bimbingan dan pendampingan kelompok UPPKS	1 jenis	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompok UPPKS	40 orang					
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Gerakan Orang Tua Sahabat Remaja (GO SAHAJA) di 5 kecamatan (Danurejan, Pakualaman, Kraton, Gondomanan, Kotagede)	5 kecamatan	Keluarga punya remaja terpapar materi GO SAHAJA	200 orang	138,586,080	152,444,688		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
								Pembinaan dan evaluasi Pembangunan Keluarga melalui kader	14 kecamatan	Penyediaan informasi timbal balik pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di 14 Kecamatan	3 laporan					
	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional Ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan Tribna di Kampung KB (Dana BOKB)	45 kampung KB	Kelancaran kegiatan operasional kelompok BKS, PIK-R dan UPPKS	45 kampung KB	270,675,000	270,675,000		Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										33,125,000	36,437,500	Baru		

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pertemuan Pengurus BPC AKU Kota dan BPR AKU Ranting Kecamatan	31 Kali	Pelaksanaan peran dan fungsi forum BPC AKU Kota dan BPR AKU Ranting	14 kecamatan	23,775,000	26,152,500		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
		2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pertemuan pembinaan Forum BKB tingkat Kota	2 Kali	Pelaksanaan peran dan fungsi forum BKB Kota	1 forum	4,550,000	5,005,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
		2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan kegiatan Pokja Ketahanan Keluarga	2 kegiatan	Penyusunan perencanaan kegiatan Ketahanan Keluarga	2 laporan	4,800,000	5,280,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
Total												14,609,321,473	16,769,139,439				

Tabel 5.12 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran.	100%					9,251,418,153	9,721,635,759		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai.	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										30,345,000	34,250,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja 2022, Renja Perubahan 2021, Revlu Renstra OPD.	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	4,705,000	5,250,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Buku Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja.	7 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	14,260,000	15,500,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
								Website dan database OPD yang dikelola secara rutin dan update.	12 bulan							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP 2020 dan Rancangan LKjIP 2021).	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	2,820,000	3,250,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	2,320,000	3,500,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring capaian kinerja tribulanan.	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	6,240,000	6,750,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
								Monitoring capaian kegiatan bulanan.	12 kali							
								Evaluasi kinerja dan kegiatan tribulanan.	4 kali							
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										7,207,395,548	7,687,165,200	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	63 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	7,193,805,548	7,670,714,700		Kasubag Keuangan-PEP	APBD

RPJMD 2017-2022		Indikator Kinerja										Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi pelaksanaan tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas.	63 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,290,000	1,525,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban, Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset.	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,400,000	1,525,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, CALK.	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,400,000	1,525,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,300,000	1,525,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan.	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	3,720,000	4,300,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran.	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,680,000	2,300,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,000,000	1,250,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,800,000	2,500,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,013,677,605	2,000,220,559	Lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah surat masuk.	3.250 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,770,000	1,858,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jumlah surat keluar.	lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon.	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	6,600,000	7,260,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan : Roda 2 (23 unit), Roda 3 (4 unit), Roda 4 (9 unit).	36 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	13,980,000	14,367,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran KIR kendaraan roda 4 pick up dan box.	4 unit								
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Honorarium Nabab.	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	134,693,508	148,162,859		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan Kebun.	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	476,400,000	517,702,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran retribusi kebersihan dan angkutan sampah.	12 bulan								
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor.	53 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	25,347,000	28,066,700		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetak.	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	14,000,000	14,780,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Penggandaan surat-surat / dokumen.	50,000 lembar								
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	10,100,000	10,719,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan-bahan komputer yang dibeli.	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	14,480,000	15,247,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga.	22 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	11,000,000	11,150,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Langganan surat kabar harian lokal dan majalah terkait pertanian dan pangan selama 12 bulan.	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	3,240,000	3,809,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makanan dan Minuman Rapat.	1.875 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	25,400,000	26,628,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah : 2 orang 4 kali, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) : 2 orang 2 kali, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa) : 2 orang 2 kali.	9 laporan perjalanan dinas	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	47,500,000	50,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan gedung kantor dinas.	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,082,857,097	900,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Jasa keamanan gedung kantor.	12 bulan								
								Pembuatan gapura pintu selatan Kebun Plasma Nuffah Pisang.	1 unit								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan kendaraan Roda 2 (23 unit), Roda 3 (4 unit), Roda 4 (9 unit).	36 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	119,000,000	221,607,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perawatan Komputer dan Laptop (36 unit), Printer (15 unit), Mesin Ketik Manual : 3 unit), Genset (1 unit), AC Split (25 unit), Mebelair (6 unit).	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	27,310,000	28,862,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
Program Pembinaan Ketahanan Pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi.	26.45%					889,131,260	1,015,249,500		Kepala Bidang Pangan		
						Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari.	17.50%										
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										111,801,200	115,161,500	Baru			
	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen NBM yang disusun.	1 dokumen	Tersedianya dokumen NBM dan data harga serta pasokan pangan yang valid, akurat, update.	100%	111,801,200	115,161,500		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD	
								Hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update.	12 laporan								
								Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun secara periodik.	12 dokumen								
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										181,230,000	233,000,000	Baru			
	2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan.	12 bulan	Bertambahnya jumlah cadangan beras pemerintah daerah.	10%	181,230,000	233,000,000		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD	
								Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Pangan.	2 rekomendasi								
								Jumlah cadangan beras pemerintah yang dibeli.	15 ton								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										596,100,060	667,088,000	Baru		
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen PPH yang disusun.	1 dokumen	Tersusunnya dokumen PPH dengan lengkap dan tepat waktu.	100%	70,000,000	85,000,000		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jenis komoditas pangan lokal yang dikembangkan pengolahannya.	3 jenis	Meningkatnya jumlah Kampung Pangan Lestari.	5%	526,100,060	582,088,000		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD
								Jumlah Kampung Pangan Lestari pada tahap penumbuhan.	4 kampung							
								Jumlah Kampung Pangan Lestari pada tahap pengembangan.	4 kampung							
								Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan menu B2SA.	35 kelompok							
Program Pembinaan Ketahanan Pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Persentase wilayah bebas kerawanan pangan.	100%					97,498,040	104,750,000		Kepala Bidang Pangan	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan										97,498,040	104,750,000	Baru		
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun.	1 dokumen	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan serta Dokumen SKPG dengan baik dan tepat waktu.	2 dokumen	97,498,040	104,750,000		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD
								Laporan SKPG bulanan. Dokumen SKPG yang disusun.	12 laporan 1 dokumen							
Program Pembinaan Pertanian	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	91.25%					185,023,160	210,062,000		Kepala Bidang Pangan	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										185,023,160	210,062,000	Baru		
	2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah pelaku usaha perdagangan komoditas pangan yang telah diberikan sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.	400 pelaku usaha	Persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu.	10%	67,914,080	75,712,000		Kepala Seksi Pengawasan Mutu Pangan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Jumlah pelaku usaha perdagangan komoditas pangan di Kota Yk yang telah diberikan pembinaan kepatuhan mutu pangan segar asal tumbuhan.	30 pelaku usaha							
								Jenis komoditas pangan segar asal tumbuhan yang diuji mutu dan keamanannya.	20 jenis komoditas							
								Jumlah sertifikat kepatuhan atas mutu pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan.	10 sertifikat							
	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah parameter uji dalam pengujian mutu dan keamanan PSAT yang bisa dilayani.	2 parameter	Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung pengujian mutu dan keamanan pangan.	100%	117,109,080	134,350,000		Kepala Seksi Pengawasan Mutu Pangan	APBD
								Sarana dan prasarana pengujian mutu yang dibeli.	2 unit							
								Jumlah olahan hasil pertanian yang dikembangkan.	15 jenis olahan							
Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan.	22.06%					478,031,400	476,002,000		Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil										89,766,080	75,102,000	Baru		
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah kelompok pembudidaya ikan pada tahap pengembangan.	15 kelompok	Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan kecil.	10%	89,766,080	75,102,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perikanan dan Kehewan	APBD
	3.25.03.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						Pendataan ulang pembudidaya ikan.	1 dokumen			388,265,320	400,900,000	Baru		
	3.25.03.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah produksi benih ikan konsumsi.	60.000 ekor	Terkelolanya balai benih dan subraiser dengan baik.	3 unit	388,265,320	400,900,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perikanan dan Kehewan	APBD
								Jumlah produksi benih ikan hias.	215.400 ekor							
								Pembesaran ikan Arwana dan Ikan Hias lainnya.	2.000 ekor							
								Rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana BBI.	1 lokasi							
								Frezer besar BBI Nitikan.	1 unit							
								Pompa Air BBI dan Subraiser BBI dan Subraiser.	3 unit							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sarana dan prasarana Sub Raiser Ikan Hias yang dibeli.	2 jenis							
Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan.	46.67%					81,252,580	82,436,500		Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan	
	3.25.05.2.02	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil										81,252,580	82,436,500	Baru		
	3.25.05.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah unit usaha komoditas perikanan yang memperoleh pendampingan teknis.	18 unit usaha	Persentase usaha komoditas perikanan yang telah mendapat pendampingan.	50%	81,252,580	82,436,500		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perikanan dan Kehewan	APBD
								Jumlah jenis komoditas perikanan yang dilakukan pengujian mutu.	2 jenis							
								Data dan Informasi hasil pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan.	12 laporan							
Program Pembinaan Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan.	3.42%					805,876,766	857,350,000		Kepala Bidang Pertanian	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										28,530,000	31,500,000	Baru		
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Petani Tanaman Pangan yang memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan.	130 petani	Peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai kebutuhan dan aturan pakai.	100%	28,530,000	31,500,000		Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian	APBD
								Jumlah Petani Tanaman Pangan yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan pakai.	130 petani							
								Laporan pemantauan produksi dan penggunaan alat mesin pertanian.	1 dokumen							
								Jumlah kelompok tani yang telah memenuhi prosedur penggunaan pestisida.	12 kelompok							
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota										777,346,766	825,850,000	Baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah varietas pisang yang berhasil dikonservasi di Kebun Plasma Nutfah Pisang.	292 varietas	Terkelolanya Kebun Plasma dan Lab Kultur Jaringan dengan baik dan sesuai SOP.	100%	777,346,766	825,850,000		Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian	APBD
Program Pembinaan Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.	100%					1,002,588,384	2,205,000,000		Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan	
Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian										1,002,588,384	2,205,000,000	Baru		
	3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Rehab dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan.	1 unit	Operasional RPH sesuai dengan fungsinya.	100%	452,588,384	455,000,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
								Pelayanan pemotongan hewan.	2 jenis							
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembuatan kebun percontohan pertanian dan perikanan.	1 unit	Kebun Plasma. Kebun Hortikultura Lab Kultur Jaringan dan Lab Olahhan terpelihara dalam kondisi yang baik.	100%	550,000,000	1,750,000,000		Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian	APBD
								Rehab dan pemeliharaan Laboratorium Kultur Jaringan.	1 unit							
								Rehab dan pemeliharaan kebun hortikultura.	1 lokasi							
Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.	95.08%					577,535,730	608,650,000		Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan	
						Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	80%									
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										145,309,680	162,500,000	Baru		
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyakit hewan dan zoonosa yang dapat tertangani.	3 jenis	Penyakit hewan dapat tertangani dan terkendali dengan baik	100%	145,309,680	162,500,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
								Peta penyakit hewan yang disusun.	1 dokumen							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										90,156,250	95,000,000	Baru		
	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jenis jasa medik veteriner yang bisa dilayani.	64 jenis layanan	Pelayanan Poliklinik Hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP.	100%	90,156,250	95,000,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										342,069,800	351,150,000	Baru		
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Data dan informasi hasil pengawasan mutu dan keamanan pangan asal hewan.	12 laporan	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah mendapat pendampingan teknis.	20%	275,086,800	283,650,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
								Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memperoleh pendampingan teknis.	100 unit usaha							
	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Data dan informasi hewan dan produk hewan yang telah diperiksa.	12 laporan	Terselenggaranya pengujian mutu pangan asal hewan.	100%	66,983,000	67,500,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan.	100%					15,755,000	17,750,000		Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan										15,755,000	17,750,000	Baru		
	3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah perizinan dan non perizinan bidang kehewanan.	19 jenis	Terlaksananya pengawasan izin usaha di bidang kehewanan.	100%	15,755,000	17,750,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perikanan dan Kehewanan	APBD
Program Pembinaan Pertanian	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Jumlah kelompok tani dengan predikat kelas Utama.	8 kelompok					638,915,900	686,000,000		Kepala Bidang Pertanian	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										638,915,900	686,000,000	Baru		
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Programa Penyuluh Pertanian yang tersusun.	15dokumen	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh.	100%	105,650,000	110,450,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pertanian	APBD

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Jumlah penyuluh yang mendapat pendidikan dan pelatihan.	13 orang								
								Sinkronisasi kegiatan dinas dengan Program penyuluhan dalam rangka penyusunan rencana kerja penyuluh.	1 dokumen								
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura kelas pemula.	14 kelompok	Persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.	30%	335,415,900	355,550,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pertanian	APBD	
								Jumlah kelompok tani ternak kelas pemula.	1 kelompok								
								Jumlah kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura kelas Madya.	28 kelompok								
								Jumlah kelompok tani ternak kelas Madya.	15 kelompok								
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Rak Vertikultur.	314 unit	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan.	100%	197,850,000	220,000,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pertanian	APBD	
								Peralatan packing untuk Kampung Sayur.	7 unit								
Total												14,023,026,373	15,984,885,759				

Tabel 5.13 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					24,766,083,759	27,266,585,136		SEKRETARIS	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										42,362,000	45,388,100	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD		3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	4,251,000	3,466,000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	3,466,000	3,812,600		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD	
						Penyusunan Infografis, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		7 dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renstra		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	3,420,000	3,762,000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD	
						Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renja OPD TW.I, II, III, IV dan monev laporan bulanan		5 dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah		1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	870,000	957,000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Dokumen Lakip, IKK, LPPD, SKM		4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	30,355,000	33,390,500		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										20,981,856,856	23,080,042,542	Baru		

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	236 ASN	Terbayarnya gaji ASN tepat waktu	100%	20,979,066,856	23,076,973,542		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	180,000	198,000		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	SPJ Terverifikasi	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Tersajinya laporan akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 dokumen	Tersusunnya bahan tanggapan pemeriksaan	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laporan keuangan akhir tahun	12 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	2,610,000	2,871,000		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										3,740,114,903	4,139,229,494	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,550,000	2,805,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
								Surat Keluar	3000 surat							
								Pengiriman Dokumen	15 dokumen							
								Materai	450 lembar							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	116,040,000	127,644,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
								Pembayaran rekening air	12 bulan							
								Pembayaran rekening retribusi kebersihan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Jasa Keamanan Kantor Pajak PBB	12 bulan 1 tahun	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	544,000,000	598,400,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis Nabab Tenaga Teknis	8 orang 2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	405,372,708	445,909,979		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	199,200,000	219,120,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Komputer AC Split Printer	20 unit 27 unit 10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	30,500,000	58,630,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
								Pemeliharaan mesin pemilah sampah	4 unit							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	59 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	49,320,295	54,252,325		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Barang cetakan Penggandaan surat-surat/dokumen	5 jenis 30.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	11,838,000	13,021,800		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,090,000	2,299,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Mouse Isi ulang toner Catrige Barcode Tinta printer	12 buah 80 buah 36 buah 20 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	25,565,000	28,121,500		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Drum toner	11 buah							
								Keyboard	5 buah							
								USB Flashdisk	20 buah							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	68,951,900	75,847,090		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
								Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih	4 jenis							
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Surat kabar	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1,800,000	1,980,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	575 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	21,235,000	23,381,600		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	87,400,000	96,140,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	2 orang							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 orang							
	X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Genset Portabel	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	10,000,000	11,000,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laboratorium	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	25,000,000	27,500,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Perawatan Kendaraan Roda 2	23 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,092,932,000	2,302,225,200		KEPALA UPT BENGKEL	APBD
								Perawatan Kendaraan Roda 3	45 unit							
								Perawatan Kendaraan Roda 4	24 unit							
								Perawatan Kendaraan Roda 6	53 unit							
								Perawatan Road Sweeper	2 unit							
								Perawatan Compactor	5 unit							
								Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2	23 unit							
								Pembayaran Pajak Kendaraan roda 3	52 unit							
								Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4	25 unit							
								Pembayaran Pajak Kendaraan roda 6	56 unit							
								Jasa KIR Kendaraan	67 unit							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Sewa peralatan/perengkapan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	46,320,000	50,952,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										1,750,000	1,925,000	Baru		
	X.XX.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Pengadaan pakaian lapangan kerja	2 jenis	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	1,750,000	1,925,000		KEPALA UPT BENGKEL	APBD
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi	31.11%					439,490,908	483,439,999		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										439,490,908	483,439,999	Baru		
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan pengujian parameter kualitas air	25 parameter	Parameter kualitas air yang dapat terlayani meningkat	89.29%	439,490,908	483,439,999		KEPALA UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	APBD
								Layanan pengujian parameter kualitas udara	10 parameter	Parameter kualitas udara yang dapat terlayani meningkat	90.91%					
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	72.31					6,911,628,582	7,602,791,440		KEPALA BIDANG RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	
						Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42.90%									
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										6,911,628,582	7,602,791,440	Baru		
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			RTH Publik yang terpelihara	48 lokasi	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42.25%	1,189,127,128	1,308,039,841		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	APBD
								Pemeliharaan Fasilitas Pelengkap RTHP	(Kel. Kricak RW 01, Kel Gedongkiwo RW 17, Kel. Prawirodirajan RW 11, Kel. Muja-Muju RW 01, Kel. Pandeyan RW 11, dan Kel. Giwangan RW 10							
								Mesin Pompa Air	2 unit							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Mangkubumi-Pangurakan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Mangkubumi-Pangurakan			810,073,000	891,080,300			DAIS
	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin 66.906 m2 Taman Kota	12 bulan	Taman Kota dalam kondisi terpelihara	100%	4,912,428,454	5,403,671,299		KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN PERINDANG JALAN	APBD
								Pengadaan tanaman hias jenis perdu	4.660 batang							
								Pengadaan tanaman hias jenis semak	6.500 rumpun							
								Pengadaan tanaman hias jenis penutup tanah	11.000 rumpun							
								Pemeliharaan rutin pohon perindang jalur hijau	12 bulan							
Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN				Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	74.15%					1,698,556,316	1,868,411,948		KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	
						Persentase usaha yang telah memiliki izin PPLH	13.70%									
						Persentase perusahaan yang mentaati pengelolaan lingkungan	42.37%									
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										1,698,556,316	1,868,411,948	Baru		
	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan	300 dokumen	Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan meningkat	60.92%	407,972,576	448,769,834		KEPALA SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara	1 dokumen	Laporan kualitas udara tersedia	100%	133,060,080	146,366,088		KEPALA SEKSI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD
								Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Eksekutif Summary Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Laporan Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Air)	3 dokumen	Laporan kualitas air tersedia	100%					
								Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau	24 usaha	Pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan meningkat	100%					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			Facilitas konservasi air tanah yang dibangun	1 unit	Pedoman dalam penataan lingkungan hidup yang tersedia meningkat	52.38%	1,157,523,660	1,273,276,026		KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3	APBD
								Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	15 izin	Penurunan level muka air tanah di Kota Yogyakarta terlindungi	10 cm					
								Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina	20 usaha/kegiatan							
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Persentase sekolah berwawasan lingkungan	96.27%					738,414,000	812,255,400		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	
						Persentase Kampung berwawasan lingkungan	52.94%									
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										738,414,000	812,255,400	Baru		
	2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			Sekolah dan Pondok Pesantren berwawasan lingkungan	40 sekolah/pondok pesantren	Sekolah berwawasan lingkungan meningkat	92.24%	738,414,000	812,255,400		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN HIDUP	APBD
								Penyuluhan lingkungan hidup	3 jenis	Kampung iklim berwawasan lingkungan	0%					
								Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	508 kelompok							
Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	74.61					17,768,672,744	19,545,540,018		PLT KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				Persentase sampah yang dikelola secara 3R	16%					17,768,672,744	19,545,540,018	Baru		
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Timbulan sampah yang diangkut ke TPA	98.52%	Sampah dari TPS terangkut ke TPA	100%	12,367,893,000	13,604,682,300		KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH	APBD
								Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari	90 penggal	Kebersihan jalan meningkat	75.51%					
								Facilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola	1 unit	Volume sampah yang didaurulang meningkat	15%					
								Sprayer	1 buah	Sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	634 ton/tahun					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Kawasan Tugu Golong Gilig, Jl. Mangkubumi dan Jl. Pangurakan dan Alun-alun Utara secara fisik selama 12 bulan	Sarana dan prasarana kawasan			1,075,682,000	1,183,250,200			
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional pemungutan retribusi kebersihan	100%	Masyarakat taat membayar retribusi kebersihan	96.26%	1,311,017,744	1,442,119,518		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN	APBD
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kota Yogyakarta			Sepeda motor roda 3	3 unit	Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah meningkat	26.67%	3,014,080,000	3,315,488,000		KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH	APBD
								Kontainer sampah	3 unit	Sarana prasarana TPS kondisi sesuai standar	69.15%					
								Bin sampah compactor	40 unit							
								Rehabilitasi depo sampah	2 unit							
								Rehabilitasi TPS	4 unit							
Total												52,322,846,309	57,579,023,941			

Tabel 5.14 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RPJMD 2017-2022	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,686,673,536	6,257,323,090		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										22,278,000	24,505,800	Lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	22,278,000	24,505,800		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
								Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen							
								Pengelolaan Website OPD	12 bulan							
								Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,335,646,036	4,769,210,640	Baru		

RPJMD 2017-2022	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,335,646,036	4,769,210,640		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Tugas/Perintah, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas	34 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD

RPJMD 2017-2022		Indikator Kinerja										Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,328,749,500	1,463,606,650	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	2496 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	71,450,000	78,595,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar								
								Pengiriman dokumen surat, paket (Keping KTP), Pos Adminduk	1000 dokumen							
								Materai	lembar							
								Perangko	50 buah							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,300,000	16,830,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	24 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,540,000	10,450,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	6 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Naban	6 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	251,097,000	276,206,700		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	140,130,000	154,143,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	60 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	94,549,500	104,004,450		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penggandaan/Fotocopy Barang Cetak	90000 lembar 4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23,825,000	26,207,500		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,182,000	10,100,200		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD

Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			LCD, CCTV, Meja Rapat, Flashdisk, DVD/CD Blank, Keyboard, Mouse, Catridge Laserjet, Pita Epson LQ 2190, Catridge Injek Printer A4 Black, Catridge Injek Printer A4 Warna, Catridge Epson Lx 300, Refill Tinta Inkjet, Refill Toner Laserjet, Refill Tinta Injek Seri 664, Catridge Toner Cetak Akta	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	143,890,000	158,279,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	48,114,000	54,951,600		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,180,000	3,498,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	1548 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	45,114,000	49,625,400		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masy arakat	1440 os							
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi	4 orang x 10 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	113,200,000	124,520,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	2 orang x 11 kali							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 orang x 2 kali							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Dindukcapil Kota Yogyakarta	1 Unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	60,000,000	66,000,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 2 Roda 4	24 unit 5 unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	175,000,000	192,500,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Higienist Sistem	12 Bulan	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	38,700,000	42,570,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sewa Tanaman Hias	12 Bulan							
								Pemeliharaan Taman	12 Bulan							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer, Printer, AC, Mesin Tik, Genset, Pompa air, BBm dan Pelumas Genset	11 unit, 15 unit, 28 unit, 6 buah, 16 unit, 1 unit, 12 bulan	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	86,478,000	95,125,800		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
Program pelayanan pendaftaran penduduk	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99.75%					1,533,394,000	1,686,733,400		Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										1,533,394,000	1,686,733,400	Baru		
	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT	40 Dokumen	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	98,164,000	107,980,400		Kasi Pindah Datang Penduduk	APBD
								Verifikasi Data Administrasi dan Faktual	40 orang							
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen	64.420 dokumen	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	940,001,000	1,034,001,100		Kasi Identitas Penduduk	APBD
								Pengadaan Ribbon (KIA, KK & KTP0 dan Cleaning KIT (KTP & KIA), HDP Film KTP	6 jenis							
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk di 96 Fasilitas Publik	960 Orang	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	467,424,000	514,166,400		Kasi Identitas Penduduk	APBD
								Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	15 orang							
								Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar	300 Orang							
								Pelayanan Perekaman KTP-El bagi pelajar SLTA	450 Orang							
								Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk	14 kelurahan							
								Pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri	2 unit							
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1 Laporan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	27,805,000	30,585,500		Kasi Identitas Penduduk	APBD

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program pelayanan pencatatan sipil	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	97.50%					382,537,000	420,790,700		Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil										382,537,000	420,790,700	Baru			
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	4 Jenis	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	149,365,000	164,301,500		Kasi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	APBD	
								Cetak Leaflet/Flyer Peningkatan Pencatatan Sipil	23.000 lembar								
								Penjilidan berkas permohonan	1.304 bendel								
								Jasa Tenaga Teknis	1 orang								
								Rapat Koordinasi	notulen								
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	23 Kelurahan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	233,172,000	256,489,200		Kasi Kelahiran dan Kematian	APBD	
								Pengadaan Dokumen Non Security Pencatatan Sipil	2 Jenis								
								Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15 Rumah Sakit								
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	94.74 %					613,708,000	674,078,140		Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								SIAK berfungsi dengan baik	100%	7,400,000	8,140,000				
	2.12.04.2.01.05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kerjasama dengan lintas sektor	2 jenis	SIAK berfungsi dengan baik	100%	7,400,000	8,140,000		Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	APBD	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan										606,308,000	665,938,140	Baru			
	2.12.04.2.03.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa komputer 5 unit, printer 7 unit, Smartphone/tablet 5 unit	17 jenis	SIAK berfungsi dengan baik	100%	437,271,000	480,997,440		Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD	
	2.12.04.2.03.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data	15 kali	SIAK berfungsi dengan baik	100%	6,100,000	6,710,000		Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	APBD	

RPJMD 2017-2022	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.12.04.2.03.08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sosialisasi Adminduk	2 Media	SIAK berfungsi dengan baik	100%	140,200,000	154,220,000		Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	APBD	
	2.12.04.2.03.09	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perjanjian Kerjasama	1 kerjasama	SIAK berfungsi dengan baik	100%	14,605,000	15,065,500		Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	APBD	
	2.12.04.2.03.11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Cetak buku profil perkembangan kependudukan	20 buku	SIAK berfungsi dengan baik	100%	8,132,000	8,945,200		Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD	
								Cetak buku data penduduk persemester	20 buku								
Total												8,216,312,536	9,038,925,330				

Tabel 5.15 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					6,399,038,200	6,591,009,346		Mantri Anom	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										14,450,000	14,883,500	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan		1,500,000	1,545,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Website terkelola dengan baik		5,240,000	5,397,200		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
								Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen							
								Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2,700,000	2,781,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terjalinnnya koordinasi penyusunan Program kegiatan OPD		1,500,000	1,545,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi OPD		3,510,000	3,615,300		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,109,681,768	5,262,972,221	Baru		

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Gaji dan Tunjangan ASN	36 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		5,097,881,768	5,250,818,221		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		120,000	123,600		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi		480,000	494,400		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		300,000	309,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		200,000	206,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8,350,000	8,600,500		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah		1,500,000	1,545,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah		300,000	309,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersedianya lapoaran akhir tahun		550,000	566,500		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,274,906,432	1,313,153,625	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Surat Masuk	1.400 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,400,000	8,652,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	600 surat							
								Pengiriman Dokumen	200 dokumen							
								Materai	2500 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik		80,880,000	83,306,400		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pembayaran rekening Air	12 bulan							
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	15 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas		4,265,172	4,393,127		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit							
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		118,864,936	122,430,884		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Tenaga Teknis	3 orang							
								Biaya Administrasi Bank	200 Transaksi							
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor		175,000,000	180,250,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Retribusi Kebersihan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Alat Tulis Kantor	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		30,000,000	30,900,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Penggandaan surat-surat/dokumen	14000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		27,125,000	27,938,750		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Cetak dus arsip	250 buah							
								Cetak map	100 buah							
								Cetak Ben 26	15 bendel							
								Cetak STS	10 bendel							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		6,000,000	6,180,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,274,906,432	1,313,153,625			
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			LCD	3 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga		236,276,500	243,364,795		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bahan komputer	22 Jenis							
								Komputer	4 buah							
								Printer	5 buah							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Bahan/alat-alat/perengkapan kantor/rumah tangga/kerja	54 Jenis							
								Filling Kabinet	3 buah							
								Lemari	2 buah							
								Sound System	2 buah							
								Kursi rapat	110 buah							
								Trolley	1 buah							
								Kursi Tunggu 4 seat	2 unit							
								Microphone	2 buah							
								Dekorasi	21 buah							
								Sewa Sound System	1 unit							
								Sewa Meja Kursi	350 unit							
								Sewa Tenda	6 unit							
								Lemari Arsip	2 buah							
								Rak Buku	1 buah							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Peralatan Rumah Tangga	54 jenis	Terpenuhinya peralatan rumah tangga		7,000,000	7,210,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Makan Minum Rapat	5010 OS	Terfasilitasinya koordinasi internal kemantren Tegalrejo		73,000,000	75,190,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Gedung Kantor	5 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas		137,824,824	141,959,569		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Roda 2	15 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional		62,250,000	64,117,500		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Roda 3	2 unit							
								Roda 4	1 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan TR dan Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Bener dan Rumah Dinas Camat.	5 unit	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, taman dan keamanan		279,770,000	288,163,100		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan Taman	12 bulan							
								Jasa keamanan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Komputer	24 unit	Peralatan kantor yang terpelihara		28,250,000	29,097,500		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Note Book	5 Unit							
								AC Split	18 unit							
								Printer	30 unit							
								Kipas Angin	11 Unit							
								Meja	50 buah							
								Kursi	150 buah							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	81					996,494,000	1,026,388,820		Mantri Anom	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										188,744,500	194,406,835			
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	236 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	236 Lembaga	188,744,500	194,406,835		Jawatan Praja	APBD
								Penguatan RT dan RW Se-Kecamatan Tegalrejo	236 Lembaga	Terlaksananya penguatan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Tegalrejo	236 Lembaga					
								Penguatan Kelembagaan RT,RW dan LPMK	240 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW dan LPMK untuk melaksanakan ketugasannya	240 orang					
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 Kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 Kali					
								Evaluasi Kelurahan	1 Kali	Terpantaunya Tingkat Perkembangan Kelurahan	1 Kali					
								Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan	1 Kali					
								Dokumen Musrenbang Kecamatan Tegalrejo dan 4 Kelurahan	5 Dokumen	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan	5 Dokumen					
								Penyusunan Profil Kecamatan dan 4 Kelurahan	5 Dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se kecamatan Tegalrejo	5 Dokumen					
								Koordinasi Forum Pambauran Kebangsaan	1 Kali	Terjalinnnya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pambauran kebangsaan pada	1 Kali					
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										240,640,000	247,859,200			
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Tegalrejo			SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN				240,640,000	247,859,200		Jawatan Kemakmuran	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	80 orang	Meningkatnya perekonomian peserta PKH	80 orang					
								Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Tegalrejo	6 kali	Meningkatnya Potensi UMKM dan Pertanian Kecamatan Tegalrejo	6 kali					
								Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan	6 kali	Meningkatnya kegiatan anggota Forkom UMKM dan Gapoktan Kecamatan Tegalrejo	6 kali					
								Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Tegalrejo	2 dokumen					
								Pemeliharaan Makam TPU Utaralaya	12 bulan	Meningkatnya pengelolaan makam TPU Utoroloyo Kecamatan Tegalrejo	12 bulan					
								Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	2 kali	Meningkatnya pengelolaan bank sampah dan kampung hijau Kecamatan Tegalrejo	2 kali					
								Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen	Meningkatnya informasi tentang perencanaan Kewilayahan yang sudah terintegrasi	1 dokumen					
								Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	2 dokumen	Meningkatnya koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	2 dokumen					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										567,109,500	584,122,785			
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Sosialisasi Jogja Smart Service	80 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendaftarannya	80 orang	25,510,000	26,275,300	Jawatan Umum	APBD	
								Sosialisasi Pelayanan Publik	80 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	80 orang					
								Sosialisasi Pelayanan Perizinan	80 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan Kecamatan	80 orang					
								Operasioanal Pelayanan	12 bulan	Kelancaran Pelayanan	12 bulan					
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	Kelancaran Pelayanan	12 bulan	15,515,000	15,980,450	Jawatan Umum	APBD	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Tegalrejo			Fasilitasi PKK Kecamatan	1 lembaga	Terjalinnnya koordinasi kelembagaan	1 lembaga	526,084,500	541,867,035	Jawatan Sosial	APBD	

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan	13 lembaga	Terjalannya koordinasi kelembagaan	13 lembaga					
								Sosialisasi Tupoksi POKJA PKK Kecamatan	250 orang	Meningkatkan pengetahuan dan kinerja PKK	250 orang					
								Sosialisasi dan Pemaparan Laporan TKPK	70 orang	Penurunan Angka Kemiskinan	70 orang					
								Lomba KKG KB Kes	1 kali	Kegiatan lomba berjalan dengan lancar	1 kali					
								Pentas Seni Wilayah	1 kali	Mampu menampilkan potensi seni budaya Wilayah sebagai wujud pelestarian budaya	1 kali					
								Gelar Kesenian	11 kali	Mampu menampilkan potensi seni budaya Wilayah sebagai wujud pelestarian budaya	11 kali					
								Pentas Seni Anak (KRA)	1 kali	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak	1 kali					
								Wayang Jogja Night Carnival	1 kali	Tersalurkannya kreasi wilayah	1 kali					
								Gebyar PAUD	1 kali	Peningkatan dan Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini	1 kali					
								Gerbangmas (Lomba Cerdas Cermat)	1 kali	Peningkatan kedisiplinan anak	1 kali					
								Gebyar Lansia (Lomba, Senam, Sosialisasi)	3 Kali	Meningkatkan kreatifitas dan Kesehatan lansia	3 Kali					
								Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	4 kali	Memaksimalkan sim pemberdayaan dan sim nglarisi	4 kali					
								Penyuluhan Mental dan Spiritual Anak dan Remaja	1 kali	Meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian anak	1 kali					
								Penyuluhan Jumantik Remaja	6 kali	Pengurangan jentik-jentik nyamuk penyebab penyakit DBD	6 kali					
								Mitra Keluarga	1 kali	Meningkatkan optimalisasi peranan dalam keluarga	1 kali					
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp. 1.702.478 .583					3,818,484,568	3,933,039,106		Mantri Pamong Praja	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										3,818,484,568	3,933,039,106	Baru		

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Tegalrejo			KELURAHAN TEGALREJO		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tegalrejo		489,453,500	504,137,105		Lurah Tegalrejo	APBD
								Peningkatan dan pemeliharaan SPAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	27 titik	mengatasi genangan air	27 titik					
								Peningkatan dan Pemeliharaan SAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)	178 m	Memperlancar pembuangan air	178 m					
								Pemeliharaan Konblok (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)	785 m	memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah	785 m					
								Pembuatan Taman (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	20 m2	Memperindah Lingkungan	20 m2					
								Pemeliharaan MCK, Air bersih (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	5 Unit	Menjaga Ketersediaan Air Bersih	5 Unit					
								Pemeliharaan Gudang (Kampung Tompeyan)	9 m2	penyimpanan inventaris	9 m2					
								Pemeliharaan Pos Ronda (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)	10 Unit	Pos Ronda terlihat bersih	10 Unit					
								Pembuatan Pagar Gerbang Portal (Kampung Sudagaran)	2 buah	Keamanan Lingkungan	2 buah					
								Papan informasi warga (Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	3 buah	Penyerapan informasi warga	3 buah					
								Rambu rambu jalan (Kampung Sudagaran)	10 buah	Keamanan pengguna jalanv	10 buah					
								Perawatan Cat Balai RT 30 (Kampung Demakan)	12 m	Perawatan Aset Wilayah	12 m					
								Pemeliharaan Corblok (Kampung Tompeyan)	60 m2	memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah	60 m2					
								Pemeliharaan PJU (Kampung Tompeyan, (Kampung Tegalrejo, (Kampung Demakan, (Kampung Sudagaran)	70 titik	Penerangan Jalan	70 titik					
								Pengecatan mural (Kampung Tompeyan)	200 m2	Keindahan	200 m2					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pembuatan Kaca Cembung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Sudagaran)	9 titik	Keamanan pengguna jalan	9 titik					
								Pengadaan HT	10 buah	Kelancaran Komunikasi	10 buah					
								Pemeliharaan IPAL Komunal (Kampung Tompeyan)	1 unit	Kesehatan Warga	1 unit					
								Pembuatan Handraill tangga (Kampung Sudagaran)	12 m	Alat Bantu Difabel	12 m					
								Jasa Konsultansi	2 dokumen	Pelaksanaan pekerjaan fisik berjalan dengan baik	2 dokumen					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Kricak			KELURAHAN KRICKAK		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kricak		590,057,500	607,759,225		Lurah Kricak	APBD
								Pemeliharaan dan Pelumpuran SAH (Kampung Jatimulyo)	530 m	mengurangi potensi genangan air	530 m					
								Pemeliharaan RTHP (kampung Jatimulyo 2 lokasi, Kampung Bangunrejo 1 lokasi)	3 lokasi	Agar lebih bersih dan indah	3 lokasi					
								Pemeliharaan jalan CONBLOCK (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	556 m	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	556 m					
								Pembuatan SPAH (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	36 titik	Mengurangi / agar sumur tidak kering dan mengurangi luapan air hujan	36 titik					
								Biopori Jumbo (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 titik	Menampung air untuk musim kemarau	30 titik					
								Pemeliharaan Balai RW.06 (Kampung Jatimulyo)	45 m	Untuk pertemuan warga RW.06 dan kegiatan RW.06	45 m					
								Pemeliharaan POS Kamling RT.35 (Kampung Kricak Kidul)	1 unit	Untuk Kegiatan Ronda Keamanan Warga	1 unit					
								Pemeliharaan Gapuro (Kampung Kricak Kidul, dan Bangunrejo) RT.35, Rt 45, dan RT 47)	3 unit	Identitas dan Petunjuk wilayah	3 unit					
								Pemeliharaan Balai RT. 35 (Perbaikan tangga dan pemasangan keramik dan pegangan stailis) (Kampung Kricak Kidul)	2 unit	Kenyamanan, Kebersihan dan Keamanan Pengguna Balai	2 unit					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemeliharaan Balai serbaguna (Kampung Bangunrejo)	2 unit	Kenyamanan, Kebersihan dan Keamanan Pengguna Balai	2 unit					
								Pemeliharaan Gudang RW 11 (Kampung Bangunrejo)	1 Unit	Perlengkapan lebih tertata	1 Unit					
								Pembuatan Pagar Pengaman Pendopo RTHP (Kampung Bangunrejo)	m	Keamanan bangunan	m					
								Pembuatan atap penutup pengolah sampah (Kampung Bangunrejo)	20 m2	Keamanan alat	20 m2					
								Pemeliharaan atap Gasebo/Ruang Tunggu Makam Cikalan (kampung Jatimulyo)	30 m2	Makam Cikalan	30 m2					
								Pemeliharaan Pagar makam Klayu RW 9 (Kampung Kricak Kidul)	38 m2	Untuk kenyamanan warga	38 m2					
								Pemeliharaan Gerbang Atap Makam (Kampung Bangunrejo)	1 Unit	Kenyamanan tempat berlindung pengunjung/takziah dari cuaca.	1 Unit					
								Pembuatan Taman (Kampung Bangunrejo)	60 m2	Membuat Pejalan Kaki teduh dan sejuk, dan lingkungan lebih asri	60 m2					
								Pelumpuran SAL (Kampung Bangunrejo)	30 m	lebih lancar	30 m					
								Kaca Cembung (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	13 titik	Keselamatan pengguna jalan di titik rawan kecelakaan	13 titik					
								Jasa Konsultansi	1 dokumen	Pelaksanaan pekerjaan fisik berjalan dengan baik	1 dokumen					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Karangwaru			KELURAHAN KARANGWARU		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karangwaru		350,320,000	360,829,600		Lurah Karangwaru	APBD
								Pemeliharaan Jalan (konblok) (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo)	96 m2	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	96 m2					
								Peningkatan dan pemeliharaan SPAH(Kampung Karangwaru Lor, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo)	17 Titik	mengatasi genangan air	17 Titik					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Peningkatan dan Pemeliharaan SAH (Kampung Blunyahrejo)	50 m	Memperlancar pemuangan air	50 m					
								Pemeliharaan Kawasan KRS (Kampung Karangwaru Lor, Blunyahrejo)	1 paket	Memperindah Lingkungan	1 paket					
								Pemeliharaan MCK, Air bersih (Kampung Karangwaru Kidul, Kampung Blunyahrejo)	4 unit	Menjaga Ketersediaan Air Bersih	4 unit					
								Pemeliharaan PJU (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Karangwaru Kidul, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo)	100 titik	Penerangan	100 titik					
								Belanja Jasa Konsultansi	2 dokumen	Konsultan pembangunan wilayah	2 dokumen					
								Pengadaan Kaca cembung (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Karangwaru Kidul, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo)	12 unit	Memperlancar arus lalulintas di dalam kampung	12 unit					
								Pemeliharaan Alat Pengolah Sampah (Kampung Blunyahrejo,)	20 m	Kemanan dan kenyamanan warga	20 m					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Bener			KELURAHAN BENER		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bener		427,983,500	440,823,005		Lurah Bener	APBD
								Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	7 titik	Genangan air hujan cepat kering, tidak ada genangan air hujan	7 titik					
								Biopori Jumbo (Kampung Bener)	2 titik	Menampung air hujan	2 titik					
								PJU (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	70 titik	Meningkatnya tingkat keamanan di wilayah	70 titik					
								Pemeliharaan Kandang Ternak Terpadu untuk Wisata Pendidikan (Kampung Bener)	1 lokasi	Warga belajar usaha	1 lokasi					
								Pemeliharaan Gudang LPMK (Kampung Bener)	1 lokasi	Penyimpanan barang dan usaha	1 lokasi					
								Renovasi MCK (Kampung Sidomulyo)	5 unit	PHBS	5 unit					
								Pembuatan Taman (Kampung Bener)	20 m	Keindahan dan keasrian	20 m					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pengecatan kanstin Jl. Bener	1100 m	Keindahan dan keasrian	1100 m					
								Pemeliharaan Kaca Cembung (Kampung Sldomulyo)	5 titik	Keselamatan lalu lintas	5 titik					
								Pemeliharaan Grobag sampah (Kampung Bener, Kampung Sldomulyo)	5 Unit	Pengangkutan	5 Unit					
								Pengadaan HT	5 unit	Komunikasi keamanan	5 unit					
								Pengadaan rambu-2 (Kampung Bener)	10 buah	Himbauan pada lingkungan sungai	10 buah					
								Jasa Konsultansi	2 dokumen	Pelaksanaan pekerjaan fisik berjalan dengan baik	2 dokumen					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Tegalrejo			KELURAHAN TEGALREJO		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tegalrejo		450,097,000	463,599,910	Lurah Tegalrejo	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	124 lembaga	Koordinasi pengurus kelembagaan	12 PKK RW, 1 PKK Kelurahan, 47 RT, 12 RW, 4 Kampung,					
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Tegalrejo	59 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Tegalrejo Masa Bakti 2021-2024	47 RT, 12 RW					
								Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
								JBM 12 RW	30 kali	Peningkatan SDM dan disiplin belajar	30 kali					
								Rapat Pengurus RT	25 orang	Koordinasi tingkat RT	25 orang					
								Rapat Pengurus RW	30 orang	Koordinasi tingkat RW	30 orang					
								Rapat Pengurus PKK RT	25 orang	Koordinasi PKK tingkat RT kembang anak	25 orang					
								Rapat Pengurus PKK RW	30 orang	Koordinasi PKK tingkat RW	30 orang					
								Rapat Pengurus Kampung	50 orang	Koordinasi tingkat Kampung	50 orang					
								Rapat Pengurus LPMK	25 orang	Koordinasi LPMK tingkat Kelurahan	25 orang					
								Sosialisasi Lansia	100 orang	Memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan lansia secara mandiri	100 orang					
								Senam Lansia	100 orang	Menjaga kesehatan lansia	100 orang					
								Latihan Kesenian Hadroh (Kampung Tompeyan)	20 orang	Melestarikan kesenian Hadroh	20 orang					
								Memetri Pangeran Diponegoro	1 kali	Memetri Budaya lokal	1 kali					
								Gebyar Sabtu Paing (Gelar Potensi UMKM) (Kampung Demakan)	3 RW	Peningkatan ekonomi masyarakat	3 RW					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan Tanggap Bencana (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	20 orang	SDM Tangguh	20 orang					
								Pelatihan Batik Ecoprint (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	24 orang	Peningkatan Ekonomi warga	24 orang					
								Pelatihan Kuliner (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	47 orang	Untuk Meningkatkan Penghasilan Warga dan Kemandirian warga	47 orang					
								Pelatihan Hidroponik, Toga dan Sayur (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	24 orang	Menambah Ekonomi Keluarga	24 orang					
								Sosialisasi Hukum dan Wawasan Kebangsaan (Kampung Demakan)	60 orang	Menambah wawasan nasionalisme	60 orang					
								Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan (Jagawarga) (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	70 orang	Menambah Pengetahuan	70 orang					
								Rapat Koordinasi Jagawarga (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	50 orang	Koordinasi program	50 orang					
								Pelatihan RW Siaga (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	40 orang	Kelancaran Kegiatan RW Siaga	40 orang					
								Rapat Koordinasi Pengurus Kesi	30 orang	Koordinasi program	30 orang					
								Sosialisasi Program Kesi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	30 orang	Mengoptimalkan kinerja pengurus Kesi dan seksi-seksi	30 orang					
								Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	40 orang	Deteksi dini menghindari terkena penyakit tidak menular	40 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sosialisasi P2WKSS (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	30 orang	Peningkatan layanan kegiatan	30 orang					
								Sosialisasi Rumah Sehat (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	30 orang	Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	30 orang					
								Sosialisasi PHBS (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	50 orang	Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	20 orang					
								Pentas Kreativitas Anak PAUD & Rapat Koordinasi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	1 tahun	Meningkatkan kreativitas anak	1 tahun					
								Pelatihan Linmas (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	60 orang	Meningkatkan kemampuan linmas dalam menjaga keamanan	60 orang					
								Sapa Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	60 orang	Mengenalkan kegiatan/pekerjaan linmas kepada masyarakat	60 orang					
								Pelatihan Pembuatan Tahu (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	24 orang	Ganti usaha	24 orang					
								Rapat Koordinasi Karang Taruna	25 orang	Koordinasi program	25 orang					
								Peringatan Sumpah Pemuda	100 orang	Memperingati hari Sumpah Pemuda	100 orang					
								Perbaikan komputer/printer	3 kali	Menunjang kinerja pengurus	3 kali					
								Sosialisasi Pendamping Keluarga Difabel (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	80 orang	Suporting Kegiatan	80 orang					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Kricak							519,633,500	535,222,505	Lurah Kricak	APBD	

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	153 lembaga	Koordinasi pengurus kelembagaan	Lembaga Kemasyara katan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW,					
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Kricak	74 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Kricak Masa Bakti 2021-2024	13 RW 61 RT					
								Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
								Pembinaan peserta didik JBM se Kel Kricak melalui les privat dan persiapan intensive menghadapi lomba dan ujian (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	39 kali	Peningkatan SDM dan disiplin belajar	39 kali					
								Lomba Balita Sehat (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	45 orang	untuk memacu pertumbuhan bayi dan balita sehat	45 orang					
								Pelatihan Baris berbaris Bergodo Keprajuritan untuk Kelurahan	40 orang	Penguatan Ketrampilan	40 orang					
								Latihan Kesenian Keroncong (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	10 orang	Melestarikan budaya keroncong	10 orang					
								Pelatihan Kesenian Klasik/tradisional dan modern(Tari Klasik, Karawitan, Ketoprak, Jatilan)	90 orang	Ekspose Kesenian dan pemberdayaan MAsyarakat	90 orang					
								Merti Kampung (Kampung Bangunrejo)	1 kali	Mengungkap fakta dan sejarah kampung	1 kali					
								Gelar Seni dan Budaya (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	1 kali	Menampilkan seni dan budaya kel. Kricak	1 kali					
								Sosialisasi Panca Tertib (Kampung Jatimulyo)	30 orang	Warga memahami tertib Lingkungan, Usaha, sosia l dan bangunan	30 orang					
								Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100 orang	Meningkatkan Kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama	100 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan dan Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Hidroponix (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	26 orang	Menambah keindahan dan pembudidayaan Tanaman	26 orang					
								Sosialisasi Kelembagaan PKK dan Pembinaan Administrasi Data SIM PKK Kel, RW, RT dan dasa Wisa (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	3 kampung	Agar tertib Administrasi	3 kampung					
								Administrasi PKK Kelurahan	1 Kelurahan	Agar Tertib administrasi	1 Kelurahan					
								Pelatihan Memimpin Lagu/Dirigen (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang	supaya semua bisa memimpin lagu	30 orang					
								Penyuluhan Anak Kost dan Induk Semang (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang	Agar anak Kost dan induk semang lebih tertib	30 orang					
								Penyuluhan Mitra Keluarga (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang	Informasi lanjutan berkait Mitra keluarga	30 orang					
								Pelatihan Administrasi (Pra Koperasi) (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	60 Orang	Memberi pengetahuan dan ilmu administrasi simpan pinjam	60 Orang					
								Pelatihan Membuat Batik Kricakan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	20 orang	Agar masyarakat pandai membuat batik dan menambah penghasilan keluarga	20 orang					
								Pelatihan Administrasi Posyandu Integrasi (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang	Posyandu se kelurahan bisa terpadu dengan BKB, PAUD, SDIDTK	30 orang					
								Sosialisasi Penanggulangan Stunting dengan PMBA (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 Orang	Untuk tumbuh kembang bayi dan balita yang sesuai dengan usia	30 Orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Fasilitasi Posyandu Balita (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	20 orang		Bantuan peningkatan gizi bagi balita (PMT) untuk menunjang kegiatan Posyandu Balita	20 orang					
								Sosialisasi Kelembagaan Bank Sampah Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	50 orang		Agar bank sampah yang ada di kricak lebih maju	50 orang					
								Pelatihan Kerajinan dari Daur Ulang (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	50 orang		Agar anggota PBS semakin kreatif	50 orang					
								Sosialisasi Administrasi, Tugas dan Aturan PSM (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	40 Orang		Sosialisasi PSM dan berprestasi	40 Orang					
								Sosialisasi Kemampuan dan Ketrampilan Diri Linmas terkait dengan Ketugasan dan Pemahaman Aturan Kerja (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	50 orang		Linmas menjadi tangguh	50 orang					
								Sosialisasi Kelembagaan UMKM serta menambah pengetahuan administrasi P2WKSS (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	35 orang		Peningkatan layanan kegiatan	35 orang					
								Pengisian Raport Keluarga Semester 2 (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	336 orang		Peningkatan taraf hidup yg lebih baik	336 orang					
								Penyuluhan HIV AIDS untuk remaja dan IRT (Ibu Rumah Tangga) serta Penyuluhan PTM (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	40 orang		Remaja dan Ibu Rumah Tangga sadar HIV AIDS dan PTM	40 orang					
								Pentas seni Anak (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	200 orang		Peningkatan Kualitas anak2 PAUD	200 orang					
								Pelatihan Baris Berbaris dan Beladiri Dengan Tongkat FKPM Sido Rukun	5 kali		Untuk kedisiplin dan Ketangkasan Anggota	5 kali					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan PPGD serta Water Rescue dan penggunaan Peralatan PPGD (KTB Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	25 orang	Peningkatan Kapasitas anggota KTB	25 orang					
								Pelatihan Peningkatan kemampuan Pelayanan Kelembagaan Kepada Masyarakat dari alur sampai dasar hukumnya (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	223 orang	Peningkatan Pelayanan Kepada Warga Masyarakat	223 orang					
								Gebyar LANSIA (Festival, Senam, Pelatihan Administrasi) (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	75 orang	Senam, jl.sehat, penyuluhan & pemeriksaan kesehatan dilanjutkan untuk pembinaan Administrasi	75 orang					
								Posyandu Lansia (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	20 orang	Untuk menunjang kegiatan Lansia (14 Grup Lansia)	20 orang					
								Sosialisasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	40 orang	Bantuan usaha dan keterampilan, bantuan dana sosial, peralatan, orientasi mobilitas, perlindungan dll.	40 orang					
								Latihan Sepak Bola Kricak FC (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	55 orang	Menambah keakraban Pemuda di Kel.Kricak	55 orang					
								Fasilitasi Posbindu	3 kampung	fasilitasi cek kesehatan bagi masyarakat	3 kampung					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Karangwaru			KELURAHAN KARANGWARU		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangwaru		668,587,784	688,645,418		Lurah Karangwaru	APBD
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	152 Lembaga	Koordinasi pengurus kelembagaan	14 PKK RW, 1 PKK Kelurahan, 56 RT, 14 RW, 5 Kampung,					
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Karangwaru	70 Lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Patangpuluhan Masa Bakti 2021-2024	56 RT, 14 RW					
								Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Kegiatan Belajar Masyarakat (les tambahan siswa SD, SMP, SMA)/JBM)	4 kali	Peningkatan SDM dan disiplin belajar	4 kali					
								Penyuluhan Pengelola dan Pendidik Paud (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	30 orang	Meningkatkan pengetahuan kepada pengelola PAUD	30 orang					
								Sosialisasi Kelembagaan RW Siaga (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan Lingkungan	20 orang					
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Kesi, Korkel, Linmas, TKPK, PSM, PMK, forum anak, UMKM karangtaruna, Jaga warga, FKUB, FKPT, Pendamping JBM, Bank Sampah, Tasgana, Pendamping PKH, Pendamping anak putus sekolah)	17 lembaga	Koordinasi pengurus lembaga sosial	17 lembaga					
								Sosialisasi Pembentukan Kampung KB (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 orang	Meningkatkan Kesertaan KB	40 orang					
								Fasilitasi Posyandu Keluarga (PMT, Pengadaan Alat Tensi, Timbangan, Tinggi Badan)	5 kampung	Bantuan peningkatan gizi bagi balita (PMT) untuk menunjang kegiatan Posyandu Balita	5 kampung					
								Pelatihan Administrasi, rekam medis, cek kesehatan bagi kader posbiniu) (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	30 orang	Menambah Pengetahuan Dan Sadar Kesehatan	30 orang					
								Sarasehan Untuk Keluarga Miskin/Rentan (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 orang	Peningkatan Pemahaman Dalam Menanggulangi Kemiskinan	40 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan Budidaya Tawon lanceng (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 orang	Peningkatan Ekonomi Warga Miskin	40 orang					
								Penyusunan Rapor Keluarga Miskin	432. KK miskin	Mendapatkan Masukan Warga Miskin Untuk Memberi Kebijakan Dan Pengentasan Kemiskinan	432. KK miskin					
								Sosialisasi Kampung Segoro Amarto (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 Orang	mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan penekanan utama perubahan nilai pada masyarakat	40 Orang					
								Penyuluhan Bela Negara Bagi Karang Taruna(Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	30 Orang	Peningkatan Jiwa Patriotik Pemuda	30 Orang					
								Pengolahan sisa sampah pilah(Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	10 Orang	mengurangi sampah yangdikirim ke TPA	10 Orang					
								Sarasehan untuk Penyandang Disabilitas Bagi penyandang dan Orang Tua Disabilitas (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	20 Orang	Meningkatkan Ekonomi Keluarga	20 Orang					
								Pelatihan Kader IPSM(Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	25 Orang	Mengenalkan Ipsm Pada Masyarakat	25 Orang					
								Senam Lansia	100 orang	Lansia Sehat Jasmani	100 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyuluhan Kegawadaruratan dan Kebencanaan (KTb,LINMAS,TASGAN A,RW SIAGA) (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 Orang	Melatih Sdm Menangani Kegawatdaruratan	40 Orang					
								Kerja Bakti Rutin Tiap Kampung (Karangwaru lor,Karangwaru Kidul, Petinggen, blunyahrejo, bangirejo)	500 Orang	Menjaga Kebersihan Lingkungan	500 Orang					
								Rapat Koordinasi Kelembagaan Dengan Opd Terkait	100 Orang	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan	100 Orang					
								Penyuluhan Pembentukan Kampung Panca Tertib Karangwaru Kidul dan Blunyahrejo	40 Orang	Meningkatkan Ketertiban Lingkungan	40 Orang					
								Pelatihan Pertanian Perkotaan untuk peningkatan ketahanan pangan (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	100 Orang	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 Orang					
								Penyuluhan PHBS dan Deteksi Dini Penyakit Menular(Pkk Rw, Pkk Kelurahan, Mitra Keluarga, Pengurus Kesi, Rw Siaga) (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo))	40 Orang	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	40 Orang					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Bener			KEURAHAN BENER		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bener		322,351,784	332,022,338	Lurah Bener	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	70 lembaga	Koordinasi pengurus kelembagaan	7 PKK RW, 1 PKK Kelurahan, 26 RT, 7 RW, 2 Kampung,					
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Bener	33 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Bener Masa Bakti 2021-2024	7 RW 26 RT					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
								JBM 7 RW	12 kali	Peningkatan SDM dan disiplin belajar	12 kali					
								Validasi Data Anak Putus Sekolah (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	2 Kampung	Koordinasi Dasa Wisma	2 Kampung					
								Fasilitasi Posyandu Timbangan, Alat Tensi, Pengukur Tinggi Badan dan Kartu Kendali)	1 paket	Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan masyarakat	1 paket					
								Sosialisasi penggunaan gadget secara cerdas (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	mengenalkan ilmu pemrograman pada anak menghadapi jaman milenial	20 orang					
								Pelatihan Kuliner Olahakan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Meningkatkan perekonomian	20 orang					
								Pelatihan Menjahit Lanjutan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Meningkatkan perekonomian	20 orang					
								Sosialisasi Penguatan Mental Disabilitas (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Menambah semangat	20 orang					
								Gebyar Lansia (Sosialisasi, Senam) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	40 orang	Memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan lansia secara mandiri	40 orang					
								Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	40 orang	Mengembalikan fungsi keluarga	40 orang					
								Penyuluhan Membentuk Karakter dan Kreativitas Anak Sejak Dini (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	50 orang	Meningkatkan kemandirian anak	50 orang					
								Pelatihan Wawasan Penghijauan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	33 orang	Meningkatkan ketahanan pangan	33 orang					
								Sosialisasi Administrasi Posbindu (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	30 orang	Menambah Pengetahuan Dan Sadar Kesehatan	30 orang					
								Rapat koordinasi KESI	180 orang	Tertib Laporan data KESI	180 orang					
								Sosialisasi Penanggulangan Bahaya HIV Aids (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	30 orang	Meningkatkan kesadaran bahaya HIV aids	30 orang					
								Latihan Karawitan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	15 orang	Melatih potensi warga bidang kesenian	40 x pertemuan					
								Pelatihan Pembuatan Kompos Organik (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Meningkatkan ketrampilan dan ekonomi	20 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sosialisasi Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	40 orang	Mengurangi angka perceraian	40 orang					
								Pelatihan Budi Daya Temak Itik (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 Orang	Meningkatkan potensi warga dan konservasi air	20 Orang					
								Pelatihan Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Menjaga kebersihan lingkungan	20 orang					
								Pengisian Raport Keluarga (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	350 orang	Mendapatkan Masukan Warga Miskin Untuk Memberi Kebijakan Dan Pengentasan Kemiskinan	350 orang					
								Penyuluhan Sopan Santun Budi Pekerti (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	30 Orang	Pembentukan karakter	30 Orang					
								Sosialisasi Pondokan tentang Persyaratan SIPP (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	30 Orang	Tertib perijinan	30 Orang					
								Koordinasi Kader Karang Taruna	30 Orang	Kekompakan	30 Orang					
								Pelatihan Packaging dan Brand Product (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	30 Orang	Menaikkan kelas UMKM	30 Orang					
								Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	40 orang	Perlindungan Anak	40 orang					
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran	155 kali					125,580,000	129,347,400		Mantri Anom	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										36,165,000	37,249,950			
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kecamatan Tegalrejo			Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama	1 kali	Meningkatkan Kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama	1 kali	36,165,000	37,249,950		Jawatan Keamanan	APBD
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	50 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	50 Tabung APAR					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 Kali	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	1 Kali					
								Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	1 Kali	Terjalannya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	1 Kali					
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										89,415,000	92,097,450			
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Tegalrejo			Penyuluhan Anggota Satuan Linmas	1 Kali	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	1 Kali	89,415,000	92,097,450	Jawatan Keamanan	APBD	
								Monitoring Pengawasan Perijinan	40 orang	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	40 orang					
								Penyuluhan PKL	107 PKL	Meningkatnya Ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	107 PKL					
								Operasi Panca Tertib	80 Kali	Ketertiban wilayah meningkat	80 Kali					
								Frekuensi Pengamanan masyarakat	7 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	7 kali					
								Koordinasi Forkopimca	14 orang	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	14 orang					
								Total				11,339,596,768	11,679,784,672			

Tabel 5.16 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,759,938,378	6,335,932,218			Sekretaris Kecamatan Jetis	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15,440,000	16,984,000	BARU			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	5,360,000	5,896,000		Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Pengelolaan Website OPD	12 BULAN	Website terkelola dengan baik	100%	4,800,000	5,280,000		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 DOKUMEN	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	2,160,000	2,376,000		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 DOKUMEN								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 BERITA ACARA	Terjalinnnya koordinasi penyusunan Program kegiatan OPD	100%	1,720,000	1,892,000		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 DOKUMEN	Tersedianya dokumen evaluasi OPD	2 DOKUMEN	1,400,000	1,540,000		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,106,262,088	4,516,888,299	BARU			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Gaji dan Tunjangan ASN	33 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,098,229,088	4,508,051,999		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1,882,000	2,070,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	562,000	618,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	12 dokumen	562,000	618,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 DOKUMEN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	562,000	618,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 DOKUMEN	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	608,000	668,800		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 DOKUMEN	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	1,962,000	2,158,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 DOKUMEN	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah	100%	562,000	618,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 DOKUMEN	Tersedianya laporan akhir tahun	100%	1,333,000	1,466,300		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Materai	1600 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		6,600,000	7,260,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Jasa Telepon kantor	12 BULAN	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik	100%	127,800,000	140,580,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Jasa air PDAM kantor	12 BULAN								
								Jasa listrik kantor	12 BULAN								
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 UNIT	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	18 unit	4,940,000	5,434,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 UNIT								
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	4 UNIT								
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Jasa Tenaga Teknis Perorangan	1 ORANG	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	109,348,800	120,283,680		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Jasa Tenaga Teknis Perorangan Nabab	2 ORANG								
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) Kecamatan dan Kelurahan	12 BULAN	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	189,042,000	207,946,200		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Retribusi Kebersihan 4 kantor	12 BULAN								
								Retribusi Assenering 4 kantor	12 BULAN								

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Alat Tulis Kantor	78 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	102,565,850	112,822,435		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Barang cetakan	12 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,684,000	100,852,400		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Penggandaan/fotocopy dokumen	245.000 LEMBAR								
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	17,013,900	18,715,290		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	31 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	131,646,500	144,811,150		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Bahan Komputer/Printer	24 JENIS								
								Sewa Sound system	1 UNIT								
								Bahan/Alat Medis Pakai Habis (BMPH/AMPH)	2 JENIS								
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Bahan/Alat " Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18 JENIS	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	18jenis	48,318,000	53,149,800		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Makan Minum Rapat	14.280 OS	Terfasilitasinya koordinasi internal kemantren Jetis	100%	212,530,000	233,783,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Kendaraan dinas roda 4	1 UNIT	Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanal	18 unit	143,515,400	157,866,940		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Kendaraan dinas roda 2	13 UNIT								
								Kendaraan dinas roda 3	4 UNIT								
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Bumijo	1 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	100%	401,131,840	441,245,024		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pemeliharaan Taman 3 Kelurahan dan Kecamatan	4 LOKASI								
								JASA KEAMANAN KANTOR	12 BULAN								
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	KECAMATAN JETIS			Pemeliharaan Genset	4 UNIT	Peralatan kantor yang terpelihara	100%	52,100,000	57,310,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pemeliharaan Gergaji Listrik	1 UNIT								
								Pemeliharaan Pompa Air	1 UNIT								
								Service alat dan perlengkapan kantor	10 KALI								
								Pemeliharaan Mesin Ketik	4 UNIT								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Service alat elektronik	15 KALI							
								Pemeliharaan AC	80 KALI							
								Service Printer	70 KALI							
								Service Komputer	40 KALI							
								Pemeliharaan Mebelair	127 UNIT							
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	87					677,431,570	745,174,727		Camat Jetis (Matri Pamong Praja)	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										146,865,650	161,552,215	baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Jetis			Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW LPMK KAMPUNG	49 orang	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	215 orang	146,865,650	161,552,215		Kasi Pemerintahan (Jawata Praja)	APBD
								Penguatan RT dan RW	203 orang	Terlaksananya penguatan RT RW	37 RW 166 RT					
								Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	203 orang	Lancarnya Pemilihan RT RW	37 RW 166 RT					
								musrenbang	4 dokumen	Terlaksananya Musrenbang	4 dokumen					
								Profil	4 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen					
								Monografi	3 dokumen	Tersedianya data monografi	3 dokumen					
								Evaluasi Kelurahan	3 Kelurahan	Kualitas perkembangan Kelurahan meningkat	3 Kelurahan					
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										109,900,000	120,890,000	lanjutan		
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Jetis			Jetis Exspo	2 hari	potensi wilayah UMKM, Lembaga Terangkat	2 hari	109,900,000	120,890,000		Kasi Perekonomian dan pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	APBD
								Koordinasi UMKM, Gapoktan	2 lembaga	kelembagaan UMKM dan Gapoktan terdata	2 lembaga					
								Workshop kampung bersih Proklim	2 hari	iklim lingkungan semakin bersih	2 hari					
								Gelar Potensi UMKM	40 stand	Meningkatkan kualitas UMKM	40 stand					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Penyuluhan layak sehat jasa boga	2 hari	Setifikasi penyedia jasa boga gandang gendong	2 hari						
								CSR dan evaluasi pembangunan fisik	1 dokumen	Evaluasi pembangunan fisik dan CSR	1 dokumen						
								Jasa tenaga ahli perencanaan ke wilayahan	1 dokumen	Dokumen perencanaan kewilayan terintegrasi	1 dokumen						
								Penyusunan buku informasi pembangunan	2 dokumen		2 dokumen						
	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									420,665,920	462,732,512	lanjutan			
	7.01.02.2.04.01		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Jetis		Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan			25,140,720	27,654,792		Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD	
	7.01.02.2.04.02		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kecamatan jetis		Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan			93,399,200	102,739,120		Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD	
								Sosialisasi PATEN	215 orang								
								Sosialisasi Jogja Smart Service	215 orang								
								Evaluasi tim pelayanan	12 bulan								
	7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Jetis		Lomba anak sholeh	1 kali	Kualitas anak sholeh meningkat	1 kali	302,126,000	332,338,600		Kasi Kesejahteraan masyarakat (Jawatan Sosial)	APBD	
								Pelatihan Seni Tradisional	10 kali								
								Pawai Budaya dan Pentas seni	2 kali								
								SURVEYOR TKPK KELURAHAN BUMIJO COKRODININ GRATAN DAN GOWONGAN	1148 KK miskin								
								Festival disabilitas	200 orang			200 orang					
								Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya & Jelajah Warisan Budaya	2 hari								
								Fasilitasi kelembagaan kecamatan (TKPK,KORCAM,FPKK.L ansia dan PAUD)	5 lembaga			5 lembaga					
								Fasilitasi PKK Kecamatan	12 bulan			12 bulan					
								Festival Lansia	1 hari			1 hari					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sapa anak kos Kelurahan gowongan	3 kali		3 kali					
								HKG	2 jenis		2 jenis					
								Posbindu	2 kali		2 kali					
								Festival PAUD	1 hari		1 hari					
								Lomba Balita Sehat Indonesia	1 hari		1 hari					
								Penyuluhan Hatinya PKK	1 hari		1 hari					
								Evaluasi Pemberdayaan kelurahan (Laporan Penanggulangan Kemiskinan)	1 dokumen		1 dokumen					
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	114.211.900					2,410,639,140	2,651,703,054		Camat Jetis (Matri Pamong Praja)	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,410,639,140	2,651,703,054	baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kelurahan Bumijo			Pemeliharaan Jalan (konblok) Kampung Pingit, Kampung Bumijo, Kampung Badran	703 m2	Kualitas Jalan Meningkat	703 m2	393,450,000	432,795,000		Lurah Bumijo	APBD
								Pemeliharaan SAH Kampung Pingit, Kampung Bumijo,	210 m	Kualitas SAH Meningkat	210 m					
								Pemeliharaan SPAH Kampung Pingit	1 titik	Kualitas SPAH Meningkat	1 titik					
								Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	2 dokumen					
								Pemeliharaan PJU Kampung Pingit, Kampung Bumijo, Kampung Badran	30 titik	Kualitas PJU meningkat	30 titik					
								Pemeliharaan pekerjaan Sumur bor Kampung Pingit, Kampung Bumijo,	8 titik	Mengatasi Kebutuhan air bersih	8 titik					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	kelurahan cokrodiningratan			PJU kampung cokrokusuman, cokrodiningratan dan jetisharjo	80 titik	Kualitas PJU meningkat	80 titik	434,901,380	478,391,518		Lurah Cokrodiningratan	APBD
								Peningkatan dan pemeliharaan Jalan cokrokusuman, cokrodiningratan dan jetisharjo	833 m2	Kualitas Jalan Meningkat	2845 m2					
								Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	2 dokumen					
								pemeliharaan balai RW Wastafel	2 unit 11 RW							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Landscap Taman Robin	1 lokasi							
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	Kelurahan Gowongan			PJU Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan, Kampung Gowongan	40 titik	Kualitas PJU meningkat	40 titik	418,078,200	459,886,020		Lurah Gowongan	APBD
								Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	2 dokumen					
								Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kampung Penumping kampung Gowongan	730 m2	Kualitas Jalan Meningkat	730 m2					
								Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan	100 m2	Kualitas SAH Meningkat	100 m2					
								Pendalaman Sumur komunal kampung penumping	1 lokasi	Mengatasi Kebutuhan air bersih	1 lokasi					
								Pemeliharaan MCK umum kampung penumping	6 unit	Penyediaan fasilitas mck untuk masyarakat	6 unit					
								Pemeliharaan balai kampung penumping dan kampung gowongan	1 unit	Penunjang fasilitas warga	1 unit					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Bumijo			Koordinasi lembaga kemasyarakatan (Kelurahan Siaga-KESI, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan-TKPK, Komisi lansia dan Kelompok Lansia RW)	4 lembaga	Kegiatan PKK optimal	4 lembaga	418,597,000	460,456,700		Lurah Bumijo	APBD
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, Kampung, LPMK dan PKK)	5 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga					
								Pelatihan kerajinan batik dan sibori (lanjutan)	55 orang	Meningkatkan kesejahteraan	55 orang					
								Penyuluhan Forum Kampung Panca Tertib	35 orang	Terciptanya tertib pondokan	35 orang					
								Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	50 orang	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	50 orang					
								Pelatihan membuat kue basah & kering	30 orang	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	30 orang					
								Pelatihan Ketoprak	30 orang	Meningkatnya Kesejahteraan	30 orang					
								Fasilitasi Kegiatan Belajar Masyarakat	13 RW	Meningkatkan kualitas anak SD dan SMP	13 RW					
								Pelatihan pembuatan kompos (lanjutan)	30 orang	Meningkatkan kebersihan lingkungan	30 orang					
								Pelatihan Karawitan	30 orang	Sosial Kemasyarakatan berjalan dengan baik	30 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang					
								Pemilihan RT RW	70 orang	Kelancaran administrasi RT RW	70 orang					
								Pelatihan membuat kerajinan dari bahan bekas	30 orang		30 orang					
								Workshop Hatinya PKK dan B2 SA	30 orang		30 orang					
								Workshop Dasawisma kampung Pingit, Badran, Bumijo	120 orang		120 orang					
								Workshop Kelurahan Siaga	35 orang		35 orang					
								Penyuluhan KTB dan Katana	40 orang		40 orang					
								Pelatihan membuat pembalut manual	30 orang		30 orang					
								Pelatihan Administrasi Posyandu	35 orang		35 orang					
								Sapaan Anak Kost (monitoring)	3 kali		3 kali					
								Penyusunan Rapor Keluarga	600 KK		600 KK					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	kelurahan cokrodingratan			Pelatihan Pengolahan Daging / Ikan	50 orang	meningkatnya pengetahuan lembaga-lembaga se kelurahan cokrodingratan	2 hari	377,768,120	415,544,932		Lurah Cokrodingratan	APBD
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	5 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga					
								Senam lansia (senam dan pengadaan panggung)	5 kali	Kesehatan lansia meningkat	11 kali					
								Workshop Perda DAMIJA	40 orang	terciptanya tertib damija	40 orang					
								workshop perda pondokan	2 hari	terciptanya tertib pondokan	2 hari					
								Pembinaan linmas	6 kali	meningkatnya keamanan warga	6 kali					
								Pemilihan RT RW	70 orang	Kelancaran administrasi RT RW	70 orang					
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang					
								Jemput bola pelayanan prima(rapat)	3 kali	meningkatnya kesadaran warga untuk mengurus dokumen kependudukan	3 kali					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Gowongan			WORKSHOP KELEMBAGAAN PKK	30 orang		50 orang	367,844,440	404,628,884		Lurah Gowongan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitasi kelembagaan (linmas, kesi, lansia, bank sampah, gapoktan, paud, ipsm, usep km.)	9 lembaga	Kegiatan PKK optimal	13 lembaga					
								Pelatihan penanggulangan kebencanaan perkotaan	20 orang	Meningkatkan kewaspadaan bencana	40 orang					
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan RT, RW, PKK Kelurahan, PKK RT/RW, LPMK, Kampung	5 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga					
								Pelatihan Membuat Makanan Tradisional utk warga miskin	40 orang	Meningkatkan kompetensi pendidik PAUD	26 orang					
								Fasilitasi posyandu (pembelian alat, rapat, penggandaan)	13 RW	Penunjang operasinal posyandu	13 RW					
								Pelatihan pelaku jasa pariwisata bagi pemuda	3 hari	Meningkatkan kompetensi pemuda	3 hari					
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang					
								Pemilihan RT RW	65 orang	Kelancaran administrasi RT RW	65 orang					
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	5					130,573,500	143,630,850		Camat Jetis (Matri Pamong Praja)	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										65,083,500	71,591,850	baru		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kecamatan Jetis			Workshop FKUB	100 orang	Terjalannya hubungan harmonis FKUB	200 orang	65,083,500	71,591,850		Kasi Ketentraman dan tertiban (Jawatan Keamanan)	APBD
								Forum pembaharuan kebangsaan	4 kali	Meningkatakan kualitas FPK						
								Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali	Meningkatakan kualitas FPK						
								Operasi ketertiban masyarakat	11 bulan							
								Jagawarga PAM JOGOBARAN	75 orang 22 kali							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										65,490,000	72,039,000	baru		

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kecamatan Jetis			Forkopimca	12 bulan	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan	65,490,000	72,039,000		Kasi Kentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD	
								Pelatihan bela negara bagi generasi muda	100 orang	Meningkatkan karakter generasi muda	100 orang						
								Workshop PKL dan juru parkir	2 kali		-						
								Koordinasi Linmas Kecamatan	4 kali								
Total												8,978,582,588	9,876,440,849				

Tabel 5.17 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,488,511,807	7,713,167,159		Mantri Anom	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,260,000	6,447,800	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		800,000	824,000		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,100,000	3,193,000		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
								Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen							
								Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021	4 dokumen							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,780,000	1,833,400		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		400,000	412,000		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		180,000	185,400		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,763,638,440	5,936,547,593	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Gaji dan Tunjangan ASN	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		5,754,931,440	5,927,579,383		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		196,000	201,880		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,320,000	1,359,600		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		90,000	92,700		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		180,000	185,400		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		6,000,000	6,180,000		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		381,000	392,430		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		180,000	185,400		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		360,000	370,800		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,718,613,367	1,770,171,766	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Surat Masuk	2677 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,800,000	4,944,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	1113 Surat							
								Pengiriman Dokumen	300 Dokumen							
								Materai	1300 Lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		144,000,000	148,320,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Rekening Air	12 Bulan							
								Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	18 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,500,000	4,635,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	3 Unit							
								Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Tenaga Teknis/Belanja Jasa Orang Perorangan/Tenaga Teknis	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		25,139,784	25,893,977		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		355,607,500	366,275,725		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Belanja Retribusi Kebersihan	12 Bulan							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Alat Tulis Kantor	49 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		31,643,887	32,593,203		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Barang Cetak	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		59,700,000	61,491,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	186.180 Lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		10,980,000	11,309,400		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dekorasi Tematik untuk Ruang Pelayanan	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		164,047,084	168,968,496		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Almari Arsip Pintu Kaca Kecamatan	6 Unit							
								Rak arsip (besi)	2 unit							
								Printer/ Docuprint	1 unit							
								AC Split 1 PK	3 Unit							
								Komputer/PC	3 Unit							
								UPS/Stabilizer	2 Unit							
								Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21 Jenis							
								Bahan Komputer/Printer	7 Jenis							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,196,000	3,291,880		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Makan Minum Rapat	137 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		61,419,000	63,261,570		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pajak PBB	1 unit 1 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		102,800,000	105,884,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Gedung kantor kecamatan	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		171,288,112	176,426,755		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Gedung kantor kelurahan baciro	1 unit							
								Gedung kantor kelurahan Demangan	1 unit							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Roda 2	18 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		73,892,000	76,108,760		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Roda 3	3 Unit							
								Roda 4	1 Unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro dan Terban	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		467,160,000	481,174,800		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa Keamanan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Service Komputer	36 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		33,040,000	34,031,200		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Service Laptop	4 Kali							
								Pemeliharaan Mesin Ketik	6 Kali							
								Service Printer	50 Kali							
								Pemeliharaan Mesin Senzo	2 Kali							
								Pemeliharaan Pompa Air	1 Kali							
								Pemeliharaan AC	24 Kali							
								BBM Genzet, gergaji senzo	4 kali							
	X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Perbaikan Meja	10 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		5,400,000	5,562,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
								Perbaikan Lemari	10 buah							
								Perbaikan Kursi	10 buah							
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Nilai survei kepuasan masyarakat		81.5			631,380,068	650,321,470		Mantri Pamong Praja	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										157,264,500	161,982,435	Baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	337 lembaga	Tercapainya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		157,264,500	161,982,435		Kasi. Jawatan Praja	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pengukuhan RT dan RW	337 lembaga								
								Penyusunan Monografi	2 dokumen								
								Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan	1 dokumen								
								Pendampingan Evaluasi Kelurahan	3 kali								
								Penyusunan Rumusan Perencanaan Program Kegiatan 2022	5 Kelurahan								
								Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	6 dokumen								
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										103,980,000	107,099,400	Baru			
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah	70 orang	Terselenggaranya koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		103,980,000	107,099,400		Kasi. Jawatan Kemakmuran	APBD	
								Expo Potensi UMKM	1 kali								
								Pembinaan Penyelenggaraan Pondokan	5 Kelurahan								
								Pendampingan Poktan dan Monitoring Evaluasi Gapoktan	5 kali								
								Sinkronisasi Program Kelembagaan FORKOM UMKM	2 kali								
								Workshop Kepariwisata	40 orang								
								Penyusunan Master Plan Animasi Kampung	1 dokumen								
								Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen								
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen								
								Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan	4 kali								
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										370,135,568	381,239,635	Baru			
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Sosialisasi UU Kependudukan	30 orang	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan		6,355,000	6,545,650		Kasi. Jawatan Umum	APBD	

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sosialisasi Pelayanan Perizinan	30 orang							
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan		56,505,568	58,200,735		Kasi. Jawatan Umum	APBD
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondokusuman			Workshop Forum Kecamatan Inklusi (FKI)	30 orang	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		307,275,000	316,493,250		Kasi. Jawatan Sosial	APBD
								Workshop Seni, Budaya dan Multimedia bagi Pemuda	40 orang							
								Workshop Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan	70 orang							
								Workshop Lansia Tangguh	40 orang							
								Workshop Pengembangan Usaha	30 orang							
								Workshop Kesehatan Sekolah	50 orang							
								Workshop Pendidik PAUD	40 orang							
								Pelatihan Kesenian (seni musik, teater, macapat, gamelan dan seni tari)	275 orang							
								Lomba Administrasi PKK	100 orang							
								Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG)	100 orang							
								Gelar Seni dan Budaya Kecamatan	100 orang							
								Pawai Budaya Kecamatan	100 orang							
								Semangat Segoro Amarto	12 bulan							
								Fasilitasi Lembaga di tingkat Kecamatan	10 lembaga							
								Fasilitasi Forum TKPK Kecamatan	1 organisasi							
								Fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	12 bulan							
								Workshop PKK Kecamatan	50 orang							
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 4.831.000.000,00					4,519,839,133	4,655,434,304		Mantri Pamong Praja	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										4,519,839,133	4,655,434,304	Baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Kotabaru			Pemeliharaan jalan konblok RW 3 Kp Kotabaru	90 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kotabaru		336,311,000	346,400,330		Lurah Kotabaru	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemeliharaan Gudang dan Balai RT/RW 10 (RW 2, RW 3, RW 4) Kp Kotabaru	5 unit							
								Pemeliharaan MCK RW 2, RW 3 Kp Kotabaru	5 titik							
								Perbaikan Lapangan Olahraga RW 3 Kp Kotabaru	1 unit							
								Pengurusan Sumur Umum Kp Kotabaru	1 unit							
								Pemeliharaan PJU Kel. Kotabaru	55 titik							
								Pekerjaan SAH RW 3 Kp Kotabaru	140 meter							
								Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
								Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Klitren			Perbaikan Jalan Konblok Kp Kepuh Balapan	665,5 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Klitren		400,208,212	412,214,458	Lurah Klitren	APBD	
								Pelumpuran SPAH Kp Klitren Lor	5 titik							
								Rehab Balai RW 11 Kp Kepuh	1 unit							
								Rehab Balai RW 5 Kp Klitren Lor	1 unit							
								Rehab Pos Ronda RW 11 KP Kepuh Balapan	1 unit							
								Rehab Taman Bacaan Masyarakat RW 7 Kp Iromejan	1 unit							
								Pemeliharaan PJU Kel. Klitren	100 titik							
								Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
								Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Terban			Pekerjaan Pegangan Tangga (gedung LPMK) Kp Terban	26 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Terban		396,622,350	408,521,020	Lurah Terban	APBD	
								Penambahan debit air Pokmair Sumber Tirtodomulyo Kp Terban	1 unit							
								Pembuatan Gorong-gorong Kp Resonegaran	150 m							
								Renovasi Pos Ronda Kp Resonegaran	1 unit							
								Perbaikan lapangan voli Kp Purbonegaran	1 unit							
								Renovasi kamar mandi dan waterom gedung LPMK Kp Terban	3 m2							
								Rehab gapura Kp Sagan	3 unit							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelumpuran SPAH Kp Sagan	10 titik							
								Penambahan pipa ke pelanggan Pokmair Sumber Tirtodonomulyo di wilayah RW 4 Kp Terban	47 pelanggan							
								Pekerjaan SPAH Kp Sagan	6 titik							
								Rehab dan Perawatan Balai RW 7 Kp Sagan	1 unit							
								Pembuatan Gapura Perbatasan CT Sleman Kp Sagan	1 unit							
								Renovasi makam tokoh kampung Kyai Resonegoro Kp Resonegaran	2 m							
								Pekerjaan Konblok Kp Sagan, KP Purbonegaran, Kp Resonegaran, KP Terban	1.160 m2							
								Rehab Jalan dan Selokan Kp Sagan	400 m2							
								Pemeliharaan PJU Kel. Terban	55 titik							
								Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
								Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Baciro			Pemeliharaan SPAH KP Gendeng	2 titik	erselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Baciro		335,543,087	345,609,379	Lurah Baciro	APBD	
								Perbaikan SAH Kp Baciro Sanggrahan	240 m							
								Pekerjaan konblok Kp Mangkukusuman, Kp Danukusuman, Kp Pengok Kidul, Kp Gendeng	845 m2							
								Pemeliharaan PJU Kel. Baciro	150 titik							
								Pembuatan Gapura Kp Gendeng	1 unit							
								Pembuatan tiang bendera, umpak dan bendera Kp Danukusuman	10 unit							
								Pelumpuran SPAH Kp Gendeng	14 titik							
								Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
								Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Demangan			Rehab SAH RW 6 Kp Sapen	20 m	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Demangan		400,265,938	412,273,916	Lurah Demangan	APBD	
								Rehab Gorong-gorong RW 7 Kp Sapen	20 m							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Rehab Atap Pos Ronda RT 26 Kp Sapen, RT 44 Kp Pengok	2 unit							
								Rehab Balai RW 9, RW 11 Kp Pengok	2 unit							
								Pengadaan cermin tikungan RW 3, RW 5 Kp Demangan, dan RW 5, RW 8 Kp Sapen	6 unit							
								Rehab Kebun Lombok Ijo RW 4 Kp Demangan	1 unit							
								Perbaikan lapangan badminton Kp Pengok	1 unit							
								Pelumpuran SAH RW 3 Kp Demangan	500 m							
								Rehab paving blok Kp Demangan, Kp Sapen, Kp Pengok	920 m2							
								Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
								Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
								Pemeliharaan PJU	60 titik							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Kotabaru			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	12 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kotabaru		257,117,594	264,831,121	Lurah Kotabaru	APBD	
								Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang							
								Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	4 RW							
								Simulasi Kampung Siaga Bencana (KSB)	75 orang							
								Pelatihan Desain Lampion	30 orang							
								Peyuluhan Kader Kesehatan	50 orang							
								Pelatihan Pemandu Wisata	25 orang							
								Operasional KESI	4 kegiatan							
								Pelatihan Kampung Sayur	40 orang							
								Pembelajaran Pemilahan Daur Ulang Sampah	2 kegiatan							
								Sosialisasi Pengolahan dan Pengurangan Sampah Plastik	60 orang							
								Workshop Kelembagaan Wilayah	110 orang							
								Pemilihan RT/RW	24 lembaga							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Terban			Bimtek SIM PKK	100 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terban		504,274,784	519,403,027	Lurah Terban	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	145 lembaga							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Fasilitasi lembaga di lingkungan Kelurahan	8 lembaga								
								FGD Gandeng Gendong	4 kampung								
								Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang								
								Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	12 RW								
								Pelatihan aquaponik	30 orang								
								Pelatihan Ecoprint	30 orang								
								Workshop Kader Posbindu	40 orang								
								Workshop Kader Posyandu	60 orang								
								Pelatihan Lele Cendol	30 orang								
								Pelatihan MC Bahasa Jawa	30 orang								
								Pelatihan Membuat Gudeg	30 orang								
								Pelatihan Membuat Makanan Untuk Hotel	20 orang								
								Pelatihan Pangrutitoyo	25 orang								
								Pemilihan RT/RW	70 lembaga								
								Pentas Seni dan Budaya	5 kegiatan								
								Penyuluhan Kader Dekelana	40 orang								
								Workshop Kelurahan Siaga (KESI)	30 orang								
								Workshop LKT	40 orang								
								Workshop Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	40 orang								
								Workshop Dasawisma	50 orang								
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Klitren			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	162 lembaga		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Klitren	599,105,788	617,078,962	Lurah Klitren	APBD		
								Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan	4 lembaga								
								Tumamen Futsal	100 orang								
								Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	90 orang								
								Workshop SIM PKK	90 orang								
								Gelar Seni Budaya	260 orang								
								Jasa Fasilitator Kelurahan	12 bulan								
								Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	16 RW								
								Pelatihan Kampung Tanggap Bencana (KTB)	130 orang								
								Pelatihan Tabulampot	40 orang								
								Pelatihan Lorong Kampung Sayur	120 orang								
								Tradisi Nyadran	240 orang								

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Workshop Pemasaran Produk Kerajinan	40 orang							
								Workshop Karang Taruna	40 orang							
								Lomba KKG Lombikes	300 orang							
								Pemilihan RT RW	79 lembaga							
								Sarasehan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)	85 orang							
								Sarasehan Kampung Panca Tertib	70 orang							
								Sarasehan Lintas Agama	60 orang							
								Sarasehan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	80 orang							
								Sosialisasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi	90 orang							
								Sarasehan Ibu dan Anak	74 orang							
								Workshop Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	60 orang							
								Workshop Pemanfaatan Biopori Jumbo	40 orang							
								Workshop KESI	45 orang							
								Workshop Lansia	50 orang							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Demangan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	120 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Demangan		453,750,596	467,363,114	Lurah Demangan	APBD	
								Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan	5 lembaga							
								Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	12 RW							
								Pelatihan Akupressure	25 orang							
								Pelatihan Batik Ecoprint	25 orang							
								Pelatihan Mengolah Sampah Organik dengan Mesin	25 orang							
								Pelatihan E-commerce	40 orang							
								Pelatihan Merajut	50 orang							
								Pelatihan Budidaya Tanaman TOGA bagi Kelompok Tani	30 orang							
								Pelatihan Membuat Sabun Cair	25 orang							
								Pelatihan Kuliner	50 orang							
								Pelatihan Membuat Kue	50 orang							
								Pemilihan RT/RW	56 lembaga							
								Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang							
								Monev Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	200 orang							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kalurahan Baciro			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	224 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Baciro		836,639,784	861,738,977		Lurah Baciro	APBD	
								Fasilitasi Lembaga di lingkungan Kelurahan	11 lembaga								
								Jasa Fasilitator Kelurahan	12 bulan								
								Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	21 RW								
								Merti Kali Gajahwong	200 orang								
								Misa Arwah 7 lingkungan	250 orang								
								Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik	45 orang								
								Pembekalan Satlinmas	100 orang								
								Pelatihan penggunaan APAR	45 orang								
								Penyuluhan Kesehatan Bagi Lansia	50 orang								
								Penyuluhan tentang Narkoba	50 orang								
								Kirab Gunung Apem Kp Danukusuman dan Kp Gendeng	500 orang								
								Sapaan Anak Kost	150 orang								
								Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB)	45 orang								
								Workshop untuk Anak dan Remaja	40 orang								
								Workshop Desa Bina Keluarga Sakinah (DBKS)	30 orang								
								Workshop hatinya PKK	35 orang								
								Workshop SIM PKK	110 orang								
								Pemilihan RT/RW	108 lembaga								
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	300 pelanggaran					213,634,932	220,043,979		Mantri Pamong Praja		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										177,634,932	182,963,979	Baru			
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Gondokusuman			Sarasehan Sinergitas FPK	75 orang	Terciptanya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		177,634,932	182,963,979		Kasi. Jawatan Keamanan	APBD	
								Operasional FPK	20 orang								
								Sarasehan Sinergitas FKDM	75 orang								

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pengamanan Masyarakat	6 wilayah							
								Operasional FKDM	20 orang							
								Operasional Forum Relawan Gondokusuman	15 orang							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										36,000,000	37,080,000	Baru		
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Gondokusuman			Operasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Forkompinka	15 orang	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada		36,000,000	37,080,000		Kasi. Jawatan Keamanan	APBD
								Operasi Ketertiban Masyarakat	50 kali							
Total												12,853,365,940	13,238,966,912			

Tabel 5.18 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan operasional perkantoran	100%					5,042,273,602	5,193,541,805		Mantri Anom	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										16,236,088	16,723,170	lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Dokumen Renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,135,000	3,229,050		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		6,460,088	6,653,890		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Penyusunan RKA dan DPA th 2022, RKPA dan DPPA th 2021	4 dokumen							
								Perjanjian kinerja dan perubahannya	2 dokumen							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,036,000	3,127,080		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan hasil renja opd	6 dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,500,000	1,545,000		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		2,105,000	2,168,150		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,218,003,396	4,344,543,497	lanjutan		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Gaji dan Tunjangan ASN	31 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		4,197,896,396	4,323,833,287		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,600,000	1,648,000		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,485,000	1,529,550		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Akuntansi dan pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,248,000	2,315,440		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,280,000	2,348,400		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		3,648,000	3,757,440		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Laporan Keuangan bulanan / semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		7,186,000	7,401,580		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Laporan Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		400,000	412,000		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Laporan keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,260,000	1,297,800		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										808,034,118	832,275,138	lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			surat masuk	1971 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,080,000	4,202,400		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								surat keluar	1594 surat							
								pengiriman dokumen	547 dokumen							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								meterai	810 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		79,440,000	81,823,200		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								pembayaran rekening air	12 bulan							
								pembayaran rekening listrik	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,300,000	3,399,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								pembayaran pajak kendaraan roda 4	1 unit							
								pembayaran pajak kendaraan roda 3	5 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			tenaga teknis	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		25,139,920	25,894,117		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		150,660,000	155,179,800		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Retribusi Kebersihan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Alat tulis Kantor	48 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		32,048,697	33,010,157		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Penggandaan surat - surat / dokumen	95.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		26,663,914	27,463,831		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								barang cetakan	9 jenis							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,971,000	4,090,130		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			televisi	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		41,408,150	42,650,394		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								soundssystem	1 unit							
								bahan komputer	8 jenis							
								sewa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		8,508,187	8,763,432		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Bahan Kebersihan	5 jenis							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			makan minum rapat	228 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		88,953,000	91,621,590		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			gedung kantor dan rumah dinas (Kecamatan Danurejan, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Bausasran)	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		60,750,000	62,572,500		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		68,987,500	71,057,125		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								roda 4	1 unit							
								roda 3	5 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Pemeliharaan taman	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		200,123,750	206,127,462		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Jasa keamanan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor / kerja / kerumahtanggaan (termasuk service komputer)	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		14,000,000	14,420,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				nilai survey kepuasan masyarakat	82					407,523,939	419,749,657		Mantri Pamong Praja	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										132,745,300	136,727,659	Baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Penguohan RT dan RW se Kemantren Danurejan	265 orang	Terlaksananya penguohan secara formal pengurus RT / RW se Kemantren Danurejan	265 orang	132,745,300	136,727,659		Jawatan Praja	APBD
								Sosialisasi pemilihan RT dan RW	238 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT / RW	238 orang					
								Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kegiatan	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kegiatan					
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	4 dokumen					

RPJMD 2017-2022	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantainya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali					
								Penjaringan aspirasi masyarakat kelurahan	3 kelurahan	Terlaksananya hasil penjaringan aspirasi masyarakat	3 kelurahan					
								Dokumen Musrenbang Kemantren Danurejan	1 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kemantren Danurejan	1 Dokumen					
								Profil Kelurahan dan Kemantren	1 Dokumen	Tersusunnya Profil Kelurahan	1 Dokumen					
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										44,998,000	46,347,940	Baru		
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Danurejan Expo	1 kali	Meningkatkan pemasaran produk UMKM	1 kali	44,998,000	46,347,940	Jawatan Kemakmuran	APBD	
								Forum pengembangan usaha wanita	3 kali	Meningkatnya kegiatan anggota forkom Usaha wanita	3 kali					
								Buku informasi Program dan kegiatan	2 dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kemantren Danurejan	2 dokumen					
								koordinasi forum perekonomian masyarakat	9 kali	Meningkatnya koordinasi forum perekonomian masyarakat	9 kali					
								Terdatanya Usaha Mikro Kecil Menengah se Kemantren Danurejan	1 Kemantren	Dokumen database UMKM se Kemantren Danurejan	1 Kemantren					
								Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di Kelurahan	1 dokumen	meningkatnya peran serta CSR di wilayah	1 dokumen					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										229,780,639	236,674,058	Baru		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Sosialisasi perijinan	40 orang	meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perijinan yang diberikan kemantren	40 orang	6,598,000	6,795,940	Jawatan Umum	APBD	
								Operasional pelayanan yang terkait perizinan	12 bulan	Terselenggaranya operasional pelayanan terkait perizinan	12 bulan					
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Operasional Pelayanan yang terkait non perijinan	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan yang terkait non perijinan	12 bulan	69,958,639	72,057,398	Jawatan Umum	APBD	
								Sosialisasi Adminduk	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan adminduk yang diberikan kecamatan	40 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sosialisasi Jogja Smart Service	40 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya	40 orang					
								Sosialisasi Keluar Bersama	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan kelahiran , inovasi keluar bersama yang diberikan kecamatan	40 orang					
								Sosialisasi Pelayanan Prima	80 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara / alur / prosedur pelayanan yang diberikan kecamatan	80 orang					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Danurejan			Koordinasi lembaga sosial Kemantren (Komisi Lansia, keagamaan, remaja, Fomi, Pramuka, PAUD, PKH, Himpaudi, BPNT, Kesenian, Kube PKH, IPSM, GOPTK, Perwosi)	14 lembaga	Terlaksananya koordinasi	14 lembaga	153,224,000	157,820,720	Jawatan Sosial	APBD	
								Penyuluhan Remaja	40 orang	meningkatkan pengetahuan remaja	40 orang					
								Penyuluhan Kader Paud	40 orang	meningkatkan kreativitas kader Paud	40 orang					
								Penyuluhan administrasi PKK	80 orang	Kapasitas Kader PKK meningkat	80 orang					
								Penyuluhan pemanfaatan tanaman herbal	40 orang	memberikan pengetahuan tentang tanaman herbal	40 orang					
								Penyuluhan kesehatan jiwa dan jasmani Lansia	40 orang	kesehatan lansia meningkat	40 orang					
								Penyuluhan Halaman asri teratur indah dan nyaman PKK	40 orang	memberikan pengetahuan tentang hatinya PKK	40 orang					
								Fasilitasi Kegiatan PKK	32 kali	Koordinasi pengurus TP PKK	32 kali					
								Penyuluhan mental spiritual PKK	40 orang	meningkatnya pengetahuan kader PKK	40 orang					
								Penyuluhan mental spiritual peserta PKH	40 orang	memberikan pengetahuan tentang keharmonisan keluarga peserta PKH	40 orang					
								Sosialisasi Kesehatan	40 orang	pembinaan kesehatan	40 orang					
								Sosialisasi kesehatan ibu dan balita	40 orang	meningkatnya kesehatan ibu dan balita	40 orang					
								Fasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat	9 kali	meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	9 kali					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Latihan Kesenian (macapat, karawitan, tari, drama tingkat kemandren)	13 kali	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	13 kali					
								Wayang Jogja Night Carnival	590 orang	terlaksananya kegiatan WJNC tingkat kota Yogyakarta	590 orang					
								Pentas Seni kemandren	380 orang	terlaksananya pentas seni kemandren danurejan	380 orang					
								Festival Kampung	1 kali	kampung yang terbina dengan baik	1 kali					
								Evaluasi Pemberdayaan	1 dokumen	tersedianya dokumen evaluasi pemberdayaan	1 dokumen					
								Surveyor TKPK Kelurahan	3 Kelurahan	terfasilitasinya surveyor TKPK	3 Kelurahan					
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	1.037.956 .600					3,506,779,413	3,611,982,795		Mantri Pamong Praja	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										3,506,779,413	3,611,982,795	Baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan		Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Tegalpanggung		Pemeliharaan PJU lingkungan kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	50 titik	keamanan dan kenyamanan jalan kampung terjamin	50 titik	571,605,000	588,753,150		Lurah Tegalpanggung	APBD
								Peningkatan dan pemeliharaan jalan konblok Kampung Ledok Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	900m2	kelancaran akses jalan	900m2					
								Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Ledok Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	600m2	mengurangi genangan air hujan	600m2					
								Peningkatan dan pemeliharaan Gapura Kampung Ledok Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	7 unit	sebagai penanda dan menambah keindahan	7 unit					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas umum (MCK / Sumur komunal, Pos ronda, dan cermin tikungan) Kampung Ledok Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegat Panggung, Kampung Juminahan	14 unit	meningkatnya mutu air bersih dan kesehatan masyarakat ,meningkatkan keamanan lingkungan ,meningkatkan keamanan pengguna jalan	14 unit					
								jasa konsultan perencanaan dan pengawas pembangunan	2 dokumen	optimalnya rencana dan pekerjaan pembangunan fisik	2 dokumen					
								Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	16 kali	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	16 kali					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Bausasran			Jasa konsultan perencanaan dan konsultasi pengawas penataan dan pengembangan lorong sayur	2 dokumen 1 paket	jasa konsultasi, pengawasan kampung bausasran	2 dokumen 1 paket	507,571,250	522,798,388		Lurah Bausasran	APBD
								pemeliharaan hidroponik poktan gemah ripah	1 titik	kelompok tani gemah ripah	1 titik					
								pemeliharaan taman Ruang Terbuka Hijau RW 07 dan taman RW 11	1 paket	tertatanya Ruang terbuka hijau	1 paket					
								konblok (penggantian) listrik penerangan (PJUL)	425 m2 5 titik	kelancaran akses jalan lingkungan jadi terang dan aman	425 m2 5 titik					
								penggantian cermin jalan (cembung)	5 buah	mengurangi kecelakaan	5 buah					
								renovasi gapura	1 paket	terpeliharanya identitas kampung	1 paket					
								pintu kamar mandi umum 2 (bahan dari aluminium klas 1)	2 buah	kenyamanan dan keamanan bagi penggunaan	2 buah					
								pelumpuran gorong - gorong	300 m	saluran air hujan lancar	300 m					
								mengganti 2 water torn sumur umum	2 buah	ketersediaan air cukup	2 buah					
								tamanisasi sayuran, obat / pupuk	315 pot	tanaman tumbuh subur, usaha meningkat	315 pot					
								spion ujung - ujung gang RW 08	2 buah	mengurangi kerawanan kecelakaan	2 buah					
								rehab selasar sumur umum	1 paket	bersih dan rapi	1 paket					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								pasangan pagar kebun sayur RT 23	50m2	lingkungan rapi dan bersih	50m2					
								perbaikan taman eks mataram	125 m 2	lingkungan bersih hijau dan asri	125m2					
								gerobag (bak angkut) sampah RW 07	1 buah	tersedianya gerobag sampah	1 buah					
								pita kejut (polisi tidur) di gang rukun	2 titik	mengurangi kecepatan	2 titik					
								perbaikan sumur umum dan pendalaman + mesin sanyo untuk sumur umum	1 paket	tercukupinya air bersih dan lingkungan bersih	1 paket					
								perbaikan pos ronda	6 m2	menambah semangat untuk kegiatan ronda	6 m2					
								pasangan PJUL	7 titik	lingkungan terang dan aman	7 titik					
								pasangan papan informasi	6 buah	menambah pengetahuan dan publikasi lancar	6 buah					
								perbaikan SAL	1 paket	saluran air limbah	1 paket					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Suryatmajan			Pintu gang kampung Ledok Macanan, Gemblakan Bawah dan Suryatmajan	4 unit	Meningkatkan keamanan	4 unit	421,490,781	434,135,505	Lurah Suryatmajan	APBD	
								Rehabilitasi balai RW 07 Kampung Gemblakan Bawah	1 unit	ruang pertemuan menjadi nyaman	1 unit					
								Penggantian Canopi Kampung Suryatmajan sebagai Pendukung Pariwisata	322,5 m2	mengangkat potensi yang ada	322,5m2					
								Pemeliharaan Gapura Kampung Suryatmajan	1 unit	Terpeliharanya sarpras fasum	1 unit					
								Mural 3 dimensi Kampung Ledok Macanan	601 m	jalan kampung menjadi indah dan bersih	601 m					
								Perbaikan Saluran Air Hujan Kampung Gemblakan Atas	70 m	Saluran air menjadi lancar tidak ada genangan air	70 m					
								Peningkatan Jalan Kampung Gemblakan Bawah	150 m2	Akses pengembangan kampung wisata dan pedestrian code Gumreget (PCG)	150m2					
								Penyambungan Saluran Air bersih kampung Sosrokusuman	30 m	Meningkatkan sarana air bersih	30 m					
								Koordinasi pembangunan fisik	30 kali	Meningkatnya koordinasi untuk pembangunan fisik	30 kali					
								Pembuatan pintu pagar besi ciri khas Jogja Kampung Cokrodirjan	4m	Pendukung icon kampung budaya	4 m					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Lingkungan Kampung Ledok Macanan, Gemblakan Atas, Sosrokusuman, Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Cokrodirjan	53 titik	Kualitas PJU meningkat	53 titik					
								Belanja jasa Konsultansi Perencana	1 dokumen	Perencanaan kegiatan fisik	1 dokumen					
								Belanja jasa konsultansi pengawas	1 dokumen	pengawasan kegiatan fisik	1 dokumen					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Tegalpanggung			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK)	171 lembaga	Koordinasi kelembagaan	171 lembaga	776,536,744	799,832,846		Lurah Tegalpanggung	APBD
								Fasilitasi Penyusunan Raport Keluarga oleh TKPK	900 KK	tersedianya fasilitasi penyusunan raport keluarga oleh TKPK	7 lembaga					
								Fasilitasi Kegiatan JBM	16 kelompok	tersedianya fasilitasi kegiatan JBM	16 kelompok					
								Fasilitator pemberdayaan Kelurahan	2 orang	Jasa tenaga teknis dan jasa tenaga bantuan	2 orang					
								pemilihan RT dan RW Kelurahan Tegalpanggung	82 lembaga	terpilihnya pengurus RT / RW Kelurahan tegalpanggung masa bakti 2021 - 2024	82 lembaga					
								Sosialisasi sadar hukum & pencegahan penganiayaan dengan pemberatan bagi remaja	150 orang	makin tingginya kesadaran akan hukum dan menurunnya tingkat penganiayaan dengan pemberatan	150 orang					
								Penyuluhan manajemen dan variasi menu bagi penyedia jamuan gandeng gendong	50 orang	bertambahnya wawasan penyedia jasa jamuan gandeng gendong	50 orang					
								Pelatihan Bahasa Inggris untuk mendukung Branding Kampung Tukangan	30 orang	meningkatnya ketrampilan dalam berbahasa Inggris	30 orang					
								Pelatihan batik Eco Print	60 orang	menambah potensi ekonomi bagi warga	60 orang					
								Penyuluhan administrasi dan manajemen Lembaga Tingkat kelurahan	190 orang	pengetahuan pengurus kelembagaan meningkat	190 orang					
								Pelatihan administrasi dan pembukuan kader PKK RW	50 orang	kinerja kader PKK RW meningkat	50 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan lainnya (Kelurahan siaga, Perlindungan masyarakat, Karang Taruna, Lembaga pendidikan dan pengamalan agama, Pekerja sosial masyarakat, Rintisan kelurahan budaya, Forum komunikasi Pemberdayaan Ekonomi Wilayah , Sagotrah , Desa Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	11 lembaga	Koordinasi kelembagaan	11 lembaga					
								Peningkatan kapasitas anggota Linmas	60 orang	Kapasitas anggota Linmas Kel tegalpanggung bertambah	60 orang					
								Fasilitasi penyusunan Profil Kelurahan Audiovisual	2 Kali	tersedianya fasilitasi penyusunan Profil Kelurahan Audiovisual	2 kali					
								Pelatihan pembuatan kue	30 orang	Ketrampilan dan kreativitas warga dalam membuat kue meningkat	30 orang					
								Fasilitasi PKK Kelurahan	24 kali	Koordinasi pengurus lebih terjaga dan administrasi lebih terpadu	24 kali					
								Penyuluhan manajemen dan tugas pekerja sosial masyarakat	30 orang	meningkatnya kemampuan manajemen dan tugas pekerja sosial masyarakat	30 orang					
								Pelatihan jumpatan bagi pendamping Difabel	20 orang	meningkatnya ketrampilan dan bertambahnya income bagi keluarga difabel	20 orang					
								pelatihan menulis dan mengarang bagi lansia	40 orang	meningkatnya kreativitas dan ketrampilan menulis lansia	40 orang					
								Penyuluhan administrasi dan manajemen RW Siaga	70 orang	meningkatnya kemampuan pengurus RW siaga	70 orang					
								Penyuluhan pencegahan demam berdarah Dengue bagi LASKAR BERLIAN (Bersih Lingkungan Anti Nyamuk)	82 orang	Laskar Berlian lebih terkoordinir dan solid	82 orang					
								Pelatihan usaha produksi dari barang bekas serta pembuatan sabun dari minyak bekas	40 orang	meningkatnya ketrampilan, menambah potensi pendapatan baru serta menjaga kebersihan lingkungan	40 orang					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								penyuluhan berorganisasi forum anak kelurahan	30 orang	meningkatnya pengetahuan dan wawasan forum anak kelurahan	30 orang						
								pelatihan budidaya lele cendoi	30 orang	peningkatan income dan gizi masyarakat	30 orang						
								pelatihan budidaya Toga dan pembuatan jamu herbal	30 orang	meningkatkan ketrampilan budidaya toga dan pembuatan jamu herbal	30 orang						
								Penyuluhan kelembagaan dan pengelolaan kelompok kesenian	40 orang	meningkatnya profesionalitas kelompok kesenian	40 orang						
								penyuluhan kelompok pemuda tingkat kampung	150 orang	terbentuknya kelompok pemuda sebagai kader karang taruna yang mumpuni di setiap kampung	150 orang						
								Festival Literasi dan aksi BERLIAN (Bersama lindungi anak) (Sosialisasi perlindungan terhadap anak, pelatihan pembentukan karakter bagi anak, permainan bersama anak)	500 orang	meningkatnya budi pekerti, kreativitas dan minat anak dalam berkegiatan secara positif	500 orang						
								Penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat dan kesehatan jiwa	50 orang	meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	50 orang						
								pelatihan administrasi SIP Posyandu	50 orang	meningkatnya pengetahuan dan kinerja kader posyandu	50 orang						
								Pelatihan budidaya tanaman pertanian dan toga serta pembuatan kompos	60 orang	meningkatnya pengetahuan budidaya tanaman pertanian dan toga serta pembuatan kompos	60 orang						
								Musyawarah kelurahan dan Sosialisasi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	80 orang	terlaksananya musyawarah kelurahan dan sosialisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	80 orang						
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan		Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Bausasran		Fasilitasi rapat RT, RW, Kampung, LPMK, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan	7 lembaga	Koordinasi kelembagaan	7 lembaga	560.419.859	577.232.454	Lurah Bausasran	APBD		
								Persiapan lomba	1 kali	koordinasi menghadapi lomba	1 kali						
								Pemilihan RT dan RW	61 lembaga	Terpilihnya pengurus RT / RW	61 lembaga						

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Rapat Koordinasi PIKK	1 Kelurahan	Tersedianya data informasi Kegiatan PKK	1 Kelurahan					
								Penyuluhan Kader GSI	25 orang	Terlaksananya penyuluhan kader GSI	25 orang					
								Koordinasi lembaga kemasyarakatan lainnya	8 lembaga	Terselenggaranya koordinasi lembaga kemasyarakatan	8 lembaga					
								pengisian buku raport keluarga	5 kampung	terlaksananya pengisian buku raport keluarga	5 kampung					
								Musyawarah TKPK	40 orang	terselenggaranya musyawarah TKPK	40 orang					
								Fasilitasi instruktur JBM	1 kelurahan	Terfasilitasinya instruktur JBM	1 kelurahan					
								rapat koordinasi KESI	20 orang	terlaksananya rapat koordinasi KESI	20 orang					
								pembinaan RW Siaga Kesehatan Jiwa	12 RW	terlaksananya pembinaan RW siaga	12 RW					
								Pembinaan mental spiritual lansia	30 orang	membangkitkan dan menumbuhkan kesadaran mental spiritual	30 orang					
								Fasilitasi kegiatan Pos bindu	5 posbindu	terlaksananya kegiatan posbindu	5 posbindu					
								Pembinaan PSM	40 orang	terlaksananya pertemuan rutin	40 orang					
								Gelar taman bacaan masyarakat	1 kali	peningkatan pengetahuan tentang buku dan literasi	1 kali					
								Rapat koordinasi yandu lansia dan balita	12 RW	terpantaunya tingkat pertumbuhan balita dan kesehatan lansia	12 RW					
								pembinaan kader jumantik	49 orang	terfasilitasnya pembinaan kesehatan lingkungan	49 orang					
								pembinaan kader kampung panca tertib	40 orang	terfasilitasnya kegiatan panca tertib dan terciptanya ketertiban warga	40 orang					
								Penyuluhan peringatan hari pekerti	50 orang	terlaksananya kegiatan hari jadi	50 orang					
								Pembinaan KTB dalam penanggulangan bencana	50 orang	terlaksananya pemantapan dan pengurangan resiko bencana	50 orang					
								penyuluhan hukum tentang UU I TE	25 orang	terlaksananya penyuluhan hukum	25 orang					
								Pelatihan membuat layang - layang kampung tegal lempuyangan	20 orang	menumbuhkan kreativitas seni	20 orang					
								Pelatihan bergodo kampung tegal lempuyangan	40 orang	terpeliharanya jiwa seni	40 orang					
								pelatihan tanaman obat keluarga (jamu) kampung tegal lempuyangan	20 orang	tersedianya toga dan keindahan wilayah	20 orang					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pelatihan hidroponik aquaponik dengan kolam di kampung lempuyangan	20 orang	meningkatkan pengetahuan di bidang ternak lele dengan metode aquaponik	20 orang						
								Pelatihan lanjutan budidaya lele	20 orang	terlaksananya pendampingan kepada kelompok budidaya lele	20 orang						
								Pelatihan gejog lesung di kampung lempuyangan	30 orang	terperliharnya seni tradisional gejog lesung di kampung lempuyangan	30 orang						
								Pelatihan pertanian perkotaan kampung macanan	20 orang	meningkatkan kegiatan bercocok tanam	20 orang						
								pelatihan membuat kue kering dan basah kampung macanan	20 orang	meningkatkan ketrampilan ibu-ibu	20 orang						
								pelatihan daur ulang sampah plastik kampung macanan	20 orang	mengurangi sampah dan menambah kreativitas dalam pemanfaatan sampah plastik	20 orang						
								penyuluhan tanaman herbal sekolah jamu kampung macanan	30 orang	menambah pengetahuan akan tanaman sekitar bermanfaat sebagai jamu	30 orang						
								pelatihan sibori model baru kampung ronodigdayan	25 orang	meningkatkan pengetahuan dan menambah income	25 orang						
								Penyuluhan manajemen kelompok pemakai air di kampung Bausasaran	35 orang	menambah pengetahuan dalam mengelola air untuk kebutuhan bersama	35 orang						
								Fasilitasi dan koordinasi pembentukan KRA di kampung ronodigdayan dan kampung Bausasaran	2 kampung	terbentuknya kelompok KRA di RW 08	2 kampung						
								sosialisasi kelembagaan dan pariwisata berbasis masyarakat	35 orang	menambah pengetahuan pengurus dalam mengelola pariwisata	35 orang						
								Workshop manajemen dan tata kelola kampung wisata kampung sayur Kel. Bausasaran	35 orang	terbentuknya tim pariwisata berbasis kampung yang handal	35 orang						
								Focus Group Discussion kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pariwisata kampung Bausasaran	30 orang	terlaksananya FGD menambah pengetahuan dan pengelolaan pariwisata di wilayah	30 orang						
								Pembuatan paket wisata kampung sayur Kel. Bausasaran	1 paket	tersebarinya informasi kampung sayur berbasis wisata	1 paket						
								Pelatihan budidaya tanaman hias kampung Bausasaran	25 orang	menambah dan meningkatkan pengetahuan di bidang budidaya tanaman hias	25 orang						

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								pelatihan lanskap sayur kampung baasaran	25 orang	menambah pengetahuan dibidang seni dekorasi dgn media tanaman hidup	25 orang					
								Pelatihan tari klasik kampung baasaran	20 orang	menumbuhkan minat seni tari untuk anak - anak	20 orang					
								Pelatihan seni angklung	20 orang	meningkatkan ketrampilan memainkan seni angklung	20 orang					
								Fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	Jasa Tenaga teknis	1 orang					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Suryatmajan			Fasilitasi lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, RT, RW, Kampung, LPMK)	6 lembaga	Fasilitasi Kelembagaan	6 lembaga	669,155,779	689,230,452		Lurah Suryatmajan	APBD
								Fasilitasi persiapan lomba	25 kali	Koordinasi menghadapi lomba	25 kali					
								Pemilihan RT/RW Kel. Suryatmajan	57 lembaga	Terpilihnya pengurus RT / RW Kel. Suryatmajan masa bakti 2021 - 2024	57 lembaga					
								Sosialisasi Pemberdayaan Lansia Produktif	25 orang	Pemberdayaan lansia	25 orang					
								Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Kelurahan Siaga, Dasa Wisma, Posyandu, lansia, PKK Kelurahan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)	6 lembaga	Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	6 lembaga					
								Pendampingan anak putus sekolah	4 kali	Terfasilitasinya KRA	4 kali					
								Pengawalan Raport Keluarga	299 KK	Fasilitasi kegiatan raport keluarga	299 KK					
								Festival Kuliner Kampung Jambu Suryatmajan	1 kali	Fasilitasi kegiatan masyarakat	1 kali					
								Gebyar Usaha Mikro Kecil Menengah	12 kelompok	Fasilitasi kegiatan masyarakat	12 kelompok					
								Pelatihan teknik pembelajaran bagi pendidik PAUD	30 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi pendidik PAUD	30 orang					
								Sosialisasi tentang Peningkatan Ekonomi Keluarga bagi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga - PKK	30 orang	Terfasilitasinya kegiatan PKK	30 orang					
								Sosialisasi pentingnya media sosial untuk bisnis online	30 orang	Terfasilitasinya kegiatan masyarakat	30 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sosialisasi pentingnya mengolah manajemen rumah tangga	30 orang	Meningkatnya pengetahuan manajemen keluarga	30 orang					
								Pelatihan pembuatan aneka kue basah	30 orang	Meningkatnya ketrampilan memasak	30 orang					
								Sosialisasi dampak bermain gadget	30 orang	Edukasi dampak bermain gadget	30 orang					
								Pelatihan barista / peracik kopi	20 orang	meningkatkan ketrampilan meracik kopi agar memiliki nilai jual dan daya saing	20 orang					
								Sosialisasi penanggulangan bencana bagi pengurus Kampung Tangguh Bencana	30 orang	meningkatkan kesiapsiagaan KTB	30 orang					
								Penyuluhan bahaya narkoba	30 orang	meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba	30 orang					
								Penyuluhan kekerasan Dalam Rumah Tangga	30 orang	meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga	30 orang					
								Pelatihan Akupresure	20 orang	meningkatkan keahlian masyarakat	20 orang					
								Gelar seni karang taruna	1 kali	meningkatkan dan menggali potensi yang ada	1 kali					
								Pembentukan jogo wargo	6 kampung	peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	6 kampung					
								Sosialisasi forum kemitraan Polisi Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	3 kali	Fasilitasi forum kemitraan polisi masyarakat	3 kali					
								Ruwahan Apeman	1 kali	Pelestarian tradisi apeman sebagai pendukung wisata budaya	1 kali					
								Gelar potensi pedestrian code gumreget	1 kali	Untuk mengekspose dan menggali potensi yang ada	1 kali					
								Fasilitasi kegiatan masyarakat (les tambahan pelajaran)	14 RW	Pendampingan pada jam belajar masyarakat	14 RW					
								Fasilitasi Jangkauan pelopor ketertiban kampung panca tertib (koordinasi dan monitoring evaluasi)	2 kampung	Fasilitasi masyarakat	2 kampung					
								Fasilitator pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	50				63,302,100	65,201,163		Mantri Pamong Praja		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									39,312,100	40,491,463	Baru			
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Danurejan			pengisian tabung akpar	53 tabung	tersedianya tabung akpar di wilayah kemantren Danurejan	53 tabung	39,312,100	40,491,463	Jawatan Keamanan	APBD	
									Pelatihan baris berbaris untuk perlindungan masyarakat	60 orang	Meningkatnya ketrampilan baris berbaris untuk LINMAS	60 orang					
									Koordinasi linmas kecamatan	30 orang	Tersedianya fasilitasi Koordinasi Linmas	30 orang					
									pengamanan hari raya (jogobaran)	10 hari	Meningkatnya keamanan saat hari raya	10 hari					
									Pengamanan wilayah sambang kampung , vandalisme operasi ketertiban	100 orang	Meningkatnya keamanan wilayah	100 orang					
										12 kali	Terlaksananya tertib wilayah	12 kali					
									Pelatihan penanganan patah tulang dan penanggulangan kebakaran bagi Kampung tangguh bencana	60 orang	Meningkatnya pengetahuan penanganan patah tulang dan penanggulangan kebakaran	60 orang					
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				-					23,990,000	24,709,700	Baru			
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Danurejan			Sosialisasi Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan daerah Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota	60 orang	Peningkatan penertiban masyarakat	60 orang	23,990,000	24,709,700	Jawatan Keamanan	APBD	
									Koordinasi Forkopimca	90 orang	Terjalinnnya koordinasi dengan Forkopimca	90 orang					
Total												9,019,879,054	9,290,475,420				

Tabel 5.19 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						4,453,278,220	4,595,091,746	Mantri Anom	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,300,000	9,577,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,060,000	2,121,000	Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,020,000	3,110,000	Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD	
								Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen							
								Pengelolaan Website OPD	12 bulan							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Dokumen Evaluasi kebijakan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,820,000	1,874,000	Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD	
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,155,121,816	3,249,767,000	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Gaji dan Tunjangan ASN	20 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,099,742,756	3,192,735,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,400,000	2,472,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	46,449,060	47,842,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Bahan Tanggapan Pemeriksa	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	624,000	642,000		Sub bag Keu Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,250,000	2,317,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,248,000	1,285,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	608,000	620,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,288,856,404	1,335,747,746	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Materai	720 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,105,000	3,198,150		Sub bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	113,400,000	116,802,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening air	12 bulan							
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Pembayaran Pajak Kendaraan Dlnas Roda 2	11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,200,000	4,326,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak Kendaraan Dlnas Roda 3	1 unit							
								Pembayaran Pajak Kendaraan Dlnas Roda 4	1 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Jasa Orang Perseorangan / NABAN	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	41,849,448	43,104,000		Sub.bag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	155,468,000	167,857,040		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Retribusi Kebersihan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Alat Tulis Kantor	46 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	29,272,096	30,150,259		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Penyediaan Barang Cetak	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	22,112,000	22,775,360		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	70.000 lembar							
								Penjilidan	40 buku							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,812,075	4,956,437		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Bahan komputer	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	242,980,785	250,863,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rrumah tangga/kerja	10 jenis							
								Bahan Kebersihan	14 jenis							
								Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik (Running Teks)	1 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Almari/Etalase Piala	1 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Televisi	1 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Rak Buku Perpustakaan	1 buah							
								Belanja Modal Pengadaan UPS	9 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1/2 biro	1 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Computer (PC)	2 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Printer	3 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Modem	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi	2 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar	10 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Lipat	30 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar	3 buah							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding	4 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Vertical Blind (Gorden)	32 meter							
								Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital	1 buah							
								Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	2 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	2 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Sound system	2 set							
								Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	3 buah							
								Belanja Modal Pengadaan CCTV	4 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Roller Blind Outdoor	13 meter							
								Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	2 buah							
								Belanja Modal Pengadaan Peralatan Permainan Dalam Ruangan	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Peralatan Permainan Luar Ruangan	1 unit							
								Belanja modal pengadaan tangga lipat	1 buah							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng gen			Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,540,000	5,706,200		Sub Bag Umum dan kepegawaian	APBD
								Sewa Meja Kursi	240 unit							
								Sewa Tenda	10 unit							
								Sewa Sound System	1 unit							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng gen			Makan Minum Rapat	355 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	127,857,000	131,692,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng gen			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Gedongtengen, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman Administrasi PBB	4 unit 1 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	221,250,000	227,887,000		Sub Bagian umum dan kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng gen			Kendaraan Dinas Roda 2	11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	58,163,000	59,907,890		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Kendaraan Dinas Roda 3	1 unit							
								Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng gen			Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	242,847,000	250,132,410		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa Keamanan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng gen			Komputer	25 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	16,000,000	16,390,000		Sub.Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Laptop	11 unit							
								AC	15 unit							
								Printer	29 unit							
								Perlengkapan kantor/kerja	9 jenis							
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,5					437,656,760	449,398,524		Mantri Pamong Praja	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										102,703,500	105,733,105	Baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongteng Kota Yogyakarta			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	174 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	174 lembaga	102,703,500	105,733,105		Jawatan Praja	APBD
								Pengukuhan RT dan RW se-Kecamatan Gedongtengen	174 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT dan RW se-Kecamatan Gedongtengen	174 lembaga					
								Desinfo RT,RW .Pengurus kampung dan LPMK se-Kecamatan Gedongtengen	195 orang	kapasitas RT/RW/LPMK/Pengurus Kampung dalam administrasi pemerintahan meningkat	195 orang					
								Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan	2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali					
								Monev penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan Kelurahan	1 kali					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyusunan Profil Kelurahan	2 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan Gedongtengen	2 dokumen					
								Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen					
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										109,728,560	113,020,000	Baru		
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			GT Award	1 kali	Pemberdayaan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan	1 kali	109,728,560	113,020,000	Jawatan Kemakmuran	APBD	
								Gedongtengen Expo	1 kali	Tereksposnya produk masyarakat Kecamatan Gedongtengen	1 kali					
								Pelatihan Pertanian Perkotaan bagi Disabilitas	20 orang	Peningkatan keberdayaan masyarakat disabilitas	20 orang					
								Evaluasi pembangunan fisik dan CSR	1 dokumen	Terselenggaranya evaluasi pembangunan fisik dan CSR di wilayah	1 dokumen					
								Penyusunan Buku Informasi Pembangunan	2 dokumen	Tersusunnya Buku Informasi Pembangunan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										225,224,700	230,645,419	Baru		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			Desiminasi Informasi Pelayanan Prima	215 orang	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	215 orang	10,994,420	11,018,734	Jawatan Umum	APBD	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Operasional PATEN	12 Bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Gedongtengen	12 Bulan	32,790,780	33,774,000	Jawatan Umum	APBD	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			Workshop Pendampingan Penyandang Disabilitas	55 orang	Pemberdayaan penyandang disabilitas meningkat	55 orang	181,439,500	185,852,685	Jawatan Sosial	APBD	
								Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rapat Rutin PKK dan Lomba KKG PKK)	12 bulan	Kapasitas kader PKK meningkat	12 bulan					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan karawitan seniman muda	35 orang	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	35 orang					
								Pawai Budaya	1 kali	Seni budaya yang terbina dengan baik dan meningkatkan daya tarik wisata Yogyakarta	1 kali					
								Parade Kesenian	1 kali	Seni budaya yang terbina dengan baik dan meningkatkan daya tarik wisata Yogyakarta	1 kali					
								Workshop Pendampingan Lansia PKH	55 orang	Partisipasi lansia di masyarakat meningkat	55 orang					
								Festival Anak Berbakat	1 kali	Melatih percaya diri dan kemandirian anak usia dini	1 kali					
								Evaluasi Pemberdayaan	1 dokumen	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah	1 dokumen					
								Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Kecamatan Gedongtengen	583 KK Miskin	Koordinasi dalam forum TKPK se-Kecamatan Gedongtengen dapat berjalan dengan baik	583 KK Miskin					
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 705.184.000,-					2,287,612,368	2,356,242,000			Lurah Pringgokusuman
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,287,612,368	2,356,242,000	Baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen			Pemeliharaan SAH di Kampung : Sosromenduran, Sosrodipuran, Pajeksan di Kel.Sosromenduran	389 M2	Kualitas SAH Meningkatkan kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal, mendukung landscape kampung	389 M2	504,668,300	519,811,000			Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kel. Sosromenduran
								Pembuatan Landscape kampung Sosrowijayan Wetan Kel Sosromenduran	1 kampung		1 kampung					
								Peningkatan dan pemeliharaan jalan kampung : Sitisewu, Sosrodipuran, Sosromenduran, Pajeksan, Jogonegaran di Kelurahan Sosromenduran	726 m2	Kualitas jalan meningkat	726 m2					
								Jasa konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Kel Sosromenduran	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan dapat berjalan lancar	2 dokumen					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum kel Sosromenduran	14 RW	kualitas PJU meningkat	14 RW					
								Sarana Prasarana Perilaku Hidup Bersih dan Sehat : Tempat Cuci Tangan se-Kelurahan Sosromenduran	70 buah	Kualitas Hidup Bersih dan Sehat dapat terjaga	70 buah					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Pringgokusuman			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, di Kampung Jagran , Kampung Kemetiran Lor , Kel Pringgokusuman	463 m2	kualitas jalan meningkat	463 m2	533,184,640	549,180,000		Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kel Pringgokusuman	APBD
								Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) di Kampung Sutodirjan, Kampung Gandekan, Kampung Jagran, Kampung Kemetiran Kidul Kel Pringgokusuman	141 m2	kualitas SAH meningkat	240 m2					
								Pembuatan SPAH di kampung Pringgokusuman, Kampung Kemetiran Lor, Kampung Kemetiran Kidul Kel.Pringgokusuman	14 buah	kualitas SAH meningkat	350 m2					
								Renovasi Fasum/MCK Komunal di Kampung Sutodirjan Kel Pringgokusuman	2 unit	kualitas MCK meningkat	2 unit					
								Perbaikan Fasum / Handrailing di Kampung Jagran, Kampung Sutodirjan Kel Pringgokusuman	6 Buah	kualitas Fasum/ Handrailing tercukupi	6 Buah					
								Perbaikan Balai RW 03 Kampung Jagran Kel Pringgokusuman	1 unit	Balai Rw 3 semakin baik	1 unit					
								Jasa konsultasi Perencana dan Pengawasan Pembangunan Kel Pringgokusuman	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan dapat berjalan dengan lancar	2 dokumen					
								Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum Kel Pringgokusuman	22 RW	kualitas PJU meningkat	22 RW					
								Belanja Modal Susur Sungai dan Outbond (Rompi, Pelampung, Ban, Helm) Kel.Pringgokusuman	1 paket	Mendukung bantaran sungai winongo sebagai lokasi wisata untk mengembangkan perekonomian masyarakat	1 paket					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen			Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman dan Pengisian Raport Keluarga	343 KK miskin	Koordinasi dalam forum TKPK dapat berjalan dengan baik	343 KK miskin	709,529,860	730,815,000		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel Pringgokusuman	APBD
								Pelatihan Lorong sayur Lanjutan Kel Pringgokusuman	44 orang	Pemanfaatan Lahan pekarangan dan peningkatan ekonomi	44 orang					
								Fasilitasi Lomba Kel Pringgokusuman	4 kali	Memfasilitasi kegiatan dalam rangka persiapan Lomba	4 kali					
								Bimtek Pembuatan Program Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana) Kel Pringgokusuman	40 orang	Mewujudkan pengembangan kelurahan layak anak	40 orang					
								Rapat Koordinasi Kampung Tangguh Bencana (KTB) Kel Pringgokusuman	1 lembaga	Memfasilitasi Rakor Pengurus KTB dalam hal berkoordinasi	1 lembaga					
								Sarasehan peningkatan ketaqwaan dan keimanan Kel Pringgokusuman	100 orang	Meningkatkan keimanan lembaga sosial masyarakat se-Kelurahan pringgokusuman	100 orang					
								Rapat Koordinasi Jaga Warga Kampung Kel Pringgokusuman	7 kampung	Memfasilitasi pengurus jaga warga dalam hal berkoordinasi	7 kampung					
								Kenduri Jenang Suran Kel Pringgokusuman	1 kali	Melestarikan seni budaya kampung Pringgokusuman	1 kali					
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,Kampung,LPM K, PKK) Kel Pringgokusuman	5 Lembaga	Memfasilitasi Kelancaran lembaga kemasyarakatan kelurahan	5 Lembaga					
								Pemilihan RT dan RW Kel Pringgokusuman	106 lembaga	Terpilihnya kepengurusan RT dan RW yang baru	106 lembaga					
								Bimtek Pra Musrenbang Kelurahan Kel Pringgokusuman	120 orang	Peningkatan kapasitas dan pengembangan tim perumus musrenbang di kelurahan	120 orang					
								FGD Pendampingan konseling Keluarga Kel Pringgokusuman	40 orang	Terselenggaranya pembinaan penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	40 orang					
								Operasional Posyandu Kel Pringgokusuman	21 posyandu	Fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah	21 posyandu					
								Rakor Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lansia Kel Pringgokusuman	30 orang	Mewujudkan partisipasi lansia dalam keluarga dan masyarakat	30 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								FGD Kelembagaan Karang Taruna Kel Pringgokusuman	50 orang	Memberikan pengetahuan kepada remaja untuk lebih produktif dan berkontribusi dalam pembangunan wilayah	50 orang					
								Pelatihan Satlinmas Kel Pringgokusuman	100 orang	Meningkatkan peran serta anggota linmas dalam proses pembangunan di wilayahnya	100 orang					
								Pelatihan Batik Ecoprint Kel Pringgokusuman	33 orang	Meningkatkan ketrampilan dan produktivitas masyarakat	33 orang					
								Pelatihan kuliner/pembuatan snack Kel Pringgokusuman	33 orang	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	33 orang					
								Pelatihan Pembuatan Souvenir Kel Pringgokusuman	33 orang	Meningkatkan ketrampilan dan produktivitas masyarakat	33 orang					
								Pelatihan Pemandu Wisata Sungai Winongo Kel Pringgokusuman	33 orang	Meningkatkan ketrampilan dan produktivitas masyarakat	33 orang					
								FGD Kader Jiwa Kel Pringgokusuman	50 orang	Meningkatkan kepedulian dan keramahan terhadap ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)	50 orang					
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah/tenaga teknis Kel Pringgokusuman	12 bulan	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	2 orang					
								Rakor Kelurahan Siaga (KESI) Kel Pringgokusuman	30 orang	Memfasilitasi kegiatan KESI sehingga dapat berjalan lancar	30 orang					
								Operasional PKK Kelurahan, RW, dan RT Kel Pringgokusuman	107 lembaga	Memfasilitasi kegiatan PKK Kelurahan, RW, dan RT, sehingga dapat berjalan lancar	107 lembaga					
								Belanja Modal Pengadaan Thermo Gun	2 buah	untuk mendukung pengecekan suhu pada pelayanan kelurahan	2 buah					
								Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD se-Kelurahan Pringgokusuman	22 PAUD	Memberikan peningkatan sarana prasarana APE PAUD	22 kelompok PAUD					
								Belanja Modal Pengadaan Timbangan Injak Digital	21 Posyandu	Memberikan peningkatan sarana prasarana posyandu	21 Posyandu					
								Belanja Modal Pengadaan Timbangan Bayi	21 Posyandu	Memberikan peningkatan sarana prasarana posyandu	21 Posyandu					
								Belanja Modal Pengadaan Tensi Digital lansia	22 Posyandu lansia	Memberikan peningkatan sarana prasarana untuk posyandu lansia	22 Posyandu lansia					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen			Fasilitasi TKPK : Penyusunan Raport Keluarga di Kelurahan Sosromenduran	150 KK miskin	Pengisian Raport Keluarga dapat berjalan dengan baik	150 KK miskin	540,229,568	556,436,000		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel Sosromenduran	APBD
								Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan, RW dan RT di Kel Sosromenduran	69 lembaga	Meningkatkan kemampuan administrasi pengurus PKK	20 orang					
								Workshop Jam Belajar Masyarakat (JBM) Kel Sosromenduran	45 orang	meningkatkan mutu pendidikan anak di luar sekolah	45 orang					
								Bimtek Musrenbang Kel Sosromenduran	70 orang	Meningkatkan kapasitas kelembagaan di masyarakat dlm pencapaian perumusan hasil musrenbangkel	70 orang					
								Sarasehan Pemberdayaan kelompok Difabel Kel Sosromenduran	30 orang	kapasitas Difabel meningkat	30 orang					
								Workshop lansia Kel Sosromenduran	83 orang	Peningkatan kesehatan bagi lansia serta pemberian motivasi lansia untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan	83 orang					
								Pembinaan RT Siaga dan Pelatihan Kader Kesehatan Kel Sosromenduran	70 orang	Peningkatan kemampuan pengurus Kesi dan terbentuknya RT Siaga	70 orang					
								Oparisional Posyandu Kel Sosromenduran	14 RW	Peningkatan pengelolaan posyandu kepada masyarakat	14 RW					
								Festival Ruwahan Kel Sosromenduran	1 kali	Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan tradisi lokal di Kelurahan Sosromenduran	1 kali					
								Gelar Potensi Sosromenduran	1 kali	Meningkatkan potensi dan bakat unggulan warga masyarakat	1 kali					
								Pelatihan Satlinmas Kel Sosromenduran	70 orang	Meningkatkan kapasitas anggota Linmas	70 orang					
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,Kampung,LPM K, PKK) Kel Sosromenduran	5 lembaga	Memfasilitasi kegiatan pada lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	5 lembaga					
								Pelatihan Akupresur bayi/balita Kel Sosromenduran	40 orang	Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam teknik akupresur bayi/balita	40 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan Budidaya Sayur dan Mural Kel Sosromenduran	7 kampung	Memberikan ketrampilan masyarakat untuk budidaya tanaman sayur dalam mewujudkan landscape kampung	7 kampung					
								Pelatihan Kuliner Kel Sosromenduran	52 orang	Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam mengolah makanan non hewani	52 orang					
								Sosialisasi Pertanian Pola Perkotaan Kel Sosromenduran	50 orang	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam penataan pertanian pola perkotaan	50 orang					
								Pemilihan RT RW Kel Sosromenduran	68 lembaga	Terpilihnya pengurus RT dan RW yang baru	68 lembaga					
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah/tenaga teknis Kel Sosromenduran	12 bulan	Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	2 orang					
								Sarasehan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	50 orang	Mewujudkan pengembangan kelurahan layak anak	50 orang					
								Workshop kepemimpinan karang taruna	65 orang	Menumbuhkan jiwa kepemimpinan kaum muda	65 orang					
								Workshop pemulasaran jenasah	48 orang	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam merawat jenasah dengan baik dan benar	48 orang					
								Penyuluhan Budi Pekerti bagi DBKS	70 orang	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budi pekerti	70 orang					
								Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD se-Kelurahan Sosromenduran	14 PAUD	Meningkatkan sarana prasarana APE PAUD se-Kelurahan Sosromenduran	14 PAUD					
								Belanja Modal Pengadaan Timbangan Injak Digital Posyandu se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu	Meningkatkan sarana prasarana Posyandu se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu					
								Belanja Modal Pengadaan Timbangan Bayi Posyandu se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu	Meningkatkan sarana prasarana Posyandu se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu					
								Belanja Modal Pengadaan Tensi Digital Posyandu se Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu	Meningkatkan sarana prasarana Posyandu Lansia se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	275 buah					123,643,060	127,516,000		Mantri Pamong Praja	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										89,443,060	92,126,000	Baru		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta			Rakor Elemen Masyarakat	8 kali	Terciptanya situasi yang kondusif di masyarakat	8 kali	89,443,060	92,126,000		Jawatan Keamanan	APBD
								Frekuensi Pengaman Masyarakat	37 kali	Keamanan wilayah meningkat	37 kali					
								Penyuluhan Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)	60 orang	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana meningkat	60 orang					
								Pengadaan Peralatan Operasional : Getel,Cat,Kuas,Tiner	2 kali	Tersedianya peralatan yang mendukung operasi penertiban di lapangan	2 kali					
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	39 buah	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	39 buah					
								Koordinasi Forum Kewadpadaan Dini Masyarakat (FKDM)	4 kali	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewadpadaan dini masyarakat	4 kali					
								Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	4 kali	Terjalannya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan kepada masyarakat	4 kali					
								Penyuluhan Jaga Warga	4 kali	Meningkatnya kapasitas jaga warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	4 kali					
								Operasional ketentraman dan ketertiban	12 bulan	Ketertiban wilayah meningkat	12 bulan					
								Rakor Panca Tertib	4 kali	Ketertiban masyarakat meningkat	4 kali					
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										34,200,000	35,390,000	Baru		
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			Monitoring dan Penyuluhan Pondokan(kos-kosan)	60 orang	Meningkatkan ketertiban pondokan/kos-kosan(tertib administrasi maupun tertib sosial)	4 kali	34,200,000	35,390,000		Jawatan Keamanan	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyuluhan PKL	60 orang	kesadaran PKL akan ketertiban wilayah meningkat	60 orang					
								Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompimca)	12 bulan	Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat berjalan lancar	12 bulan					
Total												7,302,190,408	7,528,248,270			

Tabel 5.20 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%				4,365,175,396	4,860,495,000		SEKRETARIS KECAMATAN (MANTRI ANOM)		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									6,600,000	9,300,000	Baru			
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Dokumen Renja Tahun 2022 dan perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
		X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,000,000	3,300,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
									Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
									Dokumen RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021	4 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
		X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
									Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	600,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
		X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	600,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2,934,988,396	3,231,500,000	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Gaji dan Tunjangan ASN	24 ASN			2,890,814,396	3,179,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen			1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Akuntansi dan Laporan Keuangan	12 Dokumen	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	100%	30,054,000	35,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2,320,000	3,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	5,800,000	7,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,423,587,000	1,619,695,000	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Surat Masuk	2.000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,150,000	4,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
								Surat Keluar	1.000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pengiriman Dokumen	300 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Materai	754 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualama n			Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	104,400,000	110,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Pembayaran rekening Air	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualama n			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,150,000	5,665,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	11 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualama n			Naban	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	124,082,000	137,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualama n			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	181,044,000	195,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Retribusi Kebersihan	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualama n			Alat tulis kantor	49 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,279,000	27,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualama n			Barang Cetak	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22,483,000	31,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penggandaan surat-surat/dokumen	85.000 Lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,366,000	10,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Bahan Komputer/Printer	16 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	247,052,000	330,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
								Belanja Modal Almari Kayu Arsip	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal Komputer/PC	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal UPS	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal Printer Ink Tank	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal LCD Proyektor dan Layar LCD Proyektor	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal Meja Kerja	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal Meja Rapat Lipat	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal Kursi Rapat Susun	100 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal Vacuum Cleaner	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
								Belanja Modal Sound System Ruang Rapat	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Belanja Modal CCTV	2 set	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,148,000	33,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Bahan Bacaan Perpustakaan Kantor	10 Buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	3,300,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Rapat Koordinasi yang Terselenggara	87 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39,360,000	45,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			PBB Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA	1 tahun	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	105,000,000	110,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Pemeliharaan Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Pemeliharaan Kantor Kemantren Pakualaman, Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	210,000,000	232,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda Empat	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	63,020,000	70,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda Tiga	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda Dua	11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Jasa Keamanan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	232,253,000	250,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Jasa Pemeliharaan Taman	4 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kantor	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,300,000	26,730,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
								Pemeliharaan Meubelair Kantor	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Pemeliharaan AC	10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Pemeliharaan Printer	10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Pemeliharaan Komputer	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	81,59					457,243,000	501,900,000		CAMAT (MANTRI PAMONG PRAJA) PAKUALAMAN		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										91,028,000	100,000,000	Baru			
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 Kelurahan	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	100%	91,028,000	100,000,000		SEKSI PEMERINTAHAN (JAWATAN PRAJA)	APBD	
								Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman	102 Lembaga	Terselenggaranya Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	100%						
								Pengukuhan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman	102 Lembaga	Terselenggaranya Pengukuhan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman	100%						
								Musrenbang Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan Kemantren Pakualaman	100%						

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Musrenbang Kelurahan Purwokinanti	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan Kelurahan Purwokinanti	100%					
								Musrenbang Kelurahan Gunungketur	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan Kelurahan Gunungketur	100%					
								Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	50 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%					
								Dokumen Monografi Kelurahan	3 Dokumen	Tersusun Dokumen Monografi Kelurahan dan Kemantren	100%					
								Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman	100%					
								Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	2 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Masyarakat	100%					
								Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kali	Terselenggaranya Upacara HUT RI	100%					
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										136,576,000	150,000,000	Baru		
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman	100%	136,576,000	150,000,000		SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (JAWATAN KEMAKMURAN)	APBD
								Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya ajang Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kemantren Pakualaman	100%					
								Workshop Manajemen Usaha Kemantren Pakualaman	40 orang	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kemantren Pakualaman di Bidang Manajemen Usaha	100%					
								Koordinasi UPPKS Kemantren Pakualaman	4 Kali	Penguatan Kelembagaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Tingkat Kemantren	100%					
								Koordinasi Pertemuan KUBE Kemantren Pakualaman	4 Kali	Penguatan Kelembagaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Tingkat Kemantren	100%					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Koordinasi Paguyuban PKL Kemantren Pakualaman	4 Kali	Penguatan Kelembagaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Tingkat Kemantren	100%					
								Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	2 Dokumen	Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Non Fisik di tingkat Kemantren Pakualaman	100%					
								Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Paguyuban PKL Kemantren Pakualaman	100%					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										229,639,000	251,900,000	Baru		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan yang terkait Perizinan	100%	8,660,000	9,900,000		SEKSI PELAYANAN UMUM (JAWATAN UMUM)	APBD
								Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	55 orang	Terselenggaranya Diseminasi Informasi Pelayanan Prima Kemantren	100%					
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan yang terkait Non Perizinan	100%	40,179,000	44,000,000		SEKSI PELAYANAN UMUM (JAWATAN UMUM)	APBD
								Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN)	12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN)	100%					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Pakualaman			Evaluasi Pemberdayaan kelurahan	2 Dokumen	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan kelurahan	100%	180,800,000	198,000,000		SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (JAWATAN SOSIAL)	APBD
								Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman	19 Kali	Terselenggaranya Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman	100%					
								Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan di Kemantren Pakualaman	15 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Lainnya di Kemantren Pakualaman	100%					
								Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kemantren Pakualaman	4 Kali	Terselenggaranya Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kemantren Pakualaman	100%					
								Takbir Keliling TKA, TPA, TQA Rayon Kemantren Pakualaman	2 Kali	Terselenggaranya Takbir Keliling TKA, TPA, TQA Rayon Kemantren Pakualaman	100%					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Lomba TKA, TPA, TPA, TQA Rayon Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Lomba TKA, TPA, TPA, TQA Rayon Kemantren Pakualaman	100%					
								Lomba MTQ Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Lomba MTQ Kemantren Pakualaman	100%					
								GEBYAR PAUD Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya GEBYAR PAUD Kemantren Pakualaman	100%					
								Workshop Pola Asuh Anak Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya Workshop Pola Asuh Anak Kemantren Pakualaman	100%					
								Workshop Pembuatan Rencana Pembelajaran PAUD Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya Workshop Pembuatan Rencana Pembelajaran PAUD Kemantren Pakualaman	100%					
								Workshop Public Speaking Kader PKK Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya Workshop Public Speaking Kader PKK Kemantren Pakualaman	100%					
								FGD Penyakit Tidak Menular dan Pencegahannya di Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya FGD Penyakit Tidak Menular dan Pencegahannya di Kemantren Pakualaman	100%					
								GEBYAR Lansia Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya GEBYAR Lansia Kemantren Pakualaman	100%					
								Penyuluhan Keluarga Sakinah	40 orang	Terselenggaranya Penyuluhan Keluarga Sakinah	100%					
								Pembinaan Olah Raga Kemantren Pakualaman	12 Kali	Terselenggaranya Pembinaan Olah Raga Kemantren Pakualaman	100%					
								Workshop Kantin Sehat Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya Workshop Kantin Sehat Kemantren Pakualaman	100%					
								Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman	100%					
								Pagelaran Mocopat Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Pagelaran Mocopat Kemantren Pakualaman	100%					
								Pentas Seni Kewilayahan Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Pentas Seni Kewilayahan Kemantren Pakualaman	100%					
								Pawai Budaya Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Pawai Budaya Kemantren Pakualaman	100%					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman	100 orang	Terselenggaranya Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman	100%					
								Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman	8 Kali	Terselenggaranya Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman	100%					
								FGD Penanganan Masalah Sosial Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya FGD Penanganan Masalah Sosial Kemantren Pakualaman	100%					
								HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Pakualaman	100%					
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp. 632.535.000,-					1,866,687,000	2,650,000,000			CAMAT (MANTRI PAMONG PRAJA) PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,866,687,000	2,650,000,000	Baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Purwokinanti			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Jagalan Beji	355 m2	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Jagalan Beji	100%	370,029,000	485,000,000			LURAH PURWOKINANTI
								Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Purwokinanti, dan Kampung Jagalan Beji	4 Titik	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Purwokinanti, dan Kampung Jagalan Beji	100%					
								Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Purwokinanti, Kampung Kapatihan, dan Kampung Jagalan Beji	6 Unit	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Purwokinanti, Kampung Kapatihan, dan Kampung Jagalan Beji	100%					
								Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Kapatihan dan Kampung Purwokinanti	45 titik	Terselenggaranya Pemeliharaan PJU di Wilayah Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Kapatihan dan Kampung Purwokinanti	100%					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	3 Dokumen	Terselenggaranya Jasa perencanaan fisik di Wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%					
								Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	3 Dokumen	Terselenggaranya Jasa pengawasan fisik di Wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Gunungketur			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di Wilayah Kampung Margoyasan dan Kampung Gunungketur	190 m	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di Wilayah Kampung Margoyasan dan Kampung Gunungketur	100%	339,974,000	460,000,000		LURAH GUNUNGKETUR	APBD
								Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Gunungketur	10 titik	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Gunungketur	100%					
								Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Gunungketur	5 Unit	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Gunungketur	100%					
								Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Gunungketur, Kampung Margoyasan dan Kampung Kauman	50 titik	Terselenggaranya Pemeliharaan PJJU di Wilayah Kampung Gunungketur, Kampung Margoyasan dan Kampung Kauman	100%					
								Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur	3 Dokumen	Terselenggaranya Jasa perencanaan fisik di Wilayah Kelurahan Gunungketur	100%					
								Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur	3 Dokumen	Terselenggaranya Jasa pengawasan fisik di Wilayah Kelurahan Gunungketur	100%					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Purwokinanti			Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Purwokinanti	57 Lembaga	Terselenggaranya Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Purwokinanti	100%	589,141,000	885,000,000		LURAH PURWOKINANTI	APBD
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	120 Lembaga	Terselenggarannya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	100%					
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti	14 Lembaga	Terselenggarannya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti	100%					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti	8 kali	Terselenggarannya Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti	100%					
								Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Purwokinanti	8 kali	Terselenggarannya Forum CSR Tingkat Kelurahan Purwokinanti	100%					
								Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti	3 KTB	Terselenggarannya Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti	100%					
								Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti	19 Kali	Terselenggarannya Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti	100%					
								Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti	7 Kali	Terselenggarannya Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti	100%					
								Penyusunan Raport Keluarga Kelurahan Purwokinanti	10 RW	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	100%					
								JBM Kelurahan Purwokinanti	10 RW	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%					
								Kampung Ramah Anak Kelurahan Purwokinanti	4 KRA	Terciptanya Kampung Ramah Anak Kelurahan Purwokinanti	100%					
								Evaluasi Pelaksanaan JBM Kampung Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%					
								Sambang kampung Kelurahan Purwokinanti	20 Kali	Ketertiban wilayah meningkat	100%					
								Koordinasi Pertemuan P2WKSS Kelurahan Purwokinanti	2 Kali	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100%					
								Koordinasi Pertemuan UP2K PKK Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Kapasitas Kader PKK meningkat	100%					
								Koordinasi Pertemuan Kelompok Apsari Kelurahan Purwokinanti	2 Kali	Kapasitas Kader PKK meningkat	100%					
								Koordinasi Katana Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningkat	100%					
								Koordinasi Kelompok Bank Sampah Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	100%					
								Koordinasi Pertemuan Mitra Keluarga Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100%					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kelurahan Purwokinanti	110 orang	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%					
								Workshop Kepemimpinan dan Kepemudaan Kelurahan Purwokinanti	30 Orang	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%					
								Workshop WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) Kelurahan Purwokinanti	30 Orang	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	100%					
								Pelatihan Budidaya Lele Cendol (Lanjutan) Kelurahan Purwokinanti	25 orang	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	100%					
								Pelatihan Produksi Sabun Kelurahan Purwokinanti	30 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%					
								Pelatihan Batik Cap Kelurahan Purwokinanti	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%					
								Pelatihan Kuliner Ayam Goreng Kelurahan Purwokinanti	25 orang	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	100%					
								Pelatihan Tari Klasik dan modern Kelurahan Purwokinanti	20 orang	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%					
								Pelatihan Handycraft Kelurahan Purwokinanti	25 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%					
								Gebyar PKK dan Aksi Donor Darah Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%					
								Festival Apeman Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Gunungketur			Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Gunungketur	45 Lembaga	Terselenggaranya Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Gunungketur	100%	567,543,000	820,000,000	LURAH GUNUNGKETUR	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	120 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	100%					
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur	24 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	100%					
								Fasilitasi KESI Kelurahan Gunungketur	8 kali	Terselenggaranya Fasilitasi KESI Kelurahan	100%					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Gunungketur	6 Kali	Terselenggaranya Forum CSR Tingkat Kelurahan Gunungketur	100%					
								Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Gunungketur	2 KTB	Terselenggaranya Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Gunungketur	100%					
								Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	23 Kali	Terselenggaranya Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	100%					
								Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Gunungketur	4 Kali	Terselenggaranya Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Gunungketur	100%					
								Penyusunan Raport Keluarga Kelurahan Gunungketur	9 RW	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	100%					
								JBM Kelurahan Gunungketur	9 RW	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%					
								Kampung Ramah Anak Kelurahan Gunungketur	6 KRA	Terciptanya Kampung Ramah Anak Kelurahan Gunungketur	100%					
								Koordinasi Forum Bank Sampah Kelurahan Gunungketur	4 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	100%					
								Aksi Jumat bersih Kelurahan Gunungketur	6 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	100%					
								Workshop Relawan Peduli Lansia FOPPERHAM Kelurahan Gunungketur	30 orang	Kesehatan lansia meningkat	100%					
								Workshop Kreatifitas Peserta Didik PAUD Kelurahan Gunungketur	30 orang	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	100%					
								Workshop FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kelurahan Gunungketur	120 orang	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%					
								Workshop Karang Taruna Kelurahan Gunungketur	30 orang	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%					
								Pelatihan Pos Bindu Kelurahan Gunungketur	30 orang	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	100%					
								Pelatihan Olahraga Jemparingan Kelurahan Gunungketur	20 orang	Perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	100%					
								Pelatihan Kaos Kreasi Ikat Celup Kelurahan Gunungketur	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pelatihan Budidaya Lele Cendol tingkat Dasar Kelurahan Gunungketur	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%						
								Pelatihan Lorong Sayur Dasar Kelurahan Gunungketur	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%						
								Pelatihan Tata Rias Kelurahan Gunungketur	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%						
								GUNUNGKETUR FESTIVAL Kelurahan Gunungketur	1 Kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%						
								Lomba Melukis dengan Media Totebag Kelurahan Gunungketur	1 Kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100%						
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Jumlah Pelanggaran Perda	96				112,180,000	123,000,000		CAMAT (MANTRI PAMONG PRAJA) PAKUALAMAN		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										83,000,000	91,000,000	Baru			
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Pakualaman			Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana	4 kali	Terciptanya Kampung yang Mandiri untuk beradaptasi terhadap potensi dan ancaman bencana	100%	83,000,000	91,000,000		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (JAWATAN KEAMANAN)	APBD	
								Frekuensi pengamanan masyarakat	38 Kali	Terselenggaranya Pengamanan Masyarakat	100%						
								Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	10 Kali	Terciptanya Ketertiban Masyarakat	100%						
								Pengadaan Peralatan Operasional	5 Jenis	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	100%						
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25 Tabung	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	100%						
								Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	2 kali	Terciptanya Kewaspadaan Dini Masyarakat	100%						
								Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	2 kali	Terciptanya Pembauran Kebangsaan	100%						
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										29,180,000	32,000,000	Baru			

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Pakualaman			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (FORKOPIIMKA)	4 Kali	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah	100%	29,180,000	32,000,000		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (JAWATAN KEAMANAN)	APBD
								Sosialisasi Penegakan PERDA	80 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Penegakan PERDA	100%					
								Koordinasi Linmas	3 Kali	Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dengan Linmas	100%					
Total												6,801,285,396	8,135,395,000			

Tabel 5.21 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,548,888,572	4,784,368,431		Sekretaris Kecamatan (Mantri Anom) Ngampilan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										10,400,000	10,712,000	lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		1,000,000	1,030,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		7,000,000	7,210,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
								Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya tahun 2021	2 dokumen							
								Dokumen RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021	4 dokumen							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,500,000	1,545,000		Ka. Sub bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		500,000	515,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		400,000	412,000			APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,187,412,216	3,378,726,449	lanjutan		

	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,177,012,216	3,367,632,949		Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan			450,000	413,500		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Bahan pelaksanaan verifikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,200,000	1,236,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dokumen	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	100%	900,000	927,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		400,000	412,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,500,000	2,575,000		Ka. sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		3,000,000	3,500,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,030,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun		950,000	1,000,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum									1,351,076,356	1,394,929,982	baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Surat Masuk	1.200 surat	Tersedianya pelayanan Surat Menyurat		5,595,000	5,800,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	900 surat							
							Pengiriman Dokumen	20 dokumen							
							Materai	1500 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	68,280,000	70,500,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan	-	100%					
							Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	-	100%					
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2,	12 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,800,000	5,100,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

								Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	1 unit								
								Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 unit								
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan				operasional administrasi perkantoran	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		70,940,856	73,069,082			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan				Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning service Kecamatan, kelurahan dan rumah dinas	12 bulan	kualitas kebersihan lingkungan meningkat	100%	129,000,000	132,870,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Retribusi Kebersihan	12 bulan								
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan				Alat tulis kantor	119 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	37,255,000	39,850,000				APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan				Barang cetakan	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,000,000	41,200,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan /Fotocopy	98524 lembar	-	100%						
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,975,500	9,050,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan				Bahan komputer/printer	7 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	120,000,000	125,000,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bahan peralatan dan perlengkapan kantor	38 jenis	-	100%						
								belanja Modal Laptop	1 unit	Kelurahan Ngampilan:	100%						
								belanja Modal LCD	2 unit								
								Belanja Modal TV untuk Ruang Pelayanan	1 unit								
								Belanja Modal Kipas tembok (Wall Fan)	4 unit								
								Belanja Modal Meja Knap	1 unit								
								Belanja Modal Kipas Angin Besar	2 unit	Kelurahan Notoprajan							
								Belanja Modal Kursi kerja putar	18 buah								
								Belanja Modal Meja komputer	1 buah								
								Belanja Modal printer	2 unit	Kecamatan Ngampilan							
								Belanja Modal Komputer	2 unit								
								Belanja Modal Microphone	2								
								Belanja Modal Meja kursi tamu	1 set								
								Belanja Modal meja kerja	2 buah								
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan				peralatan rumah tangga	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,750,000	13,200,500			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Makanan dan minuman rapat	4950 os	Rapat koordinasi yang terselenggara	100%	95,800,000	98,880,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Makanan dan minuman harian umum	12 bulan	-	100%					
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Ngampilan dan Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan dan Rumah Dinas Camat	4 gedung	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	370,000,000	381,100,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								pajak PBB	1 tahun							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Kendaraan roda 4	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,930,000	69,967,900		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Kendaraan roda 2	12 unit							
								Kendaraan roda 3	1 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Ngampilan dan Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan dan Rumah Dinas Camat	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		291,000,000	299,730,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa keamanan kecamatan dan kelurahan	12 bulan							
								Pemeliharaan taman	12 jenis							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Komputer	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		28,750,000	29,612,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan AC Split	7 unit							
								Pemeliharaan Mesin Ketik	3 unit							
								Pemeliharaan Printer	5 unit							
								Pemeliharaan laptop	3 unit							
								Pemeliharaan pompa air	4 unit							
								Pemeliharaan Mebelair	6 unit							
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	84,15					834,842,372	859,887,644		Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										121,435,116	125,078,169	baru		

	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kemantren Ngampilan			Sosialisasi Pemilihan RT/RW	141 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	141 lembaga	121,435,116	125,078,169	Kasi Pemerintahan (Jawatan Praja)	APBD
								Penguatan Pelantikan RT dan RW	141 lembaga	Terlaksananya penguatan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan	141 lembaga				
								Koordinasi RT dan RW	141 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	141 orang				
								Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung	30 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	30 orang				
								Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	30 ORANG						
								Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	1 dokumen		100%				
								Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen		100%				
								Penyusunan Monografi	1 dokumen						
								Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan	1 dokumen		100%				
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										128,045,000	131,886,350	raan pembangunan dan ekonomi masyarakat	
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan			Gelar potensi UMKM	1 kali	Terselenggaranya koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	128,045,000	131,886,350	Kasi Perekonomian dan Pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	APBD
								Workshop manajemen UMKM	1 kali		100%				
								Pendampingan kegiatan pembangunan dan perekonomian	1 kali		100%				
								Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di kelurahan	1 dokumen		100%				
								Informasi program dan kegiatan pembangunan	1 dokumen		100%				
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen		100%				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										585,362,256	602,923,125	lanjutan	

7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Ngampilan		Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perijinan dengan baik	100%	42,077,184	43,339,500	Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD
						Sosialisasi Pelayanan Perizinan	30 orang	Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perijinan dengan baik	100%				
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan masyarakat yang memuaskan	100%	23,159,000	23,853,770	Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD
						PATEN	12 Bulan		100%				
						Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	50 orang		100%				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Ngampilan		Pelaksanaan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Ngampilan (Lomba administrasi PKK dll)	200 orang	Meningkatkan pemahaman TP PKK dalam melaksanakan program PKK	100%	520,126,072	535,729,855	Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan Sosial)	APBD
						Gebyar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kemantren Ngampilan - Pentas Seni dan Lomba lomba	300 orang	Membangun kreativitas anak PAUD	100%				
						Pembinaan HATINYA (Halaman Asri Teratur Indah Nyaman) PKK Kemantren Ngampilan	100 orang	Pengelolaan pekarangan/halaman rumah agar lebih bermanfaat dan indah	100%				
						Workshop Teknik Ber cerita Kemantren Ngampilan	35 orang	Meningkatkan kemampuan bercerita	100%				
						Workshop Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) Kemantren Ngampilan	85 orang	Memantapkan dalam berorganisasi	100%				
						Rakordasi Forum Kelompok BK (Bimbingan Konseling) Kemantren Ngampilan	40 orang	Tertib administrasi	100%				
						Workshop PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) Kemantren Ngampilan	60 orang	Memberikan pengertian pada remaja tentang kesadaran perencanaan berkeluarga	100%				
						Lomba permainan tradisional (teklek tando, lari bathok, lari karung & egrang bambu) Kemantren Ngampilan	4 lomba	Melestarikan warisan budaya daerah	100%				
						Rakor pengurus Perwosi (Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia) Kemantren Ngampilan	20 orang	Menumbuhkan kecintaan olah raga	100%				
						Senam Massal Kemantren Ngampilan	100 orang	Meningkatkan kesehatan masyarakat	100%				

								Workshop tentang management kelompok-kelompok UMKM Kemantren Ngampilan	40 orang	Meningkatkan SDM nya	100%								
								Pelatihan Kethoprak Remaja Kemantren Ngampilan	35 orang	Lebih mengenalkan seni kethoprak pada remaja	100%								
								Pelatihan Tari Kemantren Ngampilan	50 orang	Mengenal seni & budaya wilayah	100%								
								Pelatihan Langen Carita Kemantren Ngampilan	50 orang	Mengenal seni & budaya wilayah	100%								
								Gelar Pentas Budaya Kecamatan Kemantren Ngampilan	200 orang	Mengenal seni & budaya wilayah	100%								
								Pawai Budaya Kemantren Ngampilan	200 orang	Mengenal seni & budaya wilayah	100%								
								Sosialisasi Kesehatan Lansia Tangguh Kemantren Ngampilan	60 orang	Meningkatkan semangat hidup sehat pada Lansia	100%								
								Workshop penguatan kelembagaan Lansia	75 orang	Meningkatkan kualitas hidup bagi Lansia									
								HKSN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional) Kemantren Ngampilan	240 orang	Memotivasi dan Menjaga Semangat Pendamping PMKS dalam Keluarga	100%								
								Workshop Pemberdayaan Sosial Kemantren Ngampilan	50 orang	Memotivasi Anggota Kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) & BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk bisa terentaskan dari kemiskinan dan mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah keluar dari Peserta PKH	100%								
								Rapat Koordinasi Lembaga Sosial Tingkat Kemantren Ngampilan	30 orang	Membangun Kesepahaman dan koordinasi sehingga terjalin kerjasama yang baik, efektif dan secara bersama2	100%								
								Rapat Koordinasi (BPNT) Bantuan Pangan Non Tunai Kemantren Ngampilan	30 orang	Membangun kesepahaman, mendeteksi dini persoalan-persoalan yang muncul dalam program BPNT	100%								
								Rapat Koordinasi Pekerja Sosial Masyarakat Kemantren Ngampilan	20 orang	Membangun Kesepahaman dan koordinasi sehingga terjalin kerjasama yang baik, efektif dan secara bersama2	100%								

									MTQ Kemantren Ngampilan	14 Lomba	Memelihara, mengembangkan, dan/atau meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan/atau penyebarluasan al-Quran dan al-Hadits	100%						
									Festival Takbir Keliling Kemantren Ngampilan	150 orang	Membangkitkan semangat dalam mengerjakan kebaikan.	100%						
									HUT Kemerdekaan RI Kemantren Ngampilan	1 kegiatan	Membangkitkan semangat dalam memberdayakan masyarakat	100%						
									Operasional pengelolaan pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	Memperlancar pengelolaan pemberdayaan masyarakat	100%						
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Angka swadaya Murni	Rp.665.460.000,-									Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															n dan pemeliharaan sarana dan prasarana	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Notoprajan				Pemeliharaan Konblok Kp.serangan dan Notoprajan	2 Lokasi	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Notoprajan	100%	486.000.000	500.580.000			Lurah Notoprajan	APBD
									SAH kampung Serangan	6 Lokasi	Kelancaran aliran air hujan	100%						
									Pengadaan penyangga bak air	1 Lokasi	Penunjang Fasilitas	100%						
									Pengadaan meja untuk Yandu	1 Lokasi	Membantu pelayanan yandu	100%						
									Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum (Rehab Balai RW Serangan, Notoprajan dan Suronatan Pemel Ruang publik RW 3 Serangan dan RW 6 Notoprajan)	5 Lokasi	Kualitas Fasilitas Umum Meningkat	100%						
									Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas	2 Dokumen	Pendukung pembangunan fisik secara optimal	100%						
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Ngampilan				Pemeliharaan Konblok Kelurahan Ngampilan (kampung Ngampilan, Kampung Pathuk, Kampung Ngadwinatan dan Kampung Purwodiningratan)	1782 m	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ngampilan	100%	431.940.000	444.898.200			Lurah Ngampilan	APBD

								SPAH di Kampung Pathuk	18 Titik	Kesehatan dan kenyamanan warga masyarakat	100%					
								Pembuatan lorong taman dan Tamanisasi kampung Purwodinngkatan	4 RT	Lingkungan Asri	100%					
								Pembuatan Jaringan Air bersih Kampung Pathuk	1 lokasi	Kesehatan dan kenyamanan warga masyarakat	100%					
								Besi Penutup Selokan	2 lokasi	Akses aman dan nyaman	100%					
								Pembuatan Garasi Roda 3 Damkar Kampung Ngadiwinatan	12,5 m	Penyimpanan Inventaris	100%					
								Pembuatan Pojok Baca (Taman Bacaan)	1 Lokasi	Meningkatkan Minat baca masyarakat	100%					
								Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan	2 Dokumen	Pendukung pembangunan Fisik Secara Optimal	100%					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat		Kelurahan Notoprajan		Festival Bregodo wirogending Kelurahan Notoprajan	500 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Notoprajan	100%	250,984,000	258,513,520	Lurah Notoprajan	APBD	
								Pelatihan memasak kue/kudapan Kelurahan Notoprajan	20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
								Pelatihan membuat batik ekoprint Kelurahan Notoprajan	20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
								Pelatihan Budidaya Bunga Anggrek Kelurahan Notoprajan	20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
								Pelatihan MC Bahasa Jawa Kelurahan Notoprajan	25 orang	Peningkatan Keterampilan	100%					
								Pelatihan Sibori Pemula Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penambahan income warga	100%					
								Pelatihan shibori lanjutan Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penambahan income warga	100%					
								Pelatihan manajemen pemasaran shibori Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penambahan income warga	100%					
								Pelatihan Urban Farming Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penghijauan yang produktif	100%					
								Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian dan Pemasaran Kelurahan Notoprajan	20 orang	Bertambahnya nilai produk hasil pertanian	100%					
								Pelatihan kerajinan daur ulang Kelurahan Notoprajan	15 orang	Berkurangnya sampah	100%					
								Sosialisasi pembuatan kompos dan bahan percontohan Kelurahan Notoprajan	15 orang	Pengurangan sampah organik	100%					
								Pembinaan Posbindu Kelurahan Notoprajan	50 orang	Menambah Pengetahuan Kader-Kader di Posyandu	100%					
								Senam Bersama Kelurahan Notoprajan	8 kali	Meningkatkan Kesehatan	100%					

								Workshop Administrasi Dasa Wisma Kelurahan Notoprajan	172 orang	Menambah pengetahuan dalam Admin Dawis	100%						
								Gebyar Ceria Anak PAUD Kelurahan Notoprajan	100 orang	Meningkatkan Kreatifitas & Kebersamaan	100%						
								Pelatihan lukis kaos Kelurahan Notoprajan	20 orang	Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga	100%						
								Sosialisasi Pola Asuh Anak Melenial Kelurahan Notoprajan	50 orang	Orang tua mendapatkan pengetahuan pola asuh	100%						
								Gebyar Potensi UMKM Kelurahan Notoprajan	40 orang	Meningkatkan Pemasaran Produk	100%						
								Sosialisasi etika busana Kelurahan Notoprajan	40 orang	Memberikan pengetahuan tentang berbusana yang baik	100%						
								Pelatihan manajemen UMKM Kelurahan Notoprajan	40 orang	Peningkatan kualitas pelaku UMKM	100%						
								Penyusunan Rapot Kemiskinan Kelurahan Notoprajan	200 orang	Mengurangi angka kemiskinan	100%						
								Pembinaan keluarga penyandang disabilitas Kelurahan Notoprajan	40 orang	Memberikan kiat dan cara mengasuh serta mendidik penyandang difabel	100%						
								Lomba, Gelar seni, pojok dongeng Kelurahan Notoprajan	40 orang	Mengembangkan budaya literasi pada anak anak	100%						
								Pelatihan Pengembangan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Kelurahan Notoprajan	20 orang	Pemahaman warga	100%						
								Intervensi Keluarga Rentan Afirmasi Kelurahan Notoprajan	1 Kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan	100%						
								Operasional RT,RW,Kampung dan LPMK (Rakor,Fotocopy, Paket Data) Kelurahan Notoprajan	4 lembaga	Mendukung kelancaran hubungan dan pelayanan masyarakat	100%						
								Lomba lomba Kelurahan Notoprajan	1 Kegiatan	Tersedianya anggaran untuk lomba	100%						
								PJU Kelurahan Notoprajan	50 Titik	Tersedianya penerangan jalan	100%						
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Ngampilan			Pelatihan Asmantoga dan Akupresure Kelurahan Ngampilan	40 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ngampilan	100%	381,030,500	392,461,415			Lurah Ngampilan	APBD
								Pelatihan membuat Jajanan Pasar Berbahan MOCAV Kelurahan Ngampilan	30 orang	Meningkatkan Kemampuan dan perekonomian warga	100%						
								Pelatihan Desain Motif Batik Kelurahan Ngampilan	20 orang	Dapat mengurangi pengeluaran beli kain bermotif	100%						
								Pelatihan EO (Event Organizer) Kelurahan Ngampilan	20 orang	Melatih Pemuda / Remaja membuat dan menyelenggarakan acara	100%						

									Pelatihan Pembuatan Shibori Berbahan Kaos Untuk Karang Taruna Kelurahan Ngampilan	30 orang	Agar Para Pemuda bisa mengerti cara Pembuatannya shg bisa menjadi peluang usaha mandiri	100%					
									Pelatihan Membuat Souvenir Khas Jogja (kain, akrilik/resin, kulit dan rajut) Kelurahan Ngampilan	30 orang	Memberikan Ketrampilan Pada Generasi Muda Dalam Persaingan Dunia Kerja	100%					
									Pelatihan Geguritan Anak Kelurahan Ngampilan	10 Kali	Mengembangkan potensi wilayah & ngurungi kebudayaan	100%					
									Pelatihan Mitigasi dan Kebencanaan KTB 4 kampung Kelurahan Ngampilan	60 orang	Memberi wawasan tentang Bencana	100%					
									Pelatihan Kesamaptaaan Linmas Kelurahan Ngampilan	30 orang	Menambah Kedisiplinan Anggota	100%					
									Pelatihan Membuat Media / Pupuk Kelurahan Ngampilan	70 orang	Menambah Ketrampilan dan menjadikan usaha	100%					
									Pelatihan SPS PAUD Kelurahan Ngampilan	40 orang	Menambah wawasan Pendidik	100%					
									Pelatihan Budidaya Tanaman Anggur Ninel Merah Import Kelurahan Ngampilan	20 orang	Menambah wawasan tentang Budidaya Tanaman	100%					
									Pelatihan Digital Marketing Kelurahan Ngampilan	40 orang	Pengetahuan tentang Pemasaran	100%					
									DESINFO (Desiminasi dan Informasi) 8000 HPK (Pokja IV) Kelurahan Ngampilan	60 orang	Ibu dan PUS lebih siap dan paham	100%					
									DESINFO (Desiminasi dan Informasi) Tentang HIV AIDS Kelurahan Ngampilan	50 orang	Pengeetahuan Masyarakat tentang HIV AIDS	100%					
									DESINFO (Desiminasi dan Informasi) WKSBM Kelurahan Ngampilan	40 orang	Memotivasi Warga Masyarakat	100%					
									Advokasi Lansia , Disabilitas dan Anak Terlantar Kelurahan Ngampilan	100 orang	Semangat hidup dan berguna bagi masyarakat	100%					
									DESINFO (Desiminasi dan Informasi) Kenakalan Remaja (Klith, Napza dan Sex bebas) Kelurahan Ngampilan	50 orang	Pencegahan Dini Remaja dalam Pergaulan	100%					
									Gelar Minggu Pungkasan (Car Free Day) Kelurahan Ngampilan	10 Kegiatan	Melestarikan budaya	100%					
									Gebyar Lansia dan Desinfo (Desiminasi dan Informasi) Kesehatan Lansia Kelurahan Ngampilan	100 orang	Ajang silaturahmi dan menjaga kesehatan	100%					
									Bintek SIP dan Reg. PUS (Pasagan Usia Subur), Administrasi IVA dan Papsmer Kelurahan Ngampilan	85 orang	Laporan lebih tertib, paham dan bisa melaksanakan	100%					

									Bintek Lembaga Kelurahan Siaga Kelurahan Ngampilan	40 orang	Koordinasi lebih optimal sehingga kesehatan lebih terwujud	100%						
									Bintek Administrasi Bank Sampah dan Pengolahan Daur Ulang Sampah Kelurahan Ngampilan	50 orang	Memberikan Pengetahuan Management Dan Budi Daya Pengolahan Bank Sampah	100%						
									Pembentukan Dawis Siaga Kelurahan Ngampilan	150 orang	Dawis berperan aktif dalam kesehatan	100%						
									Pembentukan dan Pembinaan BKR (Bina Keluarga Remaja) RW Kelurahan Ngampilan	30 orang	Semua RW terbentuk BKR dan remaja terwakili	100%						
									Pembentukan Kader Jumentik (Juru Pemantau Jentik) Kelurahan Ngampilan	70 orang	Warga masyarakat	100%						
									Pembinaan Management Pokja (Kelompok Kerja) I Kelurahan Ngampilan	50 orang	Relawan membantu tugas/kegiatan secara suka rela, mandiri dan tangguh	100%						
									BOP Administrasi Kelurahan	30 orang	Administrasi KESI	100%						
									BOP Administrasi TP PKK Kelurahan Ngampilan	12 Bulan	Administrasi TP PKK	100%						
									Monev Lansia Kelurahan Ngampilan	30 orang	Sambang Yandu 13 RW	100%						
									Monev JBM (Jam Belajar Masyarakat) Kelurahan Ngampilan	13 RW	Aktifnya JBM di Masyarakat	100%						
									Rakor Lembaga Kelurahan Ngampilan	1 Kegiatan	Tersampaikannya Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	100%						
									Rakor RT RW LPMK dan OPD Kelurahan Ngampilan	75 orang	Tersampaikannya Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	100%						
									Rakor Tim Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan	1 Kegiatan	Kegiatan Dapat terlaksana dengan baik	100%						
									Pengisian Rapot Keluarga Kelurahan Ngampilan	258 orang	Pendataan Warga Miskin	100%						
									Subsidi PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Warga miskin yg memiliki Bayi dan Balita Kelurahan Ngampilan	100 orang	Menambah Gizi Bayi dan Balita	100%						
									Pembinaan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) RW Kelurahan Ngampilan	50 orang	Meningkatkan Drajad Kesehatan Masyarakat	100%						
									Jam Belajar Masyarakat (JBM) Kelurahan Ngampilan	4 Kampung	Lingkungan Yang Tertib Jam Belajar Masyarakat	100%						
									Karnaval Potensi Budaya Kelurahan Ngampilan	1 Kegiatan	Potensi Budaya Wilayah terekspos	100%						
									Pembinaan Olah Raga Kelurahan Ngampilan	50 orang	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	100%						

								Operasional RT,RW,Kampung dan LPMK Kelurahan Ngampilan	4 Kegiatan	Mendukung kelancaran pelayanan dan hubungan masyarakat	100%						
								Lomba - lomba Kelurahan Ngampilan	1 Kegiatan	Tersedianya anggaran untuk Lomba	100%						
								PJU Kelurahan Ngampilan	50 Titik	Tersedianya penerangan jalan	100%						
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Jumlah pelanggaran Perda										Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															raan Pemerintahan Ketenteraman dan
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Ngampilan			Sosialisasi Pondokan (Sapa anak kos)	60 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	100%	201,281,272	207,319,710				Kasi ketenteraman dan ketertiban (Jawatan Keamanan)
								Sosialisasi Pembinaan & Penataan PKL terkait Penegakan perda	60 orang	Meningkatkan ketertiban dan kesadaran PKL	100%						
								Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB-KTB)	60 orang	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengurangan Resiko Bencana	100%						
								Sosialisasi Mitigasi Bencana (Tagana/PMI)	60 orang	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi Resiko Bencana	100%						
								Peningkatan Kapasitas Anggota PMI	60 orang	Meningkatkan kemampuan anggota PMI Kecamatan	100%						
								Peningkatan Kapasitas RW/Kampung/LPMK	60 orang	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah	100%						
								Pelatihan Pengamanan Wilayah	60 orang	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah	100%						
								Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	60 orang	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%						
								Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	60 orang	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%						
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	26 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	100%						
								Operasional Ketenteraman dan ketertiban	12 bulan	Pengelolaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100%						
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										92,000,000	94,760,000	lanjutan			

	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Ngampilan				Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkopimka)	12 bulan	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan	92,000,000	94,760,000		Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD
									Operasional Pengamanan masyarakat	12 bulan	Terciptanya kondisi ketentraman dan Ketertiban masyarakat	100%					
									Operasi Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Terciptanya kondisi ketentraman dan Ketertiban masyarakat	100%					
Total													7,226,966,716	7,542,788,920			

Tabel 5.22 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Presentase peningkatan capaian laporan kinerja dan keuangan	100%						5,133,927,606	5,287,945,435		Mantri Anom	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											12,540,000	12,916,200	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	2 Dokumen	2,880,000	2,966,400		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											12,540,000	12,916,200	Baru		
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	EBSITE dikelola dengan baik	12 bln	4,040,000	4,161,200		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD	
								Penyusunan Anggaran OPD	3 Dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	2,420,000	2,492,600		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD	
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terjalinnnya koordinasi penyusunan Program kegiatan PD	100%	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi PD	2 dokumen	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											3,928,423,036	4,046,275,727	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Gaji dan Tunjangan ASN	27 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,912,621,036	4,029,999,667		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD	

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	4,800,000	4,944,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tersedianya dokumen akuntansi Perangkat Daerah	12 dokumen	848,000	873,440		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	100%	848,000	873,440		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4,450,000	4,583,500		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	14 dokumen	1,648,000	1,697,440		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah	1 dokumen	800,000	824,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersedianya laporan akhir tahun	1 dokumen	808,000	832,240		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,192,964,570	1,228,753,508	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Surat Masuk	1.350 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,760,000	4,902,800		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	550 surat							
								Pengiriman Dokumen	250 dokumen							
								Materai	900 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik	12 bulan	67,000,000	69,010,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening Air	12 bulan							
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	15 unit	3,580,000	3,687,400		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit							
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	64,505,376	66,440,537		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Tenaga Teknis	1 orang							
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	172,891,536	178,078,283		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Retribusi Kebersihan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Alat Tulis Kantor	64 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39,092,200	40,264,966		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Penggandaan surat-surat/dokumen	28.850 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,950,000	30,848,500		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Cetak dus arsip	100 lembar							
								Cetak map	400 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,548,650	5,715,110		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Belanja Modal TV	3 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	80,205,945	82,612,123		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bahan komputer	12 bulan							
								Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	12 bulan							
								Bahan Kebersihan	12 bulan							
								Belanja Modal Notebook	1 unit							
								Belanja Modal Komputer	2 unit							
								Belanja Modal Pengeras Suara	4 unit							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Makan Minum Rapat	156 kali	Terfasilitasinya koordinasi internal Kecamatan Wirobrajan	100%	72,140,000	74,304,200		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Gedung Kantor PBB	5 unit 1 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	100%	294,877,963	303,724,302		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Roda 2 Roda 4	13 unit 1 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanal	15 unit	85,342,900	87,903,187		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Roda 3	1 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pemeliharaan Taman	12 Bulan	Terpeliharanya taman	100%	263,100,000	270,993,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Komputer	24unit	Peralatan kantor yang terpelihara	12 bulan	9,970,000	10,269,100		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								AC Split	7 unit							
								Printer	15unit							
								Perengkapan kantor/kerja	6 jenis							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	82,99				100%	678,707,766	699,068,999		Mantri Pamong Praja	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										105,452,500	108,616,075	Baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Wirobrajan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	199 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	199 lembaga	105,452,500	108,616,075		Jawatan Praja	APBD
								Penguatan RT dan RW Se-Kecamatan Wirobrajan	199 lembaga	Terlaksananya penguatan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Wirobrajan	199 lembaga					
								Koordinasi RT RW	199 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	199 orang					
								Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung	40 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	40 orang					
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali					
								Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali					
								Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	1 kali					
								Penyuluhan Jaga Warga	5 kali	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	5 kali					
								Penyuluhan Jaga Warga	40 orang	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	40 orang					
								Dokumen Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	1 dok	Tersusunnya Dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan	1 dok					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Dokumen Musrenbang Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen Musrenbang Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan	3 dokumen					
								Penyusunan Profil Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan	3 dokumen	Tersusunnya DokumenProfil Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan	3 dokumen					
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										157,043,350	161,754,651	Baru		
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	40 orang	Meningkatnya perekonomian peserta PKH	40 orang	157,043,350	161,754,651		Jawatan Kemakmuran	APBD
								Ekspo Potensi UMKM Kec Wirobrajan	2 kali	Meningkatnya Potensi UMKM Kecamatan Wirobrajan	2 kali					
								Koordinasi Pengelolaan kios Forkom UMKM Kecamatan	11 Kali	Meningkatnya kegiatan Forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	11 Kali					
								Informasi Program dan Kegiatan	1 Dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Wirobrajan	1 dokumen					
								Pemeliharaan makam Pracimalaya	1 lokasi	Meningkatnya pengelolaan makam Pracimalaya Kecamatan Wirobrajan	1 lokasi					
								Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	40 orang	Meningkatnya pengelolaan bank sampah dan kampung hijau Kecamatan Wirobrajan	40 orang					
								Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec. Wirobrajan	1 dokumen	Meningkatnya partisipasi CSR Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	1 dokumen					
								Koordinasi UMKM pertanian / kelompok Tani Kecamatan Wirobrajan dan pameran potensi Pertanian	11 kali	Meningkatnya kegiatan anggota forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	11 kali					
								Pengembangan forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya usaha anggota forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	50 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pengembangan UMKM pertanian / kelompok tani	50 orang	Meningkatnya usaha anggota UMKM pertanian / kelompok tani Kecamatan Wirobrajan	50 orang					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										416,211,916	428,698,273	Baru		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Wirobrajan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 Bulan	Terpenuhinya administrasi ijin makam	12 Bulan	6,275,000	6,463,250		Jawatan Umum	APBD
								Sosialisasi pelayanan publik	80 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kecamatan	80 orang					
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Wirobrajan			Operasional Pelayanan non perijinan	12 bulan	Terpenuhinya pelayanan yang terkait kewenangan lainnya non perijinan yang dilimpahkan dengan baik	12 bulan	120,474,916	124,089,163		Jawatan Umum	APBD
								PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	12 bulan					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Wirobrajan			Koordinasi TP PKK Kecamatan	2 kali	Terjalinnnya koordinasi kelembagaan	2 kali	289,462,000	298,145,860		Jawatan Sosial	APBD
								Sosialisasi Kesehatan Jiwa	50 orang	Meningkatnya kesehatan jiwa bagi lansia	50 orang					
								Workshop Kurikulum SPS	50 orang	Tercapainya kelengkapan keadministrasian kelembaga Pokja II	50 orang					
								Penguatan Forum PAUD	50 orang	Terjalinnnya koordinasi Forum	50 orang					
								Lomba Baduta ASI dan Ibu Cerdas Kec. Wirobrajan	100 orang	Meningkatnya kesehatan Baduta	100 orang					
								Penyuluhan Etika Berbusana Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatkan beretika berbusana yang baik	50 orang					
								Sosialisasi PHBS Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya kehidupan Bersih dan Sehat	50 orang					
								Penyuluhan HATINYA PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya kelembagaan	50 orang					
								Workshop SIM PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya pengetahuan kader PKK	50 orang					
								Penyuluhan Administrasi PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatkan pengetahuan	50 orang					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyuluhan Administrasi POKJA IV PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya pengetahuan administrasi Pokja IV	50 orang					
								Pelaksanaan KKG PKK dan KB Kes Kec. Wirobrajan	200 orang	Terlaksananya Kegiatan KKG PKK KB KES	200 orang					
								Workshop Penanggulangan Penyakit HIV AIDS Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan kinerja FKKS	40 orang					
								Workshop Kelembagaan PSM Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan kinerja IPSM Kecamatan	40 orang					
								Workshop Kesehatan Lansia Kec. Wirobrajan	40 orang	Terbentuknya keluarga yang kreatif,berwawasan luas dan produktif	40 orang					
								Gebyar Difabel Kec. Wirobrajan	250 orang	Memberikan ruang apresiasi bagi anak berkebutuhan khusus	250 orang					
								Workshop Forum Kecamatan Inklusi Kec. Wirobrajan	40 orang	terjalinnnya koordinasi forum	40 orang					
								Penyuluhan Parenting Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak usia dini	40 orang					
								Workshop APE (Alat Peraga Edukasi) Kec. Wirobrajan	40 orang	Peningkatan kapasitas Pendidik	40 orang					
								Senam massal Jadul Kec. Wirobrajan	300 orang	Meningkatkan kesehatan	300 orang					
								Workshop Pengelola Keuangan KUBE Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan pengetahuan bagi KUBE	40 orang					
								Festival Anak Muslim Kec. Wirobrajan	500 orang	Terciptanya Anak Muslim	500 orang					
								Workshop Mental dan spiritual bagi pemuda dan remaja Kec. Wirobrajan	50 orang	Menambah pengetahuan	40 orang					
								Pembinaan Perekawinan untuk warga masyarakat	50 orang	Meningkatnya mental spiritual remaja	50 orang					
								Lomba Pola Asuh Anak	100 orang	Meningkatnya pemahaman warga dalam Pola Asuh Anak	100 orang					
								Pelatihan Gamelan Kec. Wirobrajan	15 orang	Tersalurkannya seni wilayah	15 orang					
								Pelatihan Seni Peran Kec. Wirobrajan	15 orang	Menambah pengetahuan	15 orang					
								Latihan Macapat Kec. Wirobrajan	20 orang	Peningkatan pelestarian mocopat	20 orang					
								FGD Kecamatan Wirobrajan Berbasis Wisata Seni Budaya	50 orang	Tercapainya kecamatan berbasis wisata	50 orang					
								Wayang Jogja Night Carnival	80 orang	Tersalurkannya kreasi wilayah	80 orang					
								Peringatan HUT Kota Kec. Wirobrajan	90 orang	Tersalurkannya potensi wilayah	90 orang					
								Fasilitasi Lomba-lomba Kec. Wirobrajan	900 orang	Tersuportnya kegiatan lomba-lomba	900 orang					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Forum kelembagaan tingkat kecamatan	20 lembaga	Tercapainya koordinasi kelembagaan	20 lembaga					
								Koordinasi TKPK	64 orang	Terjalinya koordinasi kelembagaan	64 orang					
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp. 933.300.000					2,847,259,279	2,932,677,057		Mantri Pamong Praja	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,847,259,279	2,932,677,057	Baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kel. Pakuncen			Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Tegalmulyo, Kuncen, Gampingan, Singosaren Kel. Pakuncen	12 unit	mengurangi potensi genangan air	12 unit	325,300,000	335,059,000		Lurah Pakuncen	APBD
								Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Tegalmulyo, kuncen Kel. Pakuncen	100 m	mengurangi genangan air hujan	100 m					
								Pemeliharaan Jalan Kampung Tegalmulyo Kel. Pakuncen	165,76 m2	kelancaran akses jalan	167,76 m2					
								Konsultansi Perencana dan Pengawas Kel. Pakuncen	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan	1 dokumen					
								Pembangunan Gazebo kampung Pakuncen	1 unit	tersedianya fasilitas umum	1 unit					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kel. Wirobrajan			Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	32 titik	Genangan air hujan cepat kering, tidak ada genangan air hujan di Kel. Wirobrajan	32 titik	312,140,000	321,504,200		Lurah Wirobrajan	APBD
								Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Ketanggungan dan kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	450 m	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air Kel. Wirobrajan	450 m					
								PJU Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	23 titik	Meningkatnya tingkat keamanan di wilayah Kel. Wirobrajan	23 titik					
								Cermin cembung Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	30 unit	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas Kel. Wirobrajan	30 unit					
								Pembuatan MCK Kampung Ketanggungan Kel. Wirobrajan	2 unit	Meningkatnya kesehatan warga masyarakat Kel. Wirobrajan	2 unit					
								Pengeboran sumur umum Kampung Ketanggungan Kel. Wirobrajan	2 unit	Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk warga Kel. Wirobrajan	2 unit					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Konsultan Perencana, pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik Kel. Wirobrajan	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik Kel. Wirobrajan	2 dokumen					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kel. Patangpuluhan			Pembangunan dan renovasi konblok (* Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	750 m	Memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah Kel. Patangpuluhan	750 m	300,733,000	309,754,990		Lurah Patangpuluhan	APBD
								TAmansiasi RTH Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Kebersihan dan keindahan RTH	1 unit					
								Pembuatan gril Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	1 unit	keselamatan warga	1 unit					
								Pemeliharaan pintu pengaman Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	4 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat di Kel. Patangpuluhan	4 unit					
								Pembangunan gardu pos kamping, balai RT, PAUD, MCK Kampung Patangpuluhan dan kampung sindurejan Kel. Patangpuluhan	2 unit	Menjaga keamanan lingkungan Kel. Patangpuluhan	2 unit					
								Pemeliharaan jalan inspeksi dan pagar besi tepi sungai Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Keselamatan warga Kel. Patangpuluhan	1 unit					
								Pembangunan dan pemeliharaan regol, penataan kawasan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Keamanan RTH	1 unit					
								Perbaikan kolam RTH Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Mengembalikan fungsi kolam RTH	1 unit					
								Pelebaran dan pembuatan pagar jembatan irigasi Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Memperlancar akses warga Kel. Patangpuluhan	1 unit					
								Pagar pengaman bibir sungai Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	1 lokasi	Menjaga keamanan lingkungan Kel. Patangpuluhan	1 lokasi					
								Pemeliharaan PJU Kampung Patangpuluhan dan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	39 titik	Terpeliharanya PJU Kel. Patangpuluhan	39 titik					
								Konsultan Perencana dan Pengawas Kel. Patangpuluhan	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Kel. Patangpuluhan	2 Dokumen					
								Lantainisasi balai pertemuan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat di Kel. Patangpuluhan	1 unit					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kel. Pakuncen			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel. Pakuncen	142 lembaga	Terfasilitasinya lembaga masy di Kel. Pakuncen	142 lembaga	672,055,500	692,217,165		Lurah Pakuncen	APBD
								Koordinasi pengurus kampung Kel. Pakuncen	4 Kampung	Terkoordinasinya kampung	4 Kampung					
								Pemilihan RT dan RW Kel. Pakuncen	68 lembaga	Terpilihnya ketua RT dan RW Kel. Pakuncen	68 lembaga					
								Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kel. Pakuncen	13 Posyandu	Untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, ibu balita, dan Bapak	13 Posyandu					
								Pelatihan Budidaya lele cendol	38 kelompok	Meningkatkan pendapatan keluarga	38 kelompok					
								Sarasehan implementasi JBM di RW	12 kegiatan	Meningkatnya kesadaran belajar masyarakat	12 kegiatan					
								Sambang Pos Kamling dan Kos Kel. Pakuncen	10 kegiatan	Membangkitkan warga akan sadarnya keamanan di lingkungan	10 kegiatan					
								Rapat Koordinasi PKK Kel. Pakuncen	12 kali	memfasilitasi koordinasi PKK dengan kelembagaan lainnya dan internal	12 kali					
								Gerakan Makan Buah & Sayur Kel. Pakuncen	250 orang	Memasyarakatkan konsumsi buah dan sayur dengan cara yang baik dan indah	250 orang					
								Workshop peningkatan kualitas kelembagaan & kompetensi Pendidik PAUD Kel. Pakuncen	30 orang	pengelolaan dapat memenuhi standar nasional pengelolaan PAUD	30 orang					
								Rapat Koordinasi Kelembagaan Kel. Pakuncen	13 lembaga	Terbangunnya koordinasi kelembagaan	13 lembaga					
								Fasilitator Pemberdayaan Kel. Pakuncen	2 orang	Jasa Tenaga Teknis dan Jasa Tenaga Bantuan	2 orang					
								Sosialisasi Pembangunan fisik Kel. Pakuncen	3 kali	Tersampaiannya perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Fisik Kel. Pakuncen	3 kali					
								Sarasehan kerukunan umat beragama Kel. Pakuncen	1 kali	Terbinanya kerukunan umat beragama	1 kali					
								Fasilitasi kerja bakti Gerakan segoro Amarto Kel. Pakuncen	12 kali	Kesehatan dan kebersihan di wilayah	12 kali					
								Pemilihan RT dan RW Kel. Wirobrajan	70 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kel. Wirobrajan Masa Bakti 2021 - 2024	70 lembaga					
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel. Wirobrajan	144 lembaga	Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan Kel. Wirobrajan	144 lembaga					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kel.Wirobrajan	2 orang	Jasa Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan Kel.Wirobrajan	2 orang					
								Pelatihan Membatik	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
								Gebyar PAUD Kel.Wirobrajan	250 org	Ajang aktifitas dan kreatifitas anak, mampu bersosialisasi dan berani tampil	250 orang					
								Sosialisasi kampung panca tertib FKPT sasaran anak sekolah	70 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	70 org					
								Pelatihan administrasi forum kampung panca tertib dan paker	30 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
								Pelatihan tanaman sayur dan toga	240 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	240 org					
								Pelatihan Pokja 1-4 TP PKK Wirobrajan	45 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	45 org					
								Pelatihan EcoPrint	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
								Pelatihan Sablon	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
								Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
								Gebyar Budaya	250 org	Menampilkan potensi seni dan budaya di kelurahan wirobrajan dalam rangka HUT Kota Yogyakarta	250 org					
								Gebyar Lansia	130 org	Ajang aktifitas lansia Kel.Wirobrajan	130 org					
								Penyuluhan Linmas Kel.Wirobrajan	30 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
								Penyuluhan bahaya Narkoba Kel.Wirobrajan	60 org	Agar masyarakat lebih mengetahui bahaya narkoba dan akibatnya	60 org					
								Pelatihan Membuat Pupuk	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
								Pelatihan Penyemaian bibit tanaman	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
								Pelatihan membuat media tanam	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kel. Patangpuluhan			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Patangpuluhan	61 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kel.Patangpuluhan	61 lembaga	556,084,779	572,767,322		Lurah Patangpuluhan	APBD
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel.Patangpuluhan	126 lembaga	Terfasilitasinya lembaga Kemasyarakatan Kel. Patangpuluhan	126 lembaga					
								Penyusunan Raport Keluarga Kel.Patangpuluhan	1 Kelurahan	Fasilitas Honor TKPK	1 Kelurahan					
								Penyuluhan Lansia	40 orang	Lansia Produktif	40 orang					
								Gebyar PAUD Kel.Patangpuluhan	250 org	Meningkatnya kualitas balita dan anak Kel.Patangpuluhan	250 org					
								Pelatihan pemanfaatan pekarangan lorong sayur/ kampung sayur Kel.Patangpuluhan	200 org	Pemanfaatan lahan pekarangan Kel.Patangpuluhan	200 org					
								Karnaval HUT Kota Yogyakarta Kel.Patangpuluhan	250 org	Melestarikan kebudayaan di wilayah Kel.Patangpuluhan	250 org					
								Sosialisasi KESI Kel.Patangpuluhan	40 org	Meningkatkan KESI Kel.Patangpuluhan	40 org					
								Fasilitasi lembaga/forum kemasyarakatan Kel.Patangpuluhan	750 org	Fasilitasi forum/Lembaga di wilayah Kel.Patangpuluhan	750 org					
								Jasa fasilitator pemberdayaan kel.Patangpuluhan	12 ob	Dukungan kelancaran kegiatan, pemberdayaan dan pembangunan fisik di Kel.Patangpuluhan	12 ob					
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	120 kali					75,730,000	78,001,900		Mantri Pamong Praja	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										47,750,000	49,182,500	Baru		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Wirobrajan			Frekuensi Pengamanan masyarakat	17 kali	Meningkatnya keamanan dan tertibnya di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	17 kali	47,750,000	49,182,500		Jawatan Keamanan	APBD
								Pengadaan Peralatan Operasional	2 kali	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	2 kali					
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	40 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	40 Tabung APAR					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	5 kali	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	5 kali					
								Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	5 kali	Terjalannya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	5 kali					
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										27,980,000	28,819,400	Baru		
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Wirobrajan			Koordinasi Linmas Kecamatan	2 kali	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	2 kali	27,980,000	28,819,400	Jawatan Keamanan	APBD	
								Koordinasi Pondokan	1 kali	Meningkatnya ketertiban pondokan	1 kali					
								Koordinasi PKL	3 kali	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	3 kali					
								Koordinasi optimalisasi ketertiban	33 kali	Meningkatkan ketertiban wilayah Kec. WB	33 kali					
								Koordinasi Forkompinca	11 kali	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat	11 kali					
Total												8,735,624,651	8,997,693,391			

Tabel 5.23 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,230,755,892	5,753,731,481		Mantri Pamong Praja	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15,592,000	17,151,200	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	2,400,000	2,640,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron	Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Website terkelola dengan baik	12 bulan	3,472,000	3,819,200		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
						Penyusunan Anggaran OPD Tahun 2021		4 dokumen	Tersusunnya anggaran OPD Tahun 2021	4 dokumen						
						Perjanjian Kinerja dan perubahannya		2 dokumen	Tersusunnya Perjanjian Kinerja dan perubahannya Tahun 2021	2 dokumen						
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	7,560,000	8,316,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen						
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Terselenggaranya Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	920,000	1,012,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1,240,000	1,364,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan									4,090,078,136	4,499,085,950	Baru			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron	Gaji dan Tunjangan ASN		29 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,072,073,136	4,479,280,450		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kebudayaan masyarakat meningkat	Kemantren Mantrijeron			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 dokumen	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 dokumen	3,032,000	3,335,200		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersusunnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	1,780,000	1,958,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Terdokumentasikannya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	768,000	844,800		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	6,500,000	7,150,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	2,385,000	2,623,500		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	820,000	902,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1,160,000	1,276,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,125,085,756	1,237,494,331	Baru			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Surat Masuk	1300 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,700,000	9,570,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Surat Keluar	470 surat								
							Pengiriman Dokumen	240 dokumen								
							Materai	2400 lembar								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,200,000	73,920,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Biaya Komunikasi Camat dan Lurah	12 bulan								
							Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 Unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit	4,800,000	5,280,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	2 Unit								
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,471,500	74,218,650		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Tenaga Teknis	1 orang								
							Biaya Administrasi Bank	300 transaksi								
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	192,094,000	211,303,400		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Retribusi Kebersihan	12 bulan								
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Alat Tulis Kantor	44 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	34,155,500	37,571,050		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Barang Cetak	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,990,000	42,889,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Penggandaan Surat-Surat/ Dokumen	120.000 lembar								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,172,500	7,889,750		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Bahan Komputer/ Printer	6 Jenis	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	164,950,000	181,445,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Bahan/ alat-alat/ perlengkapan kantor/ rumah tangga/ kerja	7 jenis								
							Pengadaan Peralatan Kantor	7 Jenis								
							Bahan Kebersihan	15 Jenis								
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis			10,950,000	12,045,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Makan Minum Rapat	156 kali	Terfasilitasinya koordinasi internal Kemantren	100%	56,665,000	62,331,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1 unit	Terpeliharanya Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1 unit	20,000,000	22,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningrat, Kel. Mantrijeron	4 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningrat, Kel. Mantrijeron	4 unit	164,403,716	180,844,087		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							PBB	12 bulan								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas	2 paket								
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron		Roda 2	14 unit		Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional Kemantren Mantrijeron	17 unit	70,400,000	77,440,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 3	2 unit								
							Roda 4	1 unit								
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron		Pemeliharaan Taman	12 bulan		Terpeliharanya Keasrian dan keamanan Kemantren Mantrijeron	100%	187,675,000	206,442,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Keamanan	12 bulan								
							Pemeliharaan APAR	3 unit								
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron		Pemeliharaan Komputer dan Printer	24 unit				21,280,000	23,408,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumah tanggapan/ Komunikasi/ Studio	6 Jenis								
	X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron		Pemeliharaan Mabeleur	3 Jenis		Terpeliharanya Peralatan Mebelair Kemantren Mantrijeron	3 Jenis	8,178,540	8,896,394		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		84,57				803,103,852	883,414,237		Mantri Pamong Praja	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										134,661,000	148,127,100	Baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron		Sosialisasi Kelembagaan RT/RW	3 kali		Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan ketugasannya	3 kali	134,661,000	148,127,100		Jawatan Praja	APBD
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	1 Dokumen		Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	1 Dokumen					
							Evaluasi Kelurahan	1 Dokumen		Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 Dokumen					
							Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kali		Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	1 kali					
							Penyuluhan Jaga Warga	40 orang		Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	40 orang					
							Penyusunan Dokumen Musrenbang	4 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan	4 Dokumen					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Penyusunan Profil Kecamatan	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil tingkat Kecamatan	1 Dokumen					
								Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	286 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	286 lembaga					
								Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Mantrijeron	286 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Mantrijeron	286 lembaga					
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										309,350,784	340,285,862	Baru		
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan	8 kali	Meningkatnya keaktifan dan kualitas kegiatan anggota Forkom UMKM dan Gapoktan Kecamatan Mantrijeron	8 kali	309,350,784	340,285,862		Jawatan Kemakmuran	APBD
								Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Mantrijeron	2 dokumen					
								Pemeliharaan Sarana Prasarana makam Sarilaya	1 unit	Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana makam Sarilaya Kecamatan Mantrijeron	1 unit					
								Pengelolaan administrasi makam sarilaya	12 bulan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi makam Sarilaya Kecamatan Mantrijeron	12 bulan					
								Pemeliharaan Kebersihan Makam Sarilaya	12 bulan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kebersihan makam Sarilaya Kecamatan Mantrijeron	12 bulan					
								Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik	2 lokasi	Meningkatnya kualitas Pengelolaan RTHP Kelurahan Gedongkiwo dan Kelurahan Mantrijeron	2 lokasi					
								Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec. Mantrijeron	1 dokumen	Meningkatnya partisipasi CSR Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	1 dokumen					
								Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan	1 dokumen					
								Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	55 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan	55 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Mantrijeron	1 kali	Meningkatnya Potensi UMKM Kecamatan Mantrijeron	1 kali					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										359,092,068	395,001,275	Baru		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Operasional Pelayanan yang terkait perizinan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi perizinan yang masuk dalam kewenangan kecamatan	12 bulan	12,625,000	13,887,500	Jawatan Umum	APBD	
								Sosialisasi Pelayanan Publik	55 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan publik	55 orang					
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Operasional Pelayanan yang terkait kewenangan lainnya yang dilimpahkan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi non perizinan serta kewenangan pelayanan lain yang dilimpahkan	12 bulan	63,739,568	70,113,525	Jawatan Umum	APBD	
								Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	6 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	6 kali					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk	6 kali	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah tempat tinggalnya	6 kali	282,727,500	311,000,250	Jawatan Sosial	APBD	
								Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota	1 kali	Meningkatnya Potensi Masyarakat di bidang Seni	1 kali					
								Pawai Budaya "Wayang Jogja Night Carnival"	1 kali	Terselenggaranya Pawai Wayang Jogja Night Carnival	1 kali					
								Focus Group Discussion Potensi Seni Kecamatan Mantrijeron	30 orang	Terhimpunnya data potensi seni di wilayah kecamatan mantrijeron	30 orang					
								Fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kecamatan	10 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga di tingkat kecamatan	10 lembaga					
								Lomba Administrasi Dasa Wisma	55 orang	Meningkatnya kualitas administrasi dasa wisma	55 orang					
								Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK	55 orang	Meningkatnya pemahaman anggota PKK tentang mekanisme pengisian SIM PKK agar lebih tertib administrasi	55 orang					
								Workhop Penataan Administrasi Persiapan Lomba tingkat Kota	55 orang	Meningkatnya pemahaman anggota PKK agar lebih tertib administrasi	55 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dan Mitra Keluarga	55 orang		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pola Asuh Anak dan Remaja di lingkungan keluarga	55 orang					
							Penyuluhan Ketahanan dan Keamanan Pangan Keluarga	55 orang		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Ketahanan Pangan	55 orang					
							Sosialisasi Administrasi Posyandu Tingkat Kecamatan	55 orang		Meningkatnya pemahaman kader Posyandu tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan	55 orang					
							Lomba Kesatuan Gerak (KKG) PKK	1 kali		Meningkatnya kualitas PKK Kecamatan Mantrijeron	1 kali					
							Gelar potensi Disabilitas	1 kali		Meningkatnya Potensi/Keberdayaan Warga Masyarakat Penyandang disabilitas	1 kali					
							Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali		Meningkatnya Potensi Anak Didik Usia Dini	1 kali					
							Sosialisasi Higienitas Pedagang Kaki Lima	55 orang		Meningkatnya Pemahaman Pedagang akan pentingnya kebersihan makanan serta lingkungannya	55 orang					
							Evaluasi Pemberdayaan	2 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan tingkat kecamatan	2 Dokumen					
							Fasilitasi Lomba, Kesenian, dan Olahraga Kecamatan	10 kali		Terfasilitasinya kontingen lomba perwakilan kecamatan mantrijeron	10 kali					
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni		565.000.000				3,313,252,892	3,644,578,162		Mantri Pamong Praja	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										3,313,252,892	3,644,578,162	Baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Gedongkiwo				Peningkatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Gedongkiwo, Suryodwijayan, dan Dukuh	86 titik	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum kampung di wilayah kelurahan gedongkiwo	86 titik	312,350,000	343,585,000	Lurah Gedongkiwo	APBD
									Peningkatan dan pemeliharaan SPAH Kampung Gedongkiwo dan Dukuh	5 titik	Meningkatnya konservasi air di wilayah kelurahan gedongkiwo	5 titik				

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Dukuh dan Kampung Suryowijayan	1000 m2		Meningkatnya kualitas jalan paving blok di kampung dukuh dan suryowijayan	1000 m2					
							Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan	1 paket		Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Gedongkiwo Tahun 2021	1 paket					
							Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan	1 paket		Tersusunnya dokumen Pengawasan Pembangunan Kelurahan Gedongkiwo Tahun 2021	1 paket					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Suryodiningratan		Peningkatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	30 titik		Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum kampung di wilayah kelurahan Suryodiningratan	30 titik	444,553,740	489,009,114	Lurah Suryodiningratan	APBD	
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	141 m		Meningkatnya kualitas drainase di wilayah kelurahan Suryodiningratan	141 m					
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	25 titik		Meningkatnya konservasi air di wilayah kelurahan Suryodiningratan	25 titik					
							Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	784 m2		Meningkatnya kualitas jalan paving blok di wilayah Kelurahan Suryodiningratan	784 m2					
							Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan	1 paket		Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Suryodiningratan Tahun 2021	1 paket					
							Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan	1 paket		Tersusunnya dokumen Pengawasan Pembangunan Kelurahan Suryodiningratan Tahun 2021	1 paket					
							Pembuatan Pergola Lorong Tanaman Sayur & Buah	1 unit		Meningkatnya Keasrian dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kelurahan Suryodiningratan	1 unit					

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
								Pengadaan Pergola Taman	1 unit	Meningkatnya Keasrian dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kelurahan Suryodiningratan	1 unit						
								Pembuatan Papan Pengumuman di Pos ronda Kampung Minggiran	4 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di Pos Ronda Kampung Minggiran Tercukupi	4 unit						
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Mantrijeron			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan, Jogokariyan	86 titik	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum kampung di wilayah kelurahan Mantrijeron	86 titik	380,715,000	418,786,500	Lurah Mantrijeron	APBD		
								Pemeliharaan Poskamling RW 10	1 unit	Terpeliharanya Poskamling RW 10	1 unit						
								Pembuatan Papan Pengumuman RW 17	5 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di RW 17 Tercukupi	5 unit						
								Pembuatan Papan Pengumuman RW 05	5 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di RW 05 Tercukupi	5 unit						
								Pembuatan Portal RW 11	2 unit	Keamanan di wilayah RW 11 Meningkat	2 unit						
								Pembuatan Gapura RW 10	1 unit	Terpenuhinya Kebutuhan Gapura RW 10 sebagai sarana penanda kampung	1 unit						
								Pemeliharaan Taman RW 11	1 unit	Terpeliharanya Taman RW 11	1 unit						
								Pemeliharaan Taman RW 12	1 unit	Terpeliharanya Taman RW 12	1 unit						
								Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 13	4 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di RW 13 Tercukupi	4 unit						
								Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 14	4 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di RW 14 Tercukupi	4 unit						

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Pemeliharaan Taman Batas	1 unit		Terpeliharanya Taman Batas antara Kampung Danunegaran dan Kampung Ngadinegaran	1 unit					
							Pemeliharaan Taman RW 19	1 unit		Terpeliharanya Taman RW 19	1 unit					
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan, Jogokariyan	30 titik		Meningkatnya konservasi air di wilayah kelurahan Mantrijeron	30 titik					
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan, Jogokariyan	282 m2		Meningkatnya kualitas jalan paving blok di wilayah Kelurahan Mantrijeron	282 m2					
							Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan	1 paket		Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Tahun 2021	1 paket					
							Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan	1 paket		Tersusunnya dokumen Pengawasan Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Tahun 2021	1 paket					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan		Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Gedongkiwo	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga	30 orang		Meningkatnya Pemahaman Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga	30 orang	845,430,784	929,973,862	Lurah Gedongkiwo	APBD	
							Penyuluhan Narkoba, HIV DAN AIDS	40 orang		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Narkoba, HIV dan AIDS	40 orang					
							Pendataan Balita Stunting dan Kurang Gizi	1 Dokumen		Terdatanya Balita Stunting dan Kurang Gizi di wilayah kelurahan gedongkiwo	1 Dokumen					
							Senam tingkat kampung	3 kali		Terselenggaranya Senam Tingkat Kampung	3 kali					
							Sosialisasi Penanganan Difabel dalam Keluarga	60 orang		Meningkatnya pemahaman penanganan penyandang difabel di lingkungan keluarga	60 orang					
							PEMILIHAN RT RW	104 lembaga		Terpilihnya RT RW yang SAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku	104 lembaga					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	18 lembaga		Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	18 lembaga					
							Pelatihan Penanaman tanaman sayur	30 orang		Terlatihnya kelompok masyarakat untuk teknik penanaman sayur	30 orang					
							Jalan sehat lansia	150 orang		Terselenggaranya Jalan sehat lansia	150 orang					
							GEBYAR PAUD	1 kali		Terselenggaranya Gebyar PAUD untuk mengakomodir potensi anak Usia Dini	1 kali					
							Bimbingan Belajar dan Pelatihan seni (JBM)	12 kali		Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Belajar dan Pelatihan Seni	12 kali					
							Festival Apem	1 kali		Terselenggaranya Festival Apem sebagai sarana pelestarian budaya	1 kali					
							Festival ketupat	1 kali		Terselenggaranya Festival Ketupat sebagai sarana pelestarian budaya	1 kali					
							Gedongkiwo Expo	1 kali		Terselenggaranya Gedongkiwo Expo sebagai sarana promosi pariwisata serta ekspos potensi kesenian dan UMKM Kelurahan Gedongkiwo	1 kali					
							Pendataan TKPK	2 bulan		Terdatanya Keluarga Miskin di wilayah kelurahan gedongkiwo	2 bulan					
							Pelatihan Siskamling Kampung Suryowijayan	30 orang		Terlatihnya warga untuk meningkatkan keamanan kampung suryowijayan	30 orang					
							Pelatihan Siskamling Kampung Gedongkiwo	30 orang		Terlatihnya warga untuk meningkatkan keamanan kampung Gedongkiwo	30 orang					
							Pelatihan Siskamling Kampung Dukuh	30 orang		Terlatihnya warga untuk meningkatkan keamanan kampung Dukuh	30 orang					
							JASA FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 orang		Administrasi, Pelaporan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lancar	12 bulan					
							Sosialisasi Pembangunan	60 orang		Tersampainya informasi kegiatan pembangunan/ konstruksi yang akan dilaksanakan di wilayah kelurahan gedongkiwo tahun 2021	60 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Suryodiningratan			Sosialisasi Deteksi Dini Kader Warga Peduli AIDS	30 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang AIDS	30 orang	604,290,584	664,719,624	Lurah Suryodiningratan	APBD	
								Penyuluhan Posyandu Balita dan Lansia 4 kampung (Pugeran, Kumendaman, Minggiran dan Suryodiningratan) 17 RW	30 orang	Meningkatkan pemahaman kader posyandu tentang mekanisme pelaporan dan tertib administrasi	30 orang					
								Pelatihan kelurahan Siaga	25 orang	Terlatihnya Kader Kelurahan Siaga	25 orang					
								Sosialisasi Pemberdayaan Keluarga dengan Penyandang Difabel	30 orang	Meningkatnya Pemahaman Keluarga untuk memberdayakan anggota keluarga penyandang difabel	30 orang					
								Pemilihan RT/ RW	87 Lembaga	Terpilihnya RT RW yang SAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87 Lembaga					
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	20 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	20 lembaga					
								Pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar	25 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik perikanan air tawar	25 orang					
								Pelatihan lele cendol 4 kampung	80 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik budidaya lele cendol	80 orang					
								Pelatihan Budidaya Toga, Tanaman Sayur dan Buah di Lahan Pekarangan & Tabulampot (Kampung Sayur)	50 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik budidaya Toga, Tanaman Sayur dan Buah di Lahan Pekarangan & Tabulampot (Kampung Sayur)	50 orang					
								Fasilitasi Senam Lansia	6 kali	Terselenggaranya kegiatan senam lansia	6 kali					
								Gebyar PAUD	1 kali	Terselenggaranya Gebyar PAUD untuk mengakomodir potensi anak Usia Dini	1 kali					
								Workshop Sekolah Alam	50 orang	Meningkatnya Pemahaman anak usia sekolah dengan teknik pembelajaran sekolah alam	50 orang					
								Bimbingan Belajar Anak SD dan SMP	8 kali	Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Belajar Anak SD dan SMP	8 kali					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Workshop Budaya Membaca dan Pengenalan Perpustakaan, Gelaran Buku Lapangan Minggiran (Gedulaming)	4 kali		Meningkatnya Animo masyarakat untuk ikut menghidupkan kegiatan Budaya Membaca dan Pengenalan Perpustakaan, Gelaran Buku Lapangan Minggiran (Gedulaming)	4 kali					
							Surya Expo 2021 (Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Suryodiningratan)	1 kali		Terselenggaranya Surya Expo 2021 sebagai sarana promosi pariwisata serta ekspos potensi kesenian dan UMKM Kelurahan Suryodiningratan	1 kali					
							Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Suryodiningratan (Evaluasi Raport Keluarga & Pembuatan Profile TKPK)	1 dokumen		Tersusunnya laporan Penanggulangan Kemiskinan serta Profil TKPK Kelurahan Suryodiningratan	1 dokumen					
							Pelatihan Batik Jumpatan	15 orang		Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik pembuatan batik jumpatan	15 orang					
							Pelatihan Ecoprint 4 kampung	15 orang		Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik pembuatan ecoprint	15 orang					
							Pelatihan Pembuatan Sibori 4 kampung	20 orang		Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik pembuatan batik shibori	20 orang					
							FGD Sinergisitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	40 orang		Terciptanya sinergi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	40 orang					
							Pelatihan Linmas	30 orang		Terlatihnya anggota linmas Kelurahan	30 orang					
							Forum Diskusi Terarah Tugas dan Fungsi Forum Jaga Warga Kelurahan	20 orang		Meningkatnya pemahaman Forum Jaga Warga tentang tugas dan fungsinya	20 orang					
							Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Relawan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	20 orang		Terlatihnya Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) tentang teknik Pengurangan Resiko Bencana	20 orang					
							Pelatihan reaksi cepat Pengurangan Resiko Bencana Kampung Tangguh Bencana (KTG)	20 orang		Terlatihnya Kampung Tangguh Bencana tentang teknik reaksi cepat Pengurangan Resiko Bencana	20 orang					
							Pembinaan Dasa Wisma Kelurahan Suryodiningratan	75 orang		Terbinanya Dasawisma Kelurahan Suryodiningratan	75 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	Administrasi, Pelaporan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lancar	12 bulan					
								Sosialisasi Pembangunan	60 orang	Tersampainya informasi kegiatan pembangunan/ konstruksi yang akan dilaksanakan di wilayah kelurahan Suryodiningratan tahun 2021	60 orang					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Mantrijeron			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	7 lembaga	725,912,784	798,504,062	Lurah Mantrijeron	APBD	
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	Administrasi, Pelaporan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lancar	12 bulan					
								Konsultasi Pembuatan Profil Dan Video Kampung	1 paket	Terdokumentasinya Profil 5 Kampung di wilayah kelurahan mantrijeron	1 dokumen					
								Penyuluhan SIM PKK	60 orang	Meningkatnya pemahaman kader PKK tentang mekanisme pelaporan dengan SIM PKK	60 orang					
								Sosialisasi Mitra Keluarga	60 orang	Meningkatnya pemahaman Kader Mitra Keluarga tentang tugas dan fungsinya dalam menangani permasalahan di lingkungannya	60 orang					
								Sosialisasi Hatinya PKK	60 orang	Meningkatnya Pemahaman Kader PKK tentang HATINYA PKK	60 orang					
								Sosialisasi PHBS, Gizi Dan Konseling	60 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PHBS	60 orang					
								Operasional Jam Belajar Masyarakat	20 RW	Terselenggaranya kegiatan Jam Belajar Masyarakat di 20 RW	20 RW					
								Penyuluhan Manajemen Organisasi Karang Taruna	40 orang	Meningkatkan Kesadaran serta Pengetahuan Manajemen organisasi karang taruna bagi remaja	40 orang					
								Workshop Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak	60 orang	Meningkatnya Pemahaman orang tua dalam pengasuhan anak	60 orang					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Workshop Gerakan Orang tua Sahabat Remaja	60 orang	Meningkatnya kesadaran orang tua untuk melakukan pendekatan serta mendidik anak usia remaja	60 orang					
								Penyuluhan UPPKS	60 orang	Meningkatnya pemahaman terkait Administrasi UPPKS bagi anggota	60 orang					
								Pemilihan RT RW	95 lembaga	Terpilihnya RT RW yang SAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku	95 lembaga					
								Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	95 orang	Meningkatnya rasa cinta tanah air bagi warga masyarakat di wilayah kelurahan mantrijeron	95 orang					
								Sosialisasi Pendataan PMKS	40 orang	Meningkatnya Pemakaman Kader PSM dalam rangka pendataan PMKS	40 orang					
								Sosialisasi Linmas	40 orang	Meningkatnya Kesiapsiagaan Linmas dalam rangka ikut menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan Mantrijeron	40 orang					
								Sosialisasi Jaga Warga	40 orang	Meningkatnya Pemahaman warga masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban lingkungannya	40 orang					
								Sosialisasi Panca Tertib	60 orang	Meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk ikut mengimplementasikan gerakan panca tertib di kampungnya.	60 orang					
								Sarasehan Warga Kampung Danunegaran	50 orang	Terselenggaranya Sarasehan Warga sebagai sarana membagikan informasi	50 orang					
								Sarasehan Warga Kampung Mangkuyudan	50 orang	Terselenggaranya Sarasehan Warga sebagai sarana membagikan informasi	50 orang					
								Sosialisasi RT/RW Siaga	95 orang	Meningkatnya pemahaman Ketua RT dan RW tentang pembentukan serta tugas dan fungsi RT/RW Siaga	95 orang					
								Sosialisasi Pencegahan Stunting/ Gizi Buruk dan Penyakit Tidak Menular	60 orang	Meningkatnya pemahaman warga dalam rangka Pencegahan Stunting/ Gizi Buruk dan Penyakit Tidak Menular	60 orang					
								Penyuluhan Kesehatan Lansia	60 orang	Meningkatnya Pemahaman Lansia tentang Kesehatan	60 orang					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Penyuluhan Management Bank Sampah	40 orang	Meningkatnya Pemahaman Kader Bank Sampah tentang Administrasi serta pelaporan kegiatan Bank Sampah	40 orang					
								Sosialisasi Pelestarian Budaya Jamasan Tosan Aji	60 orang	Meningkatnya pemahaman warga tentang Pelestarian Budaya Jamasan Tosan Aji	60 orang					
								Pelatihan Lukis Jalan Dan Mural	40 orang	Terlatihnya Warga untuk memperindah lingkungannya dengan Media Lukis Jalan dan Mural Dinding	40 orang					
								Pelatihan Kampung Sayur	25 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik budidaya tanaman sayur	25 orang					
								Pelatihan Lele Cendol	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik Budidaya lele cendol	20 orang					
								Penyuluhan Kewirausahaan	60 orang	Meningkatnya Pemahaman kelompok mayarakat tentang cara berwirausaha	60 orang					
								Operasional Forum Komunikasi UMKM	12 bulan	Terfasilitasinya Kegiatan Forkom UMKM	12 bulan					
								Gebyar UMKM	1 kali	Terselenggaranya Kegiatan Gebyar UMKM sebagai sarana pemasaran potensi UMKM dan Kesenian Kelurahan Mantrijeron	1 kali					
								Sosialisasi PKL	40 orang	Meningkatnya Pemahaman PKL tentang Hak dan Kewajibannya sebagai Pedagang Kaki Lima	40 orang					
								Pelatihan Hantaran	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik membuat Hantaran baik untuk seserahan pernikahan maupun bingkisan	20 orang					
								Pelatihan Batik	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik pembuatan batik	20 orang					
								Pelatihan Kreasi Kulit	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik pembuatan kreasi kulit	20 orang					
								Pelatihan Boga	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang tata cara membuat kue dan masakan	20 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Sosialisasi Pembangunan	60 orang	Tersampainya informasi kegiatan pembangunan/ konstruksi yang akan dilaksanakan di wilayah kelurahan Mantrijeron tahun 2021	60 orang					
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	36					146,155,000	160,770,500		Kemantren Mantrijeron	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										70,425,000	77,467,500	Baru		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Mantrijeron			Frekuensi Pengamanan masyarakat	5 Jenis	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	5 Jenis	70,425,000	77,467,500	Jawatan Keamanan	APBD	
								Pengadaan Peralatan Operasional	5 Jenis	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	5 Jenis					
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	55 tabung	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	55 tabung					
								Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung Tangguh Bencana	5 kali	Meningkatkan kesiapsiagaan Kampung dalam menghadapi situasi bencana	5 kali					
								Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 bulan	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	4 bulan					
								Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 bulan	Terjalannya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	4 bulan					
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										75,730,000	83,303,000	Baru		
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Mantrijeron			Koordinasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan	16 kali	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	16 kali	75,730,000	83,303,000	Lurah	APBD	
								Sosialisasi Perda dan Perwal Pondokan	55 orang	Meningkatnya ketertiban pondokan	55 orang					
								Sosialisasi Perda dan Perwal PKL	55 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	55 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 kali		Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 kali						
							Koordinasi optimalisasi ketertiban	88 kali		Meningkatkan ketertiban wilayah Kec. MJ	88 kali						
Total												9,493,267,636	10,442,494,380				

Tabel 5.24 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,130,784,568	5,284,708,105		Mantri Anam	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										22,510,400	23,185,712	Lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	1,394,600	1,436,438		Sub bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	8,179,800	8,425,194		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
								Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen							
								Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	5,676,800	5,847,104		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terselenggaranya Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1,394,600	1,436,438		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	5,864,600	6,040,538		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,640,176,668	3,749,381,968	Lanjutan		

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,622,276,668	3,730,944,968		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
								Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	25 ASN							
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	1,300,000	1,339,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersusunnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	1,300,000	1,339,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Keuangan	12 dokumen	1,300,000	1,339,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Terdokumentasikannya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	1,000,000	1,030,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2,200,000	2,266,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	8,800,000	9,064,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	700,000	721,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1,300,000	1,339,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,468,097,500	1,512,140,425	Lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,420,000	5,582,600		Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	700 surat							
								Pengiriman Dokumen	200 dokumen							
								Materai	1900 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	112,800,000	116,184,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening Air	12 bulan							
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	12 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	100%	24,450,000	25,183,500		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,003,200	69,013,296		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Tenaga Teknis	1 orang							
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	45,648,000	47,017,440		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Retribusi Kebersihan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Infrastruktur wilayah meningkat	Kemantren Kraton			Bahan/alat-alat/perengkapan kantor/rumah tangga/kerja	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,910,000	13,297,300		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Alat Tulis Kantor	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	44,888,200	46,234,846		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Barang cetakan	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	47,570,000	48,997,100		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	150000 lembar							
								Dekorasi, dokumentasi, publikasi dan pembuatan film	3 dokumen							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,583,600	12,961,108		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Komputer PC	7 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	304,971,000	314,120,130		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Komputer Notebook	4 unit							
								Printer	4 unit							
								UPS	7 unit							
								Hardisk Eksternal 500 GB	5 unit							
								Kursi Kerja Putar Tangan	3 unit							
								Kursi Kerja Putar Tanpa Tangan	2 unit							
								Kursi tunggu 4 seat spon	2 unit							
								Kamera Mirorles/DSLR	1 unit							
								Kamera Vidio Digital	1 unit							
								Proyektor Outdoor	1 unit							
								layar Proyektor	1 unit							
								Kakulator 14 digit	7 unit							
								Kanopi	1 unit							
								Bahan komputer	4 jenis							
								Bahan/alat-alat/perengkapan kantor/rumah tangga/kerja	4 jenis							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Bahan Kebersihan Playground	30 jenis							
								genzet	1 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	5,792,000	5,965,760		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Buku Perundang-undangan	10 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	1,545,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Penyediaan Makanan dan Minuman	3780 os	Terfasilitasinya koordinasi internal Kemantren	100%	131,029,500	134,960,385		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Kursi Kerja Putar Tangan	6 unit	Terpeliharanya Peralatan Mebelair Kemantren Kraton	100%	19,868,000	20,464,040		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Kursi Kerja Putar Tanpa Tangan	6 unit							
								Kursi tunggu 4 seat spon	2 unit							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			BBM dan pelumas BBM Genset	12 unit 1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	56,510,000	58,205,300		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Kraton dan Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Kadipaten dan Rumah Dinas Camat.	5 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor Kemantren Kraton dan Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten, Kel. Panembahan		481,904,000	496,361,120		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan Taman	5 jenis							
								Jasa keamanan	12 bulan							
								Sewa ruang rapat/pertemuan	5 hari							
								PBB	1 tahun							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Mesin ketik	5 unit	Terpeliharanya Keasrian dan keamanan Kemantren Kraton	100%	93,250,000	96,047,500		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								AC	9 unit							
								Perlengkapan Kantor	4 unit							
								Sound system	4 unit							
								Sepeda listrik	1 unit							
								Genset	1 unit							
								Printer	4 unit							
								TV	4 unit							
								Komputer	16 unit							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	77,19					719,085,850	740,658,425		Mantri Pamong Praja	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										121,551,550	125,198,096	Baru		

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	218 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan	165 RT 34 RW	121,551,550	125,198,096		Jawatan Praja	APBD
								Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Kraton	218 Lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan	175RT 43 RW					
								Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/RW	276 organisasi	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	276 organisasi					
								Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung	276 organisasi	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	276 organisasi					
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	4 dokumen					
								Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan kadipaten, Kelurahan Panembahan	3 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan kraton	75 orang					
								Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali					
								Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kali	Terseleenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	1 kali					
								Dokumen Musrenbang Kecamatan kraton	4 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat	100 orang					
								Dokumen Musrenbang Kelurahan Patehan, Kelurahan kadipaten, Kelurahan panembahan	3 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	90 orang					
								Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan kadipaten, Kelurahan Panembahan	3 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan kraton	75 orang					
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										114,622,800	118,061,484	Baru		
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	31 orang	Meningkatnya perekonomian peserta PKH	30 orang dan 1 orang Naban	114,622,800	118,061,484		Jawatan Kemakmuran	APBD
								Gelar Potensi UMKM dan Pertanian Kec Kraton	25 UKM	Meningkatnya Potensi UMKM dan Pertanian Kecamatan Kraton	100 orang					
								Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan	6 kali	Meningkatnya kegiatan anggota Forkom UKM Kecamatan Kraton	30 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Bimtek UMKM dan Gapoktan	100 orang	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Kraton	100 orang					
								Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	80 orang	Meningkatnya pengelolaan bank sampah dan kampung hijau Kecamatan Kraton	80 orang					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										482,911,500	497,398,845	baru		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi perizinan yang masuk dalam kewenangan kecamatan	12 bulan	38,832,500	39,997,475		Jawatan Umum	APBD
								Sosialisasi Pelayanan Perizinan	180 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	180 orang					
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Terlaksananya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	64,463,000	66,396,890		Jawatan Umum	APBD
								Sosialisasi Jogja Smart Service	70 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya	70 orang					
								Sosialisasi Pelayanan Publik dan Adminduk	70 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	70 orang					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kraton			Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	4 kali	Meningkatkan koordinasi di antara anggota TP PKK Kecamatan dan kelurahan	1 orang	379,616,000	391,004,480		Jawatan sosial	APBD
								Pembinaan dan Penyegaran Pengadministrasian Kegiatan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RT dan RW	3 kelurahan	Meningkatkan kemampuan dalam menyusun data PKK	3 kelurahan					
								Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota	100 orang	Mengetahui tolok ukur tertib administrasi kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan Pendamping	100 orang					
								Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	65 orang	Meningkatkan rasa nasionalisme dan Bela Negara	65 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyuluhan Obat Terlarang	65 orang	Meningkatkan pengetahuan tentang obat terlarang / Narkoba	65 orang					
								Penguatan Kader Mitra Kerja	50 orang	Meningkatkan pengetahuan Mitra Kerja	65 orang					
								Pola Asuh	50 orang	Meningkatkan pengetahuan Masyarakat dalam PAAR	50 orang					
								Penyuluhan Keluarga Lanjut Asia Tangguh	50 orang	Penyuluhan kader dan lanjut Ajsia	50 orang					
								Senam Lanjut Asia	100 orang	Kebugaran Lanjut Asia	100 orang					
								Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	550 orang	Meningkatkan Kreativitas Anak dan Anak Belajar Mandiri	550 orang					
								Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha Rumahani/ Kecil	40 orang	Dapat Mengetahui Cara Pemasarannya untuk Dapat Meningkatkan Pendapatan Keluarga	40 orang					
								Penyuluhan Management Gandeng-Gendong	40 orang	Mengetahui Cara Pengelolaan, Kerjasama dalam Menerima Pesanan, dll.	40 orang					
								Monitoring & Rakordasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis KecamatanKraton	40 SPS	PAUD Berjalan Baik Sesuai Juklak / Juknis	40 SPS					
								Workshop Budidaya Anggrek	25 orang	Adanya Koordinasi antar SPS, Paguyubandan Forum PAUD	25 orang					
								Lomba Cipta Menu Non Terigu	40 orang	Meningkatkan pengetahuan tentang variasi menu sehat berbasis Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	40 orang					
								Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman	50 orang	Meningkatkan pengetahuan tentang menu sehat bagi anak usia sekolah	50 orang					
								Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan	10 bulan	Meningkatkan pemberdayaan dalam kelompok sosial masyarakat	10 bulan					
								Penyuluhan "Ngadi Sarira" dan "Ngadi Busana"	50 orang	Meningkatkan pengetahuan tentang penampilan yang baik, benar, dan sehat	50 orang					
								Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan	100 orang	Administrasi dan Kegiatan KB Kes bertambah lebih baik	100 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Lomba Bayi Sehat	100 orang	Mengetahui kondisi balita baik sehat maupun yg kurang (untuk mengikuti LBBSI tk kota)	100 orang					
								Penyuluhan Focus Group Discussion Tuberculosis	60 orang	Peserta paham tentang pencatatan, pelaporan dan administrasi Yandu	60 orang					
								Penyuluhan Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting	60 orang	"1. Diperolehnya mekanisme pembinaan di wilayah tentang stunting sampai dengan dasawisma 2. Diperolehnya mekanisme pelaporan adanya stunting mulai dari dasawisma 3. Dirumuskan pola sosialisasi sampai tingkat dasawisma"	60 orang					
								Focus Group Discussion Pola Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungan Bersih Sehat	60 orang	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Pola Hidup Bersih dan Sehat dan beserta laporan dan administrasinya	60 orang					
								Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamatan.Kelurahan	50 orang	Koordinasi kegiatan Kegiatan Kesatuan Gerak	50 orang					
								Workshop Home-Care	50 orang	Masyarakat bisa merawat lansia dengan baik dan tepat	50 orang					
								Karawitan Lansia	30 orang	Lansia memiliki kegembiraan beraktivitas	30 orang					
								Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita	60 orang	"1. Meningkatkan wawasan tentang perkoperasian wanita se wilayah Kec. Kraton 2. Meningkatkan kesejahteraan wanita melalui Kopwan Dewi Sri di Wilayah Kec. Kraton"	60 orang					
								Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kraton	32 orang	Memperkecil angka kemiskinan di Kec. Kraton	32 orang					
								Senam Rutin Senin	30 orang	Menjaga kebugaran	30 orang					
								Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi	33 orang	Menambah pengetahuan anggota tentang jenis senam	33 orang					
								Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	2 kali	Keluarga Sejahtera	2 kali					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pembangunan Pemerintah	3 hari	Organisasi penyandang disabilitas di wilayah kelurahan memiliki kesamaan pemahaman tentang isu disabilitas dan upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaannya	3 hari					
								Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	30 orang	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Mitra Kerja Dinas Sosial Yogyakarta	30 orang					
								Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019	50 orang	Lebih Mengetahui Keberadaan Pekerja Sosial	3 orang					
								Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Bidang Makanan Ringan, Packing dan Pemasaran	60 orang	Meningkatkan Pendapatan Keluarga dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan	60 orang					
								Pelatihan Mitigasi Bencana	50 orang	Semakin paham tentang alat dan fungsi kegunaannya	50 orang					
								Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana	50 orang	Mengerti tentang apa yang akan sedang dilakukan pasca bencana	50 orang					
								Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota	3 kelurahan	Melestarikan kesenian & kebudayaan	3 kelurahan					
								Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	30 orang	Meningkatkan pengetahuan pengurus dan guru	30 orang					
								Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan Kec Kraton	35 orang	Pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan lebih terkoordinir dan memahami tugasnya	35 orang					
								Workshop Kecamatan Sehat	50 orang	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan	70 orang					
								Festival Olah Raga Tradisional	250 orang	"1. Mengenalkan Olahraga Tradisional 2. Sarana Memperkuat Karakter"	250 orang					
								Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata	3 kelurahan	Mempersiapkan struktur Kelompok Sadar Wisata di Tingkat Kelurahan se Kec. Kraton	3 kelurahan					
								Festival Olah Raga Prestasi	250 orang	Meningkatkan prestasi olahraga	250 orang					
								Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival	70 orang	Melestarikan kesenian & kebudayaan	70 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 429.601.667					2.509,631,100	2.577,703,833		Mantri Pamong Praja	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2.509,631,100	2.577,703,833	baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Panembahan			Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan di Kampung Gamelan, Panembahan, Mangunnegaran, Suryoputran	40 titik	Mengurangi genangan air dan menambah cadangan air tanah	40 titik	527,600,000	543,428,000		Kelurahan Panembahan	APBD
								Pelumpuran SPAH di Kampung Panembahan	4 titik	Mengurangi genangan air dan menambah cadangan air tanah	4 titik					
								Pemeliharaan Jalan (konblok) di Kampung Panembahan, Mangunnegaran dan Suryoputran	600 m2	Meningkatkan kenyamanan pemakai jalan	600 m2					
								Pembuatan Saluran Air Hujan (SAH) kecil Kampung Langenastran	6 meter	Mengurangi genangan air dan memperlancar air masuk ke SAH	6 meter					
								Pemasangan cermin cembung Kampung Panembahan	4 titik	Mengurangi kecelakaan	4 titik					
								Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kampung Langenastran, Gamelan, Suryoputran, Panembahan dan Mangunnegaran	110 titik	Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	110 titik					
								Jasa Konsultansi Perencanaan	1 paket	Perencanaan kegiatan pembangunan fisik wilayah	1 paket					
								Jasa Konsultansi Pengawasan	1 paket	Pengawasan kegiatan pembangunan fisik wilayah	1 paket					
								Pembuatan Corblok Kampung Langenastran dan Gamelan	33.04 m3	Meningkatkan kenyamanan pemakai jalan	33.04 m3					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Kraton			Pemeliharaan paving block	627,8 m2	Jalan lancar	627,8 m2	299,910,000	301,991,100		Kelurahan Patehan	APBD
								Sumur Peresapan Air Hujan (SPA)	7 buah	Menyimpan air tanah, Mengurangi genangan air(kampung Ngadisuryan,Patehan,Taman)	7 buah					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pengerukan SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	7 buah	Menambah daya tampung air(kampung Ngadisuryan,Patehan,Taman)	7 buah					
								Perbaikan Saluran Air Limbah	Kelurahan Patehan	Memperlancar asinering	Kelurahan Patehan					
								Perbaikan Posronda	1 unit	Siskamling	1 unit					
								Pemeliharaan PJU	60 titik	Penerangan	60 titik					
								Penghijauan di jalur wisata	600 m	Jalur wisata semakin asri (timur pasar ngasem RT 44 RW 10	600 m					
								Honor untuk Konsultan perencana dan pengawas	8 kegiatan	Konsultan perencana, pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik	8 kegiatan					
								Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	1 unit	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	1 unit					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Kadipaten			Perbaikan Pos Ronda RW 01	2 unit	Siskamling Warga	2 unit	312,090,000	321,452,700		Kelurahan Kadipaten	APBD
								Pembuatan SPAH	3 unit	Mengurangi genangan air hujan	3 unit					
								Pembuatan tutup selokan	1 unit	Untuk kenyamanan warga agar tidak bau	1 unit					
								Pembuatan lapangan 2 in 1 (Basket dan badminton)	427,5 m2	Mengiatkan olah raga di masyarakat	28,5 x 15 m					
								Pembuatan Taman/Tamanisasi	15 unit	Penanaman sayuran dalam pot sebagai pendukung Kampung	15 unit					
								Pengadaan sumur peresapan	3 unit	mengurangi genangan air di jalan	3 unit					
								Renovasi fasilitas sumur umum dan pompa air	1 unit	mengurangi genangan air di jalan	1 unit					
								Pemasangan ramp (untuk membantu pegangan lansia dan difabel)	200 m	Memudahkan akses jalan lansia dan difabel	200 m					
								Penggantian pintu kamar mandi umum	9 bh	Untuk keamanan dan kenyamanan warga	9 bh					
								Conblokisasi	754 m2	Untuk keamanan dan kenyamanan warga	754 m2					
								Jasa Perencana dan Pengawasan	1 keg	Konsultan prencana, pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik	1 keg					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Panembahan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	198 lembaga	Koordinasi kelembagaan	198 lembaga	409,585,200	421,572,756		Kelurahan Panembahan	APBD
								Fasilitasi Persiapan Lomba	20 kali	Koordinasi menghadapi lomba	Lomba-lomba					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Panembahan	96 lembaga	KoordinTerpilihnya pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga Kelurahan Panembahan Masa Bakti 2021-2024 asi kelembagaan	96 lembaga					
								Fasilitasi lembaga /forum kemasyarakatan kelurahan	198 lembaga	Koordinasi meFasilitasi forum / lembaga di wilayah kelurahan hadapi lomba	7 organisasi					
								Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	2 orang	Dukungan kelancaran Kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	1 orang Naban 1 orang Tenaga Teknis					
								Pelatihan Ternak Lele Cendol	20 orang	Kelurahan Kampung Mangunnegaran/Rukun Tetangga 77 dan Kampung Suryoputran Rukun Warga 08	20 orang					
								Pelatihan Batik dan Ecoprint (2 Kegiatan)	40 orang	Kelurahan / Kampung Mangunnegaran/Kom Lansia Rukun Tetangga 14 + Rukun Warga 18 dan Kampung Suryoputran Rukun Warga 09, Kampung Panembahan Rukun Warga 13 Kampung	40 orang					
								Pelatihan Pembuatan Pakan ternak	36 orang	Kelurahan Panembahan	36 orang					
								Pelatihan Menangani Bahaya Kebakaran dan kegiatanawat daruratan	30 orang	KESI & Kampung Tangguh Bencana & Kampung Panembahan/ Rukun Warga 12	1 kegiatan					
								Pelatihan Membuat Roti & Kue Tradisional (2 Kegiatan)	40 orang	Kel Panembahan & Kampung Panembahan Rukun Warga 13	13 Posyandu					
								Pelatihan Pengolahan Lele dan Pelatihan membuat bakso (2 Kegiatan)	15 orang	Kelurahan Panembahan	15 orang					
								Pelatihan Lorong Sayur dan Pelatihan Kampung Sayur (2 Kegiatan)	75 orang	Kampung Gamelan Rukun Warga 06 / Kampung Panembahan Rukun Warga 14 /Kampung Suryoputran	75 orang					
								Lomba Administrasi antar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga se Kelurahan	60 orang	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan	60 orang					
								Lomba KKG Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga- KKBPK - Kes	200 orang	Kelurahan/Pemberdayaa n Kesejahteraan Keluarga Kel Panembahan	200 orang					
								Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Sambah	72 orang	Fasilitator Kelurahan (Faskel)	72 org					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitasi Posyandu (Antopometer/Alat ukur bayi)	18 buah	Mengetahui tingkat perkembangan bayi	18 buah					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	kelurahan patehan			Fasilitasi lembaga /forum kemasyarakatan kelurahan	12 lembaga	Fasilitasi forum / lembaga di wilayah kelurahan	12 lembaga	451,595,200	465,143,056		Kelurahan Patehan	APBD
								Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	2 orang	Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	Naban, 1 orang Tenaga					
								Penyuluhan Paugeran Jeron Beteng	50 orang	Pengetahuan Paugeran Jeron Beteng	50 orang					
								Penyuluhan rapor keluarga bagi penduduk miskin (KMS-Kartu Menuju Sejahtera)	80 KK	Untuk mengetahui kondisi kemiskinan pemegang KMS	80 KK					
								Pelatihan pembuatan, pengemasan, pemasaran makanan bagi kelompok P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)	90 orang	Menambah pendapatan	90 orang					
								Penyuluhan untuk difabel dan keluarga 'Menumbuhkan rasa percaya diri bagi difabel'	30 orang	Menumbuhkan rasa percaya diri difabel	30 orang					
								Penyuluhan untuk ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan keluarga	30 orang	Menambah pengetahuan bagi ODGJ dan keluarga	30 orang					
								Bimtek Posyandu online	50 orang	Memfaatkan IT dalam Posyandu	50 orang					
								Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat bagi relawan Kampung Tanggap Bencana)	60 orang	Meningkatkan keterampilan relawan	60 orang					
								Pelatihan pengolahan makanan tradisional	50 orang	Meningkatkan ketrampilan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) makanan tradisional	50 orang					
								Pelatihan pengemasan makanan tradisional	50 orang	Meningkatkan ketrampilan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) makanan tradisional	50 orang					
								Parenting (Kampung Ngadisuryan, Patehan, Tamán)	50 orang	Meningkatkan pengetahuan orangtua tentang mendidik anak	50 orang					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Kadipaten			Jasa Pelayanan bagi Pelayan Masyarakat di Wil	142 orang	Peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat	142 orang	508,850,700	524,116,221		Kelurahan Kadipaten	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kadipaten	68 lembaga	Terpilihnya pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga Kelurahan Panembahan Masa Bakti 2021-2024	15 Rukun Warga 53 Rukun Tetangga					
								Fasilitasi lembaga /forum kemasyarakatan kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kampung)	7 Orangani sasi	Fasilitasi forum / lembaga di wilayah Kelurahan	7 Oranganisa si					
								Jasa fasilitator pemberdayaan Kelurahan	2 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	Naban 1 orang Tenaga Teknis					
								Jasa Perencana dan Pengawasan	2 kegiatan	Konsultansi perencana, pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik	2 kegiatan					
								Festival Pisungung Ruwahan Kadipaten	1 paket	Pelestarian nilai tradisi & pengembangan Kampung Wisata Kadipaten menjadi destinasi pariwisata alternatif	1 paket					
								Pelatihan Budidaya Lele Cendol	50 Orang	Meningkatkan Potensi ternak lele, untuk nantinya menambah pendapatan keluarga	50 Orang					
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	240 kali					154,304,650	158,933,789		Mantri Pamong Praja	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										98,051,600	100,993,148	Baru		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Kraton			Koordinasi Linmas Kecamatan	1 kali	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	1 kali	98,051,600	100,993,148		Jawatan Keamanan	APBD
								Frekuensi Pengamanan masyarakat	2 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	2 kali					
								Pengadaan Peralatan Operasional	2 kali	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	2 kali					
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	43 Tabung APAR					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiat an	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyuluhan Jaga Warga	40 orang	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	40 orang					
								Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali	Terjalannya koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali					
								Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 kali	Terjalannya koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	4 kali					
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										56,253,050	57,940,641	Baru		
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Kraton			Sosialisasi Pondokan	40 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	40 orang	56,253,050	57,940,641		Jawatan Keamanan	APBD
								Penyuluhan PKL	40 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	40 orang					
								Operasi ketertiban masyarakat	110 kali		110 kali					
								Koordinasi Forkopimca	2 orang	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	2 orang					
Total												8,513,806,168	8,762,004,152			

Tabel 5.25 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,136,735,236	4,260,837,293		Kemantren Gondomanan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										41,894,000	43,150,820	baru		
								Dokumen renja Tahun 2021 dan Perubahan renja Tahun 2021	2 dokumen							
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan			Pengelolaan website OPD	12 bulan	Terkelolanya website OPD	12 bulan	31,254,000	32,191,620		Sub Bag Keu PEP	APBD
								Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Dokumen RKA, DPA, RKPA dan DPPA	4 dokumen					
								perjanjian kinerja dan perubahannya	2 dokumen	Dokumen PERKIN	2 dokumen					
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan			Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Honorarium Tenaga Teknis Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	31,254,000	32,191,620		Sub Bag Keu PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dokumen renstra	3 dokumen	1,800,000	1,854,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen	Dokumen renja OPD	6 dokumen					
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terlaksananya rakord penyusunan program dan kegiatan dengan OPD terkait	1 Berita Acara	1,500,000	1,545,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja OPD	2 dokumen	1,600,000	1,648,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,042,374,036	3,133,645,257	baru		

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan			Gaji tunjangan ASN dan TPP	27 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,035,274,036	3,126,332,257		Sub Bag Keu PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dokumen ASN	12 dokumen	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dokumen bahan verifikasi	12 dokumen	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Akutansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dokumen laporan keuangan	12 dokumen	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dokumen tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	500,000	515,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Dokumen hasil kinerja SKPD	4 dokumen	1,000,000	1,030,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	14 dokumen	Dokumen laporan keuangan bulanan/ semesteran	14 dokumen	1,000,000	1,030,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	500,000	515,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	500,000	515,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,052,467,200	1,084,041,216	baru			
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan			Materai	1900 buah	Tersedianya materai	1900 buah	7,650,000	7,879,500		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	Terbayarnya tagihan telpon	12 bulan	96,730,000	99,631,900		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran rekening Air	12 bulan	Terbayarnya tagihan air kelurahan	12 bulan						
								Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	Terbayarnya tagihan listrik	12 bulan						
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	11 unit	Terbayarnya pajak kendaraan roda 2	11 unit	2,718,400	2,799,952		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	4 unit	Terbayarnya pajak kendaraan roda 3	4 unit						
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit	Terbayarnya pajak kendaraan roda 4	1 unit						
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Tenaga Teknis Pengadministrasi Umum Kemantren Gondomanan	1 orang	Honorarium Tenaga Teknis	1 orang	25,141,200	25,895,436		Sub Bag Keu PEP	APBD	
								Biaya Administrasi bank	120 kali	Terbayarnya biaya administrasi bank	120 kali						
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yk			Pemeliharaan kebersihan	3 gedung	Terpeliharanya kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan	3 gedung	148,000,000	152,440,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
								Retribusi kebersihan	12 bulan	Terbayarnya retribusi kebersihan	12 bulan						
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Alat Tulis Kantor	36 jenis	Tersedianya ATK	36 jenis	22,753,200	23,435,796		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Penggandaan surat surat - surat / dokumen	80.000 lembar	Tersedianya anggaran penggandaan laporan kegiatan SKPD	80.000 lembar	20,920,000	21,547,600		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Cetak	6 jenis	Tersedianya anggaran cetak	6 jenis						
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	6,516,300	6,711,789		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Belanja Modal Sound System	1 unit	Tersedianya soundsystem	1 unit	82,200,000	84,666,000			APBD	
								Belanja Modal Komputer	5 unit	Komputer PC	5 unit						
								Belanja Modal Printer	7 unit	Printer	7 unit						
								Sewa Tenda	2 unit	Tersedianya tenda	2 unit						
								sewa sound system untuk HUT RI dan genset	1 unit	Tersedianya sound system untuk HUT RI	1 unit						
								Kursi tamu kelurahan Ngupasan	1 unit	Tersedianya kursi tamu untuk kantor Kel. Ngupasan	1 unit						
								Kursi ruang pelayanan Kelurahan Ngupasan	1 unit	Tersedianya kursi pelayanan untuk kantor Kel. Ngupasan	1 unit						
								LCD Proyektor kantor Kelurahan Prawirodirjan	1 unit	Tersedianya LCD proyektor untuk kantor Kel. Prawirodirjan	1 unit						
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Peralatan rumah tangga	12 jenis	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 jenis	24,625,100	25,363,853		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Belanja bahan komputer	8 jenis	Tersedianya bahan komputer	8 jenis						
								Belanja bahan/alat kebersihan	5 jenis	Tersedianya peralatan kebersihan	5 jenis						
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan buku perpustakaan	2 perpustakaan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	2 perpustakaan	5,000,000	5,150,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Makan Minum Rapat	88 kali	Terlaksananya rapat internal	88 kali	70,530,000	72,645,900		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Pemeliharaan rutin rumah dinas	1 gedung	Terpeliharanya rumah dinas	1 gedung	50,000,000	51,500,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			pemeliharaan gedung kecamatan dan kelurahan	2 gedung	Terpeliharanya gedung pemerintah	2 gedung	198,000,000	203,940,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta			Belanja jasa servis kendaraan roda 4, roda 3, roda 2	1 unit, 4 unit, 11 unit			86,799,000	89,402,970		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Belanja penggantian suku cadang roda 4, roda 3, roda 2	1 unit, 4 unit, 11 unit								
								Belanja penggantian bahan bakar minyak/ gas dan pelumas roda 4, roda 3, roda 2	1 unit, 4 unit, 11 unit								

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	X.XX.01.2.03.32		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta						188,164,000	193,808,920		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pemeliharaan Taman	12 bulan								
								Jasa Keamanan	12 bulan								
	X.XX.01.2.03.34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	kota yogyakarta						16,300,000	16,789,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Mesin ketik	3 unit								
								AC	8 unit								
								Printer	21 unit								
								Sepeda listrik	3 buah								
								Wireles	5 buah								
								HT	2 bh								
								Genset	1 bh								
								Penyedot air	1 bh								
								pemotong Pohon	1 bh								
								Kipas Angin	2 bh								
								Komputer	25 bh								
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	87,9				670,497,950	690,612,839		Kecamatan Gondomanan		
	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									127,312,750	131,132,133	baru			
	7.01.02.2.01.02		Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Gondomanan						127,312,750	131,132,133		Seksi Pemerintahan Trantib	APBD	
								Sosialisasi pemilihan RT RW	141 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	141 lembaga						
								Penguohan RT dan RW Se-Kecamatan Gondomanan	141 lembaga	Terlaksananya pemilihan RT RW	141 lembaga						
								Sarasehan kelembagaan RT RW LPMK BKM Ketua Kampung	175 orang	Meningkatnya kapasitas RT RW LPMK BKM dan Kampung	175 orang						
								Penyusunan Profil Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan	2 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kemantren Gondomanan	2 dokumen						
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali						
								Evaluasi kelurahan tingkat kecamatan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali						
								PELATIHAN BELA NEGARA BAGI GENERASI MUDA	6 kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	6 kali						
								Musrenbang tingkat Kemantren Gondomanan	1 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kemantren	1 dokumen						

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
								Musrenbang Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan	2 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan	2 dokumen						
								Musrenbang tematik	3 kali	Terlaksananya musrenbang tematik	3 kali						
	7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									104,895,000	108,041,850	baru			
	7.01.02.2.03.02		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan		Evaluasi pembangunan RW se-Kecamatan Gondomanan (EKOBANG)	1 kali	Meningkatkan pembangunan dan lingkungan RW	1 kali	104,895,000	108,041,850		Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kemantren	APBD	
								Penyuluhan PKL	50 orang	Meningkatkan pendapatan PKL	50 orang						
								Gelar Potensi UMKM Gondomanan bersih untuk jogja istimewa	1 kali	Meningkatkan pendapatan UMKM	1 kali						
								Retribusi parkir di tepi jalan umum	12 kali	Lingkungan yang bersih dan nyaman	12 kali						
									1 kali	Peningkatan pendapatan petugas parkir	1 kali						
								Informasi Pembangunan	2 kali	Publikasi rencana kegiatan pembangunan dana APBD	2 kali						
								Pertemuan rutin UMKM	4 kali	Terlaksana koordinasi kelompok UMKM tingkat kecamatan	4 kali						
								Rakord persiapan gelar potensi pertanian	3 kali	Terlaksananya rakord perispn gelar potensi pertanian	3 kali						
								Pendataan sarpras kampung (data dasar sarpras kampung)	1 dokumen	Tersedianya data sarpras kampung	1 dokumen						
								Workshop Kewirausahaan	60 orang	Terlaksananya workshop kewirausahaan	60 orang						
								Pelatihan Membuat Kue Penyuluhan Managemen UP2K	60 orang	Meningkatnya pendapatan masyarakat	60 orang						
									1 kali	Meningkatnya managemen UP2K	1 kali						
	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									438,290,200	451,438,856	Baru			
	7.01.02.2.04.01		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan		Operasional terkait perizinan (Pengawasan perizinan IMB, Pondokan)	12 bulan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	90,789,200	93,512,876		Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kemantren	APBD	
								Penyusunan buletin	2 kali	Informasi pelaksanaan kegiatan APBD kepada masyarakat	2 kali						

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Sosialisasi perundangan undangan	2 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan Kecamatan	2 kali					
								Sosialisasi dan sinkronisasi kader komanan (inovasi pelayanan)	2 kali	Meningkatnya pemahaman terhadap inovasi pelayanan Kecamatan kepada kader dan masyarakat	2 kali					
								Pembuatan video pendek pelayanan	1 dokumen	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1 dokumen					
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan			Operasional pelayanan terkait non perijinan (pelayanan adminduk)	12 bulan	meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	36,666,000	37,765,980		Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kemantren	APBD
								Operasional pelayanan yang terkait kewenangan lainnya yang dilimpahkan	12 bulan	meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 bulan					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Gondomanan			PENTAS WJNC	1 kali	Tersalurkannya kreasi seni budaya wilayah	1 kali	310,835,000	320,160,000		Seksi Pemberdayaan Masyarakat	APBD
								PENTAS SENI	1 kali	Terlaksananya pentas seni budaya masyarakat	1 kali					
								RAKORD SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA	2 kali	Terlaksananya rakord budaya dan olah raga	2 kali					
								PENYULUHAN ODGJ	3 kali	Meningkatnya kesehatan remaja gangguan jiwa	3 kali					
								Pelatihan Seni	10 bulan	Meningkatnya kecintaan terhadap budaya dan seni	10 bulan					
								RAKORD PEMBINAAN LOKASI KEC. SEHAT DAN SEKOLAH SEHAT	3 kali	Terlaksananya rakord pembinaan lokasi kecamatan sehat	3 kali					
								LOMBA UKBM	1 kali	Terlaksananya lomba UKBM	35 orang					
								MONEV TPUKS	3 kali	Meningkatnya peran TPUKS	3 kali					
								LOMBA BUMIL	1 kali	Terlaksananya lomba BUMIL	1 kali					
								SENAM SEHAT WARGA	10 kali	Meningkatnya kesehatan masyarakat	10 kali					
								PENYULUHAN LANSIA SEHAT	40 orang	Lansia yang sehat	40 orang					
								MONEV KELUARGA BERMASALAH	25 orang	Menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga	25 orang 4 kali					
								SARASEHAN REMBUG MASALAH SOSIAL	60 orang	Terlaksananya rembug masalah sosial	60 orang					
								KOORDINASI TKSK, PSM	30 orang	Terjalinya koordinasi dalam megentaskan kemiskinan masyarakat	30 orang 4 kali					
								KKG PKK	1 kali	Terlaksananya KKG PKK	1 kali					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								LOMBA ADMINT POSYANDU	1 kali	Terlaksananya lomba admint posyandu	1 kali					
								SAMBANG ANAK KOS	4 kali	Terciptanya anak kos yang santun	4 kali					
								PENYULUHAN GURU TK	2 kali	Menambah pengetahuan guru tk	2 kali					
								RAKORD FORUM PAUD KEC.GM	4 kali	Terlaksananya rakord forum PAUD	4 kali					
								PENYULUHAN PENDIDIK PAUD	2 kali	Meningkatkan kapasitas pendidik PAUD	2 kali					
								LOMBA CIPTA MENU	1 kali	Terlaksananya lomba cipta menu	1 kali					
								SOSIALISASI PAAR DPCKS	90 orang	Terlaksananya sosialisasi PAAR DPCKS	90 orang					
								Honor Pelayanan Masyarakat	1 orang	Terlaksananya pemberian honor bagi pelayanan masyarakat	1 orang					
								RAKORD PKK KECAMATAN	12 kali	Terlaksananya rakord PKK Kecamatan	12 kali					
								Lomba cerdas cermat antar kader PKK RW	1 kali	Terlaksananya lomba antar kader PKK RW	1 kali					
								Evaluasi pemberdayaan kelurahan	4 kali	Meningkatnya keberdayaan masyarakat bidang sosbud dan seni masyarakat	4 kali					
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka swadaya murni	Rp 469.200.000,-					1,887,602,400	1,944,230,472	kecamatan		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,887,602,400	1,944,230,472	baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Prawirodirjan			Renovasi MCK Kampung Sayidan (Danakel)	4 lokasi	Ketersediaan MCK bagi masyarakat terpenuhi	4 lokasi	434,288,800	447,317,464	Lurah Prawirodirjan	APBD	
								Konblokisasi di Kampung Prawirodirjan dan Kampung Sayidan (Danakel)	500 m2	Perbaikan lantai RTH untuk area kuliner, area parkir dan showroom	500 m2					
								Pembuatan Tandon air dan jaringan air bersih di Kampung Prawirodirjan (Danakel)	1 lokasi	Ketersediaan air bersih dan sehat bagi masyarakat terpenuhi	1 lokasi					
								Jasa konsultan perencanaan	1 keg	Konsultan perencana	1 keg					
								Jasa konsultan pengawasan	1 keg	Konsultan pengawasan	1 keg					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Ngupasan			MCK Umum (Kampung Ratmakan)	1 rw	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 rw	325,891,800	335,668,554		Lurah Ngupasan	APBD	
							Pengecatan Gang (Kampung Ratmakan)	1 rw	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 rw						
							Pemeliharaan Jalan Konblok 9 (Kampung Kauman)	1 titik	Kelancaran akses jalan	1 titik						
							Rehab Pos Ronda (Kampung Ngupasan)	1 titik	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 titik						
							Rehab Pos Ronda (Kampung Kauman)	1 titik	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 titik						
							Renovasi Pintu Gerbang (Kampung Kauman)	1 unit	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 unit						
							Pelumpuran & Perbaikan SAH (Kampung Ngupasan)	1 titik	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 titik						
							Pemeliharaan PJU (Kampung Kauman, Ngupasan, Ratmakan dan Ketandan)	40 titik	Terpeliharanya Fasilitas Umum	40 titik						
							Konsultan perencana	1 keg	Terlaksananya perencanaan dengan baik	1 keg						
							Konsultan pengawas	1 keg	Terlaksananya pengawasannya dengan baik	1 keg						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Prawirodirjan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	161 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan	161 lembaga	703,135,600	724,229,668		Lurah Prawirodirjan	APBD	
							Pemilihan RT RW	79 lembaga	Peningkatan kapasitas lembaga RT RW	79 lembaga						
							Festival dolanan anak	300 orang	Pelestarian dan pengenalan permainan tradisional	300 orang						
							Pelatihan Tari	30 orang	Pengenalan dan Pelatihan tari tradisional	30 orang						
							Pelatihan budidaya pertanian perikanan	25 orang	Meningkatkan usaha masyarakat di bidang pertanian perikanan	25 orang						
							Festival kuliner dan gelar potensi gandeng gendong	100 orang	Promosi dan pengenalan usaha kuliner	100 orang						
							Fasilitator kelurahan	2 orang	Jasa Naban dan Tenaga Teknis Kelurahan Prawirodirjan	2 orang						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Ngupasan			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	67 lembaga	Koordinasi kelembagaan	67 lembaga	424,286,200	437,014,786		Lurah Ngupasan	APBD	

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Ngupasan	62 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Ngupasan Masa Bakti 2021-2024	62 lembaga					
								Pelatihan Budidaya Magot	20 orang	Meningkatkan sumber daya peternakan	20 orang					
								Pelatihan Lele Cendol Kelurahan	20 orang	Meningkatkan sumber daya peternakan	20 orang					
								Penyuluhan kerukunan & toleransi antar umat beragama	100 orang	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	100 orang					
								Fasilitator Dana Kelurahan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
								Jam belajar masyarakat	2 kali	Meningkatkan kualitas JBM	2 kali					
								Penyusunan rapor keluarga	2 kali	Meningkatkan kualitas pendataan	2 kali					
								Rembug kampung	2 kali	meningkatkan kesadaran untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	2 kali					
								Pelatihan Digital Marketing	20 orang	Meningkatkan potensi dan kualitas pemasaran produk lokal	20 orang					
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	160 kali					272,340,000	280,510,200			Kecamatan Gondomanan
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										118,000,000	121,540,000	baru		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kecamatan Gondomanan			Pemantauan wilayah	12 bulan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	12 bulan	118,000,000	121,540,000			Seksi Pemerintahan Trantib
								Jogobaran	7 hari	Keamanan dan ketertiban di libur hari raya idul fitri	7 hari					
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	34 buah	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalamantisipasi kebakaran ringan	34 buah					
								Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	225 orang	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	225 orang					
								Forum Pembauran Kebangsaan	225 orang	Terjalannya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	225 orang					
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										154,340,000	158,970,200	baru		

PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kecamatan Gondomanan			Penyuluhan satlinmas	40 orang	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	40 orang	154,340,000	158,970,200	Seksi Pemerintahan Trantib	APBD	
								Operasi Ketertiban Wilayah	12 bulan	Meningkatnya pelaksanaan perda	12 bulan					
								Sapaan anak kos	12 kali	Data rumah kos, pondokan dan homestay yang update dalam pelaksanaan perda	12 kali					
								Piket siaga bencana	10 hari	Penanggulangan bencana di wilayah	10 hari					
								PAM hari besar dan insidentil	65 kali	Keamanan dan ketertiban di hari besar dan kegiatan insidentil di wilayah	65 kali					
								Pelatihan SOP kebencanaan tingkat kecamatan	50 orang	Penanganan bencana sesuai SOP	50 orang					
								Sarasehan keamanan dan ketertiban wilayah	30 orang	Terlaksananya koordinasi tentang kamanan dan ketertiban di wilayah	30 orang					
								Penyediaan data potensi pelanggaran perda (pondokan, PKL, Hotel, homesatay,hotelvirtual berbasis masyarakat)	1 dokumen	Pencegahan pelanggaran terhadap perda	1 dokumen					
								Forum koordinasi muspika	12 bulan	Terjalannya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan	12 bulan					
Total												6,967,175,586	7,176,190,804			

Tabel 5.26 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					6,047,530,564	6,275,481,135		Mantri Anom	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										21,600,000	23,190,000	Lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	5,000,000	5,100,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	10,000,000	11,000,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD
								Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen							
								Penyusunan Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,500,000	2,600,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,800,000	4,180,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersedianya dokumen laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	300,000	310,000			
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,394,778,732	4,504,385,000	Lanjutan		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Gaji dan Tunjangan ASN	30 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,390,628,732	4,500,000,000			
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,100,000			
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	510,000			
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200,000	210,000			
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200,000	210,000			
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	150,000	165,000			
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200,000	220,000			
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200,000	220,000			
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	700,000	750,000			
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,631,151,832	1,747,906,135	Lanjutan		

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Materai	1350 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,300,000	6,930,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	97,440,000	98,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran rekening Air	12 bulan								
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan								
	X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Sewa meja	400 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,620,000	20,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Sewa tenda	12 unit								
								Sewa perlengkapan/peralatan	2 unit								
								Pengisian Tabung APAR	68 tabung								
								Sewa Kursi	120 unit								
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,000,000	4,200,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit								
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	2 unit								
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Belanja Jasa Orang Perorangan/Nabab/Tenaga Teknis	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	83,247,293	85,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Servis 3 kelurahan dan 1 kecamatan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	200,380,000	201,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Retribusi Kebersihan	12 bulan								
	X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan/komunikasi/studio	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,480,000	32,428,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Tersedianya Alat Tulis Kantor	55 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	68,990,301	75,889,300		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	41,405,600	45,546,160		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penggunaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor	175.300 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	14,791,575	15,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Bahan komputer dan printer	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,534,250	44,587,675		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	24 jenis							
								Bahan Kebersihan	5 jenis							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,646,294	27,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	194 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	96,870,000	106,557,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Meja rapat	2 unit	Tersedianya meja rapat	2 unit	240,812,519	264,893,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Kulkas	1 unit	Tersedianya kulkas	3 unit					
								Dispenser	4 buah	Tersedianya dispenser	10 buah					
								Sound system	3 unit	Tersedianya sound system	4 unit					
								Lemari arsip	4 buah	Tersedianya lemari arsip	4 buah					
								Komputer	5 unit	Tersedianya komputer	5 unit					
								Printer	5 unit	Tersedianya printer	5 unit					
								Sofa tamu	3 unit	Tersedianya sofa tamu	3 unit					
								Kursi susun	25 buah	Tersedianya kursi susun	150 buah					
								Gorden	100 m	Tersedianya gorden	100 m					
								Running text 2m	1 unit	Tersedianya running text 2m	1 unit					
								Proyektor	1 unit	Tersedianya proyektor	1 unit					
								Microphone TOA	1 unit	Tersedianya microphone TOA	1 unit					
								Meja rapat panjang	2 buah	Tersedianya meja rapat panjang	2 buah					
								TV 32 inch	1 buah	Tersedianya TV 32 inch	2 buah					
								Partisi/penyekat Pendopo Kel. KP	1 unit	Tersedianya partisi/penyekat Pendopo Kel. KP	1 unit					
								Kipas angin	4 unit	Tersedianya kipas angin	4 unit					
								Tempat sampah besar	1 unit	Tersedianya tempat sampah besar	1 unit					
	X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Mergangsaan	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	20,000,000	20,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	568,250,000	625,075,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman	4 unit							
								Jasa keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman	4 unit							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	69,584,000	70,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2 unit							
								Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 unit							
	X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Terpeliharanya mebeleur	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,800,000	5,800,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84					689,378,071	697,000,000		Mantri Anom	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	12 bulan	168,947,903	172,000,000	Baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024	279 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	279 lembaga	168,947,903	172,000,000		Seksi Pemerintahan (Jawatan Praja)	APBD
								Pengukuhan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024	279 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Mergangsan	279 lembaga					
								Workshop Perencanaan Pembangunan RT, RW, RK, dan LPMK	300 lembaga	Meningkatnya kapasitas pengurus RT, RW, RK, LPMK untuk melaksanakan tugasannya	300 lembaga					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya data profil kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan MG	4 dokumen						
								Penyusunan monografi kelurahan	3 dokumen	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	3 dokumen						
								Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan	4 dokumen	Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan	4 dokumen						
								Monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 dokumen	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	3 dokumen						
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										129,078,100	130,000,000	Lanjutan			
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Gelar produk UMKM	3 hari	Terpasarkannya produk lokal UMKM	3 hari	129,078,100	130,000,000		Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	APBD	
								Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional (UMK)	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional ala hotel	1 kali						
								Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS)	3 kali	Terselenggaranya Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS)	3 kali						
								Pelatihan Ecoprint (PKK)	1 kali	Meningkatnya kapasitas PKK dalam membuat ecoprint	1 kali						
								Pelatihan Budidaya Anggrek (Gapoktan)	1 kali	Meningkatnya kapasitas Gapoktan	1 kali						
								Pemeliharaan makam TPU Sasanalaya	12 bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan makam Sasanalaya	12 bulan						
								Penyusunan buku informasi pembangunan	1 dokumen	Tersusunnya buku informasi pembangunan	1 dokumen						
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										391,352,068	395,000,000	Lanjutan			
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsaan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya perizinan tingkat kecamatan	12 bulan	21,855,000	22,000,000		Seksi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD	
								Sosialisasi Pelayanan Publik	100 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	100 orang						

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sosialisasi Pelayanan Perizinan	100 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan Kecamatan	100 orang					
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan non perizinan	12 bulan	91,634,784	93,000,000		Seksi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD
								Sosialisasi Jogja Smart Service	100 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pelayanannya	100 orang					
								Sosialisasi PATEN	100 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan dan non perizinan yang diberikan Kecamatan	100 orang					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Mergangsan			Seni budaya (Pentas Seni Kecamatan, Karnaval Budaya, Wayang Jogja Night Carnival/WJNC)	3 jenis	Meningkatkan kreatifitas seni masyarakat	3 jenis	277,862,284	280,000,000		Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan Sosial)	APBD
								Pelatihan Manajemen Sekolah bagi Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI)	30 org	Meningkatkan kualifikasi, kompetensidan profesionalitas pengelola dan pengurus GOPTKI	30 org					
								Pentingnya Pendidikan Agama dan Karakter bagi Pemuda	180 orang	Meningkatkan kualitas mental dan spiritual bagi remaja	2 kali					
								Fasilitasi Lomba	3 jenis	Koordinasi persiapan lomba-lomba	3 kali					
								Workshop Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi	50 org	Menjadikan Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi	1 kali					
								Workshop Penyakit menular & Tidak menular	60 org	Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan ttg PTM dan PM	1 kali					
								Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan	1 lembaga	Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan	2 lembaga					
								Koordinasi Lembaga Tingkat Kecamatan	10 lembaga	Koordinasi pengurus Lembaga Tingkat Kecamatan	10 lembaga					
								Workshop Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	50 org	Meningkatkan kinerja PSM yang handal	1 kali					
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 1.000.500.000					2,937,348,000	2,965,000,000		Kalurahan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,937,348,000	2,965,000,000	Lanjutan		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Brontokusuman			Jasa Konsultansi Perencanaan Kel. BK	1 dokumen	Terencananya pembangunan wilyah Kel. Brontokusuman	1 dokumen	529,757,000	530,000,000		Lurah Brontokusuman	APBD
								Jasa Konsultansi Pengawasan Kel. BK	1 dokumen	Terawasinya pembangunan wilyah Kel. Brontokusuman	1 dokumen					
								Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kel. BK (Kampung Timuran, Brontokusuman, Karangajen, Karanganyar, Lowanu)	1.760 m	Terpeliharanya jalan-jalan di Kel. BK	1.760 m					
								Penerangan Jalan Umum Kel. BK (Kampung Karangajen)	190 titik	Jalan-jalan di Kel. BK menjadi terang	190 titik					
								Peningkatan sarana dan prasarana Fasum dan prasarana Fasum (biopori kampung Timuran, Brontokusuman, Karangajen, Karanganyar, Lowanu, Prawirotaman)	618 unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana Fasum	618 unit					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Keparakan			Jasa Konsultansi Perencanaan	1 dokumen	Memperlancar kegiatan	1 dokumen	380,350,716	385,000,000		Lurah Keparakan	APBD
								Jasa Konsultansi Pengawasan	1 dokumen	Memperlancar kegiatan	1 dokumen					
								Pemeliharaan Paving Block (Dipowinatan, Keparakan Kidul)	1039 m2	Terpeliharanya jalan kampung	1039 m2					
								Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (Keparakan Lor, Keparakan Kidul, Pujokusuman, Dipowinatan)	50 titik	Terpeliharanya Penerangan kampung	50 titik					
								Pemeliharaan SAH	400 m2	Memperlancar saluran air	400 m2					
								Pembuatan Gapura / Penanda Kampung Keparakan Kidul	1 lokasi	Petunjuk lokasi kampung	1 lokasi					
								Pemeliharaan konblok Kampung Bintaran (RT 11/RW 03)	292,14 m2	Terpeliharanya Jalan kampung	292,14 m2					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Wirogunan			Jasa konsultan Pengawasan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Konsultansi Pengawasan	1 dokumen	214,234,599	220,000,000		Lurah Wirogunan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemeliharaan Konblock Kampung Surokarsan (RT. 16/ RW.05 dan RT. 19 / RW. 06)	324,01 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	324,01 M2					
								Pemeliharaan Konblock Kampung Wirogunan (RT.33/RW. 10)	78,60 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	78,60 M2					
								Pemeliharaan Konblock Kampung Joyonegaran (RT.39 / RW. 12)	90 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	90 M2					
								Pemeliharaan Konblock Kampung Nyutran (RT. 65/ RW. 21)	96,60 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	96,60 M2					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Keparakan			Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan	5 lembaga	Terselenggaranya koordinasi dengan masyarakat	5 lembaga	484,228,784	480,000,000		Lurah Keparakan	APBD
								Koordinasi Lembaga kemasyarakatan lainnya (Karang Taruna, PSM, Komisi Lansia, Linmas, Kader KB, Panca Tertib/Pekerti, Kesi, RW Siaga)	7 lembaga	Terselenggaranya Koordinasi dengan lembaga masyarakat	5 lembaga					
								Pelatihan Produk olahan Tahu tempe dan pembuatan Sagon	30 orang	Meningkatkan ketrampilan masyarakat	30 orang					
								Pelatihan Laundry	30 orang	Menambah pengetahuan dan ketrampilan untuk buka usaha	30 orang					
								Workshop Kelurahan Siaga dan RW Siaga	2 Jenis	Mengikatkan koordinasi KESI dan RW Siaga	2 jenis					
								Gerakan Jumat bersih	12 kali	Meningkatkan kebersihan lingkungan	12 kali					
								Workshop GSI dan Parenting Bunda Cerdas	60 orang	Meningkatnya Pemahaman tentang Pola Asuh Anak	60 orang					
								Sarasehan Kampung Tangguh Bencana	50 orang	Kesiapsiagaan Bencana warga masyarakat	50 orang					
								Sosialisasi Penguatan Dasa Wisma	60 orang	Meningkatnya Keamanan Kampung	60 Orang					
								Pemilihan RT/RW Kelurahan	1 kali	Terpilihnya Pengurus RT/RW Kelurahan	1 kali					
								Pelatihan Pembuatan Busur Jemparingan	20 orang	Membudayakan olah raga tradisional	20 orang					
								Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan KP	12 bulan	Honorarium TT. Kel. KP	12 bulan					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Brontokusuman			Fasilitasi Kelembagaan Tingkat Kelurahan	5 jenis lembaga	Terselenggaranya Kelembagaan Tingkat Kelurahan	6 jenis lembaga	497,672,500	500,000,000		Lurah Brontokusuman	APBD
								Pelatihan Digital marketing	30 orang	Terselenggaranya Pelatihan Digital marketing	30 orang					
								Pelatihan Aneka Makanan	4 jenis	Terselenggaranya Pelatihan membuat snack basah	4 jenis					
								Koordinasi Lembaga Tingkat Kelurahan	5 jenis lembaga	Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan	5 jenis lembaga					
								Ngecprint bareng	100 orang	Terselenggaranya pelatihan dan sharing ecoprint	100 orang					
								Pelatihan Aneka Kerajinan	4 jenis	Terselenggaranya Pelatihan Aneka Kerajinan	4 jenis					
								Pelatihan Kampung Agro	25 orang	Terselenggaranya Pelatihan Kampung Agro	25 orang					
								Workshop Kampung Wisata	40 orang	Terselenggaranya Workshop Kampung Wisata	40 orang					
								Workshop Penyusunan Raport Keluarga	585 KK	Terselenggaranya Workshop Penyusunan Raport Keluarga	585 KK					
								Pemilihan RT RW	107 lembaga	Terselenggaranya pemilihan RT RW	107 lembaga					
								Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan BK	12 bulan	Honorarium TT. Kel. BK	12 bulan					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Wirogunan			Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat	7 jenis lembaga	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan	1 Paket	831,104,401	850,000,000		Lurah Wirogunan	APBD
								Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kelurahan	12 lembaga	Terselenggaranya koordinasi antar lembaga	12 lembaga					
								Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 Jenis	Menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan	3 Jenis					
								Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 Jenis	Menambah ketrampilan kaum difabel	2 Jenis					
								Pembinaan Anak dan Remaja	2 Jenis	Menambah wawasan untuk kaum remaja	2 Jenis					
								Pembinaan Lingkungan	1 Jenis	Terciptanya Kampung Ramah Anak	1 Jenis					
								Pelatihan Managemen Usaha	1 Jenis	Meningkatkan ketrampilan untuk para pemula dalam usaha	1 Jenis					
								Pelatihan Kuliner	1 Kali	Meningkatkan ketrampilan warga masyarakat	1 kali					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pembinaan Sosial Masyarakat	3 Jenis	Menambah pengetahuan warga masyarakat	3 Jenis						
								Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan WG	12 bulan	Honorarium TT. Kel. WG	12 bulan						
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda		100			110,220,097	115,000,000			Seksi Ketentraman dan Keterlibatan (Jawatan Keamanan)	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Dukungan kondisi wilayah yang tertib	100%	51,595,097	55,000,000	Lanjutan			
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Mergangsan		Pelatihan PPGD dan lalu lintas untuk Anggota Linmas Kecamatan	80 orang	Kesigapan Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	80 orang	51,595,097	55,000,000			Seksi Ketentraman dan Keterlibatan (Jawatan Keamanan)	
								Penyuluhan Ketertiban dan Kesehatan PKL	40 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	40 orang						
								Sarasehan Kerukunan antar bangsa untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	40 orang	Meningkatkan kerukunan dalam bermasyarakat	40 orang						
								Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan untuk Forum Kewaspadaan Dini Masy. (FKDM)	40 orang	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat	40 orang						
								Pelatihan Kebencanaan untuk Mergangsan Rescue Community (MRC)	40 orang	Meningkatkan kecepatan informasi kegawat darurat	40 orang						
								Sapaan PKL	120 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	120 orang						
								Workshop Pencegahan Eksploitasi dan Kejahatan di Kalangan Remaja	40 orang	Meningkatkan Pencegahan Eksploitasi dan Kejahatan di Kalangan Remaja Kec. MG	40 orang						
								Koordinasi penanganan permasalahan ketertiban umum	3 jenis	Rakor keamanan dan ketertiban di masyarakat	3 jenis						
								Sambang kampung	120 orang	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat	120 orang						
								Workshop Pencegahan Kejahatan dan Tindak Kriminal Pasca Pandemi di Masyarakat	40 orang	Meningkatkan Pencegahan Kejahatan dan Tindak Kriminal Pasca Pandemi di Masyarakat	40 orang						

PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										58,625,000	60,000,000	Lanjutan		
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Mergangsaan			Frekuensi Pengamanan masyarakat	17 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	100%	58,625,000	60,000,000		Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD
								Operasi ketertiban masyarakat	12 bulan	Meningkatnya ketertiban dan keteraturan masyarakat di wilayah	12 bulan					
								Pengadaan peralatan operasional	4 jenis	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	4 Jenis					
								Koordinasi Forkopimka	12 bulan	Terjalinnnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan					
Total												9,784,476,732	10,052,481,135			

Tabel 5.27 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					9,077,961,270	9,350,300,107		Mantri Anom	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8,200,000	8,446,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	2,000,000	2,060,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	3,000,000	3,090,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	1,600,000	1,648,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo			Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	1,600,000	1,648,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan						Dokumen pelaksanaan hasil Renja, Renstra	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	7,177,905,640	7,393,242,809	Baru		

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100%	7,133,420,640	7,347,423,259		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang								
								Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	50 orang								
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100%	42,885,000	44,171,550		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
								BA Rekonsiliasi Barang dan Realisasi Anggaran	12 dokumen								
								Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan	12 bulan								
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100%	800,000	824,000		Bendahara Pengeluaran	APBD	
								Laporan Prognosis	dokumen								
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100%	800,000	824,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
								Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,891,855,630	1,948,611,298	Baru			
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola persuratan kecamatan	100%	48,365,000	49,815,950		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Perangko, materi/leges dan benda pos	1930 lembar								
								Pengelolaan Administrasi Umum dan Persuratan	12 bulan								
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	129,600,000	133,488,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran Listrik	12 bulan								
								Pembayaran PDAM	12 bulan								
								Pembayaran Telephone dan bantuan pulsa	12 bulan								
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	4,950,000	5,098,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pajak kendaraan dinas roda 2	24 unit								
								Pajak kendaraan operasional roda 3	4 unit								
								Pajak kendaraan dinas roda 4	1 unit								

RPJMD 2017-2022	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	356,490,000	367,184,700		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa cleaning servis kecamatan	12 bulan							
								Jasa tenaga teknis kebersihan kelurahan	12 bulan							
								Retribusi dan pengelolaan sampah	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	52,400,000	53,972,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan printer	21 unit							
								Pemeliharaan AC	10 unit							
								Pemeliharaan mesin tik	9 unit							
								Pemeliharaan komputer	28 unit							
								Pemeliharaan laptop	9 unit							
								Pemeliharaan LCD	8 unit							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	71,405,100	73,547,253		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Tersedianya alat tulis kantor kecamatan dan kelurahan	25 jenis							
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	76,680,000	78,980,400		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan berkas administrasi kantor	295.000 lembar							
								Jilid dokumen Cetak kardus arsip	640 dokumen buah							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	5,999,000	6,178,970		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Peralatan listrik kecamatan dan kelurahan	6 jenis							
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	99,860,000	102,855,800		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bahan komputer dan printer	4 jenis							
								Alat perlengkapan kantor, kerja dan rumah tangga	7 jenis							
								Alat kesehatan	8 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	31,955,530	32,914,195		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17 jenis							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	229,725,000	236,616,750		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Makanan dan minuman harian umum pelayanan masyarakat	4 jenis							
								Makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi	13 jenis							
	X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	11,250,000	11,587,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pengisian tabung APAR	50 unit							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	693,500,000	714,305,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa keamanan kantor kecamatan dan kelurahan	12 bulan							
								Pemeliharaan gedung kantor kecamatan dan kelurahan	4 unit							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	72,176,000	74,341,280		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggantian suku cadang kendaraan dinas dan operasional	29 unit							
								BBM kendaraan dinas dan operasional	29 unit							
								Jasa servis kendaraan dinas dan operasional	29 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	7,500,000	7,725,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan taman kantor kecamatan dan kelurahan	8 unit							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82					833,943,300	858,961,599		Mantri Pamong Praja	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										211,685,000	218,035,550	Baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan kecamatan	100%	211,685,000	218,035,550		Jawatan Praja	APBD
								Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	8 dokumen							
								Sosialisasi Pemilihan pengurus RT dan RW	430 orang							
								Pengukuhan pengurus RT dan RW	430 orang							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyusunan Monografi	1 dokumen							
								Penyusunan Profil	dokumen							
								Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	11 kali							
								Evaluasi Pembangunan Kelurahan	1 dokumen							
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										231,849,300	238,804,779	Baru		
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan ekonomi melalui potensi wilayah	100%	231,849,300	238,804,779		Jawatan Kemakmuran	APBD
								Workshop Pengelolaan Pondokan	300 orang							
								Koordinasi Program pembinaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan dan pembangunan wilayah	6 program							
								Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi untuk 2 kelurahan Giwangan dan Sorosutan	1 dokumen							
								Evaluasi pembangunan fisik dan CSR di luarurahan	1 dokumen							
								Workshop hyginitas produk makanan dan peningkatan pendapatan pedagang Kaki Lima	300 orang							
								Gelar Potensi UMKM dan Gapoktan	28 stand							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										390,409,000	402,121,270	Baru		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pelayanan publik kecamatan	100%	35,245,000	36,302,350		Jawatan Umum	APBD
								Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan							
								Diseminasi Informasi dan Pelayanan Perizinan Kecamatan	90 orang							

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pelimpahan kewenangan	100%	58,727,000	60,488,810		Jawatan Umum	APBD	
								Diseminasi informasi produk Pelayanan Kecamatan	90 orang								
								Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	12 bulan								
								Cetak publikasi informasi pelayanan PATEN	500 lembar								
								Koordinasi Penyelesaian Pengaduan dan Laporan Masyarakat	10 kali								
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan kelancaran terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah	100%	296,437,000	305,330,110		Jawatan Sosial	APBD	
								Workshop Program Pengembangan Pariwisata Umbulharjo Kec Umbulharjo	30 orang								
								Koordinasi Kegiatan Lembaga/Kelompok Masyarakat Kec Umbulharjo	20 unsur kelompok masyarakat								
								Monitoring dan Evaluasi Program Kecamatan Sehat	4 kali								
								Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kecamatan	50 orang								
								Sosialisasi Program Pusaka Sakinah Kecamatan (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)	50 orang								
								Penyuluhan Pola Hidup Sehat dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	50 orang								
								Sarasehan Pola Hidup Sehat dan Bahagia Lansia Kecamatan	50 orang								
								Lomba KKG PKK, KB dan Bidang Kesehatan	300 orang								
								Gebyar PAUD	300 orang								
								Fasilitasi Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya	1 kelurahan								
								Fasilitasi Koordinasi Lomba	5 jenis lomba								

RPJMD 2017-2022	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sarasehan Paguyuban Macapat Kecamatan	80 orang							
								Parade Kesenian HUT Kota Jogja Kecamatan Umbulharjo	200 orang							
								Pawai Budaya WJNC Kecamatan Umbulharjo	200 orang							
								Fasilitasi Lembaga masyarakat Kecamatan (PKK)	4 bulan							
								Koordinasi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	1.508 KK miskin							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 1.230.243.000					6,026,747,570	6,207,549,997		Mantri Pamong Praja	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										6,026,747,570	6,207,549,997	Baru		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Tahunan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	238,413,000	245,565,390		Lurah Tahunan	APBD
								Jasa Konsultan Perencana pemeliharaan dan peningkatan Jalan Kelurahan Tahunan	1 dokumen							
								Sosialisasi Pembangunan sarpras fasum di wilayah Kelurahan Tahunan	100 orang							
								Jasa Konsultan Pengawas pemeliharaan dan peningkatan Jalan Kelurahan Tahunan	1 dokumen							
								Peningkatan Jalan Konblok 3 Kampung Tahunan, Celeban, dan Tempel Wirogunan	1.622 meter persegi							
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Giwangan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	250,550,000	258,066,500		Lurah Giwangan	APBD
								Pembangunan gapura penanda kampung Taqwa Kampung Mrican	1 unit							

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pembuatan pergola penyangga tanaman anggur Kampung Mendungan	3 unit								
								Jasa Konsultan Pengawas kegiatan pembangunan Sarpras Fasum Kelurahan Glwangan	1 dokumen								
								Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan Tersebar Kampung Giwangan dan Ponggalan	30 titik								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Semaki					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	388,400,000	400,052,000		Lurah Semaki	APBD	
								Peningkatan jalan konblok Kampung Semaki Kulon	600 meter persegi								
								Pembuatan taman fasilitas umum/publik Kampung Semaki Gedhe	10 meter persegi								
								Jasa Konsultan Perencana pemeliharaan dan pembangunan Jalan, Sarpras Fasum Kelurahan Semaki	2 dokumen								
								Jasa konsultan pengawas pemeliharaan dan pembangunan Jalan, sarpras fasum Kelurahan Semaki	2 dokumen								
								Sosialisasi kegiatan pembangunan sarpras fasum Kelurahan Semaki	100 orang								
								Pengadaan fasilitas Jodang	3 unit								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Muja-Muju					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah		393,150,000	404,944,500		Lurah Muja-Muju	APBD	
								Pemeliharaan dan Peningkatan jalan konblok Kampung Miliran dan Muja-Muju	800 meter persegi								
								Pemeliharaan Balai RW 04 Kampung Miliran	1 unit								
								Pengadaan kaca cembung Kampung Miliran, Muja-Muju dan Balarejo	6 unit								

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Jasa konsultan Perencana Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju	2 dokumen								
								Jasa konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju	2 dokumen								
								Sosialisasi pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju	270 orang								
								Pemeliharaan dan Peningkatan Saluran Air Hujan Kampung Miliran, Muja-Muju, dan Balairejo	800 meter persegi								
								Pemeliharaan PJU	55 titik								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat		Kelurahan Warungboto				Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	493,509,270	508,314,548		Lurah Warungboto	APBD	
								Jasa konsultan perencana pembangunan dan pemeliharaan jalan Kelurahan Warungboto	1 dokumen								
								Jasa konsultan perencana pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Warungboto	1 dokumen								
								Sosialisasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, sarpras fasum Kelurahan Warungboto	100 orang								
								Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok Kelurahan Warungboto	1.389 meter persegi								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat		Kelurahan Sorosutan				Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	406,651,500	418,851,045		Lurah Sorosutan	APBD	
								Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok 2 Kampung Nitikan dan Sorosutan	505 meter persegi								

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pembangunan Sumur peresapan air hujan Kelurahan Sorosutan 2 Kampung Nitikan dan Sorosutan	70 titik							
								Jasa konsultan perencana pemeliharaan jalan, dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan	2 dokumen							
								Jasa konsultan pengawas pemeliharaan jalan, dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan	2 dokumen							
								Pelumpuran dan normalisasi SAH	200 meter kubik							
								Pembuatan tempat cuci tangan Fasum	3 unit							
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Pandeyan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	327.004,000	336.814,120	Lurah Pandeyan	APBD	
								Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok 2 kampung Gambiran dan Pandeyan	1.586 meter persegi							
								Pemeliharaan tutup saluran air hujan 2 kampung Gambiran dan Pandeyan	280 meter persegi							
								Pembangunan sumur peresapan air hujan dan biopori jumbo 2 kampung Gambiran dan Pandeyan	21 titik							
								Jasa konsultan perencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan	2 dokumen							
								Jasa konsultan pengawas kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan	2 dokumen							
								Sosialisasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan	240 orang							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Tahunan					Dukungan terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	597,692,000	615,622,760	Lurah Tahunan	APBD	
								Pelatihan kesenian tari, karawitan dan kethoprak Kelurahan Tahunan	48 orang							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan pemanfaatan lahan sempit dengan budidaya tanaman toga dan sayur Kelurahan Tahunan	48 orang							
								Pelatihan ketrampilan batik ecoprint Kelurahan Tahunan	24 orang							
								Pelatihan batik tulis pewarnaan bahan alami Kelurahan Tahunan	48 orang							
								Pelatihan pembuatan lorong sayur Kelurahan Tahunan	24 orang							
								Sosialisasi tentang Ketahanan Keluarga dan Perkawinan Kelurahan Tahunan	56 orang							
								Merti Dusun Kelurahan Tahunan	300 orang							
								Festival Apem Kelurahan Tahunan	200 orang							
								Workshop Generasi Muda Karangtaruna Waspada Klithih Kelurahan Tahunan	50 orang							
								Workshop Pengentasan Kemiskinan Kelurahan Tahunan	30 orang							
								Gebyar Jumpitan, Seni Budaya dan Potensi UMKM Kelurahan Tahunan	300 orang							
								Pelatihan Budidaya tanaman anggrek langka Kelurahan Tahunan	30 orang							
								GERMAS dan Senam Sehat Kelurahan Tahunan	100 orang							
								Fasilitasi kegiatan kordinasi kelompok masyarakat Kelurahan Tahunan	20 kelompok							
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahunan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	65 lembaga							
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan	12 bulan							
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Tahunan	68 lembaga							
								Pelatihan kuliner tradisional Kelurahan Tahunan	24 orang							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Giwangan					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100%	624,648,000	643,387,440		Lurah Giwangan	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Giwangan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	60 lembaga								
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan	12 bulan								
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Giwangan	57 lembaga								
								Pelatihan pemanfaatan lahan melalui budidaya tanaman sayur	45 orang								
								Koordinasi kegiatan kelompok dan lembaga masyarakat	12 kelompok								
								Gelar adat tradisi Sadranan	700 orang								
								Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana	90 orang								
								Pelatihan Marketing online program gendheng gendhong	30 orang								
								Pelatihan Budidaya ikan lele	30 orang								
								Pelatihan pengelolaan pariwisata	30 orang								
								Gelar Potensi UMKM, seni dan budaya Kelurahan Giwangan	200 orang								
								Monitoring dan Evaluasi SIM Posyandu Kelurahan Giwangan	45 orang								
								Literasi Kampung Baca Giwangan	200 orang								
								Pelatihan pembuatan aneka abon	20 orang								
								Sarasehan Pola Asuh Anak dalam Keluarga	50 orang								
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Semaki					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	399,595,000	411,582,850		Lurah Semaki	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan Semaki (LPMK, PKK, Kampung, RT/RW)	55 lembaga								

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Jasa Fasilitator pemberdayaan masyarakat Kelurahan Semaki	12 bulan							
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Semaki	52 lembaga							
								Koordinasi kelompok masyarakat	20 kelompok							
								Festival dan lomba kesemarakan Hari Raya Gelar adat tradisi Sadranan	300 orang							
								Lomba Kamling, kebersihan lingkungan dan kampung hijau Kelurahan Semaki	3 kampung							
								Lomba administrasi PKK RW Kelurahan Semaki	13 RW							
								Workshop Pencegahan Stunting Kelurahan Semaki	30 orang							
								Workshop Warga Peduli Aids (WPA) Kelurahan Semaki	30 orang							
								Gebyar Jumantik Kelurahan Semaki	60 orang							
								Pelatihan pengolahan dan pemanfaatan sampah daur ulang	30 orang							
								Pelatihan kuliner pembuatan dan pengemasan gudeg kering	30 orang							
								Pelatihan kuliner olahan makanan tradisional Kelurahan Semaki	30 orang							
								Pelatihan ketrampilan sablon Kelurahan Semaki	30 orang							
								Pelatihan Ketrampilan batik jumpitan Kelurahan Semaki	30 orang							
								Sapaan Anak Kos	30 orang							
								Pembinaan kelompok kesenian angklung	15 orang							
								FGD Pembangunan Karakter Penduduk Rentan/Miskin	130 orang							
								Pelatihan Budidya Pertanian Lahan Sempit Lorong Sayur	45 orang							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Muja-Muju					Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan sosial, budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	501,725,000	516,776,750	Lurah Muja-Muju	APBD	

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muja-Muju (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	70 lembaga								
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Muja-Muju	67 lembaga								
								Pembinaan Program Gandeng-Gendong UMKM	50 orang								
								Sarasehan PKK RT dan RW	67 kelompok								
								Senam Sehat Kampung	900 orang								
								Pelatihan pemasaran berbasis online Kelurahan Muja-Muju	40 orang								
								Profil promosi wisata Gajah Wong Kelurahan Muja-Muju	1 dokumentasi								
								Sapaan Anak Kost	90 orang								
								Pelatihan budidaya tanaman anggrek Kelurahan Muja-Muju	40 orang								
								Pelatihan olahan makan berbahan ikan Kelurahan Muja-Muju	30 orang								
								Pelatihan kerajinan batik Kelurahan Muja-Muju	40 orang								
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju	12 bulan								
								Kegiatan koordinasi kelompok dan Lembaga masyarakat Kelurahan Muja-Muju	20 kelompok								
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Pandeyan					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100%	575,268,000	592,526,040		Lurah Pandeyan	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandeyan	68 lembaga								
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Pandeyan	65 lembaga								
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan	12 bulan								
								Koordinasi kelompok masyarakat	20 kelompok								
								Pelatihan budidaya jambu air	25 orang								
								Pelatihan pembuatan manisan empon-empon	25 orang								
								Pelatihan industri kreatif era digital	40 orang								
								Pelatihan budidaya tanaman buah anggur hijau	25 orang								

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Koordinasi Jam Belajar Masyarakat berbasis RW	13 RW							
								Gelar produk dan potensi UMKM	135 orang							
								Pelatihan pengolahan daur ulang sampah organik	30 orang							
								Pelatihan pembuatan kripik tempe	25 orang							
								Pelatihan Budidaya lele cendol	32 orang							
								Pelatihan Budidaya tanaman sayur di perkotaan	25 orang							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Warungboto					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100%	322,790,000	332,473,700	Lurah Warungboto	APBD	
								Jasa fasilitator pemberdayaan masyarakat Kelurahan Warungboto	12 bulan							
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Warungboto	47 lembaga							
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Warungboto (RT, RW, Kampung, LPMK, PKK)	50 lembaga							
								Merti TUK UMBUL	200 orang							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Sorosutan					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100%	507,351,800	522,572,354	Lurah Sorosutan	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Kamasyarakatan Kelurahan Sorosutan (LPMK, PKK, Kampung, RT, RW)	91 lembaga							
								Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan							
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Sorosutan	88 lembaga							
								Pelatihan kuliner olahan ikan lele	30 orang							
								Pelatihan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas Linmas Kelurahan Sorosutan	40 orang							
								Pelatihan tanggap darurat kebencanaan bagi KTB	50 orang							
								Sosialisasi Program Taman Sampah Kelurahan Sorosutan	50 orang							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan kuliner membuat kue tradisional	30 orang							
								Pelatihan budidaya jamur tiram	30 orang							
								Workshop sinergisitas program Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia)	70 orang							
								Sosialisasi dan pembentukan Kampung Literasi	40 orang							
								Sosialisasi Pembangunan Wilayah Kelurahan	40 orang							
								Pelatihan adat budaya dan basa Jawa	40 orang							
								Kegiatan koordinasi kelompok dan lembaga masyarakat	20 lembaga							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	144					167,735,000	172,767,050		Mantri Pamong Praja	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								Dukungan terhadap kelancaran tata kelola ketertiban umum	100%	113,935,000	117,353,050	Baru		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kecamatan Umbulharjo							113,935,000	117,353,050		Jawatan Keamanan	APBD
								Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	6 bulan							
								Forum Pembauran Kebangsaan	6 bulan							
								Koordinasi dan monitor keamanan wilayah	88 kali							
								Pembinaan Program Kampung	3 program kampung							
								Koordinasi Pasca Bencana	6 kali							
								Penyuluhan Linmas	anggota							
								Upacara HUT RI	1 kali							
								Koordinasi dan PAM hari Raya	4 hari Raya							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										53,800,000	55,414,000	Baru		

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Umbulharjo					Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Forkompinca		53,800,000	55,414,000		Jawatan Keamanan	APBD
								Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan Sambang Kampung Dialog Warga Forkompinca	12 bulan							
								Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	840 orang							
								Dialog antar komponen masyarakat tentang Kedaulatan NKRI	12 bulan							
									100 orang							
								Total				16,106,387,140	16,589,578,753			

Tabel 5.28 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,530,075,096	5,783,680,818		Mantri Anom	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,200,000	7,416,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,800,000	1,854,000				Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede	Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,800,000	1,854,000				Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
						Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen									
						Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen									
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000				Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen									
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000				Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000				Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,193,524,096	4,319,329,818	Baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Gaji dan Tunjangan ASN	29 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,186,324,096	4,311,913,818		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Kotagede			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,236,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,800,000	1,854,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,236,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,329,351,000	1,456,935,000	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Materai	1080 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,680,000	4,820,400		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Pembayaran rekening telepon	12 bulan***	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	72,780,000	74,963,400		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pembayaran rekening Air	12 bulan***								
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan***								
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak Roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,160,000	3,254,800		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran Pajak Roda 3	2 unit								
								Pembayaran Pajak Roda 4	1 unit								
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,383,000	166,377,960		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	83,480,000	85,984,400		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Retribusi Kebersihan	12 Bulan								
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Alat Tulis Kantor	64 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	36,185,000	37,270,550		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Barang cetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	49,400,000	50,882,000		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Penggandaan surat-surat/dokumen	170.000 lembar								
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	18,410,000	18,962,300		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Bahan komputer	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	390,216,000	401,922,480		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Bahan Kebersihan	17 jenis								
								Belanja Modal Pengadaan Sepeda	2 unit								
								Belanja Modal Pengadaan Pointer	3 unit								
								Belanja Modal Pengadaan Brankas	1 unit								
								Belanja Modal Pengadaan TV Flat	2 unit								
								Belanja Modal Pengadaan Genset	3 unit								
								Belanja Modal Pengadaan Komputer	6 unit								
								Belanja Modal Pengadaan Laptop	2 unit								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Belanja Modal Pengadaan Printer	5 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Scanner	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Sofa	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Gordena	81 m2							
								Belanja Modal Pengadaan Rak Surat Kabar	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Kamera DSLR	3 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Handycam	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan LCD	2 unit							
								Belanja Modal Pengadaan CCTV	2 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie	1 unit							
								Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	1 unit							
								sewa tenda	8 unit							
								sewa sound sistem	4 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	17,200,000	17,716,000		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Makan Minum Rapat	6379 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	114,012,000	117,432,360		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	204,815,000	210,959,450		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								PBB Rumah Dinas	1 tahun							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	125,140,000	91,814,200		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Roda 3	2 unit							
								Roda 4	1 unit							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	180 kali 18 orang							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor Kecamatan Kotagede dan Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan dan Rumah Dinas Camat.	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	155,750,000	160,422,500		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan Taman	12 Bulan							
								Jasa keamanan	12 Bulan							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Pemeliharaan Komputer	22 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,740,000	14,152,200		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan AC Split	14 unit							
								Pemeliharaan Mesin Ketik	5 unit							
								Pemeliharaan Mebelair	8 unit							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	89,90					735,695,500	757,766,365		Mantri Pamong Praja	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										206,258,000	212,445,740	Baru		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	2 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	2 Lembaga	206,258,000	212,445,740		Jawatan Praja	APBD
								Penguohan RT dan RW Se-Kemantren Kotagede	2 Lembaga	Terlaksananya penguohan secara formal pengurus RT/RW se-Kemantren Kotagede	2 lembaga					
								Rapat Koordinasi RT RW se Kemantren Kotagede	360 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	360 orang					
								Rapat koordinasi Pengurus Kampung se Kemantren Kotagede	300 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	300 orang					
								Lomba Gapura dalam Rangka HUT RI	40 RW	Terselenggaranya Lomba Gapura dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	40 RW					
								Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede	1 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kemantren Kotagede	1 Dokumen					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan	3 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan	3 Dokumen						
								Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan	3 Dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan Kotagede	3 Dokumen						
								Workshop Penyusunan Dana Kelurahan	80 orang	Tertib Administrasi untuk Pertanggung Jawaban Dana Kelurahan	80 orang						
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali						
								Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali						
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										121,737,000	125,389,110	Baru			
	7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Dokumen Inmen Kemantren Kotagede	2 dokumen	Dokumen Inmen Kecamatan Kotagede	2 dokumen	121,737,000	125,389,110	Jawatan Kemakmuran	APBD		
								Seminar Daya Saing Usaha Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecamatan	60 orang						
								workshop pemanfaatan hatinya PKK Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatnya kelembagaan	60 orang						
								sosialisasi menu B2SA Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatkan kreatifitas masy dlm mengolah menu makan	60 orang						
								Pelatihan Batik Sibori Kemantren Kotagede	65 orang	Meningkatkan keterampilan Membuatik masyarakat	65 orang						
								Workshop Bank Sampah Kemantren Kotagede	60 orang	Memberdayakan Bank Sampah	60 orang						
								Lomba Cipta menu B2SA Kemantren Kotagede	1 kali	Meningkatkan kreatifitas masy dlm mengolah menu makan	1 kali						
								Penguatan Kelembagaan UP2K Kemantren Kotagede	75 orang	Meningkatkan Pengetahuan	75 orang						
								Pelatihan Daur ulang Sampah Kemantren Kotagede	75 orang	Pengolahan Sampah menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali	75 orang						
								Gebyar UMKM Kemantren Kotagede	57 UMKM	Meningkatnya Potensi UMKM Kecamatan Kotagede	57 UMKM						

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Workshop Pemasaran online Kemantren Kotagede	60 orang	Memberikan Pengetahuan bagaimana memasarkan produk secara Online	60 orang					
								Dokumen Perencanaan Wilayah Terintegrasi	1 dokumen	Dokumen Perencanaan Wilayah Terintegrasi	1 dokumen					
								Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	1 dokumen	Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan terevaluasi	1 dokumen					
								Mapping Potensi Kemantren Kotagede	1 dokumen	Pengembangan Potensi Wilayah Kemantren Kotagede	1 dokumen					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										407,700,500	419,931,515	Baru		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Kotagede			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	100%	1,200,000	618,000		Jawatan Umum	APBD
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kemantren Kotagede			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	100%	108,842,000	112,725,260		Jawatan Umum	APBD
								Pelatihan Aplikasi si Warga	46 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendaftarannya	46 orang					
								Buletin Warta Kotagede	6 kali	Warga masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan Kemantren Kotagede	6 kali					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kemantren Kotagede			Operasional TP PKK Kemantren Kotagede	11 Kali	Terjalinnnya koordinasi kelembagaan	60 orang	297,658,500	306,588,255		Jawatan Sosial	APBD
								Workshop Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatnya Kapasitas Kader PKK Kecamatan Kotagede	60 orang					
								Fasilitasi Lomba-lomba Kemantren Kotagede	4 lomba	Tersuportnya kegiatan lomba-lomba	4 lomba					
								Pelatihan Paduan Suara Kemantren Kotagede	40 orang	Meningkatkan Kemampuan Bernyanyi dalam Paduan Suara	40 orang					
								Workshop PAAR dan PATBM Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatnya Pengetahuan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja	60 orang					
								Workshop PUSPAGA Kemantren Kotagede	72 orang	Meningkatnya perlindungan keluarga terhadap kekerasan	72 orang					
								Gebyar Potensi PAUD Kemantren Kotagede	250 orang	Memberikan Ruang Untuk Anak PAUD menunjukkan kreatifitasnya	250 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Sosialisasi STBM Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatnya pengetahuan tentang Sanitasi dan Hidup Higienis	60 orang					
								Workshop Asuhan Toga Mandiri Kemantren Kotagede	60 orang	Menghimbau masyarakat untuk menanam tanaman Toga	60 orang					
								Workshop SIM Posyandu Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatkan Pengetahuan tentang SIM Posyandu	60 orang					
								Roadshow Posyandu Kemantren Kotagede	13 kali	Memonitoring Kegiatan Posyandu	25 orang					
								Gelar Potensi Lansia Kemantren Kotagede	250 orang	Meningkatkan kualitas kesehatan Lansia dan memberi ruang berekspresi	250 orang					
								Workshop TP UKS Kemantren Kotagede	50 orang	Menambah Pengetahuan bagi Tim Penggerak UKS se Kecamatan Kotagede	50 orang					
								Fasilitasi Forum TKPK Kemantren Kotagede	1 kali	Meningkatkan Pengetahuan bagi Forum TKPK Kecamatan	1 kali					
								Workshop Macapat Bagi Pelajar Kemantren Kotagede	35 orang	Pelestarian kesenian Macapat bagi Pelajar	35 orang					
								Workshop Kelembagaan Forum Kec. Inklusi Kemantren Kotagede	40 orang	Meningkatkan Pengetahuan dan Koordinasi Forum Kecamatan Inklusi	40 orang					
								Workshop Pranikah bagi Pemuda se Kemantren Kotagede	45 orang	Menambah Pengetahuan Generasi Muda	45 orang					
								Workshop PKADD Kemantren Kotagede	75 orang	Meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri Difabel maupun keluarganya	75 orang					
								Gebyar TK Kemantren Kotagede	250 orang	Memberikan Ruang Untuk Anak TK menunjukkan kreatifitasnya	250 orang					
								Wayang Jogja Night Carnival Kemantren Kotagede	60 orang	Tersalurkannya kreasi wilayah	60 orang					
								Gelar Potensi KMB #9 Kemantren Kotagede	5 kategori	Memunculkan Potensi dan Bakat Masyarakat	800 orang					
								Festival Olahraga Tradisional Kemantren Kotagede	150 orang	Melestarikan Olahraga Tradisional	150 orang					
								Pelatihan instruktur senam baku Indonesia Kemantren Kotagede	40 orang	Menambah Pengetahuan Instruktur Senam	40 orang					
								Workshop dan sarasehan Kader Terpadu Kemantren Kotagede	40 orang	Meningkatkan Pengetahuan dan Koordinasi yang baik dari Kader	40 orang					
								Workshop Public Speaking Kemantren Kotagede	35 orang	Meningkatkan Keterampilan dan Keberanian Berbicara di depan Umum	35 orang					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Workshop Parenting Etika dan norma Masyarakat Kemantren Kotagede	72 orang	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak usia dini	72 orang						
								Rakor Pemberdayaan Kemantren Kotagede	20 kali	Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan	20 kali						
								Evaluasi Pemberdayaan kelurahan	1 dokumen	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan	1 dokumen						
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				angka swadaya murni	2.940.000.000					2.715,180,000	2.671,851,930		Mantri Pamong Praja		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2.715,180,000	2.671,851,930	Baru			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan		Keberdayaan masyarakat meningkat			Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede		Perbaikan Konblok/Paving kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	400 m2	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	400 m2	417,000,000	429,510,000	Lurah Rejowinangun	APBD
										Pegangan Tangga Besi ke IPAL Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	1 unit	memberikan keamanan	1 unit				
										Biopori Jumbo kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	40 unit	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	40 unit				
										Pemeliharaan PJU kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	52 titik	Meningkatkan keamanan dan penerangan jalan	52 titik				
										Cermin Tikungan kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	8 unit	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas	8 unit				

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen	Dukungan kelancaran Perencanaan kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen					
								Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen	Dukungan kelancaran Pengawasan kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen					
								Revitalisasi Situs Prasasti Kuno di Kampung Gedongkuning Kelurahan Rejowinangun	1 kampung	Pelestarian Situs bersejarah di wilayah Rejowinangun	1 kampung					
								Normalisasi saluran pembuangan drainase di Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun	1 kampung	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	1 kampung					
								Pelumpuran SAH Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun	20 m2	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	20 m2					
								Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	12 unit	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	12 unit					
								Pemugaran Gapura Kampung Rejowinangun dan Kampung Gedongkuning Kelurahan Rejowinangun	2 kampung	Memperindah pintu masuk/gapura kampung	2 kampung					
								Rambu Penutup Jalan Kampung Gedongkuning Kelurahan Rejowinangun	13 Unit	meningkatkan keamanan kampung	13 Unit					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede			Perbaikan Konblok/Paving Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgedu Kelurahan Prenggan	792,552 m2	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	792 m2	472,978,000	487,025,200	Lurah Prenggan	APBD	
								Pelumpuran SAH Kampung Tinalan, dan Kampung Prenggan Kelurahan Prenggan	275,625 m	Genangan air hujan cepat kering, tidak ada genangan air hujan	274,25 m					
								Pembuatan SPAH kampung Tinalan, dan Kampung Prenggan Kelurahan Prenggan	10 titik	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	10 titik					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Penhijauan dan Tamanisasi Kampung Tinalan dan Kampung Prenggan Kelurahan Prenggan	8 titik	memperindah wilayah Kelurahan Prenggan	8 titik						
								Rehab Balai RW Kampung Tinalan Kelurahan Prenggan	1 unit	Meningkatkan penggunaan balai RW terpadu	1 unit						
								Biopori Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kelurahan Prenggan	22 unit	Berkurangnya genangan air	22 unit						
								Rambu dan Peringatan warga Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kelurahan Prenggan	26 buah	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas	26 buah						
								Papan Slogan Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kelurahan Prenggan	40 buah	Memotivasi Warga	40 buah						
								Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Prenggan	1 dokumen	Dukungan kelancaran Pengawasan kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen						
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat		Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede		Pemeliharaan Jalan / Pavingblok Kampung Basen Kelurahan Purbayan	797 m2	memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah	797 m2	336,063,000	346,144,890	Lurah Purbayan	APBD		
								Cermin Tikungan Kampung Basen, Kampung Alun - Alun, Kampung Gedongan dan Kampung Purbayan Kelurahan Purbayan	30 unit	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas	30 unit						
								Renovasi Balai RW Kampung Alun - Alun Kelurahan Purbayan	1 unit	Menjaga keamanan lingkungan	1 unit						
								Jasa Konsultan Perencanaan Kelurahan Purbayan	1 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen						
								Jasa Konsultan Pengawas Kelurahan Purbayan	1 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen						
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat		Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kelurahan Rejowinangun	131 lembaga	Terlaksana semua program Pemberdayaan kelurahan	131 lembaga	508,070,000	481,717,610	Lurah Rejowinangun	APBD		

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun	2 orang	Jasa Tenaga Teknis/Naban	2 orang					
								Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen	Pembuatan Profil Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen					
								Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Koordinasi dalam upaya Pengentasan Kemiskinan	30 orang					
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Rejowinangun	50 RT 13 RW	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Prenggan Masa Bakti 2021-2024	50 RT 13 RW					
								Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan Rejowinangun	8 lembaga	Kelembagaan Sosial yang solid	8 lembaga					
								Rakor Lintas Sektoral Kelurahan Rejowinangun	10 kali	Mempermudah Komunikasi Lintas Sektoral	10 kali					
								Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	11 kali	Memfasilitasi Koordinasi Kader PKK Kelurahan Rejowinangun	11 kali					
								Pelatihan Cluster Kuliner-Peningkatan Ekonomi Pengembangan Produk dan Pengemasan Olahan Daging Ikan Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Cluster Kuliner yang berdaya	30 orang					
								Pelatihan Cluster Kerajinan-Peningkatan Ekonomi dengan varian Batik Shibori Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Cluster Kerajinan yang berdaya	30 orang					
								Pelatihan Cluster Herbal-Peningkatan Ekonomi dengan Pengembangan varian puding herbal dan pengemasannya Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Cluster Hebal yang berdaya	30 orang					
								Pelatihan Cluster Agro-Peluang Usaha Lahan Sempit Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Cluster Agro yang berdaya	30 orang					
								Pelatihan Budidaya Lorong Sayur peningkatan gizi dan ekonomi keluarga Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Memperindah lorong dan gang dengan tanaman sayur serta meningkatkan gizi dan ekonomi	30 orang					
								Bintek Metode Pemasaran Online bagi Pelaku Usaha Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Pelaku usaha bersaing dala era teknologi 4.0	30 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Workshop Penanganan Psikologis Masa dan Pasca Bencana Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Trauma healing pasca Covid 19	30 orang					
								Workshop Pemulihan Ekonomi Keluarga Terdampak Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Pemulihan ekonomi pasca Covid 19 bagi keluarga terdampak	30 orang					
								Workshop Peningkatan Ekonomi Manajemen Pemasaran Pelaku UMKM Gandeng Gendong Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Pemulihan ekonomi pasca Covid 19 bagi UKM Gandeng Gendong	30 orang					
								Bintek Pengisian Rapor Keluarga Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Pendataan keluarga miskin (KMS)	30 orang					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK RT-RW kampung LPMK) Kelurahan Prenggan	145 lembaga	terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	432,665,000	404,192,600	Lurah Prenggan	APBD	
								Pemilihan RT dan RW Kelurahan Prenggan	2 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Prenggan Masa Bakti 2021-2024	2 lembaga					
								Workshop Gerakan PHBS Anak PAUD Kelurahan Prenggan	70 orang	Membiatkan Pola Hidup bersih pada anak PAUD	70 orang					
								Workshop Penguatan Psikologis Remaja Pasca Covid 19 Kelurahan Prenggan	40 orang	Trauma healing bagi remaja pasca covid 19	40 orang					
								Pelatihan Kerajinan Seni pada Kain Kelurahan Prenggan	30 orang	Meningkatkan perekonomian masyarakat	30 orang					
								Peringatan Hari Anti Korupsi Kelurahan Prenggan	80 orang	Meningkatkan budaya malu Korupsi	80 orang					
								Workshop Disabilitas Kelurahan Prenggan	30 orang	memberikan ruang untuk Difabel Berinteraksi dan bereksprei	30 orang					
								Pelatihan Kuliner bagi Kelompok PSA Kelurahan Prenggan	40 orang	Meningkatkan keterampilan Kuliner bagi kelompok PSA	40 orang					
								Forum TKPK Tingkat Kelurahan Prenggan	30 orang	koordinasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan	30 orang					
								Rakor Lembaga Masyarakat, Stake Holder dan Instansi Terkait Kelurahan Prenggan	18 kali	Merekatkan hubungan antar lembaga	18 kali					
								Pelatihan Olahan Lele dan Pengemasan Produk Kelurahan Prenggan	30 orang	Memberikan pelatihan untuk berbagai macam cara mengolah lele dan pemasarannya	30 orang					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan Kethoprak Kelurahan Prenggan	30 orang	Melestarikan kesenian tradisional agar tidak hilang	30 orang					
								Workshop Perlindungan Anak dan Perempuan Kelurahan Prenggan	30 orang	Meningkatkan Perlindungan Anak dan Perempuan	30 orang					
								Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan	2 orang	Jasa Tenaga Teknis/Naban	2 orang					
								Workshop dan Gelar Upacara Adat Jawa Kelurahan Prenggan	30 orang	Terselenggaranya Gelar Upacara Adat Kel Prenggan	30 orang					
								Workshop Sesorah, Pranotocoro dan Bahasa Jawa Jawa Kelurahan Prenggan	30 orang	Melestarikan Keterampilan Berbahasa Jawa	30 orang					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Keberdayaan masyarakat meningkat	Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Purbayan	2 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Purbayan Masa Bakti 2021-2024	2 lembaga	548,404,000	523,261,630	Lurah Purbayan	APBD	
								Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, 578LPMK) Kelurahan Purbayan	150 lembaga	PKK, RT, RW, Kampung, LPMK terfasilitasi untuk koordinasi	5 lembaga					
								Fasilitasi Lomba-Lomba Kelurahan Purbayan	5 lomba	terfasilitasinya lomba lomba masyarakat	5 lomba					
								Rapat Koordinasi Komisi Lansia Kelurahan Purbayan	30 orang	Komisi Lansia yang terkoordinasi	30 orang					
								Workshop Narkoba Kelurahan Purbayan	4 kampung	Memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan gerakan anti narkoba	4 kampung					
								Parenting bagi orang tua, peserta didik PAUD Se-Kelurahan Purbayan	80 orang	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak usia dini	80 orang					
								Saresehan Anak-anak Kelurahan Purbayan	30 orang	Memberikan Ruang Untuk Anak PAUD menunjukkan kreatifitasnya	30 orang					
								Pelatihan Linmas Kelurahan Purbayan	50 orang	Meningkatkan keterampilan Linmas	50 orang					
								Rapat Kampung KB Mandiri Basen (Kampung Basen) Kelurahan Purbayan	50 orang	memberikan ruang koordinasi	50 orang					
								Forum TKPK Kelurahan Purbayan	40 orang	koordinasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan	40 orang					
								Rapat Koordinasi wilayah dengan OPD terkait Kelurahan Purbayan	12 kali	merekatkan komunikasi dan koordinasi antar OPD	12 kali					
								Latihan Bregodo Gedongan Kelurahan Purbayan	3 kali	Meningkatkan keterampilan Bergodo	3 kali					

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelatihan Ketoprak Gedongan Kelurahan Purbayan	4 kali	Melestarikan budaya Tradisional	4 kali					
								Upacara NYADRAN (Merti Makam, Khataman Al-Qur'an, Tahil, Kirab gunung dan bregodo, dan pentas ketoprak) Kelurahan Purbayan	110 orang	Melestarikan Budaya Nyadran	110 orang					
								Workshop Angkatan Muda dalam kepemimpinan Kelurahan Purbayan	50 orang	Melatih Generasi Muda mempunyai jiwa kepemimpinan	50 orang					
								Sarasehan Kelompok Tani Tri Tunggal Basen Kelurahan Purbayan	30 orang	Meningkatkan koordinasi kelompok Tani	30 orang					
								Pelatihan Pengolahan Jamur Kelurahan Purbayan	30 orang	Memberikan keterampilan warga mengolah masakan berbahan jamur	30 orang					
								Peningkatan Mental Spiritual Warga (Syawalan) se Kelurahan Purbayan	140 orang	Meningkatkan Kebersamaan	140 orang					
								Pelatihan Masakan Nusantara Kelurahan Purbayan	30 orang	Meningkatkan keterampilan membuat makanan Nusantara	30 orang					
								Pelatihan Manajemen Produk Kelurahan Purbayan	30 orang	Memberikan Pengetahuan bagaimana mengemas produk agar mempunyai daya jual lebih	30 orang					
								Penyuluhan Pengelolaan sampah rumah tangga Kelurahan Purbayan	25 orang	Memberi pengetahuan pemilahan sampah	25 orang					
								Pelatihan tanaman buah Kelurahan Purbayan	30 orang	pemanfaatan lahan pekarangan	30 orang					
								Workshop Edukasi Anti Rokok Kelurahan Purbayan	100 orang	menumbuhkan minat berhenti merokok	100 orang					
								Pelatihan Daur Ulang Sampah	50 orang	Memberdayakan Bank Sampah	50 orang					
								Workshop Administrasi KKG Kelurahan Purbayan	60 orang	Kegiatan KKG yang tertib administrasi	60 orang					
								Workshop Keterpaduan PAUD, YANDU, BKB, SDIDTK Kelurahan Purbayan	70 orang	Meningkatkan Pengetahuan dan kekompakan	70 orang					
								Rapat Koordinasi DEKELANA Kelurahan Purbayan	50 orang	Meningkatnya Pengetahuan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja	50 orang					
								Lomba Merangkai Sayur Peserta Kelurahan Purbayan	60 orang	Menambah kreatifitas	60 orang					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	24 kali	Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan	2 orang	Jasa Tenaga Teknis/Naban	2 orang	308,925,000	318,192,750		Mantri Pamong Praja	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										253,525,000	261,130,750	Baru		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Kotagede			Frekuensi Pengamanan masyarakat	5 kegiatan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	5 kegiatan	253,525,000	261,130,750		Jawatan Keamanan	APBD
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalamantisipasi kebakaran ringan	45 Tabung APAR					
								Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	40 orang	Meningkatkan Kemampuan Masyarakat untuk melakukan Penanggulangan Kebakaran	40 orang					
								Workshop Bela Negara	60 orang	membina dan membentuk masyarakat Kotagede yang berkepribadian, disiplin, serta memiliki semangat dan kesadaran bela negara	60 orang					
								Penyuluhan Kampung Panca Tertib	50 orang	menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan terdekatnya masing-masing	50 orang					
								Lomba Poskamling	6 Poskamling	Menggiatkan warga untuk menghidupkan lagi kegiatan Poskamling	6 Poskamling					
								Workshop BMR	60 orang	Meningkatkan kemampuan BMR untuk melakukan kegiatan tanggap darurat dan mitigasi kebencanaan	60 orang					
								Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	60 orang	Terjalinnnya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	60 orang					
								Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	60 orang	Terjalinnnya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	60 orang					

RPJMD 2017-2022	PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Sub Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Penyuluhan Jaga Warga	10 Kampung	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	10 Kampung						
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									55,400,000	57,062,000	Baru			
	7.01.04.2.02.01		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kemantren Kotagede		Sosialisasi Pondokan (Sapa Anak Kos)	80 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	80 orang	55,400,000	57,062,000		Jawatan Keamanan	APBD	
								Operasi ketertiban masyarakat	12 orang	Penegakan Perijinan Pondokan, PKL, Vandalisme dan Ketertiban Spanduk	12 orang						
								Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkopimka)	11 kali	Terjalinnnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	11 kali						
Total												9,289,875,596	9,531,491,863				

Tabel 5.29 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional	100%					10,541,556,517	11,595,712,169			Sekretaris Dinas	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,260,000	14,586,000				
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Dokumen Renja 2022, Renja Perubahan 2021, RKA Perubahan 2021, DPPA 2021	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	11,520,000	12,672,000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Terdokumentasikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Laporan Kinerja 100%		1,740,000	1,914,000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan						Survey IKM	1 dokumen			8,033,274,517	8,836,601,969	baru			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	62 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,029,930,517	8,832,923,569			kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	434,000	477,400			kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	62 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	434,000	477,400			kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	209,000	229,900			kasubag umum dan kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	700,000	770,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	360,000	396,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	728,000	800,800		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	64,000	70,400		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	415,000	456,500		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,369,022,000	2,605,924,200	baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pengiriman dokumen	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23,800,000	26,180,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
								Materai	2750 lembar							
								Perangko	3150 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telpon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	156,600,000	172,260,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	42 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22,240,000	24,464,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	13 unit							
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 6 (Sky Lift)	1 unit							
								Pembayaran KIR roda 4	5 unit							
								Pembayaran KIR roda 6 (Sky Lift)	1 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	15 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	657,687,000	723,455,700		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor Peralatan kebersihan	12 bulan 1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	204,985,000	225,483,500		kasubag umum dan kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,439,000	21,382,900		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Barang Cetak	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,133,000	100,246,300		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	325.000 lembar							
								Jilid	325 buah							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,705,000	5,175,500		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Bahan Komputer dan Printer : - Pengisian Cartridge (150 bh) - Tinta Printer (100 bh)	250 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	73,213,000	80,534,300		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Surat kabar 6 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,440,000	8,184,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
								Buku bacaan /perpustakaan	0							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	3.380 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	51,870,000	57,057,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
								Makan Minum Hari-hari Umum	110 galon							
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah (Jawa)	13 kali 3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	197,700,000	217,470,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	4 kali 2 orang							
	X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Mebeleur : - Meja Rapat Oval (1 unit) - Kursi rapat (20 bh) - Kursi Tamu (2 set)	23 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,000,000	44,000,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Dinas Perhubungan	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	154,000,000	169,400,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
								Gedung PKB	1 unit							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Roda 2 Roda 4 Roda 6 (Sky Lift)	42 unit 13 unit 1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	402,450,000	442,695,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Taman Sewa tempat/lahan Pemasangan Repeater Jasa Keamanan Kantor	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	230,600,000	253,660,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Komputer AC Genset BBM Genset Isi Gas	20 unit 10 unit 1 unit 500 liter 1 tabung	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	31,160,000	34,276,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										126,000,000	138,600,000	baru		
	X.XX.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pakaian Kerja Lapangan : - Pakaian Taktikal - Sepatu Kerja Lapangan Taktikal	105 Stel dan 105 Pasang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	126,000,000	138,600,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD
Program Pengelolaan Lalu Lintas	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	24 km/jam					11,235,474,000	12,339,457,869		Ka. Bid. Lalu Lintas, Ka. Bid. Pembinaan Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas, Ka. Bid. Perparkiran	
Program Pengelolaan Perparkiran						Persentase Juru Parkir yang tertib	97.32%									
Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas						Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	92%									
						Jumlah Pelanggaran	480									
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	91%					2,505,796,000	2,756,375,600	baru		
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang: 1. S4 Gedongkuning 2. S4 Jetis	2 Unit	Kelancaran Lalu Lintas	100%	930,000,000	1,023,000,000		Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Kamera ATCS (Speed Dome) : 1. S4 Mirota Kampus 2. S4 Gondomanan 3. S4 Badran	3 Unit							
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL) yang terpelihara	50 unit	Kelancaran Lalu Lintas	100%	1,575,796,000	1,733,375,600		Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas	APBD
								Rambu Lalu Lintas yang terpelihara	100 unit							
								Marka yang terpelihara: 1. Marka Putih 2. Marka Kuning Sepeda 3. Marka Kuning Biku-biku 4. Marka Merah 5. Hijau	5 jenis							
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										5,883,570,000	6,472,364,300	baru		
	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Koordinasi di bidang perparkiran	12 kali	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang lancar	100%	255,627,000	281,627,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran	APBD
								Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan perparkiran	12 kali							
								Juru Parkir dan Petugas Parkir TKP yang terlayani	1.200 orang							
								Tempat Khusus Parkir (TKP) yang terpelihara	2 lokasi							
								Papan Informasi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang tersedia	30 buah							
								Sarana Prasarana Tempat Khusus Parkir (TKP) yang tersedia	1 lokasi							
								Cetak stiker dan brosur parkir	1 jenis							
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Operasional Penyelenggara Perparkiran	12 bulan	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang lancar	100%	5,627,943,000	6,190,737,300		Kepala Seksi Perizinan Parkir	APBD
								Karcis parkir yang tersedia	13 macam							
								Pakaian Juru Parkir yang tersedia	900 buah							
								Retribusi Parkir yang dipungut	100%							
								Pengawasan Perparkiran	12 bulan							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										1,107,035,000	1,217,737,668	baru		
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Head Light Tester Robotic	1 unit	Perengkapan dan Peralatan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berfungsi optimal	100%	941,995,000	1,036,193,668		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
								Perengkapan operasional pengujian berkala kendaraan bermotor	12 bulan							
								Modul Integrasi alat uji ke komputer dan tablet penguji menggunakan smart card	2 unit							
	2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Sertifikasi Penguji PKB	8 orang	Peningkatan Kapasitas Penguji Kendaraan Bermotor yang berkompenten	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Bukti Lulus uji	1500 set	Perengkapan dan Peralatan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berfungsi optimal	100%	37,500,000	41,250,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Spanduk	6 buah	Kelancaran Pelayanan PKB	100%	2,700,000	2,970,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 bulan	Perengkapan dan Peralatan Operasional berfungsi optimal	100%	115,000,000	126,500,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	48 kali	Mendukung kelancaran pelayanan PKB	100%	8,640,000	9,504,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										1,139,457,000	1,253,402,701	baru		
	2.15.02.2.06.01	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Forum Komunikasi LLAJ	1 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	250,658,865	275,724,752		kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APBD
								Laporan Manajemen dan Rekayasa LL	2 dokumen							
								Penataan Rekayasa Lalu Lintas melalui Area Traffic Control System (ATCS)	12 bulan							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Uji Coba Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	40,600,000	44,660,000		Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APBD
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Patroli, Pengendalian, Pengawasan, Penegakan Perda Bidang Perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas	12 bulan	Kelancaran Lalu Lintas	100%	848,198,135	933,017,949		Kepala Seksi Pengendalian Operasional	APBD
								Operasional bersama penegakan Perda bidang Perhubungan	44 kali							
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota										200,775,000	220,852,500	baru		
	2.15.02.2.07.01	Penetapan kebijakan tata kelola Andalalin	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Draf Peraturan Walikota tentang Andalalin	1 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	135,500,000	149,050,000		Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas	APBD
								Kajian Updating Kinerja Lalu Lintas	1 dokumen							
	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Sidang Andalalin	44 kali	Kelancaran Lalu Lintas	100%	39,875,000	43,862,500		Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas	APBD
	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Monitoring Hasil Andalalin	38 kali	Kelancaran Lalu Lintas	100%	25,400,000	27,940,000		Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas	APBD
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										264,561,000	271,017,100	baru		
	2.15.02.2.08.04	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pemantauan Penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	20 kali	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Keselamatan Lalu Lintas	100%	258,161,000	263,977,100		Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	APBD
								Edukasi Keselamatan Lalu Lintas (Operasional Taman Keselamatan Lalu Lintas)	33 kali							
								Pemeliharaan Taman Keselamatan Lalu Lintas	1 kawasan							
	2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	16 kali	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Keselamatan Lalu Lintas	100%	6,400,000	7,040,000		Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										134,280,000	147,708,000	baru			
	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur wilayah meningkat	se- Kota Yogyakarta			Operasional Angkutan Umum yang tertib	500 unit	Operasional Angkutan Umum yang optimal	100%	134,280,000	147,708,000		Kepala Seksi Pembinaan Angkutan Jalan	APBD	
								Belanja Cetak Angkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) : - Plat KTB/TNKTB (1000 psng) - SIOKTB (1000 set) - Identitas Pengemudi KTB (1000 set)	1000 set								
								Belanja Reflektor	1000 buah								
Total												21,777,030,517	23,935,170,038				

Tabel 5.30 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,611,992,684	8,987,850,000			Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Prosentase sarana dan prasarana yang memadai	100%										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Prosentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,840,000	14,100,000	Baru			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD			3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,200,000			Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pembuatan buku profil OPD			1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,100,000	5,600,000			Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,200,000			Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,740,000	1,900,000			Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah			1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,200,000			Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan				Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			1 dokumen			7,259,502,004	7,517,950,000	Baru			

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan tunjangan ASN	50 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,243,082,004	7,500,000,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi pelaksanaan tugas ASN	50 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,820,000	4,000,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,100,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,600,000	4,000,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	550,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,600,000	4,000,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,400,000	2,650,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	550,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,100,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,339,650,680	1,455,800,000	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	6300 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,100,000	6,500,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	3600 surat							
								Pengiriman dokumen	10 dokumen							
								Materai	1000 lembar							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pulsa telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000,000	132,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,000,000	9,900,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga bantuan dan tenaga teknis	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	232,594,680	245,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	174,915,000	185,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan alat tulis kantor	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	52,000,000	57,200,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22,000,000	27,500,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat surat dokumen	60.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik bangunan kantor	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,345,000	14,500,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Komputer printer	21 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	66,786,000	70,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Sewa Mesin fotokopi	12 bulan							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan peralatan rumah tangga	13 jenis : Kran, Taplak, Jam, Filter Oli, Jet shower closet, Ember, Tempat Sampah, Jas Hujan, Payung, Aki untuk genset, Galon air.	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,000,000	13,200,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bahan peralatan kebersihan yang tersedia	11 Jenis : Tissue, Pengharum, Sabun cuci, Pembasmi Serangga, Kapur Barus, Lap Kendaraan, Sapu, Sulak, Keset, Gayung, Keranjang Sampah							
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	213,825,000	250,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan minum rapat	2640 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	29,480,000	35,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi keluar daerah dalam Daerah DIY	8 kali 5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	159,200,000	165,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah di Jawa	25 kali x 2 orang							
								Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah luar jawa	5 kali							
								Transport dan akomodasi narasumber	10 orang x 2 kali							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan gedung dinas kominfosandi	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50,000,000	55,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	17 unit 5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	115,205,000	120,000,000			APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Arsip	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	25,000,000	25,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan alat studio dan komunikasi Pemeliharaan AC split	8 Jenis : Kamera Video, Lensa, Lampu Kamera, mixer, microphone, headphone 20 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	38,200,000	45,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan Taman	12 Bulan							
Program Peningkatan Komunikasi Publik	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	96.50%			3,597,659,760	3,761,000,000		Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										3,597,659,760	3,761,000,000	Baru		
	2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Analisis media cetak Analisis Media Online Analisis Media Sosial Penyusunan IKM Survey Persepsi Penyusunan Setting Agenda Komunikasi Pemerintah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Laporan 12 Bulan	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	360,000,000	400,000,000		Kepala Seksi Pengelolaan Informasi	APBD
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Program dan kinerja pemkot yang disosialisasi Informasi yang didesiminasi melalui media radio Informasi yang didesiminasi melalui media audio visual Informasi yang didesiminasi melalui media luar ruang Informasi yang didesiminasi melalui pertunjukan rakyat	14 kali 20 kali 62 kali 424 kali 2 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	1,371,634,760	1,400,000,000		Kepala Seksi Humas dan Publikasi	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Informasi yang didesiminasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	1582 kali							
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penulisan lepas yang dikerjasamakan	147 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat dan terdokumentasi dengan baik	100%	1,314,865,000	1,350,000,000		Kepala Seksi Humas dan Publikasi	APBD
								Media Pemerintah Yang diterbitkan	10 kali							
								Pengelolaan Website Pemkot Yogyakarta	12 bulan							
								Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan	67 kali							
								Pengelolaan Media Sosial Pemkot Yogyakarta	12 Bulan							
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Informasi dan Keluhan yang dikelola melalui UPIK/JSS	12 Bulan			291,680,000	330,000,000		Kepala Seksi Layanan Informasi dan Pengaduan	APBD
								Pelayanan Informasi publik yang dikelola melalui PPIID	12 Bulan							
								Dialog interaktif walikota menyapa	240 kali							
								Pengelolaan Subdomain Perangkat Daerah / Unit Kerja Pemkot	45 sub domain							
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumpa pers wartawan	44 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	75,480,000	83,000,000		Kepala Seksi Humas dan Publikasi	APBD
								Kegiatan pemerintah kota yang diliput	60 kali							
	2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penguatan relasi dengan stakeholder - ucapan selamat	15 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	30,000,000	33,000,000		Kepala Seksi Humas dan Publikasi	APBD
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Desiminasi Informasi melalui kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12 bulan	UPIK yang ditindaklanjuti	96%	154,000,000	165,000,000		Kepala Seksi Layanan Informasi dan Pengaduan	APBD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	40.93%					11,036,368,860	14,040,000,000		Ka. Bid. Teknologi Informasi dan Telematika	
						Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	80.89%									
						Presentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	100%									
						Prosentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	85%									

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Prosentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%									
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										2,091,543,000	2,500,000,000	Baru		
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat	12 bulan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	2,091,543,000	2,500,000,000		Ka. Sie. Perangkat Keras & Jaringan TI	APBD
								Koneksi Internet Non OPD yang dikelola	2 jenis	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										8,944,825,860	11,540,000,000	Baru		
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi sistem informasi yang direncanakan (dianalisis dan didesain)	16 aplikasi	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	259,532,160	275,000,000		Ka. Sie. Pengembangan Smart City	APBD
								E Government yang dievaluasi	51 OPD							
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pusat data yang dikelola	1 lokasi	Kemudahan mengakses data yang dibutuhkan	100%	6,364,340,400	7,000,000,000		Ka. Sie. Perangkat Keras & Jaringan TI	APBD
								Koneksi Internet Pusat Data yang tersedia	5 jenis	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
								Perangkat Pusat Data yang tersedia	3 unit	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
								Licensy perangkat TI yang tersedia	2 jenis	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
								Layanan VPS yang tersedia	2 unit	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perawatan Perangkat Telekomunikasi	4 jenis			870,000,000	925,000,000		Ka Seksi Pengamanan Informasi	APBD
								Biaya hak penggunaan spektrum frekwensi radio yang dibayarkan	3 frekwensi							
								Belanja modal pengadaan sound sistem	2 set							
								Belanja Modal Pengadaan Perangkat Telekomunikasi	7 jenis							
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi E government yang dikelola	20 modul aplikasi	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	726,800,000	775,000,000		Ka. Sie. Perangkat Lunak	APBD
								Sistem e Government yang dibangun	20 Aplikasi							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Permohonan rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi terlayani	12 bulan	Rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi terlayani	100%	205,812,500	225,000,000		Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Persandian dan Telmatika	APBD
								Menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi	12 bulan							
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Ekosistem TI	12 Bulan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	399,140,800	140,000,000		Ka. Sie. Pengembangan Smart City	APBD
								Implementasi Smart City yang disosialisasikan	10 kegiatan							
								Pengembangan SDM TIK	12 Orang							
								Kemitraan Bidang Teknologi Informasi	5 Kegiatan							
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Koneksi TV Kabel yang dikelola	12 bulan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	119,200,000	2,200,000,000		Ka. Sie. Perangkat Keras & Jaringan TI	APBD
								Hardware Perangkat Keras e government yang tersedia	5 jenis							
Program Pengelolaan In	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%			325,260,000	335,000,000		Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										325,260,000	335,000,000	Baru		
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Publikasi statistik dasar	4 dokumen	Masyarakat mudah mengakses kebutuhan informasi	100%	299,730,000	305,000,000		Kepala Seksi Data dan Statistik	APBD
								Publikasi statistik sektoral	1 dokumen							
								Pengelolaan Sinkronisasi data pembangunan	1 dokumen							
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Portal satu data	1 dokumen	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%	25,530,000	30,000,000		Kepala Seksi Data dan Statistik	APBD
								Penyusunan metadata 3 sektor	1 dokumen							
Program Peningkatan Pelayanan Persandian	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						Persentase pengamanan informasi	100%			654,237,492	697,500,000		Kepala Bidang Bidang Persandian dan Telekomunikasi	
								Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	60%							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										585,112,500	617,500,000	Baru		
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya	3 Jenis	kehandalan keamanan informasi	100%	569,250,000	600,000,000		Kepala Seksi Pengamanan Informasi	APBD
								Pengujian keamanan informasi	3 jenis : rutin, atas permintaan dan insidental							
								Layanan Komunikasi Email @jogjakota.go.id	3 jenis : aktifasi, deaktifasi dan pengelolaan rutin							
								Literasi keamanan informasi	4 kali	kehandalan keamanan informasi	100%					
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sinyal frekuensi yang aman	12 bulan			15,862,500	17,500,000		Ka Seksi Pengamanan Informasi	APBD
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota										69,124,992	80,000,000	Baru		
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jaring komunikasi sandi internal pemerintah Kota Yogyakarta	59 JKS	Keandalan keamanan informasi	100%	69,124,992	80,000,000		Kepala Seksi Pengamanan Informasi	APBD
								Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara	1 kali							
								Pemeliharaan peralatan persandian	30 unit							
Total												24,225,518,796	27,821,350,000			

Tabel 5.31 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,080,074,000	8,484,657,500		Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										16,000,000	17,300,000	Lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,000,000	2,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	8,000,000	8,500,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
								Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
										Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%						
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,000,000	2,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%						
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,000,000	2,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP 2020 dan Rancangan LKjIP 2021)	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,000,000	2,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										6,414,674,000	6,735,407,700	Lanjutan			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Gaji dan Tunjangan ASN	45 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,411,074,000	6,731,627,700		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Tambahan Penghasilan Pegawai	45 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,000,000	3,150,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Laporan Keuangan Bulanan/S emesteran			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	600	630				
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,649,400,000	1,731,949,800	Lanjutan			
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustri an Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Surat Masuk	100 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,650,000	1,732,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Surat Keluar	100 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
								Buku Cek	4 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
								Materai	350 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustri an Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,000,000	6,300,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustri an Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pembayaran pajak kendaraan roda dua	30 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14,820,000	15,561,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pembayaran pajak kendaraan roda empat	10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustri an Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Tenaga Bantuan (NABAN)	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	295,656,000	310,438,800		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Tenaga Teknis	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	233,000,000	244,650,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
								Retribusi Kebersihan (Dinas PerinKopUKM, Griya UMKM)	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Alat Tulis Kantor	59 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	53,047,500	55,699,875		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	38,404,000	40,404,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	106.270 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,905,000	3,050,250		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Komputer/PC	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	85,000,000	89,250,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Peralatan Rumah Tangga	26 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	35,677,500	37,461,375		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Surat Kabar selama 12 bulan	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,360,000	3,528,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Makan minum rapat	720 os; 1350 oh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,480,000	35,154,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustri an Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	19 kali, 16 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	277,400,000	291,270,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	13 kali, 14 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustri an Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Gedung Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	300,000,000	315,000,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Gedung Griya UMKM	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
								Jasa Keamanan Griya UMKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustri an Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Roda Dua	30 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	249,000,000	261,450,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Roda Empat	10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Perindustri an Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20,000,000	21,000,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Jumlah koperasi yang memiliki Akuntabilitas baik	102 unit					171,521,000	180,097,050		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										171,521,000	180,097,050	Lanjutan			

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pengawasan Koperasi	10 koperasi	Terwujudnya Koperasi yang akuntabel	10 koperasi	39,950,000	41,947,500		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	APBD
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	20 koperasi	Terwujudnya kepatuhan Koperasi terhadap perundang undangan yang berlaku	20 koperasi	131,571,000	138,149,550		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	APBD
								Pemeringkatan Koperasi	115 koperasi	Data Koperasi Berdasarkan Peringkat Lembaga dan Usahanya	115 koperas					
								Klinik Koperasi Sehat	30 laporan	Koperasi yang patuh terhadap perundang undangan yang berlaku dan Data koperasi sehat bagi KSP/ USP Koperasi	30 laporan					
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Jumlah Koperasi Simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	102 unit					67,912,000	71,307,600		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										67,912,000	71,307,600	Lanjutan		
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	85 kop	Terwujudnya koperasi yang sehat	85 kop	11,715,000	12,300,750		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	APBD
	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan			Penilaian Koperasi berprestasi	20 kop	Terwujudnya Koperasi menurut jenis	20 kop	56,197,000	59,006,850		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	APBD
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	465 orang					396,156,000	415,963,800		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota										396,156,000	415,963,800	Lanjutan		
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Bimtek bagi SDM Koperasi	100 kop	Terwujudnya SDM Koperasi yang menerapkan hasil diklat	100 kop	396,156,000	415,963,800		Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Jumlah Koperasi yang berkembang usahanya	10 unit	Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)	1 kali	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas kinerja dalam menjalankan organisasi BUKP dan UMKM anggota BUKP	14 BUKP dan 14 UMK Mikro	342,481,000	359,605,050		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										342,481,000	359,605,050	Lanjutan		
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Gelar Potensi Koperasi	6 koperasi	Terwujudnya produktivitas usaha koperasi	6 koperasi	342,481,000	359,605,050		Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi	APBD
								Monitoring dan evaluasi dana bergulir	11 kali	Tersedianya data perkembangan program-program dana bergulir kepada koperasi, LKM/BUKP dan PKL	11 kali					
								Kelompok koperasi yang dibina	24 koperasi	Terwujudnya koperasi yang sehat	24 koperasi					
								Rangkaian Hari Koperasi	1 kali	Terwujudnya Hari koperasi	1 kali					
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Jumlah Wirausaha Baru yang ditumbuhkan	100 orang					1,117,530,000	1,173,406,500		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Jumlah UKM ber-IUM	400 UKM					1,117,530,000	1,173,406,500	Lanjutan		
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha			Data pelaku UMKM	1350 UMKM	Data pelaku UMKM	1350 UMKM	109,150,000	114,607,500		Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan			Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	4 kali	Publikasi UMKM di Media Elektronik dan Media Cetak	4 pemberitaan	71,701,000	75,286,050		Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
								Kemitraan dengan lembaga pemerintah/swasta	4 lembaga	Pengembangan UMK melalui kemitraan	4 lembaga					
	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan			Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	400 UMKM	Pelaku UMKM yang paham informasi tentang perizinan usaha	400 UMKM	26,150,000	27,457,500		Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Perindustrian Koperasi Usaha			Monitoring dan evaluasi IKM dalam kelompok PEW	540 IKM	Laporan Monitoring dan evaluasi	12 laporan	910,529,000	956,055,450		Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
								Pemberdayaan wirausaha baru	100 wirausaha	Wirausaha Baru Naik Kelas	100 wirausaha					
								Peningkatan kapasitas kelompok Gandeng-Gendong	50 UMKM	Kapasitas kelompok Gandeng-Gendong meningkat	50 UMKM					
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Jumlah UKM Mandiri	30 UKM					3,421,890,000	3,592,984,500		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil; Kepala UPT Logam	
Program Pengembangan Industri Logam						Jumlah IKM Mandiri	140 IKM									
Program Pembinaan Perindustrian						Pendapatan UPT Logam	#####									
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										3,421,890,000	3,592,984,500	Lanjutan		
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Member Dekranasda yang terbina dengan baik	70 Member Dekranasda	Member Dekranasda yang wawasan usahanya bertambah	70 member dekranasda	1,421,890,000	1,492,984,500		Kepala Seksi Pengembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
								Promosi Produk UMKM	181 UMKM	Produk UMKM yang berkualitas semakin dikenal	181 UMKM					
								IKM yang mengikuti Pelatihan teknis industri	80 IKM	Pengetahuan dan ketrampilan pemasaran bagi IKM yang meningkat	80 IKM					
								IKM yang mendapat pelatihan sarana produksi	140 IKM	Pengetahuan dan ketrampilan pemasaran bagi IKM yang meningkat	140 IKM					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Layanan UPT Logam	12 bulan	Pelayanan prima terhadap semua pelanggan	12 bulan	2,000,000,000	2,100,000,000		Kepala UPT Logam	APBD
								Pemeliharaan sparepart mesin UPT Logam yang dipelihara	25 mesin	Mesin dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan permesinan	25 mesin					
								Pengadaan alat-alat pendukung pelayanan UPT Logam	1 kali	Peralatan pendukung pelayanan UPT Logam yang tersedia	1 kali					
								Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	4 perusahaan	Daya tawar IKM Logam di tingkat nasional meningkat	2 perusahaan					
								Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional mesin UPT logam	25 mesin	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional mesin UPT logam	25 mesin					
								Penataan Sumber daya manusia UPT Logam	12 bulan	Tenaga kerja pelayanan teknis permesinan tersedia	12 bulan					
Program Pembinaan Perindustrian	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	5%					200,970,000	211,018,500		Kepala Bidang Kemitraan Pemasaran Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										200,970,000	211,018,500	Lanjutan		
	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Dokumen FGD RPIK Yogyakarta	1 dokumen	Dokumen FGD RPIK Yogyakarta	1 dokumen	35,750,000	37,537,500		Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
	3.31.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pendampingan Penumbuhan sentra industri berbasis wilayah dan Pendampingan HKI bagi IKM	14 lokasi/kecamatan	Pendampingan Penumbuhan sentra industri berbasis wilayah dan Pendampingan HKI bagi IKM	14 lokasi/kecamatan	105,220,000	110,481,000		Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Koordinasi terkait Pengembangan Sentra melalui kegiatan penyuluhan di sentra IKM	20 kelompok IKM (600 IKM)	Peningkatan wawasan dan pengetahuan kelompok sentra IKM	20 kelompok IKM (600 IKM)	60,000,000	63,000,000		Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
Program Pembinaan Perindustrian	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				Persentase IKM yang berijin industri	2%					137,400,000	144,270,000		Kepala Bidang Kemitraan Pemasaran Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah										137,400,000	144,270,000	Lanjutan		
	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Fasilitasi IUI bagi IKM Kota Yogyakarta	300 IKM	IKM Kota Yogyakarta terfasilitasi IUI	300 IKM	137,400,000	144,270,000		Kepala Seksi Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
								Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha (PIRT, IUM, Halal, HAKI)	300 UMKM	Pelaku UMKM yang paham informasi tentang perizinan usaha	300 UMKM					
Program Pembinaan Perindustrian	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100%					82,605,000	86,735,250		Kepala Bidang Kemitraan Pemasaran Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota ;										82,605,000	86,735,250	Lanjutan		
	3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Perindustrian Koperasi Usaha			Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2.000 IMK	Tersedianya Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2.000 IMK	82,605,000	86,735,250		Kepala Seksi Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
								Sosialisasi SIINas	150 IKM	Terselenggaranya Sosialisasi SIINas	150 IKM					
Total												14,018,539,000	14,720,045,750			

Tabel 5.32 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,903,682,396	9,383,646,785		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									100%	41,614,000	43,694,700	lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	4,550,000	4,777,500		Ka Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			honor tenaga teknis	1 orang	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	30,594,000	32,123,700		Ka Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			Dokumen Evaluasi Kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,920,000	3,066,000		Ka Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,550,000	3,727,500		Ka Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										6,194,735,596	6,504,872,376	Baru		

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			laporan gaji dan tunjangan ASN	42 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,169,335,596	6,477,802,376		Ka Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			laporan akuntansi dan keuangan	12 dokumen akuntansi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,580,000	6,138,000		Ka Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,420,000	2,662,000		Ka Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			Laporan keuangan bulanan/semesteran	12 laporan keuangan bulanan/semesteran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,400,000	18,270,000		Ka Sub Bag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum											2,667,332,800	2,835,079,709	lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			perangko materai	5000 surat lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	16,650,000	17,482,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,140,000	13,797,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			Bahan Bakar Minyak Genset Pelumas Genset	1260 liter 15 liter	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	28,905,000	30,350,250		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			pembayaran pajak kendaraan roda 2 pembayaran pajak roda 4	14 unit 6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,275,000	16,038,750		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			tenaga teknis	16 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	707,840,376	778,624,414		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	199,500,000	209,475,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	DPMPTSP			Alat Tulis Kantor	74 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	75,324,500	79,090,725		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			barang cetakan	26 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	152,079,924	153,683,920		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
									penggandaan surat-surat dokumen	4999 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,400,000	42,420,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	39 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	215,512,000	226,287,600		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			peralatan rumah tangga	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,600,000	25,830,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			surat kabar harian nasional 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,240,000	3,564,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
									surat kabar harian lokal 12 bulan	1 jenis							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			jamuan sidang rapat	550 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,921,000	20,917,050		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
									makan dan minum rapat	550 oh							
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8 kali, 5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	214,200,000	224,910,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
									rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (jawa)	24 kali, 2 orang							
									rapat koordinasi dan konsultasi luar jawa	42 kali, 2 orang							
	X.XX.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			pompa air	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	133,210,000	139,870,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
									komputer	2 unit							
									notebook	1 unit							
									printer	8 unit							
									UPS	4 unit							
	X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			rak buku/TV/server	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	32,760,000	34,398,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
									kamera	1 unit							
									LCD/Proyektor	2 unit							

RPJMD 2017-2022	Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
							Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			gedung kantor DPMPTSP	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	366,750,000	385,087,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			kendaraan dinas roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	156,140,000	163,947,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
									kendaraan dinas roda 4	6 unit							
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			pemeliharaan taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	96,525,000	106,177,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		DPMPTSP			AC	60 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	155,360,000	163,128,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
									Televisi	8 unit							
									Pemeliharaan Pompa air	4 unit							
									Kursi	0 unit							
									Meja	0 unit							
									Mesin Ketik	3 unit							
									Genset	2 unit							
									Vertical Blind	240 m							
									Printer	40 unit							
									UPS	30 unit							
									CCTV dan Jaringan	12 unit							
									PC/laptop	7 unit							
Program Pengembangan Penanaman Modal	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Persentase realisasi investasi	87.66%					779,966,000	818,964,300		Ka. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											123,140,000	129,297,000	Baru		
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat		DPMPTSP			rancangan Perda/Perwal pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	rancangan Peraturan Daerah dan 1 rancangan	Kepastian hukum pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal kepada calon investor/investor di Kota Yogyakarta	100%	114,760,000	120,498,000		Ka. Sie Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	APBD
	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat		DPMPTSP			monev pelaksanaan Perda/Perwal pemberian Fasilitas/ Insentif/ Kemudahan PM	1 dokumen	Terlaksananya monev pelaksanaan Perda/Perwal pemberian Fasilitas/ Insentif/ Kemudahan PM	100%	8,380,000	8,799,000		Ka. Sie Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	APBD
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											656,826,000	689,667,300	Baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPSTP			identifikasi potensi penanaman modal	1 dokumen	terlaksananya identifikasi potensi penanaman modal	1 dokumen	255,480,000	268,254,000		Ka. Sie Promosi Penanaman Modal	APBD
								promosi investasi	3 even	terseleenggaranya promosi investasi	3 even					
								updating database investasi	1 dokumen	terlaksananya updating database investasi	1 dokumen					
								pelayanan informasi penanaman modal	1 dokumen	terseleenggaranya pelayanan informasi penanaman modal	1 dokumen					
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPSTP			rancangan perda/perwal rencana umum penanaman modal	rancangan perda dan 1 rancangan	doikumen rancangan perda dan perwal terselesaikan	100%	401,346,000	421,413,300		Ka. Sie Promosi Penanaman Modal	APBD
Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	85%			343,647,200	360,829,560		Ka. Bidang Pelayanan Terpadu	
Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan								persentase tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan	100%							
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										343,647,200	360,829,560	Baru		
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPSTP			pelaksanaan pendampingan pelayanan OSS	9000 pemohon	izin terbi tahun 2021	1500 izin	149,861,000	157,354,050		Ka Sie Perizinan	APBD
								pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin dan non izin	1500 berkas							
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPSTP			pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin	1500 berkas	izin terbit tahun 2021	1500 izin	95,746,200	100,533,510		Ka. Sie Non Perizinan	APBD
								tindak lanjut dan pengendalian pasca penerbitan izin	12 kali laporan							
								penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak	(formulir, sticker, sertifikat, stopmap)							
								pelaksanaan verifikasi pemenuhan komitmen OSS	1500 berkas							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPTSP			pelayanan pengaduan perizinan	44 pengaduan	Terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat;	100%	98,040,000	102,942,000		Ka Sie Informasi Pengaduan dan Konsultasi	APBD
								pengecekan lokasi pengaduan	pengaduan							
								pengelolaan layanan konsultasi perizinan	2000 layanan							
								pengelolaan layanan informasi perizinan	2000 layanan							
Program Pengembangan Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				persentase realisasi kegiatan penanaman modal	100%					184,833,000	194,074,650		Ka. Bidang Pengendalian Penanaman Modal	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										184,833,000	194,074,650	Baru		
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPTSP			pelaksanaan pemantauan penanaman modal	4 kali laporan	Terlaksananya pemantauan penanaman modal	100%	20,340,000	21,357,000		Ka Sie Pemantauan Penanaman Modal	APBD
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPTSP			pembinaan penanaman modal	120 perusahaan	terlaksananya pembinaan penanaman modal	100%	88,520,000	92,946,000		Ka Sie Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	APBD
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPTSP			pelaksanaan movev penanaman modal	66 perusahaan	terlaksananya movev penanaman modal	100%	75,973,000	79,771,650		Ka Sie Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	APBD
Program Pengembangan Penanaman Modal	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	92%					326,832,000	343,173,600		Ka. Bidang Pengelolaan Pengaduan Data dan Teknologi Informasi	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										326,832,000	343,173,600	Baru		
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	DPMPTSP			arsip perizinan yang dikelola	35000 berkas	terkelolanya arsip perizinan	35000 berkas	326,832,000	343,173,600		Ka Sie Data dan Teknologi Informasi	APBD
								arsip perizinan yang disusutkan	23.600 berkas	tersusutnya arsip perizinan	23.600 berkas					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								scan entri dokumen gambar pada berkas IMB	18.193 lembar	tersedianya scan entri dokumen gambar pada berkas IMB	18.193 lembar						
								aplikasi SIM penanaman modal perizinan	11 unit SIM	terpeliharanya aplikasi SIM penanaman modal perizinan	11 unit SIM						
								Sub domain penanaman modal dan perizinan yang dipelihara	10 Sub domain	terpeliharanya Sub domain penanaman modal dan perizinan	10 Sub domain						
								SIM aplikasi penanaman modal dan perizinan yang dikembangkan	1 unit SIM	terlaksananya SIM aplikasi penanaman modal dan perizinan	1 unit SIM						
								Anjungan mandiri perizinan	1 Unit Anjungan mandiri perizinan	Tersedianya Anjungan mandiri perizinan	1 Unit Anjungan mandiri perizinan						
Total												10,538,960,596	11,100,688,895				

Tabel 5.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan)

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,366,796,789	4,805,166,469		Sekretaris	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	79,002,000	86,902,200	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja, RKA dan DPA Tahun 2022 dan Perubahan Renja, RKA dan DPA Tahun 2021		2 Dokumen		Tersedianya Dokumen Renja, RKA dan DPA Tahun 2022 dan Perubahan Renja, RKA dan DPA Tahun 2021	100%	15,050,000	16,555,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD		12 bulan		Terinformasikannya Kegiatan Kepada Masyarakat atau Khalayak Umum	100%	41,362,000	45,498,200		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
						Penyusunan Buku Profil OPD		1 buku								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		1 dokumen		Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	12,650,000	13,915,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		2 dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 berita acara		Terwujudnya Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100%	2,990,000	3,289,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokumen		Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,950,000	7,645,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,252,943,772	3,579,928,150	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Gaji dan Tunjangan ASN		27 ASN		Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,225,443,772	3,547,988,150		Sub Bagian Keuangan	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 dokumen	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2,500,000	2,600,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	5 dokumen	Terwujudnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	100%	5,000,000	5,960,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8 dokumen	Terwujudnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	5,000,000	5,960,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	10 dokumen	Adanya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	10,000,000	11,920,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 dokumen	Adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	5,000,000	5,500,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,034,851,017	1,138,336,119	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	250 surat	Terarsipkannya Surat Masuk	100%	2,400,000	2,640,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	250 surat							
								Materai	600 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terbayarkan rekening telepon	100%	48,600,000	53,460,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
								Pembuatan Video Profil Jasa Publikasi Daring	1 buah 2 paket							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	12 unit	Terbayarkan Pajak kendaraan	100%	8,400,000	9,240,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	3 orang	Tersedianya tenaga teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan	100%	141,216,572	155,338,230		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Tenaga Bantuan	1 orang							
								Instruktur Senam	1 orang							
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Tersedianya tenaga kebersihan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	125,000,000	137,500,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	60 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	100%	33,996,780	37,396,458		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	5 jenis	Sudah Tercetaknya Barang Cetak	100%	30,831,761	33,914,937		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	95.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	6,896,550	7,586,205		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	4 unit	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	96,873,000	106,560,300		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								LCD	2 unit							
								Printer	4 unit							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Bahan/Alat medis pakai habis	4 jenis							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	9 unit	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	7,855,314	8,640,845		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Tersedianya Surat Kabar selama 12 bulan	100%	1,200,000	1,320,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	100 os	Tersedianya Makan Minum Rapat	100%	24,780,000	27,258,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	5 kali 5 orang	Terlaksanakannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	100%	122,400,000	134,640,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali 5 orang							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor	1 paket	Terlaksananya Renovasi Gedung Kantor	100%	210,000,000	231,000,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa Keamanan Kantor	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 2 Roda 4	12 unit 5 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	146,695,040	161,364,544		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Terpeliharanya Taman	100%	18,368,000	20,204,800		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer AC Split Printer	10 unit 6 unit 8 unit	Terpeliharanya Perawatan Komputer, AC Split dan Printer	100%	9,338,000	10,271,800		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	60%					4,708,121,000	5,178,933,100		Kepala Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										4,708,121,000	5,178,933,100	Baru		
	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan SDM Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	132 orang	Peningkatan SDM Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	100%	4,708,121,000	5,178,933,100		Seksi Lembaga Budaya	DAIS
								Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	4 kelurahan							
								Digitalisasi Profil Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	22 kelurahan							
								Festival Seni Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	5 hari							
								Pentas Seni untuk mendukung FKY Tingkat DIY (Pentas Seni, Pawai, Pasar Seni)	1 event							
								Penyelenggaraan FKY Tingkat Kota Yogyakarta Jogja Cross Culture	1 event 1 event							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional Berbasis Wilayah	4.71					5,102,065,040	5,612,271,544		Kepala Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										5,102,065,040	5,612,271,544	Baru		
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Misi Kebudayaan dalam acara Pekan Kebudayaan Nasional (PKN)	1 kali	Adanya Apresiasi untuk Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	100%	1,716,799,540	1,888,479,494		Seksi Seni	DAIS
								Gelar Seni Budaya Yogyakarta (TMII)	1 kali							
								Pengiriman Misi Kebudayaan dalam acara Festival Sriwijaya (Palembang) dan Festival Budaya Melayu (Bangka Belitung)	2 kali							
								Parade Musik Daerah (TMII)	1 kali							
								Pentas Godhong Apa-apa	6 kali							
								Lomba Lukis DIY-Kyoto Tingkat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan 20 Karya Terseleksi	1 event							
	2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Festival Tingkat DIY	5 jenis	Partisipasi masyarakat Kota dalam Festival	100%	3,044,530,500	3,348,983,550		Seksi Adat dan Tradisi	DAIS
								Festival Kethoprak Tingkat Kota	1 event							
								Festival Karawitan Tingkat Kota	1 event							
								Festival Langen Carita Tingkat Kota	1 event							
								Festival Teater Tingkat Kota	1 event							
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tingkat DIY	1 event	Dukungan Masyarakat dalam melestarikan adat dan tradisi	100%	340,735,000	374,808,500		Seksi Adat dan Tradisi	DAIS
								Jamasan Pusaka	1 event							
								Sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)	1 kali							
								Gelar Upacara Adat	10 kali							
								Festival Jemparingan	1 event							
Program pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	15 dokumen					1,792,744,900	1,882,382,244		Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										1,792,744,900	1,882,382,244	Baru		

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Kajian Sejarah	3 kajian	Pengetahuan dan Pengembangan Sejarah Lokal terwujud	100%	956,300,000	1,004,115,000		Seksi Sejarah, Bahasa, dan Sastra	DAIS
								Lomba Cerdas Cermat Sejarah (SMP)	1 event							
								Peringatan Hari Bersejarah	6 event							
	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Kompetisi Bahasa dan Sastra	8 Jenis lomba	Persentase Pestaerian Bahasa dan Sastra	28%	836,444,900	878,267,244		Seksi Sejarah, Bahasa, dan Sastra	DAIS
								Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	400 orang							
								Pagelaran Karya Bahasa dan Sastra (Gelar Macapat, Macapat Massal)	15 kali							
								Pagelaran Bahasa dan Sastra Jawa (Panembromo, Baca Cerkak, Geguritan)	1 event							
Program Pestaerian Warisan dan Nilai Budaya	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Persentase BCB yang Dilestarikan	52%					4,972,832,480	5,308,974,104		Kepala Bidang Warisan Budaya	
						Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	35.71%									
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										4,972,832,480	5,308,974,104	Baru		
	2.22.05.2.02.02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Rekomendasi Pestaerian WBCB oleh tim Pertimbangan Pestaerian Warisan Budaya (TP2WB) Kota Yogyakarta	120 rekomendasi	Terwujudnya Pengembangan dan Pestaerian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	100%	3,222,832,480	3,383,974,104		Seksi Warisan Budaya Benda	DAIS
								Kajian Warisan Budaya	2 dokumen							
								Rehab Bangunan Cagar Budaya atau Bangunan Warisan Budaya	2 bangunan							
								Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan Bangunan Warisan Budaya (BWB) dan atau Bangunan Cagar Budaya (BCB) oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Yogyakarta	20 dokumen							
								Penyusunan Materi dan Operasional Pusat Informasi Kalang	12 bulan							
								Travel Heritage	1 kali							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.05.2.02.03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Rumaket (Ruang Masyarakat Untuk Ketemu)	1 kali	Pengetahuan dan Implementasi masyarakat dalam Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan	100%	1,750,000,000	1,925,000,000		Seksi Warisan Budaya Tak Benda	DAIS
								Diseminasi Nilai Budaya	1 kali							
								Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2 Dokumen							
								Pembuatan Film Dokumentasi Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	4 buah							
								Festival Dalang Anak	1 event							
								Festival Dalang Remaja	1 event							
								Pengiriman Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY	2 kali							
								Pagelaran Wayang	3 event							
								Penghargaan Seniman, Budayawan, Pelestari Warisan Budaya dan Bangunan Cagar Budaya	6 Orang							
PROGRAM BARU	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Museum	29%					892,262,580	936,875,709		Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota										892,262,580	936,875,709	Baru		
	2.22.06.2.01.02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Komunitas Museum	1 Komunitas	Pengetahuan Permuseuman di Kota Yogyakarta bagi masyarakat	100%	892,262,580	936,875,709		Seksi Permuseuman	DAIS
								Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	1 Event							
								Sarasehan Permuseuman	1 Kali							
								Jumpa Sahabat Museum	4 Event							
								Jogja Museum Expo	1 Event							
Total												21,834,822,789	23,724,603,170			

Tabel 5.34 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					9,758,920,941	10,731,314,006		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	54,595,000	60,054,500			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen			200,000	220,000		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen RKA dan perubahannya	2 Dokumen			28,855,000	31,740,500		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Dokumen DPA dan perubahannya	2 Dokumen							
								Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 Dokumen							
								Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 dokumen							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen			25,140,000	27,654,000		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			200,000	220,000		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen monev kinerja perangkat daerah	12 dokumen			200,000	220,000		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Dokumen LKIP 2020	1 dokumen							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen							
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,557,371,816	7,213,108,998			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	60 ASN			6,557,371,816	7,213,108,998		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	13 SKP dan Rintug		0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan capaian kinerja	12 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,146,954,125	3,458,150,508			
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Keluar	4000 surat			55,320,908	60,980,700		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pengiriman Dokumen	30 dokumen							
								Materai 3000	600 buah							
								Materai 6000	400 buah							
								Buku Cek	1 Buah							
								Biaya Adm Bank	12 Bulan							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan***			6,900,000	7,590,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Bantuan Komunikasi Kepala OPD	12 bulan							
								Pulsa Handphone Layanan	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	22 unit			23,020,000	25,322,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	9 unit							
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 unit							
								Pembayaran Kir kendaraan roda 4	6 unit							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan***			602,700,000	662,970,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Belanja retribusi sampah	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	10 unit			42,800,000	47,080,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Laptop	5 unit							
								Printer	5 unit							
								Kamera	2 unit							
								UPS	5 unit							
								LCD Proyektor	3 unit							
								AC	30 unit							
								Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga (Kipas Angin, Tape Radio, HT, DVD Player, Dispenser, Wastafel, Sound sistem, Trolly, Mesin ketik, TV dsb)	5 unit							
								Genset	5 unit							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	69 jenis			114,987,216	126,485,938		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Belanja Bahan Komputer/Printer	6 jenis							
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Banner	30 buah			73,710,500	81,081,550		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Barang cetakan	19 jenis							
								Penggandaan surat-surat/dokumen	150.000 lembar							
								Jilid Biasa	25 buah							
								Laminating	25 lembar							
								Penggandaan HVS Warna F4 / A4	975 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis			20,411,000	22,452,100		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tiang pembatas antrian	4 unit			29,900,000	32,890,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Meja Baca	8 unit							
								Kursi kerja (eselon)	1 unit							
								Digital Smart Lock	1 unit							
								Lampu Emergency	2 unit							
								Almari Kaca	1 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	9 jenis			112,080,200	123,288,220		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20 jenis							
								Belanja obat-obatan	12 bulan							
								Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Genset Listrik	12 bulan							
								Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	2 jenis							
								Pengisian Alat Pemadam Kebakaran	5 unit							
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Buku perpustakaan	10 buku			1,500,000	1,650,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Snack rapat	3613 os			115,124,301	120,010,000			KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jamuan makan rapat	2150 oh								
								Forum Komunikasi Pustakawan dan Arsiparis	160 oh								
								Air minum untuk pengunjung	1500 galon								
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa	16 kali 3 orang			245,700,000	270,270,000			KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali 3 orang								
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung (Kotabaru, Pevita, Ngampilan)	3 unit			1,470,000,000	1,620,000,000			KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembangunan instalasi pencegahan dan pemadaman kebakaran	1 instalasi								
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 2	22 unit			221,100,000	243,210,000			KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Roda 3	11 unit								
								Roda 4	10 unit								
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan***			5,200,000	5,720,000			KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Gedung Kantor (Pintu, Wastafel, Keran, Jendela)	5 unit			1,500,000	1,650,000			KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa Keamanan	12 bulan								
	X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Mebelair (Kursi, Meja)	10 unit			5,000,000	5,500,000			KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Jumlah perpustakaan yang telah dibina	250					2,357,362,742	2,689,489,921			Kabid Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan	
Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan						Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	77										
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										2,122,160,952	2,430,767,952				
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan elektronik Perpustakaan Pevita dan Kotabaru	2% (3.260 pengunjung/tahun)	Implementasi Pelayanan perpustakaan		215,297,000	236,826,700			KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
								Sistem yang berjalan lancar (Sistem Informasi Perpustakaan, Website, Social Media)	100%								
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota	12 bulan	Implementasi Pelayanan perpustakaan	12 bulan	1,239,160,552	1,459,137,512			KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Tersedianya ragam koleksi lokal konten Yogyakarta	5 judul	dikembangkannya koleksi lokal konten Yogya	5 Judul	1,000,000	1,100,000			KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Perpustakaan sekolah	100 sekolah	Peran Perpustakaan dalam meningkatkan pengelolaan perpustakaan sekolah.	100 perpustakaan sekolah	6,540,000	7,194,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
								Lomba perpustakaan sekolah	167 sekolah	Diperolehnya tiga perpustakaan terbaik sebagai role model perpustakaan di Kota Yogyakarta	6 perpustakaan sekolah terbaik (2 kategori @ 3 penghargaan)					
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Perpustakaan khusus,	20 perpustakaan khusus	Peran Perpustakaan dalam meningkatkan pengelolaan perpustakaan khusus	20 perpustakaan khusus	8,700,000	9,570,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
								Penilaian perpustakaan khusus	114 perpustakaan khusus	Diperolehnya lima belas perpustakaan khusus/instansi terbaik sebagai role model perpustakaan khusus/instansi di Kota Lingkungan Pemerintah Yogyakarta	15 perpustakaan khusus/instansi pemenang (5 kategori @ 3 kejuaraan)					
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan tenaga perpustakaan	120 Orang	Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan	120 orang	3,600,000	3,960,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat				Kunjungan mobil keliling	400 kali	Intensitas layanan perpustakaan keliling di masyarakat	400 kali	198,660,000	218,856,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
								Kunjungan mobil internet keliling	700 kali	Intensitas layanan Kunjungan Mobil Internet Keliling	700 kali					
								Kunjungan motor perpustakaan keliling	1.300 kali	Intensitas layanan motor perpustakaan keliling	1.300 kali					
								Kunjungan layanan lesehan Jogja Istimewa	150 kali	Intensitas layanan lesehan Jogja Istimewa di trotoar area publik Kota Yogyakarta,	150 kali					
								Penambahan 2 motor perpustakaan keliling	2 motor	Penambahan armada perpustakaan keliling	2 motor					
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Tersedia ragam judul buku baru	2000 judul	dikembangkannya ragam judul buku baru	2000 judul	423,500,000	465,850,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Terkelola ragam bahan pustaka terbitan berkala dan Alat Peraga Edukatif (APE)	20 jenis	dikelolanya ragam bahan pustaka terbitan berkala dan Alat Peraga Edukatif (APE)	20 jenis	19,630,400	21,593,440		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Penerbitan Majalah Perpustakaan (Bookie)	3 Edisi			6,073,000	6,680,300		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Buku Statistik Perpustakaan	1 kali			235,201,790	258,721,969			
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelatihan menulis	80 Orang	adanya sosialisasi budaya baca tulis melalui pelatihan menulis bagi siswa	80 Orang	50,916,000	56,007,600		KaSie Pemasarakatan Budaya Gemar Membaca	APBD
	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan Di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Kampung Baca	14 kampung baca	Peran Perpustakaan dalam meningkatkan pengelolaan kampung baca.	14 kampung baca	43,028,790	47,331,669		KaSie Pemasarakatan Budaya Gemar Membaca	APBD
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Lomba siswa bercerita	100 peserta	Kemampuan berkompetisi siswa bercerita	10 orang pemenang (5 pa, 5 pi)	32,337,000	35,570,700		KaSie Pemasarakatan Budaya Gemar Membaca	APBD
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Diskusi buku	400 orang	Masyarakat dan pemustaka memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas untuk pembelajaran dan pemberdayaan,	400 orang	108,920,000	119,812,000		KaSie Pemasarakatan Budaya Gemar Membaca	APBD
								Ramadhan diperpuskota,	80 Orang	masyarakat inklusi sosial dapat mengisi ramdhan dengan kegiatan literasi membaca,	80 orang					
								liburan diperpuskota (kreasi literasi anak, asyiknya membuat film, junior smart camp)	100 orang	masyarakat /siswa inklusi sosial dapat mengisi liburan di perpustakaan dengan kegiatan kreasi literasi	150 orang					
								Wisata Literasi di Perpustakaan Kota Yogyakarta (Talita)	250 orang	Pemanfaatan perpustakaan bagi anak	250 orang					
								Gerakan Sumbang BUKU melalui Bank Buku	12 Bulan	Distribusi buku sumbangan dari masyarakat untuk yang membutuhkan meningkat	12 bulan					
Program pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1.200 judul					163,438,020	179,781,822		Kabid Pengembangan dan Pelestarian Pustaka	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota										132,438,020	145,681,822			
	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Identifikasi pelestarian naskah kuno yang bersumber dari masyarakat	100 Orang	Dilakukannya workshop identifikasi, penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno bagi masyarakat		109,875,520	120,863,072		KaSie Pelestarian Koleksi Pustaka dan Digitalisasi Pustaka	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Diseminasi Informasi naskah kuno bagi masyarakat	100 orang	Dilakukannya diseminasi informasi naskah kuno bagi masyarakat		22,562,500	24,818,750		KaSie Pengembangan Bahan Pustaka	APBD
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										31,000,000	34,100,000			
	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	20 judul	Tersedianya koleksi budaya etnis nusantara	50 jdl x 4 eks	30,000,000	33,000,000		KaSie Pengembangan Bahan Pustaka	APBD
	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengolahan koleksi budaya etnis nusantara	20 judul	Dilakukannya pengolahan koleksi budaya etnis nusantara		1,000,000	1,100,000		KaSie Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	APBD
Program pengelolaan pengembangan kearsipan	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	140 perangkat daerah /unit kerja					496,152,878	545,865,405		Kabid Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										40,704,000	44,774,400			
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pendidikan meningkat				Penilaian dan pemusnahan arsip	2 daftar	Arsip Pemkot yg dinilai dan dimusnahkan	2 daftar	40,704,000	44,774,400		KaSie Pengelolaan Arsip	APBD
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						Pendampingan penataan Arsip Dinamis	6 unit kerja	Unit Kerja yang telah ikut Sagita	6 unit kerja	153,027,779	168,334,650			
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengolahan Arsip Foto	1 dokumen	Arsip foto yang diolah	1 daftar	153,027,779	168,334,650		KaSie Pengelolaan Arsip	APBD
								Penyusunan Daftar Arsip Statis	1 dokumen	Arsip statis yg tercipta	1 daftar					
								Penyusunan Inventaris (Sarana Temu Balik Arsip)	1 dokumen	inventaris yg tercipta	1 daftar					
								Akuisisi arsip	2 dokumen akuisisi	Terselamatkannya arsip statis Pemerintah Kota Yogyakarta	2 dokumen akuisisi					
								Pemeliharaan dan perawatan arsip	2 jenis	Terpeliharanya arsip Pemerintah Kota Yogyakarta	2 jenis					
								Sprayer	1 buah							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota										302,421,099	332,756,355			
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan data arsip	500 unit data	Update data kahazanh arsip di Mariska dan SIKN	500 data	760,000	836,000		KaSie Pengelolaan Arsip	APBD
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kab/kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Penilaian Kinerja Kearsipan	159 institusi	Tersedianya dokumen hasil pembinaan kearsipan untuk menentukan kebijakan pembinaan selanjutnya	155 institusi	301,661,099	331,920,355		KaSie Pembinaan Kearsipan	APBD
								Forum Komunikasi Kearsipan	4 Kali	Tersedianya data dan informasi untuk membuat kebijakan pembinaan ke depannya	6 Kali					
								Penyuluhan kearsipan	23 kali	Tersedianya data dan informasi untuk membuat kebijakan pembinaan kepada masyarakat ke depannya	23 kali					
								Audit Kearsipan Eksternal dan Internal	2 dokumen	Tersedianya data dan informasi terkait rekomendasi LAKI sebagai acuan tindaklanjut PD/Unit Kerja	2 dokumen					
								Monitoring abiasa (aplikasi buku induk anak didik siswa sekolah)	1 monitoring	Pemantauan penggunaan aplikasi di sekolah	1 monitoring					
								Peliputan dan dokumentasi peristiwa monumental Kota dan Pemkot Yogyakarta	5 peliputan	Peliputan dan dokumentasi peristiwa monumental Kota dan Pemkot Yogyakarta	5 peliputan					
								Pubikasi Kearsipan	3 kegiatan	Publikasi kegiatan arsip 2020	3 kegiatan					
								Sosialisasi arsip	2 kali	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arsip	2 kali					
								Harddisk eksternal untuk backup arsip digital	2 unit							
PROGRAM BARU	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	840					52,876,000	58,163,600		KaBid Perlindungan Penyelamatan Data dan Informasi Arsip	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan										14,966,000	16,462,600			
	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Penelusuran Arsip Statis	1 dokumen	Arsip yang ditelusuri	1 dokumen	14,966,000	16,462,600		KaSie Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota										37,910,000	41,701,000				
	2.24.03.2.04.02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengalihmediaan Arsip	2 jenis	Terlindunginya arsip asli	2 jenis	37,910,000	41,701,000		KaSie Dokumentasi Data dan Informasi Arsip	APBD	
								Hardisk eksternal alih media arsip	2 buah								
Total												12,828,750,581	14,204,614,754				

Tabel 5.35 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi,Keuangan,dan Operasional Perkantoran	100%					1,983,316,388	2,181,647,927			Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang memadai	100%										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8,716,000	9,587,600	Baru			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 dan review renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	1,990,000	2,189,000			Kasubbag Keuangan,Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	4,840,000	5,324,000			Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku								
								Penyusunan RKA 2022 dan DPA Tahun 2021, RKPA dan DPPA Tahun 2021 dan RUP	5 Dokumen								
								Perjanjian Kinerja dan Perubahan perjanjian kinerja,Rencana aksi,dan pengukuran kinerja	4 dokumen								

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD(Review Renstra)	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	196,000	215,600		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD(LKIP, LPPD dan LKPJ, SPIP)	3 dokumen							
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	1,340,000	1,474,000		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	350,000	385,000		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
								Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen							
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1,395,116,688	1,534,628,357	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	13 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,324,414,188	1,456,855,607		Subbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	70,702,500	77,772,750		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum									100%	579,483,700	637,431,970	Lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1436 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,250,000	2,475,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	808 surat							
								Pengiriman Dokumen	10 Dokumen							
								Materai	500 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pulsa telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	10,200,000	11,220,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening telepon	12 bulan							
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
								Pembayaran Air	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,300,000	2,530,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	2 unit							
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	78,000,000	85,800,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa pengangkutan sampah	12 bulan							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	43 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,283,050	14,611,355		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetak	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,086,500	14,395,150		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	40000 lembar							
								Cetak Banner	3 Jenis							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,981,000	2,179,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	73,000,000	80,300,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Filing Cabinet	6 Unit							
								Almari lereg kaca	2 Unit							
								Almari Ayun kaca	2 Unit							
								Rak siku besi	2 Unit							
								Printer	2 Unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,159,000	3,474,900		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,320,000	1,452,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Buku Perundang-undangan	3 buku							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,900,000	10,890,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (DIY)	5x1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	141,400,000	155,540,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	6x2 orang							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	6x2 orang							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kursi kerja Meja kerja	4 buah 4 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,920,000	9,812,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Badan Kesbangpol Jasa Keamanan Kantor	1 Unit 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	123,750,000	136,125,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4	3 Unit 2 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	55,669,750	61,236,725		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,000,000	6,600,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer AC Split Printer Mesin ketik Kamera Laptop OHP	17 Unit 6 Unit 10 Unit 3 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	35,264,400	38,790,840		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										697,351,290	767,086,419		Kabid Kesatuan Bangsa	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										697,351,290	767,086,419	baru		
	8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Dokumen Program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	500,000	550,000		Kasubbid Ideologi, wawasan kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											100%					
	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			FGD Pluralisme Kota Yogyakarta	50 orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	13,510,000	14,861,000		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Upacara Peringatan Serangan Oemoem 1 Maret	1 kali	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	683,341,290	751,675,419		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
								Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	50 orang							
								Peringatan Jogja Kembali	1 kali							
								Pemantapan rasa Nasionalisme bagi PNS/ASN se Kota Yogyakarta	100 orang							
								Peringatan serbuan Kotabaru	1 kali							
								Sinau pancasila	1000 orang							
								Pemantapan rasa Nasionalisme bagi Pemuda dan Mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta	450 orang							
								Pemantapan rasa Nasionalisme bagi Ormas/LSM di Kota Yogyakarta	200 orang							
								Roadshow Museum Sejarah kebangsaan	120 orang							
								Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Masyarakat	200 orang							
								Pemantapan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta	115 orang							
								Cinta Tanah Air (CTA) bagi Pelajar	200 orang							
								Gelar Kebangsaan Kota Yogyakarta	132 orang							
								Karnaval HUT Kota Yogyakarta	100 orang							
								Penyelenggaraan Bela Negara	50 orang							
PROGRAM BARU	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	81%			1,150,292,058	1,265,255,263		Kabid Politik dan Organisasi kemasyarakatan	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										1,150,292,058	1,265,255,263	baru		
	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Dokumen Program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	100%	500,000	550,000		Kasubbid politik	APBD
	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik	8 parpol	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	100%	8,780,000	9,592,000		Kasubid Politik	APBD
								Verifikasi Kelengkapan bantuan keuangan kepada parpol	10 bulan							
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			FGD Kelas Demokrasi bagi siswa sekolah	200 Orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	100%	1,086,909,018	1,195,599,919		Kasubid Politik	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat se Kota Yogyakarta	300 orang							
								Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik se Kota Yogyakarta	200 orang							
								Pendidikan Politik bagi Kaum Marginal dan Disabilitas se Kota Yogyakarta	200 orang							
								Pendidikan politik bagi kelompok perempuan se kota yogyakarta	200 orang							
								Hibah Bantuan keuangan Partai Politik	8 parpol							
								Sewa Gedung Bawaslu	1 Unit							
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Bimbingan teknis bagi partai politik penerima bantuan keuangan di Kota Yogyakarta	1 kali	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	100%	15,130,000	16,643,000	Kasubid Politik	APBD	
								Verifikasi kelengkapan Bantuan Keuangan Kepada Parpol	10 bulan							
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Pelaporan Situasi dan Kondisi Politik Di Daerah	12 bulan	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	100%	38,973,040	42,870,344	Kasubid Politik	APBD	
								Pemantapan SIM Poldagri	1 kali							
PROGRAM BARU	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	22%					227,851,080	250,636,188	Kabid Politik dan Organisasi Kemasyarakatan		

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat										227,851,080	250,636,188	baru		
	8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Dokumen Program kerja di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi, pengawasan ormas dan ormas asing	1 dokumen	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	500,000	550,000		Subbid Organisasi kemasyarakatan	APBD
	8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Penyusunan Perwal berkaitan tercatat atau terregister ormas di Kota Yogyakarta (pembuatan dasar hukum)	12 bulan	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	6,850,000	7,535,000		Subbid Organisasi Kemasyarakatan	APBD
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Pembinaan ormas di Kota Yogyakarta	100 orang	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	214,551,080	236,006,188		Subbid Organisasi Kemasyarakatan	APBD
								FGD Forum dan Organisasi Masyarakat	50 orang							
								Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Ormas	200 orang							
								Pembinaan Tim Pengawasan Ormas	20 orang							
								Sosialisasi peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2017	200 orang							
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta							5,950,000	6,545,000		Kasubbid Organisasi kemasyarakatan	APBD
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Pendataan Ormas Terdaftar, Teregister dan Tercatat	12 bulan	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	5,950,000	6,545,000		Kasubbid Organisasi kemasyarakatan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROGRAM BARU	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	75%					635,419,040	698,960,944			Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	
						Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	65%										
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya										635,419,040	698,960,944	baru			
	8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Yogyakarta			Dokumen Perogram kerja di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	500,000	550,000			Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
	8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Kursus Paralegal	1 kali	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	10,500,000	11,550,000			Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Pembinaan Satgas Anti Penyalagunaan NAPZA di sekolah	200 orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	377,129,040	414,841,944			Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
								Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan peredaran Gelap Narkoba)	200 orang								
								Penjangkau Rehabilitasi Korban Napza	4 orang								
								FGD Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Pengurus Rumah Ibadah	100 orang								
								Pemantapan FKUB	100 orang								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Sarasehan Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta	200 orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	247,290,000	272,019,000		Kasubbid Ideologi, wawasan kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	APBD
								Workshop keanekaragaman budaya lokal untuk memperkuat persatuan dan kesatuan	100 orang							
								Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta dalam rangka hari lahirnya Pancasila	200 orang							
								Pembinaan Kelurahan Kerukunan Ummat Beragama	200 orang							
								Pembinaan Kerukunan Ummat Beragama Bagi Pemuda Lintas Agama	100 orang							
								Penguatan Kader Anti Napza	200 orang							
								Penguatan Volunteer Supervisi Kegiatan Anti Napza	200 orang							
PROGRAM BARU	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	70%					952,595,040	1,047,854,544		Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										952,595,040	1,047,854,544	baru		
	8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Dokumen Program kerja bidang Kewaspadaan dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	500,000	550,000		Subbid Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Verifikasi dan Rekomendasi SKP (Surat Keterangan Penelitian)	3 jenis	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	68,510,000	75,361,000		Subbid Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	APBD
								Fasilitasi Tim Penangan Konflik Sosial	12 bulan							
								Bimbingan Teknis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 bulan							
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	12 bulan	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	697,396,000	767,135,600		Subbid Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	APBD
								Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 kali							
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Kota Yogyakarta			Penyusunan data penanganan konflik sosial	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	186,189,040	204,807,944		Subbid Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	APBD
								Penyusunan data potensi konflik daerah dan perubahan data sosial	1 dokumen							
								Pemantauan Orang asing dan organisasi masyarakat asing	12 bulan							
								Monitoring operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	1 dokumen							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Fasilitasi tim kewaspadaan dini pemerintah daerah	12 bulan							
Total												5,646,824,896	6,211,441,285			

Tabel 5.36 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					6,192,281,848	6,319,069,573			Sekretaris Dinas	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	10,000,000	10,000,000	Lanjutan			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja tahun 2021	2 Dokumen	2,000,000	2,000,000			Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA	3 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA,DPA,DPPA	3 Dokumen	1,000,000	1,000,000			Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	4 Dokumen	3,000,000	3,000,000			Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terlaksananya Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2,000,000	2,000,000			Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Telaksananya evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2,000,000	2,000,000			Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,136,657,341	4,136,657,341	Lanjutan			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarkannya Gaji dan tunjangan ASN	33 ASN	4,129,657,341	4,129,657,341			Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	2,000,000	2,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Terkelolanya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Terselesaikannya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersajinya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Tersajinya Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,045,624,507	2,172,412,232	Lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat masuk Surat Keluar	2.100 Surat	Terselenggaranya jasa surat menyurat	100%	1,575,000	4,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Materai	Lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	Terbayarkannya Rekening Listrik dan telepon	100%	12,000,000	12,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening telepon	12 Bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja STNK	18 Unit	Terlaksananya Belanja STNK	100%	12,575,000	13,950,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	21 orang	Tercukupinya pemenuhan Tenaga Teknis	100%	982,016,117	982,016,117		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah Pengelola Parkir Jasa Usaha UPT Maloboro	2 Lokasi							
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Jasa Kebersihan	12 bulan	Terlaksananya Kebersihan Kantor	100%	119,700,000	125,685,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Alat Tulis Kantor	55 jenis	Tercukupinya Belanja Alat Tulis Kantor	100%	21,276,887	23,102,400		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Cetak	8 jenis	Tercukupinya belanja Cetak dan Penggandaan	100%	35,387,500	40,012,630		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Belanja Penggandaan	44.795 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Pemeliharaan Listrik	2 jenis	Terlaksananya pemeliharaan listrik	100%	18,400,853	24,751,125		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Komputer	3 unit	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	52,444,000	75,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Belanja Printer	1 unit							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Kursi rapat lipat	20 Unit							
								Webcam	12 Unit							
								Rak Besi	1 Unit							
								Alat Semprot Elektrik	3 Unit							
								Kipas angin dinding	3 Unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Bahan / Alat-alat / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga / Kerja	8 jenis	Terlaksananya penyediaan bahan/alat-alat/Perlengkapankantor /Rumah tangga/Kerja dan kebersihan	100%	97,028,150	110,000,000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis							
								Belanja Alat Listrik	5 Jenis							
								BBM Genset	1 Unit							
								Retribusi	2 Jenis							
								Belanja Bahan Komputer/Printer	24 Jenis							
								Bahan Kimia	1 Jenis							
								Iuran izin frekuensi HT UPT Malioboro	1 Kali							
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Surat Kabar	2 jenis	Terlaksananya belanja surat kabar	100%	1,560,000	1,984,500	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	600 OS	Terlaksananya Belanja Makan minum Rapat	100%	8,700,000	14,579,460	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perjalanan Dinas Jawa	7 Kali	Terselenggaranya Perjalanan Dinas	100%	312,900,000	350,000,000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Perjalanan Dinas Luar Jawa	7 Kali							
								Perjalanan Dinas Dalam DIY	15 Kali							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung	1 unit	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung	100%	252,000,000	263,000,000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Jasa Keamanan Gedung Kantor	12 Bulan							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	11 unit	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	109,581,000	122,331,000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	6 unit							
								Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	1 unit							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Komputer	18 unit	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100%	8,480,000	10,000,000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
								Pemeliharaan AC	8 unit							
								Pemeliharaan Printer	8 unit							
								Pemeliharaan Genset	1 unit							
								Pemeliharaan Wireless	1 unit							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Jumlah Pengunjung Taman Pintar	600.000 Pengunjung					20,072,534,400	21,667,685,000		Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar, Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata, dan Kepala UPT Malioboro	
Program pengembangan Taman Pintar						Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	50%									
Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata	86.36									
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								Terselenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Pintar dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung	100%	9,380,000,000	10,000,000,000	Lanjutan		
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	12 Bulan	Terselenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Pintar dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung	100%	9,380,000,000	10,000,000,000		Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar	BLU
								Pengembangan Ruang Ekonomi Kreatif	1 Unit							
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								Dukungan 0,44 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 29,44 %	100%	7,297,685,000	7,297,685,000	Lanjutan		
	3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara fisik selama 12 bulan: a. Street furniture; b. Vegetasi; c. Limbah; d. Kelistrikan; e. Air; f. Peralatan pendukung tenaga pemeliharaan; g. Prasarana pendukung kawasan; h. Penjagaan kawasan Malioboro; i. Pemeliharaan Kebersihan; j. Pemeliharaan jalan/pemolesan teraso	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km	Dukungan 0,44 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 29,44 %	100%	7,297,685,000	7,297,685,000		Kepala UPT Malioboro	DAIS
								Penataan PKL dan Pelaku Wisata kawasan Malioboro secara umum								
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								Daya Tarik Wisata (DTW) yang Dikembangkan	100%	3,394,849,400	4,370,000,000	Lanjutan		

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Workshop Pengembangan ODTW	40 Orang	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata	100%	598,431,000	620,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	APBD
								Festival ODTW (Langensari)	1 Event							
								Pelatihan Tata Kelola Destinasi	45 Orang							
								Pendukung Kesemarakkan Event Internasional di Kampung Wisata	17 Kampung Wisata							
	3.26.02.2.03.04	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			DED Fasilitas Sarana dan Prasarana Kampung Wisata	2 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	816,860,000	1,200,000,000		Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi dan Prasarana Pariwisata	APBD
								Pengadaan Fasilitas Sarana Prasarana Kampung Wisata	2 Kampung Wisata							
								Updating Daya Tarik Atraksi wisata	1 Dokumen							
								Penyusunan Masterplan Ekosistem Kotabaru	1 Dokumen							
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Embrional Kampung Wisata	8 Kampung	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata	100%	1,371,623,400	1,900,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	APBD
								Pengembangan Atraksi Wisata	25 Atraksi							
	3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Branding Kampung Wisata	2 Kampung Wisata	Daya tarik Wisata (DTW) yang dikembangkan	100%	607,935,000	650,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	APBD
								Surveillance (pemantauan perkembangan kampung wisata yang terakreditasi)	17 Kampung Wisata							
								Pengembangan Wisata Belanja dan Kuliner	4 Kali							
								Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima	16 DTW							
Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.200.000 Orang				3,680,770,000	4,316,282,762		Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional	100%	3,680,770,000	4,316,282,762	Lanjutan		
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Promosi Pariwisata melalui berbagai media (lokal dan nasional)	2 Jenis	Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional	100%	430,000,000	430,000,000		Kepala Seksi Promosi Pariwisata	APBD

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Direct Promotion (Tabel Top/Travel Dialog)	4 Kali	Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional	100%	2,480,470,000	3,000,000,000		Kepala Seksi Promosi Pariwisata	APBD
								Jogjagavanza	1 Event							
								Jogja Famtrip	1 Kali							
								Event Pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival)	1 Event							
								Pemilihan Dimas Diajeng Kota Jogja	1 Kali							
								Pengiriman Misi Kerjasama	2 Kali							
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan Tourist Information Service (TIS)	1 Jenis	Teridentifikasinya wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta	100%	657,309,117	736,282,762		Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata	APBD
								Pelayanan Tourist Information Center (TIC)	1 Jenis							
								Analisis Lama Tinggal Wisatawan	1 Dokumen							
								Pengelolaan Website Sistem Informasi Pariwisata Kota Yogyakarta	1 Sistem							
								Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan	1 Jenis							
								Pembuatan Media Promosi Pariwisata: brosur, buku panduan, newsletter, Calender of Events, tas promosi, Direktori Hotel dan video	7 Jenis							
								Kajian Perkembangan Data Kepariwisataaan	1 Dokumen							
								Launching CoE	1 Kali							
								Kajian Belanja Wisatawan	1 Dokumen							
	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO, berupa iuran dan pertemuan)	1 Lembaga	Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional dan Internasional	100%	112,990,883	150,000,000		Kepala Seksi Promosi Pariwisata	APBD
								Kegiatan Java Promo dalam rangka kerjasama	1 Kali							
Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi	37.08%			2,508,724,500	2,725,000,000		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Pembinaan Industri Pariwisata	
								Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	66.87%							

RPJMD 2017-2022 PROGRAM	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	100%	2,508,724,500	2,725,000,000	Lanjutan		
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi Sdm Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Workshop Perijinan Usaha Pariwisata	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata	100%	373,924,000	450,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	APBD
								Pelatihan Manajemen Homestay	50 Orang							
								Pelatihan Pemandu Tematik	50 Orang							
								Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya	50 Orang							
								Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja	50 Orang							
								Pengembangan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata	115 Orang							
	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Updating usaha Pariwisata	1 Dokumen	Tersedianya Data UJP	100%	141,125,000	175,000,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	APBD
								FGD dengan PHRI, ASHITA, GIPI	3 Kali							
								FGD Forum Public Relation Pelaku Usaha Pariwisata	3 Kali							
	3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Sertifikasi pemandu pariwisata baru	40 Orang	Pelayanan dan pengelolaan usaha jasa pariwisata	100%	220,000,000	250,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	APBD
								Sertifikasi kompetensi SDM pelaku pariwisata	30 Orang							
								Sertifikasi pemandu yang habis masa berlakunya	35 Orang							
	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Jogja Kreatif (Car Freeday Sudirman)	8 Kali	Potensi atraksi wisata budaya lokal terpublikasi dan terpelihara	100%	1,646,025,500	1,700,000,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	APBD
								Suroto Public Space Kreatif	5 Kali							
								Monitoring dan Pengawasan UJP (hotel, restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)	5 Jenis							
								Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata	40 Usaha							
	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Bimbingan Teknis SDM Usaha Jasa Pariwisata	120 Orang	Terfasilitasinya Kompetensi SDM UJP	100%	127,650,000	150,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	APBD
Total												32,454,310,748	35,028,037,335			

Tabel 5.37 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Prosentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					15,524,128,290	19,528,343,755		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan perkantoran operasional	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,734,400	18,930,240	Lanjutan		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	670,000	1,000,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen penganggaran (RKA, RKPA, DPA, DPPA)	4 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	6,194,000	8,567,540		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
						Pengelolaan Website OPD	12 bulan									
						Perjanjian Kinerja	2 dokumen									
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra OPD	3 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	840,000	1,514,100		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita acara			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	670,000	2,472,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	4,360,400	5,376,600		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										9,394,592,890	11,676,062,665	Lanjutan		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Gaji dan Tunjangan ASN	86 ASn			Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	9,383,392,890	11,649,797,665		Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD
						Tambahan Penghasilan Pegawai	86 ASN									

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									5% Pendapat an retribusi OPD							
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			LaporanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	9,600,000	17,304,000		Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,600,000	8,961,000		Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										6,116,801,000	7,833,350,850	Lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Materai	3,792 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	17,010,000	25,029,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	2,352,120,000	2,671,366,800		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening air	12 bulan							
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	26 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	30,280,000	32,218,400		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran pajak kendaraan roda 3	2 unit							
								Pembayaran pajak kendaraan roda 4	11 unit							
								Pembayaran pajak kendaraan roda 6	7 unit							
								KIR kendaraan dinas/operasional	15 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	63 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	2,464,451,100	2,712,432,900		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor/pasar	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	159,900,000	165,376,800		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Jasa assainering	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	75 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	55,610,900	95,460,400		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetak	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	58,154,000	98,159,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	243,270 lembar							
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan komputer/printer	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	41,079,000	366,644,980		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Dekorasi, dokumentasi, publikasi	5 jenis							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	27 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	19,384,000	25,831,370		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,992,000	2,657,400		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			makanan dan minum rapat	1,980 orang jamuan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	29,310,000	46,514,800		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								makanan dan minuman harian umum	30 galon							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Pulau Jawa)	14 kali 14 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	276,055,000	874,882,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 6	7 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	505,055,000	554,037,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Roda 4	11 unit							
								Roda 3	2 unit							
								Roda 2	26 unit							
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	80 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	106,400,000	162,740,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								AC Split	35 unit							
								Printer	52 unit							
								Tabung appar	190 unit x 2 kali							
								alat komunikasi/ elektronik	80 kali							
Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Prosentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20%					205,150,175	211,304,700		Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										205,150,175	211,304,700	Lanjutan		
	3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	24 kali	Pengawasan sarana distribusi, penggunaan barang berbahaya dan penggunaan BTMP di Kota Yogyakarta 14 Kecamatan	14 Kecamatan	205,150,175	211,304,700		Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan	APBD
								Monitoring Penggunaan BTM/P	8 kali							
								Pengawasan Toko Modern	20 lokasi							
								Kajian distribusi komoditas perdagangan dari hulu ke hilir	1 kajian							
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Persentase Pasar yang Memenuhi standar Pasar Sehat	23.30%					18,473,621,720	19,228,052,356		Kepala Bidang Pasar Rakyat	
Program penataan, pengembangan dan pendapatan pasar						Pendapatan Retribusi Pasar	Rp. 12.944.027.200									
Program pengembangan pusat bisnis						Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Rp. 4.665.838.520									
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										9,508,478,550	9,993,954,774	Lanjutan		
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan alat listrik dan elektronik	30 jenis	Dukungan terhadap kondisi sarana prasarana bangunan fisik dan non fisik Pasar rakyat yang memadai	30 pasar	1,078,299,750	1,110,648,820		Seksi Sarana Prasarana Pasar	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana pasar	2 jenis								
								Mesin Kompresor dan perlengkapannya	1 unit								
								Mesin las	7 unit								
								Skafolding	4 set								
								Mesin Gerinda	1 unit								
								Mesin Pompa Air dan perlengkapannya	11 unit								
								Pemeliharaan dan Perbaikan gedung Pasar (Beringharjo, Terban dan Giwangan)	3 pasar								
								Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Pasar (genzet, Radio, CCTV dan Pemeliharaan Sumur Dalam)	4 jenis								
								Pemeliharaan jaringan air dan listrik (Sentul, Legi Patangpuluhan, Beringharjo)	3 pasar								
								Penyusunan dokumen perencanaan Pasar	1 dokumen								
								Pemeliharaan Genset dan diesel hydrant pasar	5 unit								
								Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	30 pasar								
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	UPT Pusat Bisnis			Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan (sewa kios, sewa lahan promosi, sewa counter, service charge(SC))	12 bulan	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang terlaksana	12 bulan	5,558,167,000	5,724,912,100		Kepala UPT Pusat Bisnis	BLU	
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	UPT Wilayah I			Bagi hasil pendapatan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar UPT Wilayah I (kamar mandi/WC, TJU, TKP dan Bongkar muat)	4 kerjasam a/Mou	Optimalnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar Wilayah I	16 pasar	1,129,861,200	1,163,757,036		Kepala UPT Wilayah I	APBD	
								Pemungutan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah I	15 pasar								
								Pembinaan Koordinator Pasar dan Juru Pungut UPT Wilayah I	37 orang								
								Pengelolaan administrasi penggunaan dan pemanfaatan listrik mandiri pedagang pasar UPT Wilayah I	9 pasar								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E - Retribusi UPT Wilayah I (Beringharjo, Kranggan, Pingit, Karangwaru, Serangan, Suryobranta, Senen, Pathuk, PKP, Terban, Sanggrahan, Semaki, Demangan, Talok dan Lempuyangan)	15 pasar							
								Koordinasi intensif UPT Wilayah I 12 kali @ 15 orang	180 Orang							
								Bagi hasil pendapatan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar UPT Wilayah II (kamar mandi/WC, TJU, TKP dan Bongkar muat)	4 kerjasam a/Mou	Optimalnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar Wilayah II	16 pasar	929,901,200	931,419,936	Kepala UPT Wilayah II	APBD	
	3.30.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	UPT Wilayah II			Monev pemungutan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah II	16 pasar							
								Pembinaan Koordinator Pasar dan Juru Pungut UPT Wilayah II	40 orang							
								Pengelolaan administrasi penggunaan dan pemanfaatan listrik mandiri pedagang pasar UPT Wilayah II	11 pasar							
								Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E - Retribusi UPT Wilayah II (Gedongkuning, Kotagede, Telo Karangajen, Legi Patangpuluhan, Prawirotaman, Ngasem, Sentul, Ciptomulyo, Tunjungsari, Kluwih, Ledok Gondomanan, Giwangan, Beringharjo Barat dan Beringharjo Tengah)	16 pasar							
								Koordinasi intensif UPT Wilayah II 12 kali @ 15 Orang	180 Orang							
	3.30.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	UPT PASTY			Sarana Prasarana Fasilitas PASTY yang dipelihara	7 jenis	Optimalnya pengelolaan dan pelayanan PASTY	1 Pasar	812,249,400	1,063,216,882	Kepala UPT PASTY	APBD	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Bagi hasil pendapatan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar PASTY (Kamar mandi/WC dan Parkir TKP)	2 kerjasama/Mou								
								Operasional Pengelolaan Pasar Pasty	12 bulan								
								Hiburan Pasty Movement Point	8 bulan								
								Pembinaan pedagang PASTY	100 pedagang								
								Penyediaan Pompa Air	2 unit								
								Pengadaan Meja	4 unit								
								Pengadaan Kursi	10 unit								
								Pengadaan sarana prasarana fasilitas PASTY	11 jenis								
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya										8,965,143,170	9,234,097,582	Lanjutan			
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan kebersihan pasar	30 jenis	Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian pasar rakyat yang aman, tertib, bersih dan nyaman	30 pasar	7,882,008,670	8,118,468,982		Kepala Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar	APBD	
								Pemeliharaan kebersihan pasar	30 pasar								
								Pemeliharaan taman Pasar (giwangan, Sentul, Gedongkuning, dan Lempuyangan)	4 pasar								
								Pengolahan dan Pemilahan Sampah	1 pasar								
								Pelumpuran pasar tersebar	4 pasar								
								Pengamanan dan penertiban pasar	30 pasar								
								Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 hari								
								Gerakan Reresik Pasar	9 kali								
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa tanah pasar (Beringharjo, Ngasem, Pingit, Pujokusuman)	4 pasar	Terwujudnya komunikasi efektif dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pasar tradisional sehingga eksistensi pasar rakyat terjaga	30 pasar	1,083,134,500	1,115,628,600		Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang	APBD	
								Pengadaan barang cetakan sarana administrasi pendapatan pasar (Karcis, Blangko-blanko dan BKPR)	3 jenis								

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pengadaan hardisk pendukung pengelolaan SIM Pasar dan Radio Pasar	4 unit								
								Pengelolaan data pedagang	30 pasar								
								Pengelolaan SIM Pasar	12 bulan								
								Pengelolaan Radio Pasar	1 radio pasar								
								Monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar	30 pasar								
								Layanan administrasi pedagang	56 kali								
								Sarasehan pedagang dan Komunitas Pedagang	3 sarasehan								
Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100%					310,401,200	319,713,300			Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										64,374,400	66,305,700	Lanjutan			
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2 Kali	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentin	2 Kali	29,320,000	30,199,600			Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD
	3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	Terkendalinya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat di Kota Yogyakarta	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU, toko modern dan Pasar rakyat	35,054,400	36,106,100			Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD
								Kemitraan Stabilitas Ketersediaan Bahan dan Pasar (Agen dan Pangkalan)	4 kali								
								Operasional Sim Perdagangan	12 bulan								
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										246,026,800	253,407,600	Lanjutan			
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi Pengendalian Harga TPID	16 kali	Laporan Koordinasi Pengendalian Harga TPID	16 kali	18,800,000	19,364,000			Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD
	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Kajian Pengendalian Harga Pasar (Omset Pasar) dan Perlindungan Konsumen (Kepuasan Masyarakat)	2 kajian	Stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan dan barang penting di Kota Yogyakarta	8 pasar	223,626,800	230,335,600			Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Monitoring dan pengendalian harga 9 bahan pokok (Kranggan, Beringharjo, Demangan, Lempuyangan, Kotagede, Legipatangpuluhan, Prawirotaman, sentul)	8 pasar								
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Operasi Pasar	12 Kali	Laporan pemantauan Operasi Pasar	12 Kali	3,600,000	3,708,000		Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD	
Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				ProsentaseAlat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlngkapannya) yang bertanda tera sah	92.76%					318,967,300	328,536,319		Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										318,967,300	328,536,319	Lanjutan			
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya) di 15 lokasi @ 2 kali	30 kali	Meningkatkan UTTP yang di tera dan tera ulang/bertanda tera sah untuk perlindungan konsumen dan produsen	30 kali	229,031,500	235,902,445		Kepala UPT Metrologi	APBD	
								Pengujian standar bagi alat tera (ukuran panjang, rool tester, bejana meter air, anak timbangan kelas F2, bejana ukur, timbangan elektronik, anak timbangan kelas F2 terdiri dari 5kg, 10kg, 20 kg, anak timbangan klas M2)	217 standar ukuran								
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			KIE tentang Kemetrolagian (17 kali @24 orang)	408 orang	Peningkatan Pemahaman Konsumen tentang Kegiatan Metrologi Legal di Kota Yogyakarta serta adanya kepastian hukum dalam pemakaian UTTP untuk meningkatkan daerah tertib ukur di Kota Yogyakarta	408 orang; 17 pasar	89,935,800	92,633,874		Kepala UPT Metrologi	APBD	
								Pengamatan tanda tera UTTP dan penggunaannya	54 kali								
								Penyediaan Timbangan Ukur Ulang	1 unit								
Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8.00%					1,823,986,348	1,878,706,000		Kepala Bidang Bina Usaha dan Kemitraan Perdagangan		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										1,823,986,348	1,878,706,000	Lanjutan			

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Pameran Luar DIY 2 kali	40 UKM	Meningkatnya akses pemasaran produk dalam negeri melalui media promosi bagi pelaku usaha dan pedagang pasar Kota Yogyakarta	70 UKM dan pedagang di 30 pasar	1,509,669,598	1,554,959,700		Kepala Seksi Bimbingan Usaha	APBD
								Pameran Dalam DIY 1 kali	30 UKM							
								Publikasi dan promosi pasar rakyat (Kalender pasar, media cetak, media elektronik, Spanduk dan Poster publikasi, ILM, reklame) Garebeg Pasar Jogja	7 publikasi 1 kali							
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kota Yogyakarta			Gelar kemitraan UKM, Toko Modern dan Distributor	1 kali, 14 UKM, BULOG, 2 Toko modern	Meningkatnya kualitas SDm dan Omzet UKM Binaan serta optimalnya pengelolaan sarana prasarana penunjang Perdagangan Kota Yogyakarta	655 UKM, 30 Pasar	314,316,750	323,746,300		Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan	APBD
								Kemitraan UKM dan Toko Modern	200 UKM							
								Kemitraan UKM dengan jasa usaha pariwisata	200 UKM							
								Kemitraan UKM dengan e-commerce	200 UKM							
								Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah	5 UKM							
								Kemitraan Pengelolaan e Retribusi	12 bulan							
								Kemitraan pengelolaan fasilitas penunjang perdagangan (kamar mandi/WC, Parkir)	2 fasilitas							
								Pembinaan mitra pengelola fasilitas penunjang perdagangan	115 pengelola							
Total												36,656,255,033	41,494,656,430			

Tabel 5.38 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,200,650,528	10,157,898,554		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										65,826,710	102,500,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 Dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,366,640	12,000,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD,		12 bulan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	10,947,640	16,500,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
						Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		7 dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,969,320	14,000,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV		6 dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,154,660	15,000,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,388,450	45,000,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										7,119,121,928	8,566,578,554	Baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,955,982,128	8,347,178,554		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	61,447,080	76,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	62,766,384	75,600,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,080,000	5,000,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,080,000	3,400,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	31,923,860	45,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,842,476	7,500,000		ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	2,400,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	4,500,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,015,701,890	1,488,820,000	Baru		

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	13.184 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,225,000	11,400,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Surat Keluar	1.399 surat							
								Materai	2.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,400,000	20,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 24 unit	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,880,000	9,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	96,255,000	117,600,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	27 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	36,712,440	35,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	65,862,200	85,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	100.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,207,450	3,600,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Monitor LED 60", Screen Layar LCD, Toner Laserjet 87a, Toner Laserjet 83a, Cartridge Tinta Printer Warna, Cartridge Tinta Printer Hitam, Refil Toner laser, Refil Tinta 664 Warna, Refil Tinta 664 Hitam, Mouse, Flashdisk, Kabel HDMI, Wifi, Baterai Laptop	1 unit, 1 tube, 2 tube, 6 dos, 6 dos, 72 tube, 36 dos, 60 dos, 18 buah, 30 buah, 6 buah, 5 buah, 2 buah			91,180,000	150,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20,089,000	28,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,820,000	3,300,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	2100 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	60,900,000	65,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 10 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 20 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 8 kali 2 orang	38 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	275,800,000	440,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung/Kantor, Fingerprint Lock : 2 unit, Hand dryer : 3 unit, Pembuatan Backdrop Ruang Rapat : 1 unit	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	124,500,000	180,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 24 unit dan roda 4 : 4 unit	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	168,520,800	247,200,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15,600,000	18,720,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer (PC) : 10 unit, Laptop : 8 unit, AC Split : 10 unit, Printer : 8 unit, Mebelair : 3 jenis dan Sound System : 3 unit	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,750,000	75,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	92,20%					819,795,134	1,179,181,827		Ka Bid Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	100%									
	5.01.02.2.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan										527,404,144	750,624,045	Baru		
	5.01.02.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen RKPD Tahun 2022	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	159,084,528	273,956,112		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
								Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	32,867,200	47,792,640		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
	5.01.02.2.01.03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 laporan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	73,707,872	107,450,616		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah	1 laporan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	17,302,872	21,560,616		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
	5.01.02.2.01.05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Review Perencanaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	45,628,616	46,000,000		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
								Dokumen Renja Perangkat Daerah 2022	1 dokumen							
								Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2021	1 dokumen							
	5.01.02.2.01.06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	45,389,036	54,750,216		Ka. Sub Bidang Analisa Data Pembangunan	APBD
	5.01.02.2.01.07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	118,517,758	153,624,022		Ka. Sub Bidang Analisa Data Pembangunan	APBD
								Pengelolaan SIM Pemberdayaan	1 laporan							
	5.01.02.2.01.09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Analisa Data	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	34,906,262	45,489,823		Ka. Sub Bidang Analisa Data Pembangunan	APBD
								Metadata sektoral	1 dokumen							
	5.01.02.2.02	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah										96,711,060	116,100,000	Baru		
	5.01.02.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler	1 dokumen	Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah	100%	96,711,060	116,100,000		Ka. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	APBD
								Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler	1 dokumen							
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah										195,679,930	312,457,782	Baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.02.2.03.01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100%	31,984,160	44,858,142		Ka. Sub Bidang Pembangunan Daerah	APBD
								Pengendalian Kebijakan RKPD 2022	1 dokumen							
								Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021	1 dokumen							
	5.01.02.2.03.03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Evaluasi Hasil RPJMD 2020	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100%	47,113,110	77,339,880		Ka. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah	APBD
								Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2020 dan TW I, II, III 2021	6 dokumen							
	5.01.02.2.03.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100%	116,582,660	190,259,760			APBD
								Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 dokumen							
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	92,20%					426,514,493	610,167,704		Ka. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	5.01.03.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan										46,797,792	78,530,868	Baru		
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor pemerintahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%	41,910,876	65,358,569		Ka. Sub Bidang Pemerintahan	APBD
								Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pemerintahan	1 dokumen							
								Pengelolaan data sektor pemerintahan	1 dokumen							
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor pemerintahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%	4,886,916	13,172,299		Ka. Sub Bidang Pemerintahan	APBD
	5.01.03.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia										48,680,760	96,704,738	Baru		
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor pembangunan manusia	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	100%	39,644,980	81,704,738		Ka. Sub Bidang Pembangunan Manusia	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia	1 dokumen							
								Pengelolaan data sektor pembangunan manusia	1 dokumen							
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	100%	9,035,780	15,000,000		Ka. Sub Bidang Pembangunan Manusia	APBD
	5.01.03.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat										331,035,941	434,932,098	Baru		
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat	100%	294,894,097	386,752,524		Ka. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	APBD
								Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat	3 dokumen							
								Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen							
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat	100%	36,141,844	48,179,574		Ka. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	APBD
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	92,20%					742,597,698	923,282,778		Ka. Bidang Perekonomian	
	5.01.04.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian										112,116,590	158,282,778	Baru		
	5.01.04.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor perekonomian	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	100%	75,692,478	113,282,778		Ka. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah	APBD
								Perencanaan dan evaluasi strategis sektor perekonomian	2 dokumen							
								Pengelolaan data sektor perekonomian	1 dokumen							
	5.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor perekonomian	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	100%	36,424,112	45,000,000		Ka. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah	APBD
	5.01.04.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif										630,481,108	765,000,000	Baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.04.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor ekonomi kreatif	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif	100%	148,616,928	250,000,000		Ka. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	APBD
								Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi kreatif	2 dokumen							
								Pengelolaan data sektor ekonomi kreatif	1 dokumen							
	5.01.04.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100%	448,075,960	475,000,000		Ka. Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	APBD
								Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen							
								Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen							
								Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen							
								Dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Kreatif	1 dokumen							
	5.01.04.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor ekonomi kreatif	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif	100%	33,788,220	40,000,000		Ka. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	APBD
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	92,20%					627,295,046	755,071,160		Ka. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
	5.01.05.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup										164,523,216	184,071,160	Baru		
	5.01.05.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	100%	159,382,872	175,321,160		Ka. Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	APBD
								Perencanaan dan evaluasi strategis sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen							
								Pengelolaan data sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	100%	5,140,344	8,750,000		Ka. Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	APBD
	5.01.05.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan										88,800,238	111,000,000	Baru		
	5.01.05.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan	100%	82,055,666	102,000,000		Ka. Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	APBD
								Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen							
								Pengelolaan data sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen							
	5.01.05.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan	100%	6,744,572	9,000,000		Ka. Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	APBD
	5.01.05.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan										373,971,592	460,000,000	Baru		
	5.01.05.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	100%	369,105,384	450,000,000		Ka. Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	APBD
								Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen							
								Pengelolaan data sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen							
								Hibah iuran Sekber Kartamantul	1 kali							
	5.01.05.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	100%	4,866,208	10,000,000		Ka. Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	APBD
Program Penelitian dan Pengembangan	5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	88					1,913,294,876	2,504,800,800		Ka. Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.05.02.2.01	penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan										184,031,550	324,000,000	Baru			
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Buku Jurnal Jarlit	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	40,947,600	54,000,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD	
	5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	143,083,950	270,000,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD	
	5.05.02.2.02	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan										593,157,800	872,400,000	Baru			
	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020	10 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	593,157,800	872,400,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD	
	5.05.02.2.03	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan						Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM	1 dokumen			565,236,530	600,000,000	Baru			
	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	152,613,230	180,000,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD	
	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	206,311,650	210,000,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD	
	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	206,311,650	210,000,000			APBD	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										570,868,996	708,400,800	Baru			
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Anugerah Inovasi dan Penelitian	1 kali	Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan	100%	468,778,448	573,778,800		Ka. Sub Bidang Inovasi Daerah	APBD	
								Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah	51 OPD								
								Perlindungan Kekayaan Intelektual	1 dokumen								
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Diseminasi Kelitbangan	4 kali	Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan	100%	102,090,548	134,622,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD	
								Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS)	1 aplikasi								
Total												12,730,147,775	16,130,402,823				

Tabel 5.39 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,742,961,167	3,017,257,482		Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,660,000	6,226,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD		3 Dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan	Pengelolaan Website OPD		12 bulan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,520,000	1,672,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
						Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		7 Dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 Dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV		6 Dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1,160,000	1,276,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	980,000	1,078,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1,815,019,097	1,996,521,007	Baru		

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,810,019,097	1,991,021,007		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400,000	440,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	720,000	792,000		Kepala Sub Bag Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400,000	440,000		Kepala Sub Bag Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bag. Tata Pemerintahan			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400,000	440,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										922,282,070	1,014,510,475	Baru		

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Materai 3000	550 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,350,000	4,785,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
								Materai 6000	450 lembar							
								Surat Masuk	1000 surat							
								Surat Keluar	500 surat							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,700,000	2,970,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Alat Tulis Kantor	41 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	16,503,570	18,154,125		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Penggandaan surat-surat/ dokumen Barang cetakan	85000 lembar 7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	32,510,000	35,761,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,950,000	2,145,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Komputer PC: 3 unit, Printer: 3 unit, UPS: 3 unit, Dispenser: 3 unit, Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah, Kabel LCD: 2 buah	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	356,549,000	392,203,900		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
								Bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Peralatan Rumah Tangga Karpet	4 Jenis 1 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,600,000	13,860,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Surat Kabar selama 12 bulan Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	1 jenis 6 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,020,000	1,122,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Makan Minum Rapat	26 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,680,000	29,348,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	13 kali 5 orang 3 kali 3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	166,000,000	182,600,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Gedung Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan Gedung Forpi	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	202,822,500	223,104,750		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Roda 4 Roda 2	2 unit 3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	74,447,000	81,891,700		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22,950,000	25,245,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi				2,614,216,400	2,875,638,040		Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	83% Cepat Berkembang			2,614,216,400	2,875,638,040	Baru		
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Forpi yang difasilitasi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD	322,444,000	354,688,400		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen monev pelaksanaan Perwal pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, Dokumen monev pelaksanaan Perwal dan pembekalan SIM Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan secara elektronik	90%	1,983,732,400	2,182,105,640		Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	APBD
								Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Lomba Lurah Bicara) yang dilaporkan	3 Laporan	Terlaksananya rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Terlaksananya pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Terlaksananya Lomba Lurah Bicara	90%					
								Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/ Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan (Data dan monografi kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	3 Laporan	Tersedianya Data Evaluasi Kinerja Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	100%					
								Buku Toponimi yang disusun	1 dokumen	Terinformasikannya Inventarisasi Unsur Buatn Toponimi	1 dokumen					
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen	Dokumen evaluasi pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan kriteria (NSPK)	90%	308,040,000	338,844,000		Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	APBD
								Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen	Terinformasikannya penyelenggaraannya pemerintahan daerah kepada DPRD melalui buku LKPJ	1 Dokumen					
								Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 Dokumen	Dokumen rekomendasi atas LKPJ yang ditindaklanjuti	1 Dokumen					
								Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda	1 Dokumen					
								Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Terinformasikannya dokumen Ringkasan LPPD Melalui Media Massa kepada masyarakat	1 Dokumen					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM yang dilaporkan	1 dokumen					
Total												5,357,177,567	5,892,895,522			

Tabel 5.40 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,354,898,286	1,490,388,114		Kepala Bagian Hukum	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										91,759,000	100,934,900	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Renja OPD dan Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kec. Umbulharjo			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	83,784,000	92,162,400		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
								Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		100%					
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kec UH			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,625,000	3,987,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		100%					
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										996,526,000	1,096,178,600	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kec UH			Gaji dan Tunjangan ASN	15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	984,926,000	1,083,418,600		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kecamatan Umbulharjo			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450,000	1.595,000			APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										266,613,286	293,274,614	baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			surat masuk	544 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	1,650,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
								surat keluar	1120 surat		100%					
								materai	604 lembar		100%					
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,550,000	3,905,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor	56 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,701,950	17,272,145		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			cetak	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,215,000	5,736,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
								Penggandaan surat-surat/ dokumen	82.625 lembar		100%					
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	976,200	1,073,820		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			rak koran : 1 unit, lemari kaca : 1 unit, white board : 2 unit, tinta printer hitam : 60 buah, tinta printer warna : 6 buah, flashdisk : 10 buah, mouse : 10 buah, kapur barus : 4 kg, pengharum kamar mandi : 6 buah, pembersih keramik : 12 buah, refill pengharum ruangan : 15 buah, sabun cuci tangan : 5 botol, refill sabun cuci tangan : 5 buah, obat nyamuk : 5 botol, refill pembersih kaca : 5 buah	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	16,325,000	17,957,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,430,200	1,573,220		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Surat Kabar selama 12 bulan : 2 JENIS, Buku Perundang-perundangan : 14 BUKU, Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja : 5 BUKU	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,460,000	2,706,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Makan Minum Rapat	400 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000			APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah : 12 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) : 14 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa : 27 kali 3 orang	53 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	144,750,000	159,225,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,577,384	42,435,122		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,877,552	17,465,307		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			cuci gorden, cuci sofa	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,400,000	2,640,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Komputer/laptop : 20 unit, AC : 4 unit, Printer : 10 unit, mesin ketik : 2 unit, filling kabinet : 10 unit, mebelair : 5 unit	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,200,000	16,720,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%					2,146,863,929	2,361,550,322		Kepala Bagian Hukum	
	4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah										2,146,863,929	2,361,550,322	baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Draf Raperda	6 raperda	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	779,870,000	857,857,000		Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	APBD
								Peraturan Walikota (Perwal)	30 Perwal							
								Keputusan walikota (Kepwal)	300 kepwal							
								Publikasi raperda ke Media Cetak	12 halaman media cetak							
								Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	10 Produk Hukum Daerah							
								Review Produk Hukum Daerah	2 Produk Hukum Daerah							
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Perkara/ Sengketa yang ditangani	6 perkara	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	934,084,000	1,027,492,400		Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia	APBD
								Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	22 organisasi Bantuan Hukum							
								Harmonisasi Raperda/ Raperwal dari perspektif HAM	4 raperda/r aperwal							
								Konsultasi Hukum untuk masyarakat	12 bulan							
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	12 bulan	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	432,909,929	476,200,922		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
								Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	750 orang							
								Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku							
Total												3,501,762,215	3,851,938,436			

Tabel 5.41 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,391,244,527	7,921,696,512			Kepala Bagian Umum dan Protokol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,600,000	5,658,000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	570,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,100,000	2,552,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
								Penyusunan Profil OPD, RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen							
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,080,000	1,560,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	270,000	270,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	580,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,269,665,160	5,508,123,000	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	32 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,261,890,160	5,500,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	32 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	990,000	1,200,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,800,000	1,800,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	1,500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,485,000	1,485,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	400,000	400,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	600,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,073,229,367	2,362,915,512	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,900,000	9,900,000			APBD
								Surat Keluar	850 surat							
								Materai	1800 lembar							
								Perangko	300 lembar							
								Buku cek	10 buku							
								Pengiriman dokumen	6 dokumen							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	34,800,000	35,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
								Bantuan komunikasi operasional	12 bulan							
								Pembayaran rekening telepon	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa mesin foto kopi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,000,000	12,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	56,495,000	56,495,000			APBD
								Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	41 Unit							
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	79 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,903,692	67,903,692		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,324,500	91,331,820		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penggandaan surat-surat/ dokumen	240.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis			10,450,000	10,450,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia: 27 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia: 19 jenis, Hadiah/Trophy yang tersedia: 160 buah, Plakat identitas Pemerintah Kota Yogyakarta yang tersedia: 1.150 buah, Cenderamata Walikota dan Wakil Walikota yang tersedia: 70 buah, packaging : 12 bulan	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	323,576,175	600,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	66,660,000	66,660,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat (snack)	275 Os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	103,675,000	103,675,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
								Makan Minum Rapat (makan)	440 Oh							
								Snack minum harian umum	11 Bulan							
								Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota	11 bulan							
								Snack minum harian kantor walikota	11 bulan							
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	85 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	399,500,000	399,500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	250,000,000	250,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	41 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	556,945,000	570,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	90,000,000	90,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
	X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										43,750,000	45,000,000	Baru		

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			PDH Lengan Panjang	35 Stel	Dukungan terhadap peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	43,750,000	45,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
								Sepatu formal	25 pasang							
								Perfume/minyak wangi	35 buah							
								Pin Protokol	35 buah							
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81.35					7,533,848,934	8,696,115,008		Kepala Bagian Umum dan Protokol	
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah						Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80.75									
	4.01.04.2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum										5,384,608,686	6,400,000,000	Baru		
	4.01.04.2.01.01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pimpinan dan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen Pengendalian	Terfasilitasinya Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	830,754,312	900,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
								Laporan pelayanan perjalanan dinas (pimpinan dan umum)	1 Laporan		100%					
								Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia	1 laporan pengelolaan arsip		100%					
	4.01.04.2.01.02	Pengelolaan Perlengkapan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan sarpras	12 bulan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Walikota, Wakil Walikota dan Komplek Balaikota	100%	2,927,302,458	3,500,000,000		KA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	APBD
								Penyediaan sarpras	12 bulan							
								Pemeliharaan Taman kompleks Balaikota	1 lokasi							
								Pembuatan taman kompleks Balaikota	1 lokasi							
								Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi							
								Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 lokasi							
								Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	1 lokasi							
	4.01.04.2.01.03	Pengelolaan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan kerumahtanggaan pimpinan	12 bulan	Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	100%	1,626,551,916	2,000,000,000		KA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali		100%					
	4.01.04.2.03	Protokol dan Komunikasi Pimpinan										2,149,240,248	2,296,115,008	Baru		
	4.01.04.2.03.01	Fasilitasi Keprotokolan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keptokolan Pemerintah Daerah	100%	1,053,400,240	1,200,000,000		KA SUB BAG PROTOKOL	APBD
								Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	360 kali							
	4.01.04.2.03.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali	Dukungan terhadap pelayanan kedinasan Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keptokolan Pemerintah Daerah		1,094,355,008	1,094,355,008		KA SUB BAG PROTOKOL	APBD
								Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 kali							
								Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali							
	4.01.04.2.03.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 dokumen	Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan		1,485,000	1,760,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
								Total				14,925,093,461	16,617,811,520			

Tabel 5.42 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,862,893,204	3,149,182,621			Kepala Bagian P3ADK	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,995,000	2,194,500	Baru			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 dokumen		3	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	669,000	735,900		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD	12 bulan			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	586,000	644,600		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
						Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen										
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen		2	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	420,000	462,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, IV	6 dokumen										
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	140,000	154,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2,192,382,928	2,411,621,318	Baru			

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,191,248,928	2,410,373,818		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			"Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas"	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72,000	79,200		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,400		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,400		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000	132,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			"Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan"	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	480,000	528,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000	132,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										668,515,276	735,366,803	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	2.628 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	53,815,099	59,196,609		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
								Surat Keluar	1.111 surat							
								Materai	700 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,000,000	3,300,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
								Bantuan Komunikasi	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,550,000	3,905,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	78,750,000	86,625,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,600,000	17,160,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,525,000	21,477,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	75,000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer: 2 unit, LCD Proyektor: 1 unit, Layar Proyektor: 2 unit, Voice Recorder: 1 unit, HT 1 unit, meja rapat, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	72,887,677	80,176,444		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,615,300	17,176,830		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar sebanyak 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,560,000	5,016,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
								Buku Perundang-undangan	2 buku							
								Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja	2 buku							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	693 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,778,000	9,655,800		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 12 kali 2 org, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 7 kali 2 org	19 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	237,600,000	261,360,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,600,000	44,660,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	69,034,200	75,937,620		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Taman	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	30,000,000	33,000,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	14,000,000	15,400,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	80%					510,184,644	561,203,108		Kepala Bagian P3ADK	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama daerah										510,184,644	561,203,108	Baru		
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	1 dokumen	Tersedianya database Mitra Kerja Sama dalam Negeri	100%	324,414,644	356,856,108		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
								Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	Tersedianya hasil audit Rekso Arcade	100%					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerja Sama Daerah	100%					
								Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen	Tercatatnya Dokumen Kerja Sama Daerah di Notaris dan tersusunnya Dokumen Kerja Sama di Notaris	100%					
								Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	50 dokumen	Disahkannya Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
								Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Penawaran Dalam Negeri	100%					
								Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 telaah	Tersedianya telaah Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
								Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen	Terdokumentasinya Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	100%					
								Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri	100%					
								Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 sistem	Terupdatanya Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	100%					
								Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Urusan Pemerintahan yang Akan Dikerjasamakan	100%					
	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	Tersedianya Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	100%	68,400,000	75,240,000		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
								Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	Tersedianya telaah Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
								Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen	Terdokumentasinya Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	100%					
								Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	100%					
								Iuran Keanggotaan Luar Negeri	3 iuran	Terbayarkannya iuran keanggotaan UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	100%					
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dokumen	Terevaluasi dan Termonitoring Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	117,370,000	129,107,000		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74.64%					496,763,737	546,440,111		Kepala Bagian P3ADK	
						Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%									
	4.01.03.2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										496,763,737	546,440,111	Baru		
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun		2 dokumen	Tersedianya Data Laporan Kinerja dari BUMD dan BLUD sebagai bahan monitoring dan evaluasi	100%	266,450,257	293,095,283		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
						Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan		8 dokumen	Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%						
						Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun		3 dokumen	Tersedianya Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD sebagai dasar perencanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%						
						Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui		1 sistem	Tersedianya dokumen data SIM BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan kebijakan BUMD dan BLUD	100%						
						Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi		1 dokumen	Tersedianya Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	100%						
						Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi		1 dokumen	Tersedianya Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	100%						
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Data Perekonomian Daerah yang diperbarui		1 dokumen	Tersedianya Data Perekonomian Daerah	100%	132,673,480	145,940,828		Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	APBD	
						Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui		1 dokumen	Tersedianya Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta	100%						
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta		1 dokumen	Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	100%	97,640,000	107,404,000		Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	APBD	
					Total						3,869,841,585	4,256,825,840				

Tabel 5.43 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi Pembangunan

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,862,414,381	2,237,007,999			Kepala Bagian Adbang	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	7,122,200	7,601,000	baru			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen			2,334,200	2,334,200			Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Pengelolaan Website OPD,	12 bulan			1,747,000	1,921,700			Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
								Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen			1,175,000	1,292,500			Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			986,000	1,084,600			Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			880,000	968,000			Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,464,282,768	1,690,084,964	baru			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Gaji dan Tunjangan ASN	10 ASN			1,442,898,968	1,666,572,684			Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	10 ASN			1,120,000	1,232,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen			5,195,000	5,714,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen			5,195,000	5,714,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen			880,000	968,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen			2,510,200	2,761,220		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			4,043,600	4,438,060		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			1,360,000	1,496,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			1,080,000	1,188,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										391,009,413	539,322,035	baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Surat Masuk	1.439 surat			27,134,784	29,848,262		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
								Surat Keluar	753 surat							
								materai	545 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan			1,200,000	1,320,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 unit			3,960,000	4,356,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Alat Tulis Kantor	55 jenis			22,258,754	29,146,480		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.484 lembar			26,496,800	29,146,480		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis			2,505,250	2,755,775		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			LCD 1 unit, Standing mic 3 unit, Komputer 1 unit, bahan komputer/printer 17 jenis, bahan dan peralatan kebersihan 15 jenis, Dispenser 2 unit	4 jenis			77,894,625	100,809,088		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5,940,000	6,534,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis			2,400,000	2,640,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
								Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 buku							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Makan Minum Rapat	1.496 Os			21,692,000	23,861,200		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 1 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 kali 2 orang,	4 kali			20,400,000	33,660,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit			105,867,300	173,423,250		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit			59,709,900	80,976,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Dalbang			AC 6 unit, mesin ketik 1 unit, Kamera 1 unit, Komputer/laptop 13 unit, mebelair 5 unit	3 jenis			13,550,000	20,845,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98.10%					580,484,587	779,432,491		Kepala Bagian Adbang	
	4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan						Tersusunnya dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan, laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan dukungan terhadap pelaksanaan pengendalian	100%			580,484,587	779,432,491	Baru		

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan kebijakan pembangunan	1 laporan			282,766,859	379,463,788		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pengendalian pembangunan	1 laporan			144,112,040	200,610,546		Ka. Sub Bag. Pengendalian Pembangunan	APBD
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pembinaan pelaksanaan pembangunan	1 laporan			153,605,688	199,358,157		Ka. Sub Bag. Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	APBD
Total												2,442,898,968	3,016,440,490			

Tabel 5.44 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%					3.177.592.305	3.495.351.674		Bagian Organisasi	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12.864.200	14.150.620	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 dokumen	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.435.200	2.678.720		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.847.000	4.231.700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
						Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		7 Dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.465.000	1.611.500		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV		6 dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.610.000	2.871.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.507.000	2.757.700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2.638.251.440	2.902.076.584	Baru		

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.627.210.640	2.889.931.704		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat , Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah,Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.576.000	1.733.600		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.942.200	3.236.420		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.663.600	4.029.960		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.389.000	1.527.900		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	330.000	363.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										526.476.665	579.124.470	baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Dokumen	6 Dokumen	dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	53.045.600	58.350.160		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
								Materai	795 lembar							
								Surat Masuk	1900 surat							
								Surat Keluar	400 Surat							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bantuan Komunikasi Kepala	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.700.000	2.970.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pembayaran rekening telepon	12 Bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit	5 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.360.000	3.696.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.706.015	33.776.700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetak	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.098.100	37.507.910		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	116.663 Lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.143.950	4.558.400		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer 1 buah, Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	45.237.400	49.761.140		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.741.100	23.915.210		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.560.000	1.716.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat (snack)	660 OS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.540.000	20.394.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
								Makan Minum Rapat (Makan)	630 OH							
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 9 kali 9 orang , Rapat koordinasi dan konsultasi luar jawa 2 kali 12 orang	11 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	210.600.000	231.660.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kursi kerja, rak Perpustakaan	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.044.500	8.848.950		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	53.320.000	58.652.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.000.000	33.000.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.380.000	10.318.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%			1.243.315.300	1.367.646.830		Bagian Organisasi	
	4.01.04.2.02	Penataan Organisasi										1.243.315.300	1.367.646.830	Baru		
	4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja	100%	321.464.400	353.610.840		Ka. Sub Bag Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	APBD
								Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah							
								Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 Perangkat Daerah/Unit Kerja							
								Dokumen hasil Evaluasi Jabatan	50 Perangkat Daerah							
	4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen	Dukungan terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah asli yang proporsional	100%	200.000.000	220.000.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	DAIS
								Dokumen Monitoring Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen							
	4.01.04.2.02.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	2 Draf	Tersedianya dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	100%	332.578.900	365.836.790		Ka Sub Bag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	APBD
								Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	1 Kali							
								Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 Perangkat Daerah							
								Dokumen pembinaan pelayanan publik	50 OPD							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	50 OPD							
	4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi reformasi birokrasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	289.272.000	318.199.200		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
								Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen							
								Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen							
								Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen							
	4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi budaya pemerintahan di kota Yogyakarta	100%	100.000.000	110.000.000		Ka Sub Bag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DAIS
								Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen							
								Agan Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA	95 ASN							
Total												4.420.907.605	4.862.998.504			

Tabel 5.45 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%						3.789.390.060	4.168.329.066		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6.105.000	6.715.500	Baru			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.275.000	1.402.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD		12 bulan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.275.000	1.402.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
						Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		7 dokumen			100%						
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.275.000	1.402.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV		6 dokumen			100%						
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3.354.979.880	3.690.477.868	Baru			

RPJMD 2017-2022	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.296.270.240	3.625.897.264		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	50.729.640	55.802.604		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										428.305.180	471.135.698	Lanjutan		

RPJMD 2017-2022	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	900 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.725.000	1.897.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
								Surat Keluar	900 surat		100%					
								Materai	350 lembar		100%					
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telpon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.000.000	3.300.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
								Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		100%					
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.700.000	2.970.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	89.347.300	98.282.030		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.801.150	21.781.265		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.340.000	9.174.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar		100%					
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.043.000	2.247.300		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			(12A) : 2 buah, Toner printer laserjet M 1132 MFP (85A) : 6 buah, Toner printer MFP 127N (83A) : 1 buah, Toner printer laserjet P2015d (53A) : 1 buah, Toner printer laserjet P1505 (36A) : 1 buah, Catridge 810 : 6 buah, Catridge 811 : 6 buah, Refill Toner Printer : 24 kail, Refill Tinta Printer : 2 set, Pita LX 310 : 1 buah, Flash Disk 32 GB : 5 buah, CD/DVD case : 100 buah, CD : 2 pak, Mouse Pad : 50 buah,	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	26.117.230	28.728.953		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.347.500	8.082.250		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.300.000	3.630.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	363 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.171.000	6.788.100		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	14 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	151.200.000	166.320.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 4 unit dan roda 4 : 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54.805.000	60.285.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/pemeliharaan taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.200.000	21.120.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa mesin fotocopy	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.200.000	21.120.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	33.208.000	36.528.800		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85%					786.874.320	865.561.752		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
						Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85%									
	4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa										786.874.320	865.561.752	Baru		
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa	1 dokumen	Terwujudnya kelancaran dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	291.388.640	320.527.504		Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
								Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa	1 dokumen		100%					
								Pelaksanaan Katalog Daerah	1 dokumen		100%					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 dokumen		100%					
								SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen		100%					
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 aplikasi	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	100%	269.856.680	296.842.348	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	APBD	
								Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis		100%					
								Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	90 berkas		100%					
								Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali		100%					
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 dokumen permasalahan dan risiko	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	100%	225.629.000	248.191.900	Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
								Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 dokumen strategi dan informasi		100%					
								Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	21 kali		100%					
								Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal		100%					
Total												4.576.264.380	5.033.890.818			

Tabel 5.46 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional perkantoran	100%					10.747.368.925	11.628.790.033			Sekretariat DPRD	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										58.750.000	60.511.800	baru			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja OPD, Dokumen Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.040.000	8.281.200				APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD dan Penyusunan Buku Profil OPD		12 bulan 1 buku		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	38.190.000	39.335.000				APBD
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra dan Renja OPD		3 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	5.340.000	5.500.200				APBD
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4.120.000	4.243.600				APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	3.060.000	3.151.800				APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5.175.195.690	5.330.452.303	lanjutan			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Gaji dan Tunjangan ASN		40 ASN		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	5.096.428.496	5.249.321.351				APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40 dokumen		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4.890.000	5.036.700				APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4.650.000	4.789.500			APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	52.277.194	53.846.252			APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	1.200.000	1.236.000			APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	10.150.000	10.454.500			APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4.200.000	4.326.000			APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	800.000	824.000			APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	600.000	618.000			APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										5.513.423.235	6.237.825.930	baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	500 surat	Terkelolanya Surat Masuk	500 surat	19.200.000	19.776.000			APBD
								Surat Keluar	500 surat	Terkelolanya Surat Keluar	500 surat					
								Pengiriman Dokumen	100 dokumen	Terlaksananya Pengiriman Dokumen	100 dokumen					
								Materai	9000 lembar	Tersedianya materai	9000 lembar					
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terbayarnya rekening telepon	12 bulan	366.000.000	376.980.000			APBD
								Pembayaran sewa koneksi jaringan/ TV Kabel	12 bulan	Terbayarnya sewa koneksi jaringan/ TV Kabel	12 bulan					
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan	Terbayarnya rekening listrik	12 bulan					
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 unit	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 unit	43.250.000	44.547.500			APBD
								Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	18 unit	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	18 unit					
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	27 orang	Tersedianya Tenaga Teknis	27 orang	5.880.000	6.056.400			APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	439.270.400	452.448.512			APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8 jenis	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8 jenis					
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	65 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	65 jenis	67.042.525	69.053.800			APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	17 jenis	tersedianya barang cetakan	17 jenis	249.904.400	257.401.532			APBD
								Penggandaan surat-surat/ dokumen	750000 lembar	terlaksananya penggandaan surat-surat/ dokumen	750000 lembar					
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor	34 jenis	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor	34 jenis	13.781.000	14.194.430			APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Komputer/ Printer	9 jenis	Tersedianya Bahan Komputer/ Printer	9 jenis	90.171.500	92.876.645			APBD
								Sewa Meja, Kursi dan Tenda	3 jenis	Tersedianya Biaya Sewa Meja, Kursi dan tenda	3 jenis					
								Sewa Software	5 unit	tersedianya biaya sewa aplikasi video conference	5 unit					
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	35 jenis	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	35 jenis	80.786.050	83.209.632			APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Buku Peraturan Perundang-undangan	30 buku	Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan	30 buku	60.210.000	621.016.300			APBD
								Surat Kabar selama 12 bulan	12 bulan	Tersedianya Surat Kabar selama 12 bulan	12 bulan					
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makanan dan Minuman Rapat	88 kali	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	88 kali	34.350.000	35.380.500			APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah (Jawa/ Luar Jawa : 70 laporan), Forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota Yogyakarta seluruh Indonesia (46 laporan)	100%	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.036.100.000	1.067.183.000			APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Sekretariat DPRD	1 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor Sekretariat DPRD	1 unit	2.150.828.480	2.215.353.334			APBD
								Jasa Keamanan (security)	12 bulan	Tersedianya Jasa Keamanan (security)	12 bulan					
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Mobil jabatan	4 unit	Terpeliharanya Mobil jabatan	4 unit	634.003.080	653.023.172			APBD
								Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	14 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	14 unit					
								Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	14 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	14 unit					
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/ Pemeliharaan Taman	12 bulan	Terpeliharanya taman	12 bulan	105.625.800	108.794.573			APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 jenis	117.020.000	120.530.600			APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN				Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100%					22.146.064.631	23.026.435.095			Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01	Layanan administrasi DPRD										1.156.271.231	1.190.959.468	baru		
	4.02.02.2.01.01	Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen adminstrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	3 dokumen	Tersedianya Dokumen adminstrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	3 dokumen	49.081.711	50.554.262			APBD
	4.02.02.2.01.02	Fasilitasi rapat DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Paripurna DPRD	40 sidang	Terfasilitasinya Rapat Paripurna DPRD	40 sidang	425.000.000	437.750.000			APBD
	4.02.02.2.01.03	Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Rapat Fraksi	180 sidang	Terfasilitasinya Rapat Fraksi	180 sidang	427.289.520	440.108.206			APBD
	4.02.02.2.01.04	Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD	10 jenis	Tersedianya dan terpeliharanya kebutuhan rumah tangga DPRD	10 jenis	159.400.000	164.182.000			APBD
	4.02.02.2.01.05	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sarana dan Prasarana DPRD	2 jenis	Tersedianya Sarana dan Prasarana DPRD	2 jenis	95.500.000	98.365.000			APBD
	4.02.02.2.02	Layanan Keuangan DPRD										20.989.793.400	21.835.475.627	baru		
	4.02.02.2.02.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan tunjangan DPRD	12 bulan	Tersedianya Gaji dan tunjangan DPRD	12 bulan	20.780.063.400	21.619.453.727			APBD
	4.02.02.2.02.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pakaian Dinas DPRD	4 jenis	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD	4 jenis	161.050.000	165.881.500			APBD
	4.02.02.2.02.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1 kali	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	1 kali	48.680.000	50.140.400			APBD
Program Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%					31.727.754.986	32.679.587.636			Sekretariat DPRD
						Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%									
	4.02.03.2.01	Pembentukan Perdan dan Peraturan DPRD										6.397.565.000	6.589.491.950	baru		
	4.02.03.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat				Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	1.360.340.000	1.401.150.200			APBD
	4.02.03.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	9 Perda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	9 Perda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	3.439.200.000	3.542.376.000			APBD
	4.02.03.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	Tersusunnya Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	581.925.000	599.382.750			APBD
	4.02.03.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Naskah Akademik	5 dokumen	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik	5 dokumen	651.000.000	670.530.000			APBD
	4.02.03.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Tata Tertib DPRD	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Tata Tertib DPRD	1 dokumen	365.100.000	376.053.000			APBD
	4.02.03.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										2.531.950.000	2.607.908.500	baru		
	4.02.03.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	2 nota kesepakatan	Dokumen Nota Kesepakatan KUA PPAS	2 dokumen	586.610.000	604.208.300			APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.03.2.02.02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Nota Kesepakatan KUPA PPAS Perubahan	2 Nota Kesepakatan	Nota Kesepakatan KUPA PPAS Perubahan	2 dokumen	436.580.000	449.677.400			APBD
	4.02.03.2.02.03	Pembahasan APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Raperda APBD	1 perda	Persetujuan bersama DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD	1 persetujuan bersama	436.580.000	449.677.400			APBD
	4.02.03.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Raperda APBD Perubahan	1 Perda	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD Perubahan	1 Persetujuan Bersama	273.020.000	281.210.600			APBD
	4.02.03.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Semester	2 laporan	Tersusunnya Laporan Semester	2 laporan	30.920.000	31.847.600			APBD
	4.02.03.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 perda, 1 keputusan DPRD	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Yogyakarta Tahun 2020	1 perda, 1 keputusan DPRD	768.240.000	791.287.200			APBD
								LKPJ Walikota Yogyakarta								
	4.02.03.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah										7.547.300.000	7.773.719.000	lanjutan		
	4.02.03.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	1.065.200.000	1.097.156.000			APBD
	4.02.03.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Infrastruktur	100%	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Infrastruktur	100%	996.500.000	1.026.395.000			APBD
	4.02.03.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	996.500.000	1.026.395.000			APBD
	4.02.03.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	100%	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	100%	996.500.000	1.026.395.000			APBD
	4.02.03.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100%	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100%	362.100.000	372.963.000			APBD
	4.02.03.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	3.130.500.000	3.224.415.000			APBD
	4.02.03.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										7.244.803.672	7.462.147.782	lanjutan		
	4.02.03.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD	4 kali	Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	4 kali	3.770.000.000	3.883.100.000			APBD
								Pelaksanaan kegiatan ADEKSI	3 kali	Terlaksananya kegiatan ADEKSI	3 kali					

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.03.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak	2 kali	Terpublikasinya Draft Raperda atau Perda Inisiatif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat	2 kali	870.494.000	896.608.820			APBD
								Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan Dewan di media cetak	40 kali					
								Jumlah Talkshow DPRD di radio	16 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan Dewan melalui talkshow DPRD di Radio	16 kali					
								Jumlah Talkshow DPRD di televisi	16 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan Dewan melalui talkshow DPRD di televisi	16 kali					
								Jumlah Advertorial	14 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan Dewan melalui advertorial	14 kali					
								Jumlah ucapan selamat di media cetak	10 kali	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat lewat ucapan selamat di media cetak	10 kali					
								Jumlah Greeting di televisi	4 kali	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat melalui greeting di televisi	4 kali					
								Kalender DPRD	4000 eksemplar	Tersedianya kalender DPRD	4000 eksemplar					
								Frekuensi Suara Dewan	12 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui kegiatan suara dewan	12 kali					
								Jumlah Liputan khusus kegiatan Dewan	12 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui liputan khusus kegiatan Dewan	12 kali					

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Baliho yang terpasang	2 baliho	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat melalui baliho	2 baliho					
	4.02.03.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	9 Alat Kelengkapan 12 Kegiatan	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	9 Alat Kelengkapan 12 Kegiatan	162.000.000	166.860.000			APBD
	4.02.03.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	217.166.400	223.681.392			APBD
	4.02.03.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penerimaan Tamu DPRD	143 kali	Terlaksananya Penerimaan Tamu DPRD	143 kali	220.506.080	227.121.262			APBD
								Orientasi Kehumasan	1 kali	Terlaksananya Orientasi Kehumasan	1 kali					
	4.02.03.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	2.004.637.192	2.064.776.308			APBD
								Buku risalah rapat paripurna	40 risalah	Tersusunnya buku risalah paripurna	40 risalah					
								Data hasil rapat alat kelengkapan DPRD	16 dokumen	Tersusunnya data alat kelengkapan DPRD	16 dokumen					
	4.02.03.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										6.301.347.194	6.490.387.610	lanjutan		
	4.02.03.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Frekuensi Kaukus Perempuan	2 kali	Laporan Kaukus Perempuan	2 laporan	168.300.000	173.349.000			APBD
	4.02.03.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 draft	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 dokumen	457.330.000	471.049.900			APBD
	4.02.03.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Frekuensi Reses DRD	3 kali	Dokumen Reses sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya	3 dokumen	5.675.717.194	5.845.988.710			APBD
	4.02.03.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										654.630.000	674.268.900	lanjutan		
	4.02.03.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kode Etik DPRD	1 dokumen	Tersusunnya Kode Etik DPRD	1 dokumen	184.610.000	190.148.300			APBD
	4.02.03.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Kode Etik DPRD	12 bulan	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	12 bulan	470.020.000	484.120.600			APBD
	4.02.03.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah										19.940.000	20.538.200	baru		
	4.02.03.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	100%	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	100%	14.500.000	14.935.000			APBD
	4.02.03.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	100%	Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi	100%	5.440.000	5.603.200			APBD
	4.02.03.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD										1.030.219.120	1.061.125.694	lanjutan		
	4.02.03.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 laporan	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 laporan	264.600.000	272.538.000			APBD
	4.02.03.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 laporan	Tersusunnya Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 laporan	124.819.120	128.563.694			APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.03.2.08.03	Pelaksanaan Undangan DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan Undangan DPRD	48 laporan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Undangan DPRD	48 laporan	640.800.000	660.024.000			APBD
Total												64.621.188.542	67.334.812.764			

Tabel 5.47 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						8.965.660.317	19.610.126.440		Sekretaris	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7.500.000	7.700.000	Lanjutan			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Dokumen Renja Tahun 2022, Perubahan Renja Tahun 2021 dan Revit Renstra	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1.000.000	7.700.000				APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 Dokumen			3.500.000	0				APBD
								Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 Dokumen								
								Pengelolaan Website OPD	12 Bulan								
								Penyusunan Buku Profil OPD	1 Buku								
								Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	1 Dokumen								
								Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 Dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen			1.500.000	0				APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen								
								Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pengawasan	2 Laporan			1.000.000	0				APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I s/d TW IV	4 Dokumen			500.000	0			APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										7.958.216.040	9.035.088.700	Lanjutan		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji + TPP)	61 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.953.016.040	9.035.088.700			APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			TPP/Tukin 1 tahun	61 ASN							
	X.XX.01.2.02.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen			500.000	0			APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen			500.000	0			APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen			500.000	0			APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen			200.000	0			APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen			500.000	0			APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen			2.000.000	0			APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			500.000	0			APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			500.000	0			APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										999.944.277	10.567.337.740	Lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Pengadministrasi Surat Masuk	5.375 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	94.807.264	10.567.337.740			APBD
								Surat Keluar	1.764 surat							
								Pengiriman Dokumen	20 Dokumen							
								Materai Rp. 3.000	450 lembar							
								Materai Rp. 6.000	150 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan			6.600.000	0			APBD
	X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Sewa Tanaman	12 bulan			21.600.000	0			APBD
								Sewa Mesin Fotocopy	12 bulan							
								Sewa Zoom	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	13 unit			9.900.000	0			APBD
								Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	6 Unit							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan			97.980.000	0			APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Alat Tulis Kantor	67 Jenis			25.294.913	0			APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Barang Cetak	10 Jenis			22.760.000	0			APBD
								Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	75.000 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis			3.010.000	0			APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			LCD	2 unit			144.950.000	0		Sub Bag umum dan Kepegawaian	APBD
								Scanner	1 unit							
								Mobile File	1 unit							
								Tiang Mix Portable	2 unit							
								Weshtafle	1 Unit							
								Portable Scanner	4 unit							
								Termogant	1 unit							
								Dispencer	5 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Belanja Bahan Komputer/Printer	7 Jenis			32.152.500	0			APBD
								Bahan/Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7 Jenis							
								Belanja surat tercatat melalui Pos	40 kali							
								Hand Sanitizer	6 Botol							
								Belanja Retribusi/Tiket (sampah)	1 Jenis							
								Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 Jenis							
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Surat Kabar selama 12 Bulan	2 Jenis			3.300.000	0			APBD
								Buku Perundang-Undangan	6 Buku							
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Makanan dan Minuman Rapat	101 OS			84.172.000	0			APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (Uji Materi)	3 kali 2 orang			154.460.000	0			APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jawa (Konsultasi dan Undangan)	5 kali 2 orang							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa (Uji Materi)	5 kali 3 orang							
								SPPD Pengembangan Profesi AK-PP (Pemenuhan Angka Kredit Pengembangan Profesi)	13 kali 4 orang							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Lift	1 unit			37.000.000	0			APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Gedung Kantor	1 unit			88.837.600	0			APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Pemeliharaan Roda 2 Pemeliharaan Roda 4	13 unit 6 unit				0			APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			BBM Genset	12 bulan			1.620.000	0			APBD
								Pemeliharaan Komputer	20 unit			171.500.000	0			APBD
								Pemeliharaan AC split	23 unit							
								Pemeliharaan Printer	10 unit							
								Pemeliharaan Pompa Air	2 unit							
								Pemeliharaan Genset	1 unit							
								Pemeliharaan Proyektor	3 unit							
								Jasa keamanan	12 bulan							
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	91%					323.888.000	547.965.220		4 Irban Bidang Inspektorat	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset						Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%									
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik						Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana	91%									
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya						Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%									
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										171.631.000	405.154.420	Lanjutan		
	6.01.02.2.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Audit Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 LHA	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%	42.512.000	405.154.420		Irban Bid. Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	APBD
								Laporan Audit Operasional Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 LHA							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Laporan Audit Kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 LHA								
								Laporan Audit Operasional Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 LHA								
								Laporan Audit Kinerja Bidang Pembangunan Fisik	2 LHA								
								Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Fisik	1 LHA								
								Laporan Audit Kinerja Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	2 LHA								
								Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	2 LHA								
	6.01.02.2.01.02	Reviu Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Review Hasil LPPD Bidang Pembangunan dan Aparatur	1 Laporan			57.779.000	0			Irbid. Bid. Pengelolaan Keuangan dan Aset	APBD
								Laporan Peer Review Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan								
								Laporan Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah Bidang Penhelolaan Keuangan dan Aset	8 Laporan								
								Laporan Review Penyerapan Anggaran Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Laporan								
								Laporan Hasil Review LKPD Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan								
								Laporan Peer Review Bidang Pembangunan Fisik	1 Laporan								
								Laporan Hasil Review PBJ Bidang Pembangunan Fisik	4 Laporan								
								Laporan Hasil Review Laporan Kinerja Pemkot Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	1 Laporan								
								Laporan Peer Review Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	1 Dokumen								
	6.01.02.2.01.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Pemantauan TLHP di Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	4 Laporan			33.116.000	0			Irbid. Bid. Pemerintahan dan Apartur	APBD
								Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Laporan								

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pemantauan dan Pendampingan OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Kali							
								Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pembangunan Fisik	4 Laporan							
								Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	4 Laporan							
	6.01.02.2.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			38.224.000	0		Irbn Bid.Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	APBD
								Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan							
								Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pembangunan Fisik	1 Laporan							
								Laporan Evaluasi SAKIP Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	44 LHE							
								Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	1 Dokumen							
								Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	1 Laporan							
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu										152.257.000	142.810.800	Lanjutan		
	6.01.02.2.02.01	Audit Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Audit Investigasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 LHA	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan dan persentase tindak lanjut hasil revidi bidang Keuangan dan Aset, Bidang Fisik, bidang Sosekbud dan Peningkatan Kepatuhan Aparatur bidang Pemtur	91%	76.689.000	142.810.800		Irbn Bid. Pembangunan Sarana Prasarana	APBD
								Laporan ADTT Probit Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 LHA							
								Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pemerintahan dan Aparatur	3 LHA							
								Laporan ADTT Dais Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 LHA							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Laporan ADTT Probity Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 LHA							
								Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	3 LHA							
								Laporan ADTT Dais Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 LHA							
								Laporan Audit Investagasi Bidang Pembangunan Fisik	1 LHA							
								Laporan Probity Audit Bidang Pembangunan Fisik	2 LHA							
								Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pembangunan Fisik	2 LHA							
								Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Pembangunan Fisik	2 LHA							
								Laporan Audit Investigasi Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	2 LHA							
								Laporan ADTT Probity Audit Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	2 LHA							
								Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	3 LHA							
								Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	1 LHA							
	6.01.02.2.02.02	Reviu Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Review DAK Fisik Bidang Pemerintahan dan Aparatur	3 Laporan			7.479.000	0		Irbn Bid. Pembangunan Sarana Prasarana	APBD
								Review DAK Fisik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	3 Laporan							
								Review DAK Fisik Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	3 Laporan							
	6.01.02.2.02.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Monitoring Center of Prevention (MCP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			28.324.000	0		Irbn Bid. Pengelolaan Keuangan dan Aset	APBD
								Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan							
								Pemantauan Optimalisasi Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Laporan							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Laporan								
								Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bidang Pembangunan Fisik	1 Laporan								
	6.01.02.2.02.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Evaluasi Tematik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan			39.765.000	0			Irban Bid. Pemerintahan dan Aparatur	APBD
								Laporan zona Integritas (ZI) bidang Pemtur	1 Laporan								
								Laporan PMPRB Bidang Pemtur	1 Laporan								
								Laporan SPIP bidang Pemtur	2 Laporan (Semester 1 dan 2)								
								Evaluasi RB	1 Laporan								
Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	6.01.03	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Internal	89%					372.015.775	1.257.868.902			4 Irban Bidang Inspektorat	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan				Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)					179.539.900	674.597.532	Lanjutan			
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan Peer Review Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksterna dan Internal	87%	40.500.000	674.597.532			Irban Bid. Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	APBD
								Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	1 laporan								
								Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	1 laporan								
								Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen								
								Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen								
								Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen								
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Survey Penilaian Integritas (SPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			139.039.900	0			Irban Bid. Pengelolaan Keuangan dan Aset	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Fasilitas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan								
								Fasilitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan								
								Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) eksternal Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2 Laporan								
	6.01.03.2.02	Asistensi dan Pendampingan					28 Laporan					192.475.875	583.271.370	Lanjutan			
	6.01.03.2.02.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Laporan WBS Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	181.030.875	583.271.370		Irban Bid. Pemerintahan dan Apartur	APBD	
								Penelitian dan Penelaah Informasi (PPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Laporan								
								Saber Pungli Bidang Pentur	11 Laporan								
	6.01.03.2.02.02	Asistensi dan Pendampingan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Inspektorat			Gratifikasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan			11.445.000	0		Irban Bid. Pembangunan Sarana Prasarana	APBD	
								Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen								
Total												9.661.564.092	21.415.960.562				

Tabel 5.48 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						10.504.064.349	11.356.050.965		BKPP	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	9.425.000	9.800.000	Baru			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja, RKA dan DPA Tahun 2022 dan Perubahan Renja, RKA dan DPA Tahun 2021	6 dokumen			2.900.000	3.000.000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1.450.000	1.500.000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2.175.000	2.200.000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	2 dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen			1.450.000	1.550.000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1.450.000	1.550.000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										7.409.367.699	8.146.321.465	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	50 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.356.337.699	8.091.971.465		Kepala Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	47.000.000	48.000.000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	675.000	750.000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870.000	900.000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870.000	900.000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.005.000	1.100.000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870.000	900.000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870.000	900.000		Kepala Subbag Keuangan	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870.000	900.000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										3.085.271.650	3.199.929.500	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan jasa surat menyurat	2410 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	49.550.000	51.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22.800.000	24.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6.800.000	7.500.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 4	4 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa administrasi bank	600 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.000.000	3.090.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor Hygienis system	12 bulan 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	150.000.000	155.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Alat Tulis Kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	79.999.850	82.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan barang cetakan Jasa Penggandaan	11 jenis 250000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	134.650.000	138.689.500		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9.920.000	10.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.727.600.000	1.800.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Bahan komputer	10 jenis							
								Perlengkapan audio visual	13 unit							
								Meja kerja dan almari	102 unit							
								Penghancur kertas	1 unit							
								Vacuum cleaner	1 unit							
								Laptop	100 unit							
								CCTV	14 unit							
								Printer	10 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	31.385.600	32.400.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penyediaan Peralatan kebersihan	15 jenis							
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar	2 jenis, 12 bln	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6.400.000	7.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Buku perundang-undangan	10 buku							
								Majalah umum dan kepegawaian	1 jenis, 12 bln		100%					
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat Koordinasi	114 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39.029.000	40.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Makan minum forum komunikasi kepegawaian	60 oh							
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	40 kali, 2 org	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	340.000.000	350.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	54 kali, 2 org							
								Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	24 kali, 2 orang							
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan gedung BKPP	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	275.000.000	283.250.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan gedung UPT PKP	1 unit							
								Pembayaran jasa keamanan gedung UPT PKP	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	141.050.000	145.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan tanaman Pemeliharaan gensek	7 jenis 1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	27.800.000	28.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah-tanggaan/komu- nikasi/studio	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40.287.200	43.000.000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	5.03.02	KEPEGAWAIAN DAERAH				Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	66%					3.207.927.000	3.293.077.000		BKPP Kota Yogyakarta	
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian						persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	95%									
	5.03.02.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi ASN										94.840.000	96.600.000	Baru		
	5.03.02.2.01.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengembangan SIM Manajemen ASN (e- cards, e-JKK/JKM,e- KGB,e-mental,e- hukdis,e-mutasi,e- jabfung (pengangkatan,kenaikan jabatan, pemberhentian),e- layanan	7 jenis	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	100%	3.950.000	4.000.000		Kepala Subbid Pengelolaan Data dan Informasi ASN	APBD
	5.03.02.2.01.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG, SAPK)	2 SIM	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	74.770.000	76.000.000		Kepala Subbid Pengelolaan Data dan Informasi ASN	APBD
	5.03.02.2.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan data manual dan data elektronik ASN	1 laporan	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	16.120.000	16.600.000		Kepala Subbid Pengelolaan Data dan Informasi ASN	APBD
	5.03.02.2.02	Administrasi Kepegawaian						Pengajuan kartu identitas pegawai dan kartu taspem elektronik	1500 pegawai			1.655.257.000	1.704.517.000	Baru		
	5.03.02.2.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen analisa kebutuhan pegawai	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	999.342.000	1.029.000.000		Kepala Subbid Perencanaan dan Pengadaan	APBD
								Dokumen formasi pegawai	1 dokumen							
								Laporan Pemrosesan rekrutmen pegawai	1 laporan pemroses an							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.2.02.02	Penataan dan Mutasi Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penataan ASN (Mutasi Internal Pemerintah Kota Yk)	200 ASN	Terlaksananya Penataan dan Mutasi Jabatan	100%	14.705.000	15.146.000		Kepala Subbid Mutasi dan Kepangkatan	APBD
	5.03.02.2.02.03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemrosesan layanan kepegawaian (suket cuti, karis/karsu/karpeg/kpe, taspen, kgb, kp4, inpassing gaji)	6 jenis	Terlaksananya Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	100%	32.130.000	33.000.000		Kepala Subbid Administrasi dan Pemberhentian	APBD
	5.03.02.2.02.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemrosesan pemberhentian dan pensiun ASN	350 orang	Terlaksananya Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	100%	538.710.000	554.871.000		Kepala Subbid Administrasi dan Pemberhentian	APBD
								Pelaksanaan pembekalan calon purna tugas	346 orang							
	5.03.02.2.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Mutasi ASN	15 ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	100%	17.045.000	17.500.000		Kepala Subbid Mutasi dan Kepangkatan	APBD
								Pemrosesan pengajuan Peninjauan Masa Kerja	20 ASN	Terlaksananya pemrosesan pengajuan peninjauan masa kerja						
	5.03.02.2.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN	600 orang	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	53.325.000	55.000.000		Kepala Subbid Mutasi dan Kepangkatan	APBD
	5.03.02.2.03	Peningkatan Kapasitas ASN										618.341.000	629.000.000	Baru		
	5.03.02.2.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penilaian Kinerja Pegawai	1 jenis	Terlaksananya pengembangan penilaian kinerja ASN	100%	9.345.000	10.000.000		Kepala Subbidang Penilaian Kinerja dan Profesi	APBD
	5.03.02.2.03.03	Pengembangan Assessment Center	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	540 orang	Terlaksananya pengembangan assesmen center	100%	317.382.000	320.000.000		Kepala Unit Pelaksana Teknis	APBD
	5.03.02.2.03.04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Kegiatan Profesi ASN (KORPRI)	1 jenis	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan KORPRI	100%	28.400.000	29.000.000		Kepala Subbidang Penilaian Kinerja dan Profesi	APBD
	5.03.02.2.03.09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional (PAK, pembinaan jabfung, diseminasi dan sosialisasi)	1000 ASN	Terlaksananya pengelolaan karir dalam jabatan fungsional	100%	263.214.000	270.000.000		Kepala Subbidang Penilaian Kinerja dan Profesi	APBD
	5.03.02.2.04	Pengembangan Karir ASN										561.826.000	578.680.000	Baru		
	5.03.02.2.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Seleksi JPT Pratama	3 jabatan	Terlaksananya Pengembangan Karier dan Promosi ASN	100%	528.900.000	544.767.000		Kepala Subbidang Pengembangan Karier	APBD
								Penataan JPT Pratama, Jabatan administrator dan pengawas	56 ASN							
	5.03.02.2.04.02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pengembangan Pola Karier	1 dokumen	Terlaksananya penyusunan pedoman pola pengembangan karir	100%	32.926.000	33.913.000		Kepala Subbidang Pengembangan Karier	APBD
								Dokumen Pengembangan Sistem Merit	1 dokumen							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.2.05	Pembinaan ASN						Dokumen Manajemen Talenta Pegawai	1 dokumen			277.663.000	284.280.000	Baru		
	5.03.02.2.05.01	Pembinaan Disiplin ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual	10 kali	Terlaksananya Pembinaan ASN	100%	63.575.000	65.000.000		Kepala Subbidang Pembinaan, Penghargaan dan Perlindungan	APBD
								Pelaksanaan konseling pegawai	40 kali							
								Pembinaan ASN	5 ASN							
								Monitoring dan Evaluasi ASN	1 dokumen							
	5.03.02.2.05.02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	19.690.000	20.280.000		Kepala Subbidang Pembinaan, Penghargaan dan Perlindungan	APBD
	5.03.02.2.05.03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen implementasi pengembangan sistem pengukuran kinerja ASN (TPP)	1 dokumen	Terlaksananya penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan	100%	194.398.000	199.000.000		Kepala Subbidang Pembinaan, Penghargaan dan Perlindungan	APBD
								Pelaksanaan uji kesehatan pegawai	7 ASN							
								Pemrosesan pengajuan Satyalancana	300 orang							
								Pemrosesan pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)	1 laporan							
								Pemberian award kepegawaian	1 kali							
								Dokumen bantuan hukum ASN	1 dokumen							
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	5.04.02	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										9.032.792.000	1.417.422.000		BKPP Kota Yogyakarta	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis					Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	94%				9.032.792.000	1.417.422.000	Baru		
	5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen standar kompetensi jabatan	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	100%	105.760.000	109.000.000		Kepala Subbid Perencanaan Peningkatan Kompetensi	APBD
								Dokumen perencanaan diklat	1 dokumen							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen kurikulum diklat	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan	100%	40.060.000	42.000.000		Kepala Subbid Perencanaan Peningkatan Kompetensi	APBD
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman pelatihan kepemimpinan JPT, Pengawas dan Administrator	70 ASN	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	100%	8.508.958.000	876.422.000		Kepala Subbid Penyelenggaraan Pelatihan	APBD
								Pengiriman pelatihan dasar	419 CPNS							
								Pengiriman dan pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional	1450 ASN							
	5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			ASN yang mengikuti pendidikan	100 ASN	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	100%	378.014.000	390.000.000		Kepala Subbid Fasilitasi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi	APBD
								Pemrosesan pengajuan seleksi peserta pendidikan	125 ASN							
								Monitoring evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 dokumen							
								Pengurusan izin keluar negeri berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan	10 orang							
								Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyediaan ijazah	30 ASN							
								Pemrosesan pencantuman gelar akademik ASN	25 ASN							
Total												22.744.783.349	16.066.549.965			

Tabel 5.49 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						33,500,779,651	33,500,779,651		Sekretaris	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	792,000	792,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	738,000	738,000		Kasubag PEP	APBD	
								Penyusunan Buku Profil OPD	2 dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,782,000	1,782,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD	
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,640,000	1,640,000		Kasubag PEP	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100	7,405,000	7,405,000		Kasubag PEP	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										26,403,771,725	26,403,771,725	Lanjutan			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,394,731,725	26,394,731,725		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,040,000	1,040,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,000,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										7,084,650,926	7,084,650,926	Lanjutan		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Dokumen	27.000 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	194,250,000	194,250,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Materai	1.700 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		5,205,720,000	5,205,720,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
								Pembayaran rekening air	12 bulan							
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	48 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14,310,000	14,310,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 unit							
								KIR roda 4	4 unit							
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	142,438,896	142,438,896		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Administrasi bank	120 kali							
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	175,135,500	175,135,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	91 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	245,565,500	245,565,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	257,030,000	257,030,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Penggandaan surat-surat/dokumen	275,146 lembar							
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,422,500	7,422,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan komputer dan printer	33 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	296,829,000	296,829,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
								Komputer unit	5 unit							
								Printer unit	5 unit							
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	33 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	49,411,250	49,411,250		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,560,000	1,560,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan minum rapat	2550 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,300,000	33,300,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan perjalanan dinas	34 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	162,000,000	162,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Masyarakat Yogyakarta			Roda 2 Roda 4	48 unit 10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	222,198,280	222,198,280		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Genset	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,680,000	2,680,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	74,800,000	74,800,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
Program perencanaan dan pengendalian anggaran	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%			4,741,948,860	4,741,948,860		Kepala Bidang Anggaran	
Program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana tranfer								Persentase penyerapan belanja daerah	88,20%							
Program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD								Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95%							
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										656,118,981	656,118,981	Lanjutan		
	5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen KUA-PPAS Tahun 2022	2 dokumen	Tersedianya Dokumen KUA-PPAS TA 2022	2 dokumen	17,600,000	17,600,000		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD
	5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perubahan KUPA-PPAS TA. 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen KUPA-PPAS TA 2021	2 dokumen	18,950,000	18,950,000		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD
	5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Reviu RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2022	1 kali	Tersedianya dokumen review RKA dan RKPA SKPKD	100%	20,880,000	20,880,000		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD
								Reviu RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2021	1 kali							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	Tersedianya SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	100%	23,835,000	23,835,000		Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	APBD	
								SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD								
								Rancangan Perwal tentang Anggaran kas.	2 dokumen								
	5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perda APBD TA. 2022 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	2 dokumen	Tersedianya Dokumen tentang perda APBD TA 2022 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2022	100%	67,794,872	67,794,872		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD	
								Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	3 dokumen								
								Dokumen Nota Keuangan APBD TA. 2022	1 dokumen								
								Dokumen Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi APBD TA. 2022	1 dokumen								
	5.02.02.2.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2021 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Perda perubahan APBD TA 2021 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2021	100%	60,849,909	60,849,909		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD	
								Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen								
								Dokumen tentang Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen								
	5.02.02.2.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Regulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	2 dokumen	Dana Bantuan yang tercairkan	100%	446,209,200	446,209,200		Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	APBD	
								Standarisasi Harga Jasa	1 dokumen								
								Analisis Standar Belanja	1 dokumen								
								Belanja Subsidi	1 dokumen								
								Bantuan Keuangan	1 dokumen								
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										3,712,584,586	3,712,584,586	Lanjutan			

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Terkelolanya Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	3 dokumen	Tersedianya Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	100%	3,509,600,000	3,509,600,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Terealisasinya penyetoran modal	2 dokumen	Tersedianya Laporan Realisasi Penyertaan Modal	100%	28,300,000	28,300,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Terseleainya dana transfer dari pusat dan propinsi	12 bulan	Terlaporkannya dana transfer dari pusat ke Provinsi	100%	14,275,000	14,275,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen SP2D	12 dokumen	Tersedianya dokumen SP2D	12 Dokumen	89,494,586	89,494,586		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen SPM, Dokumen Daftar Gaji, Dokumen SKPP	12 dokumen	Tersedianya Dokumen SPM, Dokumen Daftar Gaji, Dokumen SKPP	12 Dokumen	9,600,000	9,600,000		Kepala Sub Bidang Belanja Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Laporan PFK	12 dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan PFK	100%	14,400,000	14,400,000		Kepala Sub Bidang Belanja Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Terseleainya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen	Terseleainya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen	24,000,000	24,000,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Kesamaan data pemungutan dan penyetoran atas SP2D antara SKPD/instansi terkait dan Kuasa BUD	12 dokumen	Tersedianya Kesamaan data pemungutan dan penyetoran atas SP2D antara SKPD/instansi terkait dan Kuasa BUD	12 Dokumen	6,480,000	6,480,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Petunjuk teknis	7 dokumen	Tersusunnya petunjuk teknis	100%	11,635,000	11,635,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
	5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan Penerbitan SPD Restitusi/Pengembalian Kelebihan Penerimaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			SPD dan laporan realisasi belanja	12 laporan	tersusunnya SPD dan laporan realisasi belanja	100%	4,800,000	4,800,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										373,245,293	373,245,293	Lanjutan		
	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD	Terpenuhinya SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD	145,732,293	145,732,293		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD
	5.02.02.2.03.02	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen LRA, LP-SAL, LAK, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen	Tersedianya Dokumen LRA, LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2020	100%	6,300,000	6,300,000		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Dokumen Neraca, LO, LPE, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen							
	5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2020	100%	78,630,000	78,630,000		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD
								Dokumen Perwal ttg Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2020	1 dokumen							
	5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan PPKD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			SKPD yang Laporan Keuangannya terkonsolidasi	45 SKPD	Tersedianya Laporan realisasi APBD TA.2020 Semester I	1 dokumen	86,123,000	86,123,000		Kepala Sub Bidang Pembiayaan	APBD
								BLUD yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD							
	5.02.02.2.03.06	penyusunan Tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen	5,775,000	5,775,000		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD
	5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Realisasi APBD TA. 2021 Semester I	1 dokumen	Tersedianya Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	8,625,000	8,625,000		Kepala Sub Bidang Pembiayaan	APBD
								Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e audit	2 kali							
								Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen							
	5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	45 SKPD	Terlaksananya Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	45 SKPD	42,060,000	42,060,000		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD
Program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	98%					2,531,524,404	2,531,524,404		Kepala Bidang Aset	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										2,531,524,404	2,531,524,404	Lanjutan		
	5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) pengadaan DAN JILID)	10837	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)	100%	49,968,500	49,968,500		Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset	APBD
	5.02.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) pemeliharaan)	7.5	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)	1005	1,500,000	1,500,000		Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset	APBD
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Cap / Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Yogyakarta	30	Terlaksananya Pengadaan Barang Daerah	100%	308,009,500	308,009,500		Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset	APBD
								Bendera Merah Putih 150 x 225	15							
								Umbul-umbul	400							
								Rontek	150							
								Buku Agenda	880							
								Kalender	11							
								Amplop kecil	40							
								Amplop besar	1							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Gambar Presiden dan Wakil Presiden	500							
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 OPD	Terlayannya dalam implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	100%	72,154,780	72,154,780		Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset	APBD
								Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 dokumen							
	5.02.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Deductible klaim asuransi	1 tahun	Tersedianya Deductible klaim asuransi	100%	1,511,279,644	1,511,279,644		Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset	APBD
								Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan	3 premi							
								Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi							
								Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	3 unit							
								Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	20 unit							
								Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	1 lokasi							
	5.02.03.2.01.08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	5 dokumen	Terlaksananya Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	100%	359,192,000	359,192,000		Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset	APBD
	5.02.03.2.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	ota Yogyakarta			Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	100%	198,684,780	198,684,780		Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset	APBD
								Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan							
								Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	2 kali							
	5.02.03.2.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	2.176	tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	1005	1,835,200	1,835,200		Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset	APBD
								Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peMINDAHTANGAN)	3500							
								Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peNGHAPUSAN)	3.5							
	5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 OPD	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 OPD	28,900,000	28,900,000		Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	100%					1,920,359,216	1,920,359,216			Kepala Bidang P3D	
Program pembukuan & penagihan pajak daerah						Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	16.000.000.000										
						Nilai pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174										
	5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										1,920,359,216	1,920,359,216	Lanjutan			
	5.02.04.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 Dokumen	213,352,000	213,352,000			Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan	APBD
								Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen								
								Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen								
								Tersedianya Studi/kajian Pajak/Retribusi	1 dokumen								
								Tersedianya Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen								
								Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain PAD yang sah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen								
	5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	1000 berkas	Tersedianya telaahan , penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	2 dokumen	18,093,000	18,093,000			Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	APBD
								Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen								
	5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Permohonan Berkas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terlayani	3.300 berkas	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.714	242,083,732	242,083,732			Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Permohonan Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2.400 berkas							
	5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyuluhan wajib pajak daerah	1400 WP	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen	152,443,770	152,443,770		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah	APBD
								Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	1000 berkas							
	5.02.04.2.02.06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaporan SPTPD Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terlayani	16.300 SPTPD	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.41 4.174	235,904,000	235,904,000		Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	APBD
								Rekonsiliasi PPJ dan PBB	12 dokumen							
	5.02.04.2.02.07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan wajib pajak	550 WP	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen	582,632,284	582,632,284		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah	APBD
								Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	12.000 SPPT							
								Penagihan Pajak Daerah	1000 Ketetapan							
	5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.41 4.714	299,735,000	299,735,000		Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah	APBD
	5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.41 4.174	2,010,000	2,010,000		Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah	APBD
	5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	48 WP	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.41 4.174	80,160,650	80,160,650		Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	48 WP							
								Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP							
	5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22.000 SPTPD	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.41 4.174	93,944,780	93,944,780		Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah	APBD
								Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	250 WP							
								Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	0 objek PBB-P2							
								Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP							
Total												42,694,612,131	42,694,612,131			

Tabel 5.50 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Bagian Kesejahteraan Rakyat

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						2.387.611.218	2.626.372.340		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											9.000.000	9.900.000	Baru		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%		1.600.000	1.760.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%		2.320.000	2.552.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
								Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%		1.600.000	1.760.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%		1.160.000	1.276.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%		2.320.000	2.552.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											1.187.811.968	1.306.593.165	Baru		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		1.178.731.968	1.296.605.165		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.960.000	2.156.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760.000	836.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760.000	836.000		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800.000	880.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.600.000	1.760.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.600.000	1.760.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800.000	880.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800.000	880.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1.190.799.250	1.309.879.175	Baru		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Surat Masuk	1000 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4.350.000	4.785.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
								Surat Keluar	500 Surat							

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Materai 6000	450 lembar								
								Materai 3000	550 lembar								
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.320.000	1.452.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2.800.000	3.080.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Alat Tulis Kantor	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23.589.650	25.948.615		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Penggandaan surat-surat/ dokumen	120.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	35.170.000	38.687.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Barang cetakan	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.594.000	3.953.400		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	388.094.000	426.903.400		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laptop: 4 buah, Printer: 4 unit, UPS: 4 unit, Pointer: 4 buah, Harddisk: 4 buah, Proyektor: 1 buah, Layar Proyektor: 1 buah; Kamera: 1 buah; Kursi ruang tamu: 1 set ; Dispenser: 4 unit; Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, Cartridge Canon	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	21.144.600	23.259.060		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.550.000	3.905.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
								Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Karpet	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						
								Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%						

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Makan Minum Rapat	22 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12.760.000	14.036.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali 6 orang	13 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	473.650.000	521.015.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Gedung Kantor Bagian kesra	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	117.400.000	129.140.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	79.927.000	87.919.700		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23.450.000	25.795.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat -> OPD di RPJMD Dinas PMPPA	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%					3.602.539.200	3.962.793.120		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%					3.602.539.200	3.962.793.120	Baru		
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	Terlaksananya Fasilitasi Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	2.474.754.000	2.722.229.400		Kepala Sub Bagian Bina Mental	APBD
								Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali					
								Fasilitasi Kegiatan Takbir ledul Fitri dan/atau ledul Adha	2 kegiatan	Terwujudnya Pendampingan Peringatan Hari Besar Keagamaan bercorak Festival	2 kegiatan					
								Hibah keagamaan kepada BAZNAS, MUI, Kemenag	10 bulan	Terlaksananya Hibah keagamaan kepada BAZNAS, MUI, Kemenag	3 lembaga					
	4.01.02.2.02.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat							468.224.000	515.046.400		Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	APBD
	4.01.02.2.02.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	Terlaksananya pendampingan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	659.561.200	725.517.320		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan		Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan					
								Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan		TermonitoringnyaPelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan					
								Koordinasi Forum Gandeng Gandong	1 laporan		Terlaksananya koordinasi Forum Gandeng Gandong	1 laporan					
								Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 laporan		Terlaksananya Dodolan Kampung	1 laporan					
						Total						5.990.150.418	6.589.165.460				

Tabel 5.51 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Keuangan

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%						2.442.345.248	2.686.579.774		Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	6.426.000	7.068.600	Baru			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD	
	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan			3.400.000	3.740.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD	
								Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen								
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD	
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen								
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			986.000	1.084.600		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD	
	X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1.760.905.259	1.936.995.785	Baru			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	17 ASN			1.748.652.259	1.923.517.485		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD	

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	17 ASN			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen			1.595.000	1.754.500		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen			1.595.000	1.754.500		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen			2.178.000	2.395.800		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			4.352.000	4.787.200		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			493.000	542.300		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum									Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	675.013.989	742.515.389	Baru	
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1439 surat			1.860.000	2.046.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
								Surat Keluar	753 surat							
								Materai	470 lembar							
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan			3.600.000	3.960.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
								Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan							

RPJMD 2017-2022	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 1 unit dan roda 2 : 3 Unit	4 unit			5.100.000	5.610.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan			92.400.000	101.640.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	57 jenis			39.883.764	43.872.141		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penggandaan surat-surat/ dokumen	200.000 lembar			40.000.000	44.000.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 jenis			1.818.750	2.000.625		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer : 3 unit, Laptop : 10 unit, LCD : 1 unit, Layar Proyektor : 1 unit, Stand Mic : 1 unit, Dispenser 1 unit, Hardisk Eksternal : 3 buah, Baterai Laptop : 3 buah, Bahan komputer/ printer : 16 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan : 13 jenis	10 jenis			176.504.475	194.154.923		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5.940.000	6.534.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar 1 jenis	12 bulan			2.400.000	2.640.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	748 os			5.423.000	5.965.300		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 4 kali 4 orang	4 kali			60.000.000	66.000.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit			162.000.000	178.200.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 1 unit dan roda 4 : 3 unit	4 unit			64.484.000	70.932.400		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
	X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, printer: 3 unit, mebelair: 3 jenis	3 jenis			13.600.000	14.960.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM										187.922.484	206.714.734		Bagian Administrasi dan Keuangan	

RPJMD 2017-2022 Program	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
						Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	4.01.04.2.04	Perencanaan Keuangan								Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan perencanaan, keuangan dan penatausahaan keuangan	100%	187.922.484	206.714.734	Baru			
	4.01.04.2.04.01	Pengelolaan Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi kebijakan perencanaan dan keuangan	1 Laporan			37.226.992	40.949.692		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD	
	4.01.04.2.04.02	Pengelolaan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen			92.775.548	102.053.103		Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Setda	APBD	
								Laporan Akuntansi Sekretariat Daerah	1 Dokumen								
								Laporan Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen								
	4.01.04.2.04.03	Penatausahaan Pelaporan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			RUP Setda	1 laporan RUP			57.919.944	63.711.939		Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Setda	APBD	
								Renja Setda	2 dokumen (renja setda; perubahan renja setda)								
								Perjanjian Kinerja Setda	2 dokumen perkin (PK setda; perubahan PK setda)								
								Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 dokumen rencana aksi dan monev RA (rencana aksi setda; monev RA tw I, monev RA tw II, monev RA tw III, monev RA tw IV)								
								Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen kinerja								
								LKIP Setda	1 dokumen LKIP								
								Review Renstra dan IKU Setda	1 dokumen renstra dan IKU setda								
Total												2.630.267.732	2.893.294.508				

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja dan Target Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	10,17
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	63,87
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	87,6
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,457
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	4,19%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	975
		Jumlah pelanggaran Perda	4.250
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,45 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,30 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,58 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	67%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,6%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,44
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	43,36
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Tabel 6.2 Indikator Kinerja dan Target Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN WAJIB				
PENDIDIKAN				
1	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY	2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY	2	
2	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	135,90%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Angka partisipasi kasar SMP	133,92%	
		Angka partisipasi murni SD	127,81%	
		Angka partisipasi murni SMP	106,35%	
		Angka partisipasi sekolah	100,00%	
KESEHATAN				
3	Derajat Kesehatan Meningkat	Cakupan Keluarga dengan indikator keluarga sehat	50%	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Ibu	4	
		Angka Kematian Bayi	6,97	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7,97	
		Prevalensi Stunting	12,2	
4	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
5	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	70,45	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
6	Luasan RTH Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	30,02%	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	83,62	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, dan Kawasan Permukiman
8	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase pengurangan sampah	18,65%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengangkutan sampah	99,32%	
KETAHANAN PANGAN				
9	Ketersediaan energi meningkat	Angka ketersediaan energi	2.500 kkal/kapita/hari	Dinas Pertanian dan Pangan
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
10	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	93,55	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, dan Kawasan Permukiman
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
11	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	90,28%	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	88,46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	98,80	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SOSIAL				
14	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	86,36	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TENAGA KERJA				
15	Angka pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	5,27%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkatkan	Persentase peningkatan upah minimum kota	6,00%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
17	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,11%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,12%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PERTANAHAN			
19	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	97,73	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	LINGKUNGAN HIDUP			
20	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	51,00 86,90	Dinas Lingkungan Hidup
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL			
21	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	98,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
22	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	402	Kemantren Danurejan
23	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	365,5	Kemantren Gedongtengen
24	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	400	Kemantren Gondokusuman
25	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	366,5	Kemantren Gondomanan
26	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	374	Kemantren Jetis
27	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	400,33	Kemantren Kotagede
28	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	346,67	Kemantren Kraton

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
29	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	371	Kemantren Mantrijeron
30	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	395	Kemantren Mergangsan
31	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389	Kemantren Ngampilan
32	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	343	Kemantren Pakualaman
33	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	363	Kemantren Tegalrejo
34	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	381	Kemantren Umbulharjo
35	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	373	Kemantren Wirobrajan
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
36	Jumlah Penduduk Terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PERHUBUNGAN			
37	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level of Service</i>)	0,798	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
38	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	75,84	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
39	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Nilai omset koperasi tahun n	403.950.000.000	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
40	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkatkan	Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	4.969.866.917	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
	PENANAMAN MODAL			
41	Nilai Investasi meningkat	Nilai investasi	308.015.205.801	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
42	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	94,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	STATISTIK			
43	Layanan Informasi Publik Meningkatkan	Indeks Layanan Informasi Publik	75,84	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
	PERSANDIAN			
44	Keamanan Informasi meningkat	Indeks pengamanan informasi	88,00	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
	KEBUDAYAAN			
45	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	67%	Dinas Kebudayaan
	PERPUSTAKAAN			
46	Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat	Jumlah kunjungan pemustaka	335.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
47	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Indeks tata kelola arsip daerah	98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	KEARSIPAN			
48	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Indeks tata kelola arsip daerah	98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PILIHAN			
	PARIWISATA			
49	Rata-Rata Belanja Wisatawan Meningkatkan	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rp 1.100.000,-	Dinas Pariwisata

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
50	Lama tinggal wisatawan meningkat	<i>Length of Stay (LoS)</i>	1,5 hari	Dinas Pariwisata
	PERTANIAN			
51	Ketersediaan energi meningkat	Angka ketersediaan energi	2.500 kkal/kapita/hari	Dinas Pertanian dan Pangan
	PERDAGANGAN			
52	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Indeks kinerja perdagangan	44,86	Dinas Perdagangan
	PERINDUSTRIAN			
53	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	4.969.866.917	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
54	Kinerja sektor industri meningkat	Nilai Omset IKM tahun n	124.377.964	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
	TRANSMIGRASI			
55	Angka pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	5,27%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	URUSAN PENUNJANG			
	PERENCANAAN			
56	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	KEUANGAN			
57	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93,72	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
58	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Nilai Pendapatan Asli Daerah	318.587.404.409	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
59	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Indeks kualitas aparatur sipil negara	75,7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
60	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
62	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	80%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	INSPEKTORAT			
63	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,40	Inspektorat Daerah
	SEKRETARIAT DAERAH			
64	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	30,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
65	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
66	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	64,62	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah)
67	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,20	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
68	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,75	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi dan Keuangan)
69	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkatkan	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	77	Sekretariat DPRD

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Walikota dan penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2021, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HARYADI SUYUTI

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
 DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Budi Santosa Asrori, SE., M.Si.
 Jabatan : Kepala Dinas
 Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

2. Nama : Budi Santosa Asrori, SE., M.Si.
 Jabatan : plt. Kepala Dinas
 Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)				
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Persentase SD terakreditasi A	90.91%
				Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional	8 medali		Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional	8 medali
				Persentase SMP akreditasi A	75.00%	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Persentase SMP akreditasi A	75.00%

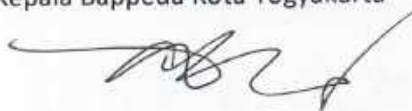
PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	5 medali		Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	5 medali
						PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PAUD	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	90.20%
							Persentase Kelulusan UNPK Paket B	90.50%
							Persentase Kelulusan UASDA Paket A	91.50%
				Persentase Kelulusan warga belajar	90.50%			
				Jumlah LKP terakreditasi	13 lbg		Jumlah LKP terakreditasi	13 lbg
				Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lbg		Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lbg
				Jumlah sekolah inklusi	79 Sekolah	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Jumlah sekolah inklusi	79 Sekolah
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru sesuai kualifikasi	99.70%	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Persentase guru sesuai kualifikasi	94.01%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	92%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	92%
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66.30 %			

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	PROGRAM PENGEMBANGAN OLAHRAGA	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	97%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta



Budi Santosa Asrori, SE., M.Si.
NIP. 197009151994031009

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta



Budi Santosa Asrori, SE., M.Si.
NIP. 197009151994031009

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Mardoyo, SKM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	80.50	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	80.50
				Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	75	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	75
				Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	84.62%	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	84.62%
				Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	100%		Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	100%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%		Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%
				Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%
				Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100%		Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100%
				Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	88%	PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	88%
				Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%
				Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%		Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%
				Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%		Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%
				Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%		Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
				Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100%		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100%
				Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%		Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%		Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%
				Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	89.90%	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	89.90%
				Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96,30%		Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96,30%
				Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	100%		Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	100%
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	90%	PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	90%
				Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	80%		Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	80%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	96%	PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	96%
				Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98%		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98%
				Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95.00%		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95.00%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	66.70%	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	66.70%
				Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	466		Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	444

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta



Tri Mardoyo, SKM
NIP. 196403231988031011

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Ariyudi Yunita, MMR
 Jabatan : Direktur
 Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	81%	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	81%
				Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (<i>Integrated Health System</i>)	24		Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (<i>Integrated Health System</i>)	24
				Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun	12%		Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun	50%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Yogyakarta



dr. Ariyudi Yunita, MMR
NIP. 196706262002122003

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Hari Setyowacono, MT

Jabatan : Kepala Dinas

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	91,57%	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	84.74%
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	86.21%	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	86.21%
				Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	30%			
				Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,10%			

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	87.58%	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	87.83%
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	96.70%	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	96.70%
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	90%	PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	90%
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	89%	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	90%
				Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	51,04%		Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	60%
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase tenaga kerja trampil	67,47%			
				Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	12%			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	90%			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	71,57%			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta



Ir. Hafi Setyowacano, MT
NIP. 196401261993031005

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala sarta Tata Sasana) Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	78.64%	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	86.50%
				Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	62.25%	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	68.00%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase penerbitan Izin Lokasi	100%			

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	100%			
3	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	96.70%	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	98.45%
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	98.26%	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	98.96%
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan	93.33%			
				Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	75%			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Yogyakarta



Menyatakan/Menetapkan:

Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta
Asisten Umum



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Agus Winarto

Jabatan : Ka. Satuan Polisi Pamong Praja

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	99%	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	95%
				Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	90,12%	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	90%
				Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	92,74%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	95%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	75%	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	82.35%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Harsono, ST, MT
NIP. 197203061996031004



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala SATPOL PP Kota Yogyakarta

Drs. Agus Winarto
NIP. 197303181992031004



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Nur Hidayat, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas

Perangkat Daerah : Dinas Kebakaran

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	05	04	PROGRAM KEBAKARAN	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	99%	PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	99%
				Persentase edukasi proteksi kebakaran	97%		Persentase edukasi proteksi kebakaran	97%
				Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100%			
				Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100%			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta



Drs. Nur Hidayat, M.Si.
NIP. 197111191992031004



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Wahyudi, S.E.

Jabatan : Kepala Pelaksana

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)				
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kampung tangguh bencana	76.92%	PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Persentase kampung tangguh bencana	79.41%
				Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%		Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	88%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	100%		Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	88%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:

Kepala Bappda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:

Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta



Nar Wahyudi, S.E.
NIP. 196502061992031009

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Agus Sudrajat, SKM, M.Kes.
Jabatan : Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Sosial

2. Nama : Ir. Riyanto
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	88%	PROGRAM DATA, INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	89%
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	84%	PROGRAM ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	85%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	85%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	85%
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100%			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100%			
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100%			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	99.24%			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91%			

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	68.00%	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan tenaga kerja	68.00%
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37.06%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37.31%
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100.00%	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100.00%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020


Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta


Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta


Agus Sudrajat, SKM, M.Kes.
NIP. 196505301988031006

Menyatakan/Menetapkan:
Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta


Ir. Riyanto
NIP. 196308121993121001

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Edy Muhammad
Jabatan : Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Nama : drg. Emma Rahmi Aryani, MM
Jabatan : Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	80.39%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	80.39%
				Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	72%		Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	72%

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	83%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	82%
	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif	67,47%			
				Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	4%			
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah	49%			
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	95%	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	88.8%
				Persentase Puskesmas Ramah Anak	100%		Persentase Puskesmas Ramah Anak	90%
				Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	90%		Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	86%
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Cakupan ketersediaan data bangga kencana	100.00%			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11.16%	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11.16%
				CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.94%		CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.94%
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	32.54%	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	32.54%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

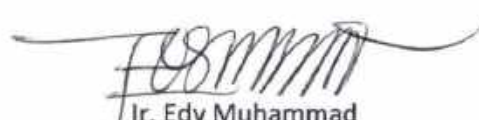
Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



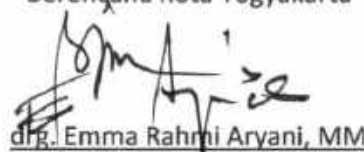
Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Yogyakarta



Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Yogyakarta



dr. Emma Rahmi Aryani, MM
NIP. 196606091993032004

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sugeng Darmanto

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi.	26.45%			
				Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari.	17.50%			
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan.	100%	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN PANGAN	Kelurahan dengan kerawanan pangan	0 kelurahan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	91,25%	PROGRAM PEMBINAAN PERTANIAN	Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya	91%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan.	22,06%			
3	25	04	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan.	46,67%	PROGRAM PEMBINAAN KEHEWANAN DAN PERIKANAN	Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya	98%
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan	3.42%	PROGRAM PEMBINAAN PERTANIAN		
		03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.	100%			
		04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan Perikanan yang aman dikonsumsi.	95,08%	PROGRAM PEMBINAAN KEHEWANAN DAN PERIKANAN	Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya	98%
				Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	80%		Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	100%
		06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan.	100%			

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
		07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama	8 kelompok	PROGRAM PEMBINAAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama	8 kelompok

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/ Menetapkan:
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



Drs. Sugeng Darmanto
NIP. 196501211992031005

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Suyana

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)				
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2	11	03	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi	31.11%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi	28.89%
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	72.31	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	72.31
				Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42.90%		Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42.90%
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	74.15%	PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	74.15%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
			LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase usaha yang telah memiliki izin PPLH	13.70%		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13.70%
				Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	42.37%		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	38.45%
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	96.27%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	96.27%
				Persentase Kampung berwawasan lingkungan	52.94%		Persentase Kampung berwawasan lingkungan	88.24%
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	74.61	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	74.61
				Persentase sampah yang dikelola secara 3R	16%		Persentase sampah yang dikelola secara 3R	16%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Ir. Suyana
NIP. 196309101990031008



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Christina Lucy Irawati
 Jabatan : Kepala Dinas
 Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99.75%	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99.75%
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	97.50%	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	97.50%
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	94.74%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	Persentase pemanfaatan data kependudukan	90%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta



Dra. Christina Lucy Irawati
NIP. 196104221986032004

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Erna Nur Setyaningsih

Jabatan : Plt. Camat Tegalrejo

Perangkat Daerah : Kecamatan Tegalrejo

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2021.


HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)				
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survey kepuasan masyarakat	81	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO	Nilai survey kepuasan masyarakat	81
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	2,567,841,000		Angka Swadaya Murni	2,567,841,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	152 kali			


Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui :
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta


Agus Tri Haryono, ST, MT

Menyatakan/Menetapkan:
Plt Camat Tegalrejo


Dra. Erna Nur Setyaningsih

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS.SUMARGANDI,MSI

Jabatan : CAMAT JETIS

Perangkat Daerah : KECAMATAN JETIS

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Jetis Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	87	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN JETIS	Nilai survei kepuasan masyarakat	87
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	114,211,900		Angka Swadaya Murni	114,211,900
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	5			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004



Menetapkan:
CAMAT JETIS

DRS.SUMARGANDI,MSI
NIP. 196903121989031005

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GURITNO, AP
 Jabatan : Camat Gondokusuman
 Perangkat Daerah : Kecamatan Gondokusuman

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2021.

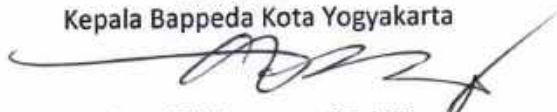
HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81.5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	Nilai survei kepuasan masyarakat	81.5
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	4,831,000,000		Angka Swadaya Murni	4,831,000,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	300			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Gondokusuman



Guritno, AP
NIP. 197507101995011002

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si

Jabatan : Camat Danurejan

Perangkat Daerah : Kecamatan Danurejan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	82	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN DANUREJAN	Nilai survei kepuasan masyarakat	82
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1.037.956.600		Angka Swadaya Murni	1.037.956.600
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *	Jumlah Pelanggaran Perda	50			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST, MT
Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Danurejan



Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si
Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si
NIP. 19690802198903 1 003

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taokhid S.IP., M.Si

Jabatan : Camat Gedongtengen

Perangkat Daerah : Kecamatan Gedongtengen

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2021.

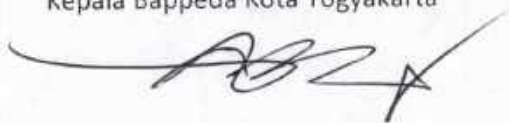
HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	83,5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GEDONGTENGEN	Nilai survei kepuasan masyarakat	83,5
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	705,184,000		Angka Swadaya Murni	705,184,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	275			

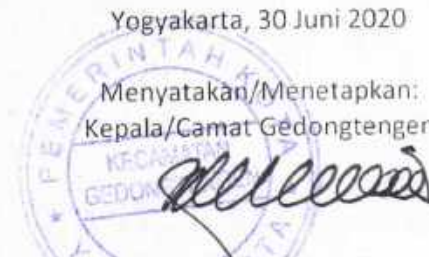
Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala/Camat Gedongtengen



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahya Wijayanta, S.Sos

Jabatan : Camat Pakualaman

Perangkat Daerah : Kecamatan Pakualaman

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2021.


HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81.59	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN PAKUALAMAN	Nilai survei kepuasan masyarakat	81.59
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	632,535,000		Angka Swadaya Murni	632,535,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *	Jumlah Pelanggaran Perda	96 kali			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta


Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Pakualaman


Cahya Wijayanta, S.Sos
NIP. 197011191996031003

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Tur Arya Warih
Jabatan : Camat Ngampilan
Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampilan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2021.


HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)				
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	84.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN NGAMPILAN	Nilai survei kepuasan masyarakat	84.15
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	665,460,000		Angka Swadaya Murni	665,460,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	72 kali			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta


Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:


Camat Ngampilan
Drs. Tur Arya Warih
NIP. 196509171986021004

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ananto Wibowo

Jabatan : Camat Wirobrajan

Perangkat Daerah : Kecamatan Wirobrajan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)				
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	82,99	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN WIROBRAJAN	Nilai survei kepuasan masyarakat	82,99
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	933,300,000		Angka Swadaya Murni	933,300,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	120 kali			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Wirobrajan



Drs. Ananto Wibowo
NIP. 197305241992031 003

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBARJILAN, SIP, M.Si.

Jabatan : Camat

Perangkat Daerah : Kemantren Mantrijeron

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,57	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MANTRIJERON	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,57
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	565,000,000		Angka Swadaya Murni	565,000,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	36 kali			


Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta


Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Mantrijeron


SUBARJILAN, SIP, M.Si.
NIP. 197207111992031006

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs.S.WIDODO MUJIYATNA

Jabatan : Camat Kraton

Perangkat Daerah : Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survey kepuasan masyarakat	77,19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KRATON	Nilai survey kepuasan masyarakat	77,19
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	429.601.667		Angka Swadaya Murni	429.601.667
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	100 kali			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST, MT

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Kraton Kota Yogyakarta.

Drs.S.Widodo Mujiyatna

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI SANTOSA, S.STP. M.Si

Jabatan : CAMAT GONDONANAN

Perangkat Daerah : KECAMATAN GONDONANAN

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2021.

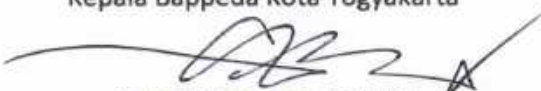
HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	87.9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDONANAN	Nilai survei kepuasan masyarakat	87.9
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	469,200,000		Angka Swadaya Murni	469,200,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	160			

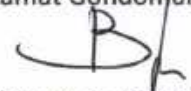
Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta


Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Gondomanan


Budi Santosa, S.STP, M.Si
NIP. 197209141993031004

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Rahmawati, SIP., MIP

Jabatan : Camat Mergangsan

Perangkat Daerah : Kecamatan Mergangsan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	84	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MERGANGSAN	Nilai survei kepuasan masyarakat	84
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1.000.500.000		Angka Swadaya Murni	1.000.500.000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	100 kali			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST, MT
Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Mergangsan

Rini Rahmawati, SIP., MIP
Rini Rahmawati, SIP., MIP
NIP. 19670213 199603 2 001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN UMBULHARJO

Jl. Glagahsari No. 99 Yogyakarta Kode Pos 55164 Telp (0274) 375782 Fax (0274) 375782
E – Mail : uh@jogjakota.go.id ; HOTLINE SMS : 08122780001 ; HOTLINE TELP: (0274) 555242
HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id ; WEB SITE : www.jogjakota.go.id

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. RUMPIS TRIMINTARTA
Jabatan : Camat
Perangkat Daerah : Kecamatan Umbulharjo

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81.5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO	Nilai survei kepuasan masyarakat	81.5
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1,230,243,000		Angka Swadaya Murni	1,230,243,000

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN
KECAMATAN UMBULHARJO

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	144 kali		

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

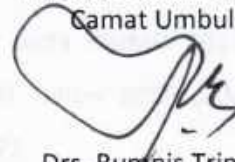
Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Camat Umbulharjo



Drs. Rumpis Trimintarta
NIP. 196405011986021005

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajwan Taufiq, SIP.,MSi.

Jabatan : Camat Kotagede

Perangkat Daerah : Kecamatan Kotagede

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	89.90	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KOTAGEDE	Nilai survei kepuasan masyarakat	89.90
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	2,940,000,000		Angka Swadaya Murni	2,940,000,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	24			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:

Camat Kotagede
KECAMATAN KOTAGEDE
Rajwan Taufiq, SIP.,MSi.
NIP. 197303021992031004

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Arif Nugroho, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	24 km/jam	PROGRAM PENGELOLAAN LALU LINTAS	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	24 km/jam
				Jumlah pelanggaran	480	PROGRAM ANGKUTAN JALAN , PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KESELAMATAN LALU LINTAS	Jumlah pelanggaran	480
				Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	91.00%		Persentase angkutan umum yang laik jalan	91.00%
				Persentase juru parkir yang tertib	97.32%	PROGRAM PENGELOLAAN PERPARKIRAN	Persentase juru parkir yang tertib	97%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	92%		Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	89%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
 Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST, MT
 NIP. 197203061996031004



Yogyakarta, 30 Juni 2020
 Menyatakan/Menetapkan:
 Kepala Dinas Perhubungan

Agus Arif Nugroho, S.STP, M.Si
 NIP. 197709071996031001



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignatius Trihastono, S.Sos. MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	96.50%	PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	96.50%
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	40.93%	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	61.93%
				Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	80.89%		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	80.89%
				Presentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	100.00%			

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
				Prosentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	85%			
				Prosentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN STATISTIK	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan informasi	100%	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERSANDIAN	Persentase pengamanan informasi	100%
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	60%		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	57%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Persandian



Agus Tri Hastono, S.Sos. MM
NIP. 196907231996031005



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Yunianto Dwisutono
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2. Nama : Ir. Riyanto
 Jabatan : PLT Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)				
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	102	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	Nilai aset koperasi	Rp598,303,653,152
							Nilai Omset Koperasi	Rp401,662,088,821
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	102			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	465			
2	17	06	PROGRAM	Jumlah	10 unit			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Drs. Yuniarto Dwisutono
NIP. 196606281986021002

Menyatakan/Menetapkan:
PLT Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Ir. RIYANTO
NIP. 19630812 199312 1 001

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Nurwidihartana

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019			RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)					
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	87.66%	PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	87.50%
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	85%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	50%
				Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	100%	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	100%
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi kegiatan penanaman modal	100%			

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	92%			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Kadri Renggono, M.Si

Jabatan : Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Plt. Kepala Dinas Kebudayaan

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	60 %	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN TRADISI	Persentase Pelestarian seni tradisi berbasis Kelurahan	60 %
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	4.71			
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	15 dokumen	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH DAN BAHASA	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	15 dokumen

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	35.71 %	PROGRAM PELESTARIAN WARISAN DAN NILAI BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	35.71 %
				Persentase BCB yang dilestarikan	52 %			
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Museum	29 %			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Menyatakan/Menetapkan:
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Asisten Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Drs. Kadri Renggono, M.Si
NIP. 196611271993031006

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Hendratmoko, SE., MM.

Jabatan : Kepala Dinas

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	250	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	250
				Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	77		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	77
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1.200	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI PUSTAKA DAN DATA INFORMASI PERPUSTAKAAN	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1.200
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	140 perangkat daerah /unit kerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	140 perangkat daerah /unit kerja

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	840	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENYELAMATAN, DATA DAN INFORMASI ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	840

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta



Wahyu Hendratmoko, SE., MM.
NIP. 1974110219938031004

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. ZENNI

Jabatan : Kepala Kantor

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
8			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8	01	02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	75	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	84%
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	81			
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	22			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	75			

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	65			
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	70			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta



NIP. 196505201993031006

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Maryustion Tonang, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	50,00%	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN WISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	50,00%
				Jumlah Pengunjung Taman Pintar	600.000	PROGRAM PENGEMBANGAN TAMAN PINTAR	Jumlah Pengunjung Taman Pintar	600.000
				Indeks kualitas atraksi pariwisata	86,36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ATRAKSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks kualitas atraksi pariwisata	86,36
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.200.000			
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	37,08%	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ATRAKSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	37,08%
				Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi	66,87%			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Pariwisata

Drs. Maryustion Tonang, MM.
NIP. 196606141994031006

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Yunianto Dwisutono

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20%			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	23,3%	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN PASAR	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	23,3%
				Pendapatan retribusi pasar	12.944.027.200	PROGRAM PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAPATAN PASAR	Pendapatan retribusi pasar	12.944.027.200
				Pendapatan UPT Pusat Bisnis	4.665.838.520	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT BISNIS	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	4.665.838.520
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100%		Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam	100%

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	92,76%			
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dibina	8,00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN	Persentase peningkatan omset Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dibina	8,00%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Drs. Yulianto Dwisutono
NIP. 196606281986021002

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Tri Haryono, ST, MT.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
5	01		PERENCANAAN					
5	01	04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	92,20%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91,80%
5	01	05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	92,20%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG FISIK	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91,80%
5	01	03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	92,20%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91,80%
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	92,20%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	91,80%
				Prosentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	100%			

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	88	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	88

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Octo Noor Arafat, SIP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian

Perangkat Daerah : Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83%	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83%
				Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrudin Alwi Effendi, S.H.M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum

Perangkat Daerah : Bagian Hukum

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bagian Hukum Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAYANAN HUKUM	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Badan Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, S.T.M.T.
NIP 197203061996031004

Menyatakan/ Menetapkan:
Kepala Bagian Hukum

Syahrudin Alwi Effendi, S.H.M.Si.
NIP 196404221997011001

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Veronica Ambar Ismuwardani, S.IP.
Jabatan : Kepala Bagian
Perangkat Daerah : Bagian Umum

2. Nama : Dra. Emiliana Yulianti
Jabatan : Kepala Bagian
Perangkat Daerah : Bagian Protokol

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bagian Umum dan Protokol Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH, DAN KERUMAHTANGGAAN	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	80,0
4	01	04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI DAN KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Badan Perencanaan
Kebudayaan dan Pembangunan
Kota Yogyakarta



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Bagian Umum



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Bagian Protokol



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Roro Andarini, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

Perangkat Daerah : Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan Kerja sama Daerah Tahun 2021.

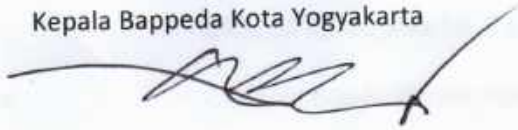
HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	80%			
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	Persentase ketercapaian target PAD	100%
				Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%			
				Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74,64%			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta



Raden Roro Anggrani, S.E, M.Si.
NIP. 197203171997032004

8

No	Nama	Jabatan	Tempat	Alamat	Telepon	Alamat
1	Agus Tri Haryono	Kepala Bappeda Kota Yogyakarta	Yogyakarta	Jl.
2	Raden Roro Anggrani	Kepala Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta	Yogyakarta	Jl.
3
4

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Wahyu Handoyo Hardjono Putro, S.T.,M.A.,MTP.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

Perangkat Daerah : Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE BIDANG URUSAN	PROGRAM	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,1%	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	95,0%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:

Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian
Pembangunan Setda Kota Yogyakarta



R. Wahyu Handoyo Hardjono Putro, S.T.,M.A.,MTP.
NIP. 197204111998031007

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarwanto , SIP,MM

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Bagian Organisasi

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bagian Organisasi Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta





Agus Tri Harjeno, ST, MT
NIP.197203061996031004



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Bagian Organisasi
Setda Kota Yk

Sarwanto, SIP,MM
NIP.197201311998031009

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022 DENGAN NOMENKLATUR
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sukadarisman, M.Si
 Jabatan : Ka. Bag. Layanan Pengadaan
 Perangkat Daerah : Bagian Layanan Pengadaan

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)					
URUSAN	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
4	01			SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85%	PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	80%
					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85%		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	80%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
 Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

 Agus Tri Hartono, ST, MT
 NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
 Kepala Bagian Layanan Pengadaan

 Drs. Sukadarisman, M.Si
 NIP. 196409101992031005



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022 DENGAN NOMENKLATUR
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BASUKI HARI SAKSONO, SH.
 Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta
 Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019				RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)				
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	0	2	SEKRETARIAT DPRD					
4	0	0	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100%			
4	0	0	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%	PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%
				Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%	PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Agus Tri Haryono, ST, MT
 NIP. 197203061996031004



Menyatakan/ Menetapkan:
 Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta
 Basuki Hari Saksiono, SH.
 NIP. 19641111199003 1 013



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022 DENGAN NOMENKLATUR
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Maryoto, MM

Jabatan : Inspektur Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Inspektorat

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	91%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	91%
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset	91%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	91%
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana	91%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN FISIK	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di Bidang Pembangunan Fisik	91%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI BUDAYA	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	91%
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	89%	PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	89%
				Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 5 elemen penilaian)

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta


Agus Tri Haryono ST, MT
NIP. 197203061996031004



Yogyakarta, 30 Juni 2020

Menyatakan/Menetapkan:
Inspektur Kota Yogyakarta


Drs. Maryoto, MM
NIP. 19610801 198503 1010



**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Kris Sarjono Sutejo, MM.
Jabatan : Kepala
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
5	03		KEPEGAWAIAN					
5	03	02	KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	66%	PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	66%
				Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	95%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	95%
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5	04	02	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94%	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala BKPP Kota Yogyakarta

Drs. Kris Sarjono Sutejo, MM.
NIP. 196306181992031001

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WASESA, SH.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

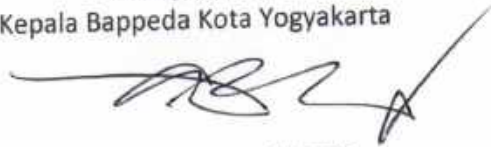
PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
5	02		KEUANGAN					
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%
				Persentase penyerapan belanja daerah	88,20%	PROGRAM PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER	Persentase penyerapan belanja daerah	88,20%
				Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95%	PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95%
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	98%	PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN INVENTARISASI ASET	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	98%

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
URUSAN	KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	100%	PROGRAM PELAYANAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	Persentase Ketercapaian Target Pajak Daerah	100%
				Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	16.000.000.000	PROGRAM PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH	Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	16.000.000.000
				Nilai pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174			

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui :
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan :
Kepala BPKAD



Wasesa, SH.

NIP. 19640506 199303 1 009

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022 DENGAN NOMENKLATUR
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Edy Muhammad
Jabatan : Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak

2. Nama : Octo Noor Arafat, S.IP, M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian
Perangkat Daerah : Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019						RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)		
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%
				Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%		Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



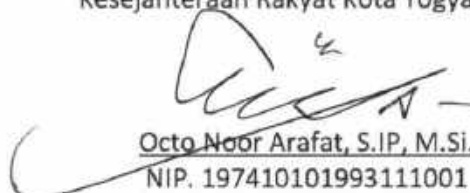
Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Yogyakarta



Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta



Octo Noor Arafat, S.IP, M.Si.
NIP. 197410101993111001

**BERITA ACARA HASIL PEMETAAN (MAPPING) RPJMD 2017-2022
DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Saya yang bertandatangan di bawahini:

1. Nama : R. WAHYU HANDOYO HARDJONO PUTRO, S.T.,M.A.,MTP.
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
Perangkat Daerah : Bagian Administrasi Pembangunan

2. Nama : VERONICA AMBAR ISMUWARDANI,S.IP.
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Perangkat Daerah : Bagian Umum

Menyatakan telah selesai melakukan pemetaan atas program pada RPJMD 2017-2022 menggunakan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah substansi indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bagian Administrasi dan Keuangan Tahun 2021.

HASIL PEMETAAN

PERMENDAGRI 90/2019					RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA TERAKHIR)			
KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	03	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai>80 s.d 90)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	95%
						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH, DAN KERUMAHTANGGAAN	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	80,0

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Bagian Administrasi
dan Pengendalian Pembangunan



Menyatakan/Menetapkan:
Kepala Bagian Umum



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



SEGORO AMARTO

KEDISIPLINAN
KEPEDULIAN SOSIAL
GOTONG ROYONG
KEMANDIRIAN

